



Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2023

JUNI 2022



foto : @darisarch

RKPD 2023



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 35 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan kerja Pemerintah Daerah tahun 2023, Gubernur perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah sesuai ketentuan Pasal 104 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- b. bahwa berdasarkan perimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 241, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2023.

Pasal 1

- (1) Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 berfungsi sebagai dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun, yaitu tahun 2023 yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023.
- (2) Sistematika Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. BAB I PENDAHULUAN
 - b. BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
 - c. BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH
 - d. BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
 - e. BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH
 - f. BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
 - g. BAB VII PENUTUP
- (3) Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 2

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 menjadi pedoman bagi Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dalam menyusun:

- a. rancangan akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2023; dan
- b. Rancangan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara tahun 2023.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Agustus 2022

**GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,**

ttd

ANIES RASYID BASWEDAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 10 Agustus 2022

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,**

ttd

MARULLAH MATALI

**BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2022 NOMOR 51015**

Sainan sesuai dengan aslinya
**KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**



**YAYAN YUHANA
NIP196508241994032003**

LAMPIRAN

PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 35 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2023



Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2023

JUNI 2022



RKPD
2023

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI		i
DAFTAR TABEL		ii
DAFTAR GAMBAR		viii
BAB I	Pendahuluan	I-2
	1.1 Latar Belakang	I-3
	1.2 Dasar Hukum Penyusunan	I-4
	1.3 Hubungan Antar Dokumen	I-5
	1.4 Maksud dan Tujuan	I-6
	1.5 Sistematika Dokumen	I-7
BAB II	Gambaran Umum Daerah	II-1
	2.1 Kondisi Umum Daerah	II-2
	2.2 Evaluasi Capaian Program RKPD Tahun 2021	II-57
BAB III	Kerangka Ekonomi dan Keuangan	III-1
	3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	III-2
BAB IV	Sasaran dan Prioritas Pembangunan	IV-1
	4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah	IV-2
	4.2 Strategi, Arah Kebijakan dan Program Prioritas	IV-18
BAB V	Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah	V-1
	5.1 Aspirasi Masyarakat Melalui Musrenbang	V-4
	5.2 Penelaahan Hasil Reses	V-6
	5.3 Penelaahan Usulan Langsung Masyarakat	V-10
	5.4 Sinkronisasi Prioritas Nasional dan Prioritas Daerah	V-21
	5.5 Rencana Kerja Perangkat Daerah	V-23
BAB VI	Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	VI-1
	6.1 Indikator Kinerja Utama	VI-2
	6.2 Indikator Kinerja Daerah terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	VI-2
BAB VII	Penutup	VII-1
LAMPIRAN		

DAFTAR TABEL

TABEL 2.1	Pembagian Wilayah Provinsi DKI Jakarta	II-4
TABEL 2.2	Panjang dan Luas Sungai/Kanal di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021	II-9
TABEL 2.3	Provinsi DKI Jakarta Tahun 2019-2021	II-9
TABEL 2.4	Perkembangan Jumlah Penduduk Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2021	II-15
TABEL 2.5	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi DKI Jakarta 2016-2021	II-24
TABEL 2.6	Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja menurut Jenis Kegiatan Utama dan Kabupaten/Kota, 2021	II-26
TABEL 2.7	Indikator Jumlah Pelanggaran Perda/Perkada yang Terjadi dan Ditangani Tahun 2018-2020	II-42
TABEL 2.8	Rasio Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2021	II-43
TABEL 2.9	Perkembangan Penduduk Miskin di Provinsi DKI Jakarta 2019-2021	II-47
TABEL 2.10	Rasio Ekspor dan Impor terhadap PDRB di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2015-2020	II-50
TABEL 2.11	Capaian Kinerja dan Serapan Anggaran Program Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Triwulan IV Tahun 2021 pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	II-58
TABEL 2.12	Capaian Kinerja dan Serapan Anggaran Program Urusan Pemerintahan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral Triwulan IV Tahun 2021	II-64
TABEL 2.13	Capaian Kinerja dan Serapan Anggaran Program Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja Triwulan IV Tahun 2021 Pada Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi	II-67
TABEL 2.14	Capaian Kinerja dan Serapan Anggaran Program Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan Triwulan IV Tahun 2021 pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	II-70

TABEL 2.15	Capaian Kinerja dan Serapan Anggaran Program Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan Triwulan IV Tahun 2021 pada Dinas Kebudayaan	II-72
TABEL 2.16	Capaian Kinerja dan Serapan Anggaran Program Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan Triwulan IV Tahun 2021 pada Dinas Pertamanan dan Hutan Kota	II-75
TABEL 2.17	Capaian Kinerja dan Serapan Anggaran Program Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan Triwulan IV Tahun 2021 pada Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian	II-77
TABEL 2.18	Capaian Kinerja dan Serapan Anggaran Program Unsur Kepegawaian Triwulan IV Tahun 2021 pada Badan Kepegawaian Daerah	II-80
TABEL 2.19	Capaian Kinerja dan Serapan Anggaran Program Unsur Pendidikan dan Pelatihan Triwulan IV Tahun 2021 pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	II-84
TABEL 2.20	Capaian Kinerja dan Serapan Anggaran Program Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga Triwulan IV Tahun 2021 pada Dinas Pemuda dan Olahraga	II-88
TABEL 2.21	Capaian Kinerja dan Serapan Anggaran Program Kesatuan Bangsa dan Politik Triwulan IV Tahun 2021	II-92
TABEL 2.22	Capaian Kinerja dan Serapan Anggaran Program Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Triwulan IV Tahun 2021 pada Dinas Kesehatan	II-99
TABEL 2.23	Capaian Kinerja dan Serapan Anggaran Program Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Triwulan IV Tahun 2021	III-104
TABEL 2.24	Capaian Kinerja dan Serapan Anggaran Program Unsur Keuangan Triwulan IV Tahun 2021	II-112
TABEL 2.25	Capaian Kinerja dan Serapan Anggaran Program Kota Administrasi Triwulan IV Tahun 2021	II-117
TABEL 2.26	Capaian Kinerja dan Serapan Anggaran Program Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika Triwulan IV Tahun 2021 pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	II-133
TABEL 2.27	Capaian Kinerja dan Serapan Anggaran Program Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil	II-136

	dan Menengah Triwulan IV Tahun 2021 pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
TABEL 2.28	Capaian Kinerja dan Serapan Anggaran Program Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Triwulan IV Tahun 2021	II-138
TABEL 2.29	Capaian Kinerja dan Serapan Anggaran Program Urusan Pemerintahan Bidang Pangan Triwulan IV Tahun 2021 pada Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian	II-142
TABEL 2.30	Capaian Kinerja dan Serapan Anggaran Program Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata Triwulan IV Tahun 2021 pada Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	II-144
TABEL 2.31	Capaian Kinerja dan Serapan Anggaran Program Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	II-148
TABEL 2.32	Capaian Kinerja dan Serapan Anggaran Program Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Triwulan IV Tahun 2021 pada Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk	II-155
TABEL 2.33	Capaian Kinerja dan Serapan Anggaran Program Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Triwulan IV Tahun 2021 pada Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk	II-157
TABEL 2.34	Capaian Kinerja dan Serapan Anggaran Program Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal Triwulan IV Tahun 2021 pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	II-160
TABEL 2.35	Capaian Kinerja dan Serapan Anggaran Program Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Triwulan IV Tahun 2021	II-165
TABEL 2.36	Capaian Kinerja dan Serapan Anggaran Program Unsur Penelitian dan Pengembangan Triwulan IV Tahun 2021 pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	II-171
TABEL 2.37	Capaian Kinerja dan Serapan Anggaran Program Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian	II-174

	Penduduk dan Keluarga Berencana Triwulan IV Tahun 2021 pada Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk	
TABEL 2.38	Capaian Kinerja dan Serapan Anggaran Program Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan Triwulan IV Tahun 2021 pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	II-177
TABEL 2.39	Capaian Kinerja dan Serapan Anggaran Program Unsur Perencanaan Triwulan IV Tahun 2021	II-180
TABEL 2.40	Capaian Kinerja dan Serapan Anggaran Program Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan Triwulan IV Tahun 2021 pada Dinas Perhubungan	II-185
TABEL 2.41	Capaian Kinerja dan Serapan Anggaran Program Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian Triwulan IV Tahun 2021 pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	II-190
TABEL 2.42	Capaian Kinerja dan Serapan Anggaran Program Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan Triwulan IV Tahun 2021 pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	II-193
TABEL 2.43	Capaian Kinerja dan Serapan Anggaran Program Urusan Pemerintahan Bidang Persandian Triwulan IV Tahun 2021 pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	II-195
TABEL 2.44	Capaian Kinerja dan Serapan Anggaran Program Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian Triwulan IV Tahun 2021 pada Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian	II-198
TABEL 2.45	Capaian Kinerja dan Serapan Anggaran Program Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Triwulan IV Tahun 2021 pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	II-202
TABEL 2.46	Capaian Kinerja dan Serapan Anggaran Program Urusan Pemerintahan Bidang Sosial Triwulan IV Tahun 2021 pada Dinas Sosial	II-205
TABEL 2.47	Capaian Kinerja dan Serapan Anggaran Program Urusan Pemerintahan Bidang Statistik Triwulan IV Tahun 2021 pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	II-208

TABEL 3.1	Pemulihan Ekonomi Global	III-3
TABEL 3.2.a	Komponen Pertumbuhan Ekonomi Sisi Pengeluaran (% yoy)	III-5
TABEL 3.2.b	Komponen Pertumbuhan EKonomi Sisi Lapangan Usaha	III-5
TABEL 3.3	Realisasi dan Proyeksi Ekonomi Makro Nasional	III-6
TABEL 3.4	Perkembangan PDRB Provinsi DKI Jakarta dari Sisi Permintaan (% yoy)	III-7
TABEL 3.5	Perkembangan PDRB Provinsi DKI Jakarta Dari Sisi Lapangan Usaha	III-7
TABEL 3.6	Faktor Risiko Perekonomian Jakarta	III-10
TABEL 3.7	Realisasi dan Proyeksi Ekonomi Makro DKI Jakarta	III-11
TABEL 3.8	Rencana Ringkasan APBD dalam RKPD Tahun 2023	III-12
TABEL 3.9	Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2019 s.d Tahun 2023 (dalam Miliar Rupiah)	III-18
TABEL 3.10	Realisasi dan Proyeksi/Target Belanja Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2019 s.d Tahun 2023 (dalam Miliar Rupiah)	III-20
TABEL 3.11	Rekapitulasi Usulan Belanja Hibah	III-21
TABEL 3.12	Realisasi dan Proyeksi/Target Pembiayaan Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2019 s.d Tahun 2023 (dalam Miliar Rupiah)	III-21
TABEL 3.13	Pendanaan Paket Pembangunan JSS Zona 1	III-30
TABEL 3.14	Porsi Pembagian Kegiatan Jakarta Sewerage Development Project Zona 6 Fase 1	III-30
TABEL 3.15	Pendanaan Paket Pembangunan JSS Zona 6 Fase 1	III-31
TABEL 3.16	Petunjuk Pemilihan Alternatif Pembiayaan Berdasarkan Kelayakan Ekonomi dan Finansial Proyek	III-39
TABEL 4.1	Tujuan/Sasaran Tahun 2023	IV-15
TABEL 4.2	Sasaran, Strategi dan Prioritas Pembangunan Tahun 2023	IV-23
TABEL 5.1	Rekapitulasi Usulan Awal dan Fase rembuk RW Tahun 2023	V-4
TABEL 5.2	Rekapitulasi Usulan Fase Musrenbang Kelurahan Tahun 2023	V-5
TABEL 5.3	Rekapitulasi Usulan Fase Musrenbang Kecamatan Tahun 2023	V-5

TABEL 5.4	Rekapitulasi Hasil Reses DPRD Tahun 2021 Menurut Wilayah	V-6
TABEL 5.5	Rekapitulasi Hasil Reses DPRD Periode I Tahun 2021 Menurut Wilayah	V-6
TABEL 5.6	Rekapitulasi Hasil Reses DPRD Periode II Tahun 2021 Menurut Wilayah	V-7
TABEL 5.7	Rekapitulasi Hasil Reses DPRD Periode III Tahun 2021 Menurut Wilayah	V-8
TABEL 5.8	Rekapitulasi Hasil Reses DPRD Periode I Tahun 2022 Menurut Wilayah	V-9
TABEL 5.9	Rekapitulasi Hasil Penelaahan Usulan Langsung Masyarakat Menurut Wilayah	V-10
TABEL 5.10	Rekapitulasi Hasil Penelaahan Usulan Langsung Masyarakat Menurut SKPD/UKPD	V-10
TABEL 5.11	Rekapitulasi Alasan Hasil Usulan Langsung Masyarakat Belum Diakomodir	V-21
TABEL 5.12	Pagu Indikatif Perangkat Daerah Tahun 2023	V-24
TABEL 6.1	Indikator Kinerja Utama Tahun 2023-2026	VI-4
TABEL 6.2	Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	VI-6

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR 1.1	Hubungan antar dokumen perencanaan dan penganggaran	I-6
GAMBAR 2.1	Peta Kemiringan Lereng Daerah Jabodetabek	II-4
GAMBAR 2.2	Peta Geologi Teknik Kawasan Jabodetabekpunjur	II-5
GAMBAR 2.3	Potongan Melintang Selatan Utara	II-7
GAMBAR 2.4	Peta Tematik Sungai di Provinsi DKI Jakart	II-8
GAMBAR 2.5	Peta Penggunaan Lahan di Provinsi DKI Jakarta	II-10
GAMBAR 2.6	Peta Rawan Banjir	II-12
GAMBAR 2.7	Peta Penurunan Muka Tanah di Provinsi DKI Jakarta	II-12
GAMBAR 2.8	Wilayah Resiko Kebakaran DKI Jakarta	II-13
GAMBAR 2.9	Peta Kawasan Rawan Bencana DKI Jakarta	II-13
GAMBAR 2.10	Penambahan Kasus Harian Covid-19 DKI Jakarta	II-15
GAMBAR 2.11	Jumlah Penduduk Provinsi DKI Jakarta Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2021	II-16
GAMBAR 2.12	Laju Pertumbuhan PDRB dan PDB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran (persen) Tahun 2017-2021	II-17
GAMBAR 2.13	Laju Inflasi Provinsi DKI Jakarta Tahun 2016 s.d.2021	II-18
GAMBAR 2.14	Nilai PDRB Perkapita Provinsi DKI Jakarta Tahun 2016 s.d. 2021	II-18
GAMBAR 2.15	Indeks Gini Provinsi DKI Jakarta Tahun 2016-2021	II-19
GAMBAR 2.16	Distribusi Pembagian Total Pengeluaran Per Kapita Provinsi DKI Jakarta Tahun 2016-2021	II-20
GAMBAR 2.17	Persentase Penduduk Miskin Provinsi DKI Jakarta dan Indonesia Tahun 2016-2021	II-20
GAMBAR 2.18	Perbandingan IPM Provinsi dan Nasional Tahun 2010-2021	II-21
GAMBAR 2.19	Indeks Pembangunan Gender Provinsi DKI Jakarta dan Indonesia Tahun 2012-2021	II-22
GAMBAR 2.20	Angka Melek Huruf DKI Jakarta dan Indonesia Tahun 2015-2021	II-23
GAMBAR 2.21	Perkembangan Angka Usia Harapan Hidup DKI Jakarta dan Nasional Tahun 2010-2021	II-23
GAMBAR 2.22	Jumlah Kasus Balita Kekurangan Gizi di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018-2021	II-24
GAMBAR 2.23	Rasio Penduduk yang Bekerja di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2016-2021 (Persentase)	II-25

GAMBAR 2.24	Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja menurut Kabupaten/Kota, 2021	II-26
GAMBAR 2.25	Angka Partisipasi Sekolah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2015-2021	II-27
GAMBAR 2.26	Perkembangan Angka Partisipasi Murni di DKI Jakarta Tahun 2015-2021	II-28
GAMBAR 2.27	Perkembangan Rata-Rata Lama Sekolah DKI Jakarta dan Nasional Tahun 2016-2021	II-29
GAMBAR 2.28	Perkembangan Angka Partisipasi Kasar di DKI Jakarta Tahun 2015-2021 (dalam persen)	II-30
GAMBAR 2.29	Persentase Angka Putus Sekola Jenjang Pendidikan SD; SMP; SMA dan SMK Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021 Menurut Kabupaten/Kota Administrasi	II-30
GAMBAR 2.30	Jumlah Penerima Kartu Jakarta Pintar Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2021	II-31
GAMBAR 2.31	Jumlah Fasilitas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta 2017-2021	II-32
GAMBAR 2.32	Jumlah Tenaga Kesehatan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018-2021	II-33
GAMBAR 2.33	Persentase Penduduk yang memiliki BPJS Kesehatan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2021	II-33
GAMBAR 2.34	Persentase Penduduk yang Mempunyai Keluhan Kesehatan Selama Sebulan Terakhir	II-34
GAMBAR 2.35	Akumulasi Cakupan Vaksinasi Provinsi DKI Jakarta Menurut Kota/Kabupaten Per 22 Juni 2022	II-34
GAMBAR 2.36	Panjang Jalan 2020	II-35
GAMBAR 2.37	Panjang dan Luas Trotoar 2016-2020	II-35
GAMBAR 2.38	Jumlah IMB Bangunan Tahun 2017-2021	II-36
GAMBAR 2.39	Jumlah Retribusi Tahun 2017-2021	II-36
GAMBAR 2.40	Jumlah Fasilitas Tempat Sampah Sementara Tahun 2021	II-37
GAMBAR 2.41	Volume Sampah yang Terangkut per Hari Menurut Jenis Sampah	II-37
GAMBAR 2.42	Komposisi Sampah Menurut Jenis Sampah Tahun 2021	II-38
GAMBAR 2.43	Cakupan Pelayanan Air Bersih Provinsi DKI Jakarta Tahun 2015-2021 (Jumlah Pelanggan)	II-38
GAMBAR 2.44	Cakupan Pelayanan Air Bersih Provinsi DKI Jakarta Tahun 2015-2021 [Kubikasi Air Terjual (m ³)	II-39

GAMBAR 2.45	Presentase Rumah Tangga yang memiliki akses Terhadap Sumber Air Minum	II-40
GAMBAR 2.46	Jumlah Rumah Susun Sederhana di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2021	II-40
GAMBAR 2.47	Presentase Status Milik Sendiri Bangunan Tempat Tinggal di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018- 2021	II-41
GAMBAR 2.48	Proporsi Akses Sanitasi pada Rumah Tangga Tahun 2021	II-41
GAMBAR 2.49	Pengumuman Fasilitas MCK Tahun 2018-2021	II-42
GAMBAR 2.50	Jumlah Kejahatan/Pelanggaran Kamtibmas Menurut Jenis dan Kabupaten/Kota Administrasi Provinsi DKI Jakarta	II-43
GAMBAR 2.51	Jumlah Unit Pengadaan Sarana dan Prasarana pencegahan, penanggulangan kebakaran dan APD Tahun 2021	II-44
GAMBAR 2.52	Jumlah Kejadian Kebakaran di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2021	II-45
GAMBAR 2.53	Penanganan PMKS di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018-2021	II-46
GAMBAR 2.54	Persentase Penduduk Miskin Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2021	II-47
GAMBAR 2.55	Jumlah Pekerja Sosial di DKI Jakarta Tahun 2017-2021	II-48
GAMBAR 2.56	Perkembangan Jumlah Sarana Sosial di DKI Jakarta	II-48
GAMBAR 2.57	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga per Bulan di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2020-2021	II-49
GAMBAR 2.58	Jumlah Penumpang Transjakarta Tahun 2016 – 2021	II-51
GAMBAR 2.59	Jumlah Kunjungan Wisata Mancanegara Tahun 2017-2021	II-52
GAMBAR 2.60	Proporsi Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara Jakarta terhadap Nasional Tahun 2017-2021	II-52
GAMBAR 2.61	Jumlah Kunjungan Wisatawan ke Objek Wisata Unggulan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2020-2021	II-53
GAMBAR 2.62	Jumlah Kejahatan di Wilayah Polda Metro Jaya Tahun 2015 – 2021	II-53
GAMBAR 2.63	Jumlah Akomodasi, kamar, dan Tempat Tidur yang tersedia pada Hotel Bintang 2018-2021	II-54
GAMBAR 2.64	Jumlah Perizinan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017 – 2020	II-54

GAMBAR 2.65	Rasio Penduduk yang Bekerja Menurut Pendidikan Terakhir yang Ditamatkan Agustus 2018 s.d 2021	II-55
GAMBAR 2.66	Rasio Ketergantungan Dependency Ratio Provinsi DKI Jakarta Tahun 2015 – 2021	II-56
GAMBAR 2.67	Capaian Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Serapan Anggaran Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Triwulan IV Tahun 2021	II-57
GAMBAR 2.68	Capaian Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Serapan Anggaran Urusan Pemerintahan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral Triwulan IV Tahun 2021	II-61
GAMBAR 2.69	Capaian Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Serapan Anggaran Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja Triwulan IV Tahun 2021	II-65
GAMBAR 2.70	Capaian Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Serapan Anggaran Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan Triwulan IV Tahun 2021	II-69
GAMBAR 2.71	Capaian Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Serapan Anggaran Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan Triwulan IV Tahun 2021	II-71
GAMBAR 2.72	Capaian Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Serapan Anggaran Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan Triwulan IV Tahun 2021	II-74
GAMBAR 2.73	Capaian Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Serapan Anggaran Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan Triwulan IV Tahun 2021	II-76
GAMBAR 2.74	Capaian Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Serapan Anggaran Unsur Kepegawaian Triwulan IV Tahun 2021	II-79
GAMBAR 2.75	Capaian Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Serapan Anggaran Unsur Pendidikan dan Pelatihan Triwulan IV Tahun 2021	II-83
GAMBAR 2.76	Capaian Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Serapan Anggaran Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga Triwulan IV Tahun 2021	II-86
GAMBAR 2.77	Capaian Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Serapan Anggaran Kesatuan Bangsa dan Politik Triwulan IV Tahun 2021	II-90

GAMBAR 2.78	Capaian Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Serapan Anggaran Kesatuan Bangsa dan Politik Triwulan IV Tahun 2021	II-90
GAMBAR 2.79	Capaian Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Serapan Anggaran Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Triwulan IV Tahun 2021	II-97
GAMBAR 2.80	Capaian Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Serapan Anggaran Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Triwulan IV Tahun 2021	II-103
GAMBAR 2.81	Capaian Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Serapan Anggaran Unsur Keuangan Triwulan IV Tahun 2021	II-110
GAMBAR 2.82	Capaian Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Serapan Anggaran Kota Administrasi Triwulan IV Tahun 2021	II-115
GAMBAR 2.83	Capaian Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Serapan Anggaran Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika Triwulan IV Tahun 2021	II-132
GAMBAR 2.84	Capaian Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Serapan Anggaran Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Triwulan IV Tahun 2021	II-135
GAMBAR 2.85	Capaian Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Serapan Anggaran Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Triwulan IV Tahun 2021	II-137
GAMBAR 2.86	Capaian Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Serapan Anggaran Urusan Pemerintahan Bidang Pangan Triwulan IV Tahun 2021	II-141
GAMBAR 2.87	Capaian Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Serapan Anggaran Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata Triwulan IV Tahun 2021	II-143
GAMBAR 2.88	Capaian Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Serapan Anggaran Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Triwulan IV Tahun 2021	II-146
GAMBAR 2.89	Capaian Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Serapan Anggaran Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Triwulan IV Tahun 2021	II-154

GAMBAR 2.90	Capaian Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Serapan Anggaran Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	II-156
GAMBAR 2.91	Capaian Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Serapan Anggaran Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal Triwulan IV Tahun 2021	II-159
GAMBAR 2.92	Capaian Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Serapan Anggaran Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Triwulan IV Tahun 2021	II-163
GAMBAR 2.93	Capaian Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Serapan Anggaran Unsur Penelitian dan Pengembangan Triwulan IV Tahun 2021	II-170
GAMBAR 2.94	Capaian Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Serapan Anggaran Urusan Pemerintahan	II-172
GAMBAR 2.95	Capaian Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Serapan Anggaran Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan Triwulan IV Tahun 2021	II-176
GAMBAR 2.96	Capaian Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Serapan Anggaran Unsur Perencanaan Triwulan IV Tahun 2021	II-179
GAMBAR 2.97	Capaian Program/Kegiatan/Program dan Serapan Anggaran Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan Triwulan IV Tahun 2021	II-183
GAMBAR 2.98	Capaian Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Serapan Anggaran Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian Triwulan IV Tahun 2021	II-188
GAMBAR 2.99	Capaian Program dan Serapan Anggaran Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan Triwulan IV Tahun 2021	II-192
GAMBAR 2.100	Capaian Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Serapan Anggaran Urusan Pemerintahan Bidang Persandian Triwulan IV Tahun 2021	II-194
GAMBAR 2.101	Capaian Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Serapan Anggaran Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian Triwulan IV Tahun 2021	II-196
GAMBAR 2.102	Capaian Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Serapan Anggaran Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Triwulan IV Tahun 2021	II-201

GAMBAR 2.103	Capaian Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Serapan Anggaran Urusan Pemerintahan Bidang Sosial Triwulan IV Tahun 2021	II-204
GAMBAR 2.104	Capaian Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Serapan Anggaran Urusan Pemerintahan Bidang Statistik Triwulan IV Tahun 2021	II-207
GAMBAR 3.1	Perkembangan Inflasi Jakarta dan Nasional Tahun 2019-2022	III-8
GAMBAR 3.2	Perkembangan Nilai Tukar Rupiah terhadap USD. 1 Jan 2021-31 Des 2021	III-9
GAMBAR 3.3	Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Jakarta Tahun 2021-2023	III-10
GAMBAR 3.4	Proyeksi Inflasi Jakarta 2022-2026	III-11
GAMBAR 3.5	Kerangka Alternatif Pendanaan yang Dapat Diimplementasikan pada Kurun 2023-2026	III-24
GAMBAR 4.1	Tahapan Pembangunan Jangka Menengah 2023-2026	IV-19
GAMBAR 4.2	PPKM DKI Jakarta	IV-51
GAMBAR 5.1	Mekanisme dan Jadwal Penyusunan RKPD 2023	V-3
GAMBAR 5.2	Kompilasi Hasil Reses DPRD Periode I Tahun 2021 Menurut Wilayah	V-7
GAMBAR 5.3	Kompilasi Hasil Reses DPRD Periode II Tahun 2021 Menurut Wilayah	V-8
GAMBAR 5.4	Kompilasi Hasil Reses DPRD Periode III Tahun 2021 Menurut Wilayah	V-9
GAMBAR 5.5	Kompilasi Hasil Reses DPRD Periode I Tahun 2022 Menurut Wilayah	V-10
GAMBAR 6.1	Kerangka Indeks Daya Saing	VI-3

Bagian 1

Buku Utama

1

Pendahuluan

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan RKPD DKI Jakarta Tahun 2023, sehingga substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik. Bab ini

terdiri atas latar belakang penyusunan RKPD, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen perencanaan, maksud dan tujuan penyusunan RKPD serta sistematika dokumen.



Foto: @darisarch

1.1

Latar belakang

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan daerah hasil penjabaran dari dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk periode 1 (satu) tahun. Sesuai amanat Pasal 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Perencanaan Pembangunan Nasional terdiri atas perencanaan pembangunan yang disusun secara terpadu oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS bersama Kementerian/Lembaga terkait dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya. Perencanaan Pembangunan Nasional tersebut menghasilkan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP).

Dalam konteks perencanaan pembangunan daerah, rencana pembangunan jangka panjang disusun untuk periode 20 (dua puluh) tahun dalam bentuk dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), rencana pembangunan jangka menengah daerah disusun untuk periode 5 (lima) tahun dalam bentuk dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan rencana pembangunan tahunan disusun untuk periode 1 (satu) tahun dalam bentuk dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Perencanaan pembangunan daerah yang berorientasi pada proses, menggunakan 4 (empat) pendekatan perencanaan pembangunan yaitu pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, serta atas-bawah dan bawah-atas. Pendekatan teknokratis dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Pendekatan partisipatif dilakukan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Pendekatan politis dilaksanakan dengan menerjemahkan visi dan misi kepala daerah terpilih ke dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah yang dibahas bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Sedangkan pendekatan atas-bawah dan bawah-atas merupakan hasil perencanaan

yang diselenggarakan dalam musyawarah pembangunan yang dilaksanakan mulai dari kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi hingga nasional. Selain menggunakan pendekatan-pendekatan tersebut, perencanaan pembangunan daerah yang berorientasi pada hambatan dan/atau permasalahan yang saling berkaitan satu dengan lainnya. Pendekatan integratif dilakukan dengan menyatukan beberapa kewenangan ke dalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan daerah. Sedangkan pendekatan spasial dilaksanakan dengan mempertimbangkan dimensi keruangan dalam perencanaan.

Dalam proses penyusunannya, sebagaimana yang telah diamanatkan dalam pasal 16 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, tahapan proses penyusunan RKPD terdiri atas:

1. persiapan penyusunan;
2. penyusunan rancangan awal;
3. penyusunan rancangan;
4. pelaksanaan musrenbang;
5. penyusunan rancangan akhir; dan
6. penetapan

Dalam hal penyusunan RKPD provinsi dimaksud, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah mengacu pada tahapan penyusunan RKPD tersebut.

Namun demikian, perencanaan tahun 2023 merupakan masa transisi di mana RPJMD 2017-2022 telah berakhir tetapi RPJMD periode berikutnya belum selesai karena Pilkada di Provinsi DKI Jakarta baru akan dilaksanakan pada Tahun 2024. Oleh karena itu, RKPD Provinsi Tahun 2023 perlu mengacu pada dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Tahun 2023-2026, serta berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan RKPD Tahunan 2023, dan dokumen Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023, sebagaimana yang diamanatkan oleh Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Tahun 2022.

Berpedoman pada RPD Provinsi dimaksud adalah penyalarsan sasaran dan prioritas pembangunan daerah serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang ditetapkan untuk kurun waktu tahun 2023-2026. Berpedoman pada pedoman penyusunan RKPD Tahun 2023 bermakna bahwa penyusunan RKPD Provinsi perlu menyesuaikan dengan koridor perencanaan Pemerintah Pusat, antara lain prioritas nasional dan pemenuhan Standar Pelayanan Minimum (SPM). Sedangkan berpedoman pada RKP dan program strategis nasional berarti dalam penyusunan RKPD Provinsi diperlukan penyalarsan prioritas pembangunan daerah, program serta kegiatan tahunan daerah dengan tema,

agenda pembangunan dan sasaran pengembangan wilayah dalam RKPD serta program strategis nasional lainnya.

Di samping itu, dalam penyusunan rencana kerja perangkat daerah yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam dokumen RKPD Provinsi ini, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta perlu menyesuaikan dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi Dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Dalam menyusun dokumen RKPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023, pemerintah provinsi DKI Jakarta mengacu pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Daerah Nomor 14 tahun 2011 tentang Sistem Perencanaan 2011 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Terpadu;
6. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025;
7. Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2026;
8. PP Nomor 2 Tahun 2018 tentang SPM;
9. Perpres Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN;
10. Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan SPM;
12. Permendagri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan RKPD Tahun 2023;
13. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.

1.3 Hubungan antar dokumen

Sebagaimana telah disebutkan dalam pasal 258 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, pembangunan daerah merupakan perwujudan dari pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang telah diserahkan ke Daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional. Untuk itu dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perlu dilakukan sinkronisasi dan harmonisasi dengan dokumen perencanaan lainnya, khususnya antara dokumen perencanaan Daerah dan dokumen lainnya yang mendukung perencanaan pembangunan Daerah, baik dokumen yang terkait keruangan maupun dokumen lain yang memuat target pembangunan nasional.

Sinkronisasi dan harmonisasi antar dokumen dimaksud dilakukan secara spasial dan a-spasial. Secara a-spasial, keterkaitan antar dokumen telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Dokumen RKPD sebagai dokumen perencanaan pembangunan tahunan Daerah merupakan penjabaran dari dokumen RPD yang berpedoman pada RPJP Daerah dan mengacu serta diserasikan dengan RKP yang merupakan penjabaran dari RPJMN. Di sisi lain, dokumen RPD juga memedomani dokumen RPJMN. Hal tersebut bermakna bahwa dalam mencapai target pembangunan secara nasional yang tertuang dalam dokumen RKP dan RPJMN, juga didukung oleh seluruh Daerah di Indonesia. Selanjutnya dokumen RKPD dimaksud menjadi acuan bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah yang juga mengacu pada dokumen Renstra Perangkat Daerah yang merupakan penjabaran RPD bagi Perangkat Daerah untuk kurun waktu 5 tahun. Dokumen RKPD tersebut juga menjadi pedoman dalam penyusunan RAPBD sebelum menjadi APBD.

Selain daripada itu, dokumen-dokumen a-spasial tersebut juga perlu disinkronisasikan dengan dokumen-dokumen perencanaan spasial yang berhubungan dengan penataan ruang, antara lain dokumen RTRW Nasional, RTR Pulau dan RTR Kawasan Strategis Nasional pada level Pemerintah Pusat dan dokumen RTRW Pemerintah Daerah, RDTR

dan PZ, serta RTR Kawasan Strategis Daerah. Selain memperhatikan aspek penataan ruang dalam wilayah dan nasional, perlu juga diselaraskan dengan dokumen-dokumen RTR dari daerah sekitar. Sinkronisasi antara dokumen a-spasial dan spasial tersebut dilakukan dengan penyesuaian antara dokumen RPJPD dan dokumen RTRW Daerah, di mana RPJPD memedomani RTRW Daerah, sebagai dokumen induk dari penataan secara keruangan Daerah. Konstelasi hubungan antar dokumen dimaksud dapat dilihat pada gambar berikut.

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, pada penyusunan RKPD Tahun 2023 menjadi sedikit berbeda karena berada pada masa transisi antara berakhirnya periode RPD 2017-2022 dengan RPD yang akan datang paska PILKADA Tahun 2024. Sehingga, RKPD Tahun 2023 mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026, yang merupakan RPD transisi, dan Rencana Kerja Pemerintah Pusat (RKP) Tahun 2023.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa penyusunan RKPD merupakan satu bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen perencanaan lainnya, baik dokumen perencanaan yang bersifat spasial maupun dokumen perencanaan yang bersifat a-spasial. Dalam konteks perencanaan a-spasial, RKPD memiliki keterkaitan langsung dengan dokumen-dokumen perencanaan a-spasial lainnya di tingkat daerah, seperti dokumen RPJMD/RPD, RPJPD, Renja Perangkat Daerah dan Renstra Perangkat Daerah. Demikian pula halnya dengan dokumen-dokumen perencanaan a-spasial di tingkat nasional, seperti dokumen RPJMN, RPJPN, RKP dan Renja K/L dan Renstra Perangkat K/L. RKPD perlu memedomani RPJMN, RPJPN dan utamanya RKP yang telah disusun oleh Pemerintah Pusat, di mana arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dijabarkan.

Dalam hal keberlanjutan proses perencanaan menuju proses penganggaran, RKPD juga memiliki peran penting sebagai pedoman penyusunan RAPBD dan RKA Perangkat

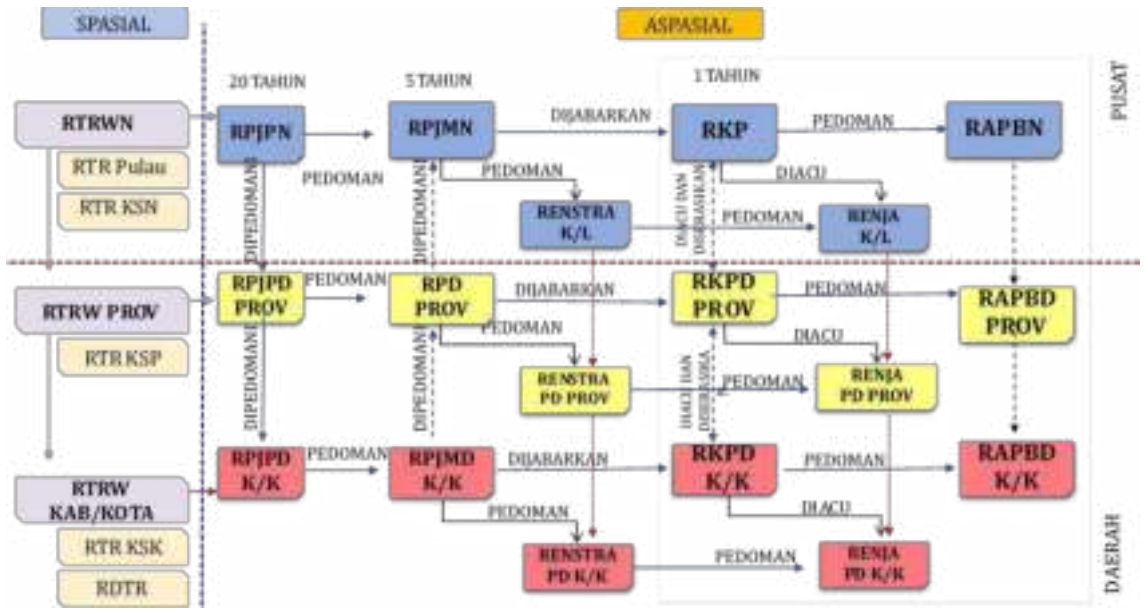
Daerah, yang pada akhir proses penganggaran akan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah tentang APBD dan rincian APBD.

Ditinjau dari sisi keruangan, RKPD pun memiliki keterkaitan tidak langsung dengan dokumen RTRW Daerah dan RTRW Nasional. Hal ini dapat dilihat bahwa RKPD yang merupakan penjabaran tahunan dari

RPD yang memedomani RPJP Daerah dan RTRW Daerah, di mana dokumen RTRW Daerah dimaksud menggunakan RTRW Nasional sebagai acuan dalam penyusunannya, dengan tetap mempertimbangkan RTR daerah sekitarnya dan dokumen penataan ruang lainnya di Daerah seperti RDTR dan PZ serta RTR Kawasan Strategis Daerah.

GAMBAR 1.1

Hubungan antar dokumen perencanaan dan penganggaran



Sumber: Kementerian Dalam Negeri 2022, diolah

1.4 Maksud dan tujuan

RKPD Provinsi Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta Tahun 2023, yang disusun oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dimaksudkan sebagai:

1. Arah pembangunan tahunan Provinsi DKI Jakarta di tahun 2023;
2. Pedoman bagi para pemangku kepentingan pembangunan, baik di lingkungan pemerintahan, masyarakat, dunia usaha/swasta dan pihak-pihak terkait lainnya, untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan daerah;
3. Acuan dalam pelaksanaan pembangunan daerah bagi Perangkat Daerah, sesuai dengan tugas, fungsi, kewenangan dan tanggung jawab masing-masing;

4. Instrumen dalam pelaksanaan fungsi pengawasan oleh DPRD sebagai kendali penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
5. Pedoman dalam perencanaan kebijakan pembangunan daerah dalam pemulihan pasca pandemi Covid-19 di tahun 2023.

Tujuan penyusunan dokumen RKPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023 adalah:

1. Menyediakan arah kebijakan penyelenggaraan pembangunan;
2. Menyediakan rencana kebijakan pembangunan Daerah dalam pemulihan pasca pandemi Covid-19 pada tahun 2023;
3. Menyediakan acuan bagi seluruh Kepala Perangkat Daerah dan Kepala Unit Kerja

- Perangkat Daerah pada masa transisi di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam menentukan prioritas program dan kegiatan Tahun 2023;
4. Menetapkan program prioritas untuk masing-masing urusan pemerintahan Tahun 2023;

5. Menjadi landasan dalam finalisasi Renja Perangkat Daerah; dan
6. Menyediakan acuan dalam penyusunan dokumen penganggaran KUA dan PPAS.

1.5 Sistematika dokumen

Sistematika dokumen RKPD, sebagaimana yang telah diamanatkan dalam bagian C.3 Lampiran Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, adalah sebagai berikut:

- BAB 1. Pendahuluan
- BAB 2. Gambaran Umum Kondisi Daerah
- BAB 3. Kerangka Ekonomi dan Keuangan

- BAB 4. Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah
- BAB 5. Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah
- BAB 6. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
- BAB 7. Penutup

2

Gambaran Umum Daerah

Pada bab ini dijelaskan mengenai kondisi daerah tentang demografi dan geografi dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD sampai tahun berjalan dan realisasi RPJMD serta permasalahan pembangunan daerah. Gambaran umum kondisi daerah memberikan pemahaman awal tentang apa

bagaimana serta sejauh mana keberhasilan pembangunan daerah yang dilakukan selama ini, dan/atau mengidentifikasi faktor-faktor berbagai aspek yang nantinya perlu tingkatkan atau optimalisasi pencapaian keberhasilan pembangunan daerah provinsi atau kabupaten/kota.



Foto: @darisarch

2.1

Kondisi Umum Daerah

Bagian ini menjelaskan dan menyajikan secara logis dasar-dasar analisis, gambaran umum kondisi daerah yang meliputi aspek geografi dan demografi serta indikator kinerja

penyelenggaraan pemerintah daerah, dengan sub bahasan aspek geografi demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing daerah.

Pelaksanaan Otonomi Daerah di Provinsi DKI Jakarta

Pelaksanaan otonomi daerah di Provinsi DKI Jakarta diatur dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia, di mana disebutkan bahwa Provinsi DKI Jakarta merupakan daerah khusus yang berfungsi sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia dan sekaligus sebagai daerah otonom pada tingkat provinsi. Dengan Otonomi Provinsi DKI Jakarta yang diletakkan pada tingkat provinsi sehingga Penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta harus mengikuti dan menuruti asas otonomi, asas dekonsentrasi, asas tugas pembantuan, dan kekhususan sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Selain itu, pada pasal 5 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tersebut juga dinyatakan bahwa Provinsi DKI Jakarta berperan sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia yang memiliki kekhususan tugas, hak, kewajiban dan tanggung jawab tertentu dalam penyelenggaraan pemerintahan dan sebagai tempat kedudukan perwakilan negara asing, serta pusat/perwakilan lembaga internasional.

Dalam konteks perencanaan pembangunan, sebagai konsekuensi peran tersebut di atas, maka Pemprov. DKI Jakarta perlu mempunyai metode pendekatan tersendiri dan berbeda dengan provinsi lainnya. Dalam rangka mengakomodir kebutuhan warga, proses perencanaan pembangunan di Jakarta dimulai dari tingkat RW sampai tingkat provinsi. Sementara itu, Pemerintah Kota dan Kabupaten hanya bersifat kota administrasi. Hal ini disebabkan oleh otonomi tunggal pada daerah Provinsi, sehingga DPRD hanya ada

pada tingkat provinsi, tidak ada pada tingkat Kabupaten/Kota.

Selain sebagai Ibukota NKRI, Jakarta mempunyai peran yang penting dan multifungsi. Jakarta merupakan kota yang berkontribusi paling tinggi bagi perekonomian nasional, dikarenakan Jakarta adalah pusat kegiatan keuangan di tingkat nasional. Jakarta juga merupakan pusat kegiatan pemerintahan sebagai tempat kedudukan perwakilan negara asing, serta pusat/perwakilan lembaga internasional. Dengan demikian maka Jakarta akan sangat penting bagi NKRI dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan untuk aspek luar negeri.

Sebagai kota internasional dan tempat komunikasi antar berbagai suku bangsa, maka penting bagi Jakarta dalam melakukan dialog budaya. Jadi secara umum budaya Jakarta dapat dikatakan sebagai pusat akulturasi antara budaya asing dan budaya domestik. Fungsi lainnya adalah bahwa Provinsi DKI Jakarta juga sebagai daerah otonom. Fungsi ini mendorong Pemerintahan provinsi DKI Jakarta wajib untuk memiliki pemerintahan yang solid, kompeten, berwibawa, tanggap, bersih dan profesional. Sehingga masyarakat dapat terlayani dengan baik dan puas.

Dengan dasar uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai pusat pemerintahan, dan sebagai daerah otonom. Dengan fungsi tersebut ini maka Jakarta mempunyai karakteristik permasalahan yang sangat kompleks dan berbeda dengan provinsi lain. Provinsi DKI Jakarta selalu berhadapan dengan masalah urbanisasi, keamanan,

transportasi, lingkungan, pengelolaan kawasan khusus, dan masalah sosial kemasyarakatan lain yang memerlukan pemecahan masalah secara sinergis melalui berbagai instrumen.

Namun demikian, dalam hal pengelolaan wilayah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tetap mengacu kepada Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015. Undang-Undang tersebut mendasari pembentukan Perangkat Daerah yang akan berperan penting dalam menyelesaikan permasalahan Jakarta yang spesifik.

Aspek Geografi dan Demografi

Bagian ini menjelaskan dan menyajikan secara logis dasar-dasar analisis, gambaran umum kondisi daerah yang meliputi aspek geografi dan demografi serta indikator kinerja

penyelenggaraan pemerintah daerah, dengan sub bahasan aspek geografi demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing daerah.

Luas dan Batas Wilayah

Wilayah provinsi DKI Jakarta terletak pada dataran rendah antara 6°12' Lintang Selatan dan 106°48' Bujur Timur dengan ketinggian rata-rata ± 7 meter di atas permukaan laut. Sebagian besar karakteristik wilayah Provinsi DKI Jakarta berada di bawah permukaan air laut pasang. Kondisi tersebut mengakibatkan sebagian wilayah di Provinsi DKI Jakarta rawan genangan, baik karena curah hujan yang tinggi maupun karena semakin tingginya air laut pasang (rob).

Dilihat dari posisi geostrategis, Provinsi DKI Jakarta terletak di sisi utara bagian barat Pulau Jawa, dengan bagian utara berbatasan langsung dengan Laut Jawa dan merupakan bentang pantai sepanjang 35 km yang menjadi tempat bermuaranya 9 sungai, 2 kanal, dan 2 flood way. Sedangkan sisi timur dan selatan Provinsi DKI Jakarta berbatasan dengan wilayah administrasi Provinsi Jawa Barat, serta sisi barat berbatasan dengan wilayah Provinsi Banten.

Berdasarkan Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 171 tahun 2007 tentang Penataan, Penetapan Batas dan Luas Wilayah Kelurahan di Provinsi DKI Jakarta, secara geografis luas wilayah DKI Jakarta adalah 7.639,83 km², dengan luas daratan 662,33 km² termasuk 110 pulau yang tersebar

di Kepulauan Seribu, dan luas lautan 6.977,5 km².

Provinsi DKI Jakarta merupakan ibukota Negara Indonesia sehingga tidak memiliki kawasan pedalaman maupun kawasan terpencil. Sebagian wilayah Provinsi yang membentang dari timur ke barat sepanjang kurang lebih 35 km, dan menjorok ke darat sekitar 4-10 km. Selain memiliki daerah pesisir, DKI Jakarta juga memiliki 110 pulau yang tersebar pada 2 (dua) Kecamatan di wilayah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu. Pulau-pulau di wilayah tersebut memiliki luas beragam, sebanyak 30 persen memiliki luas lebih dari 10 Ha, sebanyak 25 persen memiliki luas antara 5 - 10 Ha, dan sisanya sebanyak 45 persen berukuran kurang dari 5 Ha. Pulau-pulau tersebut memanjang dari utara ke selatan dengan ciri-ciri berpasir putih dan bergosong karang, serta beriklim tropis panas dengan kelembaban berkisar antara 75 - 99 persen. Dari 110 pulau yang terdapat di Kabupaten Kepulauan Seribu, hanya 11 pulau yang berpenghuni, yaitu Pulau Untung Jawa, Pulau Lancang Besar, Pulau Pari, Pulau Payung Besar, Pulau Tidung Besar, Pulau Panggang, Pulau Pramuka, Pulau Kelapa, Pulau Kelapa Dua, Pulau Harapan, dan Pulau Sebir.

Dalam hal administrasi pemerintahan, Provinsi DKI Jakarta dibagi menjadi 5 (lima) Kota Administrasi dan 1 (satu) Kabupaten Administrasi. Hal tersebut dimaksudkan guna

meningkatkan pelayanan kepada masyarakat agar lebih efektif dan efisien. Wilayah kecamatan terbagi menjadi 44 Kecamatan, dan rincian sebagai berikut.

TABEL 2.1

Pembagian Wilayah Provinsi DKI Jakarta

No.	Kota/Kabupaten Administrasi	Luas Area (km ²)	Jumlah			
			Kecamatan	Kelurahan	RW	RT
1.	Jakarta Pusat	52,38	8	44	389	4.572
2.	Jakarta Utara	139,99	6	31	449	5.223
3.	Jakarta Barat	124,44	8	56	586	6.481
4.	Jakarta Selatan	154,32	10	65	576	6.088
5.	Jakarta Timur	182,70	10	65	707	7.926
6.	Kepulauan Seribu	10,18	2	6	24	127
Jumlah		664,01	44	267	2.731	30.417

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta 2022 dan Biro Tata Pemerintahan 2018

Topografi

Bagian ini menjelaskan dan menyajikan secara logis dasar-dasar analisis, gambaran umum kondisi daerah yang meliputi aspek geografi dan demografi serta indikator kinerja

penyelenggaraan pemerintah daerah, dengan sub bahasan aspek geografi demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing daerah.

GAMBAR 2.1

Peta Kemiringan Lereng Daerah Jabodetabek



Sumber: Master Plan dan Kajian Akademis Persampahan Provinsi DKI Jakarta 2012-2032

Dapat dilihat bahwa sekitar 0-3 persen wilayah Provinsi DKI Jakarta yaitu memiliki kecenderungan datar, sementara daerah hulu dimana sungai-sungai yang bermuara di

Provinsi DKI Jakarta memiliki ketinggian yang cukup tinggi yaitu sekitar 8-15 persen di wilayah Bogor dan Cibinong, sedangkan

daerah Ciawi-Puncak memiliki ketinggian lebih dari 15 persen.

Fenomena banjir yang terjadi di Jakarta tidak lepas dari kemiringan lerengnya, lokasi Kota Jakarta sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 2.1 di atas, masih tergolong dalam tingkat kemiringan lereng 0-3 persen. Kemiringan lereng pada Kota Tangerang dan Bekasi memiliki karakteristik yang sama, sehingga dapat dinyatakan bahwa sebagian besar kawasan Jabodetabek berada pada kemiringan lereng relatif landai.

Dengan kondisi kemiringan lahan yang demikian, ditambah dengan 17 sungai yang mengalir di wilayah Provinsi DKI Jakarta menyebabkan kecenderungan semakin rentannya wilayah Jakarta untuk tergenang air dan banjir pada musim hujan. Terlebih jika memperhatikan tingginya tingkat perkembangan wilayah di sekitar Jakarta, menyebabkan semakin rendahnya resapan air kedalam tanah dan menyebabkan run off air semakin tinggi, yang pada gilirannya akan memperbesar ancaman banjir di wilayah Provinsi DKI Jakarta.

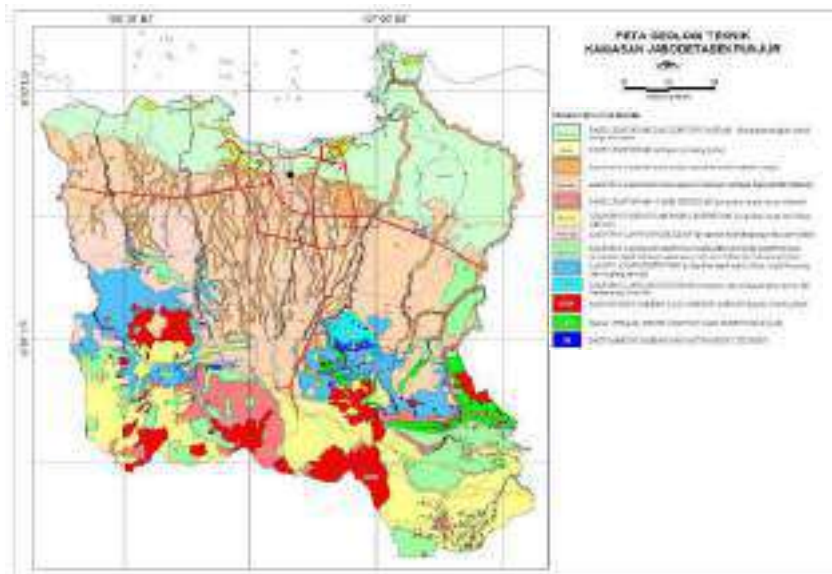
Geologi

Secara geologis, seluruh daerah di Jakarta terlihat bahwa strukturnya terdiri dari endapan Pleistocene yang terdapat ± 50 meter di bawah permukaan tanah. Di sisi utara, permukaan keras baru terdapat pada kedalaman 10-25 m, semakin ke selatan permukaan keras semakin dangkal pada kedalaman 8-15 m, pada sebagian wilayah, lapisan permukaan tanah yang keras terdapat pada kedalaman 40 m. Sedangkan struktur di sisi selatan terdiri atas lapisan alluvial.

Pada dataran rendah pantai merentang ke bagian pedalaman sekitar 10 Kilometer. Di bawah terdapat lapisan endapan yang lebih tua yang tidak tampak pada permukaan tanah karena timbunan seluruhnya oleh endapan alluvium. Gambar 2.2 berikut memberikan informasi tentang peta geologi teknik Kawasan Jabodetabekpunjur.

GAMBAR 2.2

Peta Geologi Teknik Kawasan Jabodetabekpunjur



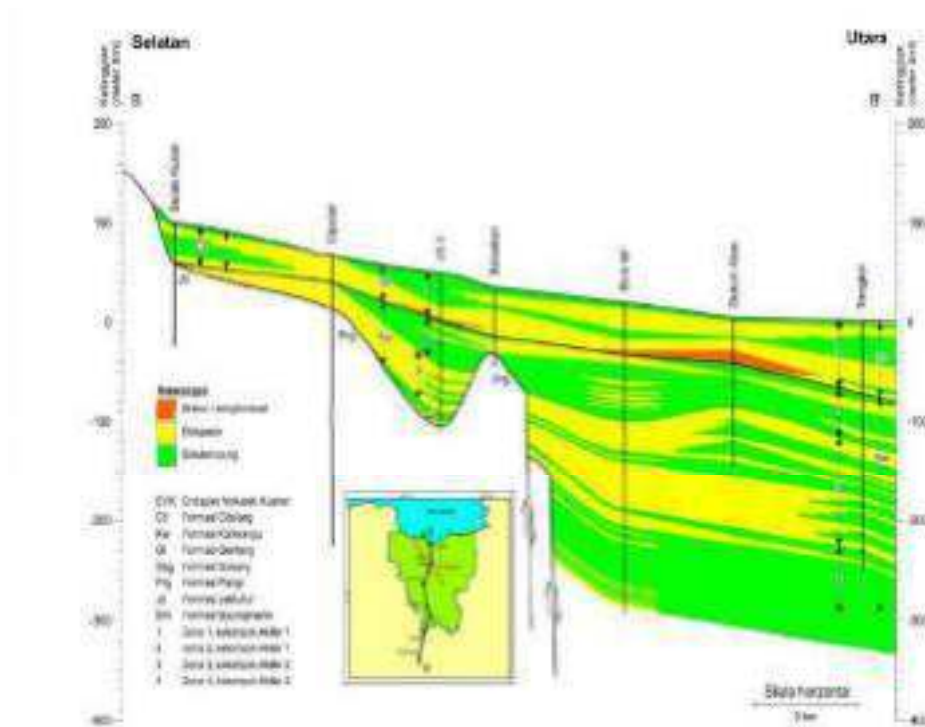
Sumber: Master Plan dan Kajian Akademis Persampahan Provinsi DKI Jakarta 2012-2032

Secara umum, karakteristik keteknikian tanah dan batuan Provinsi DKI Jakarta menunjukkan bahwa terdapat 4 karakteristik utama, yaitu:

- a. Pasir lempungan dan lempung pasir, merupakan endapan aluvial sungai dan pantai berangsur-angsur dari atas ke bawah terdiri dari lanau lempungan, lanau pasir dan lempung pasir. Semakin kearah utara mendekati pantai di permukaan berupa lanau pasir dengan sisipan lempung organik dan pecahan cangkang kerang, tebal endapan antara perselang-seling lapisannya bekisar antara 3-12 m, namun ketebalan secara keseluruhan endapan tersebut diperkirakan mencapai 300 m. Lanau lempungan tersebar secara dominan di permukaan, abu-abu kehitaman sampai abu-abu kecoklatan, setempat mengandung material organik, lunak-teguh, plastisitas sedang-tinggi. Lanau pasir, kuning keabuan, teguh, plastisitas sedang-tinggi. Lempung pasir, abu-abu kecoklatan, tegus, plastisitas sedang-tinggi;
- b. Pada beberapa tempat nilai penetrometer saku (qu) untuk lanau lempungan antara lanau pasir antara 2-3 kg/cm² dan lempung pasir antara 1,5-3 kg/cm², tebal;
- c. lapisan (data sondir dan bor tangan) lanau lempungan antara 1,5-5 m, lanau pasir antara 0,5-3 m dan lempung pasir antara 1-4 m dan kisaran nilai tekanan konus lanau lempungan antara 2-20 kg/m², lanau pasir antara 15-25 kg/m² dan lempung pasir antara 10-40 kg/m²;
- d. Satuan Pasir Lempungan, merupakan endapan pematang pantai berangsur-angsur dari atas ke bawah terdiri dari perselang-seling lanau pasir dan pasir lempungan. Tebal endapan antara 4,5-13 m. Di permukaan didominasi oleh pasir lempungan, dengan warna coklat muda dan mudah terurai. Pasir berbutir halus-sedang, mengandung lempung, setempat kerikil dan pecahan cangkang kerang. Lanau pasir berwarna kelabu kecoklatan, lunak, plastisitas sedang. Di beberapa tempat nilai penetrometer saku (qu) untuk pasir lempungan antara 0,75 -2 kg/cm² dan lanau pasir antara 1,5-3 kg/cm², tebal lapisan (data sondir dan bor tangan) pasir lempungan antara 3-10 m dan lanau pasir antara 1,5-3 meter dan kisaran nilai tekanan konus pasir lempungan antara 10-25 kg/m² dan lanau pasir antara 2-10 kg/m²;
- e. Satuan Lempung Pasir dan Pasir Lempungan, merupakan endapan limbah banjir sungai. Satuan tersebut tersusun beselang-selang antara lempung pasir dan pasir lempungan. Lempung pasir umumnya berwarna abu-abu kecoklatan, coklat, dengan plastisitas sedang, konsistensi lunak-teguh. Pasir lempungan berwarna abu-abu, angka lepas, berukuran pasir halus-kasar, merupakan endapan alur sungai dengan ketebalan 1,5-17 m; dan
- f. Lempung Lanauan dan Lanau Pasir, merupakan endapan kipas aluvial vulkanik (tanah tufa dan konglomerat), berangsur-angsur dari atas ke bawah terdiri dari lempung lanauan dan lanau pasir dengan tebal lapisan antara 3-13,5 meter. Lempung lanauan tersebar secara dominan di permukaan, coklat kemerahan hingga coklat kehitaman, lunak-teguh, plastisitas tinggi. Lanau pasir, merah-kecoklatan, teguh, plastisitas sedang-tinggi. Di beberapa tempat nilai penetrometer saku untuk lempung antara 0,8-2,85 kg/cm² dan lanau lempungan antara 2,3-3,15 kg/cm², tebal lapisan (data sondir dan bor tangan) lempung antara 1,5-6 m dan lanau lempungan antara 1,5-7,5 m. Kisaran nilai tekanan konus lempung antara 2-50 kg/m² dan lanau lempungan antara 18-75 kg/m². Tufa dan konglomerat melapuk menengah – tinggi, putih kecoklatan, berbutir pasir halus-kasar, agak padu dan rapuh.

GAMBAR 2.3

Potongan Melintang Selatan Utara



Sumber: Master Plan dan Kajian Akademis Persampahan Provinsi DKI Jakarta 2012-2032

Pada gambar 2.3 dapat dilihat bahwa Provinsi DKI Jakarta merupakan endapan vulkanik quarter yang terdiri dari 3 (tiga) formasi yaitu: Formasi Citalang, Formasi Kaliwangu, dan Formasi Parigi. Formasi Citalang memiliki kedalaman hingga kira-kira 80 m. Formasi Citalang didominasi oleh batu pasir pada bagian bawahnya dengan bagian atasnya merupakan batu lempung, sedangkan di beberapa tempat terdapat breksi/konglomerat

terutama pada bagian Blok M dan Dukuh Atas. Formasi Kaliwangu didominasi oleh batu lempung diselingi oleh batu pasir yang memiliki kedalaman sangat bervariasi, dengan kedalaman bagian utaranya lebih dari 300 m dan di sekitar Babakan, formasi Parigi mendesak keatas hingga kedalaman 80 m. Dengan kondisi geografis demikian, disadari bahwa Jakarta termasuk wilayah rawan banjir.

Hidrologi

Provinsi DKI Jakarta memiliki potensi air yang sebagian besar terletak dalam cekungan air bawah tanah yang tidak mengenal batas administrasi pemerintahan dan bersifat lintas Kabupaten/Kota yang dibatasi oleh batas-batas hidrogeologi, yang secara teknis diatur dalam Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 716 K/40/MEM/2003 tentang Batas Horisontal Cekungan Air Tanah Di Pulau Jawa dan Pulau Madura, berikut Peta Cekungan Air Tanah Provinsi Jawa Tengah dan DIY. Menurut keputusan tersebut, Provinsi DKI Jakarta berada pada

Cekungan Air Tanah (CAT) Provinsi Jawa Barat dan DKI Jakarta yang merupakan cekungan air tanah lintas Provinsi, yang berada di antara Provinsi Banten, Provinsi DKI Jakarta, dan Provinsi Jawa Barat dengan luas sekitar 1.439 km². Sebarannya mencakup sebagian Kota Tangerang dan sebagian Kabupaten Tangerang, seluruh wilayah DKI Jakarta, sebagian Kabupaten Bogor dan sebagian Kabupaten Bekasi.

Litologi akuifer utama dari cekungan air tanah Provinsi Jawa Barat dan DKI Jakarta

merupakan: endapan sungai pasir, kerikil, kerakal, dan bongkah; endapan kipas gunung api; pasir, kerikil, dan kerakal; endapan pematang pantai; pasir halus-kasar mengandung cangkang moluska; tuf Banten; tuf batu apung; dan batu pasir tufan. Jumlah air tanah bebas 803 juta m³/tahun, sedangkan jumlah air tanah tertekan 40 juta m³/tahun.

Sistem akuifiernya bersifat multi layers yang dibentuk oleh endapan kuartar dengan ketebalan mencapai 250 m. Ketebalan akuifer tunggal antara 1-5 m, terutama berupa lanau sampai pasir halus. Kelulusan horizontal antara 0,1-40 m/hari, sementara kelulusan vertikalnya berdasarkan hasil simulasi aliran air tanah CAT Jakarta sekitar 250 m²/hari air tanah pada endapan kuartar mengalir pada sistem akuifer ruang antar bulir. Di daerah pantai umumnya didominasi oleh air tanah panyau/asin yang berada di atas air tanah tawar kecuali di daerah yang disusun oleh endapan sungai lama dan pematang pantai. Akuifer produktif umumnya dijumpai sekitar kedalaman 40 mbmt dan mencapai kedalaman maksimum 150 mbmt.

Pembagian sistem akuifer di CAT Jakarta yang hingga saat ini digunakan adalah sebagai berikut:

1. Sistem akuifer tidak tertekan yang berada pada kedalaman 0-40 mbmt, disebut sebagai kelompok akuifer I;
2. Sistem akuifer tertekan atas yang berada pada kedalaman 40-140 mbmt, disebut sebagai kelompok akuifer II; dan
3. Sistem akuifer tertekan bawah yang berada pada kedalaman 140 – 250 mbmt, disebut sebagai kelompok akuifer III.

Pembagian akuifer di CAT Jakarta tersebut didasarkan atas dijumpainya lempung berfaies laut yang memisahkan sistem akuifer yang satu dengan lainnya. Mengatasi sistem akuifer di daerah pemantauan adalah endapan tersier yang bersifat relatif sangat kedap air. Berdasarkan letaknya, Kota Jakarta termasuk kota delta (delta city) yaitu kota yang berada pada muara sungai yang umumnya berada di bawah permukaan laut, dan cukup rentan terhadap perubahan iklim. Meskipun demikian, keberadaan sungai dan laut menyebabkan sebuah delta city memiliki keunggulan strategis, terutama dalam hal transportasi perairan. Kota delta umumnya berada di bawah permukaan laut, dan cukup rentan terhadap perubahan iklim. Berikut peta aliran sungai, kanal dan flood way yang melalui wilayah DKI Jakarta (Gambar 2.4) serta panjang dan luas dari masing-masing sungai/kanal menurut peruntukannya sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 2.2.

GAMBAR 2.4

Peta Tematik Sungai di Provinsi DKI Jakarta



Sumber: Dokumen RPJMD Tahun 2017-2022

TABEL 2.2

Panjang dan Luas Sungai/Kanal di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021

No.	Sungai/Kanal	Panjang (m)	Luas (m ²)	Peruntukan
1.	Ciliwung	21.660	515.600	Usaha Perkotaan
2.	Krukut	18.370	206.340	Air Baku Air Minum
3.	Mookervart	8.600	215.000	Air Baku Air Minum
4.	Kali Angke	4.350	175.375	Usaha Perkotaan
5.	Kali Pesanggrahan	11.400	142.500	Perikanan
6.	Kali Grogol	21.600	367.325	Perikanan
7.	Kali Cideng	12.700	291.000	Usaha Perkotaan
8.	Kalibaru Timur	14.250	106.875	Usaha Perkotaan
9.	Cipinang	9.060	72.480	Usaha Perkotaan
10.	Sunter	21.290	540.900	Usaha Perkotaan
11.	Cakung	18.100	181.000	Usaha Perkotaan
12.	Buaran	8.800	154.000	Usaha Perkotaan
13.	Kalibaru Barat	14.250	106.875	Air Baku Air Minum
14.	Cengkareng Drain	2.950	147.500	Usaha Perkotaan
15.	Jati Kramat	3.270	21.255	Usaha Perkotaan
16.	Ancol	8.650	301.175	Usaha Perkotaan
17.	Banjir Kanal Barat	3.650	155.700	Usaha Perkotaan

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta, 2022

Klimatologi

Dalam hal musim, wilayah Indonesia pada umumnya dikenal dua musim yaitu musim kemarau dan musim hujan. Pada tahun 2021,

untuk wilayah Jakarta, suhu udara tertinggi terjadi pada bulan Desember sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut.

TABEL 2.3

Provinsi DKI Jakarta Tahun 2019-2021

No	Bulan	2019			2020			2021		
		Suhu Udara (°C)			Suhu Udara (°C)			Suhu Udara (°C)		
		Max	Min	Mean	Max	Min	Mean	Max	Min	Mean
1.	Januari	34,00	23,60	27,90	34,40	24,00	28,02	34,20	23,40	27,30
2.	Februari	34,00	24,00	28,20	34,60	24,00	27,72	34,00	23,80	27,40
3.	Maret	34,80	23,80	28,10	34,60	25,00	28,60	33,80	23,00	28,30
4.	April	35,20	24,80	28,80	34,80	25,00	29,08	34,20	24,40	28,70
5.	Mei	35,00	25,00	29,60	35,60	24,80	29,58	34,80	23,40	29,40
6.	Juni	34,40	24,40	29,20	35,00	24,40	29,49	34,20	24,20	28,50
7.	Juli	34,00	24,00	28,70	34,20	24,20	28,93	34,00	24,00	28,80
8.	Agustus	33,60	24,00	28,20	34,80	24,00	29,12	34,40	24,60	29,00
9.	September	35,00	24,00	28,80	35,00	24,00	29,29	35,00	23,60	29,20
10.	Oktober	35,00	24,60	29,40	34,60	24,00	28,83	34,20	24,60	29,20
11.	November	34,60	25,00	29,50	35,20	25,00	29,00	34,60	24,00	28,50
12.	Desember	33,80	24,80	28,40	34,80	24,20	28,15	35,20	24,00	28,20

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta, 2022

Penggunaan Lahan

Penggunaan lahan terbagi menjadi kawasan budidaya dan kawasan lindung. Kawasan budidaya terdiri dari kawasan peruntukan hutan produksi, pertanian, pertambangan, industri, pariwisata, permukiman, pendidikan tinggi, pesisir dan pulau-pulau kecil, serta kawasan militer dan kepolisian.

Dalam beberapa dekade terakhir, perkembangan fisik wilayah DKI Jakarta ditandai oleh semakin luasnya lahan terbangun. Perkembangan lahan terbangun berlangsung dengan pesat seiring dengan pertumbuhan penduduk dan aktifitasnya. Kecenderungan tersebut mengindikasikan bahwasanya ketersediaan lahan menjadi permasalahan yang penting bagi

pembangunan Provinsi DKI Jakarta. Pembangunan fisik di Jakarta terus mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Hal ini ditandai oleh pembangunan gedung perkantoran, sarana ekonomi dan sosial serta infrastruktur kota lainnya. Semua ini merupakan konsekuensi logis dari semakin majunya pembangunan dan perekonomian Jakarta. Gambaran penggunaan lahan di DKI Jakarta dapat dilihat pada gambar berikut.

Peruntukan lahan untuk perumahan menduduki proporsi terbesar, yaitu 48,41 persen dari luas daratan utama DKI Jakarta. Sedangkan luasan untuk peruntukan bangunan industri, perkantoran dan perdagangan hanya mencapai 15,68 persen.

GAMBAR 2.5

Peta Penggunaan Lahan di Provinsi DKI Jakarta



Sumber: RTRW Provinsi DKI Jakarta 2030

Potensi Wilayah

Jakarta merupakan wilayah yang sangat strategis baik dalam lingkup nasional, regional, maupun internasional. Oleh karena itulah, dalam pengembangan wilayah memperhatikan lingkungan strategis

sekitarnya. Dalam pengembangan wilayah, rencana struktur ruang DKI Jakarta merupakan perwujudan dan penjabaran dari struktur ruang kawasan perkotaan

Jabodetabekpunjur seperti yang tertera dalam Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2020.

Jabodetabekpunjur secara ekonomi merupakan kawasan strategis nasional yang terdiri atas kawasan perkotaan inti dan kawasan sekitarnya yang membentuk kawasan metropolitan. Sebagai kawasan perkotaan inti, Jakarta berkembang menjadi pusat pemerintahan nasional, pusat perekonomian dan jasa internasional, nasional dan regional.

Kontribusi Jakarta terhadap ekonomi nasional dan Pulau Jawa masing-masing sebesar 17.19 persen dan 28 persen. Hal ini menyebabkan Jakarta menjadi barometer perekonomian nasional. Rencana pemindahan ibukota negara hendaknya menjadi pendorong bagi Jakarta untuk meningkatkan daya saing.

Sejalan dengan hal tersebut, maka perencanaan struktur ruang telah memperhatikan berbagai aspek lingkungan strategis yang diduga akan mempengaruhi perkembangan kota Jakarta secara

keseluruhan. Rencana struktur ruang yang dikembangkan di DKI Jakarta meliputi empat struktur ruang, yaitu sistem pusat kegiatan, sistem dan jaringan transportasi, sistem prasarana sumber daya air, dan sistem dan jaringan utilitas perkotaan.

Sistem pusat kegiatan terdiri dari sistem pusat kegiatan primer dan sekunder. Sistem dan jaringan transportasi terdiri dari sistem dan jaringan transportasi darat, transportasi laut dan transportasi udara. Selanjutnya sistem prasarana sumber daya air terdiri dari sistem konservasi sumber daya air, sistem pendayagunaan sumber daya air, dan sistem pengendalian daya rusak air.

Sedangkan sistem dan jaringan utilitas perkotaan terdiri atas sistem dan jaringan air bersih, sistem prasarana dan sarana pengelolaan air limbah, sistem prasarana dan sarana pengelolaan sampah, sistem dan jaringan energi, serta sistem dan jaringan telekomunikasi.

Wilayah Rawan Bencana

Berdasarkan sejarah kebencanaan DKI Jakarta, terdapat 8 jenis ancaman bencana diantaranya; banjir, kebakaran gedung dan pemukiman, epidemi dan wabah penyakit, konflik sosial, gelombang ekstrem dan abrasi, kegagalan teknologi, cuaca ekstrem dan gempa bumi. Banjir dan kebakaran menjadi bencana yang paling sering terjadi.

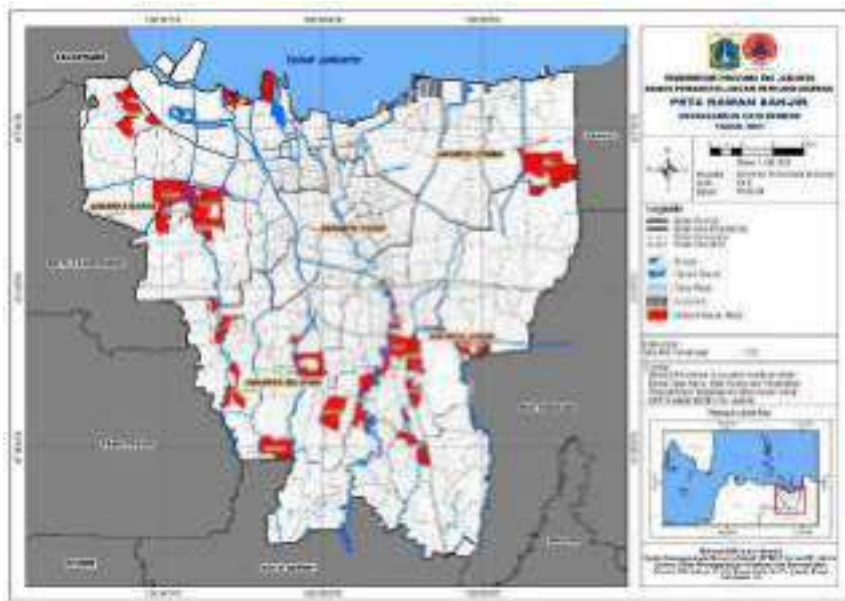
Selain posisi geografis yang berada di wilayah pesisir landai dengan 40 persen daratan berada di bawah rata-rata muka laut serta dilalui oleh 13 sungai besar, banjir dan genangan air di Jakarta juga disebabkan oleh curah hujan lokal yang tinggi, sistem drainase yang tidak berfungsi secara optimal, berkurangnya wilayah resapan air serta prasarana dan sarana pengendalian banjir yang belum berfungsi maksimal.

Adapun salah satu faktor yang memperburuk dampak banjir dan genangan adalah penurunan permukaan tanah (land subsidence). Secara umum laju penurunan tanah yang terdeteksi adalah sekitar 1-15 cm per tahun, bervariasi secara spasial maupun temporal. Beberapa faktor penyebab terjadinya penurunan tanah yaitu pengambilan air tanah yang berlebihan, penurunan karena beban bangunan (settlement), penurunan karena adanya konsolidasi alamiah dari lapisan-lapisan tanah, serta penurunan karena gaya-gaya tektonik.

Gambar di bawah ini menggambarkan wilayah rawan banjir DKI Jakarta tahun 2021.

GAMBAR 2.6

Peta Rawan Banjir



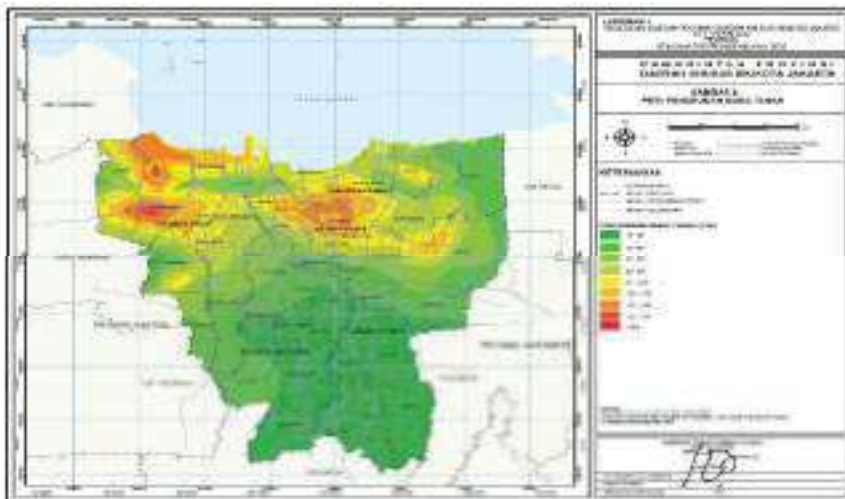
Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah, 2022

Beberapa daerah yang mengalami subsidence cukup besar yaitu Cengkareng Barat, Pantai Indah Kapuk, sampai dengan Dadap. Nilai subsidence paling besar terdapat di daerah Muara Baru. Sementara untuk

Jakarta Pusat dan Jakarta Selatan nilai subsidence relatif kecil. Peta penurunan tanah DKI Jakarta dari tahun ke tahun dapat dilihat pada gambar 2.7.

GAMBAR 2.7

Peta Penurunan Muka Tanah di Provinsi DKI Jakarta



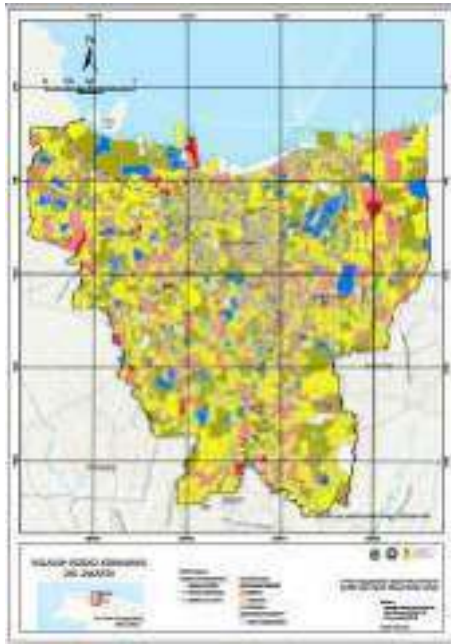
Sumber: Perda Provinsi DKI Jakarta No. 1 Tahun 2012 tentang RTRW Jakarta 2030

Bencana lain yang sering terjadi di Jakarta adalah kebakaran. Bencana ini umumnya terjadi di lokasi permukiman padat penduduk dan lingkungan pasar yang pada umumnya disebabkan oleh arus pendek listrik. Bahaya

kebakaran diperkirakan akan terus menjadi ancaman apabila tidak tumbuh kesadaran masyarakat untuk hidup dengan budaya perkotaan.

GAMBAR 2.8

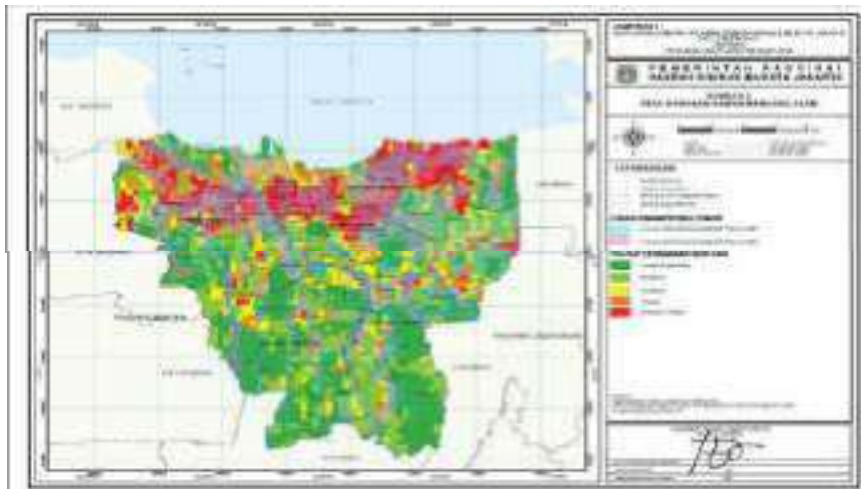
Wilayah Resiko Kebakaran DKI Jakarta



Sumber: Laporan Pemetaan Resiko Kebakaran DKI Jakarta, DRRC UI 2021

GAMBAR 2.9

Peta Kawasan Rawan Bencana DKI Jakarta



Sumber: Perda Provinsi DKI Jakarta No. 1 Tahun 2012 tentang RTRW Jakarta 2030

Terkait dengan potensi gempa bumi, di sekitar Jakarta diperkirakan terdapat 10 sumber gempa dengan potensi terbesar di sekitar Selat Sunda, yang selama ini aktif dan berpotensi menimbulkan risiko bencana. Berdasarkan data seismik kegempaan seluruh Indonesia, di selatan Jawa bagian barat terdapat seismic gap (daerah jalur gempa dengan kejadian gempa yang sedikit dalam jangka waktu lama) yang juga menyimpan potensi gempa yang tinggi terhadap Jakarta. Kondisi Jakarta Bagian

Utara yang merupakan batuan atau tanah lunak akan lebih rentan terhadap dampak gempa dibandingkan wilayah Jakarta bagian selatan. Kawasan rawan bencana di Provinsi DKI Jakarta dapat dilihat pada Gambar 2.9.

Berdasarkan peta kawasan rawan bencana gempa bumi Jawa bagian barat, potensi gempa bumi di wilayah DKI Jakarta termasuk kategori tingkat menengah sampai rendah. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sendiri telah menyusun peta zonasi gempa Level I – Level

II, yaitu sampai dengan peta kondisi kerentanan batuan/tanah dan respon gempa berdasarkan data sekunder.

Untuk menanggulangi potensi kerawanan bencana tersebut, maka Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga telah menetapkan kawasan yang diperuntukan sebagai tempat evakuasi bencana. Kawasan peruntukan evakuasi bencana ini ditetapkan dengan ketentuan antara lain:

- a. Memiliki luas minimum 1.000 m² (seribu meter persegi) dan diprioritaskan pada kelurahan rawan bencana;
- b. Lokasi mudah diakses dari kawasan rawan bencana;
- c. Relatif aman saat mengalami bencana;
- d. Dapat dijangkau angkutan umum;
- e. Tersedia utilitas dan sarana yang memadai; dan
- f. Merupakan bagian dari fasilitas sosial atau fasilitas umum.

Adapun lokasi kawasan evakuasi bencana utama diarahkan antara lain di:

- a. Kawasan Monumen Nasional,
- b. Kawasan Gelora Bung Karno Senayan,
- c. Kawasan Taman Impian Jaya Ancol,
- d. Kawasan Islamic Centre,
- e. Kawasan Taman Mini Indonesia Indah,
- f. Kawasan Taman Margasatwa Ragunan,
- g. Kawasan Hutan Kota Srengseng,
- h. Kawasan Taman Kampung Sawah/Taman Catleya,
- i. Kawasan Halim Perdana Kusuma,
- j. Kawasan Taman BMW,
- k. Kawasan Kebon Pisang,
- l. Kawasan TPU Tegal Alur,
- m. Kawasan TPU Tanah Kusir,
- n. Kawasan pusat pemerintahan,
- o. Kawasan pemakaman, dan
- p. Kawasan rekreasi lainnya.

Selain kawasan evakuasi bencana, direncanakan pula jalur evakuasi bencana. Jalur evakuasi bencana adalah jaringan jalan yang dilalui Transjakarta, jalan arteri menuju lokasi kawasan evakuasi bencana utama dan menuju fasilitas vital yaitu Pelabuhan Tanjung Priok dan Bandara Halim Perdana Kusuma.

Pemanfaatan dan pengelolaan kawasan evakuasi bencana tersebut dilakukan

berdasarkan arahan antara lain optimalisasi pemanfaatan kawasan ruang terbuka hijau dan kawasan terbuka plasa publik maupun privat sebagai kawasan evakuasi bencana dilengkapi sarana utilitas yang memadai; penetapan prasarana, sarana, dan fasilitas umum, dan sosial sebagai kawasan evakuasi bencana dengan memperhatikan ketersediaan utilitas dan aksesibilitas; peningkatan aksesibilitas dari dan ke kawasan evakuasi bencana; dan pengaturan dan pengendalian kegiatan dan bangunan di kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan evakuasi bencana. (Sumber: RTRW 2030).

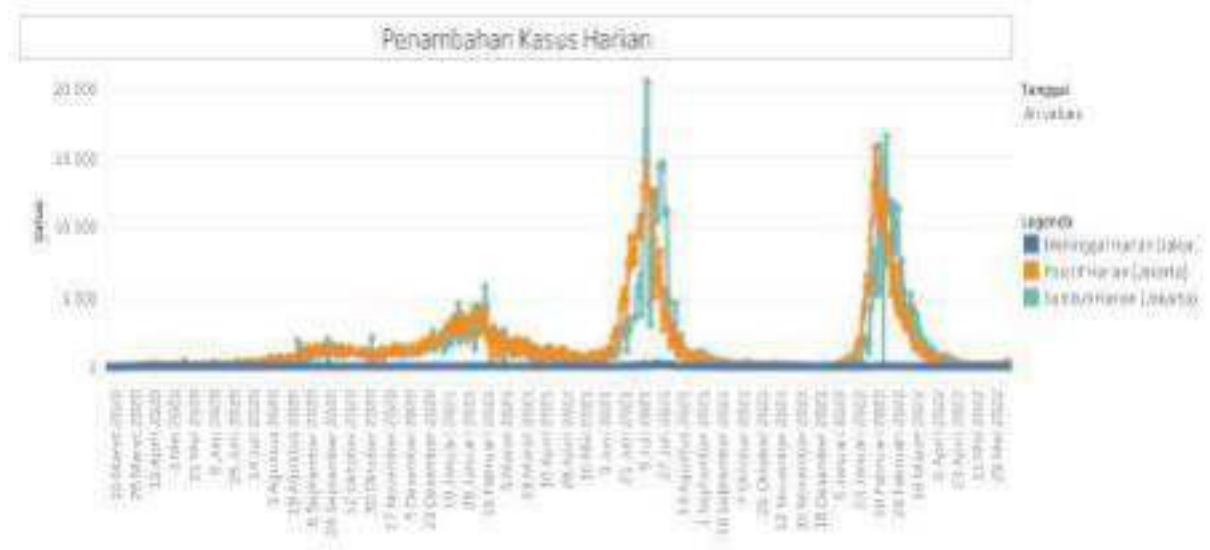
Pandemi Covid-19 menuntut Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk bergerak dan responsif dalam melakukan tindakan pencegahan maupun penanggulangan. Ada tiga strategi utama yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yaitu, tes, lacak dan pembatasan gerak.

Sejak awal Januari 2021, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta konsisten menjalankan pemeriksaan Polymerase Chain Reaction (PCR) sebanyak 40.000 tes setiap pekannya. Angka ini empat kali lipat dari standar yang ditetapkan WHO yaitu 1 tes untuk setiap 1.000 penduduk. Dengan populasi Jakarta yang berkisar 10 juta penduduk maka Jakarta diharuskan melakukan lebih dari 10.000 tes setiap pekannya. Oleh karena itu, penambahan kasus aktif harian yang tercatat menyebabkan grafik meningkat cukup tajam pada pertengahan tahun 2021. Dalam mengatasi hal tersebut pemerintah melakukan program percepatan vaksinasi di masyarakat, sehingga grafik penambahan kasus harian covid-19 melandai pada akhir tahun 2021.

Munculnya varian *omicron* pada awal tahun 2022 menyebabkan penambahan kasus harian covid-19 kembali meningkat. Menyikapi hal tersebut, pemerintah mendorong program percepatan vaksinasi lanjutan (*booster*). Program tersebut berhasil menekan angka penambahan kasus harian covid-19. Gambar di bawah ini merupakan pergerakan penambahan kasus harian covid-19 DKI Jakarta.

GAMBAR 2.10

Penambahan Kasus Harian Covid-19 DKI Jakarta



Sumber: <https://corona.jakarta.go.id>, 13 Juni 2022

Demografi

Pertumbuhan penduduk dapat dipengaruhi oleh kelahiran, kematian, dan migrasi. Pada tahun 2021 jumlah penduduk Provinsi DKI Jakarta mencapai 10.644.776 jiwa. Dilihat dari komposisi penduduk menurut jenis kelamin, jumlah penduduk laki-laki Provinsi DKI Jakarta tahun 2020 sebanyak 5.362.748 jiwa atau 50,38 persen dari jumlah keseluruhan penduduk, lebih banyak dibandingkan jumlah

penduduk perempuan yaitu sebanyak 5.282.028 jiwa atau 49,62 persen. Oleh karenanya, Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2021 memiliki sex ratio sebesar 101,53 penduduk laki-laki per 100 penduduk perempuan. Rincian perkembangan komposisi penduduk dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 adalah sebagai berikut:

TABEL 2.4

Perkembangan Jumlah Penduduk Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2021

No.	Uraian	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1.	Laki-laki	5.202.815	5.244.690	5.285.321	5.334.781	5.362.748
2.	Perempuan	5.171.420	5.222.910	5.272.489	5.227.307	5.282.028
3.	Jumlah	10.374.235	10.467.600	10.557.810	10.562.088	10.644.776
4.	Pertumbuhan	0,98	0,94	0,90	0,92	0,92
5.	Densitas (Ribuan jiwa/ km ²)	15,51	15,66	15,8	15,9	15,9
6.	Sex Ratio	100,61	100,42	100,24	102,06	101,53

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta. "Jakarta Dalam Angka, 2022"

Jumlah penduduk Provinsi DKI Jakarta cenderung terus meningkat dari tahun ke tahun. Provinsi DKI Jakarta memiliki kepadatan penduduk yang tinggi dibandingkan dengan provinsi lainnya di Indonesia, dengan kepadatan penduduk 15,9 ribu jiwa/Km².

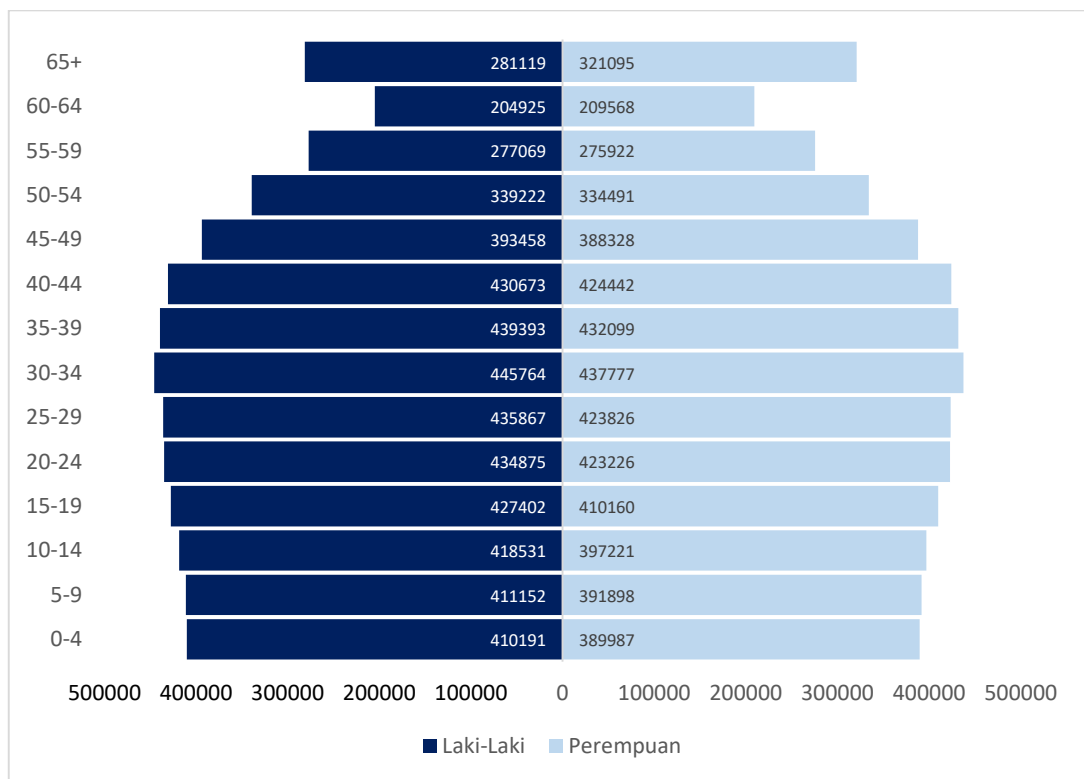
Komposisi penduduk menurut jenis kelamin pada tahun 2021 memiliki tren jumlah penduduk laki-laki selalu lebih banyak dibandingkan penduduk perempuan. Jumlah WNI tertinggi berada di Kota Administrasi

Jakarta Utara yaitu sebanyak 3.245.909 jiwa, sedangkan jumlah WNI terendah terdapat pada Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu yaitu sebanyak 29.330 jiwa.

Sedangkan komposisi penduduk Provinsi DKI Jakarta menurut umur pada tahun 2021 didominasi oleh kelompok usia produktif yaitu usia 15 sampai 64 sebesar 69,28% dari keseluruhan penduduk di DKI Jakarta. Hal tersebut dapat dilihat dalam gambar dibawah ini.

GAMBAR 2.11

Jumlah Penduduk Provinsi DKI Jakarta Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2021



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta, 2022

Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Tingkat kesejahteraan ekonomi masyarakat yang tinggi merupakan tujuan yang ingin dicapai oleh setiap daerah. Namun manfaat tersebut harus juga dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Dengan kata lain, aspek pemerataan juga menjadi pertimbangan

penting dalam keberhasilan pembangunan. Dalam bagian ini akan diuraikan beberapa indikator yang menggambarkan kondisi tingkat kesejahteraan dan pemerataan ekonomi Provinsi DKI Jakarta.

Pertumbuhan PDRB

Tingkat kesejahteraan ekonomi masyarakat yang tinggi merupakan tujuan yang ingin dicapai oleh setiap daerah. Namun manfaat tersebut harus juga dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Dengan kata lain, aspek pemerataan juga menjadi pertimbangan penting dalam keberhasilan pembangunan. Dalam bagian ini akan diuraikan beberapa indikator yang menggambarkan kondisi tingkat kesejahteraan dan pemerataan ekonomi Provinsi DKI Jakarta.

Salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi perekonomian Jakarta secara makro adalah melalui data produk domestik regional bruto (PDRB), jumlah nilai tambah bruto (*gross value added*) yang timbul dari seluruh sektor perekonomian di suatu wilayah. Terdapat 2 (dua) jenis penilaian

PDRB yaitu atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan. Selain menjadi bahan dalam penyusunan perencanaan, angka PDRB juga bermanfaat untuk bahan evaluasi hasil-hasil pembangunan yang telah dilaksanakan.

Apabila dilihat dari laju pertumbuhan PDRB, pada umumnya, dari tahun 2017 hingga tahun Tahun 2021 laju pertumbuhan PDRB Provinsi DKI Jakarta mengalami tren yang menurun. Setelah tahun 2017, tren laju pertumbuhan PDRB terus menurun hingga Tahun 2021 yaitu sebesar 3.56 persen. Penurunan laju pertumbuhan PDRB ini disebabkan oleh kontraksi ekonomi yang berlangsung selama 2020 hingga 2021 yang disebabkan oleh pandemi global. Hal tersebut dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

GAMBAR 2.12

Laju Pertumbuhan PDRB dan PDB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran (persen) Tahun 2017-2021



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta. "Jakarta Dalam Angka, 2022"

Inflasi

Laju inflasi DKI Jakarta dari tahun ke tahun berfluktuasi nilainya, karena sangat bergantung pada kondisi perekonomian, baik nasional maupun global. Apabila dibandingkan dengan inflasi nasional, inflasi Provinsi DKI Jakarta memiliki tren yang hampir sama. Hal tersebut menunjukkan tren kenaikan harga barang di Provinsi DKI

Jakarta cukup dapat menggambarkan kenaikan harga barang secara nasional. Data terkini menunjukkan bahwa inflasi DKI Jakarta sampai dengan Desember tahun 2021 adalah sebesar 1,53 persen (yoy). Rincian mengenai nilai inflasi DKI Jakarta sebagaimana dapat dilihat pada gambar berikut:

GAMBAR 2.13

Laju Inflasi Provinsi DKI Jakarta Tahun 2016 s.d.2021



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta. "Jakarta Dalam Angka, 2022"

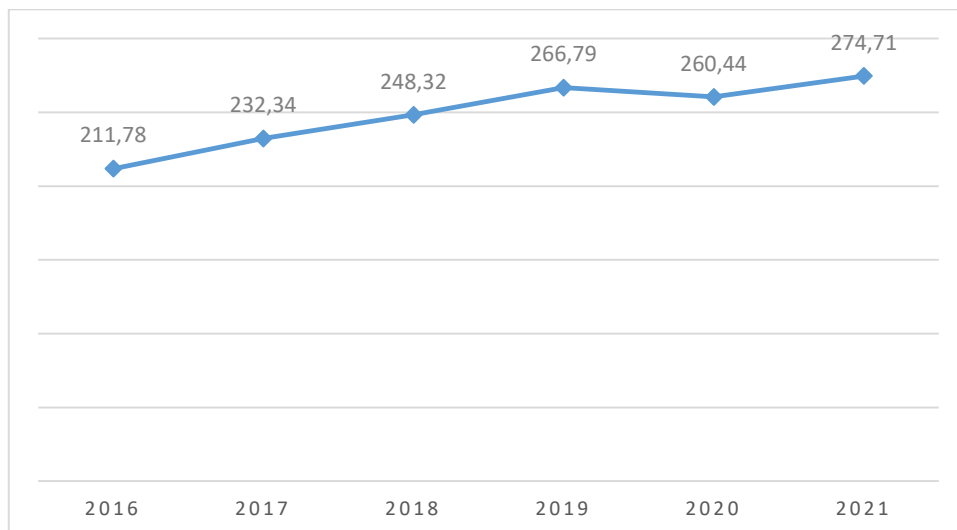
PDRB Per Kapita

Perkembangan nilai PDRB perkapita menunjukkan proporsi nilai tambah yang dihasilkan dalam satu tahun dibagi jumlah penduduk. Pada tahun 2016, nilai PDRB Perkapita berdasarkan harga berlaku sebesar Rp.211.78 juta. Angka ini terus meningkat hingga Tahun 2021 menjadi Rp. 274.71 juta.

Data BPS menunjukkan bahwa PDRB perkapita DKI Jakarta berdasarkan harga berlaku memiliki tren yang meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan kesejahteraan masyarakat Provinsi DKI Jakarta sebagaimana terlihat pada gambar berikut.

GAMBAR 2.14

Nilai PDRB Perkapita Provinsi DKI Jakarta Tahun 2016 s.d. 2021

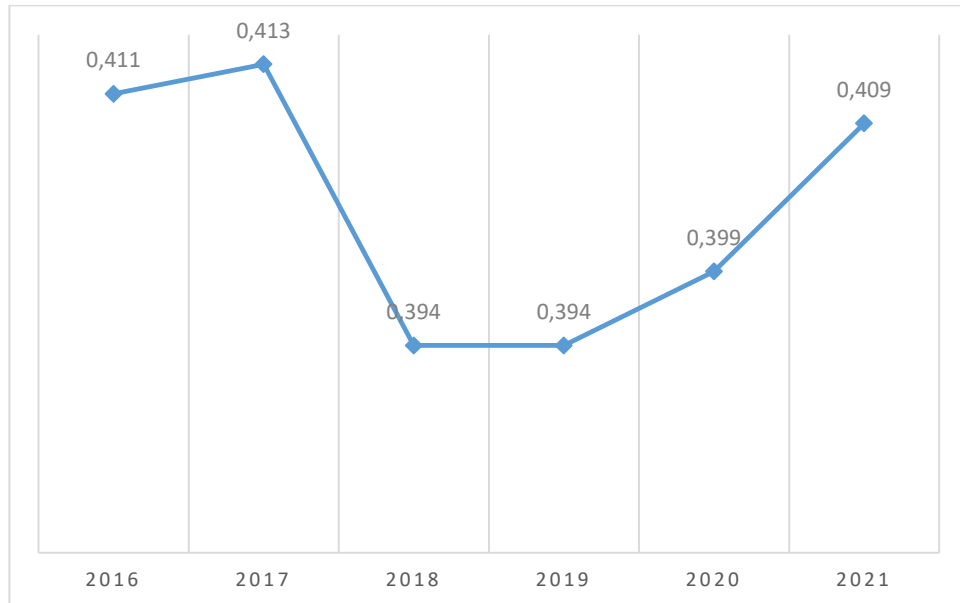


Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta. "Jakarta Dalam Angka, 2022"

Indeks Gini

GAMBAR 2.15

Indeks Gini Provinsi DKI Jakarta Tahun 2016-2021



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta. "Jakarta Dalam Angka, 2022"

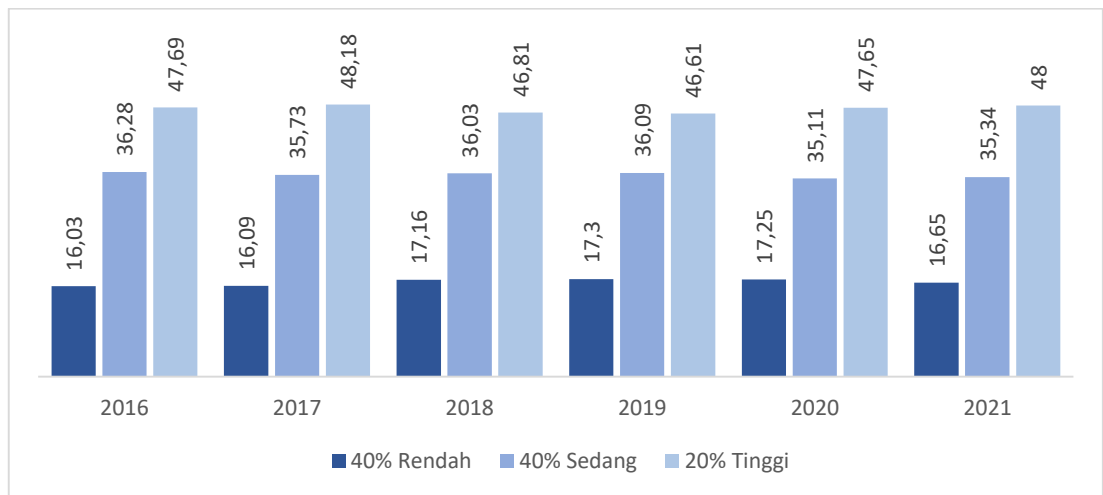
Indeks gini adalah salah satu ukuran yang paling sering digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh dalam suatu daerah. Ukuran kesenjangan indeks gini berada pada besaran 0 (nol) dan 1 (satu). Nilai 0 (nol) pada indeks gini menunjukkan tingkat pemerataan yang sempurna, dan semakin besar nilai gini maka semakin tinggi pula tingkat ketimpangan. Gambar 2.14. memperlihatkan tren indeks gini Provinsi DKI Jakarta sejak tahun 2016 s.d tahun 2021. Dari gambar tersebut terlihat bahwa tren indeks gini DKI Jakarta dari tahun 2016 – 2019 cenderung menurun dan stabil diangka 0,394 pada tahun 2019 yang kemudian meningkat kembali hingga tahun 2021. Hal tersebut menunjukkan terjadinya peningkatan ketimpangan pendapatan dalam struktur masyarakat DKI Jakarta berdasarkan golongan pengeluaran antar kelompok penduduk.

Selain indeks gini, ukuran ketimpangan lainnya yang sering digunakan adalah persentase pendapatan pada kelompok penduduk 40 persen terbawah atau dikenal dengan ukuran ketimpangan Bank Dunia. Kategori ketimpangan Bank Dunia ditentukan dengan menggunakan kriteria sebagai berikut:

1. Jika proporsi jumlah pendapatan dari penduduk yang masuk kategori 40 persen terendah terhadap total pendapatan seluruh penduduk kurang dari 12 persen, dikategorikan ketimpangan pendapatan tinggi;
2. Jika proporsi jumlah pendapatan dari penduduk yang masuk kategori 40 persen terendah terhadap total pendapatan seluruh penduduk di antara 12-17 persen, dikategorikan ketimpangan pendapatan sedang/menengah; dan
3. Jika proporsi jumlah pendapatan dari penduduk yang masuk kategori 40 persen.

GAMBAR 2.16

Distribusi Pembagian Total Pengeluaran Per Kapita Provinsi DKI Jakarta Tahun 2016-2021



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta. "Jakarta Dalam Angka, 2022"

Dari gambar diatas dapat dilihat bahwa pada tahun 2016, proporsi jumlah pendapatan dari penduduk yang masuk kategori 40 persen terendah terhadap total pendapatan seluruh penduduk sebesar 16,03 persen. Artinya, pada tahun 2016, ketimpangan pendapatan di DKI Jakarta dikategorikan sedang/menengah.

Begitu juga pada tahun 2021, proporsi jumlah pendapatan dari penduduk yang masuk kategori 40 persen terendah terhadap total pendapatan seluruh penduduk sebesar 16.65 persen. Pada tahun 2021, ketimpangan pendapatan di DKI Jakarta masih dikategorikan sedang/menengah.

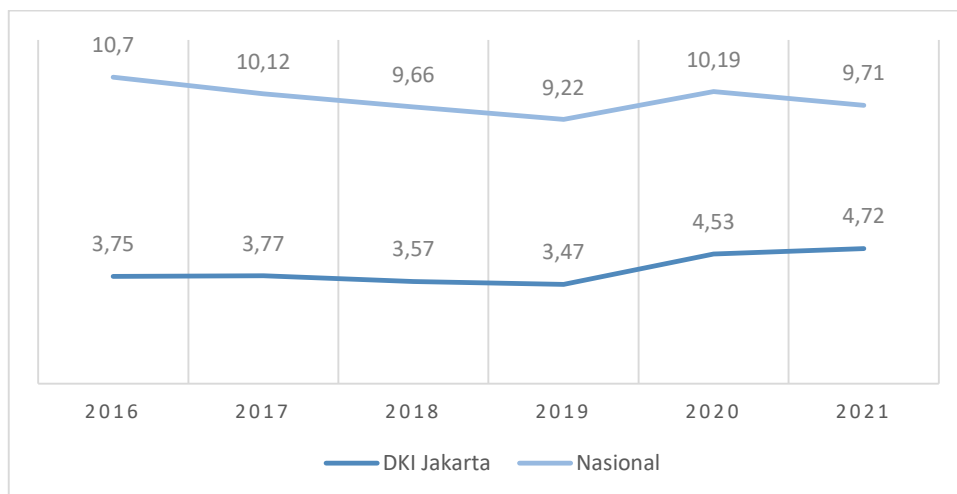
Tingkat Kemiskinan

Pada tahun 2016 – 2021, tren persentase penduduk miskin di Provinsi DKI Jakarta cenderung meningkat walaupun dengan deviasi tidak lebih dari 1 persen dalam periode tersebut. Namun, pada tahun 2020, persentase penduduk miskin DKI Jakarta

melonjak naik dari 3,47 persen pada tahun 2019 menjadi 4,53 persen pada tahun 2020. Artinya, penduduk miskin di DKI Jakarta bertambah 118,6 ribu orang atau naik sebesar 1,11 persen dibandingkan kondisi 2019.

GAMBAR 2.17

Persentase Penduduk Miskin Provinsi DKI Jakarta dan Indonesia Tahun 2016-2021



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta. "Jakarta Dalam Angka, 2022"

Indeks Pembangunan Manusia

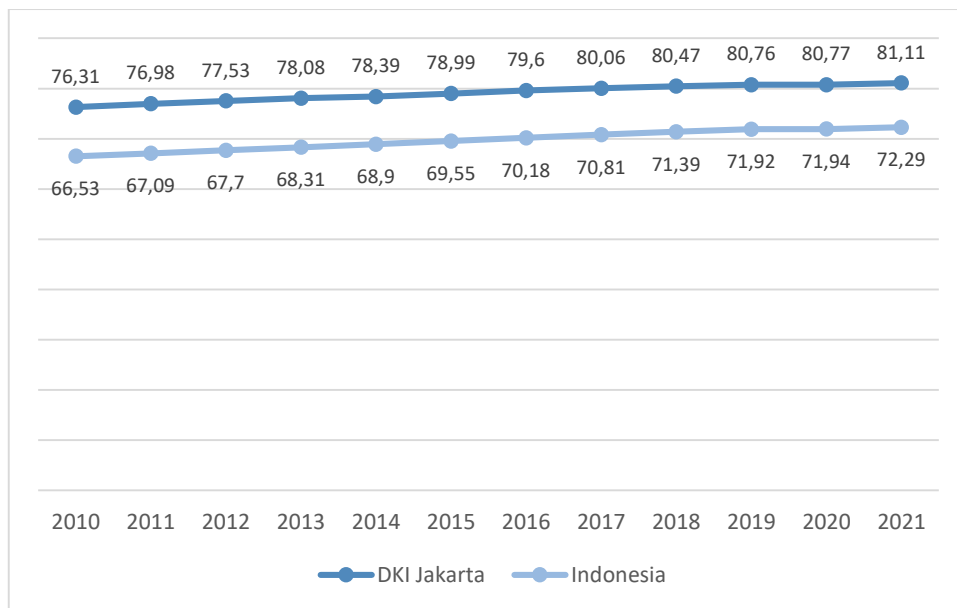
IPM diperkenalkan oleh UNDP pada tahun 1990 dan metode penghitungan direvisi pada tahun 2010. BPS mengadopsi perubahan metodologi penghitungan IPM yang baru sejak tahun 2014 dan telah dilakukan backcasting sampai ke angka IPM tahun 2010. IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan. IPM dibentuk oleh tiga dimensi dasar, yaitu umur panjang dan hidup sehat (a long and healthy life), pengetahuan (knowledge) dan standar hidup layak (decent standard of living). Dengan pengukuran IPM ini, setidaknya ada 3 manfaat yang diperoleh, diantaranya adalah: i) IPM merupakan

indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk); ii) IPM dapat menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah/negara; dan iii) IPM juga dapat digunakan sebagai salah satu alokator penentuan Dana Alokasi Umum (DAU).

Selain itu dengan menggunakan rata-rata geometrik dalam menyusun IPM dapat diartikan bahwa capaian satu dimensi tidak dapat ditutupi oleh capaian di dimensi lain. Hal tersebut menunjukkan dalam mewujudkan pembangunan manusia yang baik, ketiga dimensi harus memperoleh perhatian yang sama besar karena sama pentingnya.

GAMBAR 2.18

Perbandingan IPM Provinsi dan Nasional Tahun 2010-2021



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta. "Jakarta Dalam Angka, 2022"

Pada tahun 2010 IPM Provinsi DKI Jakarta adalah sebesar 76,31 menjadi 81,11 pada tahun 2021, dengan rata-rata kenaikan IPM sebesar 0,44 persen per tahun. Namun kenaikan IPM, menjadi lebih lambat pada periode 2018-2020 yaitu hanya sebesar 0,01 persen. Walaupun pertumbuhan pada periode ini paling lambat dibandingkan dengan 34 provinsi lainnya namun sejak tahun 2017

status IPM DKI Jakarta telah masuk ke level "Sangat Tinggi" yaitu status IPM dengan passing grade sebesar 81,11. Angka ini jauh diatas IPM Nasional yang sebesar 72,29. Secara umum, pembangunan manusia di DKI Jakarta telah meningkat 4,8 poin yaitu dari 76,31 menjadi 81,11 dalam kurun waktu 12 tahun terakhir.

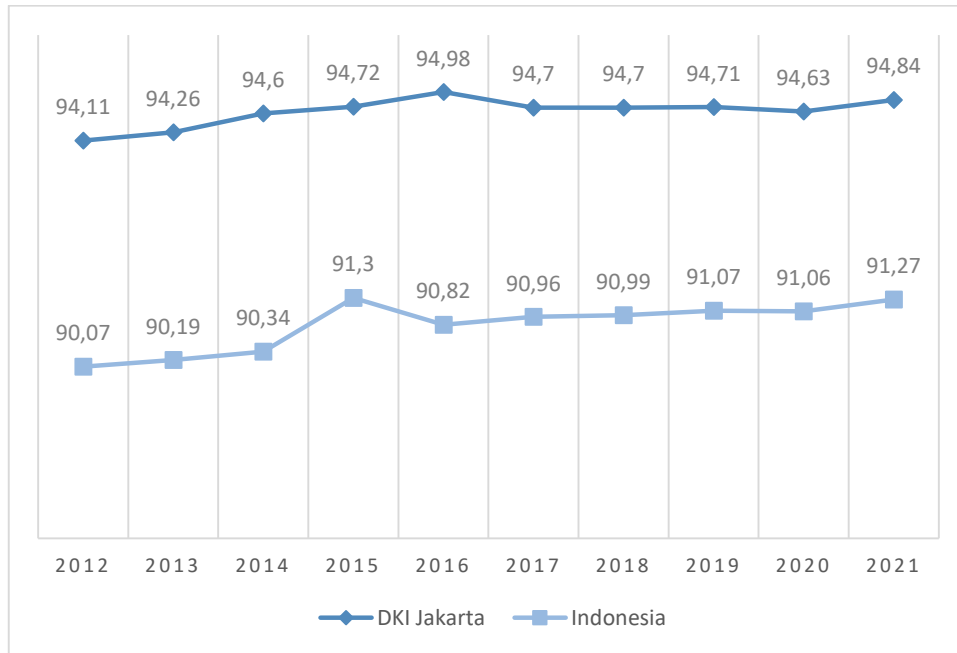
Indeks Pembangunan Gender

Indeks Pembangunan Gender (IPG) adalah indeks pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia yang sama seperti IPM, hanya saja data yang ada dipilah antara laki-laki dan perempuan. IPG digunakan untuk mengetahui kesenjangan pembangunan

manusia antara laki-laki dan perempuan. Secara umum, sejak tahun 2010 hingga tahun 2021, IPG DKI Jakarta terus mengalami peningkatan. Hal tersebut menunjukkan perbaikan kesetaraan gender dalam indikator-indikator pembentuk IPM.

GAMBAR 2.19

Indeks Pembangunan Gender Provinsi DKI Jakarta dan Indonesia Tahun 2012-2021



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta. "Jakarta Dalam Angka, 2022"

Angka Melek Huruf

Angka Melek Huruf (AMH) adalah proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis dalam huruf latin atau lainnya. Perkembangan Angka Melek Huruf Provinsi DKI Jakarta dan perkembangan Angka Melek Huruf Nasional dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Dari gambar di bawah dapat diketahui bahwa capaian Angka Melek Huruf Provinsi DKI Jakarta tahun 2015 hingga 2021 telah melampaui capaian Nasional. Perkembangan Angka Melek Huruf DKI Jakarta selama kurun waktu 2015-2021 selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya. Meskipun demikian, capaian Angka Melek Huruf tersebut masih belum mencapai target MDG's, yakni 100% pada tahun 2015.

GAMBAR 2.20

Angka Melek Huruf DKI Jakarta dan Indonesia Tahun 2015-2021



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta. "Jakarta Dalam Angka, 2022"

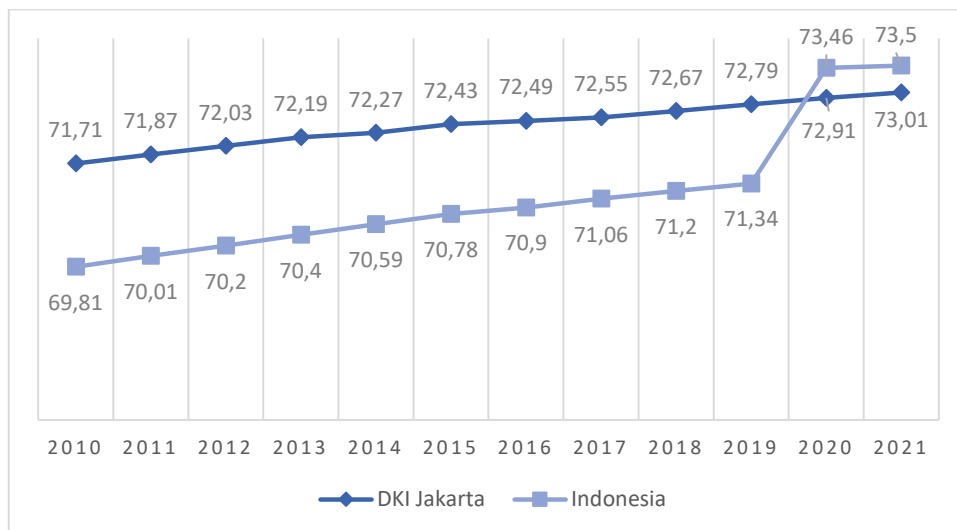
Usia Harapan Hidup

Angka usia harapan hidup penduduk di Provinsi DKI Jakarta dalam kurun waktu 2010 hingga 2021 telah melampaui angka usia harapan hidup nasional. Namun pada tahun 2020 dan 2021 angka usia harapan hidup di DKI Jakarta berada di bawah usia harapan hidup nasional yaitu 72,91 dan 73,01, sedangkan angka usia harapan hidup nasional pada tahun 2020 sebesar 73,46 dan

tahun 2021 sebesar 73,5 tahun. Adapun angka harapan hidup standar nasional adalah 71 tahun (WHO, 2014). Hal ini bermakna kesehatan penduduk di DKI Jakarta telah melampaui standar nasional. Lebih lanjut, perkembangan usia harapan hidup di DKI Jakarta tahun 2010-2021 dapat disimak dalam gambar di bawah ini.

GAMBAR 2.21

Perkembangan Angka Usia Harapan Hidup DKI Jakarta dan Nasional Tahun 2010-2021



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta. "Jakarta Dalam Angka, 2022"

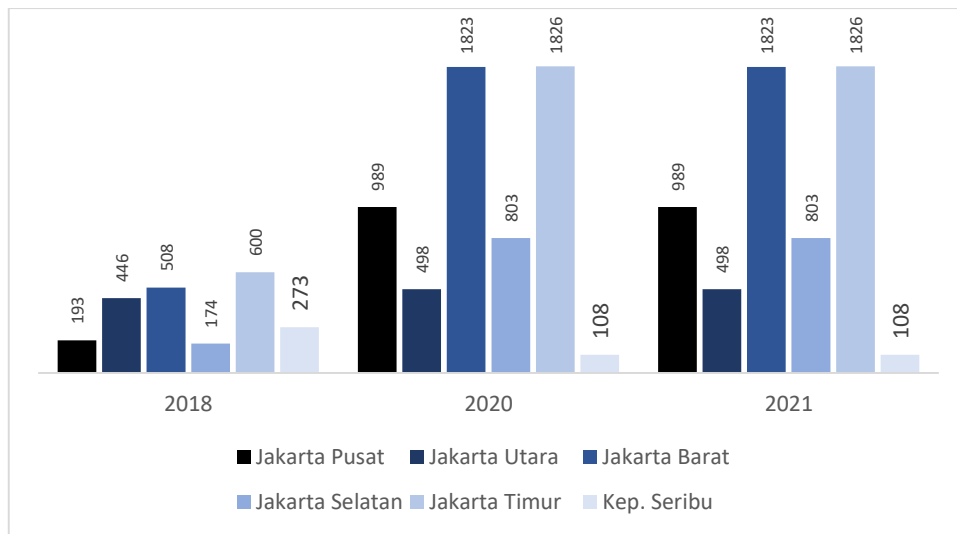
Balita dengan Gizi Buruk

Upaya kesehatan anak yang dilakukan bertujuan untuk menekan angka kematian pada bayi baru lahir, bayi dan balita. Upaya tersebut juga dilakukan untuk menjamin keoptimalan tumbuh kembang anak serta terjaminnya pemenuhan hak kesehatan anak. Data yang dikeluarkan oleh BPS Provinsi DKI Jakarta menunjukkan pelonjakan angka balitadengann gizi buruk dalam kurun waktu

tahun 2018 hingga tahun 2021. Dapat dilihat pada gambar di bawah, Kota Administrasi Jakarta Timur memiliki angka balita dengan gizi buruk yang tertinggi yaitu sebesar 1826 balita pada tahun 2020 dan 2021. Perkembangan jumlah balita dengan gizi buruk di DKI Jakarta tahun 2018-2021 dapat disimak dalam gambar di bawah ini.

GAMBAR 2.22

Jumlah Kasus Balita Kekurangan Gizi di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018-2021



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta. "Jakarta Dalam Angka, 2022"

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Kondisi ketenagakerjaan Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2021 menunjukkan adanya penurunan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) bila dibandingkan dengan kondisi 5 tahun sebelumnya. Pada tahun 2016 sampai dengan 2021, secara garis besar, TPAK di DKI Jakarta mengalami tren penurunan. Pada

Tahun 2016, TPAK DKI Jakarta sebesar 66,91%. Pada tahun 2021 mengalami penurunan menjadi sebesar 62,63%. Artinya, dari 100 orang penduduk berusia 15 tahun ke atas, sebanyak 63 orang diantaranya memasuki pasar lapangan kerja di tahun 2021.

TABEL 2.5

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi DKI Jakarta 2016-2021

No.	Uraian	Tahun					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Angkatan Kerja (ribu orang)	5.178,84	4.856,12	5.041,62	5.189,27	5.232,03	5.177,31
1.1	Bekerja (ribu orang)	4.861,83	4.509,17	4.726,78	4.678,83	4.659,251	4.737,42
1.2	Menganggur (ribu orang)	317,01	346,95	314,84	510,43	572,78	439,90

No.	Uraian	Tahun					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
2.	Bukan Angkatan Kerja (ribu orang)	2.561,05	2.980,29	2.842,40	2.387,83	2.967,66	3.089,04
3.	Penduduk Usia 15 tahun keatas (ribu orang)	7.739,89	7.836,40	7.884,02	7.577,11	8.199,69	8.266,356
4.	TPAK	66,91	61,97	63,95	68,48	63,81	62,63
5.	TPT	6,12	7,14	6,24	6,22	10,94	8,50
6.	Rasio Penduduk Bekerja	93,88	92,86	93,76	90,16	89,05	92,58

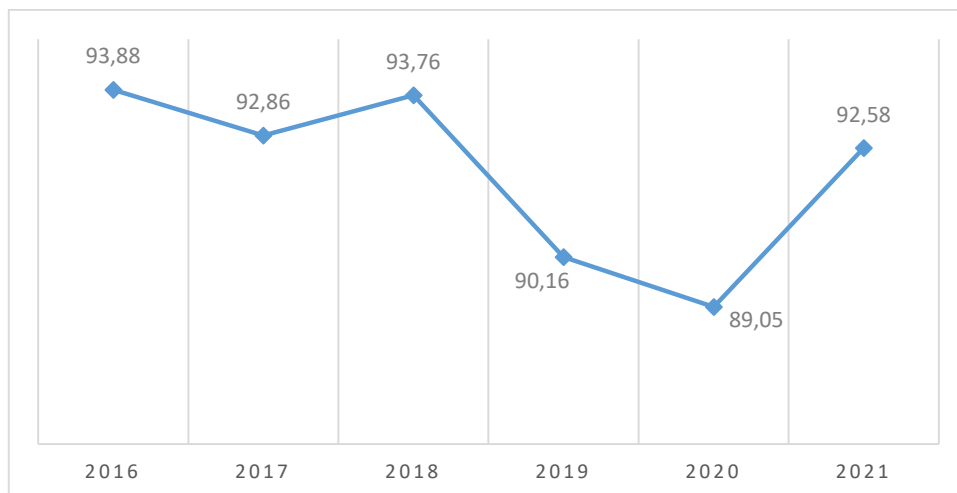
Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta. "Jakarta Dalam Angka, 2022"

Rasio angkatan kerja yang bekerja di Provinsi DKI Jakarta sejak tahun 2016 hingga tahun 2019 memiliki tren meningkat. Namun sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 terjadi penurunan rasio penduduk dari angkatan kerja yang bekerja dan meningkat lagi pada tahun 2021 Data tenaga kerja menunjukkan bahwa pada tahun 2016 sebesar 93,88 persen dari angkatan kerja yang ada memperoleh pekerjaan, atau dengan kata lain terdapat 6,12 persen angkatan kerja yang tidak memperoleh pekerjaan atau menganggur. Angkatan kerja yang memperoleh pekerjaan di Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2017 sebesar 92,86 persen sedangkan angkatan kerja yang tidak memperoleh pekerjaan atau menganggur

sebanyak 7.14 persen. Sampai dengan tahun 2018, jumlah angkatan kerja yang memperoleh pekerjaan masih meningkat pada level 93,76 persen dengan jumlah angkatan kerja yang menganggur sebesar 6,24 persen. Namun, pada tahun 2019, rasio angkatan kerja yang bekerja mengalami penurunan seiring dengan penurunan pertumbuhan ekonomi pada tahun ini yaitu pada level 90,16 persen dan angkatan kerja yang menganggur sebesar 6.22 persen. Kondisi ini diperparah oleh pandemic Covid-19 yang membuat angka rasio penduduk bekerja menurun hingga level 89,05 persen. Namun pada tahun 2021 angka ini meningkat kembali hingga 92,58 persen.

GAMBAR 2.23

Rasio Penduduk yang Bekerja di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2016-2021 (Persentase)



Sumber: Jakarta Dalam Angka, 2017-2022

Gambaran struktur ketenagakerjaan tahun 2021 di DKI Jakarta menurut kabupaten/kota administrasi cukup bervariasi. Pada tahun

2021, angkatan kerja terbanyak terdapat di Kota Jakarta Timur sebanyak 1.370.294 orang, disusul Kota Jakarta Barat sebanyak

1.298.775 orang, Kota Jakarta Selatan sebanyak 1.101.337 orang, Kota Jakarta Utara sebanyak 937.413 orang dan Kota Jakarta Pusat sebanyak 457.669 orang. Sementara itu, jumlah angkatan kerja yang paling rendah terdapat di Kabupaten Kepulauan Seribu sebanyak 11.826 orang. Sejalan dengan jumlah angkatan kerja, penduduk bekerja terbanyak terdapat di Kota Jakarta Timur sebesar 1.257.540 orang, disusul Kota Jakarta Barat sebesar 1.181.095 orang, Kota Jakarta Selatan sebesar 1.020.587 orang, Kota Jakarta Utara sebesar 845.194 orang dan Kota Jakarta Pusat sebesar 422.188 orang. Sedangkan, jumlah penduduk bekerja yang paling sedikit terdapat di Kabupaten Kepulauan Seribu sebanyak 10.811 orang.

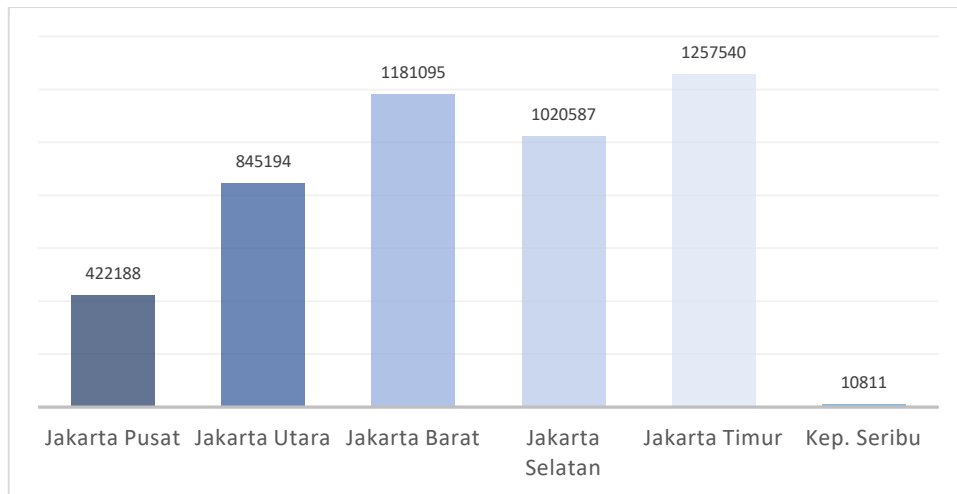
TPAK tertinggi terdapat di Kota Jakarta Utara yaitu 65,79 persen, angka tersebut di atas

TPAK DKI Jakarta yang sebesar 62,63 persen. TPAK tertinggi selanjutnya terdapat di Kabupaten Kepulauan Seribu yaitu 65,45 persen, Kota Jakarta Barat sebesar 63,21 persen, Kota Jakarta Pusat sebesar 63,17 persen dan Kota Jakarta Selatan sebesar 61,44 persen. Sementara TPAK terendah terdapat di Kota Jakarta Timur sebesar 60,85 persen.

TPT tertinggi terdapat di Kota Jakarta Utara mencapai 9,84 persen. Urutan kedua terdapat di Kota Jakarta Barat sebesar 9,06 persen. Sedangkan TPT terendah terdapat di Kota Jakarta Selatan sebesar 7,33 persen. Wilayah yang mempunyai TPT lebih besar dari TPT DKI Jakarta adalah Kota Jakarta Barat, Kota Jakarta Utara dan Kabupaten Kepulauan Seribu, Sementara wilayah lainnya mempunyai TPT di bawah TPT DKI Jakarta.

GAMBAR 2.24

Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja menurut Kabupaten/Kota, 2021



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta, 2022, diolah

TABEL 2.6

Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja menurut Jenis Kegiatan Utama dan Kabupaten/Kota, 2021

Kabupaten/Kota	Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas	Angkatan Kerja	TPAK (%)	Bekerja	Pengangguran	TPT (%)
Kep. Seribu	18068	11826	65,45	10811	1015	8,58
Jakarta Selatan	1792484	1101337	61,44	1020587	80750	7,33
Jakarta Timur	2251875	1370294	60,85	1257540	112754	8,23
Jakarta Pusat	724551	457669	63,17	422188	35481	7,75
Jakarta Barat	2054557	1298775	63,21	1181095	117680	9,06

Kabupaten/Kota	Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas	Angkatan Kerja	TPAK (%)	Bekerja	Pengangguran	TPT (%)
Jakarta Utara	1424821	937413	65,79	845194	92219	9,84
DKI Jakarta	8266356	5177314	62,63	4737415	439899	8,50

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta. "Jakarta Dalam Angka, 2022"

Aspek Pelayanan Umum Pendidikan

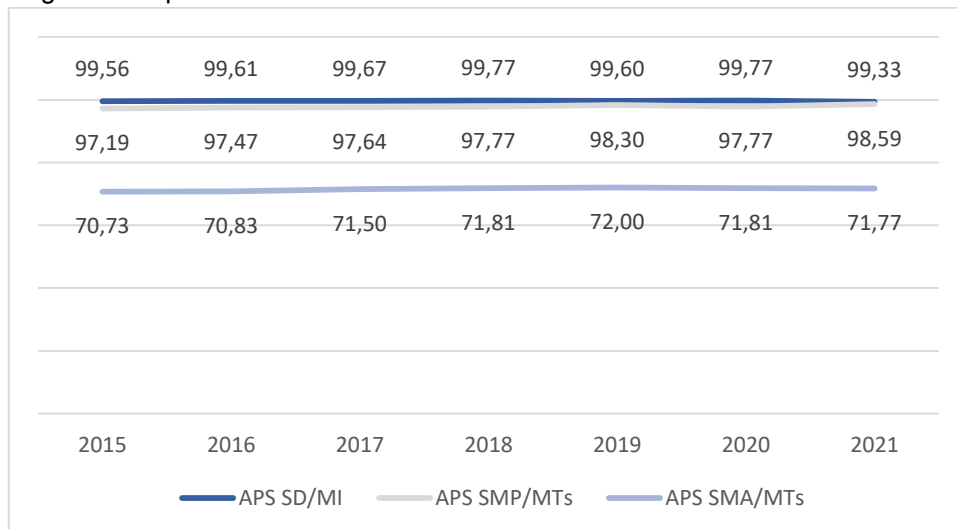
Pendidikan menjadi salah satu unsur penting dalam proses pembangunan. Pendidikan yang berkualitas dapat membentuk SDM yang memiliki pengetahuan dan keterampilan yang mampu menciptakan kondisi yang kondusif bagi pembangunan. Karena pentingnya kontribusi pendidikan terhadap pembangunan, Pemprov. DKI Jakarta sangat serius mengatur hal tersebut mulai dari mencantulkannya sebagai program prioritas dalam RPJMD DKI Jakarta tahun 2017 -2022 hingga berbagai kebijakan inovatif seperti Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus, peningkatan kualitas laboratorium dan perpustakaan serta training bagi tenaga pendidik. Dalam penyelenggaraan Pendidikan di Provinsi DKI Jakarta, pendidikan diarahkan pada perluasan dan pemerataan pendidikan. Hal tersebut diketahui melalui indikator-indikator yang digunakan untuk mengukur perluasan dan pemerataan pendidikan seperti: persentase angka partisipasi sekolah; persentase angka

partisipasi murni; rata-rata lama sekolah; angka melek huruf, rasio guru dan murid serta jumlah sekolah dan jumlah murid.

Persentase angka partisipasi sekolah menggambarkan proporsi dari semua anak yang masih sekolah pada suatu kelompok umur tertentu terhadap penduduk dengan kelompok umur yang sesuai. Perhitungan tersebut sejak tahun 2009 memperhitungkan pula pendidikan non formal (Paket A, Paket B, dan Paket C). Semakin tinggi angka partisipasi sekolah menggambarkan terbukanya peluang yang lebih besar dalam mengakses pendidikan secara umum. Pada kelompok umur mana peluang tersebut terjadi dapat dilihat dari besarnya angka partisipasi sekolah pada setiap kelompok umur. Berikut persentase angka partisipasi sekolah di Provinsi DKI Jakarta kurun waktu 2015 sampai dengan 2021.

GAMBAR 2.25

Angka Partisipasi Sekolah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2015-2021



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta. "Jakarta Dalam Angka, 2022"

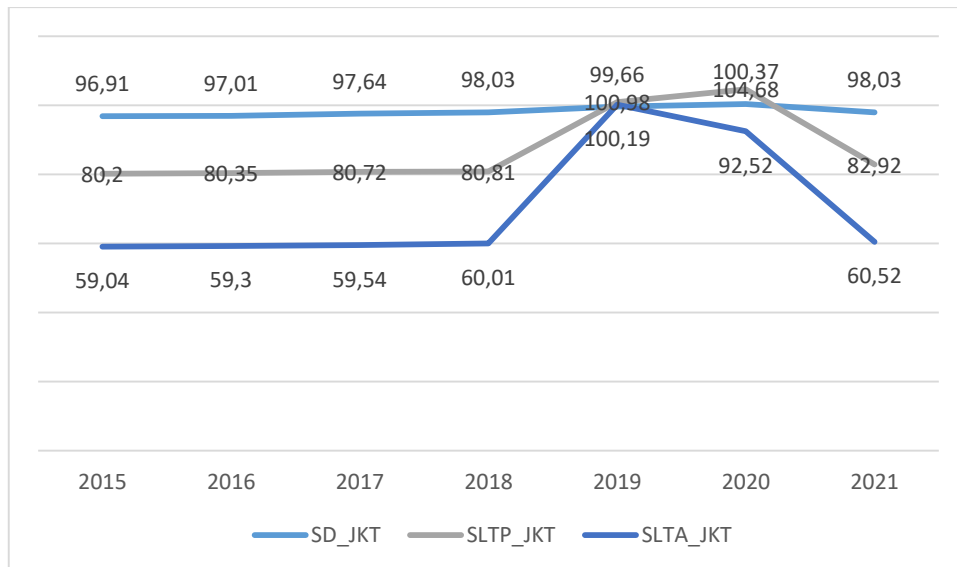
Berdasarkan gambar di atas, persentase angka partisipasi sekolah pada suatu kelompok umur tertentu di Provinsi DKI Jakarta masih sangat baik pada jenjang pendidikan SD/MI dan SMP/MTs. Walau belum mencapai 100 persen seluruhnya namun angka tertinggi pada angka partisipasi sekolah dasar (SD/MI) pada tahun 2018 dan tahun 2020 yaitu sebesar 99,77 persen dan angka partisipasi sekolah menengah pertama (SMP/MTs) pada tahun 2021 yaitu sebesar 98,59 persen, mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan tahun 2020 yang sebesar 97,77 persen. Sementara itu, persentase angka partisipasi sekolah menengah atas (SMA/SMK/MA) mengalami peningkatan cukup signifikan dari 70,73 persen pada tahun 2015, meningkat menjadi 72,00 persen pada tahun 2019 dan kemudian

mengalami penurunan pada tahun 2020 dan peningkatan kembali pada tahun 2021 namun masih di bawah tahun 2019 yaitu sebesar 71,77 persen.

Indikator lain untuk mengukur kualitas pendidikan yaitu menggunakan APM. Persentase Angka Partisipasi Murni (APM) adalah persentase jumlah anak pada kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan usianya terhadap jumlah seluruh anak pada kelompok usia sekolah yang bersangkutan. Persentase Angka Partisipasi Murni (APM) digunakan untuk mengukur proporsi anak yang bersekolah tepat waktu. Perkembangan APM di Provinsi DKI Jakarta disajikan pada gambar di bawah ini.

GAMBAR 2.26

Perkembangan Angka Partisipasi Murni di DKI Jakarta Tahun 2015-2021



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta. "Jakarta Dalam Angka, 2022"

APM SD/MI mengalami peningkatan dari tahun 2015 sebesar 96,91 persen menjadi 98,03 persen di tahun 2021. Sedangkan APM SMP/MTs pada tahun 2015 tercatat sebesar 80,2 persen, kemudian mengalami peningkatan menjadi 82,92 persen di tahun 2021. Untuk APM SMA/SMK/MA selama tahun 2015 hingga tahun 2021 juga mengalami peningkatan dari yang sebelumnya 59,04 persen menjadi 60,52 persen. Fenomena yang terjadi pada tahun

2019 dan 2020 yaitu angka yang tercatat melebihi 100% mengindikasikan bahwa terdapat siswa yang bukan merupakan penduduk DKI Jakarta namun bersekolah di DKI Jakarta.

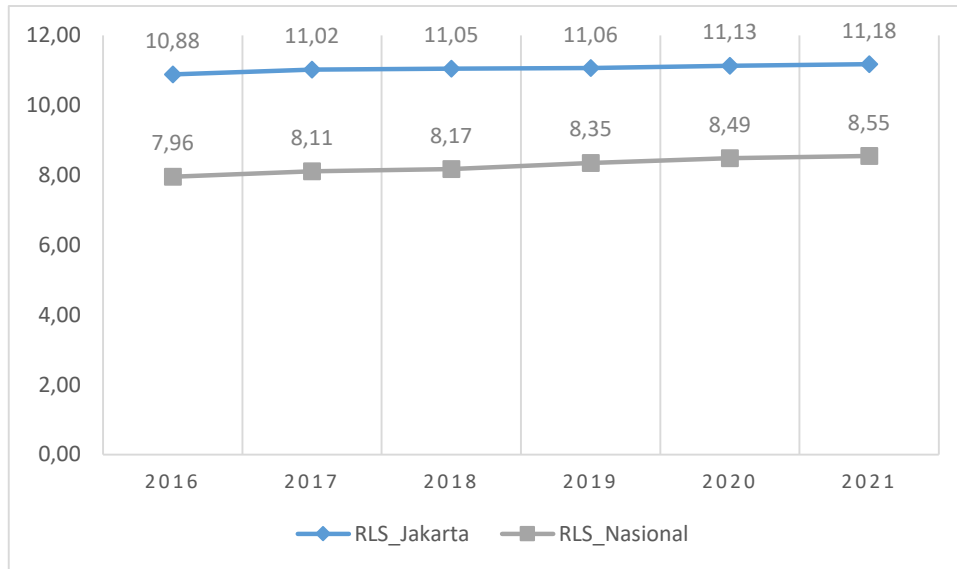
Rata-rata lama sekolah menggambarkan jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk usia 15 tahun keatas dalam menjalani pendidikan formal. Berdasarkan gambar di bawah Rata-rata Lama Sekolah di DKI

Jakarta Tahun 2016-2021 telah melampaui capaian nasional. Pada tahun 2021 Rata-Rata Lama Sekolah nasional mencapai 8,55 tahun atau masih setara dengan kelas IX, sedangkan Rata-Rata Lama Sekolah di DKI

Jakarta mencapai 11,18 tahun atau setara dengan kelas XI. Perkembangan Rata-rata Lama Sekolah di Provinsi DKI Jakarta dan Nasional dapat dilihat pada gambar berikut:

GAMBAR 2.27

Perkembangan Rata-Rata Lama Sekolah DKI Jakarta dan Nasional Tahun 2016-2021



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta. "Jakarta Dalam Angka, 2022"

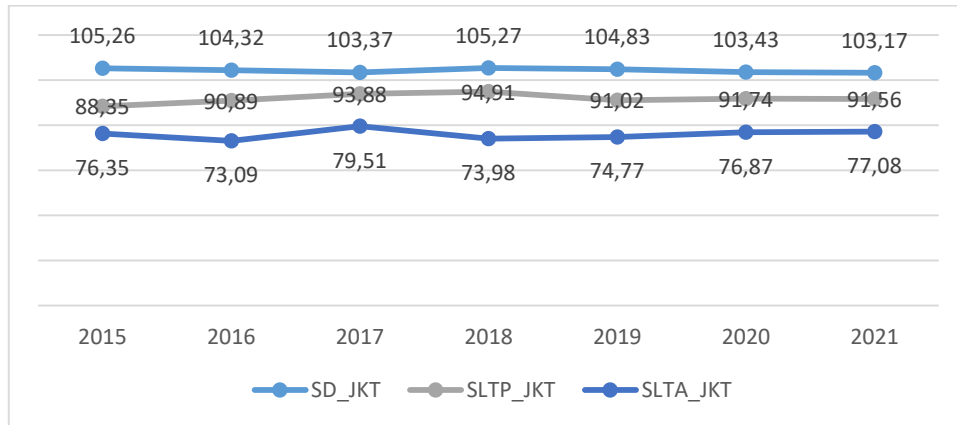
Partisipasi Kasar (APK) adalah persentase jumlah penduduk yang sedang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan (berapapun usianya) terhadap jumlah penduduk usia sekolah yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut. APK menunjukkan partisipasi penduduk yang sedang mengenyam pendidikan sesuai dengan jenjang pendidikannya. APK adalah salah satu ukuran yang menjadi tolak ukur keberhasilan program pembangunan pendidikan yang diselenggarakan dalam rangka memperluas kesempatan bagi penduduk untuk mengenyam pendidikan. APK merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan. Nilai APK bisa lebih dari 100 persen karena populasi murid yang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan mencakup anak berusia di luar batas usia sekolah pada jenjang pendidikan yang bersangkutan. Gambar di bawah menyajikan

perkembangan SD/MI, SMP/MTs dan APK SMA/SMK/MA di DKI Jakarta tahun 2015-2021.

Dari grafik di bawah dapat diketahui bahwa APK SD/MI di DKI Jakarta sejak tahun 2015 sampai dengan 2021 telah melebihi 100 persen. Pada tahun 2015 terdapat 5,26 persen murid SD/MI yang tidak berusia 7-12, pada tahun 2016 terdapat 4,32 persen murid SD/MI yang tidak berusia 7-12, pada tahun 2017 terdapat 3,37 persen murid SD/MI yang tidak berusia 7-12, pada tahun 2018 terdapat 5,27 persen murid SD/MI yang tidak berusia 7-12, pada tahun 2019 terdapat 4,83 persen murid SD/MI yang tidak berusia 7-12, pada tahun 2020 terdapat 3,43 persen murid SD/MI yang tidak berusia 7-12 dan pada tahun 2021 terdapat 3,17 persen murid SD/MI yang tidak berusia 7-12 Hal ini dapat berarti adanya pengulangan kelas, penambahan murid dari daerah lain, atau adanya paket penyetaraan.

GAMBAR 2.28

Perkembangan Angka Partisipasi Kasar di DKI Jakarta Tahun 2015-2021 (dalam persen)



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta. "Jakarta Dalam Angka, 2022"

Secara umum, APK SMP/MTs cenderung berfluktuasi dan terjadi penurunan yang cukup signifikan pada tahun 2019 namun meningkat kembali hingga 91,56 persen pada tahun 2021.

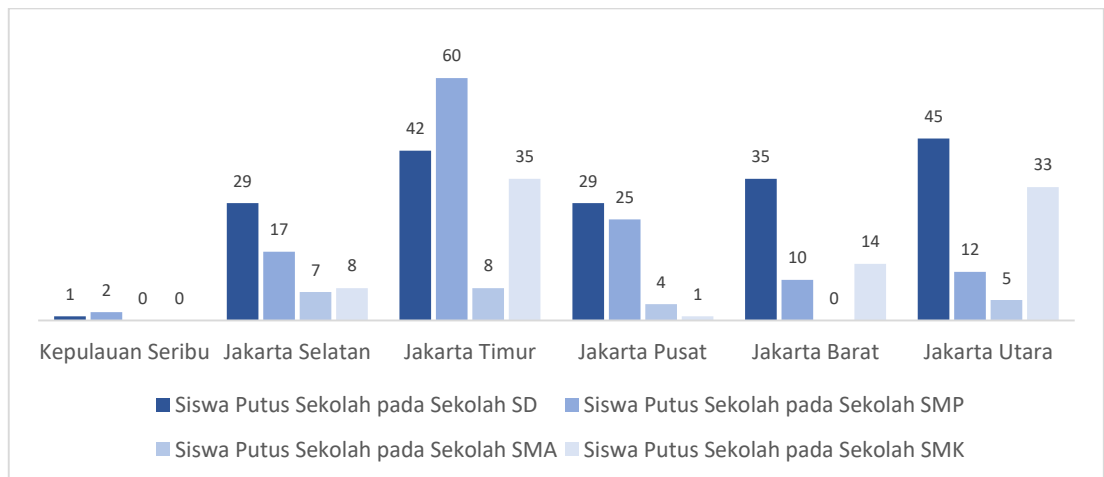
Tren APK siswa SMA/SMK/MA dari tahun 2015 sampai dengan 2019 cukup berfluktuasi namun setelahnya memiliki tren yang meningkat. Pada tahun 2015, APK SMA/SMK/MA sebesar 76,35 persen kemudian meningkat menjadi 77,08 persen pada tahun 2021. APK siswa SMA/SMK/MA tertinggi pada Tahun 2017 yaitu sebesar 79,51 persen dan APK siswa SMA/SMK/MA terendah pada Tahun 2016 yaitu sebesar 73,09.

Angka Putus Sekolah berfungsi untuk mengukur kemajuan pembangunan di bidang pendidikan dan untuk melihat keterjangkauan pendidikan maupun pemerataan pendidikan pada masing-masing kelompok umur (7-12; 13-15; dan 16-18 tahun).

Pada gambar di bawah dapat dilihat bahwa siswa putus sekolah pada sekolah SMA cenderung memiliki jumlah yang paling kecil dibanding jenjang sekolah lainnya pada setiap Kabupaten/Kota di DKI Jakarta. Secara umum, Kota Administrasi Jakarta Timur memiliki jumlah siswa putus sekolah paling tinggi dibandingkan dengan kota/kabupaten lain, namun hal tersebut juga dapat terjadi karena jumlah penduduk di wilayah Jakarta Timur memiliki penduduk yang lebih banyak dibanding kota/kabupaten lain.

GAMBAR 2.29

Persentase Angka Putus Sekolah Jenjang Pendidikan SD; SMP; SMA dan SMK Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021 Menurut Kabupaten/Kota Administrasi



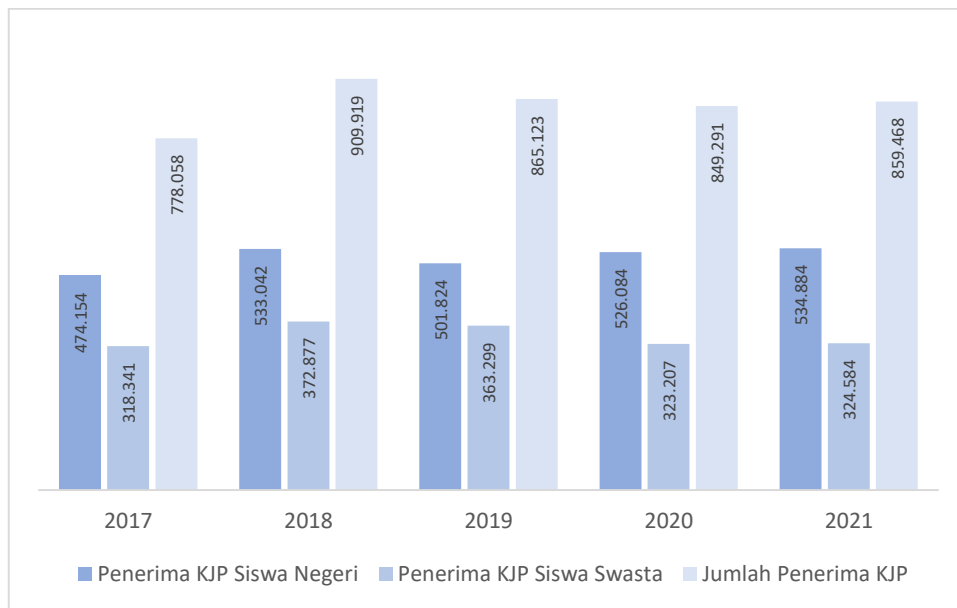
Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta. "Jakarta Dalam Angka, 2022"

KJP adalah program strategis untuk memberikan akses bagi warga DKI Jakarta dari kalangan masyarakat tidak mampu untuk mengenyam pendidikan minimal sampai dengan tamat SMA/SMK dengan dibiayai penuh dari dana APBD Provinsi DKI Jakarta. Siswa miskin adalah peserta didik pada jenjang satuan pendidikan sekolah dasar sampai dengan menengah yang secara personal dinyatakan tidak mampu baik secara materi maupun penghasilan orang tuanya yang tidak memadai untuk memenuhi kebutuhan dasar pendidikan. Kebutuhan dasar pendidikan yang dimaksud mencakup: seragam, sepatu, dan tas sekolah, biaya transportasi, makanan serta biaya ekstrakurikuler. Perkembangan jumlah penerima KJP dapat dilihat pada gambar berikut.

Secara umum, total jumlah siswa penerima KJP dari tahun 2015 mulai dari tingkat SD hingga SMA mengalami peningkatan walaupun agak menurun di tahun 2019. Pada Tahun 2015, total penerima KJP sebanyak 561,408 orang yang terus meningkat sampai dengan tahun 2019 yaitu sebanyak 905,919 orang dan sedikit mengalami penurunan pada tahun 2019 menjadi 876,593 orang. Proporsi siswa sekolah negeri yang menerima KJP pada tahun 2015 sebesar 58.46 persen. Jumlah ini mengalami peningkatan pada tahun 2019 menjadi 58.56 persen. Sementara proporsi siswa sekolah swasta yang menerima KJP pada periode tahun 2015 sampai dengan 2019 mengalami penurunan yaitu dari 41.54 persen menjadi 41.44 persen.

GAMBAR 2.30

Jumlah Penerima Kartu Jakarta Pintar Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2021



Sumber: Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, 2022

Kesehatan

Pemerintah mempunyai tanggung jawab untuk menjamin setiap warga negara memperoleh pelayanan kesehatan yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan. Sebagai suatu kebutuhan dasar, setiap individu bertanggungjawab untuk memenuhi kebutuhan hidup dirinya dan orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya, sehingga

pada dasarnya pemenuhan kebutuhan masyarakat terhadap kesehatan adalah tanggung jawab setiap warganegara. Mengingat kebutuhan warga negara terhadap barang/jasa kesehatan sangat vital dan dengan karakteristik barang/jasa kesehatan yang unik dan kompleks. Dalam rangka memberikan pelayanan kesehatan yang

terbaik bagi masyarakat DKI Jakarta, pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus memperbaiki dan menambah jumlah fasilitas kesehatan. Fasilitas kesehatan yang terus meningkat adalah rumah sakit, balai pengobatan umum, dan posyandu. Dalam periode 2017-2021, jumlah rumah sakit bertambah sebanyak 26 rumah sakit dari 187 rumah sakit menjadi 211 rumah sakit. Selain itu, jumlah posyandu sudah mencapai 4.469 posyandu yang tersebar di enam wilayah kabupaten/kota administrasi DKI Jakarta ada Tahun 2021.

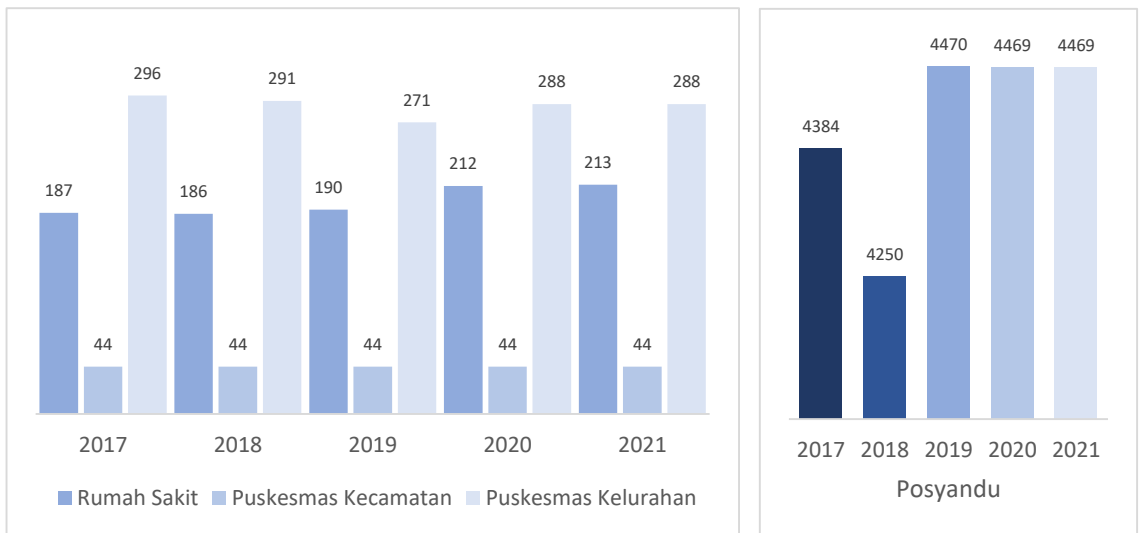
Sedangkan untuk puskesmas kecamatan jumlahnya sama dari tahun 2017, yakni

sebanyak 44 unit. Sementara itu, jumlah puskesmas kelurahan mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2018 dikarenakan beberapa puskesmas berubah status menjadi Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) kelas D.

Pembangunan RSUD kelas D dimaksudkan agar dapat memberikan pelayanan kesehatan rujukan pasien dari puskesmas yang lebih dekat dan cepat, sebelum pasien dirujuk ke Rumah Sakit Kelas C atau B. Berikut jumlah Fasilitas Kesehatan di DKI Jakarta tahun 2017 sampai dengan tahun 2021.

GAMBAR 2.31

Jumlah Fasilitas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta 2017-2021



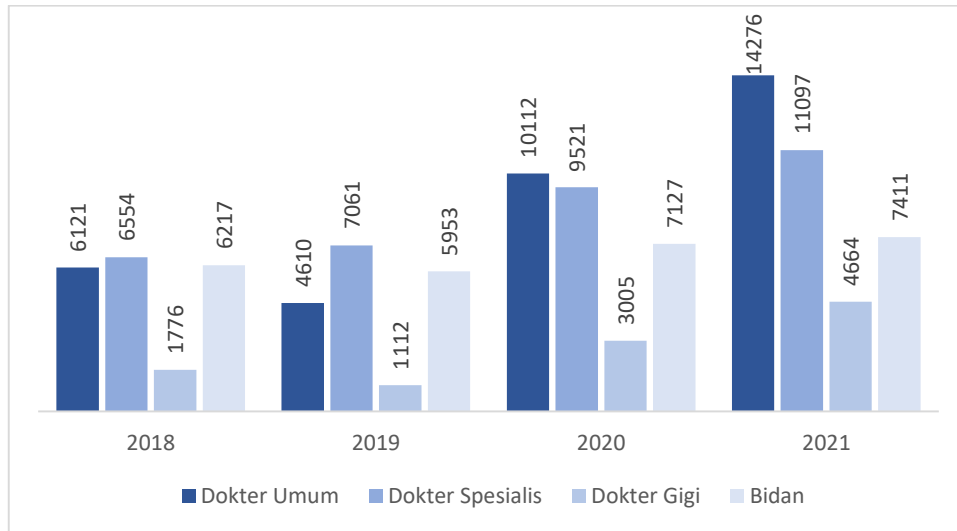
Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta. "Jakarta Dalam Angka, 2022"

Selain faskes yang memadai, tenaga kesehatan yang cukup dan berkualitas juga menjadi unsur penting dalam menentukan kualitas pelayanan kesehatan. Dapat di lihat pada gambar di bawah, jumlah tenaga kesehatan memiliki tren yang positif dari tahun 2018 hingga tahun 2021. Jumlah dokter umum yang ada di DKI Jakarta meningkat dari 6.121 pada tahun 2018 menjadi 14.276 dokter umum pada tahun 2021. Jumlah dokter spesialis juga meningkat dari 6.554 pada tahun

2018 menjadi 11.097 dokter pada tahun 2021. Dokter gigi yang sebelumnya berjumlah 1.776 pada tahun 2018 menjadi 4.664 dokter pada tahun 2021. Jumlah bidan juga meningkat dari 6.217 pada tahun 2018 menjadi 7.411 bidan pada tahun 2021. Penjabaran lengkap mengenai pertumbuhan jumlah tenaga kesehatan di Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2018 hingga 2021 dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

GAMBAR 2.32

Jumlah Tenaga Kesehatan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018-2021



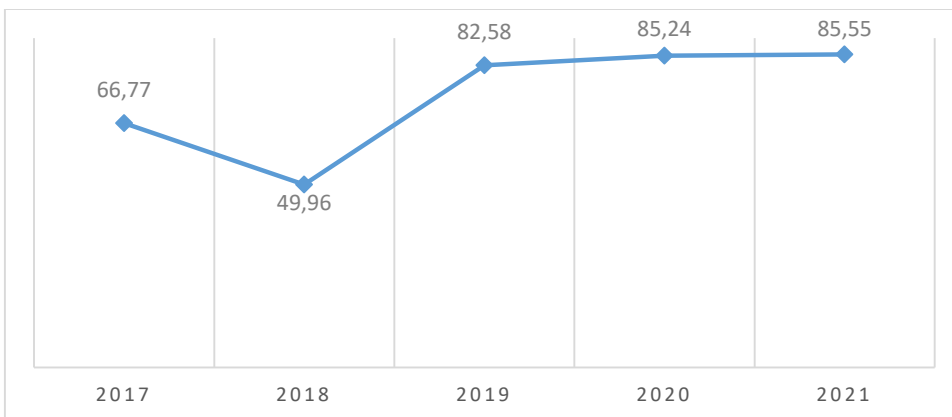
Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta. "Jakarta Dalam Angka, 2022"

Selain Jumlah Faskes fisik yang ada ditengah masyarakat, ada penunjang fasilitas Kesehatan yang dapat digunakan oleh masyarakat banyak adalah asuransi Kesehatan yang disediakan pemerintah yakni BPJS Kesehatan, Fokus utamanya adalah untuk Penerima Bantuan luran (PBI) yang merupakan peserta Jaminan Kesehatan bagi Fakir Miskin dan orang yang tidak mampu sebagaimana diamanatkan Undang undang

Sistem Jaminan Sosial Nasional yang iurannya ditanggung Pemerintah sebagai Program Jaminan Kesehatan. Peserta PBI adalah warga fakir miskin yang telah ditetapkan Pemerintah dan diatur melalui Peraturan Pemerintah. Berikut Gambar besaran persentase penduduk yang memiliki BPJS Kesehatan Menurut Kabupaten/Kota di DKI Jakarta.

GAMBAR 2.33

Persentase Penduduk yang memiliki BPJS Kesehatan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2021



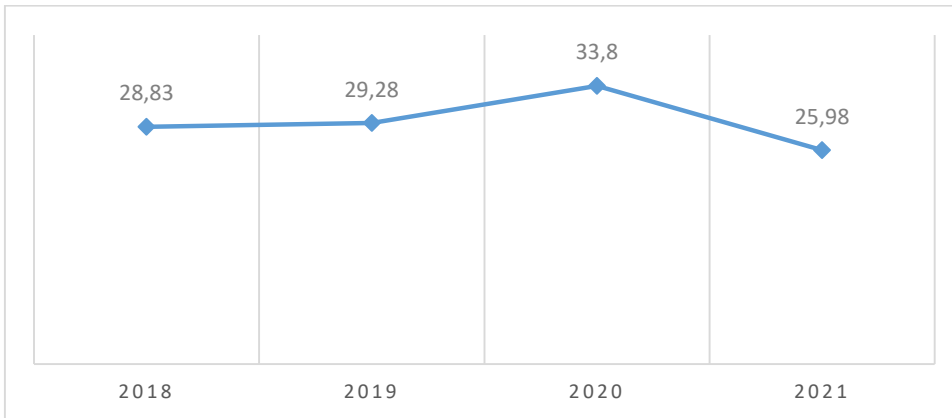
Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta. "Jakarta Dalam Angka, 2022"

Persentase Penduduk yang memiliki BPJS sejak tahun 2017 ke 2021 mengalami peningkatan yang signifikan semula sebesar 66,77 persen menjadi 85,55 persen di tahun 2021. Indikator lain untuk melihat derajat kesehatan penduduk adalah persentase

penduduk yang mengalami keluhan Kesehatan. Pada tahun 2021, persentase masyarakat yang memiliki keluhan kesehatan menurun yaitu sebesar 28,83 persen pada tahun 2018 menjadi 25,98 persen pada tahun 2021.

GAMBAR 2.34

Persentase Penduduk yang Mempunyai Keluhan Kesehatan Selama Sebulan Terakhir



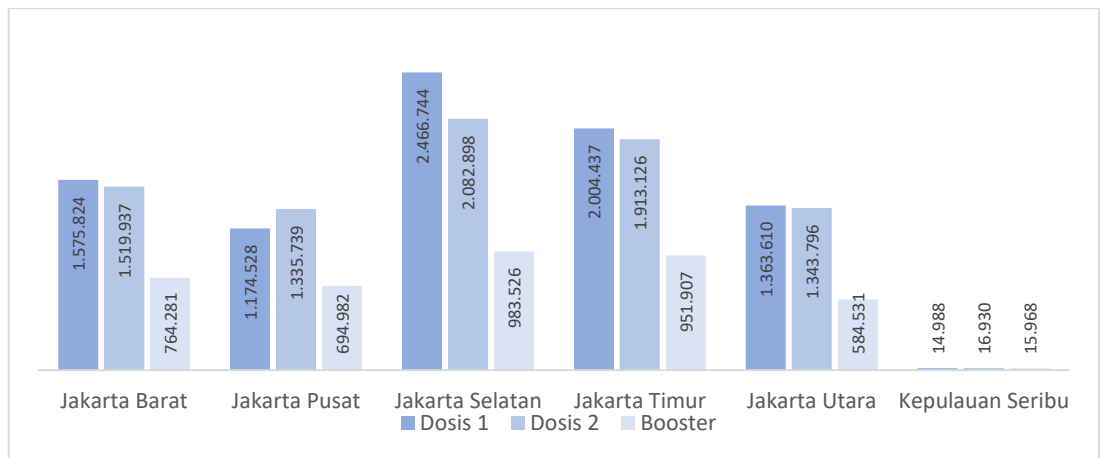
Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta. "Jakarta Dalam Angka, 2022"

Pandemi Covid-19 menuntut Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk bergerak dan responsif dalam melakukan tindakan pencegahan maupun penanggulangan. Ada tiga strategi utama yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yaitu, tes,

lacak dan pembatasan gerak. Dalam aspek pelayanan kesehatan, pemerintah mencanangkan program vaksinasi bagi masyarakat. Berikut ini akumulasi cakupan vaksinasi menurut kota/kabupaten per 22 Juni 2022 di Provinsi DKI Jakarta.

GAMBAR 2.35

Akumulasi Cakupan Vaksinasi Provinsi DKI Jakarta Menurut Kota/Kabupaten Per 22 Juni 2022



Sumber: corona.jakarta.go.id, 23 Juni 2022

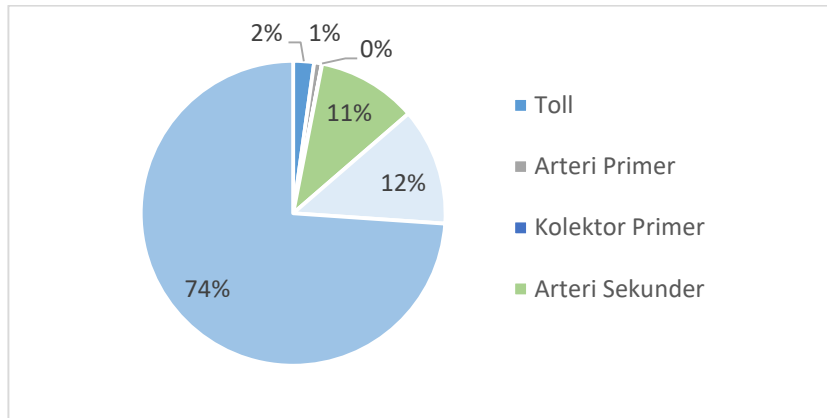
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Ruang lingkup urusan pekerjaan umum dan penataan ruang mencakup bina marga, cipta karya dan tata ruang, serta sumber daya air. Pekerjaan umum salah satu yang dapat dilihat dan dirasakan adalah akses jalan yang digunakan untuk mobilisasi masyarakat. Terdapat dua status jalan di Provinsi DKI Jakarta yakni Nasional dan Provinsi. Panjang jalan secara keseluruhan (nasional, provinsi, dan kabupaten/kota) di DKI Jakarta tidak

menunjukkan pertambahan yang signifikan, tahun 2019 terjadi penurunan panjang jalan Kota Administrasi sebesar 284 meter, sedangkan jenis jalan lainnya tidak mengalami perubahan (tetap). Hal tersebut dikarenakan lahan baru untuk jalan sudah tidak dapat dilakukan penambahan yang besar. Sebagaimana digambarkan pada gambar berikut.

GAMBAR 2.36

Panjang Jalan 2020



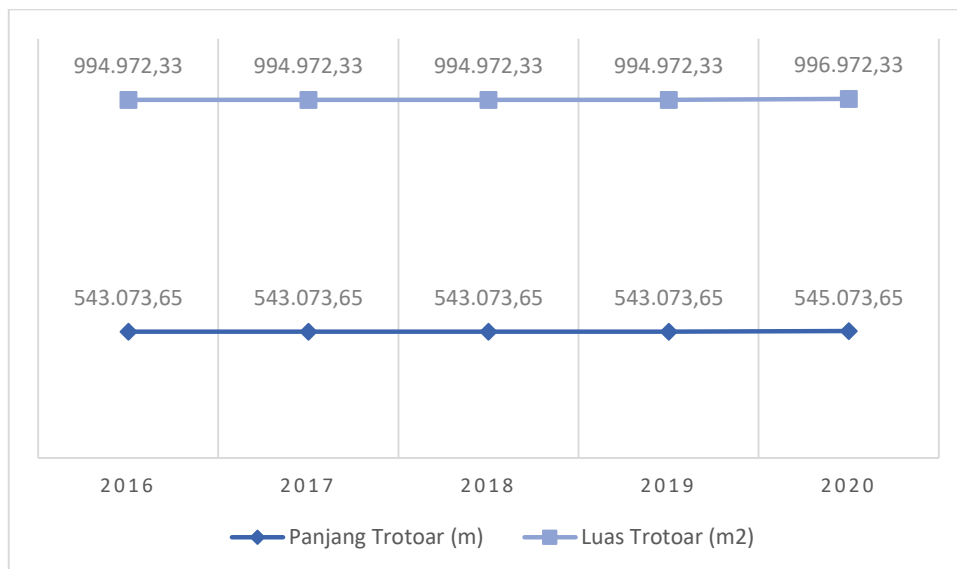
Sumber: Provinsi DKI Jakarta Dalam Angka Tahun 2021

Selain Panjang jalan, trotoar sebagai penunjang mobilitas masyarakat adalah bagian dari jalan raya yang khusus disediakan untuk pejalan kaki yang terletak didaerah manfaat jalan, yang diberi lapisan permukaan dengan elevasi yang lebih tinggi dari permukaan perkerasan jalan, dan pada

umumnya sejajar dengan jalur lalu lintas kendaraan. Panjang trotoar dari tahun 2016 sampai dengan 2019 tidak mengalami penambahan Panjang dan Luas. Sedangkan tahun 2020, ada penambahan panjang trotoar walaupun tidak signifikan.

GAMBAR 2.37

Panjang dan Luas Trotoar (m) 2016-2020



Sumber: Provinsi DKI Jakarta Dalam Angka Tahun 2021

Kinerja urusan pekerjaan umum dan penataan ruang dalam lingkup cipta karya dan tata ruang, bahwa perencanaan tata ruang di DKI Jakarta diwujudkan melalui Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), serta Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Peraturan Zonasi (PZ). Pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana di DKI Jakarta

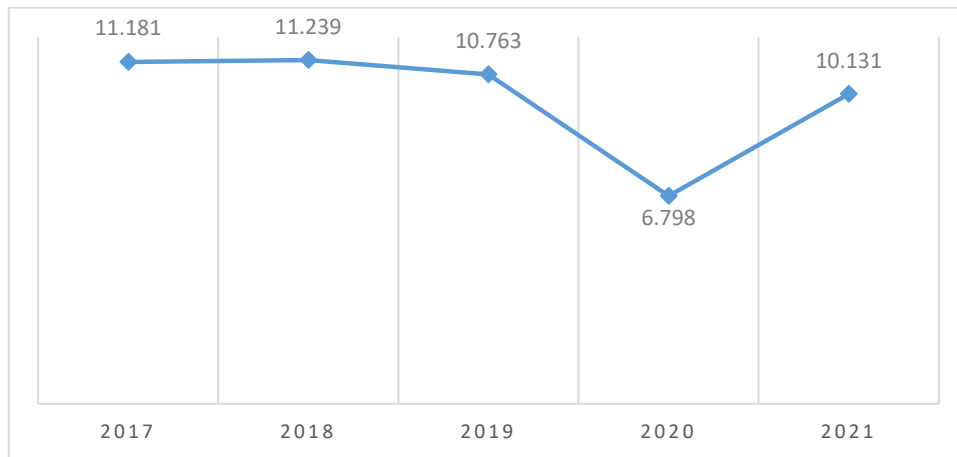
berdasarkan data tahun 2007 adalah sebesar 43 persen. Untuk mewujudkan tertib tata ruang dan konsistensi pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang yang ditetapkan, maka diperlukan pengendalian pemanfaatan ruang. Pengendalian pemanfaatan ruang antara lain diwujudkan melalui perizinan dan penerapan sanksi atau penindakan terhadap

pelanggaran bangunan. Jumlah Izin Mendirikan bangunan (IMB) tahun 2020 terjadi penurunan yang cukup signifikan dibandingkan tahun sebelumnya yaitu dari sebanyak 10.763 pada tahun 2019 menjadi 6,798 pada tahun 2020. Banyak faktor yang mempengaruhi fluktuatif jumlah IMB Bangunan salah satunya lahan untuk pembangunan baru yang sudah tidak tersedia serta penurunan kegiatan konstruksi pada masa pandemi. Namun pada tahun berikutnya yaitu tahun 2021 jumlah IMB kembali meningkat yaitu sebesar 10.131, angka tersebut pula belum mencapai level di tahun

sebelum tahun 2020. Walaupun demikian, hal tersebut tidak berkorelasi positif terhadap jumlah retribusi yang diperoleh. Artinya, retribusi sektor bangunan tidak mempengaruhi pendapatan retribusi secara keseluruhan. Dapat dilihat pada Gambar 2.38. Walaupun IMB kembali meningkat pada tahun 2021, namun retribusi daerah menurun sangat signifikan dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2020 retribusi tahunan yang diperoleh sebesar 197,85 miliar namun pada tahun 2021 menurun hingga 55,03 miliar. Penjelasan secara numerik dapat dilihat pada gambar dibawah ini.

GAMBAR 2.38

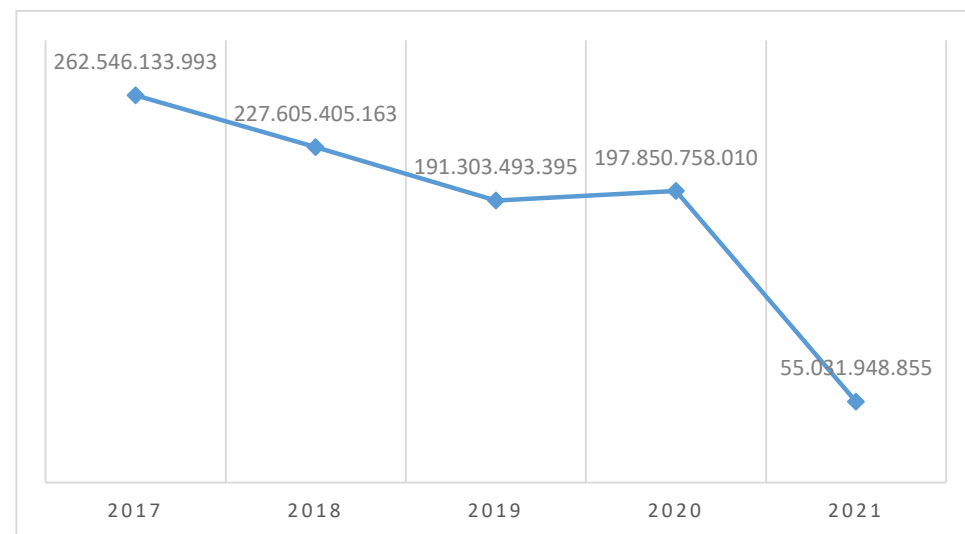
Jumlah IMB Bangunan Tahun 2017-2021



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta. "Jakarta Dalam Angka, 2022"

GAMBAR 2.39

Jumlah Retribusi Tahun 2017-2021



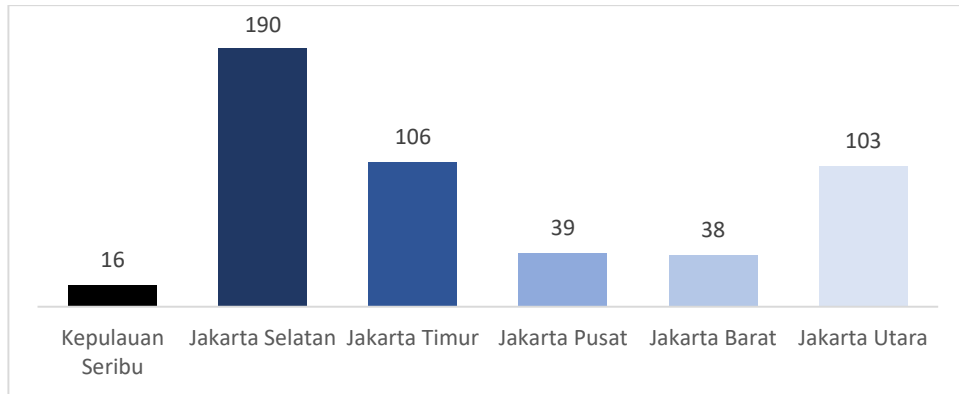
Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta. "Jakarta Dalam Angka, 2022"

Penataan ruang yang baik tidak terlepas dari kebersihan dan keindahan pembangunan yang dirasakan oleh masyarakatnya. Salah satu indikator kebersihan yakni tata kelola sampah di perkotaan, tahun 2021 DKI Jakarta memiliki sebanyak 492 jumlah fasilitas Tempat Pembuangan Sampah (TPS)

Sementara di 6 wilayah. Wilayah dengan TPS Sementara terbanyak adalah Jakarta Selatan dengan jumlah 190 lokasi, sedangkan untuk kepulauan seribu memiliki paling sedikit Tempat Pembuangan Sementara Sementara yaitu sebanyak 16 lokasi. Lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut:

GAMBAR 2.40

Jumlah Fasilitas Tempat Sampah Sementara Tahun 2021



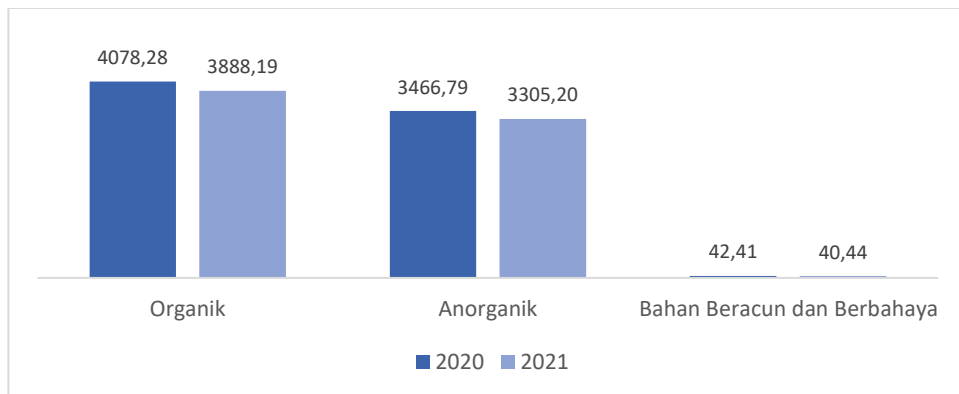
Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta. "Jakarta Dalam Angka, 2022"

Tempat Pembuangan Sampah Sementara harus diangkat setiap harinya untuk menghindari penumpukan sampah yang akan menghasilkan bibit penyakit, secara umum ada tiga jenis sampah yang dihasilkan di masyarakat yakni organik, anorganik dan bahan beracun berbahaya. Gambar dibawah memperlihatkan jumlah volume sampah per hari menurut jenisnya. Pada Tahun 2021 sampah organik menjadi yang terbanyak dihasilkan per harinya dengan jumlah 3.888,19 ton, menurun sebesar 4,66 persen dibandingkan tahun 2020. Bahan beracun dan

berbahaya juga mengalami penurunan dari tahun 2020 sebesar 42,41 ton menjadi 40,44 ton perhari atau menurun sebanyak 4,64 persen. Kondisi serupa juga terjadi untuk sampah anorganik, penurunan volume dari 3.466,79 ton perhari menjadi 3.305,2 atau menurun sebesar 4,66 persen pada tahun 2021. Secara umum volume sampah yang terangkut perhari pada tahun 2021 lebih rendah dibandingkan tahun 2020. Penjabaran lebih lanjut dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

GAMBAR 2.41

Volume Sampah yang Terangkut per Hari Menurut Jenis Sampah



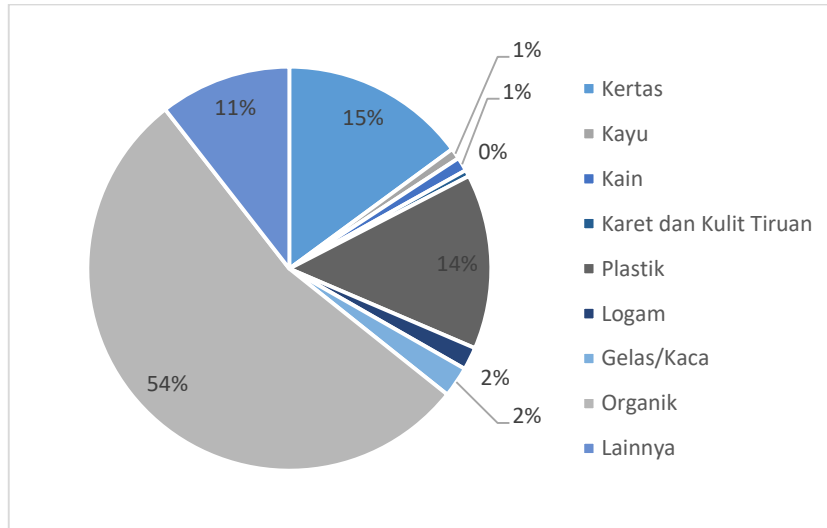
Sumber: BPS, "Jakarta Dalam Angka", 2022

Terdapat berbagai jenis sampah yang dihasilkan dari kegiatan sehari-hari, diantaranya dari perkantoran, industri, perdagangan atau rumah tangga. Sampah organik masih mendominasi dengan besaran

sebesar 53,75 persen lalu diikuti sampah kertas dengan nilai 14,92 persen dan plastik 14,02 persen. Berikut komposisi sampah menurut jenisnya pada Tahun 2021 yang dapat dilihat dari gambar berikut:

GAMBAR 2.42

Komposisi Sampah Menurut Jenis Sampah Tahun 2021



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta. "Jakarta Dalam Angka, 2022"

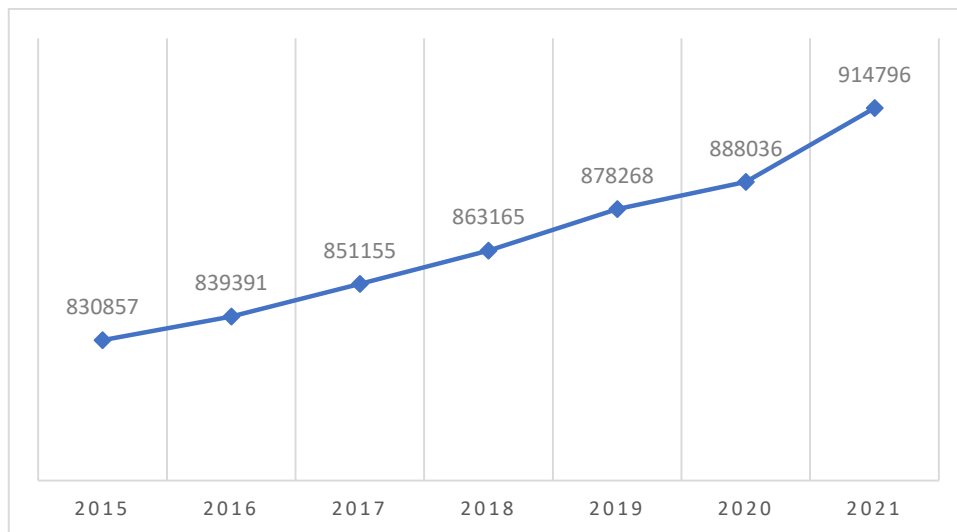
Terkait dengan sumber daya air dapat dijelaskan bahwa sumber air utama DKI Jakarta 97 persen berasal air baku luar Jakarta (Waduk Jatiluhur 81 persen) and Air Curah Olahan dari Tangerang (16 persen). Sementara itu, sumber air baku lokal hanya

sebesar 3 persen yang berasal dari Kali Krukut (Cilandak) dan Kali Pesanggrahan.

Kapasitas produksi maksimum perusahaan air bersih di DKI Jakarta yaitu PAM Jaya dan kubikasi air terjual digambarkan dalam gambar berikut:

GAMBAR 2.43

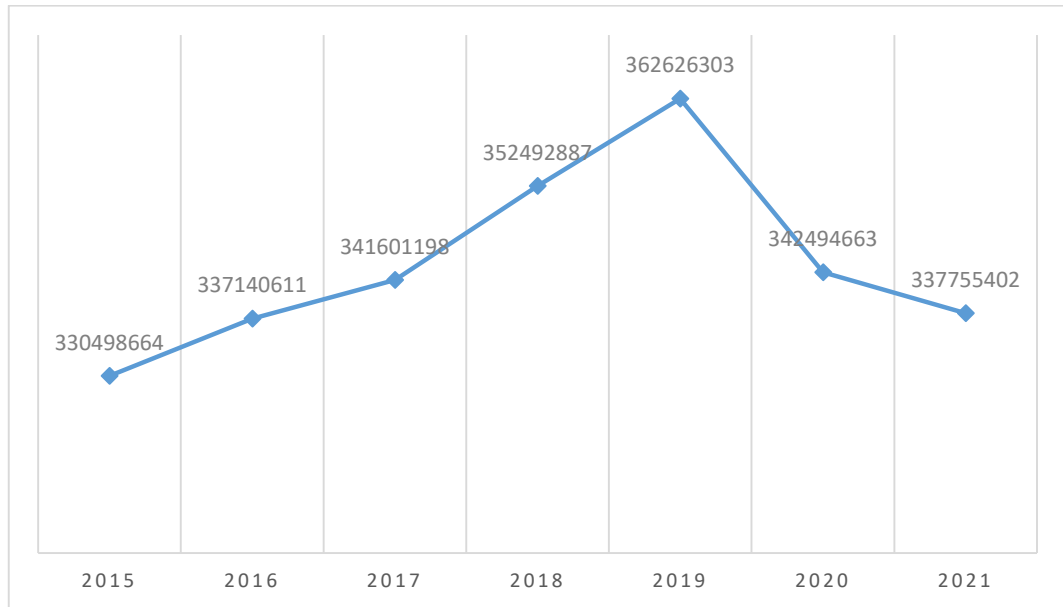
Cakupan Pelayanan Air Bersih Provinsi DKI Jakarta Tahun 2015-2021 (Jumlah Pelanggan)



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta. "Jakarta Dalam Angka, 2022"

GAMBAR 2.44

Cakupan Pelayanan Air Bersih Provinsi DKI Jakarta Tahun 2015-2021 [Kubikasi Air Terjual (m3)]



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta. "Jakarta Dalam Angka, 2022"

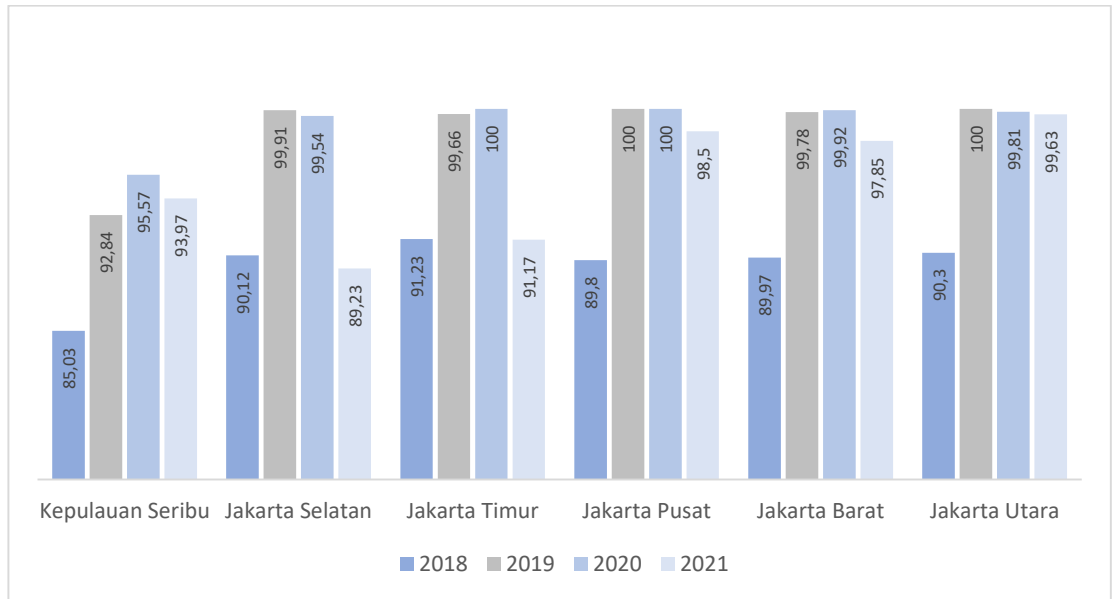
Dari gambar tersebut dapat dijelaskan bahwa jumlah pelanggan PAM Jaya pada tahun 2015 sebanyak 830.857 pelanggan, jumlah tersebut terus meningkat hingga pada tahun 2021 jumlah pelanggan PAM Jaya adalah sebanyak 914.796 pelanggan. Walaupun demikian, jumlah air yang terjual cenderung berfluktuasi antara tahun 2015 hingga tahun 2021. Pada tahun 2015 kubikasi air terjual adalah sebesar 330,5 juta m3 hingga pada tahun 2021 jumlah tersebut menjadi 337,75 juta m3. Badan regulator PAM Jaya merilis bahwa Jakarta akan membutuhkan air sekitar 28.000 liter per detik pada tahun 2022. Namun demikian masih ada kendala kebocoran volume air (non-revenue water) yang akan berdampak pada penurunan kualitas, kuantitas dan kontinuitas distribusi air kepada pelanggan resmi. Langkah yang sudah dilakukan untuk mengurangi kebocoran air antara lain: penggantian pipa-pipa air yang sudah tua, menggantikan water meter yang rusak, serta meningkatkan kemampuan

kapasitas air dan administrasi serta menindak tegas pelaku pencurian air.

Air bersih merupakan urat nadi kehidupan, salah satu hal yang penting adalah air minum. Dapat dilihat pada gambar di bawah, pada tahun 2021 rata rata pada seluruh wilayah DKI Jakarta mengalami penurunan dalam akses terhadap sumber air minum. Penurunan terparah terjadi pada Kota Jakarta Selatan, yang sebelumnya 99,54 persen pada tahun 2020 menjadi 89,23 persen pada tahun 2021. Selanjutnya kota yang mengalami penurunan akses terhadap sumber air minum terparah adalah Kota Jakarta Timur, yang sebelumnya 100 persen pada tahun 2020 menjadi 91,17 persen pada tahun 2021 Hal serupa juga terjadi pada kota/kabupaten lainnya, penjelasan lebih lanjut mengenai besar penurunan akses terhadap sumber air minum dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

GAMBAR 2.45

Presentase Rumah Tangga yang memiliki akses Terhadap Sumber Air Minum



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta. "Jakarta Dalam Angka, 2022"

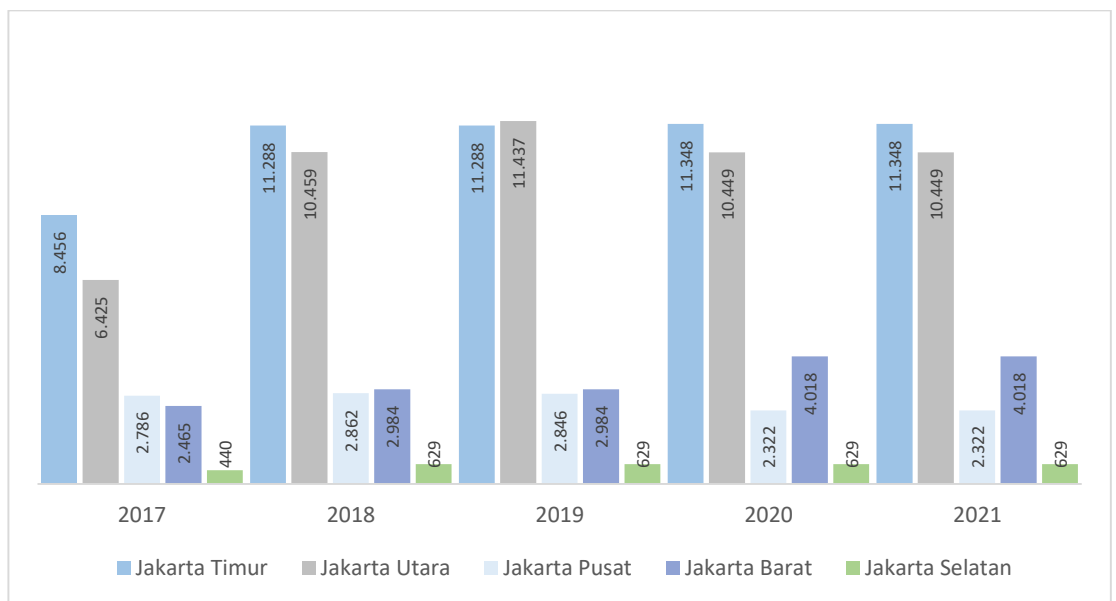
Perumahan Rakyat dan Kasawan Permukiman

Lahan yang padat dan terbatas di Jakarta menjadi kendala dalam pembangunan hunian yang bersifat horizontal, jenis hunian vertikal menjadi solusi yang ada akan keterbatasan lahan yang ada. Jika melihat gambar di bawah ini, jumlah unit Rusun di 4 (empat) wilayah kota administrasi mengalami peningkatan kecuali Jakarta Pusat. Wilayah

yang paling pesat mengalami peningkatan jumlah Rusun adalah Kota Administrasi Jakarta Utara dan Kota Administrasi Jakarta Barat. Sementara itu, jumlah Rusun di wilayah Kota Administrasi Jakarta Pusat pada Tahun 2017-2021 mengalami penurunan sebesar 17 persen.

GAMBAR 2.46

Jumlah Rumah Susun Sederhana di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2021



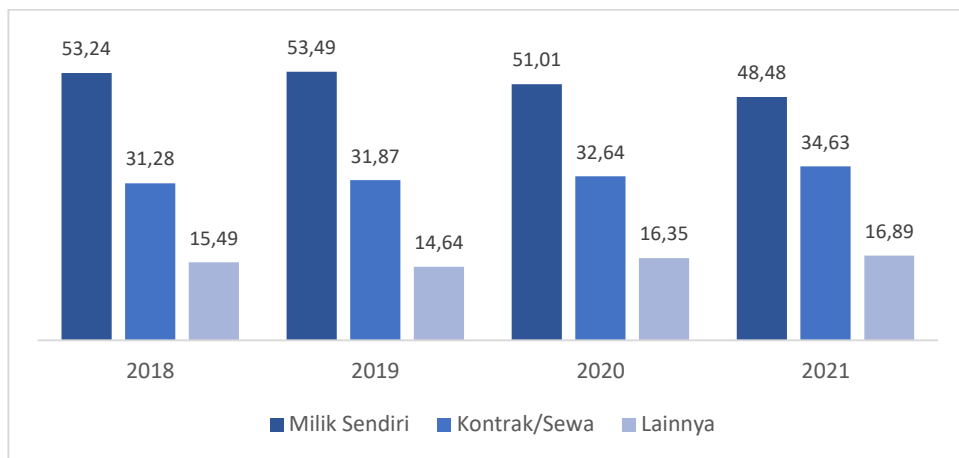
Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta. "Jakarta Dalam Angka, 2022"

Pembangunan hunian berorientasi vertikal diharapkan mampu mengakomodir penduduk DKI Jakarta yang status tempat tinggal atau huniannya sewa/kontrak. Pada Gambar 2.47 dapat dilihat bahwa dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2021, persentase status “Milik Sendiri” tempat tinggal menurun dari 53,24 persen pada tahun 2018 menjadi 48,48 persen pada tahun 2021. Sementara itu, status “Kontrak/Sewa” meningkat dari 31,28

persen pada tahun 2018 menjadi 34,63 persen pada Tahun 2021. Demikian pula, dengan status “lainnya”, meningkat dari 15,49 persen pada Tahun 2018 menjadi 16,89 persen pada tahun 2021. Angka ini menunjukkan bahwa pertumbuhan supply tempat tinggal lebih lambat dibandingkan dengan pertumbuhan permintaan akan tempat tinggal yang berdampak pada mahalannya harga tempat tinggal.

GAMBAR 2.47

Presetase Status Milik Sendiri Bangunan Tempat Tinggal di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018-2021



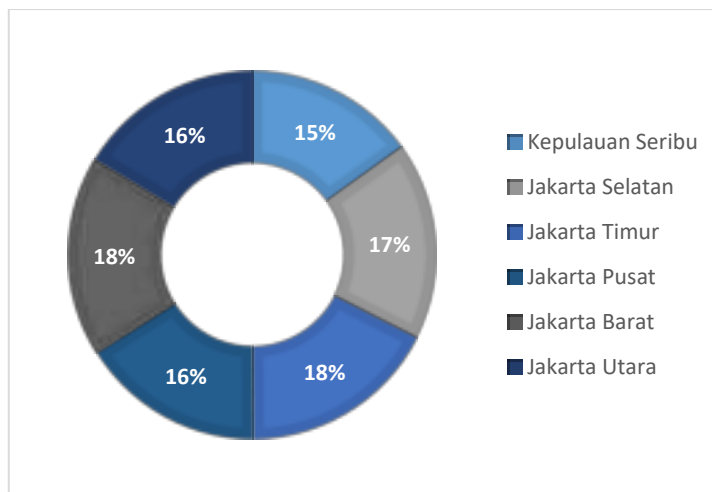
Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta. “Jakarta Dalam Angka, 2022”

Kesadaran tentang higienitas penduduk tercermin dari sanitasi yang layak. Persentase rata-rata rumah tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi layak di Provinsi DKI Jakarta telah mencapai 92,485 persen hal ini membuktikan bahwa masyarakat di ibukota

secara sadar memahami kebersihan merupakan hal yang paling penting dalam menunjang kehidupan sehari-hari, diharapkan kedepannya tingkat kesehatan turut meningkat.

GAMBAR 2.48

Porporasi Akses Sanitasi pada Rumah Tangga Tahun 2021



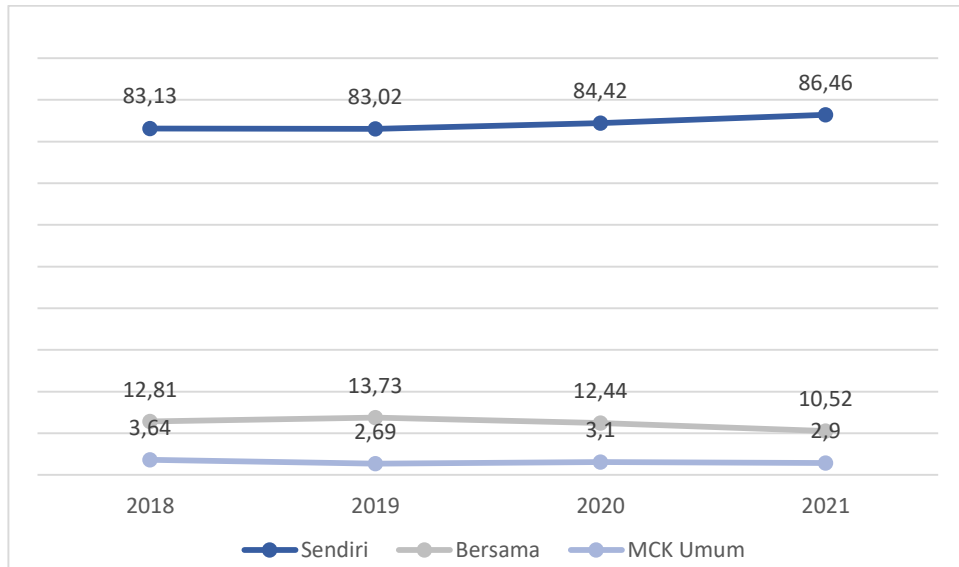
Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta. “Jakarta Dalam Angka, 2022”

Sanitasi yang baik dapat terlihat dari seberapa besar penggunaan fasilitas buang air besar bagi warga. Penggunaan fasilitas sendiri merupakan indikator yang terbesar yakni sebesar 83,13 persen di tahun 2018 dan 86,46 persen di tahun 2021. Penurunan terjadi pada indikator penggunaan fasilitas

bersama, tidak menggunakan dan tidak ada. Untuk MCK Umum menurun dari 3,1 persen pada tahun 2021 menjadi 2,9 persen pada tahun 2021 dan fasilitas bersama menurun menjadi 10,52 di tahun 2021 dari sebelumnya di tahun 2020 sebesar 12,44.

GAMBAR 2.49

Pengumuman Fasilitas MCK Tahun 2018-2021



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta. "Jakarta Dalam Angka, 2022"

Kentrentaman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Dalam hal ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, pemerintah daerah mempunyai kewajiban menegakan peraturan daerah melalui perangkat daerahnya. Dalam hal penegakan peraturan daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, perangkat pemerintah daerah yang memiliki tugas pokok tersebut adalah Polisi Pamong Praja. Namun

apabila dipandang perlu, pemerintah daerah akan dibantu Polri dalam hal penegakan peraturan perundang-undangan baik yang dibuat oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Adapun indikator jumlah pelanggaran perda/perkada yang terjadi dan jumlah pelanggaran perda/perkada yang ditangain sebagai berikut:

TABEL 2.7

Indikator Jumlah Pelanggaran Perda/Perkada yang Terjadi dan Ditangani Tahun 2018-2020

No	Indikator	2018		2019		2020
		Target	Capaian	Target	Capaian	
1	Persentase Berkas Perkara Kasus Pelanggaran Perda dan/Perkada yang dilimpahkan ke JPU dengan Kategori P21	5	88	10	92,57	15

2	Persentase Penyelesaian Pelanggaran Perda dan/atau Perkada terkait Ketenteraman dan Ketertiban Umum	55	99	55	98,86	70
---	---	----	----	----	-------	----

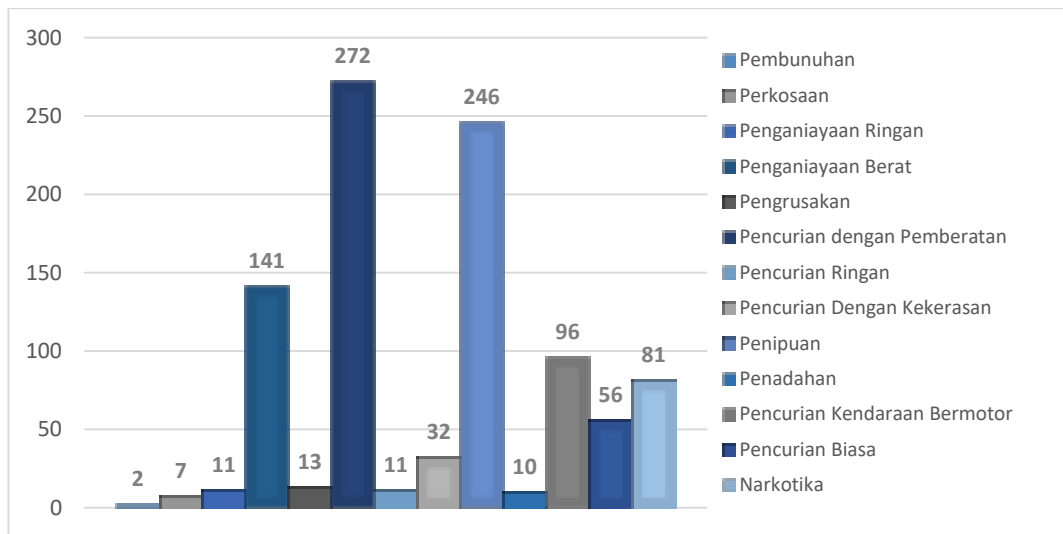
Sumber: Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Satuan Polisi Pamong Praja DKI Jakarta 2018-2020

Dilihat dari indikator jumlah pelanggaran perda dan/perkada yang terjadi pada tahun 2020 ialah 15 persen dengan persentase penyelesaian pelanggaran perda/perkada

ialah 70% dengan penjabaran jumlah kejahatan/pelanggaran kamtibmas menurut jenis dan kabupaten/kota administrasi Provinsi DKI Jakarta sebagai berikut:

GAMBAR 2.50

Jumlah Kejahatan/Pelanggaran Kamtibmas Menurut Jenis dan Kabupaten/Kota Administrasi Provinsi DKI Jakarta



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta. "Jakarta Dalam Angka, 2022"

Berdasarkan gambar diatas diketahui bahwa pelanggaran tertinggi menurut jenis ialah pelanggaran terkait pencurian dengan pemberatan yaitu sebanyak 27,8 persen dari seluruh jenis pelanggaran. Adapun rasio

perangkat pemerintah daerah (dalam hal ini Satpol PP) per 10.000 penduduk mengalami tren penurunan selama tahun 2017 hingga tahun 2021 yang digambarkan pada tabel berikut:

TABEL 2.8

Rasio Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2021

No.	Indikator	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah Polisi Pamong Praja	3.232	3.162	3.056	2.978	2.867
2	Jumlah Penduduk	10.374.235	10.467.629	10.557.649	10.562.088	10.609.681
3	Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk	3,12	3,02	2,89	2,82	2,70

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta. "Jakarta Dalam Angka, 2022"

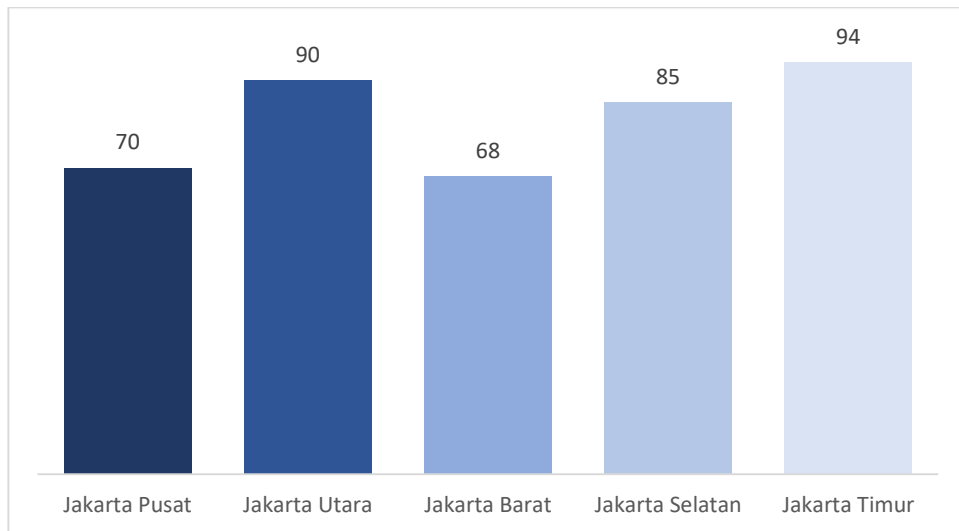
Pada tahun 2017 tercatat terdapat 3,12 Satpol PP untuk melayani 10.000 penduduk, menurun menjadi 2,70 Satpol PP untuk melayani 10.000 penduduk pada tahun 2021. Hal ini dipengaruhi adanya tren penurunan jumlah satpol PP di tahun 2017 hingga tahun 2021 disertai dengan peningkatan jumlah penduduk di tahun yang sama.

Dalam hal penanggulangan bencana kebakaran, kejadian kebakaran pada umumnya terjadi di lokasi dengan tingkat kepadatan aktivitas yang tinggi. Korelasi antara bangunan gedung, tingkat aktivitas kawasan serta kondisi kawasan seperti

kawasan permukiman kumuh, permukiman liar hingga kawasan industri yang kurang tertata, memicu tingginya tingkat kerawanan kebakaran di wilayah perkotaan. Penanganan bencana kebakaran meliputi kegiatan pencegahan, kesiapsiagaan, tanggap darurat, hingga pemulihan dimana memerlukan kecepatan dan ketepatan dalam bertindak yang harus segera ditindaklanjuti. Dalam upaya penanggulangan kebakaran di Provinsi DKI Jakarta, Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan menyiapkan sejumlah personel pemadam kebakaran dan hidran yang tersebar di seluruh wilayah, dengan gambaran sebagai berikut:

GAMBAR 2.51

Jumlah Unit Pengadaan Sarana dan Prasarana pencegahan, penanggulangan kebakaran dan APD Tahun 2021



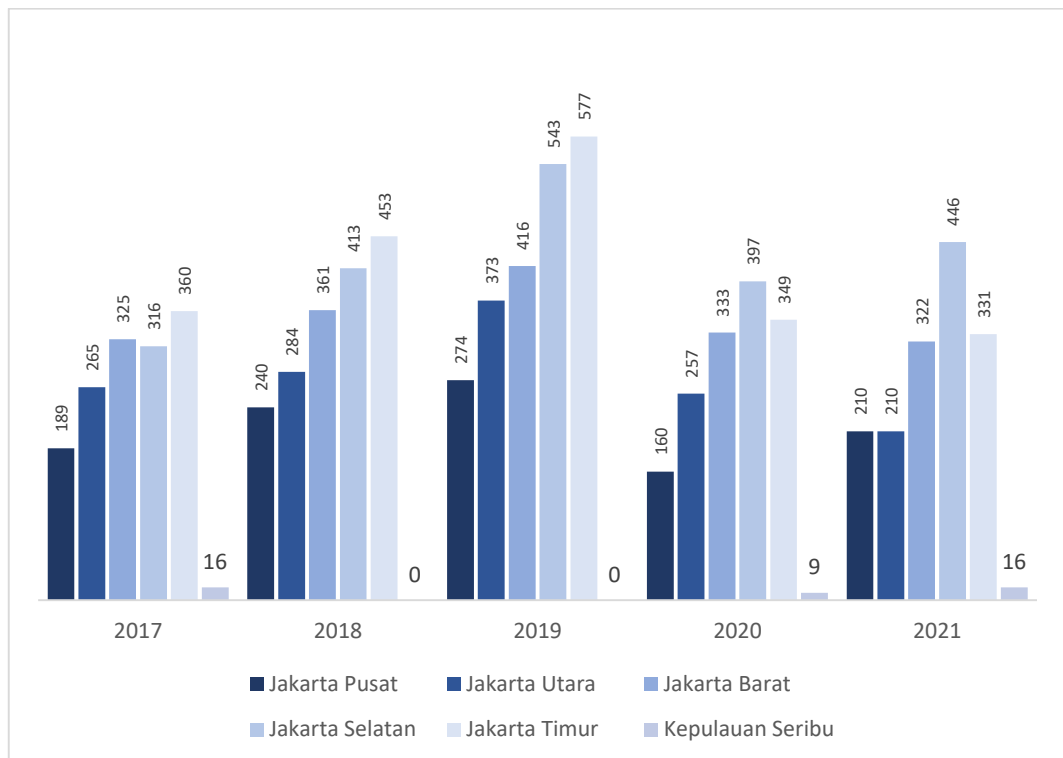
Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta. "Jakarta Dalam Angka, 2022"

Jakarta Timur merupakan wilayah terluas dengan jumlah penduduk yang lebih besar, memiliki jumlah sarana prasarana pemadam kebakaran paling banyak yaitu 94 jumlah sarana prasarananya. Jakarta Utara memiliki 90 sarana prasarana kebakaran. Jakarta

Pusat memiliki 70 sarana prasarana kebakaran. Jakarta Barat memiliki sebanyak sarana dan prasarananya sebanyak 68. Sementara itu, banyaknya kejadian kebakaran yang terjadi di Provinsi DKI Jakarta dapat dilihat pada gambar berikut.

GAMBAR 2.52

Jumlah Kejadian Kebakaran di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2021



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta. "Jakarta Dalam Angka, 2022"

Dalam upaya menjaga kualitas peralatan dan sarana prasarana pencegahan dan penanggulangan kebakaran, Dinas Gulkarmat melakukan pengujian mutu yang secara teknis dilakukan oleh Pusdiklat Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan. Peralatan dan sarana prasarana yang dilakukan pengujian mutu yaitu meliputi, pengujian alat pemadam api, pengujian foam liquid, pengujian pintu

tahan api, pengujian rolling door, pengujian fire stopping, pengujian pengendali asap atau api, pengujian pompa portable, pengujian mobil pemadam, pengujian selang kebakaran, pengujian helm kebakaran, pengujian baju tahan panas, pengujian sepatu keselamatan kebakaran, pengujian kepala pemercik, pengujian brankas, pengujian komponen hidran, dan pengujian mulut pipa.

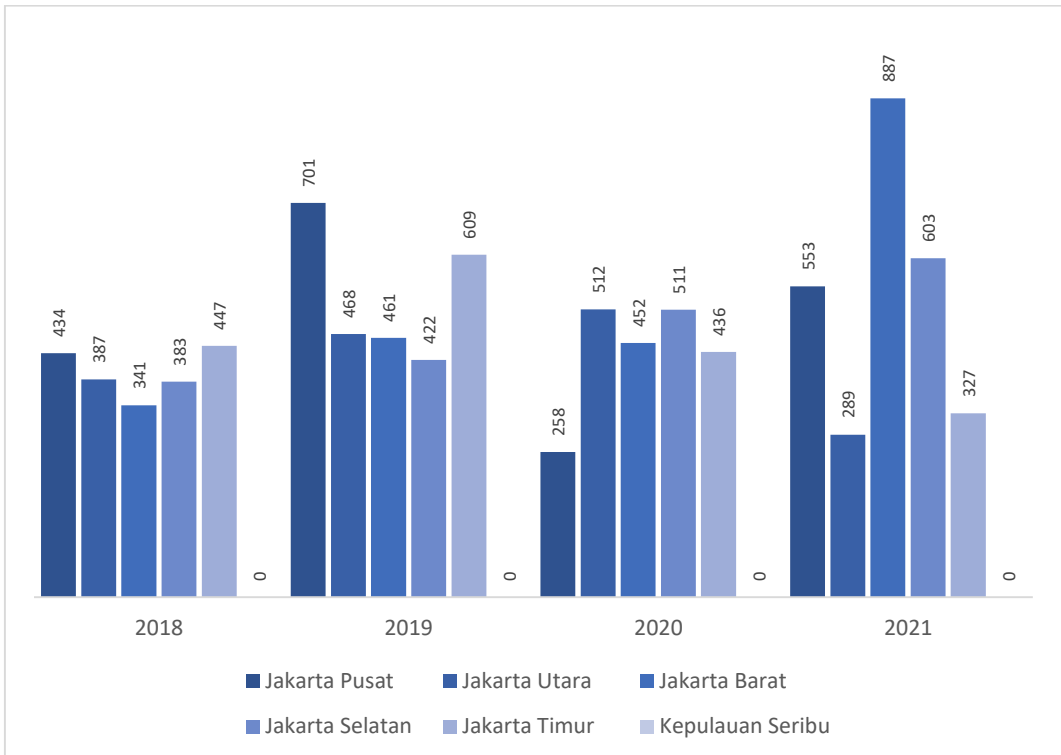
Sosial

Sasaran pelayanan urusan sosial adalah para Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang merupakan seseorang, keluarga, atau kelompok masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya dan karenanya tidak dapat menjalin hubungan yang serasi dan kreatif dengan lingkungannya sehingga tidak dapat

memenuhi kebutuhan hidupnya (jasmani, rohani dan sosial) secara memadai dan wajar. Hambatan, kesulitan, dan gangguan tersebut dapat berupa kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, ketunaan sosial, keterbelakangan, atau keterasingan dan kondisi atau perubahan lingkungan (secara mendadak) yang kurang mendukung atau menguntungkan

GAMBAR 2.53

Penanganan PMKS di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018-2021



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta. "Jakarta Dalam Angka, 2022"

Secara umum, jumlah PMKS mengalami peningkatan. Pada tahun 2018 tercatat sebanyak 1.992 orang, kemudian pada tahun 2021 meningkat menjadi 2.659 orang, hal ini merupakan hasil akumulasi peningkatan di seluruh wilayah DKI Jakarta kecuali Kabupaten Kepulauan Seribu. Upaya penanganan yang telah dilakukan pemerintah Provinsi DKI Jakarta antara lain adalah meningkatkan kualitas pelayanan sarana prasarana rehabilitasi sosial, pelatihan keterampilan dan pembinaan bagi lansia, peningkatan kualitas SDM keluarga miskin dan pembinaan mental bagi PMKS. Lebih lanjut dapat dilihat dalam gambar di atas.

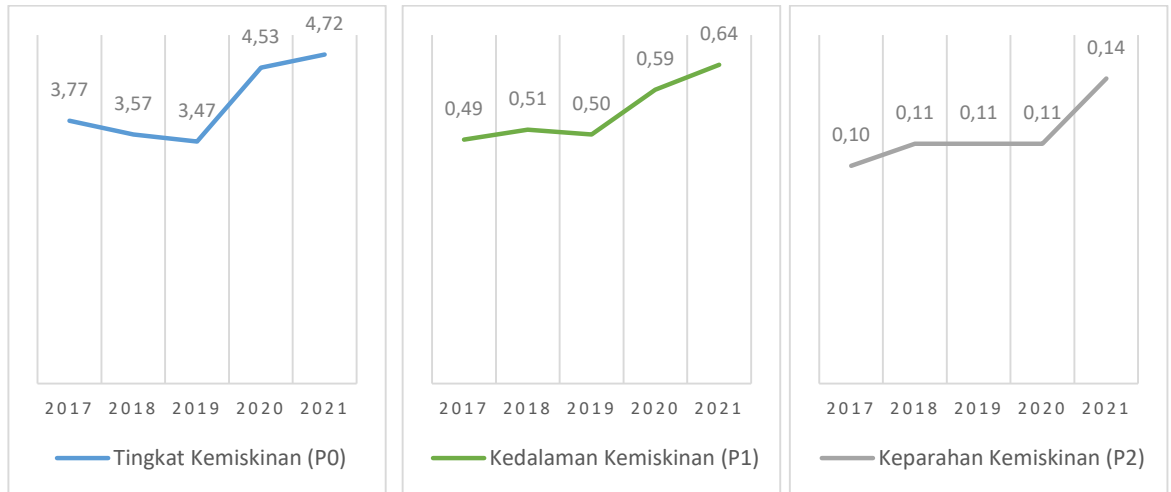
Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial dijabarkan bahwa kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Penyelenggaraan kesejahteraan sosial meliputi: Rehabilitasi Sosial, Jaminan Sosial,

Pemberdayaan Sosial dan Perlindungan Sosial. Rehabilitasi sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat. Jaminan sosial adalah skema yang melembaga untuk menjamin seluruh warga masyarakat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.

Perlindungan sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial. Pemberdayaan Sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk menjadikan warga negara yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya. Muara dari penyelenggaraan kesejahteraan sosial yaitu perorangan, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat dapat hidup mandiri. Berikut gambaran fakir miskin yang dapat mandiri di Provinsi DKI Jakarta selama kurun waktu tahun 2017-2021:

GAMBAR 2.54

Persentase Penduduk Miskin Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2021



Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS), BPS

Dilihat berdasarkan Tabel 2.9, indikator kedalaman kemiskinan (P1) di Provinsi Jakarta pada bulan September 2021 meningkat menjadi 0,75 begitu juga terhadap

indikator keparahan kemiskinan (P2) yaitu 0,18. Peningkatan juga dapat dilihat dari garis kemiskinan (GK) dengan jumlah Rp715.052,- per bulan.

TABEL 2.9

Perkembangan Penduduk Miskin di Provinsi DKI Jakarta 2019-2021

Uraian	2019		2020		2021	
	Maret	Sept	Maret	Sept	Maret	Sept
Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bulan)	637.260	663.355	680.401	683.339	697.638	715.052
Tingkat Kemiskinan (PO)	3,47	3,42	4,53	4,69	4,72	4,67
Kedalaman Kemiskinan (P1)	0,497	0,397	0,59	0,669	0,64	0,75
Keparahan Kemiskinan (P2)	0,111	0,072	0,114	0,152	0,14	0,18

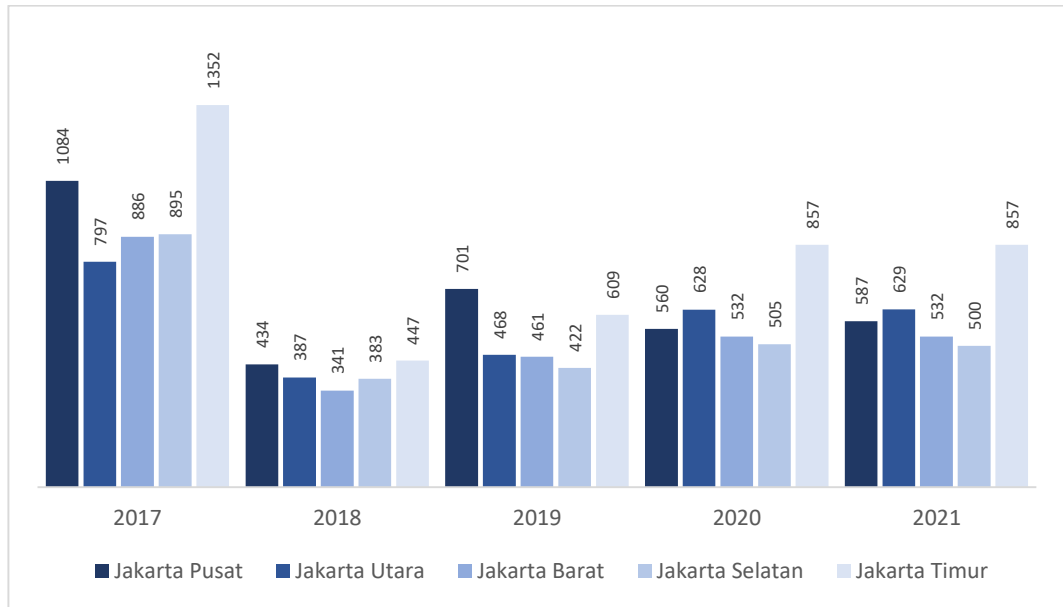
Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS), BPS

Mewujudkan kesejahteraan sosial menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. Amanat tersebut membuka kesempatan yang luas kepada masyarakat untuk ikut andil dalam penyelenggaraan kegiatan sosial kemanusiaan. Kesadaran dan tanggung jawab sosial masyarakat untuk turut serta mewujudkan kesejahteraan sosial dicerminkan antara lain dalam bentuk kesediaan masyarakat menjadi relawan sosial

atau tenaga kesejahteraan sosial masyarakat. Tenaga kesejahteraan sosial merupakan seseorang yang dididik dan dilatih untuk melaksanakan tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial dan/atau seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta yang ruang lingkup kegiatannya di bidang kesejahteraan sosial. Berikut gambaran jumlah tenaga kesejahteraan sosial masyarakat yang aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Provinsi DKI Jakarta tahun 2017-2021.

GAMBAR 2.55

Jumlah Pekerja Sosial di DKI Jakarta Tahun 2017-2021



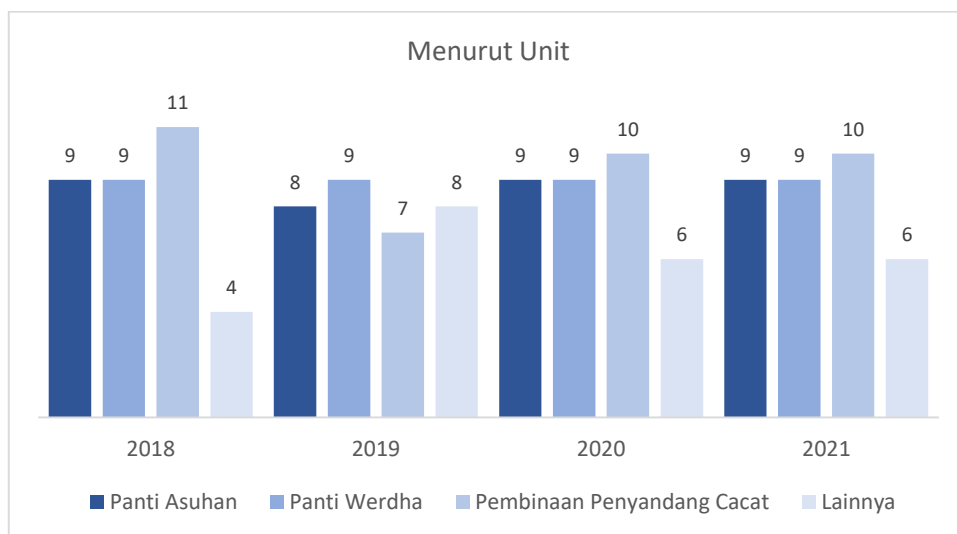
Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta. "Jakarta Dalam Angka, 2022"

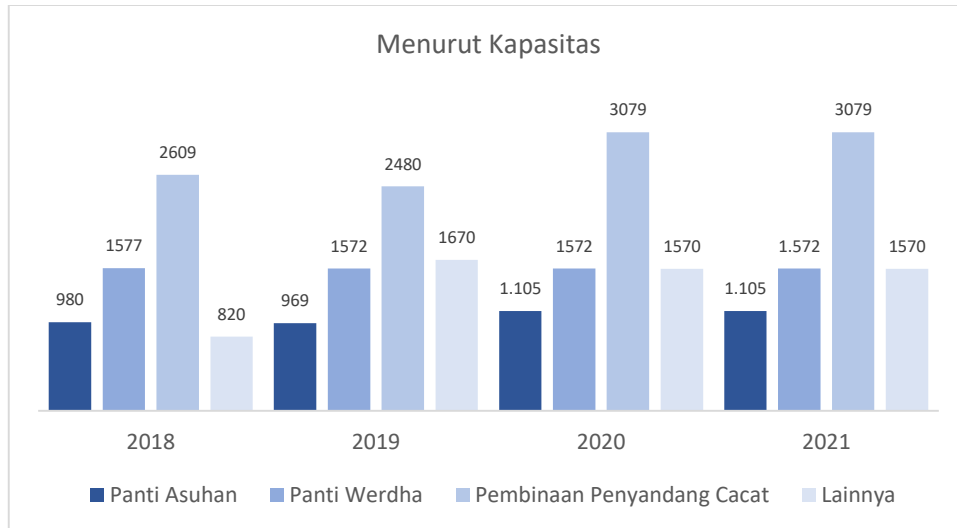
Jumlah tenaga kesejahteraan sosial masyarakat yang aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Provinsi DKI Jakarta mengalami sedikit peningkatan dalam kurun waktu 2020 hingga 2021, yaitu sebanyak 3.082 orang pada tahun 2020 menjadi 3.105 orang pada tahun 2021. Untuk menunjang penyelenggaraan kesejahteraan sosial, diperlukan sarana sosial yang meliputi panti asuhan, panti jompo, panti rehabilitasi, rumah singgah dan sarana

sejenis lainnya. Secara umum, jumlah panti sosial di DKI Jakarta sejak tahun 2018 hingga tahun 2021 mengalami peningkatan jumlah kapasitas. Kapasitas yang dapat ditampung naik sebanyak 1.340, yang sebelumnya 5.986 pada tahun 2018 menjadi 7.326 pada tahun 2021. Sedangkan jumlah unit di tahun 2019 terdapat pengurangan 1 unit dikarenakan penggabungan beberapa sarana sosial sejenis. Penjelasan lebih lanjut dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

GAMBAR 2.56

Perkembangan Jumlah Sarana Sosial di DKI Jakarta





Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta. "Jakarta Dalam Angka, 2022"

Aspek Daya Saing Daerah

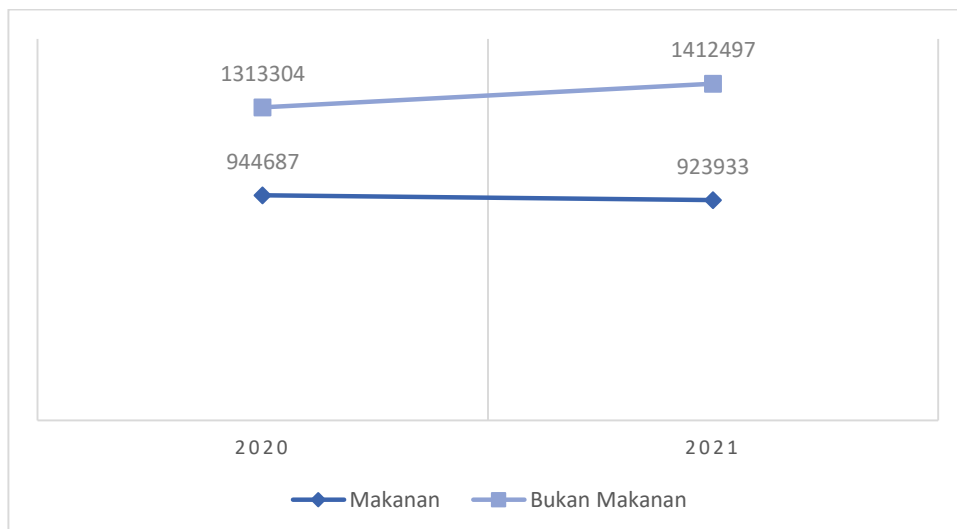
Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

Kemampuan ekonomi daerah terkait dengan daya saing daerah adalah kapasitas ekonomi daerah harus memiliki daya tarik (attractiveness) bagi pelaku ekonomi yang telah berada didalam dan akan masuk ke suatu daerah untuk menciptakan nilai tambah bagi peningkatan daya saing daerah. Salah satu indikator yang dapat menggambarkan aspek kemampuan ekonomi daerah dalam

perannya sebagai pendorong daya saing daerah adalah indikator pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita. Indikator ini menggambarkan tingkat konsumsi rumah tangga yang menjelaskan seberapa atraktif tingkat pengeluaran rumah tangga. Semakin besar rasio atau angka konsumsi RT semakin atraktif bagi peningkatan kemampuan ekonomi daerah.

GAMBAR 2.57

Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga per Bulan di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2020-2021



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta. "Jakarta Dalam Angka, 2022"

Salah satu komponen pengeluaran Rumah Tangga adalah pengeluaran Rumah Tangga non makanan. Dari indikator ini dapat dilihat bagaimana kecenderungan masyarakat untuk membelanjakan pendapatannya selain makanan. Masyarakat DKI Jakarta sendiri dalam periode 2020-2021 menunjukkan kecenderungan peningkatan konsumsi non makanan. Pada tahun 2021, rata-rata pengeluaran per kapita sebulan untuk komoditi non makanan Provinsi DKI Jakarta sebesar 1.313.304 rupiah menjadi 1.412.497 rupiah. Keterbukaan ekonomi suatu daerah dapat dilihat dari indikator berupa rasio dari

jumlah ekspor dan impor terhadap PDRB suatu daerah tersebut. Untuk Provinsi DKI Jakarta sendiri, rasio ekspor dan impor terhadap PDRB DKI Jakarta terus mengalami tren yang menurun dari tahun 2015 hingga 2019. Pada tahun 2015, rasio ekspor dan impor terhadap PDRB adalah sebesar 0,64. Rasio ini kemudian terus menurun hingga tahun 2019 menjadi 0,56. Hal ini menunjukkan bahwa aktivitas perdagangan di DKI Jakarta sedang mengalami penurunan. Penjelasan lebih lengkap dalam bentuk angka dapat dilihat pada tabel berikut ini.

TABEL 2.10

Rasio Ekspor dan Impor terhadap PDRB di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2015-2020

Indikator	2015	2016	2017	2018	2019	2020*
Jumlah ekspor barang dan jasa	227,786.90	227,542.90	218,866.60	229,175.90	228,014.90	166,948.62
Jumlah impor barang dan jasa	709,942.40	695,046.50	768,064.00	851,749.00	795,940.30	604,511.48
Net Ekspor Antar Daerah	223,994.60	240,092.80	300,142.30	334,853.70	336,937.90	244,858.99
PDRB	1,454,563.85	1,539,916.88	1,635,359.15	1,736,291.05	1,838,500.71	1,792,794.59
Rasio Ekspor + Impor terhadap PDRB	0.64	0.60	0.60	0.62	0.56	0.43

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta, 2020

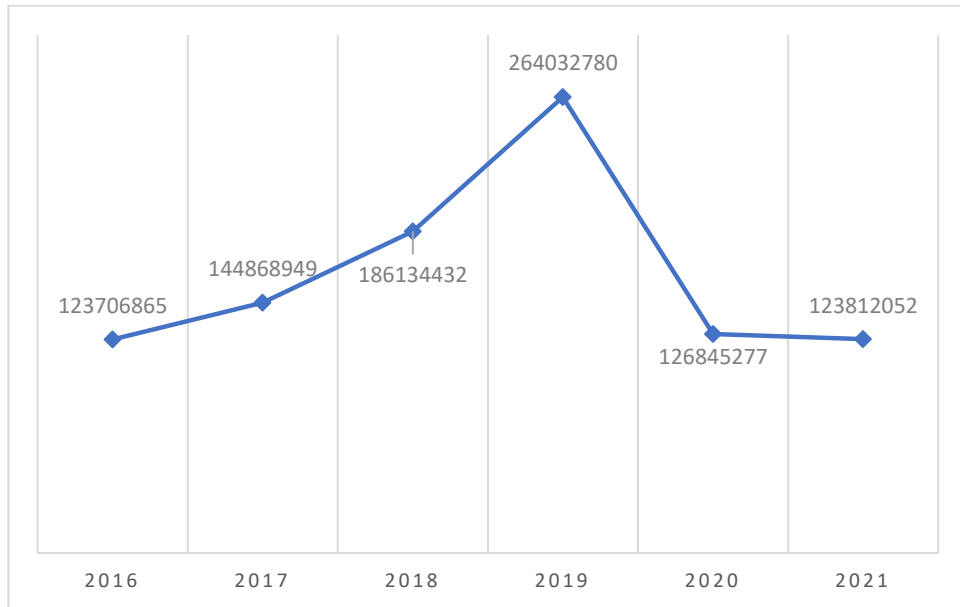
Fokus Wilayah/Infrastruktur

Kemacetan dan banjir menjadi masalah serius di DKI Jakarta. Jumlah penduduk yang tinggi membutuhkan transportasi massal dengan biaya yang murah dan nyaman sehingga diharapkan dapat mengurangi kemacetan di Ibukota. TransJakarta hadir menjadi salah satu solusi transportasi publik warga Jakarta

dengan jumlah penumpang sebanyak 123.812.052 orang. Penumpang paling banyak terdapat di koridor I (Blok M-Kota) sebanyak 8.948.313 orang. Berikut grafik jumlah penumpang Transjakarta dari tahun 2016 sampai tahun 2021.

GAMBAR 2.58

Jumlah Penumpang Transjakarta Tahun 2016 – 2021



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta. "Jakarta Dalam Angka, 2022"

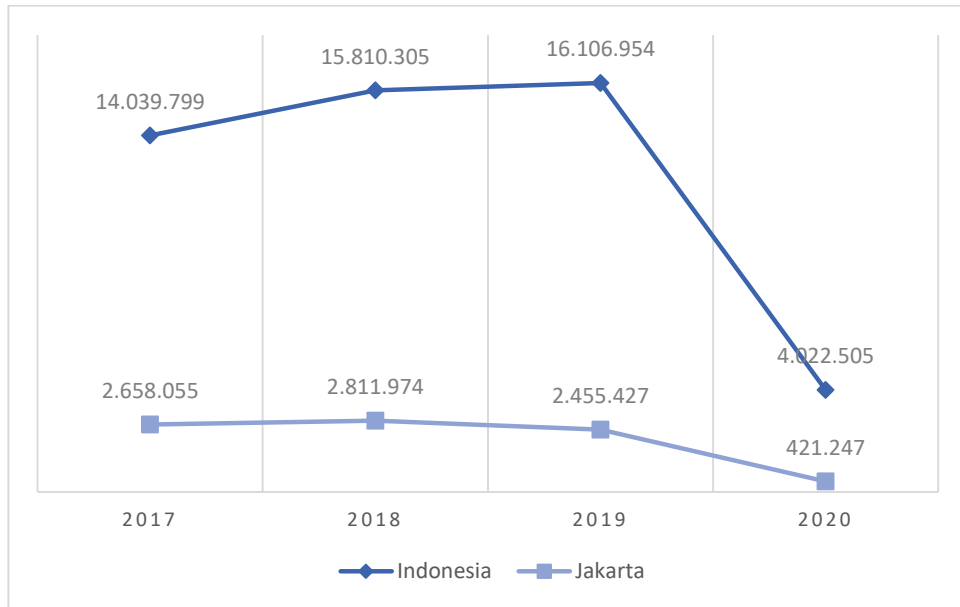
Selain transjakarta sebagai moda transportasi umum, Proyek MRT Jakarta dimulai dengan pembangunan jalur MRT Fase I sepanjang ± 16 kilometer dari Terminal Lebak Bulus hingga Bundaran Hotel Indonesia yang memiliki 13 stasiun berikut 1 depo. Jam operasional mulai pukul 05.00-24.00 diharapkan dapat menampung lebih kurang 130.000 penumpang per hari (hasil survei 2017) dengan jumlah rangkaian sebanyak 16 rangkaian (1 rangkaian adalah 6 kereta). Hadirnya transportasi publik yang memadai diharapkan dapat menarik wisatawan baik lokal maupun mancanegara ke berbagai lokasi wisata di Jakarta.

Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara bersifat fluktuatif sejak tahun 2017-2021, sedangkan proporsi jumlah wisatawan mancanegara ke DKI Jakarta terhadap Negara Indonesia mengalami penurunan sejak tahun 2017 18,93 persen menjadi 7,66 persen di tahun 2021. Pada Tahun 2020 dan 2021, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara baik ke seluruh destinasi wisata

di Indonesia maupun di Jakarta, keduanya mengalami penurunan yang sangat drastis. Jumlah kunjungan turis mancanegara ke Indonesia menurun sebesar 75 persen dibandingkan tahun sebelumnya yaitu dari 16.106.954 orang pada tahun 2019 menjadi hanya sebanyak 4.022.505 orang pada Tahun 2020. Penurunan jumlah turis mancanegara ke Jakarta lebih drastis yaitu sebesar 83 persen atau dari 2.455.427 pada Tahun 2019 menjadi hanya sebanyak 421,247 orang pada Tahun 2020. Hal ini disebabkan oleh kebijakan pembatasan penerbangan dan lockdown di banyak negara sehingga berimbas pada pariwisata internasional dan perjalanan bisnis antar negara. Pada tahun 2021, sector pariwisata belum sepenuhnya pulih, bahkan terus terjadi penurunan dari datuh sebelumnya. Turis mancanegara yang berkunjung ke DKI Jakarta pada tahun 2021 turun 72,62 persen dari tahun sebelumnya. Begitu pula turis mancanegara yang berkunjung ke Indonesia tahun 2021 turun 61,57 persen dari tahun 2020.

GAMBAR 2.59

Jumlah Kunjungan Wisata Mancanegara Tahun 2017-2021



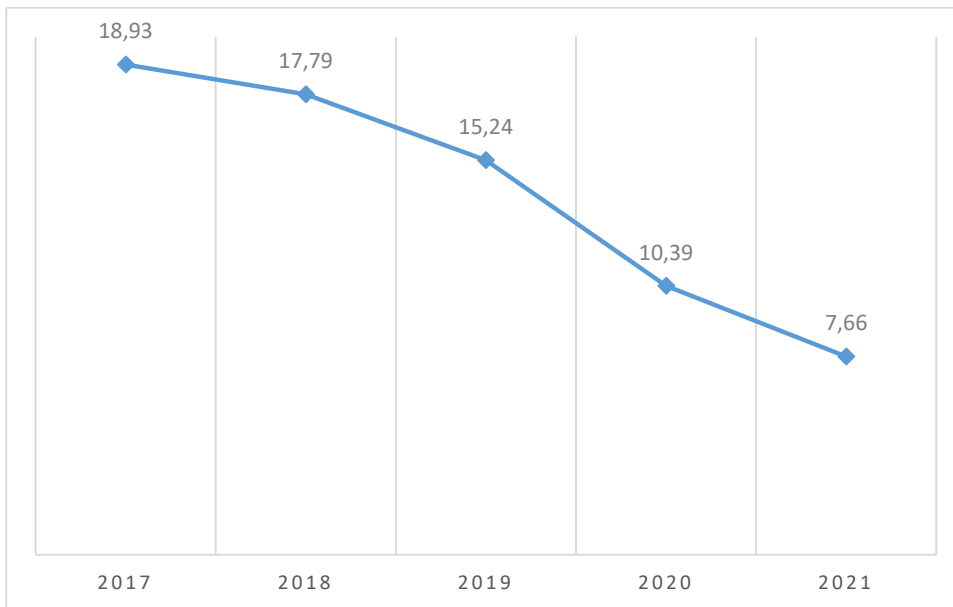
Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta. "Jakarta Dalam Angka, 2022"

Tren proporsi jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Jakarta terhadap nasional menurun sepanjang lima tahun ini. Pada 2017, Jakarta menyumbang sebesar 18,93

persen kunjungan mancanegara. Namun, jumlah ini semakin menurun dari tahun ke tahun sampai dengan menjadi 7,66 persen pada tahun 2021.

GAMBAR 2.60

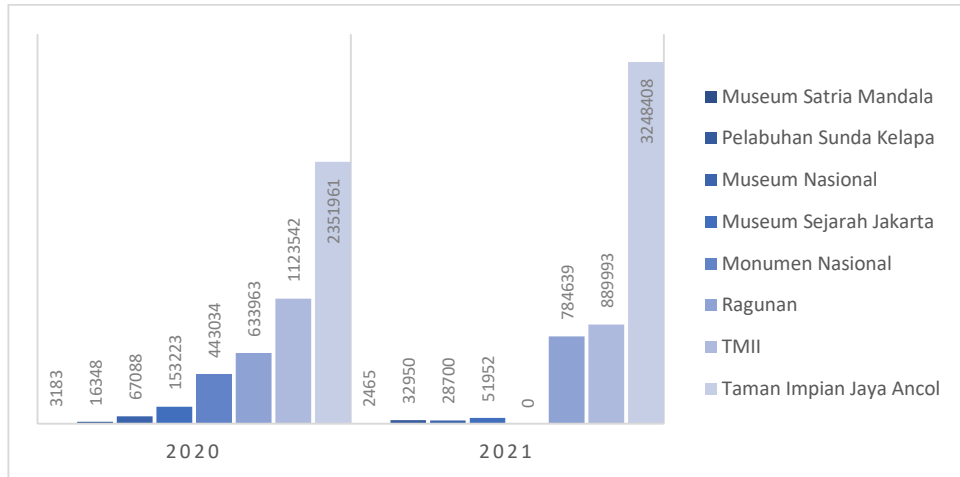
Proporsi Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara Jakarta terhadap Nasional Tahun 2017-2021



Sumber: Statistik Jakarta, 2021

GAMBAR 2.61

Jumlah Kunjungan Wisatawan ke Objek Wisata Unggulan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2020-2021



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta. "Jakarta Dalam Angka, 2022"

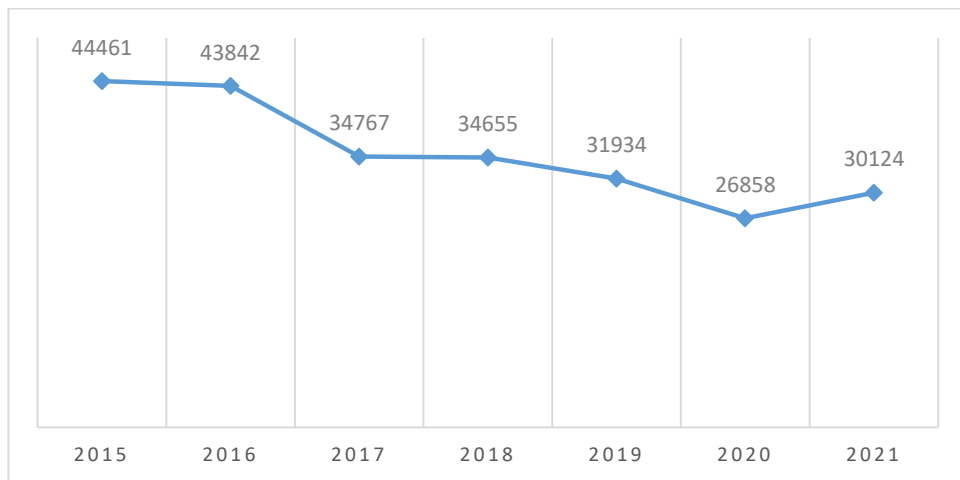
Jumlah kunjungan wisatawan ke objek wisata unggulan Provinsi DKI Jakarta mengalami peningkatan dari 4.792.342 kunjungan pada tahun 2020 menjadi sebanyak 5.039.107 kunjungan pada tahun 2021.

Selain sektor pariwisata, daya tarik investor untuk menanamkan modalnya sangat dipengaruhi faktor-faktor seperti tingkat suku bunga, kebijakan perpajakan dan regulasi perbankan. Iklim investasi juga sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang mendorong berkembangnya investasi antara lain faktor keamanan dan ketertiban suatu wilayah dan kemudahan proses perijinan.

Angka kriminalitas di DKI Jakarta selama periode 2015-2021 memiliki kecenderungan menurun. Pada tahun 2015, terdapat sebanyak 44.461 kasus kejahatan yang dilaporkan melalui Polda Metro Jaya namun mengalami penurunan di tahun 2020 menjadi 26.858 kasus. Meskipun demikian, pada tahun 2021 angka tersebut kembali meningkat menjadi 30.124, hal ini mengindikasikan bahwa tetap diperlukan adanya upaya untuk menekan meningkatnya angka kriminalitas, melalui pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat dengan melibatkan partisipasi masyarakat untuk turut menjaga keamanan lingkungannya. Deskripsi secara numerik angka kriminalitas dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

GAMBAR 2.62

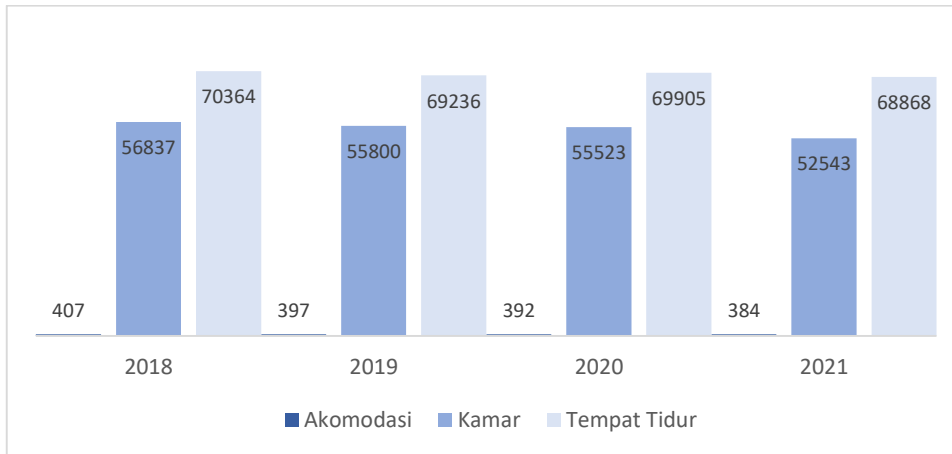
Jumlah Kejahatan di Wilayah Polda Metro Jaya Tahun 2015 – 2021



Sumber: Statistik Kriminalitas 2016-2021, Badan Pusat Statistik, diolah

GAMBAR 2.63

Jumlah Akomodasi, kamar, dan Tempat Tidur yang tersedia pada Hotel Bintang 2018-2021



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta. "Jakarta Dalam Angka, 2022"

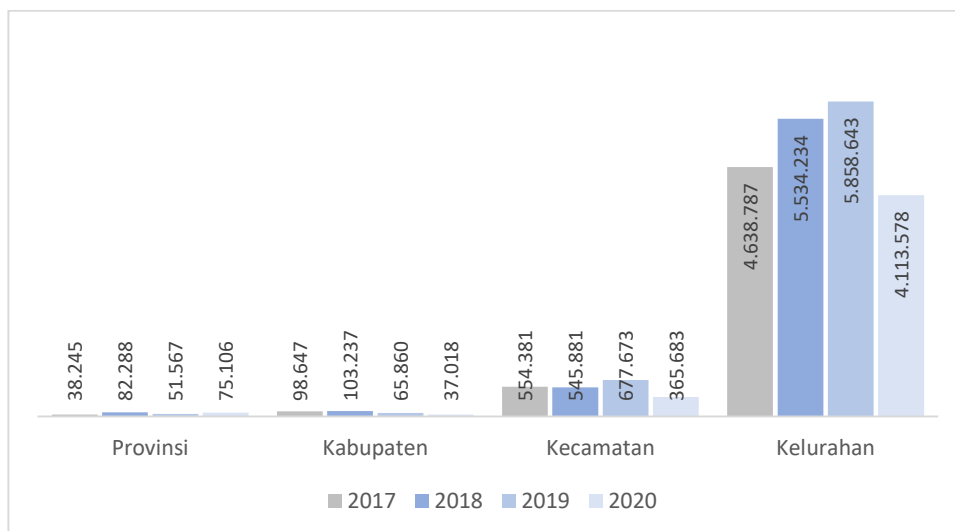
Jika dibandingkan dengan tahun 2018, jumlah akomodasi, kamar dan tempat tidur yang tersedia pada hotel bintang mengalami penurunan. Pada tahun 2018, jumlah akomodasi sebanyak 407 yang kemudian menurun menjadi 384 pada tahun 2021. Jumlah kamar hotel berbintang pada Tahun 2018 sebanyak 56.837 kemudian menurun menjadi 52.543 pada tahun 2021. Jumlah tempat tidur pada hotel berbintang juga mengalami penurunan dari 70.364 pada tahun 2018 menjadi 68.868 pada tahun 2021. Selain hal-hal tersebut diatas, kemudahan prosedur dan tata cara memperoleh perijinan atau pengurusan ijin untuk berinvestasi merupakan salah satu faktor pendukung minat investor

untuk berinvestasi di DKI Jakarta. Kecepatan birokrasi dalam melayani permohonan perijinan untuk beberapa jenis ijin/surat yang dikeluarkan oleh Pemprov. DKI Jakarta adalah kurang dari 7 hari, terkecuali ijin untuk mendirikan bangunan.

Dalam perspektif kedepan, pelayanan perizinan ini akan terus disempunakan dan diperbaiki sehingga terjamin kepastian prosedur, waktu dan keamanan perijinan serta pada akhirnya akan memberi kenyamanan dan kemudahan investor untuk berinvestasi di Jakarta. Penjelasan lebih lanjut dapat dilihat pada gambar di bawah.

GAMBAR 2.64

Jumlah Perizinan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017 – 2020



Sumber: Laporan Penyelenggaraan DPMPTSP DKI Jakarta 2020

Selama kurun waktu 2017 DKI Jakarta telah mengeluarkan sebanyak 5.330.060 perijinan, peningkatan cukup signifikan sampai dengan tahun 2019 meningkat menjadi 6.653.743 perizinan, Hal ini menunjukkan bahwa terobosan dan peningkatan pelayanan ke masyarakat dapat memberikan kontribusi ke jumlah perizinan. Namun terjadi penurunan

pada tahun 2020 menjadi 4.591.385. Dalam perspektif kedepan, pelayanan perijinan ini akan terus disempunakan dan diperbaiki sehingga terjamin kepastian prosedur, waktu dan keamanan perijinan serta pada akhirnya akan memberi kenyamanan dan kemudahan investor untuk berinvestasi di Jakarta.

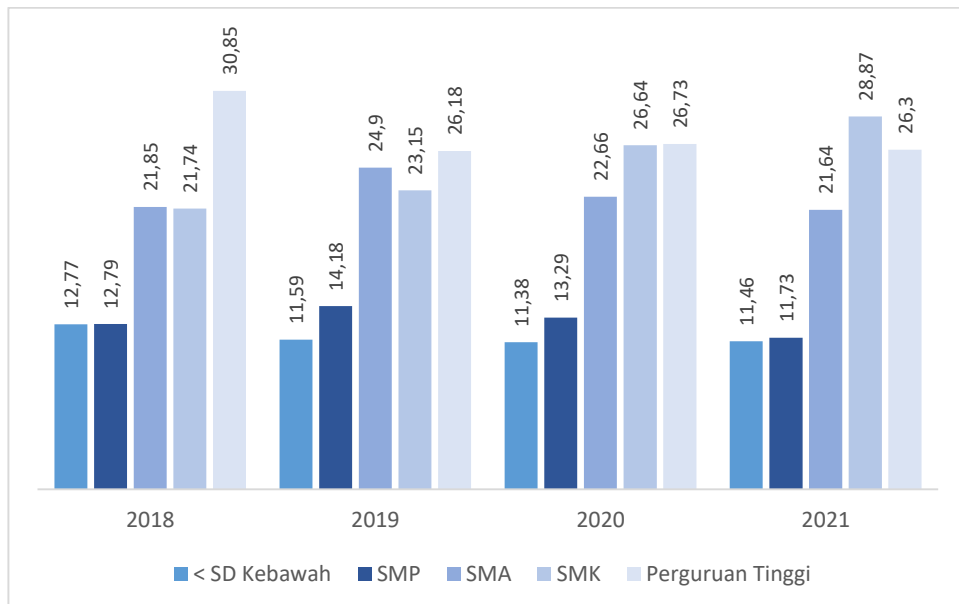
Fokus Sumber Daya Manusia

Dari sisi kualitas tenaga kerja, jumlah lulusan perguruan tinggi yang bekerja di DKI Jakarta secara umum memiliki rasio yang paling tinggi dibandingkan dengan jenjang pendidikan yang lain. Pada Agustus 2018, proporsi pekerja dengan pendidikan tertinggi yang ditamatkan adalah perguruan tinggi adalah sebesar 30,85 persen namun angka tersebut menurun hingga 26,3 persen pada Agustus 2021. Hal berbeda terjadi pada jenjang SMK,

pada Agustus 2018 proporsi lulusan SMK mengisi lapangan kerja di DKI Jakarta adalah sebesar 21,74 persen, angka tersebut terus meningkat hingga 28,87 persen pada Agustus 2021. Hal itu dapat terjadi karena peningkatan kualitas pendidikan pada jenjang SMK sehingga siswa yang disiapkan untuk siap berkerja memiliki value yang lebih tinggi di pasar tenaga kerja sehingga memiliki peluang yang lebih tinggi memasuki dunia kerja.

GAMBAR 2.65

Rasio Penduduk yang Bekerja Menurut Pendidikan Terakhir yang Ditamatkan Agustus 2018 s.d 2021



Sumber: Keadaan Pekerja di Indonesia, 2018-2021

Rasio ketergantungan (dependency ratio) dapat digunakan untuk melihat apakah suatu daerah merupakan kategori daerah maju dengan produktivitas penduduk yang tinggi atau daerah berkembang dengan produktivitas penduduk yang masih rendah.

Rasio ini merupakan indikator demografi yang sangat penting. Semakin tinggi angka rasio ketergantungan menunjukkan semakin tinggi beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif/tidak produktif lagi.

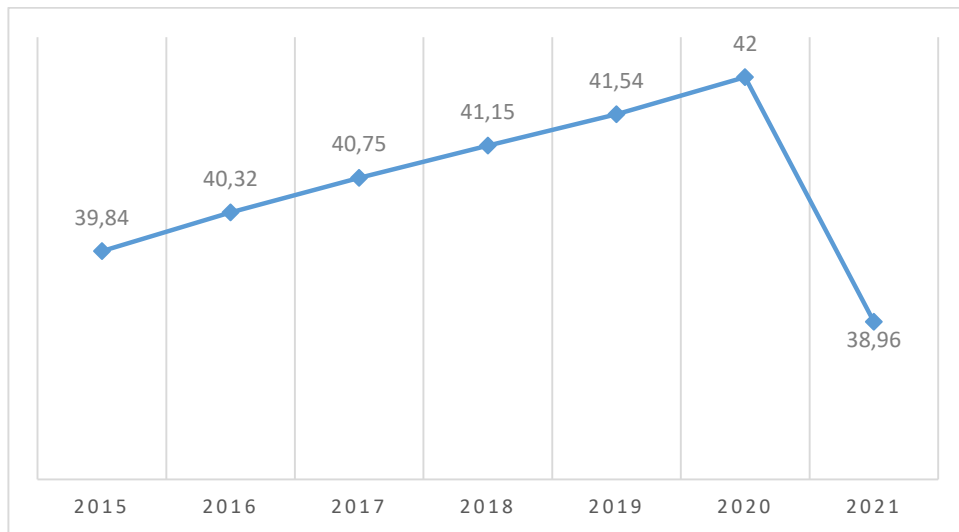
Sementara itu, semakin rendah angka rasio menunjukkan semakin rendah beban yang ditanggung penduduk produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif/tidak produktif lagi.

Sejak tahun 2015 hingga 2020, angka rasio ketergantungan di DKI Jakarta mengalami peningkatan. Namun pada tahun 2021 rasio ketergantungan menurun cukup drastis hingga 38,96. Secara numerik dapat dilihat

dengan angka ketergantungan yang berada di bawah 50. Artinya, penduduk usia produktif (15-64 tahun) menanggung sedikit penduduk usia non produktif (<15 dan >64 tahun), dimana kualitas penduduk (baik tingkat pendidikan, skill, profesionalitas dan kreativitas) mampu menekan beban ketergantungan sampai tingkat terendah yang berguna untuk mendorong pembangunan ekonomi. Secara lengkap dapat dilihat pada grafik di bawah ini.

GAMBAR 2.66

Rasio Ketergantungan Dependency Ratio Provinsi DKI Jakarta Tahun 2015 – 2021



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta. "Jakarta Dalam Angka, 2022"

2.2

Evaluasi Capaian Program RKPD Tahun 2021

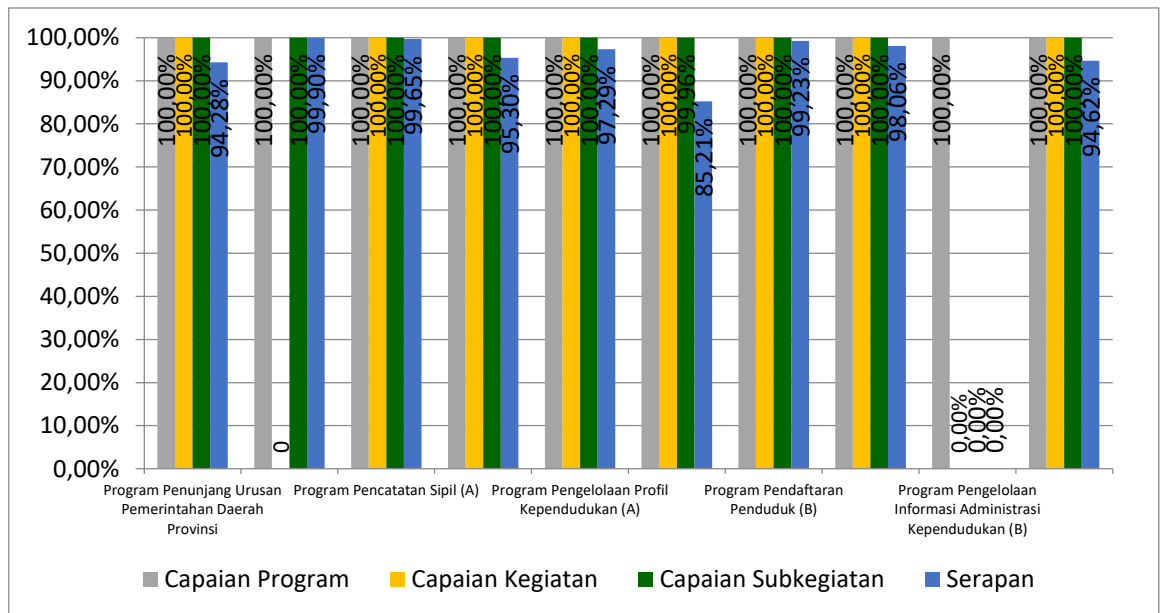
Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pada Tahun 2021, Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil memiliki 10 program dengan total anggaran program sebesar Rp 310.449.710.353 dan serapan anggaran program sampai dengan Bulan Desember Tahun 2021 sebesar Rp 290527808739 243.517.534.910 (95,39% dari total pagu).

Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Informasi mengenai capaian program/-kegiatan/subkegiatan dan serapan anggaran dijabarkan pada Gambar 2.67 sebagai berikut.

GAMBAR 2.67

Capaian Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Serapan Anggaran Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Triwulan IV Tahun 2021



Sumber : e-SAKIP dan e-Monev 2021, diolah

Berdasarkan Gambar 2.67, dari 10 program Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, semuanya memiliki target dan realisasi dengan capaian termasuk dalam kategori mencapai target pada Triwulan IV Tahun 2021. Berdasarkan serapan anggaran Triwulan IV Tahun 2021, seluruh program serapannya di atas 80% kecuali terdapat 1

(satu) program tidak beranggaran yaitu Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (B). Sementara itu, untuk perbandingan antara capaian program, rata-rata capaian kegiatan dan rata-rata capaian subkegiatan cukup berimbang untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2.11 sebagai berikut.

TABEL 2.11

Capaian Kinerja dan Serapan Anggaran Program Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Triwulan IV Tahun 2021 pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil







Program	Sasaran Program	Indikator Program	Satuan	Target Tahun 2021	Kinerja Indikator Tahun 2021			Capaian Program	Rata-rata Capaian Kegiatan	Rata-rata Capaian Subkegiatan	Anggaran Tahun 2021	Anggaran Perubahan Tahun 2021	Realisasi	Serapan (%)
					Target	Realisasi	Capaian							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Peningkatan tertib kependudukan sesuai peraturan perundang-undangan	Indeks kepuasan pelayanan kantor	Indeks	4	4	4	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	225.112.064.733	197.895.858.473	186.578.875.920	94,28%
Program Pendaftaran Penduduk (A)	Peningkatan tertib kependudukan sesuai peraturan perundang-undangan	Persentase Cakupan Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk	%	96,67	96,67	99,32	102,74%	100,00%	100,00%	100,00%	1.691.503.560	1.691.503.560	1.689.825.013	99,90%
Program Pencatatan Sipil (A)	Peningkatan tertib kependudukan sesuai peraturan perundang-undangan	Persentase Cakupan Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil	%	82,5	82,5	99,59	120,72%	100,00%	100,00%	100,00%	3.483.737.442	2.863.337.442	2.853.219.706	99,65%
Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (A)	Peningkatan pendayagunaan data kependudukan bagi pelayanan publik dan kepentingan pembangunan nasional.	Jumlah instansi/lembaga pengguna data kependudukan	Pengguna data	96	96	144	150,00%	100,00%	100,00%	100,00%	393.749.520	349.580.320	333.161.268	95,30%

Program	Sasaran Program	Indikator Program	Satuan	Target Tahun 2021	Kinerja Indikator Tahun 2021			Capaian Program	Rata-rata Capaian Kegiatan	Rata-rata Capaian Subkegiatan	Anggaran Tahun 2021	Anggaran Perubahan Tahun 2021	Realisasi	Serapan (%)
					Target	Realisasi	Capaian							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Program Pengelolaan Profil Kependudukan (A)	Peningkatan tertib kependudukan sesuai peraturan perundang-undangan	Persentase tersusunnya profil kependudukan	%	100	100	100	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	61.295.815	61.295.815	59.637.500	97,29%
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota	Peningkatan tertib kependudukan sesuai peraturan perundang-undangan	Indeks kepuasan pelayanan kantor	Indeks	4	4	4	100,00%	100,00%	100,00%	99,96%	58.252.034.019	55.172.813.772	47.010.273.829	85,21%
Program Pendaftaran Penduduk (B)	Peningkatan tertib kependudukan sesuai peraturan perundang-undangan	Persentase Cakupan Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk	%	96,67	96,67	99,32	102,74%	100,00%	100,00%	100,00%	55.009.328.820	51.954.015.306	51.553.089.259	99,23%
Program Pencatatan Sipil (B)	Peningkatan tertib kependudukan sesuai peraturan perundang-undangan	Persentase Cakupan Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil	%	82,5	82,5	99,59	120,72%	100,00%	100,00%	100,00%	584.114.373	385.322.373	377.828.044	98,06%
Program Pengelolaan Informasi Administrasi	Peningkatan pendayagunaan data kependudukan bagi pelayanan publik dan	Jumlah instansi/lembaga pengguna data	Pengguna data	96	96	144	150,00%	100,00%	- (Tidak ada kegiatan)	- (Tidak ada subkegiatan tahun 2021)	-	-	-	-

Program	Sasaran Program	Indikator Program	Satuan	Target Tahun 2021	Kinerja Indikator Tahun 2021			Capaian Program	Rata-rata Capaian Kegiatan	Rata-rata Capaian Subkegiatan	Anggaran Tahun 2021	Anggaran Perubahan Tahun 2021	Realisasi	Serapan (%)
					Target	Realisasi	Capaian							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Kependudukan (B)	kepentingan pembangunan nasional.	kependudukan							tahun 2021)					
Program Pengelolaan Profil Kependudukan (B)	Peningkatan tertib kependudukan sesuai peraturan perundang-undangan	Persentase tersusunnya profil kependudukan	%	100	100	100	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	164.298.948	75.983.292	71.898.200	94,62%

Sumber: e-SAKIP dan e-Monev 2021, diolah

Keterangan warna capaian kinerja dan serapan anggaran:

	: Mencapai Target ($\geq 100,00\%$)		: Sedang ($66,00\% \leq x < 75,00\%$)
	: Sangat Tinggi (Capaian Kinerja: $91,00\% \leq x < 100,00\%$; Serapan Anggaran: $91,00\% \leq x < 100,00\%$)		: Rendah ($51,00\% \leq x < 65,00\%$)
	: Tinggi ($76,00\% \leq x < 90,00\%$)		: Sangat Rendah ($\leq 50,00\%$)

Berdasarkan data yang disajikan pada Tabel 2.11, dari 10 indikator program Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, semuanya telah memiliki target dan realisasi dengan capaian termasuk dalam kategori mencapai target sebesar 100,00%. Untuk rata-rata capaian kegiatan di bawah program-program bidang ini, semua program memiliki rata-rata capaian mencapai 100,00%.

Sementara untuk rata-rata capaian subkegiatan, terdapat 2 program yang tidak memiliki rata-rata capaian mencapai 100,00% yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan rata-rata capaian mencapai 98,90%, yang masuk dalam kategori tinggi dan Program Pencatatan Sipil (B) dengan capaian sub kegiatan 80,00% yang masuk dalam kategori tinggi. Sedangkan 8 program lainnya telah memiliki rata-rata capaian mencapai 100,00%.

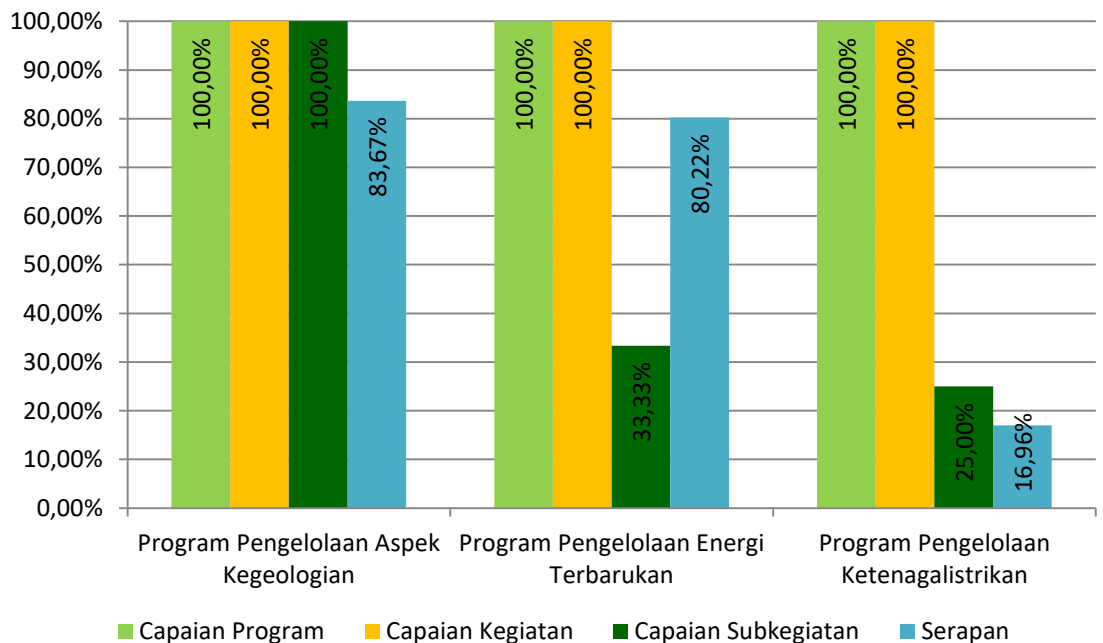
Energi dan Sumber Daya Mineral

Pada Tahun 2021, Urusan Pemerintahan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral memiliki 3 program dengan total anggaran program sebesar Rp11.271.197.196 dan serapan anggaran program sampai dengan Bulan Desember Tahun 2021 sebesar Rp9.066.053.307 (80,44% dari total pagu). Perangkat Daerah yang melaksanakan

urusan pemerintahan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral adalah Dinas Sumber Daya Air dan Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi. Informasi mengenai capaian program, kegiatan, subkegiatan dan serapan anggaran dijabarkan pada Gambar 2.68 sebagai berikut.

GAMBAR 2.68

Capaian Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Serapan Anggaran Urusan Pemerintahan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral Triwulan IV Tahun 2021



Sumber: e-SAKIP dan e-Monev 2021, diolah

Berdasarkan Gambar 2.68 seluruh program Urusan Pemerintahan Bidang memiliki target dan realisasi yang berada pada kategori mencapai target 100,00% pada Triwulan IV. Berdasarkan serapan anggaran, 3 program tersebut memiliki serapan anggaran yang berada pada kategori tinggi dan sangat rendah dengan rincian, Program Pengelolaan Aspek Kegeologian dengan serapan mencapai 83,67%, Program

Pengelolaan Energi Terbarukan dengan serapan mencapai 80,22%, dan Program Pengelolaan Ketenagalistrikan dengan serapan mencapai 16,96%. Pada rata-rata

kegiatan, keseluruhan program telah mencapai target dengan nilai capaian kegiatan 100,00%. Sedangkan untuk rata-rata capaian sub kegiatan, Program Pengelolaan Aspek Kegeologian memiliki capaian sebesar 100,00% dan dua program lain yakni Program Pengelolaan Energi Terbarukan dengan capaian sub kegiatan 33,33% dan Program Pengelolaan Ketenagalistrikan memiliki capaian sub kegiatan 25,00% masuk dalam kategori sangat rendah. Capaian kinerja indikator program/kegiatan/subkegiatan dan serapan anggaran Urusan Pemerintahan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral dapat dilihat pada Tabel 2.12 sebagai berikut.

TABEL 2.12







Capaian Kinerja dan Serapan Anggaran Program Urusan Pemerintahan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral Triwulan IV Tahun 2021

Program	Sasaran Program	Indikator Program	Satuan	Target Tahun 2021	Kinerja Indikator Tahun 2021			Capaian Program	Rata-rata Capaian Kegiatan	Rata-rata Capaian Subkegiatan	Anggaran Tahun 2021	Anggaran Perubahan Tahun 2021	Realisasi	Serapan (%)
					Target	Realisasi	Capaian							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Program Pengelolaan Aspek Kegeologian	Melambatnya penurunan permukaan tanah (land subsidence)	Jumlah bangunan gedung yang mematuhi peraturan pencatatan dan pengambilan air tanah	%	95	95	99,31	104,54%	100,00%	100,00%	100,00%	11.049.054.109	10.513.981.508	8.797.255.598	83,67%
		Jumlah titik pemantauan penurunan tanah	Unit	5	5	8	160,00%							
Program Pengelolaan Energi Terbarukan	Meningkatnya pemanfaatan energi terbarukan dengan aman, handal dan berkelanjutan untuk mendukung pembangunan kota	Jumlah daya PLTS Roof Top yang terbangun	Kilo Watt peak	200	200	2261	1130,50%	100,00%	100,00%	100,00%	12.826.286.337	221.892.188	177.994.359	80,22%
Program Pengelolaan Ketenagalistrikan	Meningkatnya pemanfaatan ketenagalistrikan secara aman, handal dan berkelanjutan	Persentase daya listrik terpasang di Kepulauan Seribu	%	87	87	100	114,94%	100,00%	100,00%	25,00%	1.077.683.230	535.323.500	90.803.350	16,96%
		Persentase bangunan/gedung/	%	46	46	50,7	110,22%							

Program	Sasaran Program	Indikator Program	Satuan	Target Tahun 2021	Kinerja Indikator Tahun 2021			Capaian Program	Rata-rata Capaian Kegiatan	Rata-rata Capaian Subkegiatan	Anggaran Tahun 2021	Anggaran Perubahan Tahun 2021	Realisasi	Serapan (%)
					Target	Realisasi	Capaian							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	an untuk mendukung pembangunan kota	sarana/prasarana milik pemda yang memiliki SLO ketenagalistrikan												

Sumber: e-SAKIP dan e-Monev 2021, diolah

Keterangan warna capaian kinerja dan serapan anggaran:

	: Mencapai Target ($\geq 100,00\%$)		: Sedang ($66,00\% \leq x < 75,00\%$)
	: Sangat Tinggi (Capaian Kinerja: $91,00\% \leq x < 100,00\%$; Serapan Anggaran: $91,00\% \leq x < 100,00\%$)		: Rendah ($51,00\% \leq x < 65,00\%$)
	: Tinggi ($76,00\% \leq x < 90,00\%$)		: Sangat Rendah ($\leq 50,00\%$)

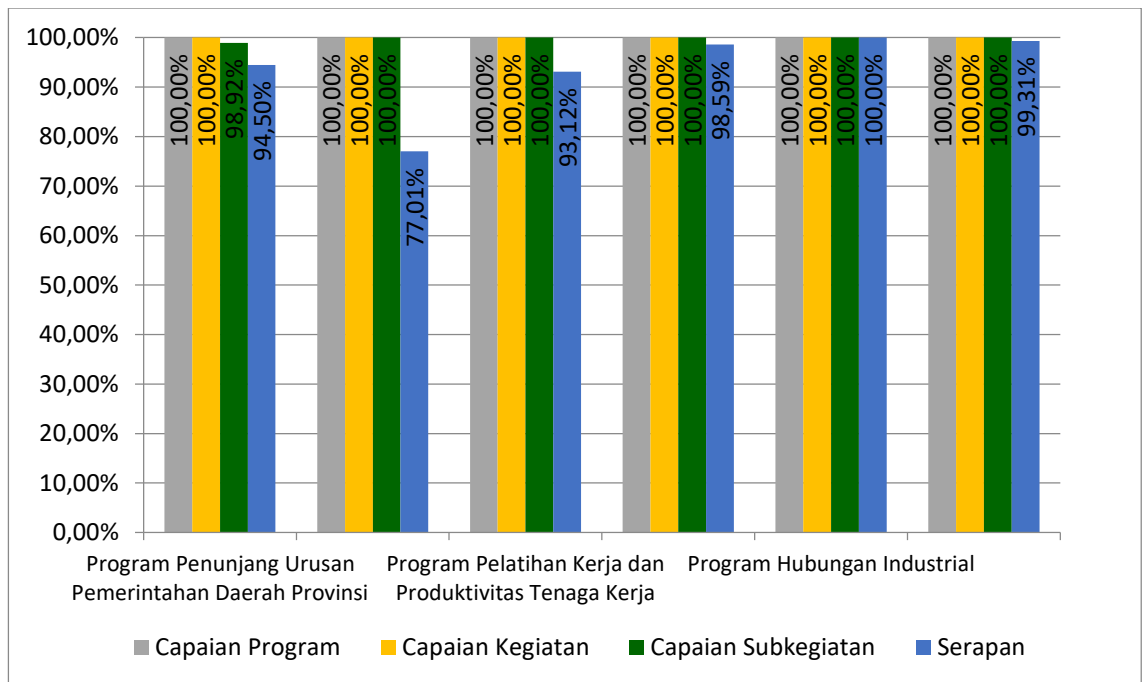
Tenaga Kerja

Pada tahun 2021, Urusan Pemerintahan pada Bidang Ketenagakerjaan memiliki 6 program dengan total anggaran program sebesar Rp256.324.857.735 dengan serapan anggaran program hingga bulan Desember 2021 sebesar Rp 240.536.380.616 atau sebesar 94,50% dari total pagu. Perangkat

daerah yang melaksanakan urusan Pemerintahan bidang ketenagakerjaan yakni Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi. Informasi terkait capaian program, kegiatan, sub kegiatan serta serapan anggaran pada Bidang Tenaga Kerja terdapat pada Gambar 2.69 sebagai berikut.

GAMBAR 2.69

Capaian Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Serapan Anggaran Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja Triwulan IV Tahun 2021



Sumber: e-SAKIP dan e-Monev 2021, diolah

Berdasarkan Gambar 2.69, seluruh program pada Urusan Pemerintahan Bidang Ketenagakerjaan secara keseluruhan mencapai target. Pada serapan anggaran, terdapat 1 (satu) program yang serapannya di bawah 80% yaitu Program Perencanaan Tenaga Kerja sehingga dapat dikatakan bahwa pencapaian program tersebut tidak dipengaruhi oleh anggaran. Selanjutnya,

perbandingan capaian program, rata-rata capaian kegiatan dan capaian subkegiatan cukup berimbang gap antar levelnya sehingga dapat dikatakan hubungan kausalitas antar level sasaran cukup baik. Data detail terkait kinerja indikator program, kegiatan, sub kegiatan, dan serapan anggaran urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja dapat dilihat pada Tabel 2.13.

TABEL 2.13

Capaian Kinerja dan Serapan Anggaran Program Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja Triwulan IV Tahun 2021 Pada Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi







Program	Sasaran Program	Indikator Program	Satuan	Target Tahun 2021	Kinerja Indikator Tahun 2021			Capaian Program	Rata-rata Capaian Kegiatan	Rata-rata Capaian Subkegiatan	Anggaran Tahun 2021	Anggaran Perubahan Tahun 2021	Realisasi	Serapan (%)
					Target	Realisasi	Capaian							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Meningkatnya indeks kepuasan pelayanan kantor urusan pemerintahan daerah	Indeks kepuasan pelayanan kantor	Indeks	4	4	4	100,00%	100,00%	100,00%	98,92%	247.863.328.205	247.863.328.205	234.223.728.021	94,50%
		Indeks kepuasan pelayanan kendaraan operasional	Indeks	4	4	4	100,00%							
Program Perencanaan Tenaga Kerja	Tersusunnya dokumen perencanaan tenaga kerja	Jumlah dokumen perencanaan tenaga kerja	Dokumen	1	1	1	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	69.600.000,00	69.600.000,00	53.600.000,00	77,01%
Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Meningkatnya angkatan kerja yang mampu menghasilkan barang dan jasa secara efektif dan efisien	Jumlah pencari kerja yang mendapatkan pelatihan	Orang	6096	6096	7970	130,74%	100,00%	100,00%	100,00%	39.579.778.172	4.795.445.890	4.465.715.183	93,12%
Program Penempatan	Meningkatnya	Jumlah pencari	Orang	26000	26000	28168	108,34%	100,00%	100,00%	100,00%				98,59%

Program	Sasaran Program	Indikator Program	Satuan	Target Tahun 2021	Kinerja Indikator Tahun 2021			Capaian Program	Rata-rata Capaian Kegiatan	Rata-rata Capaian Subkegiatan	Anggaran Tahun 2021	Anggaran Perubahan Tahun 2021	Realisasi	Serapan (%)
					Target	Realisasi	Capaian							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
tan Tenaga Kerja	keberhasi lan pencari kerja dalam mempero leh pekerjaan di sektor formal dan informal	kerja yang berhasil ditempatka n												
		Jumlah pencari kerja yang berwirausa ha	Orang	3399	3399	4060	119,45%				9.413.86 2.324	9.413.862.3 24	9.281.28 4.007	
		Jumlah sistem informasi yang dibangun atau dikembang kan	Sistem	1	1	1	100,00%							
Program Hubunga n Industrial	Meningka tnya jumlah kasus hubunga n industrial yang masuk ke tingkat Perjanjia n Bersama (PB) hasil mediasi bidang hubunga n industrial	Jumlah kasus hubungan industrial yang masuk ke tingkat Perjanjian Bersama (PB)	Kasus	100	100	113	113,00%	100,00%	100,00%	100,00%	1.594.55 5.000	1.562.400.0 00	1.562.40 0.000	100,00%

Program	Sasaran Program	Indikator Program	Satuan	Target Tahun 2021	Kinerja Indikator Tahun 2021			Capaian Program	Rata-rata Capaian Kegiatan	Rata-rata Capaian Subkegiatan	Anggaran Tahun 2021	Anggaran Perubahan Tahun 2021	Realisasi	Serapan (%)
					Target	Realisasi	Capaian							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	dan kesejahteraan pekerja													
Program Pengawasan Ketenagakerjaan	Meningkatkan jumlah perusahaan yang menjalankan norma ketenagakerjaan	Jumlah perusahaan yang menjalankan norma kerja	Perusahaan	3700	3700	3762	101,68%	100,00%	100,00%	100,00%	1.954.970.760	1.168.641.820	1.160.537.411	99,31%
		Jumlah perusahaan yang menjalankan norma K3	Perusahaan	1380	1380	2233	161,81%							

Sumber: e-SAKIP dan e-Monev 2021, diolah

Keterangan warna capaian kinerja dan serapan anggaran:

	: Mencapai Target ($\geq 100,00\%$)		: Sedang ($66,00\% \leq x < 75,00\%$)
	: Sangat Tinggi (Capaian Kinerja: $91,00\% \leq x < 100,00\%$; Serapan Anggaran: $91,00\% \leq x < 100,00\%$)		: Rendah ($51,00\% \leq x < 65,00\%$)
	: Tinggi ($76,00\% \leq x < 90,00\%$)		: Sangat Rendah ($\leq 50,00\%$)

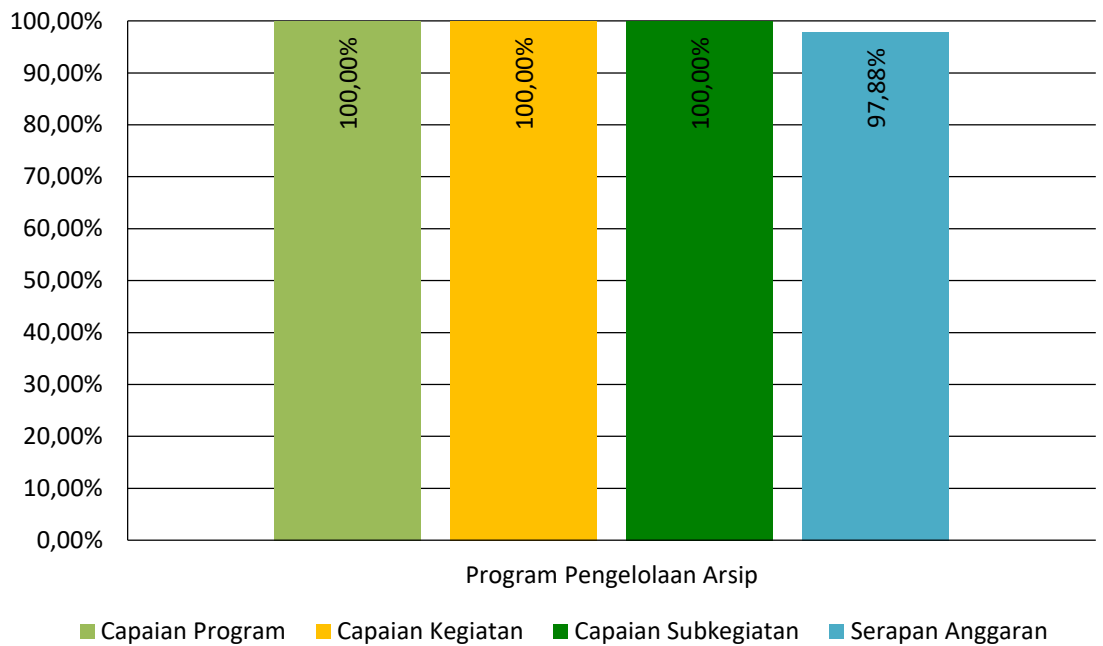
Kearsipan

Pada Tahun 2021, Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan memiliki 1 program dengan total anggaran program sebesar Rp4.777.761.343 dan serapan anggaran program sampai dengan Bulan Desember Tahun 2021 sebesar Rp4.576.450.840 (97,88% dari total pagu). Perangkat Daerah

yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan adalah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Informasi mengenai capaian program/ kegiatan/ sub kegiatan dan serapan anggaran dijabarkan pada Gambar 2.70 sebagai berikut.

GAMBAR 2.70

Capaian Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Serapan Anggaran Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan Triwulan IV Tahun 2021



Sumber: e-SAKIP dan e-Monev 2021, diolah

Berdasarkan Gambar 2.70 di atas, capaian program pada Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan mencapai target. Selanjutnya, untuk perbandingan capaian program, rata-rata capaian kegiatan dan rata-rata capaian subkegiatan juga cukup seimbang dimana keseluruhannya mencapai target 100%.

Serapan anggaran pada Program Pengelolaan Arsip juga di atas 90% sehingga dapat dikatakan dalam kondisi normal. Capaian kinerja indikator program/-kegiatan/subkegiatan dan serapan anggaran urusan pemerintahan Bidang Kearsipan dapat dilihat pada Tabel 2.14 sebagai berikut.







TABEL 2.14

Capaian Kinerja dan Serapan Anggaran Program Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan Triwulan IV Tahun 2021 pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Program	Sasaran Program	Indikator Program	Satuan	Target Tahun 2021	Kinerja Indikator Tahun 2021			Capaian Program	Rata-rata Capaian Kegiatan	Rata-rata Capaian Subkegiatan	Anggaran Tahun 2021	Anggaran Perubahan Tahun 2021	Realisasi	Serapan (%)
					Target	Realisasi	Capaian							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Program Pengelolaan Arsip	Meningkatnya Persentase Pengelolaan Kearsipan di SKPD/UKPD dan BUMD sesuai standar serta Arsip yang Siap Layan (e-arsip)	Persentase pengelolaan kearsipan di SKPD/UKPD dan BUMD sesuai standar	%	81,48	81,48	85,20	104,57%	100,00%	100,00%	100,00%	4.787.337.305	4.777.761.343	4.676.450.840	97,88%
		Persentase arsip yang siap layan (e-arsip)	%	77,78	77,78	80,63	103,66%							

Sumber: e-Sakip 2021, diolah

Keterangan warna capaian kinerja dan serapan anggaran:

	: Mencapai Target ($\geq 100,00\%$)		: Sedang ($66,00\% \leq x < 75,00\%$)
	: Sangat Tinggi (Capaian Kinerja: $91,00\% \leq x < 100,00\%$; Serapan Anggaran: $91,00\% \leq x < 100,00\%$)		: Rendah ($51,00\% \leq x < 65,00\%$)
	: Tinggi ($76,00\% \leq x < 90,00\%$)		: Sangat Rendah ($\leq 50,00\%$)

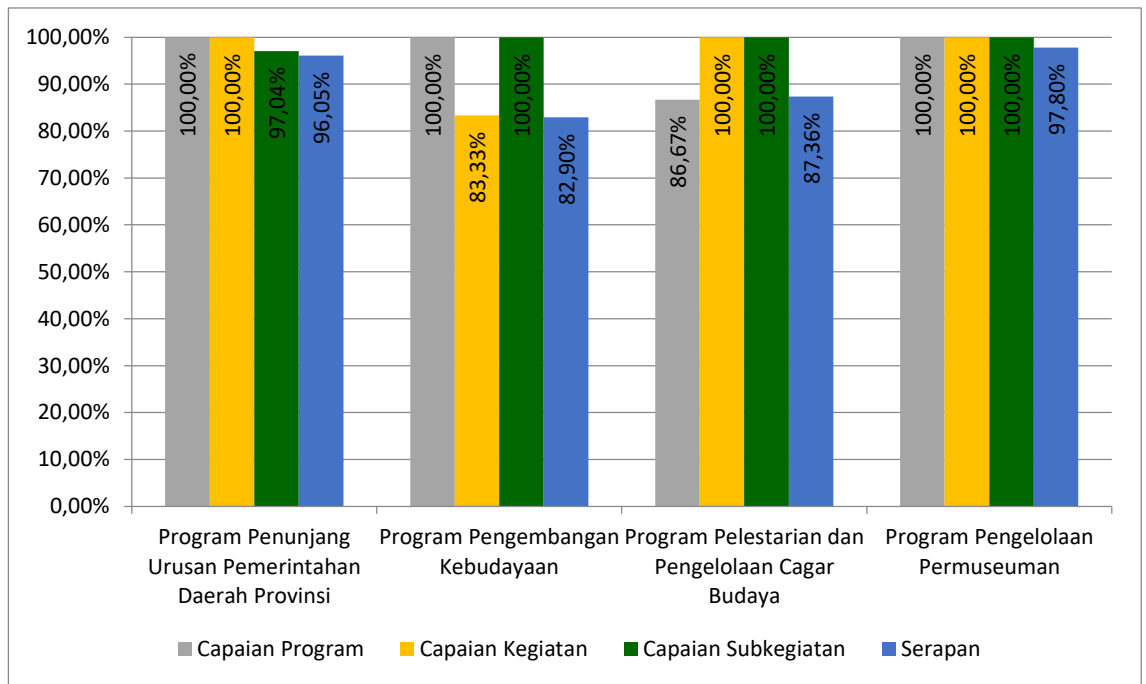
Kebudayaan

Pada Tahun 2021, Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan memiliki 4 program dengan total anggaran program sebesar Rp212.823.019.951 dan serapan anggaran program sampai dengan Bulan Desember Tahun 2021 sebesar Rp200.846.601.935 (94,37% dari total pagu). Perangkat Daerah

yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan adalah Dinas Kebudayaan. Informasi mengenai capaian program/kegiatan/subkegiatan dan serapan anggaran dijabarkan pada Gambar 2.71 sebagai berikut.

GAMBAR 2.71

Capaian Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Serapan Anggaran Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan Triwulan IV Tahun 2021



Sumber: e-SAKIP dan e-Monev 2021, diolah

Berdasarkan Gambar 2.71, terdapat 1 (satu) program yang tidak mencapai target yaitu program pelestarian dan pengelolaan cagar budaya akan tetapi masih dalam kategori tinggi. Sementara itu, apabila melihat perbandingan antara capaian program, rata-rata capaian kegiatan dan rata-rata capaian subkegiatan cukup seimbang perbandingannya kecuali pada Program Pengembangan Kebudayaan yang rata-rata

capaian kegiatannya 83,33% sementara capaian program dan rata-rata capaian subkegiatan mencapai target. Hal ini mengindikasikan bahwa terdapat hubungan kausalitas yang masih perlu ditingkatkan pada level kegiatan. Capaian kinerja indikator program/-kegiatan/subkegiatan dan serapan anggaran Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan dapat dilihat pada Tabel 2.15 sebagai berikut.

TABEL 2.15







Capaian Kinerja dan Serapan Anggaran Program Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan Triwulan IV Tahun 2021 pada Dinas Kebudayaan

Program	Sasaran Program	Indikator Program	Satuan	Target Tahun 2021	Kinerja Indikator Tahun 2021			Capaian Program	Rata-rata Capaian Kegiatan	Rata-rata Capaian Subkegiatan	Anggaran Tahun 2021	Anggaran Perubahan Tahun 2021	Realisasi	Serapan (%)
					Target	Realisasi	Capaian							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan dan Keuangan Daerah yang Transparan dan Akuntabel	Indeks kepuasan pelayanan kantor	Indeks	4	3	3	100,00%	100,00%	100,00%	97,04%	189.906.757.925	173.184.222.241	166.347.850.364	96,05%
		Indeks kepuasan pelayanan kendaraan operasional	Indeks	4	3	3	100,00%							
Program Pengembangan Kebudayaan	Meningkatnya pengelolaan objek pemajuan kebudayaan	Jumlah Pelaku Seni Budaya yang dilatih	Orang	8.180	8.180	14.924	182,44%	100,00%	83,33%	100,00%	19.191.467.733	26.588.949.599	22.043.389.183	82,90%
		Jumlah Pelaku Seni Budaya yang tampil	Orang	20.320	20.320	21.204	104,35%							
		Jumlah unsur seni budaya yang dilestarikan	Jenis	20	20	877	4385,00%							
Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Meningkatnya jumlah cagar budaya yang dikonservasi dan direvitalisasi dibandingkan jumlah seluruh cagar budaya yang ada di DKI Jakarta	Persentase cagar budaya yang berhasil direvitalisasi	%	75	75	65	86,67%	86,67%	100,00%	100,00%	4.397.842.138	2.940.413.013	2.568.821.475	87,36%

Program	Sasaran Program	Indikator Program	Satuan	Target Tahun 2021	Kinerja Indikator Tahun 2021			Capaian Program	Rata-rata Capaian Kegiatan	Rata-rata Capaian Subkegiatan	Anggaran Tahun 2021	Anggaran Perubahan Tahun 2021	Realisasi	Serapan (%)
					Target	Realisasi	Capaian							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Program Pengelolaan Permuseuman	Meningkatnya sarana dan prasarana untuk menunjang kepuasan dan kenyamanan pengunjung museum	Persentase kelengkapan sarana prasarana	%	5	5	66,7	1334,00 %	100,00%	100,00%	100,00%	4.731.745.449	10.109.435.098	9.886.540.913	97,80%

Sumber: e-SAKIP dan e-Monev 2021, diolah

Keterangan warna capaian kinerja dan serapan anggaran:

	: Mencapai Target	($\geq 100,00\%$)		: Sedang	($66,00\% \leq x < 75,00\%$)
	: Sangat Tinggi	(Capaian Kinerja: $91,00\% \leq x < 100,00\%$; Serapan Anggaran: $91,00\% \leq x < 100,00\%$)		: Rendah	($51,00\% \leq x < 65,00\%$)
	: Tinggi	($76,00\% \leq x < 90,00\%$)		: Sangat Rendah	($\leq 50,00\%$)

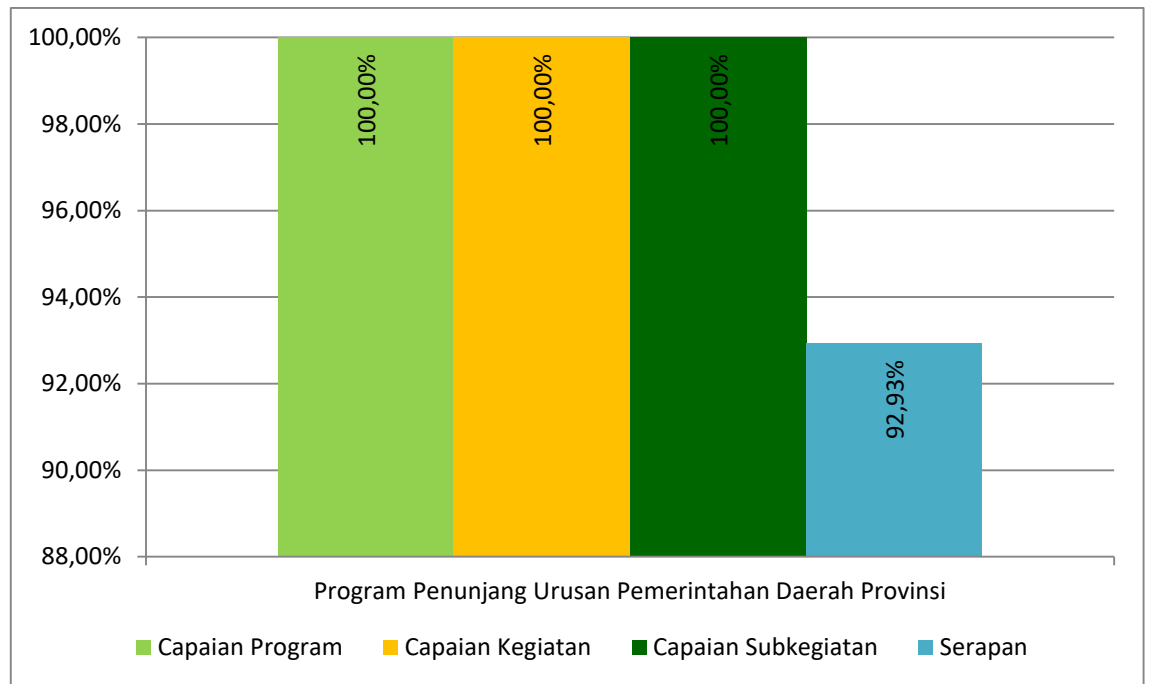
Kehutanan

Pada Tahun 2021, Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan memiliki 1 program dengan total anggaran program sebesar Rp254.397.787.159 dan serapan anggaran program sampai dengan Bulan Desember Tahun 2021 sebesar Rp246.461.154.988 (96,88% dari total pagu). Perangkat daerah

yang melaksanakan urusan pemerintahan Bidang Kehutanan adalah Dinas Pertamanan dan Hutan Kota. Informasi mengenai capaian program/kegiatan/- subkegiatan dan serapan anggaran dijabarkan pada Gambar 2.72 sebagai berikut

GAMBAR 2.72

Capaian Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Serapan Anggaran Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan Triwulan IV Tahun 2021



Sumber: e-SAKIP dan e-Monev 2021, diolah

Berdasarkan gambar 2.72, program Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan, yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi memiliki capaian program dengan kategori mencapai target. Untuk rata-rata capaian kegiatan dan rata-rata capaian subkegiatan mencapai target sehingga dapat dikatakan capaiannya cukup seimbang.

Selanjutnya, terkait data serapan anggaran dapat dikatakan masih dalam kondisi ideal karena serapan anggarannya di atas 80%. Capaian kinerja indikator program/kegiatan/-subkegiatan dan serapan anggaran Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan dapat dilihat pada Tabel 2.16 di bawah sebagai berikut.







TABEL 2.16

Capaian Kinerja dan Serapan Anggaran Program Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan Triwulan IV Tahun 2021 pada Dinas Pertamanan dan Hutan Kota

Program	Sasaran Program	Indikator Program	Satuan	Target Tahun 2021	Kinerja Indikator Tahun 2021			Capaian Program	Rata-rata Capaian Kegiatan	Rata-rata Capaian Subkegiatan	Anggaran Tahun 2021	Anggaran Perubahan Tahun 2021	Realisasi	Serapan (%)
					Target	Realisasi	Capaian							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Terlaksananya penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Indeks kepuasan layanan penunjang urusan pemerintahan	Indeks	3	3	4	133,33%	98,00%	100,00%	100,00%	304.744.771.822	254.387.787.159	246.461.154.988	96,88%

Sumber: e-SAKIP dan e-Monev 2021, diolah

Keterangan warna capaian kinerja dan serapan anggaran:

	: Mencapai Target ($\geq 100,00\%$)		: Sedang ($66,00\% \leq x < 75,00\%$)
	: Sangat Tinggi (Capaian Kinerja: $91,00\% \leq x < 100,00\%$; Serapan Anggaran: $91,00\% \leq x < 100,00\%$)		: Rendah ($51,00\% \leq x < 65,00\%$)
	: Tinggi ($76,00\% \leq x < 90,00\%$)		: Sangat Rendah ($\leq 50,00\%$)

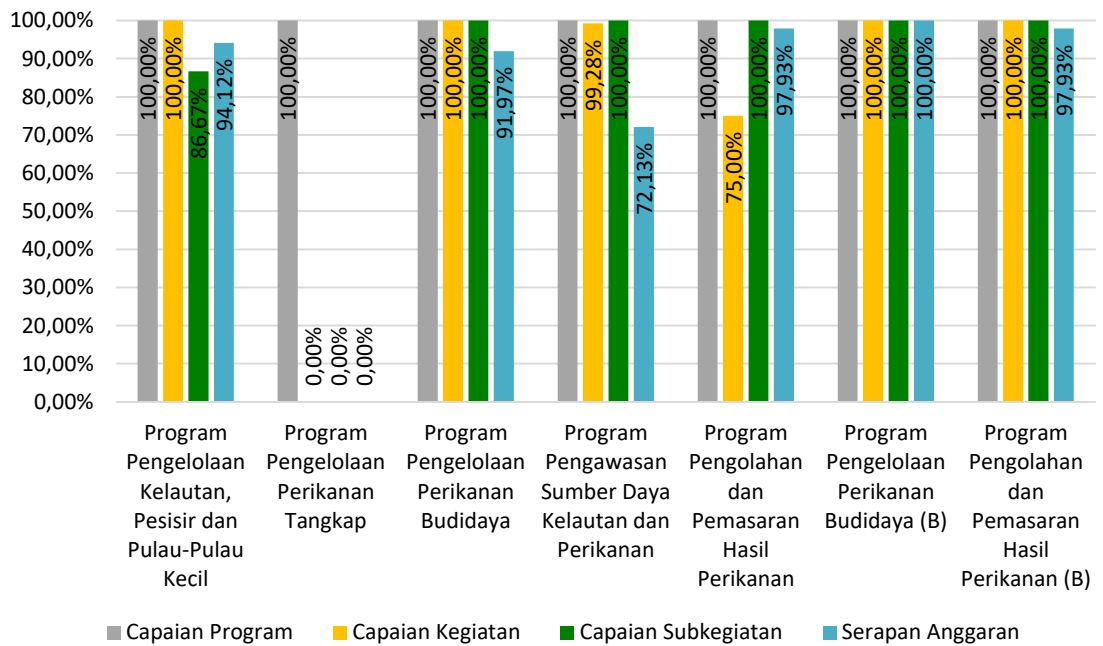
Kelautan dan Perikanan

Pada Tahun 2021, Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan memiliki 7 program dengan total anggaran program sebesar Rp6.221.738.653 dan serapan anggaran program sampai dengan Bulan Desember Tahun 2021 sebesar Rp5.726.249.621 (92,04% dari total pagu).

Perangkat daerah yang melaksanakan urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan adalah dinas ketahanan pangan, kelautan dan pertanian. Informasi mengenai capaian program/kegiatan/subkegiatan dan serapan anggaran dijabarkan pada Gambar 2.73 sebagai berikut.

GAMBAR 2.73

Capaian Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Serapan Anggaran Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan Triwulan IV Tahun 2021



Sumber: e-SAKIP dan e-Monev 2021, diolah

Berdasarkan Gambar 2.73, seluruh program pada Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan mencapai target. Apabila melihat perbandingan capaian program, rata-rata capaian kegiatan dan rata-rata capaian subkegiatan sebagian besar dalam kondisi seimbang kecuali pada Program Pengelolaan Perikanan Tangkap dan Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan. Selanjutnya

untuk serapan anggaran, terdapat 1 (satu) program yang serapannya di bawah 80% dan 1 (satu) program tidak memiliki anggaran. Capaian kinerja indikator program/kegiatan/-subkegiatan dan serapan anggaran Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan dapat dilihat pada Tabel 2.17 sebagai berikut.

TABEL 2.17







Capaian Kinerja dan Serapan Anggaran Program Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan Triwulan IV Tahun 2021 pada Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian

Program	Sasaran Program	Indikator Program	Satuan	Target Tahun 2021	Kinerja Indikator Tahun 2021			Capaian Program	Rata-rata Capaian Kegiatan	Rata-rata Capaian Subkegiatan	Anggaran Tahun 2021	Anggaran Perubahan Tahun 2021	Realisasi	Serapan (%)
					Target	Realisasi	Capaian							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Bertambahnya luas ekosistem pesisir dan laut yang dikonservasi dan direhabilitasi serta tercapainya masyarakat peduli ekosistem pesisir dan laut	Luas perairan ekosistem laut dan pesisir yang dikonservasi dan direhabilitasi	Ha	1	1	1,16	116,00%	100,00%	100,00%	86,67%	11.813.206.726	889.481.417	837.206.623	94,12%
Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Tercapainya Produksi Perikanan tangkap	Jumlah produksi perikanan tangkap	Ton	114.320	114.320,00	115.775,00	101,27%	100,00%	-	-	-	-	-	-
Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Terpenuhiya produksi perikanan budidaya	Jumlah produksi ikan hias	Ekor	16.619.000	16.619.000	16.642.500	100,14%	100,00%	100,00%	100,00%	5.813.016.992	5.135.504.969	4.723.194.361	91,97%
		Jumlah produksi benih ikan	Ekor	35.982.625	35.982.600	48.372.400	134,43%							
Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan	Tercapainya Pengawasan Sumber Daya Kelautan	Jumlah pelanggaran pemanfaatan sumberdaya	Pelanggaran	65	65	69	106,15%	100,00%	99,28%	100,00%	698.051.294	104.421.268	75.317.637	72,13%

Program	Sasaran Program	Indikator Program	Satuan	Target Tahun 2021	Kinerja Indikator Tahun 2021			Capaian Program	Rata-rata Capaian Kegiatan	Rata-rata Capaian Subkegiatan	Anggaran Tahun 2021	Anggaran Perubahan Tahun 2021	Realisasi	Serapan (%)
					Target	Realisasi	Capaian							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
dan Perikanan	dan Perikanan	a kelautan dan perikanan												
Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Terlaksananya Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Jumlah produksi dan pemasaran produk olahan hasil perikanan	Ton	6.827,57	6827,57	16057,47	235,19%	100,00%	75,00%	100,00%	1.469.543.711	86.981.000	85.181.000	97,93%
Program Pengelolaan Perikanan Budidaya (B)	Terpenuhinya Produksi perikanan budidaya	Jumlah produksi perikanan budidaya	Ton	1.593	1593	2906,7	182,47%	100,00%	100,00%	100,00%	2.114.847.489	5.350.000	5.350.000	100,00%
Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan (B)	Tercapainya angka konsumsi ikan	Angka Konsumsi Ikan	Kg/Kapita/Tahun	40	40	41,9	104,75%	100,00%	100,00%	100,00%	86.981.000	86.981.000	85.181.000	97,93%

Sumber: e-SAKIP dan e-Monev 2021, diolah

Keterangan warna capaian kinerja dan serapan anggaran:

	: Mencapai Target ($\geq 100,00\%$)		: Sedang ($66,00\% \leq x < 75,00\%$)
	: Sangat Tinggi (Capaian Kinerja: $91,00\% \leq x < 100,00\%$; Serapan Anggaran: $91,00\% \leq x < 100,00\%$)		: Rendah ($51,00\% \leq x < 65,00\%$)
	: Tinggi ($76,00\% \leq x < 90,00\%$)		: Sangat Rendah ($\leq 50,00\%$)

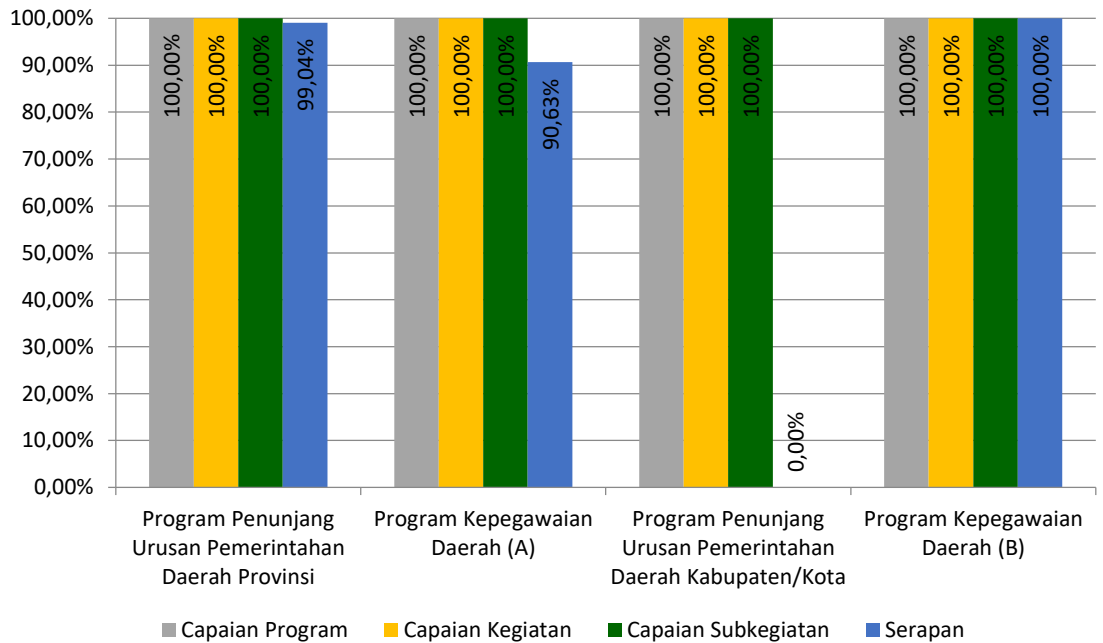
Kepegawaian

Pada Tahun 2021, Unsur Kepegawaian memiliki 4 program dengan total anggaran program sebesar Rp357.723.177.264 dan serapan anggaran program sampai dengan Bulan Desember Tahun 2021 sebesar Rp351.941.062.247 (98,38% dari total pagu).

Perangkat daerah yang melaksanakan Unsur Kepegawaian adalah Badan Kepegawaian Daerah. Informasi mengenai capaian program/kegiatan/- subkegiatan dan serapan anggaran dijabarkan pada Gambar 2.74 sebagai berikut.

GAMBAR 2.74

Capaian Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Serapan Anggaran Unsur Kepegawaian Triwulan IV Tahun 2021



Sumber: e-SAKIP dan e-Monev 2021, diolah

Berdasarkan Gambar 2.74 di atas, seluruh program Unsur Kepegawaian telah memiliki target dan realisasi dengan rata-rata capaian mencapai 100,00% pada Triwulan 4 Tahun 2021. Berdasarkan serapan anggaran, 3 dari 4 program memiliki serapan anggaran dengan kategori tinggi dan sangat tinggi. 3 program tersebut antara lain Program Kepegawaian Daerah (B) dengan serapan mencapai 100%, Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dengan serapan mencapai

99,04%, dan Program Kepegawaian Daerah (A) dengan serapan mencapai 90,63%.

Sementara 1 program lainnya yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota tidak memiliki anggaran dan realisasi sehingga tidak dapat ditentukan nilai serapan anggarannya. Capaian kinerja indikator program/kegiatan/subkegiatan dan serapan anggaran Unsur Kepegawaian dapat dilihat pada Tabel 2.18 sebagai berikut.

TABEL 2.18

Capaian Kinerja dan Serapan Anggaran Program Unsur Kepegawaian Triwulan IV Tahun 2021 pada Badan Kepegawaian Daerah







Program	Sasaran Program	Indikator Program	Satuan	Target Tahun 2021	Kinerja Indikator Tahun 2021			Capaian Program	Rata-rata Capaian Kegiatan	Rata-rata Capaian Subkegiatan	Anggaran Tahun 2021	Anggaran Perubahan Tahun 2021	Realisasi	Serapan (%)
					Target	Realisasi	Capaian							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel	Indeks kepuasan pelayanan kantor	indeks	4	4	4	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	634.592.813.732	329.790.231.478	326.618.677.618	99,04%
		Indeks kepuasan pelayanan kendaraan operasional	indeks	4	4	4	100,00%							
Program Kepegawaian Daerah (A)	Terwujudnya pengelolaan manajemen ASN berbasis sistem merit	Indeks capaian kinerja ASN Pemprov. DKI Jakarta	Nilai (Skala 0-100)	88	88	88,91	101,03%	100,00%	100,00%	100,00%	8.896.928.210	27.866.945.786	25.256.384.629	90,63%
		Persentase jabatan yang diisi sesuai dengan kompetensi dan kualifikasi	%	80	80	81,17	101,46%							
		Persentase penurunan tingkat	%	11	11	14,29	129,91%							

Program	Sasaran Program	Indikator Program	Satuan	Target Tahun 2021	Kinerja Indikator Tahun 2021			Capaian Program	Rata-rata Capaian Kegiatan	Rata-rata Capaian Subkegiatan	Anggaran Tahun 2021	Anggaran Perubahan Tahun 2021	Realisasi	Serapan (%)
					Target	Realisasi	Capaian							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
		pelanggaran disiplin di SKPD/UKPD yang menjadi kewenangan BKD												
		Indeks Kepuasan Pelayanan Kepegawaian	Nilai (skala 0-100)	90	90	90,96	101,07%							
		Kepuasan Layanan KORPRI	%	90	90	93,26	103,62%							
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel	Indeks Kepuasan Pelayanan Kantor	Indeks	4	4	4	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	426.705.506	-	-	-
Program Kepegawaian Daerah (B)	Terwujudnya pengelolaan manajemen	Indeks Kepuasan Layanan Kepegawaian	Nilai (skala 0-100)	90	90	90,96	101,07%	100,00%	100,00%	100,00%	66.000.000	66.000.000	66.000.000	100,00%

Program	Sasaran Program	Indikator Program	Satuan	Target Tahun 2021	Kinerja Indikator Tahun 2021			Capaian Program	Rata-rata Capaian Kegiatan	Rata-rata Capaian Subkegiatan	Anggaran Tahun 2021	Anggaran Perubahan Tahun 2021	Realisasi	Serapan (%)
					Target	Realisasi	Capaian							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	en ASN berbasis sitem merit	Persentase jabatan yang diisi sesuai dengan kompetensi dan kualifikasi	%	80	80	81,17	101,46%							

Sumber: e-SAKIP dan e-Monev 2021, diolah

Keterangan warna capaian kinerja dan serapan anggaran:

	: Mencapai Target	($\geq 100,00\%$)		: Sedang	($66,00\% \leq x < 75,00\%$)
	: Sangat Tinggi	(Capaian Kinerja: $91,00\% \leq x < 100,00\%$; Serapan Anggaran: $91,00\% \leq x < 100,00\%$)		: Rendah	($51,00\% \leq x < 65,00\%$)
	: Tinggi	($76,00\% \leq x < 90,00\%$)		: Sangat Rendah	($\leq 50,00\%$)

Berdasarkan Tabel 2.18, sebanyak 10 indikator program Unsur Kepegawaian semuanya telah memiliki target dan realisasi dengan kategori capaian mencapai target 100,00% pada Triwulan IV Tahun 2021. Untuk rata-rata capaian kegiatan di bawah program-program unsur ini termasuk dalam kategori

mencapai target atau bernilai 100,00%. Pada rata-rata capaian sub kegiatan seluruh program memiliki capaian sebesar 100,00%. Hal ini mengindikasikan bahwa rumusan kegiatan dan subkegiatan sudah tepat dan mampu berkontribusi terhadap indikator program.

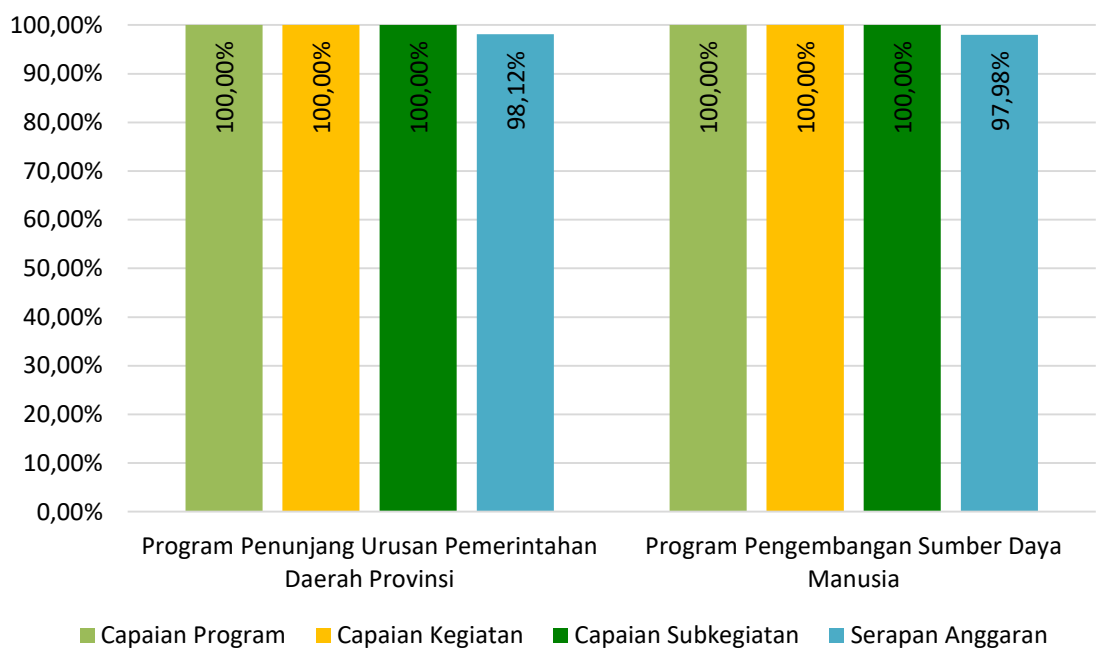
Pendidikan dan Pelatihan

Pada Tahun 2021, Unsur Pendidikan dan Pelatihan memiliki 2 program dengan total anggaran program sebesar Rp 62.218.714.980 dan serapan anggaran program sampai dengan Bulan Desember Tahun 2021 sebesar Rp 61.043.643.585 (98,11% dari total pagu). Perangkat daerah

yang melaksanakan Unsur Pendidikan dan Pelatihan adalah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Informasi mengenai capaian program/kegiatan/subkegiatan dan serapan anggaran dijabarkan pada Gambar 2.75 berikut.

GAMBAR 2.75

Capaian Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Serapan Anggaran Unsur Pendidikan dan Pelatihan Triwulan IV Tahun 2021



Sumber: e-SAKIP dan e-Monev 2021, diolah

Berdasarkan Gambar 2.75, dari 2 program Unsur Pendidikan dan Pelatihan, semuanya telah memiliki target dan realisasi dengan capaian sebesar 100,00% pada Triwulan IV. Berdasarkan serapan anggaran, Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi memiliki serapan sebesar 98,12%

dan Program Pengembangan Sumber Daya Manusia memiliki serapan sebesar 97,98%. Capaian kinerja indikator program/kegiatan/-subkegiatan dan serapan anggaran Unsur Pendidikan dan Pelatihan dapat dilihat pada Tabel 2.19 sebagai berikut.

TABEL 2.19

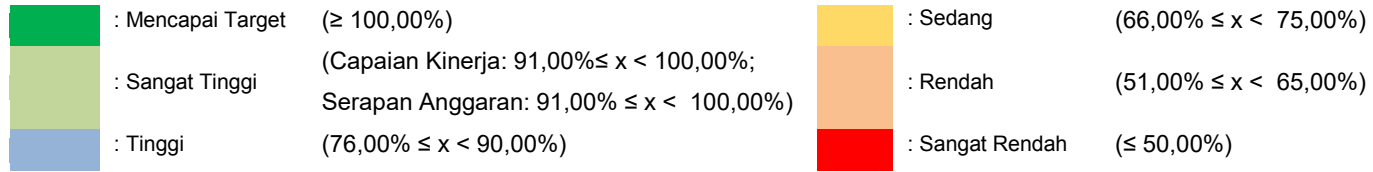
Capaian Kinerja dan Serapan Anggaran Program Unsur Pendidikan dan Pelatihan Triwulan IV Tahun 2021 pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Program	Sasaran Program	Indikator Program	Satuan	Target Tahun 2021	Kinerja Indikator Tahun 2021			Capaian Program	Rata-rata Capaian Kegiatan	Rata-rata Capaian Subkegiatan	Anggaran Tahun 2021	Anggaran Perubahan Tahun 2021	Realisasi	Serapan (%)
					Target	Realisasi	Capaian							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Anggaran	Indeks kepuasan pelayanan kantor	Indeks	4	4,00	4,00	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	74.467.263.195	57.233.491.817	56.159.242.416	98,12%
		Indeks kepuasan pelayanan kendaraan operasional	Indeks	4	4,00	4,00	100,00%							
Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Meningkatnya Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase peningkatan kompetensi SDM di bidang kompetensi teknis dan fungsional	%	66	66,00	68,05	103,11%	100,00%	100,00%	100,00%	6.821.710.970	4.985.223.163	4.884.401.169	97,98%
		Akreditasi Pengelolaan Diklat	Jenis diklat	4	4,00	4,00	100,00%							
		Persentase SDM aparatur yang mendapatkan sertifikasi profesi	%	74	74,00	74,00	100,00%							
		Persentase peningkatan kompetensi SDM di bidang kompetensi dasar dan manajerial	%	65	65,00	65,00	100,00%							
		Persentase peningkatan kompetensi SDM di bidang kompetensi	%	54	54,00	54,00	100,00%							



Sumber: e-SAKIP dan e-Monev 2021, diolah

Keterangan warna capaian kinerja dan serapan anggaran:



Berdasarkan Tabel 2.19, dari 7 indikator Program Unsur Pendidikan dan Pelatihan, semuanya telah memiliki target dan realisasi dengan kategori capaian mencapai target (100,00%) pada Triwulan IV Tahun 2021.

Sementara itu untuk rata-rata capaian kegiatan dan subkegiatan di bawah program-program unsur ini termasuk dalam kategori mencapai target atau bernilai 100,00%.

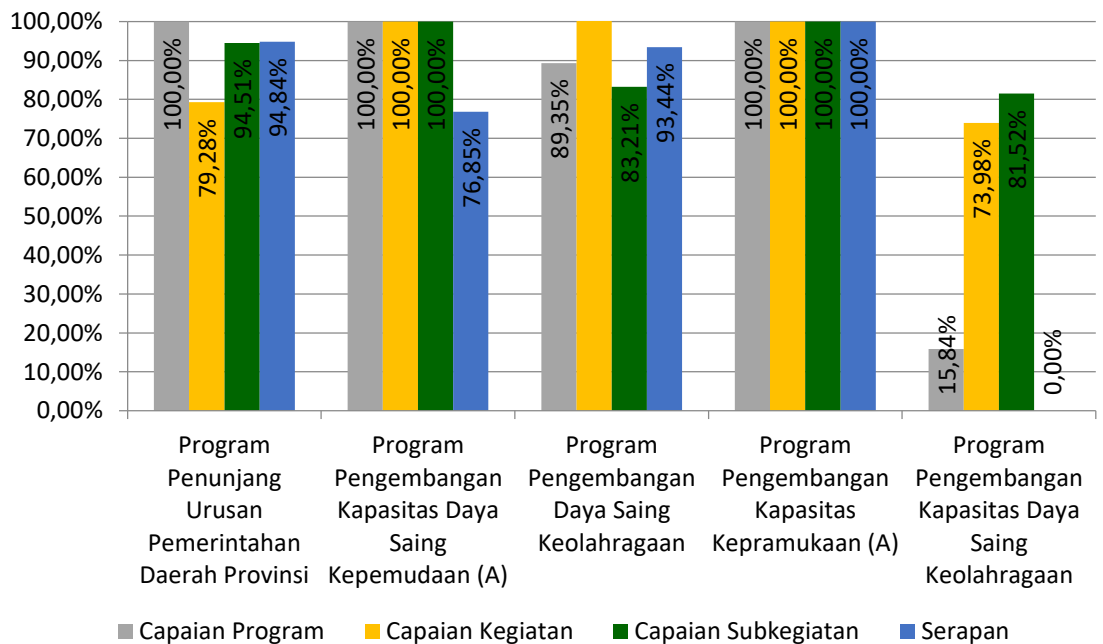
Kepemudaan dan Olah Raga

Pada Tahun 2021, Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga memiliki 5 program dengan total anggaran program sebesar Rp908.912.667.744 dan serapan anggaran program sampai dengan Bulan Desember Tahun 2021 sebesar Rp851.832.918.961 (93,72% dari total pagu).

Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga adalah Dinas Pemuda dan Olahraga. Informasi mengenai capaian program/kegiatan/subkegiatan dan serapan anggaran dijabarkan pada Gambar 2.76 sebagai berikut.

GAMBAR 2.76

Capaian Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Serapan Anggaran Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga Triwulan IV Tahun 2021



Sumber: e-SAKIP dan e-Monev 2021, diolah

Berdasarkan Gambar 2.76 di atas, dari 5 program Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga, 3 di antaranya telah memiliki target dan realisasi dengan capaian termasuk dalam kategori mencapai target pada Triwulan IV Tahun 2021. Sementara 2 program lainnya yaitu Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan dan program Pengembangan Kapasitas Daya

Saing Keolahragaan juga memiliki target dan realisasi, tetapi kategori capaiannya masing-masing berada pada kategori tinggi sebesar 89,35% dan rendah sebesar 15,84%. Penyebab rendahnya capaian program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan dikarenakan pelaksanaan program tersebut melibatkan banyak masyarakat sehingga

pelaksanaannya terkendala pandemi covid-19.

Berdasarkan serapan anggaran, terdapat 4 program yang memiliki serapan di atas 80% yaitu Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan (A) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan dan Program Pengembangan Kapasitas Daya

Saing Kepemudaan (A). Sementara itu 1 program lagi tidak dapat dihitung serapannya dikarenakan anggarannya dihapus pada Perubahan APBD Tahun 2021. Capaian kinerja indikator program/kegiatan/-subkegiatan dan serapan anggaran urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga dapat dilihat pada Tabel 2.20 sebagai berikut.

TABEL 2.20

Capaian Kinerja dan Serapan Anggaran Program Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga Triwulan IV Tahun 2021 pada Dinas Pemuda dan Olahraga

Program	Sasaran Program	Indikator Program	Satuan	Target Tahun 2021	Kinerja Indikator Tahun 2021			Capaian Program	Rata-rata Capaian Kegiatan	Rata-rata Capaian Subkegiatan	Anggaran Tahun 2021	Anggaran Perubahan Tahun 2021	Realisasi	Serapan (%)
					Target	Realisasi	Capaian							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)	(16)
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Indeks kepuasan pelayanan kantor	Indeks	80	80	90,35	112,94%	100,00%	79,28%	94,51%	197.867.415.407	170.016.864.433	161.244.390.699	94,84%
		Indeks kepuasan pelayanan kendaraan operasional	Indeks	87,5	87,5	87,88	100,43%							
Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan (A)	Terlaksananya Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Jumlah pemuda yang berhasil dibina	Orang	7.529	7.529	12.505	166,09%	100,00%	100,00%	100,00%	4.853.782.248	952.977.030	732.319.200	76,85%
Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan	Terlaksananya Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan	Jumlah prestasi olahraga yang diperoleh	Medali	554	554	399	72,02%	89,35%	66,67%	83,21%	785.607.208.297	732.540.761.281	684.454.144.062	93,44%
		Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana olahraga	%	72,12	72,12	76,93	106,67%							
Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan (A)	Terlaksananya Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Jumlah Anggota Pramuka yang dibina	Orang	900	900	1.135,00	126,11%	100,00%	100,00%	100,00%	5.606.696.010	5.402.065.000	5.402.065.000	100,00%

Program	Sasaran Program	Indikator Program	Satuan	Target Tahun 2021	Kinerja Indikator Tahun 2021			Capaian Program	Rata-rata Capaian Kegiatan	Rata-rata Capaian Subkegiatan	Anggaran Tahun 2021	Anggaran Perubahan Tahun 2021	Realisasi	Serapan (%)
					Target	Realisasi	Capaian							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)	(16)
Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahra- gaan	Terlaksananya Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahra- gaan	Jumlah masyarakat aktif berolahraga	Orang	8.603.224	8.603.220	1.362.410	15,84%	15,84%	73,98%	81,52%	38.563.774.125	-	-	-

Sumber: e-SAKIP dan e-Monev 2021, diolah

Keterangan warna capaian kinerja dan serapan anggaran:

	: Mencapai Target ($\geq 100,00\%$)		: Tinggi ($76,00\% \leq x < 90,00\%$)		: Rendah ($51,00\% \leq x < 65,00\%$)
	: Sangat Tinggi (Capaian Kinerja: $91,00\% \leq x < 100,00\%$; Serapan Anggaran: $91,00\% \leq x < 100,00\%$)		: Sedang ($66,00\% \leq x < 75,00\%$)		: Sangat Rendah ($\leq 50,00\%$)

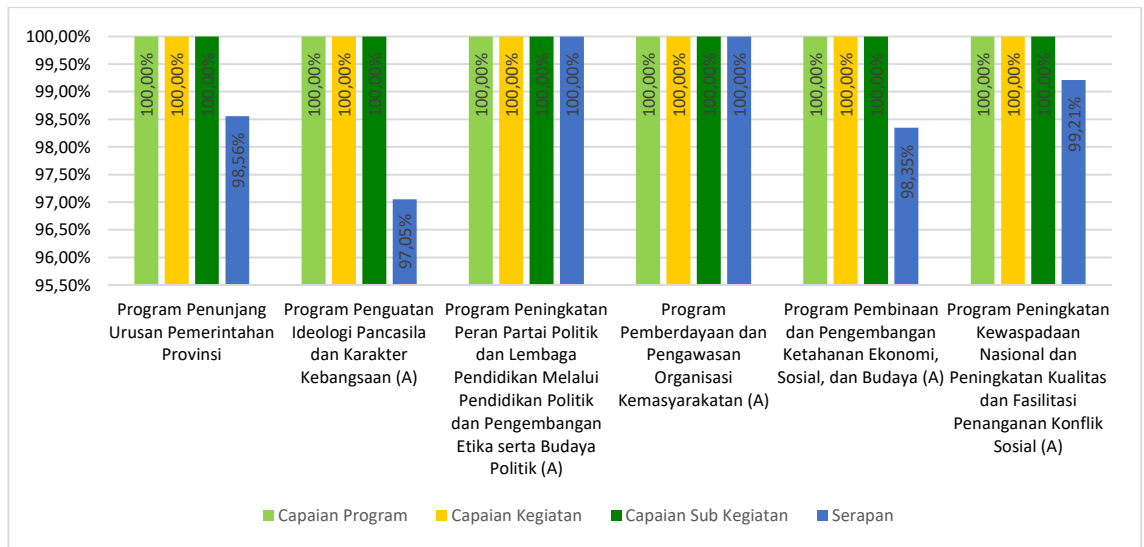
Kesatuan Bangsa dan Politik

Pada Tahun 2021, Kesatuan Bangsa dan Politik memiliki 12 program dengan total anggaran program sebesar Rp 119,185,152,107 dan serapan anggaran program sampai dengan bulan Desember tahun 2021 sebesar Rp 106.005.819.521,00 atau 89,00% dari total pagu. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan

Pemerintahan Bidang Urusan Pemerintahan Umum yakni Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Informasi terkait capaian program, kegiatan, sub kegiatan serta serapan anggaran pada Bidang Urusan Pemerintahan Umum terdapat pada Gambar 2.77 dan Gambar 2.78 sebagai berikut.

GAMBAR 2.77

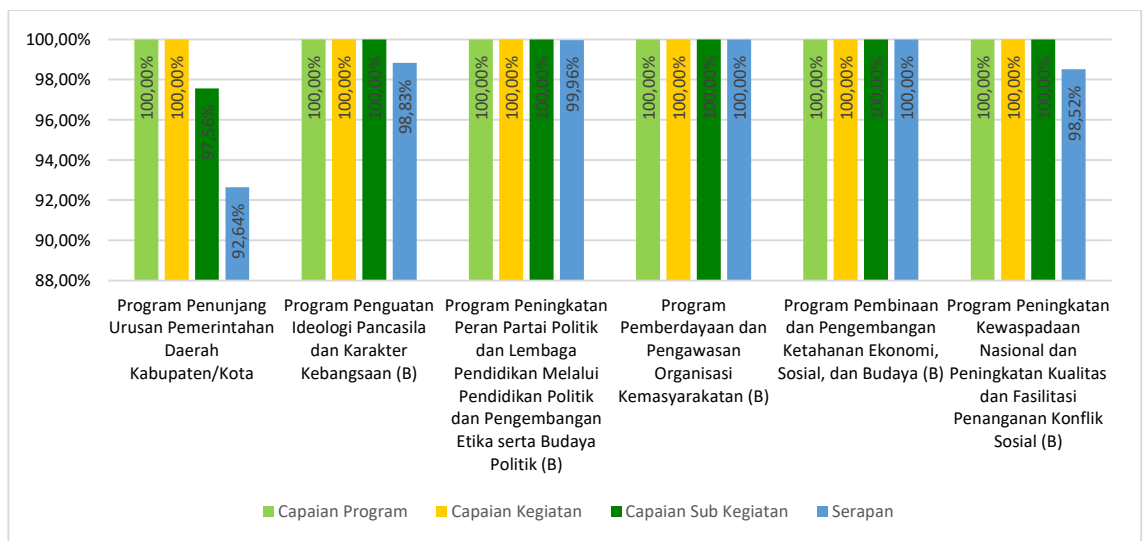
Capaian Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Serapan Anggaran Kesatuan Bangsa dan Politik Triwulan IV Tahun 2021



Sumber: e-SAKIP dan e-Monev 2021, diolah

GAMBAR 2.78

Capaian Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Serapan Anggaran Kesatuan Bangsa dan Politik Triwulan IV Tahun 2021



Sumber: e-SAKIP dan e-Monev 2021, diolah

Berdasarkan Gambar 2.77 dan Gambar 2.78, seluruh program pada Bidang Urusan Pemerintahan Umum sudah memiliki target dan realisasi pada Triwulan IV Tahun 2021, sehingga rata-rata capaian dapat dihitung. Rata-rata capaian pada Urusan Pemerintahan Umum secara keseluruhan yang mencakup 12 indikator program mencapai angka 100,00% yang menandakan bahwa rata-rata capaian masuk dalam kategori sangat tinggi. Pada serapan anggaran, terdapat empat program yang memiliki serapan anggaran sebanyak 100,00%.

Serapan anggaran dengan nilai 100% yaitu Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik (A), Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik (B), dan Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya (B).

Selain itu, serapan anggaran pada Urusan Pemerintahan Umum didominasi oleh

serapan anggaran sangat tinggi dengan rincian Program Penunjang Urusan Pemerintahan Provinsi sebesar 98,56% Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan (A) sebesar 97,05%, Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya (A) sebesar 98,35%, Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial (A) 99,21%, Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan (B) sebesar 98,83%, Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik (B) dengan serapan sebesar 99,96%, dan Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial (B) dengan serapan 98,52%.

Capaian kinerja indikator program, kegiatan, sub kegiatan, dan serapan anggaran urusan Pemerintahan urusan umum dapat dilihat pada Tabel 2.21.

TABEL 2.21

Capaian Kinerja dan Serapan Anggaran Program Kesatuan Bangsa dan Politik Triwulan IV Tahun 2021 pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Program	Sasaran Program	Indikator Program	Satuan	Target Tahun 2021	Kinerja Indikator Tahun 2021			Capaian Program	Rata-rata Capaian Kegiatan	Rata-rata Capaian Subkegiatan	Anggaran Tahun 2021	Anggaran Perubahan Tahun 2021	Realisasi	Serapan (%)
					Target	Realisasi	Capaian							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Provinsi	Meningkatnya Keuasan Pelayanan Kantor SKPD/UKPD Kesatuan Bangsa dan Politik	Indeks keuasan pelayan kantor	Indeks	4	4	4	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	59.665.355.938	52.292.828.750,00	51.539.207.626,00	98,56%
Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan (A)	Meningkatnya Pemahaman Masyarakat Terkait Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase Tingkat Pemahaman Masyarakat Terkait Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	%	50	50	60,25	110,00%	100,00%	100,00%	100,00%	1.096.375.000,00	1.096.375.000,00	1.064.000.000,00	97,05%
Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik (A)	Meningkatnya Pemahaman Masyarakat Terkait Peningkatan Peran Partai dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta	Persentase Tingkat Pemahaman Masyarakat Terkait Peningkatan Peran Partai dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta	%	50	50	62	110,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100.150.000,00	100.150.000,00	100.150.000,00	100,00%

Program	Sasaran Program	Indikator Program	Satuan	Target Tahun 2021	Kinerja Indikator Tahun 2021			Capaian Program	Rata-rata Capaian Kegiatan	Rata-rata Capaian Subkegiatan	Anggaran Tahun 2021	Anggaran Perubahan Tahun 2021	Realisasi	Serapan (%)
					Target	Realisasi	Capaian							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Budaya Politik												
Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Masyarakat (A)	Meningkatnya Pemahaman Ormas Terkait Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Masyarakat	Persentase Tingkat Pemahaman Ormas Terkait Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Masyarakat	%	50	50	59,33	110,00%	100,00%	100,00%	100,00%	18.375.000,00	18.375.000,00	18.375.000,00	100,00%
Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya (A)	Meningkatnya Pemahaman Masyarakat Terkait Pembinaan dan pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Persentase Tingkat Pemahaman Masyarakat Terkait Pembinaan dan pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	%	50	50	56,6	110,00%	100,00%	100,00%	100,00%	133.375.000,00	133.375.000,00	131.175.000,00	98,35%
Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi	Menurunnya kejadian konflik di masyarakat	Jumlah Konflik Sosial	Kejadian Konflik	24	24	23	104,17%	100,00%	100,00%	100,00%	1.456.350.000,00	1.456.350.000,00	1.444.850.000,00	99,21%

Program	Sasaran Program	Indikator Program	Satuan	Target Tahun 2021	Kinerja Indikator Tahun 2021			Capaian Program	Rata-rata Capaian Kegiatan	Rata-rata Capaian Subkegiatan	Anggaran Tahun 2021	Anggaran Perubahan Tahun 2021	Realisasi	Serapan (%)
					Target	Realisasi	Capaian							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Penanganan Konflik Sosial (A)														
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Keuasan Pelayanan Kantor	Indeks kepuasan pelayanan kantor	Indeks	4	4	4	100,00%	100,00%	100,00%	97,56%	560.840.762	560.840.762	519.566.895	92,64%
Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan (B)	Meningkatnya Pemahaman Masyarakat Terkait Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase Tingkat Pemahaman Masyarakat Terkait Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	%	50	50	50	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	3.710.775.000	3.710.775.000	3.667.450.000,00	98,83%
Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik (B)	Meningkatnya Pemahaman Masyarakat Terkait Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta	Persentase Tingkat Pemahaman Masyarakat Terkait Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta	%	50	50	50	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	27.365.395.000	27.365.395.000	27.353.145.000	99,96%

Program	Sasaran Program	Indikator Program	Satuan	Target Tahun 2021	Kinerja Indikator Tahun 2021			Capaian Program	Rata-rata Capaian Kegiatan	Rata-rata Capaian Subkegiatan	Anggaran Tahun 2021	Anggaran Perubahan Tahun 2021	Realisasi	Serapan (%)
					Target	Realisasi	Capaian							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	gan Etika Serta Budaya Politik	Budaya Politik												
Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan (B)	Meningkatnya Pemahaman Ormas Terkait Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Tingkat Pemahaman Ormas Terkait Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	%	50	N/A	N/A	-	100,00%	100,00%	100,00%	16.499.750.000	16.499.750.000	16.499.750.000,00	100,00%
Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya (B)	Meningkatnya Pemahaman Masyarakat Terkait Pembinaan dan pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Persentase Tingkat Pemahaman Masyarakat Terkait Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	%	50	50	50	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	169.400.000,00	169.400.000,00	169.400.000,00	100,00%

Program	Sasaran Program	Indikator Program	Satuan	Target Tahun 2021	Kinerja Indikator Tahun 2021			Capaian Program	Rata-rata Capaian Kegiatan	Rata-rata Capaian Subkegiatan	Anggaran Tahun 2021	Anggaran Perubahan Tahun 2021	Realisasi	Serapan (%)
					Target	Realisasi	Capaian							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial (B)	Menurunkan kejadian konflik di masyarakat	Jumlah Konflik Sosial	Kejadian Konflik	24	24	23	104,17%	100,00%	100,00%	100,00%	3.551.175.000,00	3.551.175.000,00	3.498.750.000,00	98,52%

Sumber: e-SAKIP dan e-Monev 2021, diolah

Keterangan warna capaian kinerja dan serapan anggaran:

	: Mencapai Target ($\geq 100,00\%$)		: Tinggi ($76,00\% \leq x < 90,00\%$)		: Rendah ($51,00\% \leq x < 65,00\%$)
	: Sangat Tinggi (Capaian Kinerja: $91,00\% \leq x < 100,00\%$; Serapan Anggaran: $91,00\% \leq x < 100,00\%$)		: Sedang ($66,00\% \leq x < 75,00\%$)		: Sangat Rendah ($\leq 50,00\%$)

Berdasarkan data yang tersaji pada Tabel 2.21, dari 12 indikator Urusan Pemerintahan Umum, pada seluruh program memiliki rata-rata dikategorikan dalam kategori mencapai target. Seluruh program memiliki rata-rata capaian sub kegiatan sebesar 100,00% dan

dikategorikan dalam kategori mencapai target. Hal ini mengindikasikan bahwa rumusan kegiatan dan subkegiatan sudah tepat dan mampu berkontribusi terhadap indikator program.

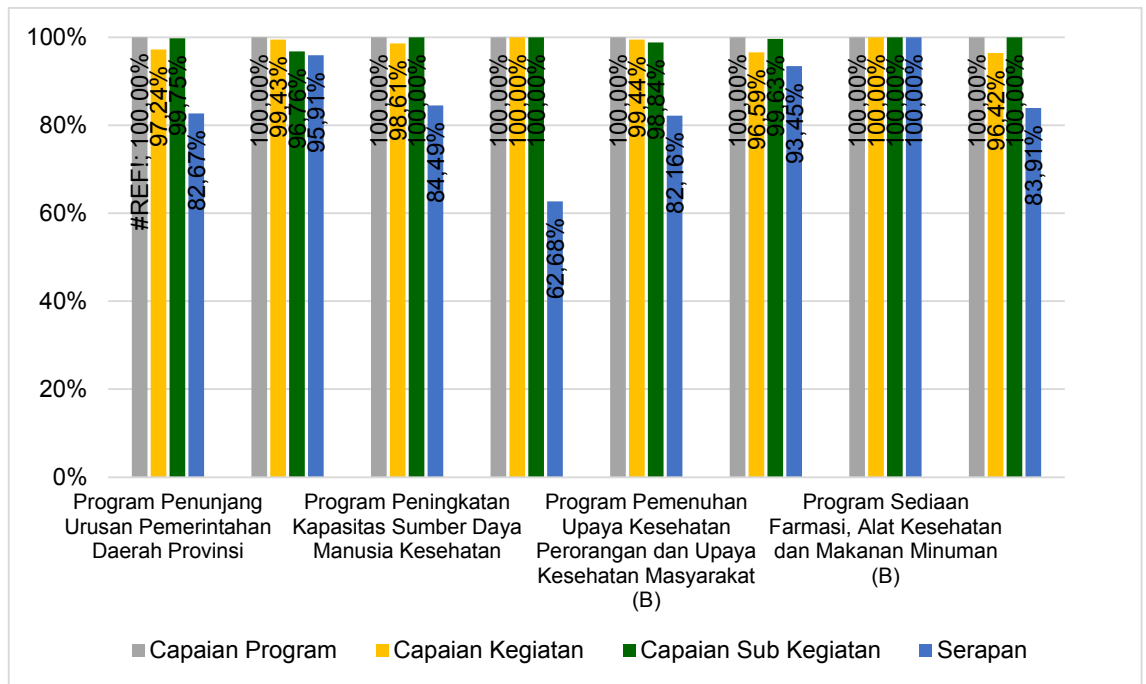
Kesehatan

Pada tahun 2021, urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan memiliki 8 program dengan total anggaran sebesar Rp11.005.592.593.300 dengan serapan anggaran program sampai dengan bulan Desember tahun 2021 sebesar Rp 9.495.405.365.634 atau 86,00% dari total pagu. Perangkat daerah yang

melaksanakan urusan Pemerintahan bidang Kesehatan adalah Dinas Kesehatan. Informasi terkait capaian program, kegiatan, sub kegiatan serta serapan anggaran pada bidang pendidikan terdapat pada Gambar 2.79 sebagai berikut.

GAMBAR 2.79

Capaian Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Serapan Anggaran Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Triwulan IV Tahun 2021



Sumber: e-SAKIP dan e-Monev 2021, diolah

Berdasarkan Gambar 2.79, dapat dilihat apabila pada urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan, pada seluruh program telah mencapai target capaian sebesar 100,00% dan dapat dikategorikan dalam kategori mencapai target. Pada serapan anggaran program, terlihat hanya 1 program yang capaiannya di bawah 80% yaitu program sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan

minuman yang capaiannya hanya 62,68%. Berdasarkan data, terdapat 2 (dua) subkegiatan yang berkontribusi terhadap rendahnya serapan anggaran program dimaksud yaitu

1. Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Pengakuan PBF

Cabang dan Cabang PAK (Penanggung Jawab Dinas Kesehatan)

2. Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK (Penanggung Jawab Labkesda)

Apabila melihat data perbandingan capaian program, rata-rata capaian kegiatan dan rata-

rata capaian subkegiatan, maka secara umum dapat dikatakan setara karena rata-rata capaian kegiatan maupun subkegiatan masih di atas 90%. Untuk capaian program urusan kesehatan seluruhnya mencapai target. Data detail terkait capaian kinerja indikator program, kegiatan, sub kegiatan, dan serapan anggaran urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan dapat dilihat pada Tabel 2.22.

TABEL 2.22

Capaian Kinerja dan Serapan Anggaran Program Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Triwulan IV Tahun 2021 pada Dinas Kesehatan

Program	Sasaran Program	Indikator Program	Satuan	Target Tahun 2021	Kinerja Indikator Tahun 2021			Capaian Program	Rata-rata Capaian Kegiatan	Rata-rata Capaian Subkegiatan	Anggaran Tahun 2021	Anggaran Perubahan Tahun 2021	Realisasi	Serapan (%)
					Target	Realisasi	Capaian							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Tersedianya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Indeks kepuasan pelayanan kantor	Indeks	3	3	3	100,00%	100,00%	97,24%	99,75%	5.315.486.500.510	5.315.486.500.510	4.394.364.739.711	82,67%
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat (A)	Terselenggaranya Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Layanan Kesehatan yang Memenuhi Standar	%	65	65	87,83	135,12%	100,00%	99,43%	96,76%	2.473.740.597.227	2.473.740.597.227	2.372.649.734.084	95,91%
		Persentase Penyediaan Layanan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan	%	100	100	100	100,00%							
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) yang Kompeten	%	97	97	99	102,06%	100,00%	98,61%	100,00%	1.388.154.029.800	1.388.154.029.800	1.172.812.321.792	84,49%

Program	Sasaran Program	Indikator Program	Satuan	Target Tahun 2021	Kinerja Indikator Tahun 2021			Capaian Program	Rata-rata Capaian Kegiatan	Rata-rata Capaian Subkegiatan	Anggaran Tahun 2021	Anggaran Perubahan Tahun 2021	Realisasi	Serapan (%)
					Target	Realisasi	Capaian							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Tersedianya Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Persentase Produk Alat Kesehatan dan PKRT yang Memenuhi Persyaratan Aman, Mutu, dan Bermanfaat	%	50	50	56	112,00%	100,00%	100,00%	100,00%	229.29 2.219.527	229.292. 219.527	143.713. 035.626	62,68%
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat (B)	Terselenggaranya Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Penyediaan Layanan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan	%	100	100	100	100,00%	100,00%	99,44%	98,84%	725.22 0.464.059	725.220. 464.060	595.849. 069.179	82,16%
		Persentase Layanan Kesehatan yang Memenuhi Standar	%	65	65	87,83	135,12%							

Program	Sasaran Program	Indikator Program	Satuan	Target Tahun 2021	Kinerja Indikator Tahun 2021			Capaian Program	Rata-rata Capaian Kegiatan	Rata-rata Capaian Subkegiatan	Anggaran Tahun 2021	Anggaran Perubahan Tahun 2021	Realisasi	Serapan (%)
					Target	Realisasi	Capaian							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan (B)	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) yang Kompeten	%	97	97	99	102,06%	100,00%	96,59%	99,63%	868.400.582.557	868.400.582.557	811.557.070.240	93,45%
Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman (B)	Tersedianya Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Persentase Sarana Kefarmasian yang Memenuhi Standar	%	35	35	35	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	83.681.000	83.681.001	83.681.002	100,00%
		Persentase Produk Alat Kesehatan dan PKRT yang Memenuhi Persyaratan Aman, Mutu, dan Bermanfaat	%	50	50	56	112,00%							
Program Pemberdayaan Masyarakat	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat	Proporsi Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat	%	47	47	65,82	140,04%	100,00%	96,42%	100,00%	5.214.518.620	5.214.518.620	5.214.518.620	4.375.714.000

Program	Sasaran Program	Indikator Program	Satuan	Target Tahun 2021	Kinerja Indikator Tahun 2021			Capaian Program	Rata-rata Capaian Kegiatan	Rata-rata Capaian Subkegiatan	Anggaran Tahun 2021	Anggaran Perubahan Tahun 2021	Realisasi	Serapan (%)
					Target	Realisasi	Capaian							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Bidang Kesehatan	Bidang Kesehatan	at (UKBM) Aktif												

Sumber: e-SAKIP dan e-Monev 2021, diolah

Keterangan warna capaian kinerja dan serapan anggaran:

	: Mencapai Target ($\geq 100,00\%$)		: Sedang ($66,00\% \leq x < 75,00\%$)
	: Sangat Tinggi (Capaian Kinerja: $91,00\% \leq x < 100,00\%$; Serapan Anggaran: $91,00\% \leq x < 100,00\%$)		: Rendah ($51,00\% \leq x < 65,00\%$)
	: Tinggi ($76,00\% \leq x < 90,00\%$)		: Sangat Rendah ($\leq 50,00\%$)

Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

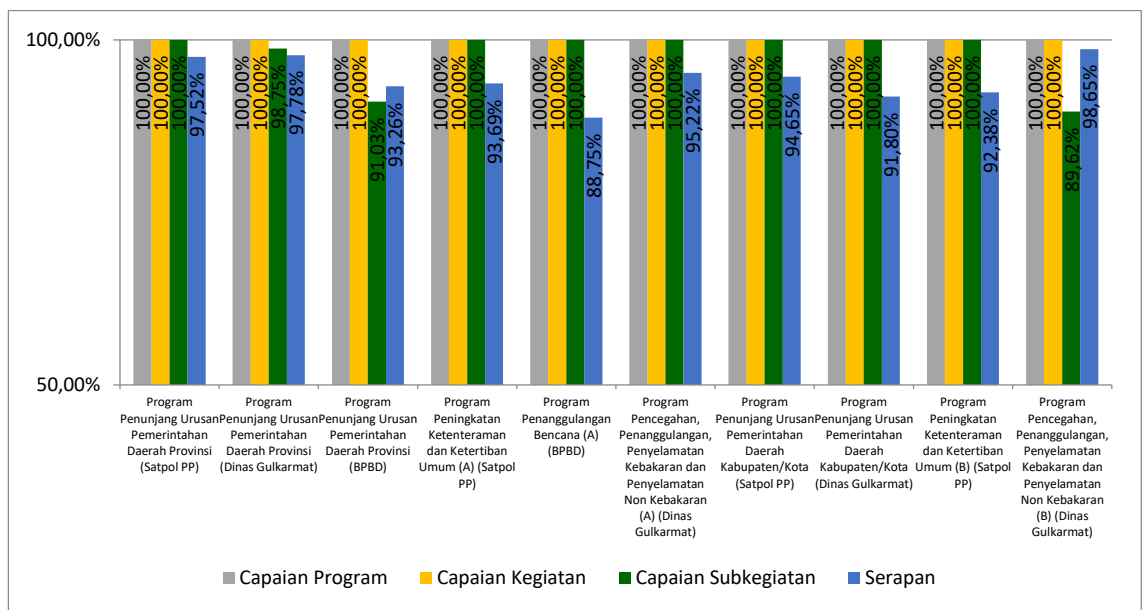
Pada tahun 2021, Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat memiliki program sebanyak 10 program dengan total anggaran program sebanyak Rp 2.202.330.287.631 dengan serapan anggaran program sampai dengan bulan Desember tahun 2021 sebesar Rp 2.130.264.535.127 atau 96,73% dari total pagu. Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat adalah:

1. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)
2. Dinas Penanggulangan dan Penyelamatan Kebakaran (Gulkarmat)
3. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).

Informasi terkait capaian program, kegiatan, sub kegiatan serta serapan anggaran pada ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat terdapat pada Gambar 2.80 berikut.

GAMBAR 2.80

Capaian Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Serapan Anggaran Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Triwulan IV Tahun 2021



Sumber: e-SAKIP dan e-Monev 2021, diolah

Berdasarkan Gambar 2.80, seluruh program pada Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat, memiliki rata-rata capaian termasuk kategori mencapai target $\geq 100,00\%$. Apabila dilihat serapan anggaran program, seluruh program serapannya mencapai $\geq 80\%$ yaitu pada rentang kategori sangat tinggi dan tinggi. Apabila melihat data perbandingan capaian program, rata-rata

capaian kegiatan dan rata-rata capaian subkegiatan sebagian besar cukup berimbang. Gap capaian antar level tidak terlalu signifikan yaitu masih di bawah 10%. Data detail terkait kinerja Urusan Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat dapat dilihat pada Tabel 2.23 sebagai berikut.

TABEL 2.23

Capaian Kinerja dan Serapan Anggaran Program Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Triwulan IV Tahun 2021

Program	Sasaran Program	Indikator Program	Satuan	Target Tahun 2021	Kinerja Indikator Tahun 2021			Capaian Program	Rata-rata Capaian Kegiatan	Rata-rata Capaian Subkegiatan	Anggaran Tahun 2021	Anggaran Perubahan Tahun 2021	Realisasi	Serapan (%)
					Target	Realisasi	Capaian							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Satuan Polisi Pamong Praja														
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Terwujudnya ketenteraman dan ketertiban umum dengan didukung sarana dan prasarana Satpol PP yang memadai	Indeks Kepuasan Pelayanan Kantor	Indeks	4	4	4	100,00 %	100,00%	100,00%	100,00%	819.074.826.423	819.074.826.423	798.800.651.361	97,52%
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Terwujudnya ketenteraman dan ketertiban umum dengan didukung sarana dan prasarana Satpol PP yang memadai	Indeks Kepuasan Pelayanan Kantor	Indeks	4	4	4	100,00 %	100,00%	100,00%	100,00%	14.897.679.561	14.897.679.561	14.100.029.930	94,65%
Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (A)	Terwujudnya peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum	Persentase Penyelesaian Pelanggaran Perda dan atau Perkada terkait Ketenteraman dan Ketertiban Umum	%	80	80	93,835	117,29 %	100,00%	100,00%	100,00%	270.759.899.084	270.759.899.084	253.664.933.863	93,69%

Program	Sasaran Program	Indikator Program	Satuan	Target Tahun 2021	Kinerja Indikator Tahun 2021			Capaian Program	Rata-rata Capaian Kegiatan	Rata-rata Capaian Subkegiatan	Anggaran Tahun 2021	Anggaran Perubahan Tahun 2021	Realisasi	Serapan (%)
					Target	Realisasi	Capaian							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
		Persentase Berkas Perkara Kasus Pelanggaran Perda dan/Perkada yang dilimpahkan ke JPU dengan Kategori P21	%	20	20	95,305	476,53 %							
Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (B)	Terwujudnya peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum	Persentase Penyelesaian Pelanggaran Perda dan atau Perkada terkait Ketenteraman dan Ketertiban Umum	%	80	80	93,835	117,29 %	100,00%	100,00%	100,00%	13.872.011.500	13.872.011.500	12.814.854.400	92,38%
Badan Penanggulangan Bencana Daerah														
Program Penanggulangan Bencana (A)	Menurunnya Indeks Risiko Bencana	Persentase informasi kebencanaan yang disampaikan ke masyarakat	%	100	100	100	100,00 %	100,00%	100,00%	100,00%	43.409.958.559	43.409.958.559	38.527.657.464	88,75%
		Persentase masyarakat dan aparatur yang dilatih dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana	%	0,7	0,7	0,7	100,00 %							
		Persentase Implementasi	%	32,92	32,92	32,92	100,00 %							

Program	Sasaran Program	Indikator Program	Satuan	Target Tahun 2021	Kinerja Indikator Tahun 2021			Capaian Program	Rata-rata Capaian Kegiatan	Rata-rata Capaian Subkegiatan	Anggaran Tahun 2021	Anggaran Perubahan Tahun 2021	Realisasi	Serapan (%)
					Target	Realisasi	Capaian							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
		Fasilitas Publik Aman serta Ketahanan Masyarakat Jakarta terhadap Bencana												
		Persentase pendampingan yang dilaksanakan pada pasca bencana	%	100	100	100	100,00 %							
		Persentase kebutuhan dasar pengungsi sesuai standar kebutuhan dalam waktu 1 kali 24 jam	%	100	100	100	100,00 %							
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel	Indeks kepuasan pelayanan kantor	Indeks	4	4	4	100,00 %	100,00%	100,00%	91,03%	25.697.352.315	25.697.352.315	23.965.396.151	93,26%
Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan														
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah di tingkat	Indeks Kepuasan Pelayanan Kantor	Indeks	4	4	4	100,00 %	100,00%	100,00%	98,75%	753.382.361.437	753.382.361.437	736.663.459.787	97,78%







Program	Sasaran Program	Indikator Program	Satuan	Target Tahun 2021	Kinerja Indikator Tahun 2021			Capaian Program	Rata-rata Capaian Kegiatan	Rata-rata Capaian Subkegiatan	Anggaran Tahun 2021	Anggaran Perubahan Tahun 2021	Realisasi	Serapan (%)
					Target	Realisasi	Capaian							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	provinsi yang transparan dan akuntabel													
Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran (A)	Terwujudnya peningkatan kualitas layanan pencegahan, penanggulangan kebakaran, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran	Tingkat kerawanan kebakaran	Indeks	3,5	3,5	3,55	101,43 %	100,00%	100,00%	100,00%	133.360.01 1.719	133.360.01 1.719	126.981.22 5.681	95,22%
		Persentase penanggulangan kebakaran yang berhasil	%	84	84	97,15	115,65 %							
		Persentase Operasi Penyelamatan yang Berhasil	%	80	80	94,735	118,42 %							
		Persentase petugas pemadam kebakaran yang kompeten	%	53,25	53,25	54,19	101,77 %							
		Persentase penyelesaian pembinaan dan pengawasan atas Pencegahan, Penanggulangan, serta Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	%	100	0	101,20825	100,00 %							
Program Penunjang Urusan	Terwujudnya tata kelola pemerintah	Indeks Kepuasan	Indeks	4	4	4	100,00 %	100,00%	100,00%	100,00%	20.509.344. 932	20.509.344. 932	18.827.768. 829	91,80%

Program	Sasaran Program	Indikator Program	Satuan	Target Tahun 2021	Kinerja Indikator Tahun 2021			Capaian Program	Rata-rata Capaian Kegiatan	Rata-rata Capaian Subkegiatan	Anggaran Tahun 2021	Anggaran Perubahan Tahun 2021	Realisasi	Serapan (%)
					Target	Realisasi	Capaian							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	n dan keuangan daerah di tingkat kota yang transparan dan akuntabel	Pelayanan Kantor												
Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran (B)	Terwujudnya peningkatan kualitas layanan pencegahan, penanggulangan kebakaran, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran	Tingkat kerawanan kebakaran	Indeks	3,5	3,5	3,55	101,43 %	100,00%	100,00%	89,62%	107.366.842.101	107.366.842.101	105.918.557.661	98,65%
		Persentase penanggulangan kebakaran yang berhasil di tingkat Kota Administrasi	%	84	84	97,035	116%							
		Persentase Operasi Penyelamatan yang Berhasil di tingkat Kota Administrasi	%	80	80	95,9735	119,97 %							
		Persentase pembinaan petugas operasional penanggulangan kebakaran dan penyelamatan	%	100	100	101,55	101,55 %							
		Persentase investigasi lanjut atas	%	10	10	10,05	100,50 %							

Program	Sasaran Program	Indikator Program	Satuan	Target Tahun 2021	Kinerja Indikator Tahun 2021			Capaian Program	Rata-rata Capaian Kegiatan	Rata-rata Capaian Subkegiatan	Anggaran Tahun 2021	Anggaran Perubahan Tahun 2021	Realisasi	Serapan (%)
					Target	Realisasi	Capaian							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
		penyebab kejadian kebakaran												

Sumber: e-SAKIP dan e-Monev 2021, diolah

Keterangan warna capaian kinerja dan serapan anggaran:

	: Mencapai Target	($\geq 100,00\%$)		: Sedang	($66,00\% \leq x < 75,00\%$)
	: Sangat Tinggi	(Capaian Kinerja: $91,00\% \leq x < 100,00\%$; Serapan Anggaran: $91,00\% \leq x < 100,00\%$)		: Rendah	($51,00\% \leq x < 65,00\%$)
	: Tinggi	($76,00\% \leq x < 90,00\%$)		: Sangat Rendah	($\leq 50,00\%$)

Keuangan

Pada Tahun 2021, Unsur Keuangan memiliki 9 program dengan total anggaran program sebesar Rp1.636.921.108.024 dan serapan anggaran program sampai dengan Bulan Desember Tahun 2021 sebesar Rp1.373.020.948.629 (83,88% dari total pagu).

Perangkat Daerah yang melaksanakan Unsur Keuangan adalah sebagai berikut.

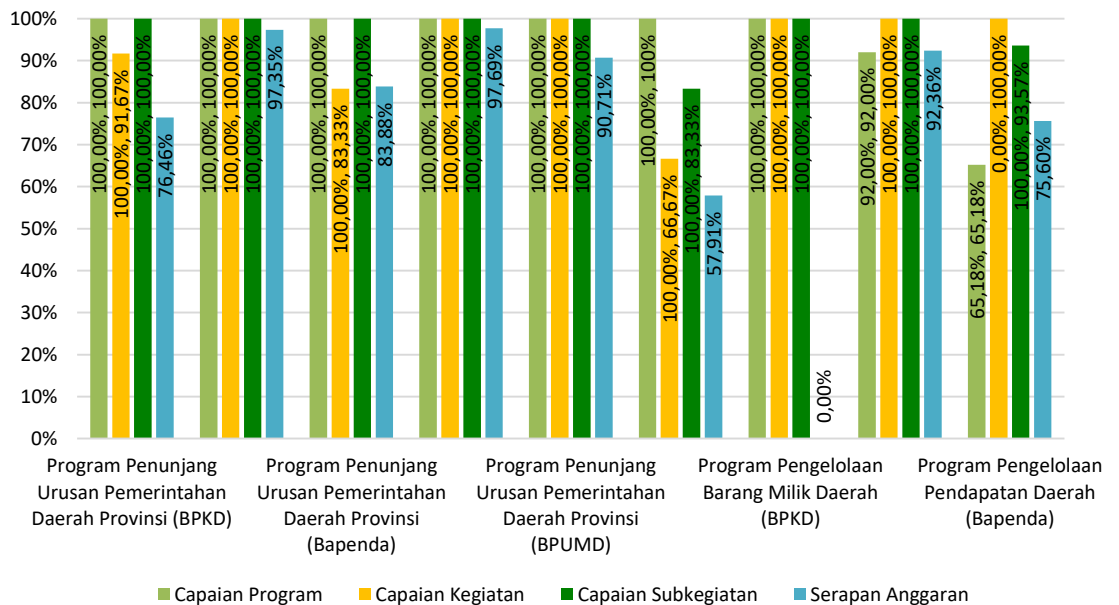
1. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD)

2. Badan Pengelolaan Aset Daerah (BPAD)
3. Badan Pendapatan Daerah (Bapenda)
4. Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa (BPPBJ)
5. Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Dperindustri (BPBUMD)

Informasi mengenai capaian program/kegiatan/subkegiatan dan serapan anggaran dijabarkan pada Gambar 2.81 sebagai berikut.

GAMBAR 2.81

Capaian Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Serapan Anggaran Unsur Keuangan Triwulan IV Tahun 2021



Sumber: e-SAKIP dan e-Monev 2021, diolah

Berdasarkan Gambar 2.81 dari 9 program Unsur Keuangan, seluruh program pada Unsur Perencanaan telah memiliki target dan realisasi dengan nilai capaian yang bervariasi pada Triwulan IV. 7 program berada pada kategori mencapai target dengan nilai capaian 100,00%, sementara 2 program lainnya masing-masing berada pada kategori sangat tinggi dengan nilai capaian 92,00% dan pada kategori rendah dengan nilai capaian 65,18%. Berdasarkan serapan anggaran, 8 program memiliki nilai serapan dengan kategori bervariasi antara sangat tinggi, tinggi, sedang dan rendah.

Adapun 8 program tersebut antara lain Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dengan serapan masing-masing mencapai Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi oleh BPPBJ sebesar 97,69%, Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi oleh BPAD sebesar 97,35%, Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi oleh BPUMD 90,71%, Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi oleh Bapenda dengan serapan 83,88%, dan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi oleh BPKD dengan nilai serapan sebesar 76,46%.

Program Pengelolaan Barang Milik Daerah dengan nilai serapan mencapai 92,36%, Program Pengelolaan Pendapatan Daerah dengan nilai serapan mencapai 75,60%, dan Program Pengelolaan Keuangan Daerah dengan serapai mencapai 57,91%.

Sementara 1 program lainnya tidak memiliki anggaran dan realisasi sehingga tidak dapat ditentukan nilai serapan anggarannya. Capaian kinerja indikator program/- kegiatan/subkegiatan dan serapan anggaran Unsur Keuangan dapat dilihat pada Tabel 2.24 sebagai berikut.

TABEL 2.24

Capaian Kinerja dan Serapan Anggaran Program Unsur Keuangan Triwulan IV Tahun 2021







Program	Sasaran Program	Indikator Program	Satuan	Target Tahun 2021	Kinerja Indikator Tahun 2021			Capaian Program	Rata-rata Capaian Kegiatan	Rata-rata Capaian Subkegiatan	Anggaran Tahun 2021	Anggaran Perubahan Tahun 2021	Realisasi	Serapan (%)
					Target	Realisasi	Capaian							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Meningkatnya kepuasan terhadap penunjang urusan pemerintahan daerah	Indeks kepuasan pelayanan kantor	Indeks	4	4,00	4,00	100,00%	100,00%	91,67%	100,00%	226.753.003.471	227.911.277.744	174.262.209.114	76,46%
		Indeks kepuasan pelayanan kendaraan operasional	Indeks	4	4,00	4,00	100,00%							
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Meningkatnya kinerja Badan Pengelolaan Aset Daerah	Indeks kepuasan pelayanan kantor	Indeks	4	4,00	4,00	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	135.702.835.171	105.128.609.623	102.344.414.464	97,35%
		Indeks kepuasan pelayanan kendaraan operasional	Indeks	4	4,00	4,00	100,00%							
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Peningkatan Pengelolaan dan Pelayanan Kantor	Persentase pegawai yang dikirim untuk mengikuti kegiatan Diklat	%	100	100,00	100,00	100,00%	100,00%	83,33%	100,00%	1.168.875.984.152	1.017.187.765.981	853.200.587.042	83,88%
		Indeks Kepuasan Pelayanan Kantor UPP-PKB/ Samsat dan UPPPD, Kepegawaian serta Keuangan	Indeks	4	4	4	100,00%							
Program Penunjang Urusan Pemerintah	Tersedianya pengelolaan, perlengkapan, peralatan	Indeks kepuasan pelayanan kantor	Indeks	4	4,00	4,00	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	93.639.856.723	74.687.175.476	72.962.251.696	97,69%

Program	Sasaran Program	Indikator Program	Satuan	Target Tahun 2021	Kinerja Indikator Tahun 2021			Capaian Program	Rata-rata Capaian Kegiatan	Rata-rata Capaian Subkegiatan	Anggaran Tahun 2021	Anggaran Perubahan Tahun 2021	Realisasi	Serapan (%)
					Target	Realisasi	Capaian							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
an Daerah Provinsi	kantor, dan pengelolaan kendaraan operasional	Indeks kepuasan pelayanan kendaraan operasional	Indeks	4	4,00	4,00	100,00%							
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Meningkatkan kualitas pelayanan manajemen kantor	Indeks Kepuasan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan	Indeks	4	4,00	4,00	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	25.765.498.342	20.990.715.324	19.041.211.396	90,71%
Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	Persentase Laporan Keuangan SKPD sesuai SAP dan tepat waktu	%	100	100,00	100,00	100,00%	100%	66,67%	83,33%	33.483.790.986	1.706.544.382	988.192.460	57,91%
		Persentase penyelesaian tahapan penyusunan RAPBD	%	100	100,00	100,00	100,00%							
Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Terselesaikannya Penyusunan Standar Harga tepat waktu	Persentase Penyelesaian Penyusunan Standar Harga tepat waktu	%	100	100,00	100,00	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	1.206.779.660	-	-	-
Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Terlaksananya Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah piutang atas aset daerah yang dikerjasamakan	PKS	10	10,00	6,00	60,00%	92,00%	100,00%	100,00%	37.214.522.333	42.398.237.057	39.159.747.255	92,36%
		Jumlah SKPD tertib pengelolaan aset daerah	SKPD/UKPD	733	733,00	736,00	100,41%							

Program	Sasaran Program	Indikator Program	Satuan	Target Tahun 2021	Kinerja Indikator Tahun 2021			Capaian Program	Rata-rata Capaian Kegiatan	Rata-rata Capaian Subkegiatan	Anggaran Tahun 2021	Anggaran Perubahan Tahun 2021	Realisasi	Serapan (%)
					Target	Realisasi	Capaian							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
		Persentase Penyelesaian Aset Fasos Fasum dari pihak lain	%	99	99,00	99,00	100,00%							
		Persentase Aset Daerah yang teridentifikasi dan tercatat dalam e-aset	%	100	100,00	100,00	100,00%							
		Jumlah penerimaan hasil aset daerah yang dikerjasamakan	PKS	30	30,00	30,00	100,00%							
Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Peningkatan Pengelolaan dan Pelayanan Pajak Daerah	Jumlah Penerimaan Pajak Daerah	Triliun Rupiah	43,375	43,38	34,55	79,66%	65,18%	100,00%	93,57%	183.470.664.214	146.910.782.437	111.062.335.202	75,60%
		Jumlah Penerimaan Retribusi Daerah	Miliar Rupiah	755,755	755,76	383,08	50,69%							

Sumber: e-SAKIP dan e-Monev 2021, diolah

Keterangan warna capaian kinerja dan serapan anggaran:

	: Mencapai Target ($\geq 100,00\%$)		: Sedang ($66,00\% \leq x < 75,00\%$)
	: Sangat Tinggi (Capaian Kinerja: $91,00\% \leq x < 100,00\%$; Serapan Anggaran: $91,00\% \leq x < 100,00\%$)		: Rendah ($51,00\% \leq x < 65,00\%$)
	: Tinggi ($76,00\% \leq x < 90,00\%$)		: Sangat Rendah ($\leq 50,00\%$)

Berdasarkan Tabel 2.24, dari 9 program keseluruhan memiliki capaian rata-rata kegiatan sebesar 100,00% dengan jumlah program yang mencapai target sebanyak 6 program terdapat pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, Program, Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, Program Pengelolaan Barang Milik Daerah, Program Pengelolaan Barang Milik Daerah, dan Program Pengelolaan Pendapatan Daerah.

Sebanyak 3 program lain memiliki capaian kegiatan dengan kategori sangat tinggi, tinggi,

dan sedang dengan rincian Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi 91,67%, Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi 83,33%, dan Program Pengelolaan Keuangan Daerah 66,67%. Sementara untuk rata-rata capaian subkegiatan di bawah program-program unsur ini, sebanyak 7 program telah memiliki nilai rata-rata capaian subkegiatan mencapai 100,00% dan 2 program lain masuk dalam kategori sangat tinggi dan tinggi yakni Program Pengelolaan Pendapatan Daerah dengan capaian 93,57% dan Program Pengelolaan Keuangan Daerah dengan capaian 83,33%.

Kewilayahan Administrasi Kota

Pada Tahun 2021, Kota administrasi memiliki 6 program dengan total anggaran program sebesar Rp 51,044,325,689 dengan serapan anggaran program sampai dengan bulan Desember tahun 2021 sebesar Rp 37,788,236,843 atau sebesar 74,03% dari total pagu. Perangkat Daerah yang melaksanakan Kota Administrasi adalah sebagai berikut.

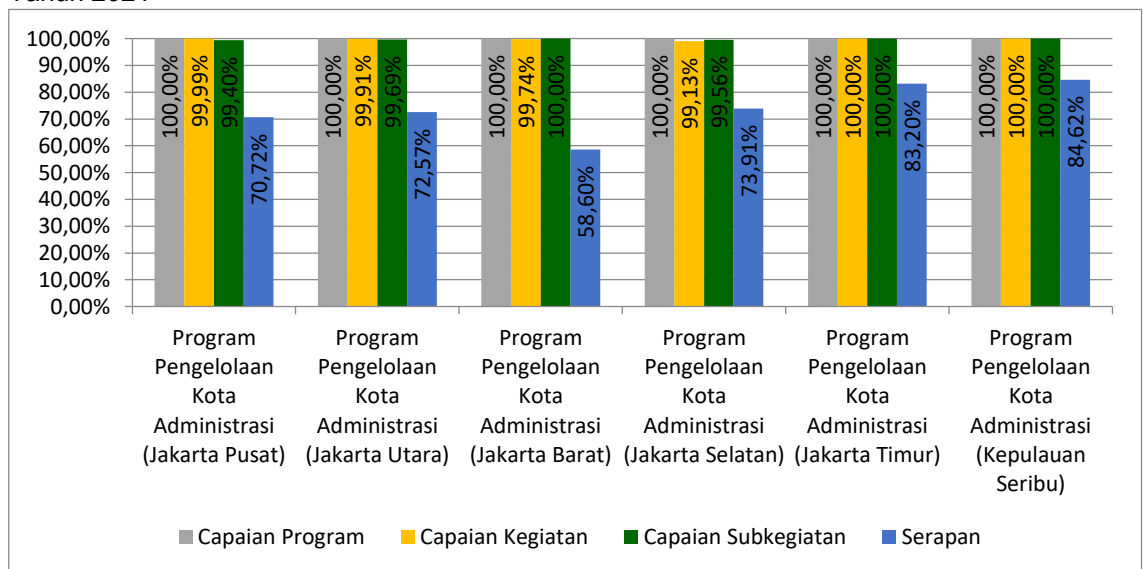
1. Kota Administrasi Jakarta Pusat (JP)

2. Kota Administrasi Jakarta Utara (JU)
3. Kota Administrasi Jakarta Barat (JB)
4. Kota Administrasi Jakarta Selatan (JS)
5. Kota Administrasi Jakarta Timur (JT)
6. Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu – Kep. Seribu (Kep. Seribu)

Informasi terkait capaian program, kegiatan, sub kegiatan serta serapan anggaran unsur kewilayahan kota administrasi terdapat pada Gambar 2.82 berikut.

GAMBAR 2.82

Capaian Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Serapan Anggaran Kota Administrasi Triwulan IV Tahun 2021



Sumber: e-SAKIP dan e-Monev 2021, diolah

Berdasarkan Gambar 2.82 di atas, seluruh indikator program pada Urusan Pemerintahan Unsur Administrasi Kota memiliki capaian sebesar 100,00% yang masuk dalam kategori mencapai target. Serapan anggaran Administrasi Kota memiliki sebaran serapan anggaran yang masuk dalam katogori rendah, sedang dan tinggi. Kota Administrasi Jakarta Pusat memiliki serapan anggaran sebesar 70,72% dan masuk dalam kategori sedang. Kota Adminsitrasi Jakarta Utara memiliki serapan sebesar 72,57%, termasuk dalam kategori sedang. Kota Administrasi Jakarta

Barat memiliki serapan anggaran sebesar 58,60% yang masuk dalam kategori rendah.

Kota administrasi Jakarta Selatan memiliki serapan sebesar 73,96% yang masuk dalam kategori sedang. Sedangkan untuk Kabupaten Kepulauan Seribu dan Kota Administrasi Jakarta Timur memiliki anggaran yang masuk dalam kategori tinggi yakni sebesar 83,20% dan 84,62%. Capaian kinerja indikator program, kegiatan, sub kegiatan, dan serapan anggaran urusan Pemerintahan Unsur Kewilayahan Administrasi kota dapat dilihat Tabel 2.25.

TABEL 2.25

Capaian Kinerja dan Serapan Anggaran Program Kota Administrasi Triwulan IV Tahun 2021

Program	Sasaran Program	Indikator Program	Satuan	Target Tahun 2021	Kinerja Indikator Tahun 2021			Capaian Program	Rata-rata Capaian Kegiatan	Rata-rata Capaian Subkegiatan	Anggaran Tahun 2021	Anggaran Perubahan Tahun 2021	Realisasi	Serapan (%)
					Target	Realisasi	Capaian							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Program Pengelolaan Kota Administrasi	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel	Persentase Terbinanya Lembaga Kemasyarakatan	%	90	90	90	100,00%	100,00%	99,99%	99,85%	8.927.009.886	6.750.779.286	4.774.097.758	70,72%
		Persentase penanganan perkara Tingkat Kota Administrasi Jakarta Pusat	%	100	100	100	100,00%							
		Persentase Terlaksananya Tugas dan Fungsi Kota Administrasi Jakarta Pusat > 80 %	%	100	100	100	100,00%							
		indeks kepuasan pelayanan kendaraan operasional	Indeks	4	4	4	100,00%							
		Indeks Kepuasan Pelayanan Keprotokol an	Indeks	4	4	4	100,00%							
		Persentase Penyelesaian Sengketa Hukum	%	100	100	100	100,00%							

Program	Sasaran Program	Indikator Program	Satuan	Target Tahun 2021	Kinerja Indikator Tahun 2021			Capaian Program	Rata-rata Capaian Kegiatan	Rata-rata Capaian Subkegiatan	Anggaran Tahun 2021	Anggaran Perubahan Tahun 2021	Realisasi	Serapan (%)
					Target	Realisasi	Capaian							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
		Persentase Peningkatan Kesadaran Hukum dan Hak Asasi Manusia	Nilai	85	85	N/A	-							
		Persentase Capaian Kinerja Walikota (KPI, Perkin dan Lakip)	%	100	100	100	100,00%							
		Persentase Jumlah Wirausaha Baru Yang Tercapai	%	100	100	100	100,00%							
		Persentase Terselesaikannya Permasalahan Terhadap Pelaksanaan Kota Sehat	%	100	100	100	100,00%							
		Persentase Terselesaikannya Permasalahan Terhadap Penanggulangan Kemiskinan Kota	%	100	100	100	100,00%							
		Persentase Terselesaik	%	100	100	100	100,00%							

Program	Sasaran Program	Indikator Program	Satuan	Target Tahun 2021	Kinerja Indikator Tahun 2021			Capaian Program	Rata-rata Capaian Kegiatan	Rata-rata Capaian Subkegiatan	Anggaran Tahun 2021	Anggaran Perubahan Tahun 2021	Realisasi	Serapan (%)
					Target	Realisasi	Capaian							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
		annya Permasalahan Terhadap Pelaksanaan Kota Layak Anak												
		Persentase Terselesaikannya Permasalahan Terhadap Pelaksanaan BOP dan BOS	%	100	100	100	100,00%							
Program Pengelolaan Kota Administrasi	Terlaksananya program pengelolaan kota administrasi	indeks kepuasan pelayanan kendaraan operasional	Indeks	4	4	4	100,00%	100,00%	99,99%	99,92%	6,069,718,810	6,069,718,810.00	4,404,889,676.00	72.57%
		Persentase Terbinanya Lembaga Kemasyarakatan	%	97	97	97	100,00%							
		Persentase Terlaksananya Tugas dan Fungsi Kota Administrasi Jakarta Utara > 80 %	%	100	100	100	100,00%							
		Persentase Penanganan Perkara Tingkat	%	90	90	90	100,00%							

Program	Sasaran Program	Indikator Program	Satuan	Target Tahun 2021	Kinerja Indikator Tahun 2021			Capaian Program	Rata-rata Capaian Kegiatan	Rata-rata Capaian Subkegiatan	Anggaran Tahun 2021	Anggaran Perubahan Tahun 2021	Realisasi	Serapan (%)
					Target	Realisasi	Capaian							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
		Kota Administrasi Jakarta Utara												
		Persentase Jumlah Wirausaha Baru Yang Tercapai	%	95	95	95	100,00%							
		Persentase Capaian Kinerja Walikota (KPI, Perkin dan Lakip)	%	95	95	97,5	102,63%							
		Persentase Penyelesaian Sengketa Hukum.	%	92	92	92	100,00%							
		Persentase terselesaikannya Permasalahan Terhadap Pelaksanaan Kota Layak Anak	%	100	100	N/A	-							
		Persentase terselesaikannya Permasalahan Terhadap Pelaksanaan BOP dan BOS	%	100	100	N/A	-							
		Persentase Terselesaik	%	100	100	N/A	-							

Program	Sasaran Program	Indikator Program	Satuan	Target Tahun 2021	Kinerja Indikator Tahun 2021			Capaian Program	Rata-rata Capaian Kegiatan	Rata-rata Capaian Subkegiatan	Anggaran Tahun 2021	Anggaran Perubahan Tahun 2021	Realisasi	Serapan (%)
					Target	Realisasi	Capaian							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
		annya Permasalahan Terhadap Penanggulangan Kemiskinan Kota												
		Persentase Terselesaikannya Permasalahan Terhadap Pelaksanaan Kota Sehat	%	100	100	N/A	-							
		Persentase Peningkatan Kesadaran Hukum dan Hak Asasi Manusia	%	85	85	85	100,00%							
		Indeks Kepuasan Pelayanan Keprotokol an	Indeks	4	4	4	100,00%							
Program Pengelolaan Kota Administrasi Jakarta Barat	Terwujudnya Pengelolaan Kota Administrasi Jakarta Barat	Persentase Penanganan Perkara tingkat Kota Administrasi Jakarta Barat	%	100	100	100	100,00%	100,00%	99,74%	100,00%	11.237.315.871	8.433.621.537	4.941.904.206	58,60%
		Persentase Terbinanya	%	96	96	96	100,00%							

Program	Sasaran Program	Indikator Program	Satuan	Target Tahun 2021	Kinerja Indikator Tahun 2021			Capaian Program	Rata-rata Capaian Kegiatan	Rata-rata Capaian Subkegiatan	Anggaran Tahun 2021	Anggaran Perubahan Tahun 2021	Realisasi	Serapan (%)
					Target	Realisasi	Capaian							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
		Lembaga Kemasyarakatan												
		Persentase Penyelesaian Sengketa Hukum	%	100	100	100	100,00%							
		Peningkatan Kesadaran Hukum dan Hak Asasi Manusia	Nilai	86	86	N/A	-							
		Persentase Capaian Kinerja Walikota (KPI, Perkin dan Lakip)	%	95	95	99,99	105,25%							
		Persentase Jumlah Wirausaha Baru Yang Tercapai	%	100	100	100	100,00%							
		indeks kepuasan pelayanan kendaraan operasional	Indeks	4	4	4	100,00%							
		Indeks Kepuasan Pelayanan Keprotokol an	Indeks	4	4	4	100,00%							
		Persentase terselesaikannya Permasalahan	%	100	100	100	100,00%							

Program	Sasaran Program	Indikator Program	Satuan	Target Tahun 2021	Kinerja Indikator Tahun 2021			Capaian Program	Rata-rata Capaian Kegiatan	Rata-rata Capaian Subkegiatan	Anggaran Tahun 2021	Anggaran Perubahan Tahun 2021	Realisasi	Serapan (%)
					Target	Realisasi	Capaian							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
		Terhadap Pelaksanaan BOP dan BOS												
		Persentase Terealisasi Permasalahan Terhadap Pelaksanaan Kota Layak Anak	%	100	100	100	100,00%							
		Persentase Terealisasi Permasalahan Terhadap Pelaksanaan Kota Sehat	%	100	100	100	100,00%							
		Persentase Terealisasi Permasalahan Terhadap Penanggulangan Kemiskinan Kota	%	100	100	100	100,00%							
		Persentase Terlaksananya Tugas dan Fungsi Kota Administrasi Jakarta	%	87	87	94,11	108,17%							

Program	Sasaran Program	Indikator Program	Satuan	Target Tahun 2021	Kinerja Indikator Tahun 2021			Capaian Program	Rata-rata Capaian Kegiatan	Rata-rata Capaian Subkegiatan	Anggaran Tahun 2021	Anggaran Perubahan Tahun 2021	Realisasi	Serapan (%)
					Target	Realisasi	Capaian							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
		Barat > 80 %												
Program Pengelolaan Kota Administrasi	Terlaksananya Program Pengelolaan Kota Administrasi	Indeks Kepuasan Pelayanan Keprotokol an	Indeks	4	4	4	100,00%	100,00%	99,13%	99,71%	14.935.227.466	12.665.546.109	9,330,121,217.00	73,91%
		Persentase Penyelesaian Sengketa Hukum	%	100	100	100	100,00%							
		Persentase Capaian Kinerja Walikota (KPI, Perkin dan Lakip)	%	100	100	100	100,00%							
		Persentase Jumlah Wirausaha Baru Yang Tercapai	%	100	100	100	100,00%							
		Persentase Penanganan Perkara Tingkat Kota Administrasi Jakarta Selatan	%	100	100	100	100,00%							
		Peningkatan Kesadaran Hukum dan Hak Asasi Manusia	Nilai	84	84	N/A	-							
		Persentase Terbinanya Lembaga	%	100	100	100	100,00%							

Program	Sasaran Program	Indikator Program	Satuan	Target Tahun 2021	Kinerja Indikator Tahun 2021			Capaian Program	Rata-rata Capaian Kegiatan	Rata-rata Capaian Subkegiatan	Anggaran Tahun 2021	Anggaran Perubahan Tahun 2021	Realisasi	Serapan (%)
					Target	Realisasi	Capaian							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
		Kemasyarakan												
		Persentase Terlaksananya Tugas dan Fungsi Kota Administrasi Jakarta Selatan > 80 %	%	100	100	100	100,00%							
		Persentase terselesaikannya Permasalahan Terhadap Pelaksanaan BOP dan BOS	%	100	100	100	100,00%							
		Persentase terselesaikannya Permasalahan Terhadap Pelaksanaan Kota Layak Anak	%	100	100	100	100,00%							
		Persentase terselesaikannya Permasalahan Terhadap Pelaksanaan Kota Sehat	%	100	100	100	100,00%							

Program	Sasaran Program	Indikator Program	Satuan	Target Tahun 2021	Kinerja Indikator Tahun 2021			Capaian Program	Rata-rata Capaian Kegiatan	Rata-rata Capaian Subkegiatan	Anggaran Tahun 2021	Anggaran Perubahan Tahun 2021	Realisasi	Serapan (%)
					Target	Realisasi	Capaian							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
		Persentase Terselesaikannya Permasalahan Terhadap Penanggulangan Kemiskinan Kota	%	100	100	100	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	13.260.452.231	11.138.343.707	9.266.969.141	83,20%
		indeks kepuasan pelayanan kendaraan operasional	Indeks	4	4	4	100,00%							
Program Pengelolaan Kota Administrasi	Meningkatnya Kepuasan Pengelolaan Kota Administrasi Jakarta Timur	indeks kepuasan pelayanan kendaraan operasional	Indeks	4	4	4	100,00%							
		Indeks Kepuasan Pelayanan Keprotokol an	Indeks	4	4	4	100,00%							
		Persentase Terselesaikannya Permasalahan Terhadap Pelaksanaan BOP dan BOS	%	100	100	100	100,00%							
		Persentase Terselesaikannya Permasalahan	%	100	100	100	100,00%							

Program	Sasaran Program	Indikator Program	Satuan	Target Tahun 2021	Kinerja Indikator Tahun 2021			Capaian Program	Rata-rata Capaian Kegiatan	Rata-rata Capaian Subkegiatan	Anggaran Tahun 2021	Anggaran Perubahan Tahun 2021	Realisasi	Serapan (%)
					Target	Realisasi	Capaian							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
		Terhadap Pelaksanaan Kota Layak Anak												
		Persentase Terealisasi Permasalahan Terhadap Pelaksanaan Kota Sehat	%	100	100	100	100,00%							
		Persentase Terealisasi Permasalahan Terhadap Penanggulangan Kemiskinan Kota	%	100	100	100	100,00%							
		Penyelesaian Sengketa Hukum	%	100	100	100	100,00%							
		Persentase Capaian Kinerja Walikota (KPI, Perkin dan Lakip)	%	91	91	91	100,00%							
		Persentase Jumlah Wirausaha Baru Yang Tercapai	%	100	100	107,23	107,23%							
		Persentase Penanganan	%	100	100	100	100,00%							







Program	Sasaran Program	Indikator Program	Satuan	Target Tahun 2021	Kinerja Indikator Tahun 2021			Capaian Program	Rata-rata Capaian Kegiatan	Rata-rata Capaian Subkegiatan	Anggaran Tahun 2021	Anggaran Perubahan Tahun 2021	Realisasi	Serapan (%)
					Target	Realisasi	Capaian							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
		n Perkara tingkat Kota Administrasi Jakarta Timur												
		Persentase Peningkatan Kesadaran Hukum dan Hak Asasi Manusia	Nilai	84,35	84,35	N/A (Tidak diukur tahun 2021 oleh KemenkumHAM)	-							
		Persentase Terbinanya Lembaga Kemasyarakatan	%	100	100	100	100,00%							
		Persentase Terlaksananya Tugas dan Fungsi Kota Administrasi Jakarta Timur > 80 %	%	90	90	100	111,11%							
Program Pengelolaan Kota Administrasi	Meningkatnya Kinerja Program Perangkaat Daerah dalam Pengelolaan Kabupaten	Persentase Penyelesaian Sengketa Hukum	%	95	95	100	105,26%							
		Persentase Capaian Kinerja Bupati (KPI, Perkin dan Lakip)	%	90	90	98,46	109,40%	100,00%	100,00%	100,00%	7.090.869.661	6.191.819.822	5.239.218.195	84,62%

Program	Sasaran Program	Indikator Program	Satuan	Target Tahun 2021	Kinerja Indikator Tahun 2021			Capaian Program	Rata-rata Capaian Kegiatan	Rata-rata Capaian Subkegiatan	Anggaran Tahun 2021	Anggaran Perubahan Tahun 2021	Realisasi	Serapan (%)
					Target	Realisasi	Capaian							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	n Administrasi	Indeks Kepuasan Pelayanan Keprotokol an	Indeks	4	4	4	100,00%							
		indeks kepuasan pelayanan kendaraan operasional	Indeks	4	4	4	100,00%							
		Persentase Terselesaikannya Permasalahan Terhadap Penanggula ngan Kemiskinan Kabupaten	%	95	95	100	105,26%							
		Persentase Terselesaikannya Permasalahan Terhadap Pelaksanaa n BOP dan BOS	%	95	95	100	105,26%							
		Persentase Permasalah an Pelaksanaa n Tugas dan Fungsi Kabupaten Administras i yang	%	90	90	100	111,11%							

Program	Sasaran Program	Indikator Program	Satuan	Target Tahun 2021	Kinerja Indikator Tahun 2021			Capaian Program	Rata-rata Capaian Kegiatan	Rata-rata Capaian Subkegiatan	Anggaran Tahun 2021	Anggaran Perubahan Tahun 2021	Realisasi	Serapan (%)
					Target	Realisasi	Capaian							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
		terselesaikan												

Sumber: e-SAKIP dan e-Monev 2021, diolah

Keterangan warna capaian kinerja dan serapan anggaran:

	: Mencapai Target	($\geq 100,00\%$)		: Sedang	($66,00\% \leq x < 75,00\%$)
	: Sangat Tinggi	(Capaian Kinerja: $91,00\% \leq x < 100,00\%$; Serapan Anggaran: $91,00\% \leq x < 100,00\%$)		: Rendah	($51,00\% \leq x < 65,00\%$)
	: Tinggi	($76,00\% \leq x < 90,00\%$)		: Sangat Rendah	($\leq 50,00\%$)

Berdasarkan data yang tersaji pada Tabel 2.25, dari 6 Program Urusan Pemerintah Unsur Kewilayahan Administrasi Kota, pada program memiliki dominasi capaian kegiatan yang termasuk dalam kategori sangat tinggi dengan capaian kegiatan $\geq 90,00\%$. Kota Administrasi Jakarta Pusat memiliki capaian kegiatan sebesar 99,99%, Kota Administrasi Jakarta Utara memiliki capaian 99,91%, Kota Administrasi Jakarta Barat memiliki capaian sebesar 99,74%, Kota Administrasi Jakarta Selatan memiliki capaian sebesar 99,13%. Sedangkan pada Kota Administrasi Jakarta Timur dan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu memiliki capaian yang mencapai target

sebesar 100,00%. Pada rata-rata capaian sub kegiatan, Kota Administrasi Jakarta Pusat memiliki capaian sangat tinggi sebesar 99,40%, Kota Administrasi Jakarta Utara memiliki capaian sangat tinggi sebesar 99,69%, Kota Administrasi Jakarta Timur dengan capaian 99,56% sedangkan Program yang masuk dalam kategori mencapai target Kota Administrasi Jakarta Barat dan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu. Hal ini mengindikasikan bahwa indikator dan kegiatan telah selaras sehingga dapat memberi kontribusi terhadap keberhasilan indikator.

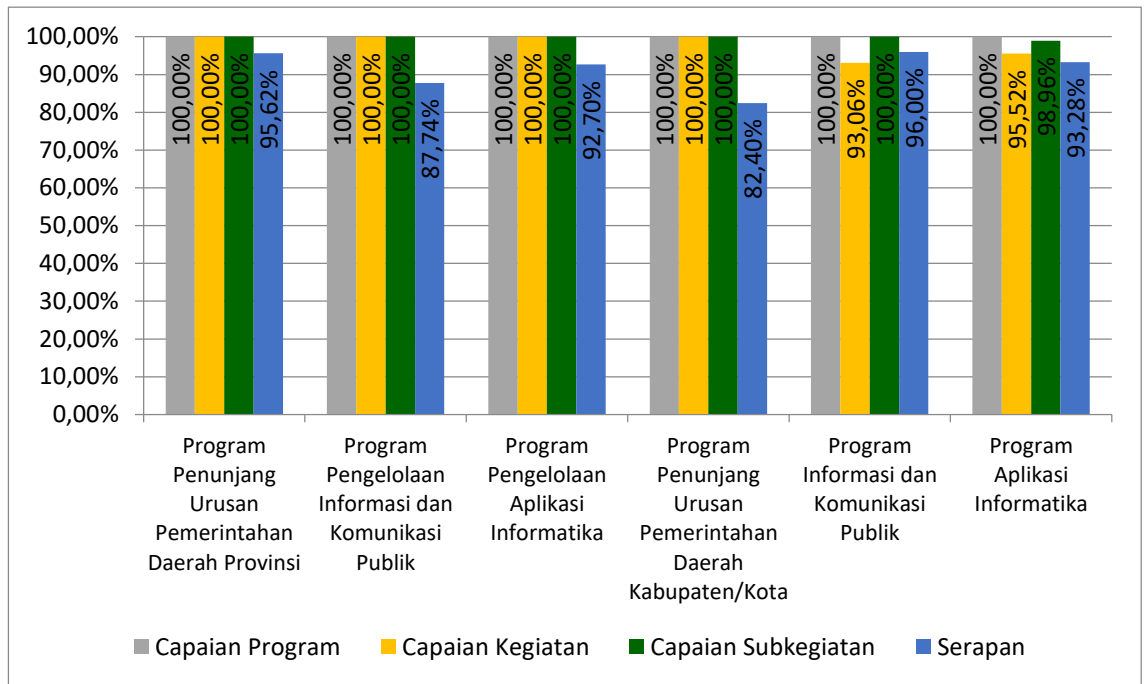
Komunikasi dan Informatika

Pada tahun 2021, urusan Pemerintahan pada Bidang Komunikasi dan Informatika memiliki 6 program dengan total anggaran program sebesar Rp 492.408.824.781 dengan serapan anggaran program hingga bulan Desember 2021 sebesar Rp 457.337.994.961 atau sebesar 92,88% dari total pagu. Perangkat daerah yang melaksanakan urusan

Pemerintahan bidang komunikasi dan informatika adalah Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik. Informasi terkait capaian program, kegiatan, sub kegiatan serta serapan anggaran pada bidang tenaga kerja terdapat pada Gambar 2.83 sebagai berikut.

GAMBAR 2.83

Capaian Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Serapan Anggaran Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika Triwulan IV Tahun 2021



Sumber: e-SAKIP dan e-Monev 2021, diolah

Berdasarkan Gambar 2.83, secara keseluruhan rata-rata capaian program didominasi dengan capaian $\geq 100\%$ dan dapat dikategorikan dalam kategori mencapai target. Serapan anggaran pada Bidang Komunikasi dan Informatika rata-rata di atas 80%. Pada rata-rata capaian sub kegiatan, seluruh program termasuk dalam kategori mencapai target dan kategori sangat tinggi. Apabila melihat data realisasi kinerja program, terdapat 2 (dua) indikator program yang

realisasinya jauh melampaui target yaitu pada Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik dengan indikator Jumlah masyarakat yang mengkonsumsi informasi publik dari kanal/saluran informasi resmi Pemprov DKI Jakarta yang capaiannya hingga 5650%. Terlalu tingginya capaian indikator mengindikasikan bahwa target yang ditetapkan terlalu rendah. Data detail terkait kinerja program dan anggaran dapat dilihat pada Tabel.

TABEL 2.26







Capaian Kinerja dan Serapan Anggaran Program Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika Triwulan IV Tahun 2021 pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik

Program	Sasaran Program	Indikator Program	Satuan	Target Tahun 2021	Kinerja Indikator Tahun 2021			Capaian Program	Rata-rata Capaian Kegiatan	Rata-rata Capaian Subkegiatan	Anggaran Tahun 2021	Anggaran Perubahan Tahun 2021	Realisasi	Serapan (%)
					Target	Realisasi	Capaian							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Meningkatnya kepuasan pelayanan kantor	Indeks kepuasan pelayanan kantor	Indeks	4	4	4	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	98.793.344.702	98.793.344.702	94.462.427.091	95,62%
Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Meningkatnya jumlah cakupan masyarakat yang terinformasi program dan capaian Pemprov. DKI Jakarta	Jumlah masyarakat yang mengkonsumsi informasi publik dari kanal/saluran informasi resmi Pemprov DKI Jakarta	Orang	5.800.000	5.800.000	327.700.000,0000	5650,00%	100,00%	100,00%	100,00%	43.147.354.986	43.147.354.986	37.857.048.813	87,74%
Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Meningkatnya optimalisasi penggunaan IT dalam pelayanan publik dan pelayanan aparatur	Jumlah cakupan layanan SPBE	Perangkat Daerah	51	51	51	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	339.353.724.358	339.353.724.358	314.595.930.227	92,70%
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya kepuasan pelayanan kantor	Indeks kepuasan pelayanan kantor sudi komunikasi informatika dan statistik kota/kabupaten	Nilai	4	4	4	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	659.660.980	659.660.980	543.592.050	82,40%

Program	Sasaran Program	Indikator Program	Satuan	Target Tahun 2021	Kinerja Indikator Tahun 2021			Capaian Program	Rata-rata Capaian Kegiatan	Rata-rata Capaian Subkegiatan	Anggaran Tahun 2021	Anggaran Perubahan Tahun 2021	Realisasi	Serapan (%)
					Target	Realisasi	Capaian							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Program Informasi dan Komunikasi Publik	Meningkatnya jumlah cakupan masyarakat yang terinformasi program dan capaian Pemprov. DKI Jakarta	Jumlah masyarakat yang mengkonsumsi informasi publik dari kanal/saluran informasi resmi Pemprov DKI Jakarta di tingkat Kabupaten/Kota	Orang	5.800.000	5.800.000,00	33.352.300,00	575,04%	100,00%	93,06%	100,00%	4.661.712.076	4.661.712.076	4.475.345.180	96,00%
Program Aplikasi Informatika	Meningkatnya optimalisasi penggunaan IT dalam pelayanan publik dan pelayanan aparatur	Jumlah cakupan layanan SPBE	Perangkat Daerah	51	51	51	100,00%	100,00%	95,52%	98,95%	5.793.027.679	5.793.027.679	5.403.651.600	93,28%

Sumber: e-SAKIP dan e-Monev 2021, diolah

Keterangan warna capaian kinerja dan serapan anggaran:

	: Mencapai Target ($\geq 100,00\%$)		: Sedang ($66,00\% \leq x < 75,00\%$)
	: Sangat Tinggi (Capaian Kinerja: $91,00\% \leq x < 100,00\%$; Serapan Anggaran: $91,00\% \leq x < 100,00\%$)		: Rendah ($51,00\% \leq x < 65,00\%$)
	: Tinggi ($76,00\% \leq x < 90,00\%$)		: Sangat Rendah ($\leq 50,00\%$)

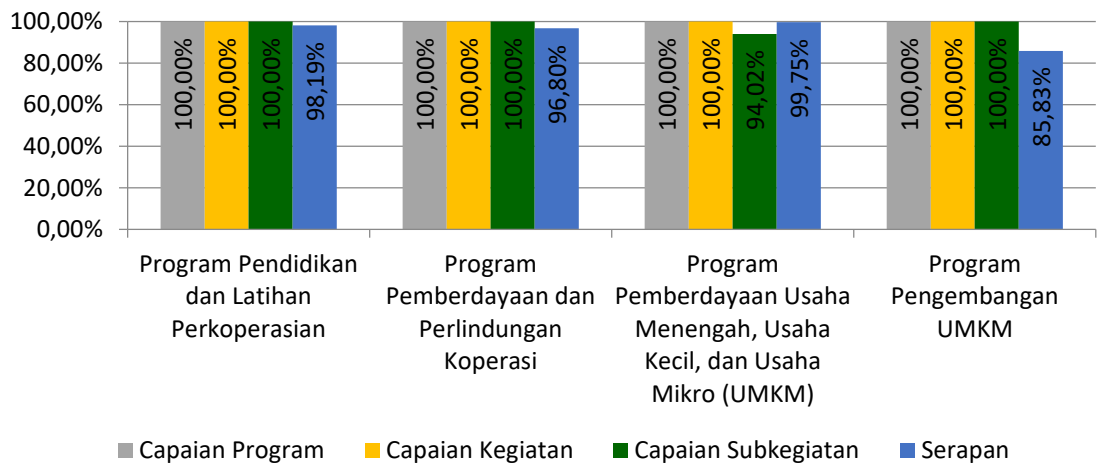
Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

Pada tahun 2021, Urusan Pemerintahan pada Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah memiliki 4 program dengan total anggaran program sebesar Rp 32.347.233.842 dengan serapan anggaran program hingga bulan Desember 2021 sebesar Rp 31.126.041.42 atau sebesar 96,22% dari total pagu. Perangkat daerah yang melaksanakan urusan

Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah. Informasi terkait capaian program, kegiatan, sub kegiatan serta serapan anggaran pada bidang koperasi, usaha kecil dan menengah terdapat pada Gambar 2.84 sebagai berikut.

GAMBAR 2.84

Capaian Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Serapan Anggaran Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Triwulan IV Tahun 2021



Sumber: e-SAKIP dan e-Monev 2021, diolah

Berdasarkan Gambar 2.84, secara keseluruhan, rata-rata capaian indikator program memiliki capaian sebesar $\geq 100,00\%$ dan dapat dikategorikan dalam kategori mencapai target. Sebanyak 3 dari 4 program memiliki serapan anggaran pada Urusan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah $\geq 90,00\%$ yang masuk kategori sangat tinggi. Satu program memiliki serapan dengan kategori tinggi yaitu Program Pengembangan UMKM. Terkait rata-rata capaian kegiatan, 4 program memiliki rata-rata capaian kegiatan sebesar 100,00% dan dikategorikan dalam kategori mencapai target. Selanjutnya untuk

rata-rata capaian subkegiatan, sebanyak 3 dari 4 program memiliki rata-rata capaian sub kegiatan sebesar 100,00% dan dikategorikan dalam kategori mencapai target, satu program yang memiliki capaian sub kegiatan yang masuk dalam kategori sangat tinggi yaitu Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM) dengan capaian sebesar 94,02%. Data kinerja indikator program, kegiatan, sub kegiatan, dan serapan anggaran urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah dapat dilihat pada Tabel 2.27.







TABEL 2.27

Capaian Kinerja dan Serapan Anggaran Program Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Triwulan IV Tahun 2021 pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Program	Sasaran Program	Indikator Program	Satuan	Target Tahun 2021	Kinerja Indikator Tahun 2021			Capaian Program	Rata-rata Capaian Kegiatan	Rata-rata Capaian Subkegiatan	Anggaran Tahun 2021	Anggaran Perubahan Tahun 2021	Realisasi	Serapan (%)
					Target	Realisasi	Capaian							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Meningkatnya kemampuan dan kompetensi pengurus koperasi	Jumlah pengurus koperasi yang keanggotaan di DKI Jakarta yang diberikan pendidikan dan pelatihan perkoperasian	Orang	70	70	502	717,14%	100,00%	100,00%	100,00%	1.580.999.221	1.580.999.221	1.552.391.083	98,19%
Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Meningkatnya jumlah Koperasi di DKI Jakarta yang bersertifikat Nomor Induk Koperasi	Jumlah koperasi yang bersertifikasi Nomor Induk Koperasi	Koperasi	120	120	126	105,00%	100,00%	100,00%	100,00%	149.760.000	149.760.000,00	144.975.000,00	96,80%
Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Meningkatnya jumlah dan kualitas UMKM di DKI Jakarta	Pertumbuhan Jumlah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah	UMKM	27.799	27799	46903	168,72%	100,00%	100,00%	94,02%	30.479.387.621	30.479.387.621	29.291.930.338	96,10%
Program Pengembangan UMKM	Meningkatnya kemampuan dan kompetensi pelaku UMKM di DKI Jakarta	Jumlah UMKM peserta kegiatan pendidikan dan pelatihan serta bimbingan teknis	Orang	70	70	4800	6857,14%	100,00%	100,00%	100,00%	137.087.000	137.087.000	136.745.000	99,75%

Sumber: e-SAKIP dan e-Monev 2021, diolah

Keterangan warna capaian kinerja dan serapan anggaran:

	: Mencapai Target ($\geq 100,00\%$)		: Sedang ($66,00\% \leq x < 75,00\%$)
	: Sangat Tinggi (Capaian Kinerja: $91,00\% \leq x < 100,00\%$; Serapan Anggaran: $91,00\% \leq x < 100,00\%$)		: Rendah ($51,00\% \leq x < 65,00\%$)
	: Tinggi ($76,00\% \leq x < 90,00\%$)		: Sangat Rendah ($\leq 50,00\%$)

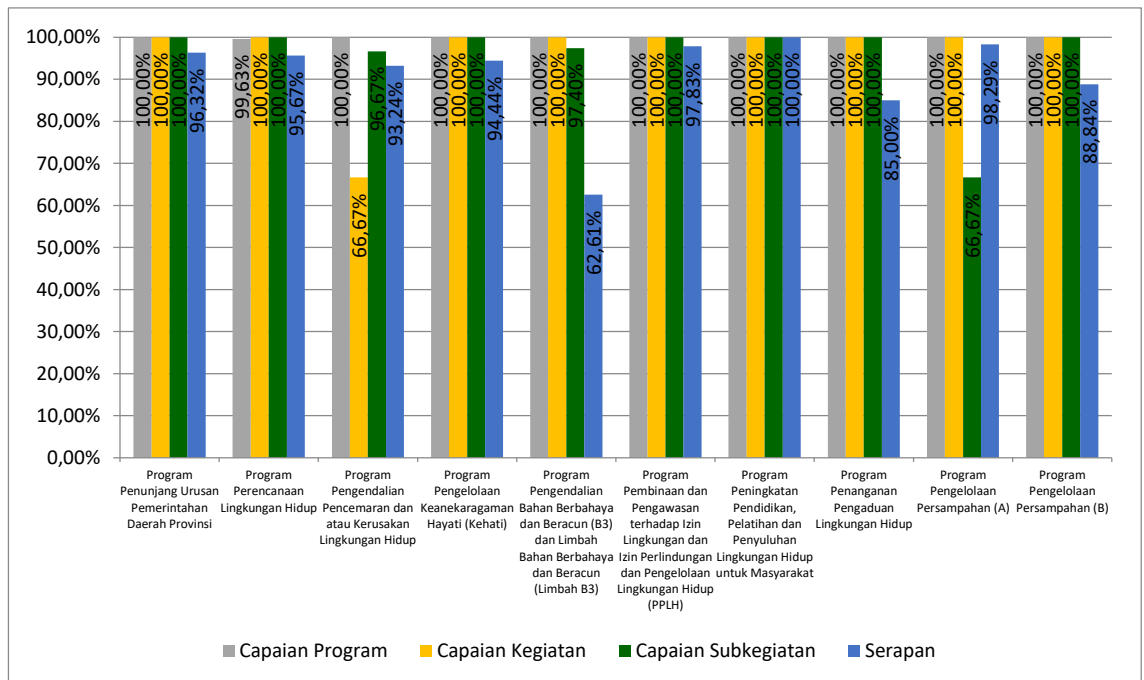
Lingkungan Hidup

Pada tahun 2021, urusan Pemerintahan pada Bidang Lingkungan hidup memiliki 10 program dengan total anggaran program sebesar Rp 2.583.308.721.162 dengan serapan anggaran program hingga bulan Desember 2021 sebesar Rp 2.242.564.154.475 atau sebesar 86,81% dari total pagu. Perangkat daerah yang melaksanakan urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan hidup yakni:

1. Dinas Lingkungan Hidup
 2. Dinas Pertamanan dan Hutan Kota
- Informasi terkait capaian program, kegiatan, sub kegiatan serta serapan anggaran pada Bidang Lingkungan hidup terdapat pada Gambar 2.85, sebagai berikut.

GAMBAR 2.85

Capaian Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Serapan Anggaran Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Triwulan IV Tahun 2021



Sumber: e-SAKIP dan e-Monev 2021, diolah

Berdasarkan Gambar 2.85, rata-rata capaian indikator program didominasi dengan capaian $\geq 100\%$ dan dapat dikategorikan dalam kategori mencapai target. Serapan anggaran pada Bidang Lingkungan Hidup didominasi oleh kategori sangat tinggi dan tinggi. Akan tetapi, terdapat 1 (satu) program dengan serapan anggaran sedang, yaitu program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan

Beracun (Limbah B3) sementara capaian program mencapai target. Untuk itu, ke depannya perlu dipertimbangan perencanaan anggaran agar lebih presisi dengan kebutuhan pencapaian outcome untuk program tersebut. Data detail indikator program, kegiatan, sub kegiatan, dan serapan anggaran urusan Pemerintahan bidang lingkungan hidup dapat dilihat pada Tabel 2.28 sebagai berikut.

TABEL 2.28

Capaian Kinerja dan Serapan Anggaran Program Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Triwulan IV Tahun 2021

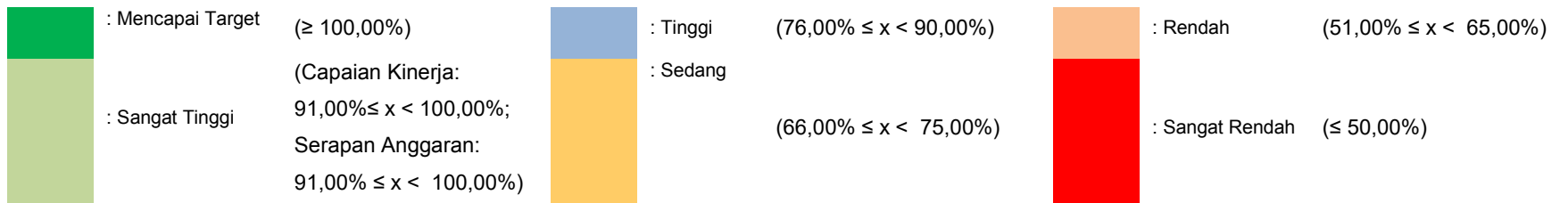
Program	Sasaran Program	Indikator Program	Satuan	Target Tahun 2021	Kinerja Indikator Tahun 2021			Capaian Program	Rata-rata Capaian Kegiatan	Rata-rata Capaian Subkegiatan	Anggaran Tahun 2021	Anggaran Perubahan Tahun 2021	Realisasi	Serapan (%)
					Target	Realisasi	Capaian							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)	(16)
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan	Indeks	3	3	3	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	370.986.540.360	370.986.540.360	357.329.877.947	96,32%
Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Terlaksananya Perencanaan Lingkungan Hidup	Persentase penyelesaian penyusunan dokumen perencanaan dan kebijakan lingkungan hidup dengan tepat waktu	%	100	100	100	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	1.859.653.059,00	1.859.653.059,00	1.779.088.900,00	95,67%
Program Pengendalian Pencemaran dan atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Meningkatnya Pengendalian Pencemaran dan atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air	Indeks	41,4	41	44	107,32%	99,63%	66,67%	96,67%	10.079.094.798	10.079.094.798	9.398.217.751	93,24%
		Indeks Kualitas Udara	Indeks	67,02	67,02	66,52	99,25%							
Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Terlaksananya pengelolaan keanekaragaman hayati (kehati)	Persentase Penyelesaian Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	%	100	0	100	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	592.635.209.440	592.635.209.440	559.713.350.191	94,44%
Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan	Terlaksananya Pengendalian Bahan	Persentase pelayanan pengelolaan limbah B3	%	95	95	100	105,26%	100,00%	100,00%	97,40%	906.866.290	906.866.290	567.768.520,00	62,61%

Program	Sasaran Program	Indikator Program	Satuan	Target Tahun 2021	Kinerja Indikator Tahun 2021			Capaian Program	Rata-rata Capaian Kegiatan	Rata-rata Capaian Subkegiatan	Anggaran Tahun 2021	Anggaran Perubahan Tahun 2021	Realisasi	Serapan (%)
					Target	Realisasi	Capaian							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)	(16)
Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)													
Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Persentase pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH)	%	100	100	100	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	813.568.300	813.568.300	795.928.900	97,83%
Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Tercapainya Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase peningkatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup	%	100	100	100	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	138.600.000,00	138.600.000,00	138.600.000,00	100,00%
Program Penanganan	Terselesaikannya	Persentase penanganan	%	100	100	100	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	206.839.440	206.839.440	175.807.500	85,00%

Program	Sasaran Program	Indikator Program	Satuan	Target Tahun 2021	Kinerja Indikator Tahun 2021			Capaian Program	Rata-rata Capaian Kegiatan	Rata-rata Capaian Subkegiatan	Anggaran Tahun 2021	Anggaran Perubahan Tahun 2021	Realisasi	Serapan (%)
					Target	Realisasi	Capaian							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)	(16)
Pengaduan Lingkungan Hidup	Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	pengaduan dan penegakan hukum Lingkungan Hidup												
Program Pengelolaan Persampahan (A)	Meningkatnya Pengelolaan Persampahan	Persentase pengurangan sampah di kota	%	24	24	24,85	103,54%	100,00%	100,00%	66,67%	132.424.309.072	130.686.199.393	128.453.737.898	98,29%
		Persentase penanganan sampah di kota	%	74	74	75,15	101,55%							
Program Pengelolaan Persampahan (B)	Meningkatnya Pengelolaan Persampahan	Persentase pengurangan sampah di kota	%	24	24	24,85	103,54%	100,00%	100,00%	100,00%	1.702.884.421.188	1.475.134.750.082	1.310.469.984.260	88,84%
		Persentase penanganan sampah di kota	%	74	74	75	101,35%							

Sumber: e-Sakip dan e-Monev 2021, diolah

Keterangan warna capaian kinerja dan serapan anggaran:



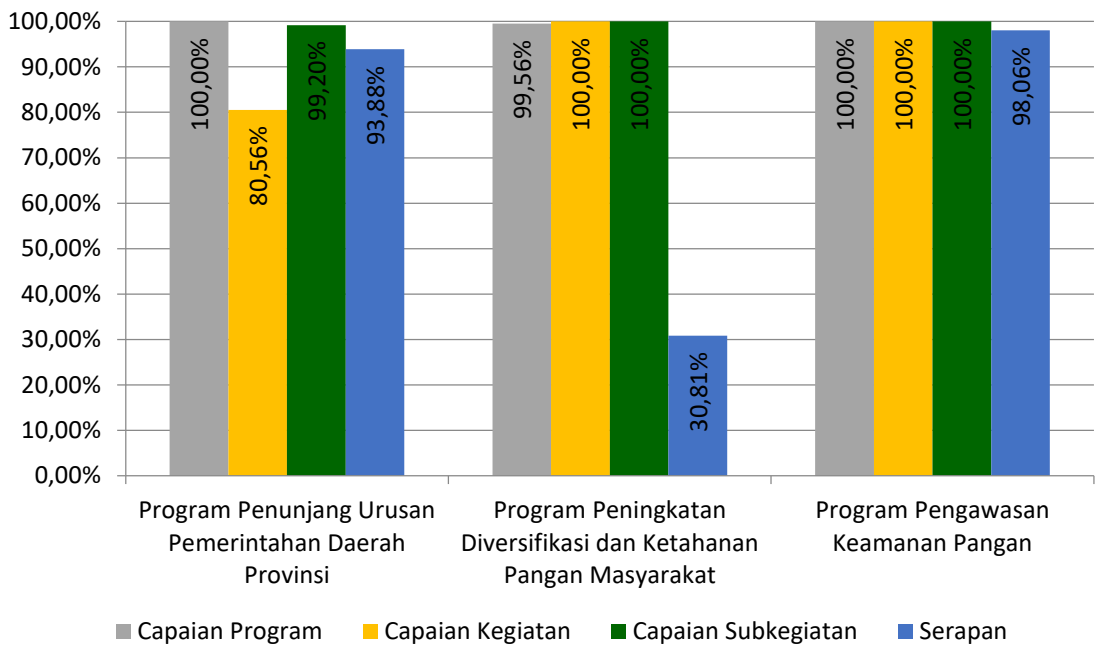
Pangan

Pada tahun 2021, urusan Pemerintahan Bidang Pangan memiliki 3 program dengan total anggaran sebesar Rp 866.037.860.721 dengan serapan anggaran program sampai dengan bulan Desember tahun 2021 sebesar Rp 430.369.534.762 atau 49,69% dari total pagu. Perangkat daerah yang melaksanakan

urusan pemerintahan bidang pangan adalah Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian. Informasi terkait capaian program, kegiatan, sub kegiatan serta serapan anggaran pada bidang pangan terdapat pada Gambar 2.86 sebagai berikut.

GAMBAR 2.86

Capaian Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Serapan Anggaran Urusan Pemerintahan Bidang Pangan Triwulan IV Tahun 2021



Sumber: e-SAKIP dan e-Monev 2021, diolah

Berdasarkan Gambar 2.86, seluruh program urusan Pemerintah Bidang Pangan dapat mencapai target optimal. Untuk serapan anggaran, terdapat 1 (satu) program yang serapan anggarannya masuk dalam kategori sangat rendah yaitu Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat. Sangat rendahnya serapan anggaran program tersebut dikarenakan terdapat 1 (satu) subkegiatan yang mendapatkan tambahan anggaran pada fase Perubahan APBD Tahun 2021 yaitu sub kegiatan Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal.

Untuk perbandingan capaian program, rata-rata capaian kegiatan dan rata-rata capaian subkegiatan, terlihat pada Gambar 2.84 cukup berimbang kecuali pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi yang capaian kegiatannya kisaran 80% akan tetapi capaian program mencapai 100% sehingga perlu dilakukan analisis kembali terkait indikator kegiatan yang digunakan. Data detail terkait kinerja program dan anggaran program dapat dilihat pada Tabel 2.29 di bawah.







TABEL 2.29

Capaian Kinerja dan Serapan Anggaran Program Urusan Pemerintahan Bidang Pangan Triwulan IV Tahun 2021 pada Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian

Program	Sasaran Program	Indikator Program	Satuan	Target Tahun 2021	Kinerja Indikator Tahun 2021			Capaian Program	Rata-rata Capaian Kegiatan	Rata-rata Capaian Subkegiatan	Anggaran Tahun 2021	Anggaran Perubahan Tahun 2021	Realisasi	Serapan (%)
					Target	Realisasi	Capaian							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)	(16)
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Tercapainya pelaksanaan pengelolaan anggaran yang transparan dan akuntabel	Indeks Kepuasan Pelayanan Kantor	Indeks	4	4	4	100,00%	100,00%	80,56%	100,00%	258.095.01 6.534	258.095.01 6.534	242.312.18 3.646	93,88%
Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Tersedianya stok kebutuhan pangan	Persentase ketersediaan pangan	%	100	100	100	100,00%	99,56%	100,00%	100,00%	606.785.38 0.440	606.785.38 0.440	186.922.36 2.183,00	30,81%
		Skor Pola Pangan Harapan	Skor	88	88	86,3	98,07%							
Program Pengawasan Keamanan Pangan	Terawasnya pangan segar	Persentase pangan yang bebas bahan berbahaya	%	96	96	99,95	104,11%	100,00%	100,00%	100,00%	1.157.463. 747	1.157.463.7 47	1.134.988.9 33	98,06%

Sumber: e-SAKIP dan e-Monev 2021, diolah

Keterangan warna capaian kinerja dan serapan anggaran:

	: Mencapai Target ($\geq 100,00\%$)		: Sedang ($66,00\% \leq x < 75,00\%$)
	: Sangat Tinggi (Capaian Kinerja: $91,00\% \leq x < 100,00\%$; Serapan Anggaran: $91,00\% \leq x < 100,00\%$)		: Rendah ($51,00\% \leq x < 65,00\%$)
	: Tinggi ($76,00\% \leq x < 90,00\%$)		: Sangat Rendah ($\leq 50,00\%$)

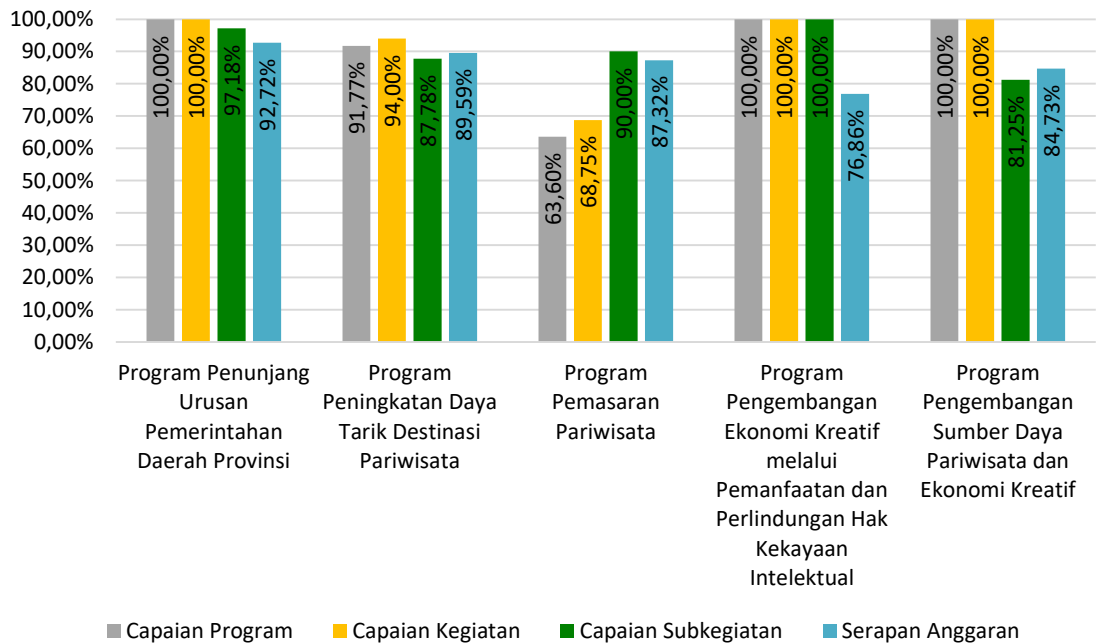
Pariwisata

Pada Tahun 2021, Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata memiliki 5 program dengan total anggaran program sebesar Rp201.401.528.695 dan serapan anggaran program sampai dengan Bulan Desember Tahun 2021 sebesar Rp183.229.068.915 (90,98% dari total pagu). Perangkat daerah

yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pariwisata adalah Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Informasi mengenai capaian program, kegiatan, sub kegiatan dan serapan anggaran dijabarkan pada Gambar 2.87 berikut.

GAMBAR 2.87

Capaian Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Serapan Anggaran Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata Triwulan IV Tahun 2021



Sumber: e-SAKIP dan e-Monev 2021, diolah

Berdasarkan Gambar 2.87 di atas, capaian seluruh program telah memiliki target dan realisasi dengan kategori yang bervariasi, diantaranya 3 (tiga) program berada pada kategori capaian mencapai target, sedangkan 1 (satu) program lainnya masing-masing berada pada kategori capaian sangat tinggi dan 1 (satu) program dengan capaian rendah. Program dengan capaian rendah yaitu

Program Pemasaran Pariwisata. Penyebab rendahnya capaian program tersebut karena ukuran keberhasilan program tersebut adalah jumlah wisatawan sehingga pada tahun 2021 kondisi pariwisata di DKI Jakarta belum pulih. Capaian kinerja indikator program, kegiatan, sub kegiatan dan serapan anggaran urusan pemerintahan bidang pariwisata dapat dilihat pada Tabel 2.30 sebagai berikut.

TABEL 2.30







Capaian Kinerja dan Serapan Anggaran Program Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata Triwulan IV Tahun 2021 pada Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Program	Sasaran Program	Indikator Program	Satuan	Target Tahun 2021	Kinerja Indikator Tahun 2021			Capaian Program	Rata-rata Capaian Kegiatan	Rata-rata Capaian Subkegiatan	Anggaran Tahun 2021	Anggaran Perubahan Tahun 2021	Realisasi	Serapan (%)
					Target	Realisasi	Capaian							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Terwujudnya pemenuhan sarana dan prasarana penunjang operasional pengelolaan kantor dalam rangka pelayanan prima	Indeks kepuasan pelayanan kantor	Indeks	4	4	4	100,00%	100,00%	100,00%	97,18%	172.109.950.397	160.217.303.430	148.545.707.314	92,72%
		Indeks kepuasan pelayanan kendaraan operasional	Indeks	4	4	4	100,00%							
Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Meningkatnya daya tarik destinasi pariwisata Jakarta	Persentase Industri Pariwisata yang memiliki TDUP (Tanda Daftar Usaha Pariwisata)	%	99	99	179	180,81%	91,77%	94,00%	87,78%	30.006.988.743	11.245.593.406	10.074.373.786	89,59%
		Jumlah Wisatawan Nusantara	Orang	7.300.090	7.300.090	5.499.040	75,33%							
		Jumlah Objek Wisata Baru	Objek Wisata	2	2	2	100,00%							
Program Pemasaran Pariwisata	Meningkatnya minat kunjungan wisatawan ke Jakarta	Jumlah Wisatawan Mancanegara	Orang	450.014	450.014	122.299	27,18%	63,60%	68,75%	90,00%	114.188.029.401	11.365.156.220	9.923.706.267	87,32%
		Jumlah E-Tourism	Pengunjung halaman webiste	1.000.000	1.000.000	2.945.970	294,60%							
Program Pengembangan	Meningkatnya jumlah pelaku ekonomi	Jumlah pelaku	Pelaku ekonomi kreatif	1.000	1.000	1.587	158,70%	100,00%	100,00%	100,00%	28.294.620.280	13.374.723.680	10.280.151.888	76,86%

Program	Sasaran Program	Indikator Program	Satuan	Target Tahun 2021	Kinerja Indikator Tahun 2021			Capaian Program	Rata-rata Capaian Kegiatan	Rata-rata Capaian Subkegiatan	Anggaran Tahun 2021	Anggaran Perubahan Tahun 2021	Realisasi	Serapan (%)
					Target	Realisasi	Capaian							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	kreatif dan subsektor ekonomi kreatif yang mendapat manfaat dan dukungan pengembangan ekonomi kreatif	ekonomi kreatif												
		Jumlah subsektor ekonomi kreatif	Sub sektor	11	11	17	154,55%							
Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Meningkatnya kompetensi dan profesionalisme sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif	Persentase SDM Industri Pariwisata bersertifikat	%	83,7	83,7	88,27	105,46%	100,00%	100,00%	81,25%	10.799.692.273	5.198.751.960	4.405.129.660	84,73%

Sumber: e-SAKIP dan e-Monev 2021, diolah

Keterangan warna capaian kinerja dan serapan anggaran:

	: Mencapai Target ($\geq 100,00\%$)		: Sedang ($66,00\% \leq x < 75,00\%$)
	: Sangat Tinggi (Capaian Kinerja: $91,00\% \leq x < 100,00\%$; Serapan Anggaran: $91,00\% \leq x < 100,00\%$)		: Rendah ($51,00\% \leq x < 65,00\%$)
	: Tinggi ($76,00\% \leq x < 90,00\%$)		: Sangat Rendah ($\leq 50,00\%$)

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

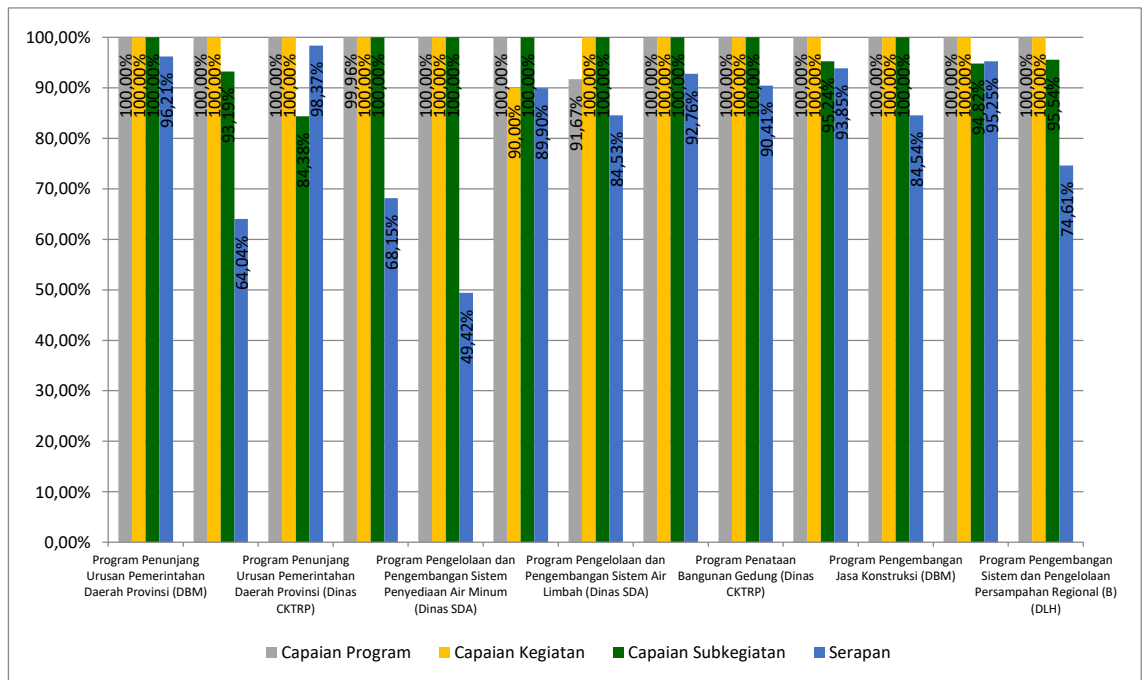
Pada Tahun 2021, Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang memiliki 13 program dengan total anggaran program sebesar Rp 6.024.467.095.355 dan serapan anggaran program sampai dengan Bulan Desember Tahun 2021 sebesar Rp 4.015.436.290.703 atau 77,72% dari total pagu. Perangkat Daerah Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah:

1. Dinas Bina Marga (DBM)
2. Dinas Sumber Daya Air (SDA)
3. Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan (CKTRP)
4. Dinas Lingkungan Hidup.

Informasi terkait capaian program, kegiatan, sub kegiatan serta serapan anggaran pada Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang terdapat pada Gambar 2.88 berikut.

GAMBAR 2.88

Capaian Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Serapan Anggaran Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Triwulan IV Tahun 2021



Sumber: e-SAKIP dan e-Monev 2021, diolah

Berdasarkan Gambar 2.88, dari 13 program Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, sebanyak 11 dari 13 program memiliki capaian program yang masuk dalam kategori mencapai target dengan capaian $\geq 100,00\%$. Selain itu, terdapat dua program yang memiliki capaian sangat tinggi yaitu Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) capaian sebesar 99,96% dan Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah dengan capaian 91,67%. Hal ini mengindikasikan bahwa kegiatan program sudah tepat

sehingga mampu memberi kontribusi terhadap indikator program.

Berdasarkan serapan anggaran program, Program Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang memiliki serapan anggaran yang beragam baik dalam kategori sangat rendah maupun kategori sangat tinggi. Kategori sangat rendah terdapat pada satu program yakni Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum sebesar 49,42%. Penyebab rendahnya serapan anggaran program dimaksud karena terdapat 1 (satu)

subkegiatan yang yaitu Pembangunan Baru SPAM Jaringan Perpipaan yang serapannya hanya 44,13%.

Selanjutnya, terdapat tiga program masuk dalam kategori serapan sedang yakni Program Penunjang Urusan Pemerintahan

Daerah Provinsi sebesar 64,04%, Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) sebesar 68,15%, dan Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional (B) dengan capaian 74,61%. Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat pada Tabel 2.31.

TABEL 2.31

Capaian Kinerja dan Serapan Anggaran Program Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Triwulan IV Tahun 2021

Program	Sasaran Program	Indikator Program	Satuan	Target Tahun 2021	Kinerja Indikator Tahun 2021			Capaian Program	Rata-rata Capaian Kegiatan	Rata-rata Capaian Subkegiatan	Anggaran Tahun 2021	Anggaran Perubahan Tahun 2021	Realisasi	Serapan (%)
					Target	Realisasi	Capaian							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Dinas SDA														
Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Terwujudnya Pengelolaan Sumber Daya Air terpadu	Persentase luas kawasan banjir yang tertangani	%	51,84	51,84	51,73	99,79%	99,96%	100,00%	100,00%	2.415.331.494.538	2.834.345.123.177	1.931.503.934.347	68,15%
		Persentase tanggul kritis di muara kali dan pantai kawasan pesisir Jakarta yang telah terbangun	%	10,94	10,94	11,19	102,29%							
		Jumlah titik pembangunan Sarana Retensi	Unit	1256	1256	24967	1987,82 %							
		Persentase Pantai di Kepulauan Seribu yang bebas dari abrasi	%	50,78	50,78	50,8	100,04%							
		Persentase waduk yang memenuhi baku mutu untuk air baku	%	1,85	1,85	7,41	400,54%							

Program	Sasaran Program	Indikator Program	Satuan	Target Tahun 2021	Kinerja Indikator Tahun 2021			Capaian Program	Rata-rata Capaian Kegiatan	Rata-rata Capaian Subkegiatan	Anggaran Tahun 2021	Anggaran Perubahan Tahun 2021	Realisasi	Serapan (%)
					Target	Realisasi	Capaian							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Terwujudnya peningkatan akses sarana dan prasarana air bersih	Persentase cakupan pelayanan air bersih	%	64	64	65,3	102,03%	100,00%	100,00%	100,00%	90.735.773.788	96.733.410.116	47.807.554.313	49,42%
Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Terwujudnya peningkatan akses sarana dan prasarana air limbah	Persentase cakupan pelayanan sistem pengelolaan air limbah	%	19,99	19,99	18,19	91,00%	91,67%	100,00%	100,00%	8.149.634.989	133.861.219.443	113.148.639.119	84,53%
Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Berkurangnya Jumlah Titik Genangan Banjir	Persentase penanganan genangan yang kurang dari 2 jam	%	83	83	83,18	100,22%	100,00%	100,00%	100,00%	530.994.960.841	473.502.414.479	439.222.331.350	92,76%
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan Daerah yang transparan dan	Indeks kepuasan pelayanan kantor	Indeks	3	3	4	133,33%	100,00%	100,00%	93,19%	641.697.453.029	641.697.453.029	410.967.481.841	64,04%
		Indeks kepuasan pelayanan kendaraan operasional	Indeks	3	2	4	200,00%							

Program	Sasaran Program	Indikator Program	Satuan	Target Tahun 2021	Kinerja Indikator Tahun 2021			Capaian Program	Rata-rata Capaian Kegiatan	Rata-rata Capaian Subkegiatan	Anggaran Tahun 2021	Anggaran Perubahan Tahun 2021	Realisasi	Serapan (%)
					Target	Realisasi	Capaian							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	akuntabel													
Dinas Lingkungan Hidup														
Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional (A)	Meningkatnya Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Persentase terpenuhinya sarana dan prasarana penanganan sampah	%	100	100	100	100,00%	100,00%	90,00%	100,00%	98.885.408.777	1.828.783.227	1.644.085.922	89,90%
Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional (B)	Meningkatnya Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Persentase Terpenuhinya sarana dan prasarana pengurangan sampah	%	100	100	100	100,00%	100,00%	100,00%	95,54%	6.779.912.310	6.688.600.166	4.990.427.410	74,61%
Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan														
Program Penataan Bangunan Gedung	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pembangunan gedung	Persentase pembangunan gedung pemda yang memenuhi standar	%	100	100	100	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	307.185.078.623	307.185.078.623	277.733.129.759	90,41%







Program	Sasaran Program	Indikator Program	Satuan	Target Tahun 2021	Kinerja Indikator Tahun 2021			Capaian Program	Rata-rata Capaian Kegiatan	Rata-rata Capaian Subkegiatan	Anggaran Tahun 2021	Anggaran Perubahan Tahun 2021	Realisasi	Serapan (%)
					Target	Realisasi	Capaian							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	pemda yang memenuhi standar													
Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Meningkatkannya pemanfaatan ruang yang sesuai dengan rencana tata ruang	Rasio kesesuaian rencana tata ruang	%	61	61	71,99	118,02%	100,00%	100,00%	94,82%	132.168.833.715	120.972.705.179	115.221.334.745	95,25%
		Persentase pelanggaran tata ruang yang ditangani	%	90	90	99,22	110,24%							
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Meningkatkannya kepuasan pelayanan kantor dan kendaraan operasional	Indeks kepuasan pelayanan kantor	Indeks	4	4	4	100,00%	100,00%	100,00%	84,38%	208.537.203.301	208.537.203.301	205.144.112.360	98,37%
		Indeks kepuasan pelayanan kendaraan operasional	Indeks	4	4	4	100,00%							
Dinas Bina Marga														
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan Daerah	Indeks kepuasan pelayanan kantor	Indeks	3	3	4	133,33%	100,00%	100,00%	100,00%	414.509.849.834	414.509.849.834	398.808.754.609	96,21%
		Indeks kepuasan	Indeks	2	2	4	200,00%							

Program	Sasaran Program	Indikator Program	Satuan	Target Tahun 2021	Kinerja Indikator Tahun 2021			Capaian Program	Rata-rata Capaian Kegiatan	Rata-rata Capaian Subkegiatan	Anggaran Tahun 2021	Anggaran Perubahan Tahun 2021	Realisasi	Serapan (%)
					Target	Realisasi	Capaian							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	yang transparan dan akuntabel	pelayanan kendaraan operasional												
Program Penyelenggaraan Jalan	Tercapainya Penambahan Road Ratio	Penambahan road ratio	%	0,0006	0,0006	0,0032	533,33%	100,00%	100,00%	95,24%	657.021.791.592	784.214.336.905	735.949.743.977	93,85%
		Penambahan luas jalur pejalan kaki	m2	46075	46075	53541,4	116,20%							
		Persentase kondisi jalan mantap	%	95	95	96,77	101,86%							
		Panjang Jalan yang Memiliki Prasarana Jaringan Utilitas (m)	m	4200	4200	4200	100,00%							
		Persentase cakupan pencahayaan kota	%	85,95	85,95	86,78	100,97%							
		Persentase pencahayaan kota hemat energi berbasis smart system	%	100	100	100	100,00%							
Program Pengemban	Terwujudnya tata kelola	Indeks kepuasan pelayanan	Indeks	4	4	4	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	390.917.876	390.917.876	330.498.000	84,54%

Program	Sasaran Program	Indikator Program	Satuan	Target Tahun 2021	Kinerja Indikator Tahun 2021			Capaian Program	Rata-rata Capaian Kegiatan	Rata-rata Capaian Subkegiatan	Anggaran Tahun 2021	Anggaran Perubahan Tahun 2021	Realisasi	Serapan (%)
					Target	Realisasi	Capaian							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
gan Jasa Konstruksi	pemerintahan dan keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel	laboratorium di bidang kebinamargaan												

Sumber: e-SAKIP dan e-Monev 2021, diolah

Keterangan warna capaian kinerja dan serapan anggaran:

	: Mencapai Target ($\geq 100,00\%$)		: Sedang ($66,00\% \leq x < 75,00\%$)
	: Sangat Tinggi (Capaian Kinerja: $91,00\% \leq x < 100,00\%$; Serapan Anggaran: $91,00\% \leq x < 100,00\%$)		: Rendah ($51,00\% \leq x < 65,00\%$)
	: Tinggi ($76,00\% \leq x < 90,00\%$)		: Sangat Rendah ($\leq 50,00\%$)

Berdasarkan data yang disajikan pada Tabel 2.31, apabila melihat perbandingan antara capaian program, kegiatan dan subkegiatan sebagian besar cukup berimbang, kecuali pada program penunjang urusan pemerintahan daerah dengan penanggung jawab Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan

Pertanahan yang rata-rata capaian subkegiatannya masuk kategori tinggi sementara capaian kegiatan dan programnya masuk kategori mencapai target sehingga dapat diasumsikan bahwa hubungan kausalitas antara subkegiatan dan sasaran di atasnya kurang baik.

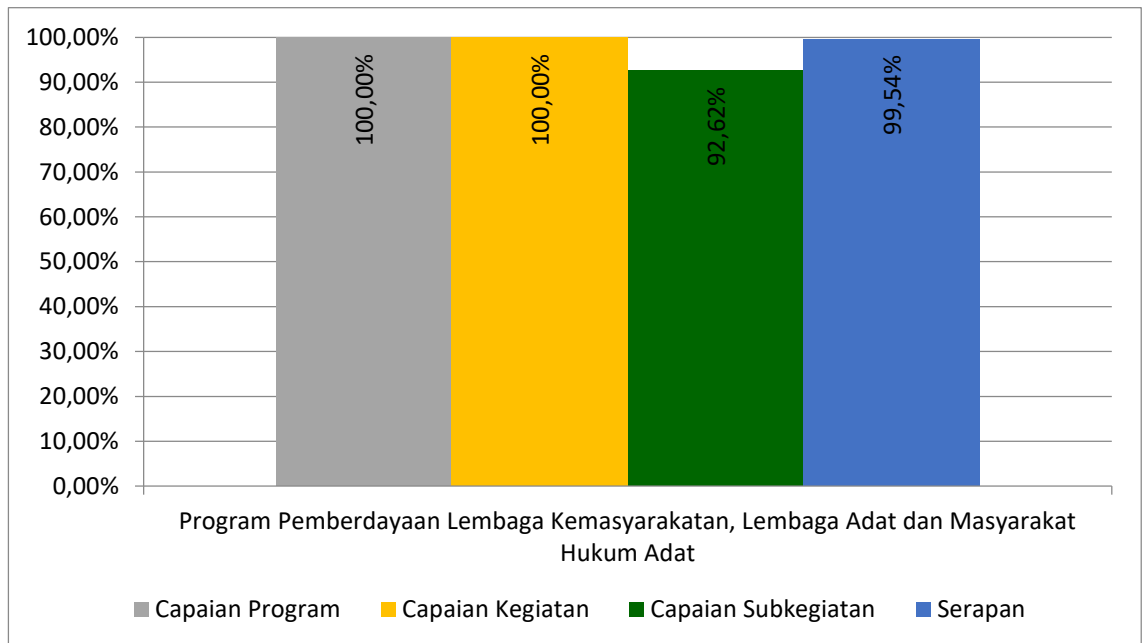
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pada Tahun 2021, Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa memiliki 1 program dengan total anggaran program sebesar Rp4.780.327.330 dan serapan anggaran program sampai dengan Bulan Desember Tahun 2021 sebesar Rp4.758.527.330 (99,54% dari total pagu). Perangkat Daerah yang melaksanakan

Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk. Informasi mengenai capaian program/kegiatan/subkegiatan dan serapan anggaran dijabarkan pada Gambar 2.89 berikut.

GAMBAR 2.89

Capaian Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Serapan Anggaran Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Triwulan IV Tahun 2021



Sumber: e-SAKIP dan e-Monev 2021, diolah

Berdasarkan Gambar 2.89 di atas, program Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, yaitu Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat memiliki target dan realisasi dengan capaian termasuk dalam kategori mencapai target pada Triwulan IV Tahun 2021. Sedangkan

dari serapan anggaran, program tersebut memiliki serapan dengan kategori sangat tinggi yakni sebesar 99,54%. Capaian kinerja indikator program/kegiatan/subkegiatan dan serapan anggaran Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dapat dilihat pada Tabel 2.32 sebagai berikut.







TABEL 2.32

Capaian Kinerja dan Serapan Anggaran Program Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Triwulan IV Tahun 2021 pada Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk

Program	Sasaran Program	Indikator Program	Satuan	Target Tahun 2021	Kinerja Indikator Tahun 2021			Capaian Program	Rata-rata Capaian Kegiatan	Rata-rata Capaian Subkegiatan	Anggaran Tahun 2021	Anggaran Perubahan Tahun 2021	Realisasi	Serapan (%)
					Target	Realisasi	Capaian							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Program Pemberdayaan Lembaga Masyarakat Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Meningkatnya peran lembaga kemasyarakatan dalam program pemberdayaan lembaga kemasyarakatan	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif dalam pemberdayaan masyarakat	%	70	70	98	140,00%	100,00%	100,00%	92,62%	4.804.765.840	4.780.327.330	4.758.527.330	99,54%

Sumber: e-SAKIP dan e-Monev 2021, diolah

Keterangan warna capaian kinerja dan serapan anggaran:

	: Mencapai Target ($\geq 100,00\%$)		: Sedang ($66,00\% \leq x < 75,00\%$)
	: Sangat Tinggi (Capaian Kinerja: $91,00\% \leq x < 100,00\%$; Serapan Anggaran: $91,00\% \leq x < 100,00\%$)		: Rendah ($51,00\% \leq x < 65,00\%$)
	: Tinggi ($76,00\% \leq x < 90,00\%$)		: Sangat Rendah ($\leq 50,00\%$)

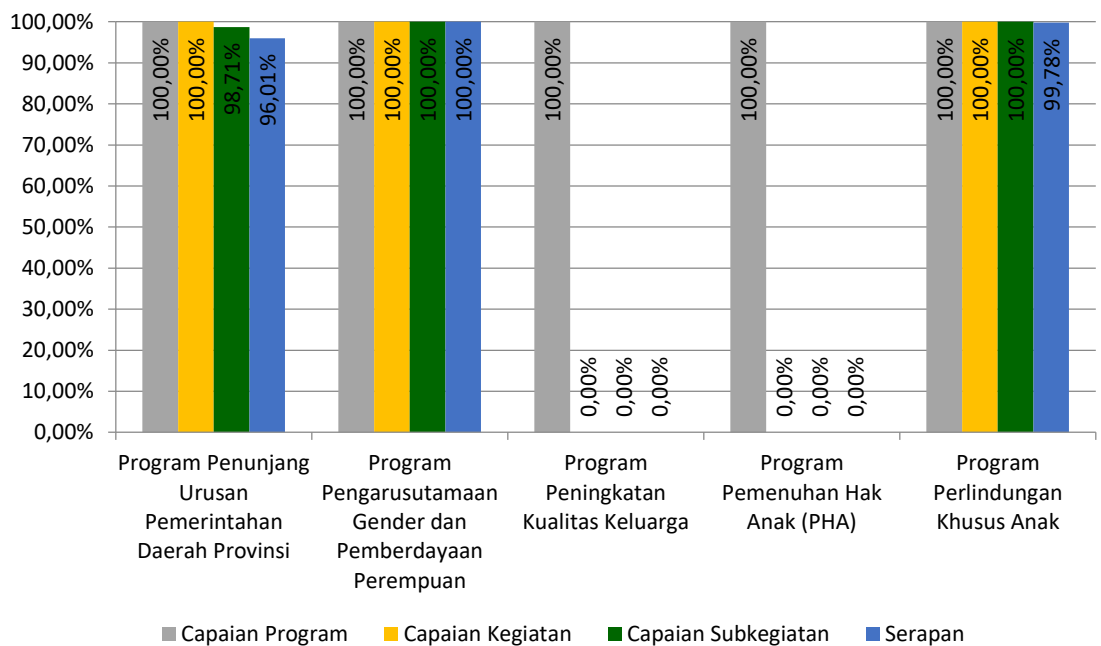
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pada Tahun 2021, Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memiliki 6 program dengan total anggaran program sebesar Rp216.667.992.582 dan serapan anggaran program sampai dengan Bulan Desember Tahun 2021 sebesar Rp206.543.468.271 (95,33% dari total pagu). Perangkat Daerah

yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk. Informasi mengenai capaian program/kegiatan/- subkegiatan dan serapan anggaran dijabarkan pada Gambar 2.90 sebagai berikut.

GAMBAR 2.90

Capaian Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Serapan Anggaran Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak



Sumber: e-SAKIP dan e-Monev 2021, diolah

Berdasarkan Gambar 2.90, seluruh program pada Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mencapai target pada Triwulan IV Tahun 2021. Untuk serapan anggaran juga cukup berimbang dengan serapan anggaran di atas 80%. Akan tetapi, terdapat 2 (dua) program lainnya yaitu Program Peningkatan Kualitas Keluarga dan Program Pemenuhan Hak Anak (PHA) tidak memiliki anggaran maupun realisasinya, sehingga serapan anggarannya 0,00%. Hal ini disebabkan

karena adanya penghapusan kegiatan pada Perubahan APBD Tahun 2021. Dari Gambar 2.88, juga terlihat bahwa perbandingan capaian program, rata-rata capaian kegiatan dan rata-rata capaian subkegiatan cukup berimbang pada 3 (tiga) program pada Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Data detail terkait kinerja dan serapan anggaran Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dapat dilihat pada Tabel 2.33 sebagai berikut.

TABEL 2.33







Capaian Kinerja dan Serapan Anggaran Program Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Triwulan IV Tahun 2021 pada Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk

Program	Sasaran Program	Indikator Program	Satuan	Target Tahun 2021	Kinerja Indikator Tahun 2021			Capaian Program	Rata-rata Capaian Kegiatan	Rata-rata Capaian Subkegiatan	Anggaran Tahun 2021	Anggaran Perubahan Tahun 2021	Realisasi	Serapan (%)
					Target	Realisasi	Capaian							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Terwujudnya pengelolaan kantor yang efisien dan efektif	Indeks kepuasan pelayanan kantor	Indeks	4	4	4	100,00%	100,00%	100,00%	99,11%	258.819.792.729	205.344.254.482	197.146.031.801	96,01%
		Indeks kepuasan pelayanan kendaraan operasional	Indeks	4	4	4	100,00%							
Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Meningkatnya pembangunan yang responsif gender secara berkelanjutan	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang melaksanakan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG)	%	48	48	61,9	128,96%	100,00%	100,00%	100,00%	1.610.806.500	1.587.606.500	1.587.606.500	100,00%
Program Perlindungan Perempuan	Terlayannya korban kekerasan terhadap perempuan secara komprehensif, melalui layanan pengaduan, layanan konseling dan layanan hukum	Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif	%	100	100	100	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	9.927.007.440	9.732.423.600	7.806.129.970	80,21%

Program	Sasaran Program	Indikator Program	Satuan	Target Tahun 2021	Kinerja Indikator Tahun 2021			Capaian Program	Rata-rata Capaian Kegiatan	Rata-rata Capaian Subkegiatan	Anggaran Tahun 2021	Anggaran Perubahan Tahun 2021	Realisasi	Serapan (%)
					Target	Realisasi	Capaian							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Meningkatnya pembangunan kualitas keluarga	Persentase pembinaan terhadap keluarga yang memiliki anak tidak sekolah	%	100	100	100	100,00%	100,00%	(Kegiatan Dihapus pada P-APBD Tahun 2021)	(Kegiatan Dihapus pada P-APBD Tahun 2021)	5.200.000	-	-	-
Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Terwujudnya pembangunan yang menjamin pemenuhan hak anak secara terencana, menyeluruh dan berkelanjutan	Persentase Kota/Kabupaten Layak Anak mendapatkan predikat Madya	%	83,33	83,33	100	120,00%	100,00%	- (Kegiatan Dihapus pada P-APBD Tahun 2021)	- (Subkegiatan Dihapus pada P-APBD Tahun 2021)	33.400.000	-	-	-
Program Perlindungan Khusus Anak	Terlayannya korban kekerasan terhadap anak secara komprehensif, melalui layanan pengaduan, layanan konseling dan layanan hukum	Persentase korban kekerasan terhadap anak yang mendapat layanan komprehensif	%	100	100	100	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	2.157.784.270		3.700.000	99,78%

Sumber: e-SAKIP dan e-Monev 2021, diolah

Keterangan warna capaian kinerja dan serapan anggaran:

	: Mencapai Target ($\geq 100,00\%$)		: Sedang ($66,00\% \leq x < 75,00\%$)
	: Sangat Tinggi (Capaian Kinerja: $91,00\% \leq x < 100,00\%$; Serapan Anggaran: $91,00\% \leq x < 100,00\%$)		: Rendah ($51,00\% \leq x < 65,00\%$)
	: Tinggi ($76,00\% \leq x < 90,00\%$)		: Sangat Rendah ($\leq 50,00\%$)

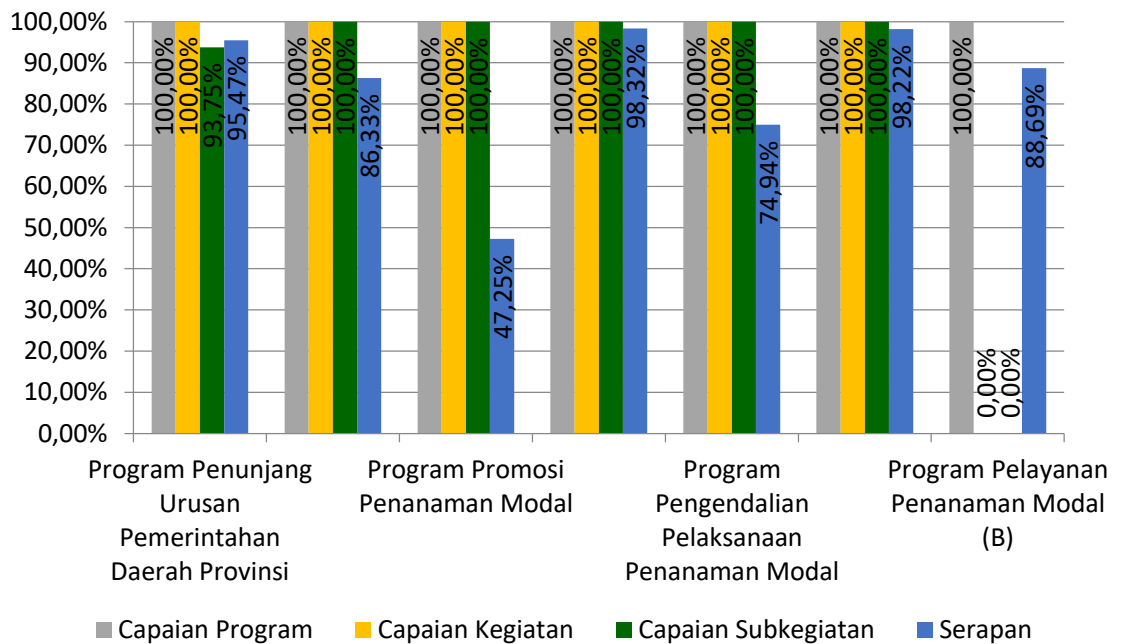
Penanaman Modal

Pada Tahun 2021, Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal memiliki 7 program dengan total anggaran program sebesar Rp675.293.050.503 dan serapan anggaran program sampai dengan Bulan Desember Tahun 2021 sebesar Rp647.240.217.071 (95,85% dari total pagu). Perangkat Daerah

yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Informasi mengenai capaian program/kegiatan/subkegiatan dan serapan anggaran dijabarkan pada Gambar 2.91 sebagai berikut.

GAMBAR 2.91

Capaian Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Serapan Anggaran Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal Triwulan IV Tahun 2021



Sumber: e-SAKIP dan e-Monev 2021, diolah

Berdasarkan Gambar 2.91 terlihat bahwa seluruh program pada Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal mencapai target pada triwulan IV tahun 2021. Berdasarkan serapan anggaran, dari 7 (tujuh) program terdapat 2 (dua) program yang serapan anggarannya di bawah 80% yaitu Program Promosi Penanaman Modal dan Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal.

Berdasarkan data yang disajikan pada Tabel 2.34, rata-rata capaian kegiatan dan subkegiatan di bawah program-program bidang ini, terdapat 6 program yang rata-rata capaian kegiatan mencapai 100,00%, atau

dapat dikategorikan dalam kategori mencapai target. Sedangkan terdapat satu program yang tidak memiliki capaian kegiatan yaitu Program Pelayanan Penanaman Modal (B). Pada rata-rata capaian sub kegiatan, seluruh program memiliki capaian sebesar 100,00% terkecuali Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dengan capaian 93,75% dan masuk dalam kategori sangat tinggi. Terdapat satu program yang tidak memiliki capaian sub kegiatan yaitu Program Pelayanan Penanaman Modal (B). Data kinerja program, kegiatan dan subkegiatan dapat dilihat pada Tabel 2.34 sebagai berikut.

TABEL 2.34

Capaian Kinerja dan Serapan Anggaran Program Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal Triwulan IV Tahun 2021 pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Program	Sasaran Program	Indikator Program	Satuan	Target Tahun 2021	Kinerja Indikator Tahun 2021			Capaian Program	Rata-rata Capaian Kegiatan	Rata-rata Capaian Subkegiatan	Anggaran Tahun 2021	Anggaran Perubahan Tahun 2021	Realisasi	Serapan (%)
					Target	Realisasi	Capaian							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel	Indeks kepuasan pelayanan kantor	Indeks	4	4	4	100,00%	100,00%	100,00%	93,75%	608.038.991.262	558.065.861.788	532.806.281.141	95,47%
		Indeks kepuasan pelayanan kendaraan operasional	Indeks	4	4	4	100,00%							
Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Meningkatnya pertumbuhan investasi	Persentase Pengembangan Iklim Penanaman Modal	%	100	100	100	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	2.149.450.932	650.350.000	561.470.000	86,33%
Program Promosi Penanaman Modal	Meningkatnya pertumbuhan investasi	Jumlah realisasi investasi penanaman modal di Provinsi DKI Jakarta	Triliun	94	94	98,6	104,89%	100,00%	100,00%	100,00%	3.293.919.895	976.121.940	461.250.000	47,25%
		Indeks kepuasan pelaksanaan promosi daerah	Indeks	77,5	77,5	87	112,26%							
Program Pelayanan Penanaman Modal	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan perizinan dan non perizinan melalui	Persentase Layanan Perizinan dan Non Perizinan secara online	%	100	100	100	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	126.172.074.600	114.284.906.917	112.365.743.930	98,32%
		Indeks Produktivitas	Indeks	82	82	107,97	131,67%							

Program	Sasaran Program	Indikator Program	Satuan	Target Tahun 2021	Kinerja Indikator Tahun 2021			Capaian Program	Rata-rata Capaian Kegiatan	Rata-rata Capaian Subkegiatan	Anggaran Tahun 2021	Anggaran Perubahan Tahun 2021	Realisasi	Serapan (%)
					Target	Realisasi	Capaian							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	penyenggaraa nlayan an perizinan dan non perizinan secara online	Pelayanan DPMP TSP												
Program Pengenda lian Pelaksana an Penanam an Modal	Meningkatnya pertumbuhan investasi	Indeks Tingkat Kepuasan Masyarakat Terpadu Satu Pintu	Indeks	90	90	90,09	100,10 %	100,00%	100,00 %	100,00%	1.074.607.041	883.470.180	662.080.000	74,94%
		Persentase permasalahan yang dihadapi perusahaan debottlenecking	%	100	100	100	100,00 %							
Program Pengelola an Data dan Sistem Informasi Penanam an Modal	Meningkatnya Pelayanan Perizinan dan non Perizinan secara online yang diselenggarakan secara online	Persentase Layanan Perizinan dan Non Perizinan secara online	%	100	100	100	100,00 %	100,00%	100,00 %	100,00%	9.327.595.747	9.234.573.400	9.070.555.500	98,22%
		Indeks Produktivitas Sistem Data dan Informasi	Indeks	82	82	86	104,88 %							
Program Pelayana n Penanam an Modal (B)	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan perizinan dan non perizinan melalui penyenggaraa nlayan an	Indeks Produktivitas Pelayanan DPMP TSP	Indeks	82	82	107,97	131,67%	100,00%	0 (realisasi tidak di validasi)	0 (realisasi tidak di validasi)	447.509.525	432.339.678	383.445.000	88,69%

Program	Sasaran Program	Indikator Program	Satuan	Target Tahun 2021	Kinerja Indikator Tahun 2021			Capaian Program	Rata-rata Capaian Kegiatan	Rata-rata Capaian Subkegiatan	Anggaran Tahun 2021	Anggaran Perubahan Tahun 2021	Realisasi	Serapan (%)
					Target	Realisasi	Capaian							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	perizinan dan non perizinan secara online													

Sumber: e-SAKIP dan e-Monev 2021, diolah

Keterangan warna capaian kinerja dan serapan anggaran:

	: Mencapai Target	($\geq 100,00\%$)		: Sedang	($66,00\% \leq x < 75,00\%$)
	: Sangat Tinggi	(Capaian Kinerja: $91,00\% \leq x < 100,00\%$; Serapan Anggaran: $91,00\% \leq x < 100,00\%$)		: Rendah	($51,00\% \leq x < 65,00\%$)
	: Tinggi	($76,00\% \leq x < 90,00\%$)		: Sangat Rendah	($\leq 50,00\%$)

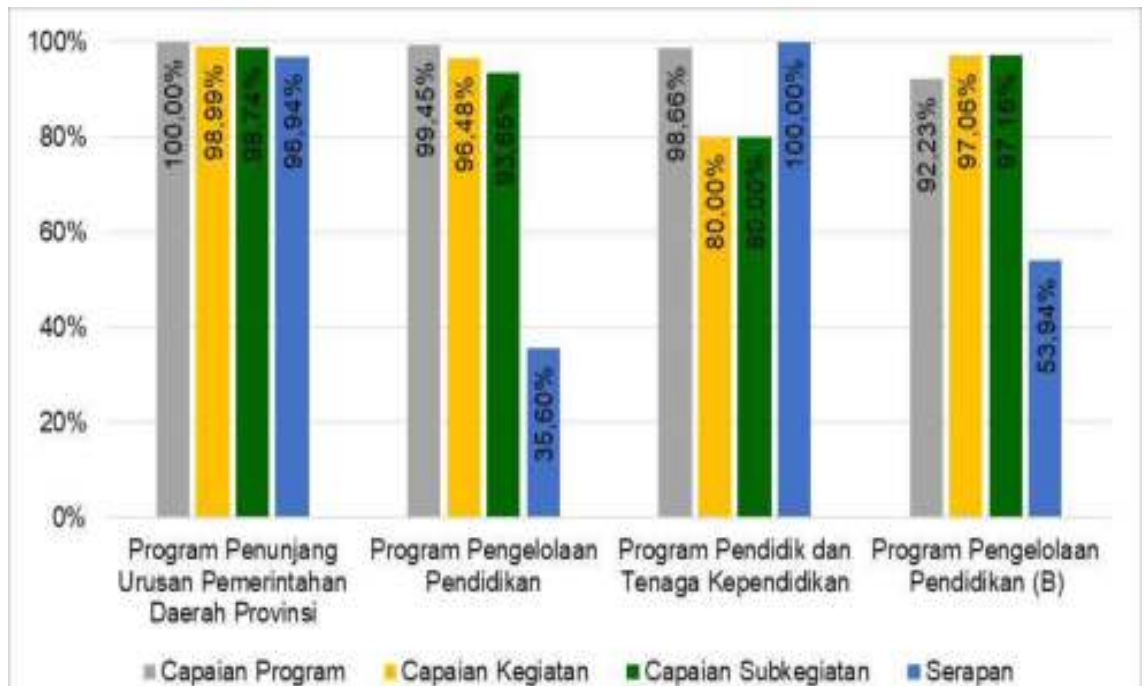
Pendidikan

Pada tahun 2021, urusan Pemerintahan pada Bidang Pendidikan memiliki 4 program dengan total anggaran program sebesar Rp 11.723.460.322.204 dengan serapan anggaran program hingga bulan Desember 2021 sebesar Rp 9.443.450.401.529 atau 80,55% dari total pagu. Perangkat daerah

yang melaksanakan urusan Pemerintahan bidang pendidikan yakni Dinas Pendidikan. Informasi terkait capaian program, kegiatan, sub kegiatan serta serapan anggaran pada bidang pendidikan terdapat pada Gambar 2.92 sebagai berikut.

GAMBAR 2.92

Capaian Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Serapan Anggaran Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Triwulan IV Tahun 2021



Sumber: e-SAKIP dan e-Monev 2021, diolah

Berdasarkan Gambar 2.92 di atas, terlihat rata-rata capaian pada Bidang Pendidikan didominasi oleh angka $\geq 91,00\%$ yang menandakan bahwa rata-rata capaian masuk dalam kategori sangat tinggi. Terdapat satu program dengan capaian 100,00% yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi. Pada serapan anggaran, terdapat satu program yang memiliki serapan anggaran sebesar 100,00% yakni pada Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan. Pada program pengelolaan pendidikan (B) terdapat 1 (satu) indikator yang capaiannya sangat rendah yaitu "Persentase Angka Partisipasi Kasar PAUD (3-6 tahun). Berdasarkan informasi dari Dinas Pendidikan, rendahnya capaian indikator dikarenakan data

target yang digunakan merupakan data Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Akan tetapi, secara real dilapangan banyak anak usia 6 tahun yang sudah memasuki jenjang SD sementara data Kementerian masih memasukkan seluruh data anak usia 6 tahun masih dalam jenjang PAUD.

Dari 4 (empat) program yang diampu oleh SKPD/UKPD Dinas Pendidikan, terdapat 1 (satu) program yang serapan anggarannya masuk kategori sangat rendah dan sedang yaitu Program Pengelolaan Pendidikan (A dan B). Setelah dilakukan pendalaman evaluasi, penyebab serapan anggaran sangat rendah karena realisasi subkegiatan yang terkait Biaya Operasional Sekolah (BOS) tidak/belum

tercatat pada sistem Monev APBD. Seperti yang diketahui bahwa dana BOS merupakan dana dari Kementerian sehingga pelaporan SPJ langsung dilaksanakan pada sistem Kementerian.

Selanjutnya, apabila melihat data perbandingan capaian program, rata-rata capaian kegiatan dan rata-rata capaian

subkegiatan, secara umum relatif lebih seimbang kecuali program pendidikan dan tenaga kependidikan yang rata-rata capaian kegiatan dan subkegiatan lebih rendah dibanding capaian program sehingga perlu dianalisa lebih lanjut hubungan kausalitasnya. Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat pada Tabel 2.35.

TABEL 2.35

Capaian Kinerja dan Serapan Anggaran Program Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Triwulan IV Tahun 2021 pada Dinas Pendidikan

Program	Sasaran Program	Indikator Program	Satuan	Target Tahun 2021	Kinerja Indikator Tahun 2021			Capaian Program	Rata-rata Capaian Kegiatan	Rata-rata Capaian Subkegiatan	Anggaran Tahun 2021	Anggaran Perubahan Tahun 2021	Realisasi	Serapan (%)
					Target	Realisasi	Capaian							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Meningkatnya layanan penunjang urusan pemerintah daerah	Indeks kepuasan pelayanan kantor	Indeks	4	4	4	100,00%	100,00%	98,98%	98,74%	7.754.213.556.204	7.754.213.556.204	7.516.754.753.654	96,94%
		Indeks kepuasan pelayanan kendaraan operasional	Indeks	4	4	4	100,00%							
Program Pengelolaan Pendidikan	Meningkatnya akses pelayanan pendidikan	Persentase Kelulusan Jenjang SMA/MA	%	100	100	99,99	99,99%	99,45%	96,48%	93,65%	1.171.794.931.570	1.171.794.931.570	417.201.000.968	35,60%
		Persentase Kelulusan Jenjang SMK	%	100	100	99,99	99,99%							
		Rata-rata Nilai Ujian Nasional / Ujian Sekolah Berbasis Daerah Jenjang SMK	Poin	69	69	79,15	114,71%							
		Rata-rata Nilai Ujian Nasional / Ujian Sekolah Berbasis Daerah Jenjang SMA/MA	Poin	69	69	82,82	120,03%							
		Persentase sekolah yang memiliki	%	94,05	94,05	91,09	96,85%							

Program	Sasaran Program	Indikator Program	Satuan	Target Tahun 2021	Kinerja Indikator Tahun 2021			Capaian Program	Rata-rata Capaian Kegiatan	Rata-rata Capaian Subkegiatan	Anggaran Tahun 2021	Anggaran Perubahan Tahun 2021	Realisasi	Serapan (%)
					Target	Realisasi	Capaian							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
		sarana dan prasarana sesuai Standar Nasional Pendidikan (SNP)												
		Persentase penerima Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus yang bersekolah	%	100	100	100	100,00%							
		Persentase Sekolah terakreditasi A	%	72,54	72,54	72,18	99,50%							
		Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK/MA	%	82,95	82,95	80,97	97,61%							
		Persentase Angka Putus Sekolah Jenjang SMA/MA/SMK	%	0,08	0,08	0,01	800,00%							
		Persentase sekolah yang sudah menerima peserta didik berkebutuhan khusus	%	100	100	100	100,00%							
		Rata-rata lama sekolah	Tahun	11,19	11,19	11,2	100,09%							

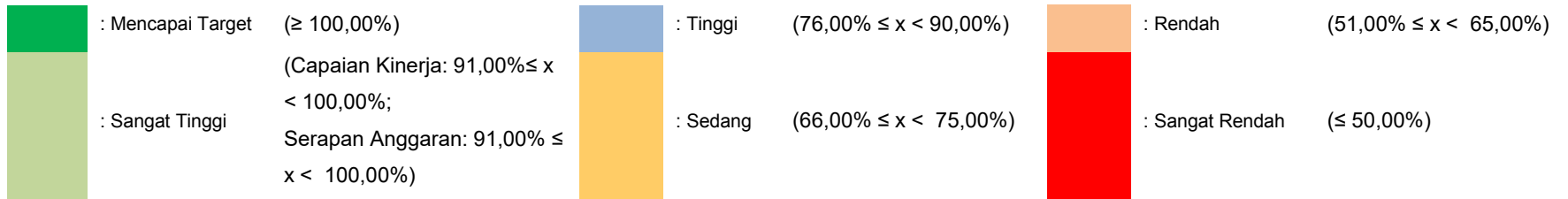
Program	Sasaran Program	Indikator Program	Satuan	Target Tahun 2021	Kinerja Indikator Tahun 2021			Capaian Program	Rata-rata Capaian Kegiatan	Rata-rata Capaian Subkegiatan	Anggaran Tahun 2021	Anggaran Perubahan Tahun 2021	Realisasi	Serapan (%)
					Target	Realisasi	Capaian							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
		penduduk jakarta												
Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Meningkatnya kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan	Persentase pendidik dan tenaga kependidikan yang mengikuti kegiatan peningkatan kompetensi	%	100	100	97,32	97,32%	98,66%	80,00%	80,00%	1.076.500.000	1.076.500.001	1.076.500.002	100,00%
		Persentase pendidik dan tenaga kependidikan yang mendapatkan peningkatan kesejahteraan melalui hibah PGRI	%	54187	54187	54187	100,00%							
Program Pengelolaan Pendidikan (B)	Meningkatnya akses pelayanan pendidikan	Persentase Angka Partisipasi Murni SD/MI	%	97,71	97,71	96,24	98,50%	80,10%	97,05%	97,16%	2.796.375.334.430	2.796.375.334.430	1.508.418.146.905	53,94%
		Persentase Angka Partisipasi Murni SMP/MTs	%	87,25	87,25	84,58	96,94%							
		Persentase Angka Putus Sekolah Jenjang SD/MI	%	0,01	0,01	0,006	140,00%							
		Persentase Angka Putus Sekolah	%	0,03	0,03	0,002	193,33%							

Program	Sasaran Program	Indikator Program	Satuan	Target Tahun 2021	Kinerja Indikator Tahun 2021			Capaian Program	Rata-rata Capaian Kegiatan	Rata-rata Capaian Subkegiatan	Anggaran Tahun 2021	Anggaran Perubahan Tahun 2021	Realisasi	Serapan (%)
					Target	Realisasi	Capaian							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
		Jenjang SMP/MTs												
		Persentase Kelulusan Jenjang SD/MI	%	100	100	100	100,00%							
		Persentase Kelulusan Jenjang SMP/MTs	%	100	100	99,99	99,99%							
		Rata-rata Nilai Ujian Nasional / Ujian Sekolah / Madrasah Berbasis Daerah Jenjang SMP/MTs	Poin	69,19	69,19	80,61	116,51%							
		Rata-rata Nilai Ujian Nasional / Ujian Sekolah / Madrasah Berbasis Daerah Jenjang SD/MI	Poin	78	78	82,51	105,78%							
		Persentase Angka Partisipasi Kasar PAUD (3-6 Tahun)	%	81,22	81,22	19,3	23,76%							
		Jumlah lembaga kursus dan	Lemba ga	871	871	830	95,29%							

Program	Sasaran Program	Indikator Program	Satuan	Target Tahun 2021	Kinerja Indikator Tahun 2021			Capaian Program	Rata-rata Capaian Kegiatan	Rata-rata Capaian Subkegiatan	Anggaran Tahun 2021	Anggaran Perubahan Tahun 2021	Realisasi	Serapan (%)
					Target	Realisasi	Capaian							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
		pelatihan terakreditasi												
		Persentase penerima Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus yang bersekolah	%	100	100	100	100,00%							

Sumber: e-SAKIP dan e-Monev 2021, diolah

Keterangan warna capaian kinerja dan serapan anggaran:



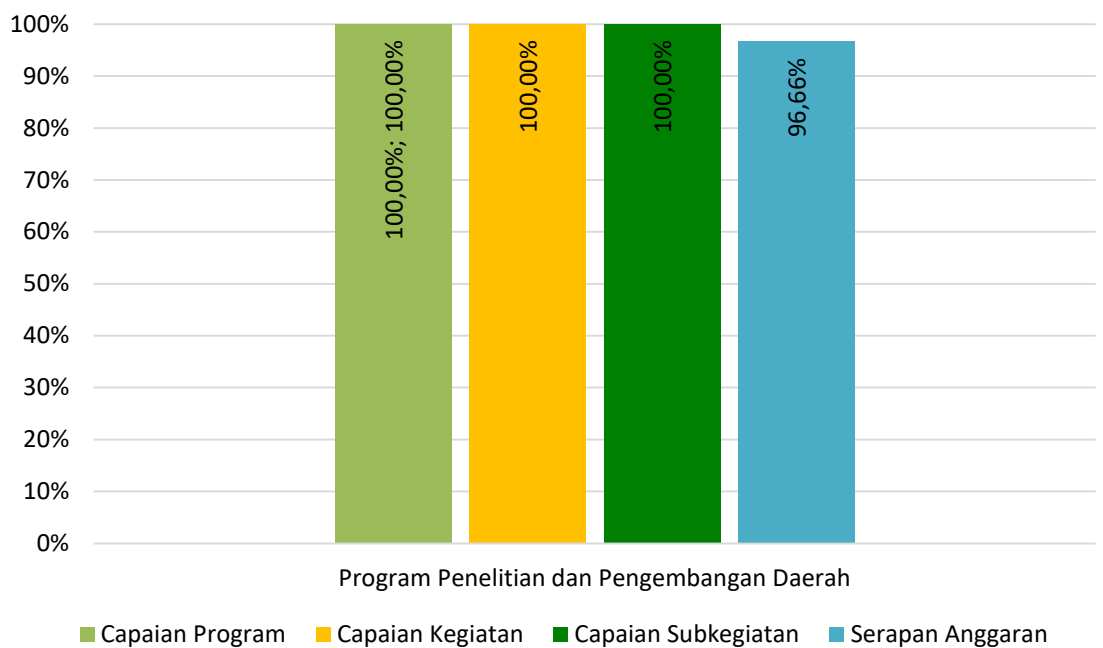
Penelitian dan Pengembangan

Pada Tahun 2021, Unsur Penelitian dan Pengembangan memiliki 1 program dengan total anggaran program sebesar Rp 5.105.609.317 dan serapan anggaran program sampai dengan Bulan Desember Tahun 2021 sebesar Rp 4.934.853.709

(96,66%% dari total pagu). Perangkat daerah yang melaksanakan Unsur Penelitian dan Pengembangan adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Informasi mengenai capaian program/kegiatan/subkegiatan dan serapan anggaran dijabarkan pada Gambar 2.93 berikut.

GAMBAR 2.93

Capaian Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Serapan Anggaran Unsur Penelitian dan Pengembangan Triwulan IV Tahun 2021



Sumber: e-SAKIP dan e-Monev 2021, diolah

Berdasarkan gambar, Program Unsur Penelitian Dan Pengembangan yaitu Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah telah memiliki target dan realisasi dengan nilai capaian 100,00% pada Triwulan IV Tahun 2021. Berdasarkan serapan anggaran,

program tersebut memiliki serapan dengan kategori sangat tinggi, yaitu sebesar 96,66%. Capaian kinerja indikator program/kegiatan/-subkegiatan dan serapan anggaran unsur penelitian dan pengembangan dapat dilihat pada Tabel 2.36 berikut.







TABEL 2.36

Capaian Kinerja dan Serapan Anggaran Program Unsur Penelitian dan Pengembangan Triwulan IV Tahun 2021 pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Program	Sasaran Program	Indikator Program	Satuan	Target Tahun 2021	Kinerja Indikator Tahun 2021			Capaian Program	Rata-rata Capaian Kegiatan	Rata-rata Capaian Subkegiatan	Anggaran Tahun 2021	Anggaran Perubahan Tahun 2021	Realisasi	Serapan (%)
					Target	Realisasi	Capaian							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Meningkatnya pemanfaatan inovasi daerah pada perangkat daerah	Persentase kontribusi perangkat daerah dalam peningkatan inovasi daerah	%	65	65,00	78,00	120,00%	100,00%	100,00%	100,00%	6.470.438.500	5.105.609.317	4.934.853.709	96,66%

Sumber: e-SAKIP dan e-Monev 2021, diolah

Keterangan warna capaian kinerja dan serapan anggaran:

	: Mencapai Target ($\geq 100,00\%$)		: Sedang ($66,00\% \leq x < 75,00\%$)
	: Sangat Tinggi (Capaian Kinerja: $91,00\% \leq x < 100,00\%$; Serapan Anggaran: $91,00\% \leq x < 100,00\%$)		: Rendah ($51,00\% \leq x < 65,00\%$)
	: Tinggi ($76,00\% \leq x < 90,00\%$)		: Sangat Rendah ($\leq 50,00\%$)

Berdasarkan Tabel 2.36, indikator Program Unsur Penelitian dan Pengembangan, yaitu Persentase Kontribusi Perangkat Daerah dalam Peningkatan Inovasi Daerah telah memiliki target dan realisasi dengan capaian 100,00% atau mencapai target pada Triwulan IV Tahun 2021. Sementara itu untuk rata-rata

capaian kegiatan dan sub kegiatan di bawah Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah termasuk dalam kategori mencapai target dengan nilai mencapai 100,00%. Hal ini mengindikasikan bahwa rumusan kegiatan dan subkegiatan sudah tepat dan mampu berkontribusi terhadap indikator program.

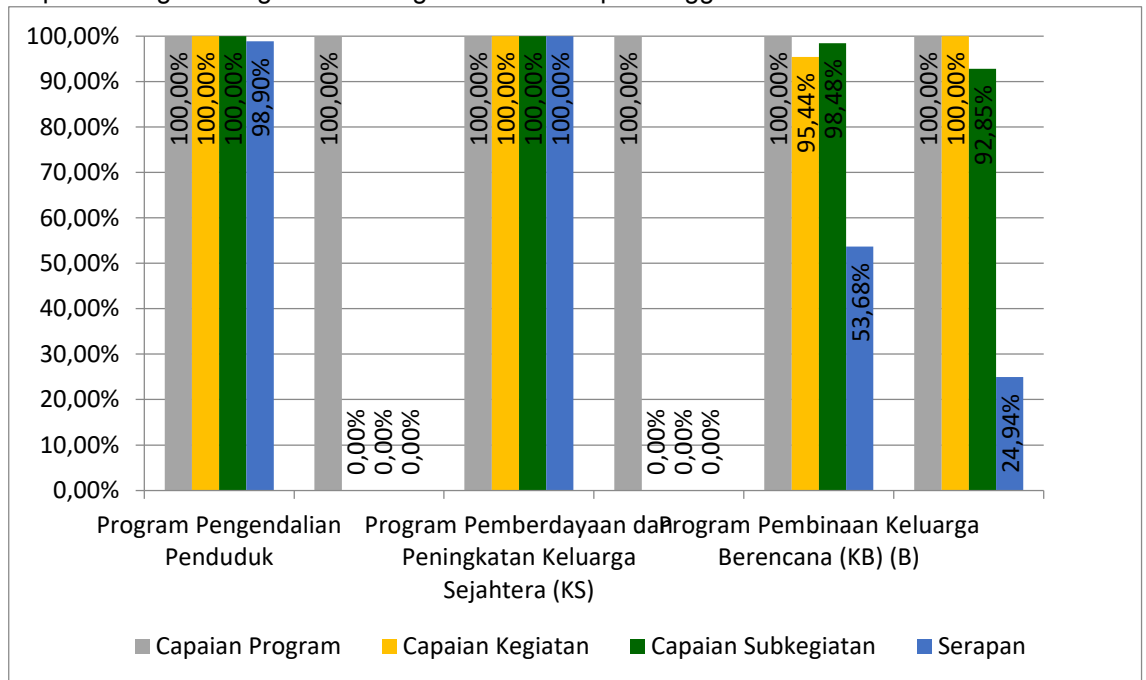
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Pada tahun 2021, urusan Pemerintahan pada bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana memiliki 6 program dengan total anggaran program sebesar Rp 24.312.686.811 dengan serapan anggaran program hingga bulan Desember 2021 sebesar Rp 12.526.522.856 atau sebesar 51,52% dari total pagu. Perangkat daerah

yang melaksanakan urusan Pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana adalah Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk. Informasi terkait capaian program, kegiatan, sub kegiatan serta serapan anggaran pada Bidang Tenaga Kerja terdapat pada Gambar 2.94 sebagai berikut.

GAMBAR 2.94

Capaian Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Serapan Anggaran Urusan Pemerintahan



Sumber: e-SAKIP dan e-Monev 2021, diolah

Sebanyak 7 dari 8 indikator program pada bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana memiliki capaian program sebesar 100,00% dan dikategorikan dalam kategori mencapai target. Serapan anggaran pada bidang ini tersebar pada kategori sangat tinggi, sedang maupun sangat rendah. Terdapat 2 (dua) program yang

pelaksanaannya tanpa anggaran yaitu Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) dan Program Pengendalian Penduduk (B). Sementara itu, untuk program yang sangat rendah yaitu Program Pembinaan Keluarga Berencana (B) dan Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) (B) dengan serapan anggaran

di bawah 60% sehingga ada kemungkinan bahwa pelaksanaan program tidak terpengaruh anggaran. Selanjutnya untuk perbandingan capaian program, rata-rata capaian kegiatan dan rata-rata capaian

subkegiatan cukup berimbang. Tidak terdapat gap yang cukup besar antar level kinerja. Data detail kinerja program dan anggaran dapat dilihat pada Tabel 2.37 sebagai berikut.

TABEL 2.37







Capaian Kinerja dan Serapan Anggaran Program Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Triwulan IV Tahun 2021 pada Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk

Program	Sasaran Program	Indikator Program	Satuan	Target Tahun 2021	Kinerja Indikator Tahun 2021			Capaian Program	Rata-rata Capaian Kegiatan	Rata-rata Capaian Subkegiatan	Anggaran Tahun 2021	Anggaran Perubahan Tahun 2021	Realisasi	Serapan (%)
					Target	Realisasi	Capaian							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Program Pengendalian Penduduk	Meningkatnya capaian program pengendalian penduduk dan pendataan keluarga	Persentase keluarga yang terdata	%	84	84	87,6	104,29%	100,00%	100,00%	100,00%	2.372.649.048,00	2.372.649.048,00	2.346.451.906,00	98,90%
Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Meningkatnya pelayanan serta pembinaan keluarga berencana	Persentase masyarakat yang mengetahui isu kependudukan	%	54,5	54,5	59,4	108,99%	100,00%	-	(dihapus)	-	(dihapus)	-	(dihapus)
		Age Specific Fertility Rate (kelompok umur 15-19 tahun)	per 1000	21	21	23,2	110,48%							
Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Meningkatnya ketahanan dan kesejahteraan keluarga	Persentase cakupan sasaran pasangan usia subur menjadi peserta KB (CPR)	%	58,66	58,66	60,28	102,76%	100,00%	100,00%	92,85%	50.400.000,00	50.400.000,00	50.400.000,00	100,00%
Program Pengendalian Penduduk (B)	Meningkatnya capaian program pengendalian penduduk	Persentase pelaporan hasil pelayanan kontrasepsi di	%	100	100	100	100,00%	100,00%	-	(dihapus)	(dihapus)	(dihapus)	(dihapus)	(dihapus)

Program	Sasaran Program	Indikator Program	Satuan	Target Tahun 2021	Kinerja Indikator Tahun 2021			Capaian Program	Rata-rata Capaian Kegiatan	Rata-rata Capaian Subkegiatan	Anggaran Tahun 2021	Anggaran Perubahan Tahun 2021	Realisasi	Serapan (%)
					Target	Realisasi	Capaian							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	dan pendataan keluarga	lapangan/fasilitas kesehatan												
Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) (B)	Meningkatnya pelayanan serta pembinaan keluarga berencana	Persentase Pasangan Usia Subur (PUS) yang mendapatkan pelayanan KB	%	100	100	100	100,00%	100,00%	95,44%	98,48%	16.250.237.763	16.250.237.763	8.723.453.950,00	53,68%
		Unmetneed (PUS yang ingin ber-KB tetapi belum terlayani)	%	14,2	14,2	9,93	69,93%							
Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) (B)	Meningkatnya ketahanan dan kesejahteraan keluarga	Persentase cakupan sasaran pasangan usia subur menjadi peserta KB (CPR)	%	58,66	58,66	60,28	102,76%	100,00%	100,00%	92,85%	5.639.400.000,00	5.639.400.000,00	1.406.217.000	24,94%

Sumber: e-SAKIP dan e-Monev 2021, diolah

Keterangan warna capaian kinerja dan serapan anggaran:

	: Mencapai Target ($\geq 100,00\%$)		: Sedang ($66,00\% \leq x < 75,00\%$)
	: Sangat Tinggi (Capaian Kinerja: $91,00\% \leq x < 100,00\%$; Serapan Anggaran: $91,00\% \leq x < 100,00\%$)		: Rendah ($51,00\% \leq x < 65,00\%$)
	: Tinggi ($76,00\% \leq x < 90,00\%$)		: Sangat Rendah ($\leq 50,00\%$)

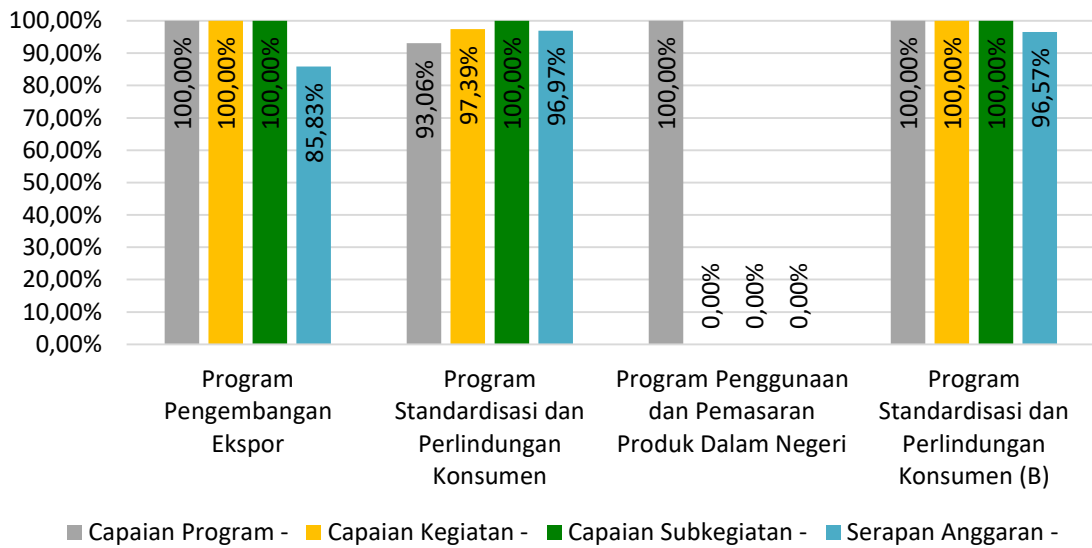
Perdagangan

Pada Tahun 2021, Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan memiliki 5 program dengan total anggaran program sebesar Rp11.164.582.672 dan serapan anggaran program sampai dengan Bulan Desember Tahun 2021 sebesar Rp10.306.757.599 (99,32% dari total pagu). Perangkat daerah

yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah. Informasi mengenai capaian program/kegiatan/- subkegiatan dan serapan anggaran dijabarkan pada Gambar 2.95 sebagai berikut.

GAMBAR 2.95

Capaian Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Serapan Anggaran Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan Triwulan IV Tahun 2021



Sumber: e-SAKIP dan e-Monev 2021, diolah

Berdasarkan Gambar 2.95 di atas, 4 (empat) program telah memiliki target dan realisasi dengan kategori mencapai target pada 3 program dan 1 program berada pada kategori sangat tinggi. Berdasarkan serapan anggaran, terdapat 3 (tiga) program yang memiliki nilai serapan anggaran dengan kategori sangat tinggi dan tinggi yaitu Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen dengan serapan mencapai 96,97%, Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen (B) dengan sarapan mencapai 96,57%, dan Program Pengembangan Ekspor dengan serapan mencapai 85,83%. Sedangkan 1 (satu) program lainnya yaitu Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri tidak memiliki anggaran pada Perubahan APBD Tahun 2021.

Untuk rata-rata capaian kegiatan dan sub kegiatan 2 program Program Pengembangan Ekspor dan Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen (B) memiliki rata-rata capaian dan subkegiatan mencapai 100,00%. Sementara itu pada Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen, rata-rata capaian kegiatan mencapai 97,39% dan untuk subkegiatan mencapai 100,00%. Sedangkan 2 program lainnya yaitu Program Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting dan Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri tidak memiliki capaian pada masing-masing kegiatan dan subkegiatannya. Capaian kinerja indikator program/kegiatan/subkegiatan dan serapan anggaran Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan dapat dilihat pada 38 sebagai berikut.

TABEL 2.38







Capaian Kinerja dan Serapan Anggaran Program Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan Triwulan IV Tahun 2021 pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Program	Sasaran Program	Indikator Program	Satuan	Target Tahun 2021	Kinerja Indikator Tahun 2021			Capaian Program	Rata-rata Capaian Kegiatan	Rata-rata Capaian Subkegiatan	Anggaran Tahun 2021	Anggaran Perubahan Tahun 2021	Realisasi	Serapan (%)
					Target	Realisasi	Capaian							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Program Pengembangan Ekspor	Meningkatnya ekspor yang dilakukan UKM DKI Jakarta	Jumlah ekspor yang dilakukan UKM DKI Jakarta	USD	4.208.117.493	4.208.120.000	38.966.300.000	925,98%	100,00%	100,00%	100,00%	3.823.919.488	4.645.575.028	3.987.269.493	85,83%
Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	Terwujudnya perlindungan konsumen di DKI Jakarta	Persentase keluhan/temuan konsumen yang ditindaklanjuti	%	100	100	100	100,00%	93,06%	97,39%	100,00%	6.493.380.125	6.065.896.457	5.881.906.456	96,97%
		Persentase cakupan alat UTTP (Ukuran, Takaran, Timbangan, dan Perlengkapannya) yang ditera dan ditera ulang	%	99	99	78,38	79,17%							
		Jumlah pasar yang menjual produk ber SNI, produk makanan minuman dan menggunakan alat kemetrolagian yang diawasi	Pasar	22	22	22	100,00%							
Program Penggunaan dan Pemasaran Produk	Terwujudnya fasilitasi pemasaran	Jumlah pelaku usaha perdagangan yang terfasilitasi	Orang	75	75	626	834,67%	100,00%	- (kegiatan dihapus anggarannya)	- (subkegiatan dihapus anggarannya)	2.790.705.070	- (anggaran dihapus)	- (anggaran dihapus)	-

Program	Sasaran Program	Indikator Program	Satuan	Target Tahun 2021	Kinerja Indikator Tahun 2021			Capaian Program	Rata-rata Capaian Kegiatan	Rata-rata Capaian Subkegiatan	Anggaran Tahun 2021	Anggaran Perubahan Tahun 2021	Realisasi	Serapan (%)
					Target	Realisasi	Capaian							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Dalam Negeri	produk dalam negeri bagi pelaku usaha di DKI Jakarta	mengikuti promosi produk dalam negeri												
Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen (B)	Meningkatnya lokasi usaha perdagangan yang taat akan ketentuan metrologi legal	Jumlah pasar yang menggunakan alat Kemetrolagian yang diawasi	Pasar	22	22	22	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	463.837.638	453.111.188	437.581.650	96,57%

Sumber: e-SAKIP dan e-Monev 2021, diolah

Keterangan warna capaian kinerja dan serapan anggaran:

	: Mencapai Target ($\geq 100,00\%$)		: Sedang ($66,00\% \leq x < 75,00\%$)
	: Sangat Tinggi (Capaian Kinerja: $91,00\% \leq x < 100,00\%$; Serapan Anggaran: $91,00\% \leq x < 100,00\%$)		: Rendah ($51,00\% \leq x < 65,00\%$)
	: Tinggi ($76,00\% \leq x < 90,00\%$)		: Sangat Rendah ($\leq 50,00\%$)

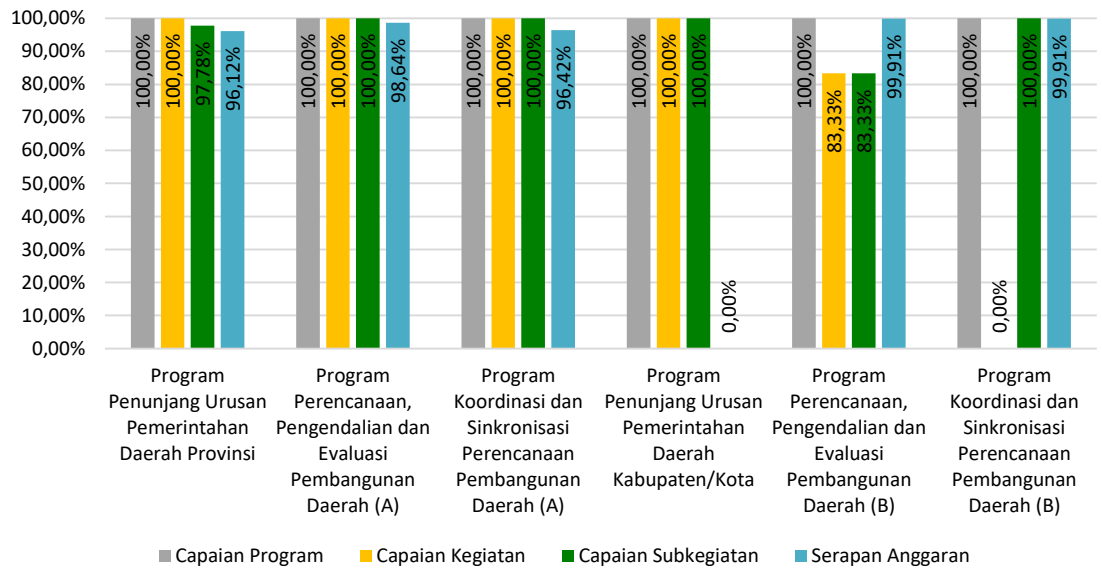
Perencanaan

Pada Tahun 2021, Unsur Perencanaan memiliki 6 program dengan total anggaran program sebesar Rp137.991.689.199 dan serapan anggaran program sampai dengan Bulan Desember Tahun 2021 sebesar Rp133.433.281.930 (96,70% dari total pagu).

Perangkat daerah yang melaksana-kan Unsur Perencanaan adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Informasi mengenai capaian program/-kegiatan/subkegiatan dan serapan anggaran dijabarkan pada Gambar 2.96 berikut.

GAMBAR 2.96

Capaian Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Serapan Anggaran Unsur Perencanaan Triwulan IV Tahun 2021



Sumber: e-SAKIP dan e-Monev 2021, diolah

Berdasarkan Gambar 2.96 seluruh program pada Unsur Perencanaan telah memiliki target dan realisasi yang berada pada kategori mencapai target 100,00% pada Triwulan IV. Berdasarkan serapan anggaran, 5 program memiliki serapan anggaran yang berada pada kategori sangat tinggi dengan rincian Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah (B) dengan serapan mencapai 99,91%, Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah (B) dengan serapan mencapai 99,91%, Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah (A) dengan serapan mencapai

98,64%, Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah (A) dengan serapan mencapai 96,42%, dan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dengan serapan mencapai 96,12%.

Sedangkan satu program yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota tidak memiliki angka realisasi sehingga tidak dapat ditemukan nilai serapan anggarannya. Capaian kinerja indikator program/kegiatan/subkegiatan dan serapan anggaran Unsur Perencanaan dapat dilihat pada Tabel 2.39 sebagai berikut.

TABEL 2.39

Capaian Kinerja dan Serapan Anggaran Program Unsur Perencanaan Triwulan IV Tahun 2021 Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah







Program	Sasaran Program	Indikator Program	Satuan	Target Tahun 2021	Kinerja Indikator Tahun 2021			Capaian Program	Rata-rata Capaian Kegiatan	Rata-rata Capaian Subkegiatan	Anggaran Tahun 2021	Anggaran Perubahan Tahun 2021	Realisasi	Serapan (%)
					Target	Realisasi	Capaian							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Terwujudnya pelayanan prima kantor di Bappeda	Indeks kepuasan pelayanan kantor	Indeks	3	3	3	100,00%	100,00%	100,00%	97,78%	110.141.86 1.531	107.879.77 8.891	103.694. 374.391	96,12%
Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah (A)	Meningkatnya kinerja perencanaan pembangunan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta	Persentase keselarasan prioritas pembangunan daerah dalam RKPD dengan strategi dan arah kebijakan dalam RPJMD	%	100	100	100	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	24.953.974 .763	22.987.584. 452	22.675.4 07.659	98,64%
		Indeks kepuasan pelayanan sistem informasi Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah.	IKM	3	3	3,27	109,00%							
		Rata-rata capaian program pembangunan daerah	%	85	85	95,51	112,36%							
Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan	Meningkatnya kinerja program	Rata-rata capaian indikator program perangkat	%	85	85	89,76	105,60%	100,00%	100,00%	100,00%	1.636.687. 906	1.565.437.9 06	1.509.46 9.080	96,42%

Program	Sasaran Program	Indikator Program	Satuan	Target Tahun 2021	Kinerja Indikator Tahun 2021			Capaian Program	Rata-rata Capaian Kegiatan	Rata-rata Capaian Subkegiatan	Anggaran Tahun 2021	Anggaran Perubahan Tahun 2021	Realisasi	Serapan (%)
					Target	Realisasi	Capaian							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
n Pembangu nan Daerah (A)	perangka t daerah	daerah Bidang Pemerintah n												
		Rata-rata capaian indikator program perangkat daerah Bidang Kesra	%	85	85	96,41	113,42%							
		Rata-rata capaian indikator program perangkat daerah Bidang Perekonomia n	%	85	85	97,04	114,16%							
		Rata-rata capaian indikator program perangkat daerah Bidang SPKLH	%	85	85	99,85	117,47%							
Program Penunjang Urusan Pemerintah an Daerah Kabupaten/ Kota	Terwujud nya pelayana n prima kantor di Subanppo eko/kab	Indeks Kepuasan Pelayanan Kantor Subanppo eko/ kab	Indeks	3	3	3,83	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	2.601.893. 335	-	-	-
Program Perencanaa n, Pengendali an dan	Meningk atnya aspirasi masyarak at	Persentase usulan masyarak at yang	%	53,75	53,75	77,41	144,02%	100,00%	83,33%	83,33%	6.145.603. 978	5.423.903.9 50	5.419.17 0.800	99,91%

Program	Sasaran Program	Indikator Program	Satuan	Target Tahun 2021	Kinerja Indikator Tahun 2021			Capaian Program	Rata-rata Capaian Kegiatan	Rata-rata Capaian Subkegiatan	Anggaran Tahun 2021	Anggaran Perubahan Tahun 2021	Realisasi	Serapan (%)
					Target	Realisasi	Capaian							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Evaluasi Pembangunan Daerah (B)	wilayah kota/kabupaten administrasi yang diakomodir	diakomodir dalam RKPD												
Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah (B)	Meningkatnya kinerja UKPD Pemprov DKI Jakarta	Rata-Rata Capaian Kinerja UKPD	%	85	85	98,81	116,25%	100,00%	- (realisasi tidak di validasi)	100,00%	134.984.000	134.984.000	134.860.000	99,91%

Sumber: e-SAKIP dan e-Monev 2021, diolah

Keterangan warna capaian kinerja dan serapan anggaran:

	: Mencapai Target ($\geq 100,00\%$)		: Sedang ($66,00\% \leq x < 75,00\%$)
	: Sangat Tinggi (Capaian Kinerja: $91,00\% \leq x < 100,00\%$; Serapan Anggaran: $91,00\% \leq x < 100,00\%$)		: Rendah ($51,00\% \leq x < 65,00\%$)
	: Tinggi ($76,00\% \leq x < 90,00\%$)		: Sangat Rendah ($\leq 50,00\%$)

Berdasarkan Tabel 2.39, dari 11 indikator program Unsur Perencanaan, sebanyak 4 program memiliki rata-rata capaian kegiatan mencapai 100,00%, satu program masuk dalam kategori tinggi dengan serapan 83,33% yakni Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah (B). Sementara untuk rata-rata capaian subkegiatan, seluruh program memiliki nilai

rata-rata capaian yang 4 di antaranya mencapai 100,00% dan 1 lainnya mencapai 97,78% dan masuk dalam kategori tinggi pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi. Selain itu terdapat 1 program dengan capaian 83,33% yaitu Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah (B).

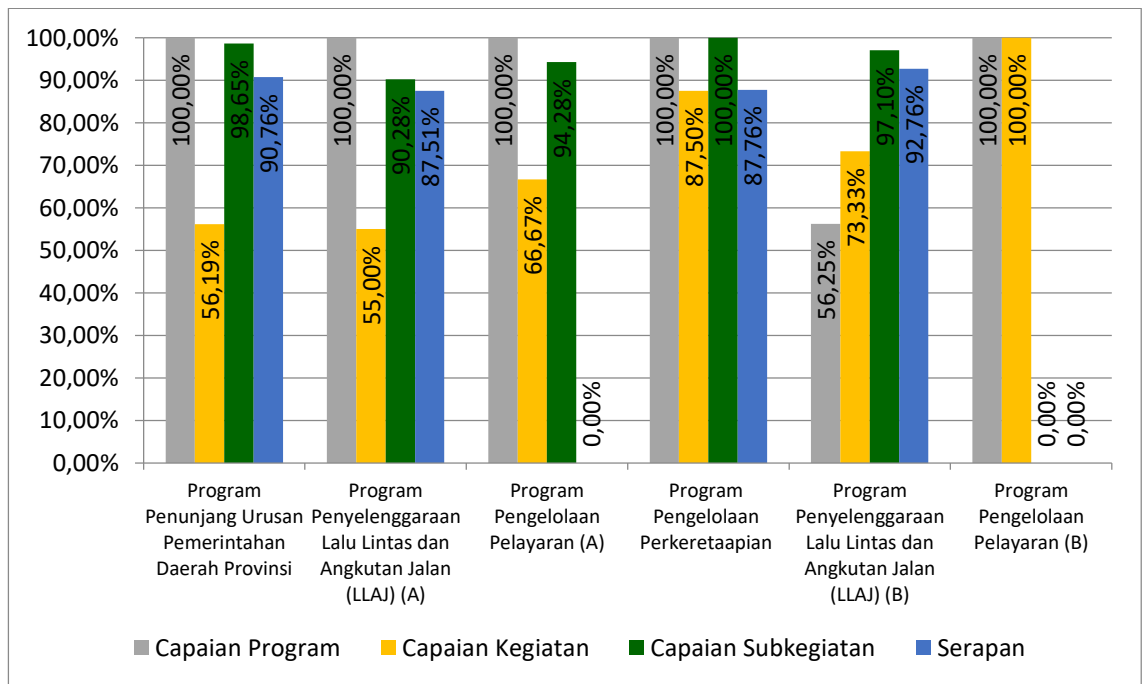
Perhubungan

Pada Tahun 2021, Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan memiliki 6 program dengan total anggaran program sebesar Rp6.002.264.809.396 dan serapan anggaran program sampai dengan Bulan Desember Tahun 2021 sebesar Rp5.293.309.051.088 (88,19% dari total pagu). Perangkat Daerah

yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan adalah Dinas Perhubungan. Informasi mengenai capaian program/kegiatan/subkegiatan dan serapan anggaran dijabarkan pada Gambar 2.97 sebagai berikut sebagai berikut.

GAMBAR 2.97

Capaian Program/Kegiatan/Program dan Serapan Anggaran Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan Triwulan IV Tahun 2021



Sumber: e-SAKIP dan e-Monev 2021, diolah

Berdasarkan Gambar 2.97, untuk serapan anggaran, terdapat dua program yang masuk dalam kategori tinggi yaitu Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) (A) dengan serapan 87,51% dan

Program Pengelolaan Perkeretaapian dengan serapan 87,76%. Dua program masuk dalam kategori sangat tinggi, Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dengan serapan 90,70% dan Program

Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) (B) dengan serapan 92,76%.

Berdasarkan data yang disajikan pada Tabel 2.40, dari 11 indikator program Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan, memiliki capaian termasuk dalam kategori mencapai target sebesar 100,00%. Pada rata-rata capaian kegiatan, terdapat dua rata-rata capaian kegiatan pada program dengan

kategori rendah pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi memiliki capaian 56,19%, Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) (A) dengan capaian 55,00%. Sementara untuk rata-rata capaian subkegiatan, didominasi oleh kategori sangat tinggi dengan capaian $\geq 90,00\%$. Data detail terkait kinerja program dan anggaran dapat dilihat pada Tabel 2.40 sebagai berikut.

TABEL 2.40

Capaian Kinerja dan Serapan Anggaran Program Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan Triwulan IV Tahun 2021 pada Dinas Perhubungan

Program	Sasaran Program	Indikator Program	Satuan	Target Tahun 2021	Kinerja Indikator Tahun 2021			Capaian Program	Rata-rata Capaian Kegiatan	Rata-rata Capaian Subkegiatan	Anggaran Tahun 2021	Anggaran Perubahan Tahun 2021	Realisasi	Serapan (%)
					Target	Realisasi	Capaian							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Terlaksananya program penunjang urusan pemerintahan an daerah provinsi	Indeks Kepuasan Pelayanan Kantor	Nilai	4	4	4	100,00%	100,00%	56,19%	98,65%	885.336.301.860	721.270.467.575	654.599.713.997	90,76%
Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) (A)	Terlaksananya program penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Jumlah penumpang umum yang terlayani per hari	Penumpang per hari	859861	859861	2672580	310,82%	100,00%	55,00%	95,52%	4.868.675.628.580	5.058.805.332.204	4.327.477.953.136	85,54%
		Presentase kecelakaan angkutan umum yang mengakibatkan korban jiwa pertahun	%	0,08	0,08	0,01	1500,00%							
		Kecepatan Rata-Rata di 41 Koridor Jalan Utama pada Jam Sibuk	Km/Jam	24	24	24,91	103,79%							
Program Pengelolaan Pelayanan (A)	Terlaksananya program pengelolaan pelayaran	Jumlah terminal penumpang perairan (Pelabuhan) yang memenuhi Standar Pelayanan Prima	Terminal Penumpang	1	1	1	100,00%	100,00%	22,22%	100,00%	169.222.956.687	169.222.956.687	139.366.140.535	82,36%

Program	Sasaran Program	Indikator Program	Satuan	Target Tahun 2021	Kinerja Indikator Tahun 2021			Capaian Program	Rata-rata Capaian Kegiatan	Rata-rata Capaian Subkegiatan	Anggaran Tahun 2021	Anggaran Perubahan Tahun 2021	Realisasi	Serapan (%)
					Target	Realisasi	Capaian							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
		Persentase armada angkutan perairan yang memenuhi standar berdasarkan peraturan perundangan	%	82	82	82,5	100,61%							
		Persentase Operator Angkutan Perairan yang Memenuhi Peraturan	%	65	65	65	100,00%							
Program Pengelolaan Perkeretaapian	Terlaksananya program pengelolaan perkeretaapian	Persentase tindak lanjut perencanaan/pengawasan/kebijakan pengoprasi-an perkeretaapian	%	100	100	100	100,00%	100,00%	87,50%	100,00%	10.842.687.989	3.418.379.674	2.999.853.615	87,76%
Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) (B)	Terlaksananya program penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase kecelakaan angkutan umum yang mengakibatkan korban jiwa pertahun	%	0,08	0,08	0,01	1500,00%	100,00%	65,83%	100,00%	249.709.249.160	218.770.629.943	195.842.645.251	89,52%
		Persentase Kendaraan Angkutan Umum yang Terintegrasi	%	80	80	85,38	106,73%							
Program Pengelolaan Pelayaran (B)	Terlaksananya program pengelolaan pelayaran	Jumlah terminal penumpang angkutan perairan	Terminal Penumpang	1	1	1	100,00%	100,00%	100,00%	- (dihapus)	- (dihapus)	- (dihapus)	- (dihapus)	- (dihapus)

Program	Sasaran Program	Indikator Program	Satuan	Target Tahun 2021	Kinerja Indikator Tahun 2021			Capaian Program	Rata-rata Capaian Kegiatan	Rata-rata Capaian Subkegiatan	Anggaran Tahun 2021	Anggaran Perubahan Tahun 2021	Realisasi	Serapan (%)
					Target	Realisasi	Capaian							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
		(Pelabuhan) yang memenuhi Standar Pelayanan Prima												

Sumber: e-SAKIP dan e-Monev 2021, diolah

Keterangan warna capaian kinerja dan serapan anggaran:

	: Mencapai Target ($\geq 100,00\%$)		: Sedang ($66,00\% \leq x < 75,00\%$)
	: Sangat Tinggi (Capaian Kinerja: $91,00\% \leq x < 100,00\%$; Serapan Anggaran: $91,00\% \leq x < 100,00\%$)		: Rendah ($51,00\% \leq x < 65,00\%$)
	: Tinggi ($76,00\% \leq x < 90,00\%$)		: Sangat Rendah ($\leq 50,00\%$)

Berdasarkan data yang disajikan pada Tabel 2.40, dari 11 indikator program Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan, semuanya telah memiliki target dan realisasi dengan capaian termasuk dalam kategori mencapai target sebesar 100,00%. Pada rata-rata capaian kegiatan, terdapat dua program dengan kategori rendah pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi memiliki capaian 56,19%, Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) (A) dengan capaian 55,00%.

Selain itu, dua program dalam kategori tinggi yakni Program Pengelolaan Pelayaran (A) dengan capaian 66,67% dan Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) (B) dengan capaian 73,33%. Terdapat program yang masuk dalam kategori tinggi yaitu Program Pengelolaan

Perkeretaapian dan satu program mencapai target yakni Program Pengelolaan Pelayaran (B). Satu program masuk dalam kategori tinggi yaitu Program Pengelolaan Perkeretaapian dengan capaian sebesar 87,50%, satu program masuk dalam kategori mencapai target yaitu Program Pengelolaan Pelayaran (B) dengan capaian 100,00%.

Sementara untuk rata-rata capaian subkegiatan, didominasi oleh kategori sangat tinggi dengan capaian $\geq 90,00\%$ yang terdapat pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) (A), Program Pengelolaan Pelayaran (A) dan Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) (B). Sebanyak satu program memiliki capaian yang mencapai 100,00% yaitu Program Pengelolaan Perkeretaapian

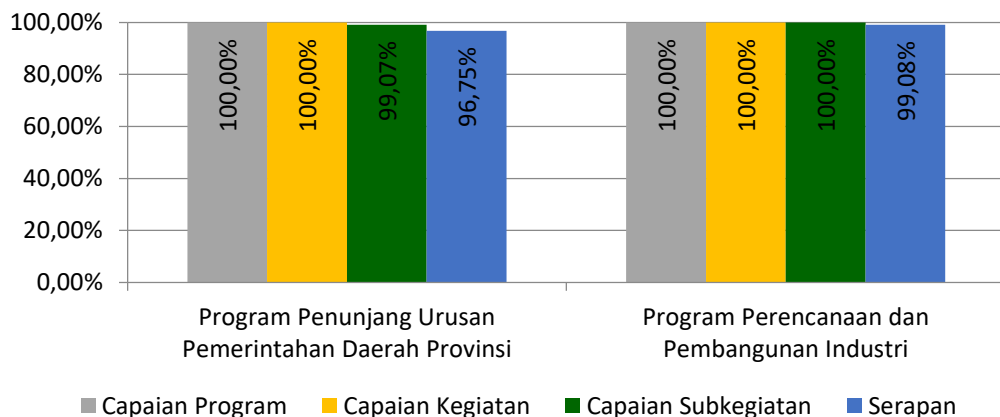
Perindustrian

Pada Tahun 2021, Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian memiliki 3 program dengan total anggaran program sebesar Rp173.484.274.933 dan serapan anggaran program sampai dengan Bulan Desember Tahun 2021 sebesar Rp168.270.924.319 (96,99% dari total pagu). Perangkat daerah

yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha kecil dan Menengah. Informasi mengenai capaian program/kegiatan/subkegiatan dan serapan anggaran dijabarkan pada Gambar 2.98 sebagai berikut.

GAMBAR 2.98

Capaian Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Serapan Anggaran Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian Triwulan IV Tahun 2021



Sumber: e-SAKIP dan e-Monev 2021, diolah

Berdasarkan Gambar 2.98, dari 2 program Urusan Pemerintahan Bidang dengan kategori mencapai target pada Triwulan IV. Berdasarkan serapan anggaran, Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi memiliki nilai serapan mencapai 96,75% dan Program Perencanaan dan Pembangunan Industri memiliki nilai serapan mencapai 99,08%. Rata-rata capaian kegiatan dan subkegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Provinsi adalah 100,00% dan 99,07%. Sementara Rata-rata capaian kegiatan dan subkegiatan pada Program Perencanaan dan Pembangunan Industri adalah 100,00%. Sedangkan pada Program Pengendalian Izin Usaha Industri tidak ada nilai rata-rata capaian kegiatan dan subkegiatan. Capaian kinerja indikator program/kegiatan/-subkegiatan dan serapan anggaran Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian dapat dilihat pada Tabel 2.41 sebagai berikut.

TABEL 2.41







Capaian Kinerja dan Serapan Anggaran Program Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian Triwulan IV Tahun 2021 pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Program	Sasaran Program	Indikator Program	Satuan	Target Tahun 2021	Kinerja Indikator Tahun 2021			Capaian Program	Rata-rata Capaian Kegiatan	Rata-rata Capaian Subkegiatan	Anggaran Tahun 2021	Anggaran Perubahan Tahun 2021	Realisasi	Serapan (%)
					Target	Realisasi	Capaian							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Terlaksananya tata kelola pemerintah yang transparan dan akuntabel	Indeks kepuasan pelayanan kantor	Indeks	4	4	4	100,00%	100,00%	100,00%	99,07%	187.308.796.150	155.170.098.026	150.124.351.244	96,75%
		Indeks kepuasan pelayanan kendaraan operasional	Indeks	4	4	4	100,00%							
Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Meningkatnya jumlah dan kualitas IKM di DKI Jakarta	Jumlah wirausaha industri baru	Wirausaha	5.560	5.560	23.762	427,37%	100,00%	100,00%	100,00%	16.165.990.708	18.314.176.908	18.146.573.075	99,08%
		Persentase pertumbuhan jumlah industri kreatif	%	58,3	58,3	175,97	301,84%							
		Persentase jumlah IKM yang berkualitas	%	15,47	15,47	22,58	145,96%							
		Persentase produk IKM bebas bahan berbahaya	%	56,26	15,47	15,47	100,00%							

Program	Sasaran Program	Indikator Program	Satuan	Target Tahun 2021	Kinerja Indikator Tahun 2021			Capaian Program	Rata-rata Capaian Kegiatan	Rata-rata Capaian Subkegiatan	Anggaran Tahun 2021	Anggaran Perubahan Tahun 2021	Realisasi	Serapan (%)
					Target	Realisasi	Capaian							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Program Pengendalian Izin Usaha Industri	Meningkatnya jumlah pelaku industri yang terlayani dalam proses verifikasi teknis sebagai pemenuhan komitmen izin usaha industri.	Persentase produk industri dengan standar SNI	%	78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Sumber: e-SAKIP dan e-Monev 2021, diolah

Keterangan warna capaian kinerja dan serapan anggaran:

	: Mencapai Target ($\geq 100,00\%$)		: Sedang ($66,00\% \leq x < 75,00\%$)
	: Sangat Tinggi (Capaian Kinerja: $91,00\% \leq x < 100,00\%$; Serapan Anggaran: $91,00\% \leq x < 100,00\%$)		: Rendah ($51,00\% \leq x < 65,00\%$)
	: Tinggi ($76,00\% \leq x < 90,00\%$)		: Sangat Rendah ($\leq 50,00\%$)

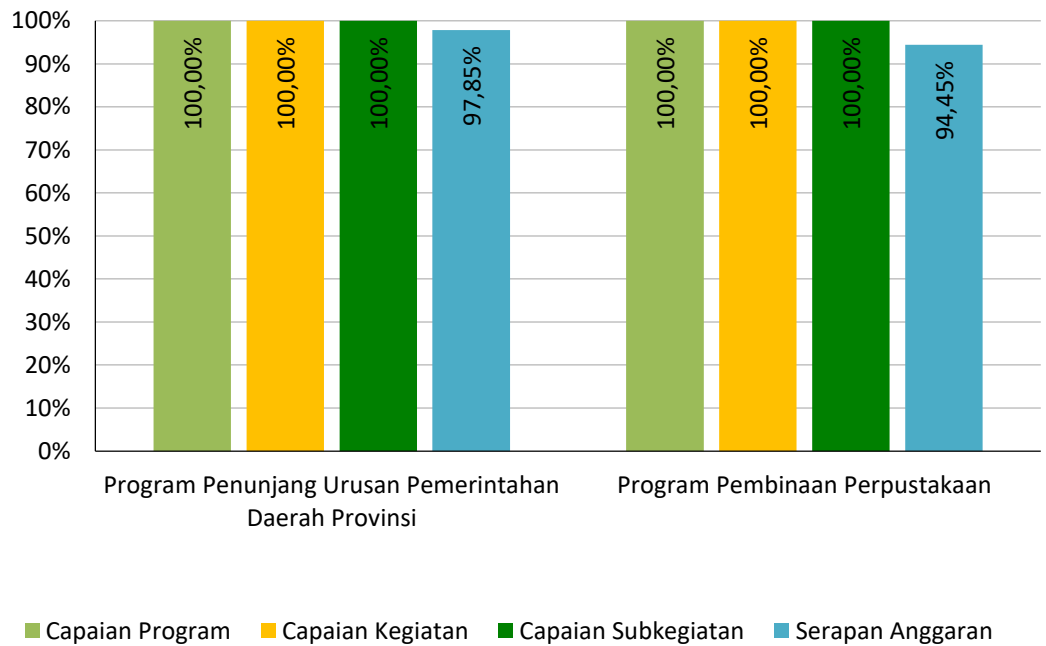
Perpustakaan

Pada tahun 2021, urusan Pemerintahan pada Bidang Perpustakaan memiliki 2 program dengan total anggaran program sebesar Rp 94.976.456.022 dengan serapan anggaran program hingga bulan Desember 2021 sebesar Rp 92.798.816.868 atau sebesar 97,71% dari total pagu. Perangkat daerah

yang melaksanakan urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan yakni Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Informasi terkait capaian program, kegiatan, sub kegiatan serta serapan anggaran pada Bidang Perpustakaan terdapat pada Gambar 2.99 sebagai berikut.

GAMBAR 2.99

Capaian Program dan Serapan Anggaran Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan Triwulan IV Tahun 2021



Sumber: e-SAKIP dan e-Monev 2021, diolah

Berdasarkan Gambar 2.99, rata-rata capaian pada Bidang Perpustakaan secara keseluruhan capaiannya 100,00%. Sementara itu, untuk serapan anggaran juga dalam kondisi normal dimana serapannya di atas 90%. Apabila melihat perbandingan capaian program, rata-rata capaian kegiatan dan rata-rata capaian subkegiatan juga seimbang dimana seluruhnya

mencapai target. Berdasarkan kondisi tersebut, dari Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan tidak terdapat permasalahan dalam pelaksanaannya. Capaian kinerja indikator program, kegiatan, sub kegiatan, dan serapan anggaran urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan dapat dilihat pada Tabel 2.42.







TABEL 2.42

Capaian Kinerja dan Serapan Anggaran Program Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan Triwulan IV Tahun 2021 pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Program	Sasaran Program	Indikator Program	Satuan	Target Tahun 2021	Kinerja Indikator Tahun 2021			Capaian Program	Rata-rata Capaian Kegiatan	Rata-rata Capaian Subkegiatan	Anggaran Tahun 2021	Anggaran Perubahan Tahun 2021	Realisasi	Serapan (%)
					Target	Realisasi	Capaian							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel	Indeks kepuasan pelayanan kantor	Indeks	4	4	4	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	90.936.266.342	90.936.266.342	88.982.686.777,00	97,85%
		Indeks kepuasan pelayanan kendaraan operasional	Indeks	4	4	4	100,00%							
Program Pembinaan Perpustakaan	Meningkatnya rasio pengunjung perpustakaan dan perpustakaan binaan yang memenuhi SNP	Rasio pengunjung perpustakaan	%	10,55	10,55	16,81	159,34%	100,00%	100,00%	100,00%	4.040.189.680	4.040.189.680	3.816.130.091,00	94,45%
		Persentase perpustakaan binaan yang memenuhi SNP (Standar Nasional Perpustakaan)	%	75	75	75	100,00%							

Sumber: e-SAKIP dan e-Monev 2021, diolah

Keterangan warna capaian kinerja dan serapan anggaran:

	: Mencapai Target ($\geq 100,00\%$)		: Sedang ($66,00\% \leq x < 75,00\%$)
	: Sangat Tinggi (Capaian Kinerja: $91,00\% \leq x < 100,00\%$; Serapan Anggaran: $91,00\% \leq x < 100,00\%$)		: Rendah ($51,00\% \leq x < 65,00\%$)
	: Tinggi ($76,00\% \leq x < 90,00\%$)		: Sangat Rendah ($\leq 50,00\%$)

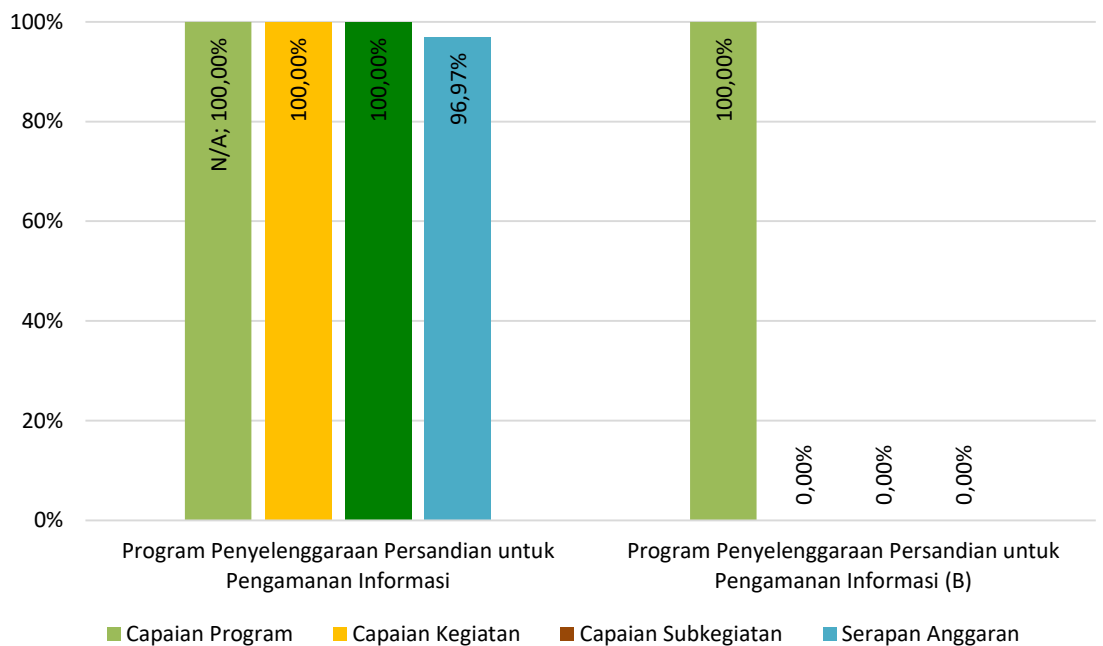
Persandian

Pada tahun 2021, urusan Pemerintahan pada Bidang Persandian memiliki 2 program dengan total anggaran program sebesar Rp 16,530,027,128 dengan serapan anggaran program hingga bulan Desember 2021 sebesar Rp 15,979,364,850.00 atau sebesar 99,97% dari total pagu. Perangkat daerah

yang melaksanakan urusan Pemerintahan bidang persandian yakni Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik. Informasi terkait capaian program, kegiatan, sub kegiatan serta serapan anggaran pada bidang persandian terdapat pada Gambar 2.100 di bawah sebagai berikut.

GAMBAR 2.100

Capaian Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Serapan Anggaran Urusan Pemerintahan Bidang Persandian Triwulan IV Tahun 2021



Sumber: e-SAKIP dan e-Monev 2021, diolah

Berdasarkan Gambar 2.100 rata-rata capaian program pada bidang persandian secara keseluruhan didominasi oleh angka 100,00% yang menandakan bahwa rata-rata capaian program masuk dalam kategori mencapai target. Selain itu, terdapat 1 (satu) program kode B yang tidak memiliki rata-rata capaian kegiatan dan rata-rata capaian subkegiatan.

Hal ini terjadi karena subkegiatan secara keseluruhan digabungkan ke dalam program kode A.

Selanjutnya untuk serapan anggaran, program pada Urusan Pemerintahan Bidang Persandian dalam kondisi normal dimana serapannya di atas 80%. Data detail program dapat dilihat pada Tabel 2.43.







TABEL 2.43

Capaian Kinerja dan Serapan Anggaran Program Urusan Pemerintahan Bidang Persandian Triwulan IV Tahun 2021 pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik

Program	Sasaran Program	Indikator Program	Satuan	Target Tahun 2021	Kinerja Indikator Tahun 2021			Capaian Program	Rata-rata Capaian Kegiatan	Rata-rata Capaian Subkegiatan	Anggaran Tahun 2021	Anggaran Perubahan Tahun 2021	Realisasi	Serapan (%)
					Target	Realisasi	Capaian							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Meningkatnya pengamanan informasi di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta	Persentase perangkat daerah Provinsi yang telah menggunakan layanan persandian dalam rangka pengamanan informasi milik pemerintah	%	90	90	98,04	108,93 %	100,00%	100,00%	100,00%	16.530.027.128	16.478.006.728,00	15.979.364.850,00	96,97%
Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi (B)	Meningkatnya pengamanan informasi di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta	Persentase perangkat daerah di kabupaten/kota yang telah menggunakan layanan persandian dalam rangka pengamanan informasi milik pemerintah	%	90	90	100	111,11 %	100,00%	-	-	-	-	-	-

Sumber: e-SAKIP dan e-Monev 2021, diolah

Keterangan warna capaian kinerja dan serapan anggaran:

	: Mencapai Target ($\geq 100,00\%$)		: Sedang ($66,00\% \leq x < 75,00\%$)
	: Sangat Tinggi (Capaian Kinerja: $91,00\% \leq x < 100,00\%$; Serapan Anggaran: $91,00\% \leq x < 100,00\%$)		: Rendah ($51,00\% \leq x < 65,00\%$)
	: Tinggi ($76,00\% \leq x < 90,00\%$)		: Sangat Rendah ($\leq 50,00\%$)

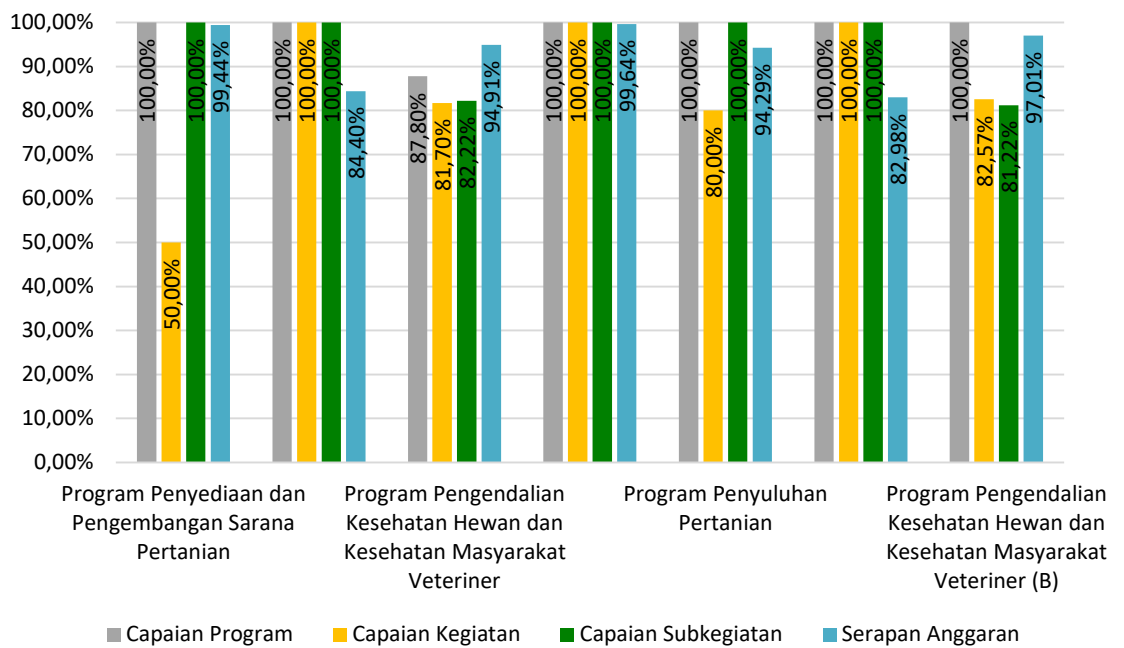
Pertanian

Pada tahun 2021, urusan pemerintahan Bidang Pertanian memiliki 7 program dengan total anggaran program sebesar Rp8.308.570.439 dan serapan anggaran program sampai dengan bulan Desember Tahun 2021 sebesar Rp7.394.511.962 (89,00% dari total pagu). Perangkat Daerah

yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pertanian adalah Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian. Informasi mengenai capaian program, kegiatan, subkegiatan dan serapan anggaran dijabarkan pada Gambar 2.101 sebagai berikut.

GAMBAR 2.101

Capaian Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Serapan Anggaran Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian Triwulan IV Tahun 2021



Sumber: e-SAKIP dan e-Monev 2021, diolah

Berdasarkan Gambar 2.101, sebagian besarnya (6 program) berada pada kategori mencapai target (100,00%) dan 1 program berada pada kategori tinggi (87,80%). Berdasarkan serapan anggaran, 7 program tersebut memiliki serapan anggaran yang berada pada kategori sangat tinggi dan tinggi. Untuk rata-rata capaian kegiatan, sebanyak 3 program memiliki capaian kegiatan sebesar 100,00% dan masuk dalam kategori mencapai target. Pada 3 program lain memiliki kategori tinggi yakni Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner sebesar 81,70%, Program Penyuluhan Pertanian sebesar 80,00% dan Program Pengendalian

Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner (B), sedangkan satu program masuk dalam kategori rendah yaitu Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian sebesar 82,57%. Sedangkan terdapat satu program yang memiliki capaian kegiatan rendah yakni Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian sebesar 50,00%.

Sementara itu untuk rata-rata capaian subkegiatan, sebanyak 5 program memiliki capaian subkegiatan mencapai 100,00%, dan dua program lain masuk dalam kategori tinggi yaitu Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner

dan Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner (B). Sedangkan dua program lain memiliki capaian sub kegiatan dalam kategori tinggi yaitu Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner sebesar 82,22% dan Program Pengendalian

Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner (B) dengan capaian 82,22%. Capaian kinerja indikator program/kegiatan/subkegiatan dan serapan anggaran Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian dapat dilihat pada Tabel 2.44 sebagai berikut.

TABEL 2.44

Capaian Kinerja dan Serapan Anggaran Program Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian Triwulan IV Tahun 2021 pada Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian







Program	Sasaran Program	Indikator Program	Satuan	Target Tahun 2021	Kinerja Indikator Tahun 2021			Capaian Program	Rata-rata Capaian Kegiatan	Rata-rata Capaian Subkegiatan	Anggaran Tahun 2021	Anggaran Perubahan Tahun 2021	Realisasi	Serapan (%)
					Target	Realisasi	Capaian							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Tersedianya sarana pertanian dan pengembangannya	Jumlah produksi tanaman pangan dan hortikultura	Ton	43.725	43.725,00	100.346,00	229,49%	100,00%	50,00%	100,00%	2.563.668.376	1.243.407.154	1.236.383.340	99,44%
		Jumlah produksi benih padi	Ton	47,2	47,2	47,22	100,04%							
		Jumlah produksi susu	Liter	5.050.000	5.050.000,00	5.934.210,00	117,51%							
Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Tercapainya Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Jumlah produksi daging	Kg	35.112.014	35.112.000,00	43.426.700,00	123,68%	100,00%	100%	100,00%	16.426.240.730	4.823.881.829	4.071.377.686	84,40%
		Jumlah pelayanan kesehatan hewan	Ekor	10.000	10.000	20.409	204,09%							
		Jumlah lokasi pengembangan kegiatan urban farming	Lokasi	320	320	400	125,00%							
Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Meningkatnya Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah kasus penyakit hewan menular strategis	Kasus	0	0	0	100,00%	87,80%	81,70%	82,22%	1.214.670.847	782.285.185	742.505.786	94,91%
		Jumlah kasus penyakit hewan menular strategis (Brucellosis, AI, SE dan anthrax)	Kasus	9	9	2	22,22%							

Program	Sasaran Program	Indikator Program	Satuan	Target Tahun 2021	Kinerja Indikator Tahun 2021			Capaian Program	Rata-rata Capaian Kegiatan	Rata-rata Capaian Subkegiatan	Anggaran Tahun 2021	Anggaran Perubahan Tahun 2021	Realisasi	Serapan (%)
					Target	Realisasi	Capaian							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
		Jumlah sertifikasi kesehatan masyarakat veteriner	Sertifikasi	41	41	26	63,41%							
		Jumlah pelanggaran bidang pertanian dan peternakan	Kasus	0	0	0	100,00%							
Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Tercapainya Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase penanganan hama dan penyakit tanaman	%	100	100	100	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	242.190.795	60.252.500	60.038.000	99,64%
Program Penyuluhan Pertanian	Terlaksananya Penyuluhan Pertanian	Jumlah produksi dan pemasaran produk pertanian	Ton	114	114	205,76	180,49%	100,00%	80,00%	100,00%	2.906.056.972	379.961.699	358.253.360	94,29%
		Jumlah produksi dan pemasaran produk peternakan	Ton	9500	9.500,00	12.714,00	133,83%							
Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian (B)	Tersedianya Prasarana Pertanian	Jumlah lokasi Agrowisata yang dikembangkan	Lokasi	8	8	8	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	8.657.753.351	444.497.426	368.858.580	82,98%
Program Pengendalian	Terlaksananya Pengend	Jumlah pelanggaran	Kasus	5	5	5	100,00%	100,00%	82,57%	82,22%	1.601.819.695	574.284.646	557.095.210	97,01%

Program	Sasaran Program	Indikator Program	Satuan	Target Tahun 2021	Kinerja Indikator Tahun 2021			Capaian Program	Rata-rata Capaian Kegiatan	Rata-rata Capaian Subkegiatan	Anggaran Tahun 2021	Anggaran Perubahan Tahun 2021	Realisasi	Serapan (%)
					Target	Realisasi	Capaian							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner (B)	alian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	bidang peternakan												

Sumber: e-SAKIP dan e-Monev 2021, diolah

Keterangan warna capaian kinerja dan serapan anggaran:

	: Mencapai Target ($\geq 100,00\%$)		: Sedang ($66,00\% \leq x < 75,00\%$)
	: Sangat Tinggi (Capaian Kinerja: $91,00\% \leq x < 100,00\%$; Serapan Anggaran: $91,00\% \leq x < 100,00\%$)		: Rendah ($51,00\% \leq x < 65,00\%$)
	: Tinggi ($76,00\% \leq x < 90,00\%$)		: Sangat Rendah ($\leq 50,00\%$)

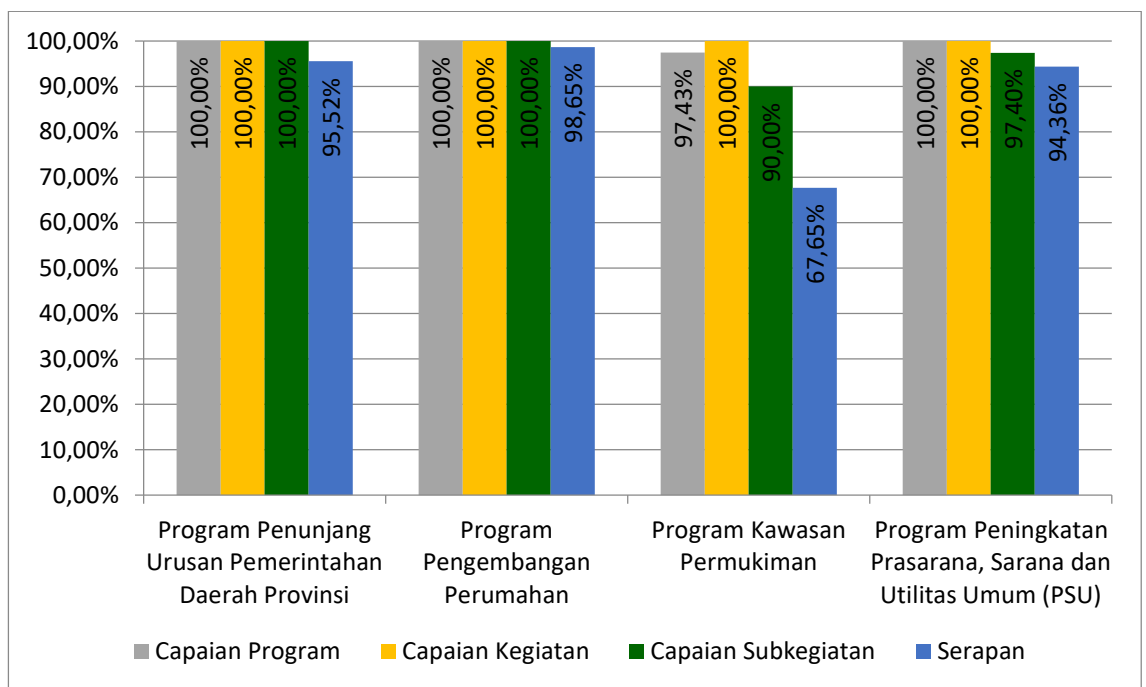
Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Pada Tahun 2021, Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman memiliki 4 program dengan total anggaran program sebesar Rp 2.235.623.040.620 dan serapan anggaran program sampai dengan Bulan Desember tahun 2021 sebesar Rp 2.178.429.668.399 atau 97,44% dari total pagu. Perangkat Daerah yang melaksanakan

Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman adalah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman. Informasi terkait capaian program, kegiatan, sub kegiatan serta serapan anggaran pada Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Terdapat pada Gambar 2.102 berikut.

GAMBAR 2.102

Capaian Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Serapan Anggaran Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Triwulan IV Tahun 2021



Sumber: e-SAKIP dan e-Monev 2021, diolah

Berdasarkan Gambar 2.102, dapat diketahui bahwa 3 (tiga) program mencapai target dan 1 (satu) program dengan capaian sangat tinggi yakni pada Program Pengembangan Perumahan dengan capaian 97,43%. Untuk serapan anggaran, terdapat 1 (satu) program yang tidak berimbang antara capaian program dengan serapan anggaran, yaitu program kawasan permukiman. Pada grafik juga

terlihat perbandingan antara capaian program, rata-rata kegiatan dan rata-rata subkegiatan dapat dikatakan cukup berimbang karena gap capaian antar level tidak terlalu signifikan. Adapun data detail terkait kinerja dan serapan anggaran Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dapat dilihat pada Tabel 2.45.

TABEL 2.45







Capaian Kinerja dan Serapan Anggaran Program Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Triwulan IV Tahun 2021 pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Program	Sasaran Program	Indikator Program	Satuan	Target Tahun 2021	Kinerja Indikator Tahun 2021			Capaian Program	Rata-rata Capaian Kegiatan	Rata-rata Capaian Subkegiatan	Anggaran Tahun 2021	Anggaran Perubahan Tahun 2021	Realisasi	Serapan (%)
					Target	Realisasi	Capaian							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel	Indeks kepuasan pelayanan kantor	Indeks	3	3	4	133,33%	100,00%	100,00%	100,00%	381.927.739.313	381.927.739.313	364.810.424.133	95,52%
		Indeks kepuasan pelayanan kendaraan operasional	Indeks	4	4	4	100,00%							
Program Pengembangan Perumahan	Tersedianya hunian yang layak dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat	Indeks kepuasan penghuni rumah susun	Indeks	78	78	80,1	102,69%	100,00%	100,00%	100,00%	36.797.210.328	16.943.413.394	11.462.724.359	67,65%
Program Kawasan Permukiman	Tersedianya hunian yang layak dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat	Persentase unit perumahan rakyat yang terbangun	%	0,14	0,14	0,86	614,29%	97,43%	100,00%	100,00%	1.120.946.029.885	1.606.791.740.620	1.585.176.477.618	98,65%
		Persentase unit perumahan rakyat yang terpelihara/terawat	%	34,7	34,7	34,7	100,00%							

		Persentase perumahan rakyat yang lengkap sarana prasarana	%	56,52	56,52	52,17	92,30%							
Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Terwujudnya kawasan perkotaan yang layak huni, tertata rapi dan berkelanjutan berikut sarana prasarana pendukungnya	Jumlah kawasan/fasilitas permukiman yang ditata	RW Kumuh	64	64	64	100,00%	100,00%	100,00%	99,09%	229.960.147.293	229.960.147.293	216.980.042.289	94,36%

Sumber: e-SAKIP dan e-Monev 2021, diolah

Keterangan warna capaian kinerja dan serapan anggaran:

	: Mencapai Target ($\geq 100,00\%$)		: Sedang ($66,00\% \leq x < 75,00\%$)
	: Sangat Tinggi (Capaian Kinerja: $91,00\% \leq x < 100,00\%$; Serapan Anggaran: $91,00\% \leq x < 100,00\%$)		: Rendah ($51,00\% \leq x < 65,00\%$)
	: Tinggi ($76,00\% \leq x < 90,00\%$)		: Sangat Rendah ($\leq 50,00\%$)

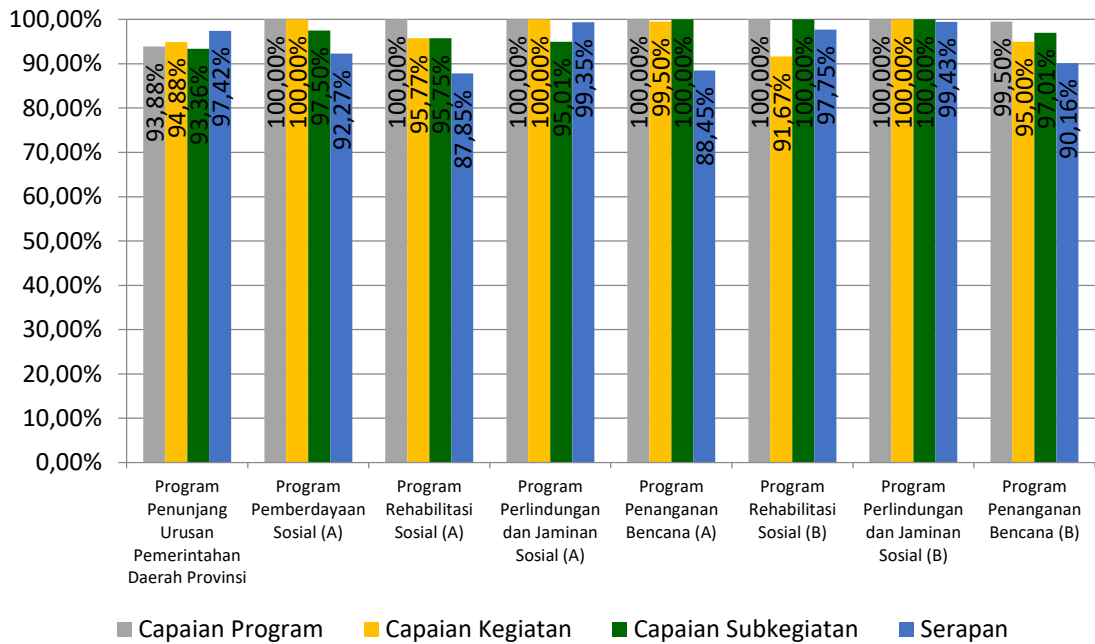
Sosial

Pada Tahun 2021, Urusan Pemerintahan Bidang Sosial memiliki 8 program dengan total anggaran program sebesar Rp 3.084.411.483.837 dan serapan anggaran program sampai dengan Bulan Desember Tahun 2021 sebesar Rp 3.034.781.595.606 atau 98,39% dari total pagu. Perangkat

Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Sosial adalah Dinas Sosial. Informasi mengenai capaian program, kegiatan, subkegiatan dan serapan anggaran dijabarkan pada Gambar 2.103 sebagai berikut.

GAMBAR 2.103

Capaian Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Serapan Anggaran Urusan Pemerintahan Bidang Sosial Triwulan IV Tahun 2021



Sumber: e-SAKIP dan e-Monev 2021, diolah

Berdasarkan Gambar 2.103, 6 (enam) program memiliki target dan realisasi dengan rata-rata capaian termasuk kategori mencapai target $\geq 100,00\%$. Sedangkan pada 2 program lain memiliki capaian program dengan kategori sangat tinggi pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dan Program Penanganan Bencana (B). Untuk data serapan anggaran, rata-rata serapan anggaran di atas 80% sehingga

serapan anggaran cukup ideal. Sementara itu, dari gambar terlihat bahwa capaian program, rata-rata capaian kegiatan dan rata-rata capaian subkegiatan cukup berimbang, dimana gap antar level tidak terlalu signifikan. Capaian kinerja indikator program/kegiatan/subkegiatan dan serapan anggaran Urusan Pemerintahan Bidang Sosial dapat dilihat pada Tabel 2.46 sebagai berikut.

TABEL 2.46







Capaian Kinerja dan Serapan Anggaran Program Urusan Pemerintahan Bidang Sosial Triwulan IV Tahun 2021 pada Dinas Sosial

Program	Sasaran Program	Indikator Program	Satuan	Target Tahun 2021	Kinerja Indikator Tahun 2021			Capaian Program	Rata-rata Capaian Kegiatan	Rata-rata Capaian Subkegiatan	Anggaran Tahun 2021	Anggaran Perubahan Tahun 2021	Realisasi	Serapan (%)
					Target	Realisasi	Capaian							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Indeks kepuasan pelayanan kendaraan operasional	Indeks	4	4	3,75	93,75%	93,88%	94,88%	93,78%	299.440.807.032	299.440.807.033	291.716.092.082	97,42%
		Indeks kepuasan pelayanan kantor	Indeks	4	4	3,76	94,00%							
Program Pemberdayaan Sosial (A)	Terlaksananya Program Pemberdayaan Sosial	Persentase SDM penyelenggara kesejahteraan sosial yang diberdayakan	%	93	93	95,08	102,24%	100,00%	100,00%	97,50%	4.479.396.780	4.479.396.780	4.132.950.129	92,27%
Program Rehabilitasi Sosial (A)	Terlaksananya Program Rehabilitasi Sosial	Persentase pemenuhan kebutuhan dasar PMKS di luar fakir miskin, korban bencana, HIV/AIDS, dan NAPZA	%	100	100	100,5	100,50%	100,00%	95,77%	95,75%	174.746.497.610	174.746.497.611	153.523.446.785	87,85%
Program Perlindungan dan Jaminan Sosial (A)	Terlaksananya Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase fakir miskin dan orang tidak mampu yang memperoleh bantuan keuangan/barang setiap tahun	%	71	71	107	150,70%	100,00%	100,00%	95,01%	2.499.579.523.469	2.499.579.523.469	2.483.316.808.236	99,35%
Program Penanganan Bencana (A)	Terlaksananya Program Penanganan Bencana	Persentase pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana	%	100	100	100	100,00%	100,00%	99,50%	100,00%	9.820.851.415	9.820.851.415	8.687.019.470	88,45%

Program	Sasaran Program	Indikator Program	Satuan	Target Tahun 2021	Kinerja Indikator Tahun 2021			Capaian Program	Rata-rata Capaian Kegiatan	Rata-rata Capaian Subkegiatan	Anggaran Tahun 2021	Anggaran Perubahan Tahun 2021	Realisasi	Serapan (%)
					Target	Realisasi	Capaian							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Program Rehabilitasi Sosial (B)	Terlaksananya Program Rehabilitasi Sosial Tingkat Kota	Persentase pemenuhan kebutuhan dasar PMKS di luar fakir miskin, korban bencana, HIV/AIDS, dan NAPZA di luar panti	%	100	100	109	109,00%	100,00%	91,67%	100,00%	28.508.880.825	28.508.880.825	27.868.738.860	97,75%
Program Perlindungan dan Jaminan Sosial (B)	Terlaksananya Program Perlindungan dan Jaminan Sosial Tingkat Kota	Persentase DTKS yang terverifikasi dan tervalidasi	%	100	100	100	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	47.222.499.644	47.222.499.644	46.952.845.451	99,43%
Program Penanganan Bencana (B)	Terlaksananya Program Penanganan Bencana Tingkat Kota	Persentase penyediaan penyelenggara kesiapsiagaan bencana	%	100	100	99,5	99,50%	99,50%	95,00%	96,81%	20.613.027.062	20.613.027.062	18.583.694.593	90,16%

Sumber: e-SAKIP dan e-Monev 2021, diolah

Keterangan warna capaian kinerja dan serapan anggaran:

	: Mencapai Target ($\geq 100,00\%$)		: Sedang ($66,00\% \leq x < 75,00\%$)
	: Sangat Tinggi (Capaian Kinerja: $91,00\% \leq x < 100,00\%$; Serapan Anggaran: $91,00\% \leq x < 100,00\%$)		: Rendah ($51,00\% \leq x < 65,00\%$)
	: Tinggi ($76,00\% \leq x < 90,00\%$)		: Sangat Rendah ($\leq 50,00\%$)

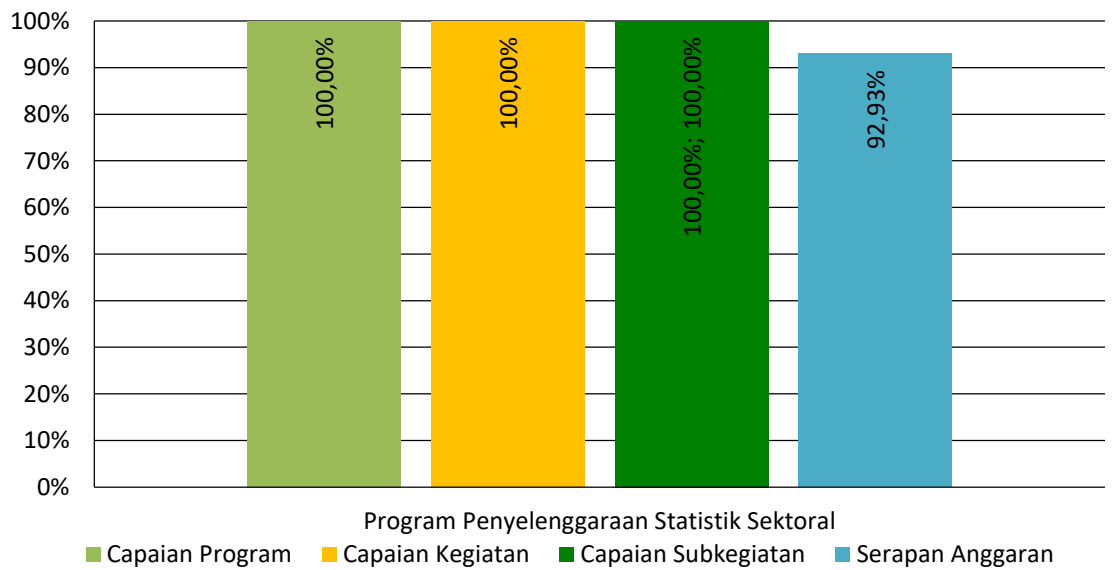
Statistik

Pada Tahun 2021, Urusan Pemerintahan Bidang Statistik memiliki 1 program dengan total anggaran program sebesar Rp.12.061.778.100 dan serapan anggaran program sampai dengan bulan Desember Tahun 2021 sebesar Rp11.209.040.000 (92,93% dari total pagu). Perangkat Daerah

yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Statistik adalah Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik. Informasi mengenai capaian program/kegiatan/-subkegiatan dan serapan anggaran dijabarkan pada Gambar 2.104 sebagai berikut.

GAMBAR 2.104

Capaian Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Serapan Anggaran Urusan Pemerintahan Bidang Statistik Triwulan IV Tahun 2021



Sumber: e-SAKIP dan e-Monev 2021, diolah

Berdasarkan Gambar 2.104, terlihat bahwa capaian program, rata-rata capaian kegiatan dan rata-rata capaian subkegiatan mencapai target dan dengan serapan di atas 80%. Secara umum dapat dikatakan program tersebut dalam kondisi ideal dimana capaian

antar level seimbang. Data detail terkait capaian kinerja indikator program/kegiatan/-subkegiatan dan serapan anggaran Urusan Pemerintahan Bidang Statistik dapat dilihat pada Tabel 2.47 sebagai berikut.







TABEL 2.47

Capaian Kinerja dan Serapan Anggaran Program Urusan Pemerintahan Bidang Statistik Triwulan IV Tahun 2021 pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik

Program	Sasaran Program	Indikator Program	Satuan	Target Tahun 2021	Kinerja Indikator Tahun 2021			Capaian Program	Rata-rata Capaian Kegiatan	Rata-rata Capaian Subkegiatan	Anggaran Tahun 2021	Anggaran Perubahan Tahun 2021	Realisasi	Serapan (%)
					Target	Realisasi	Capaian							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Meningkatnya optimalisasi penggunaan data statistik sebagai basis pengambilan kebijakan	Persentase perangkat daerah yang menggunakan data statistik dalam proses pengambilan kebijakan	%	100	100,00	100,00	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	12.108.600.600	12.061.778.100	11.209.040.000	92,93%

Sumber: e-SAKIP dan e-Monev 2021, diolah

Keterangan warna capaian kinerja dan serapan anggaran:

	: Mencapai Target ($\geq 100,00\%$)		: Sedang ($66,00\% \leq x < 75,00\%$)
	: Sangat Tinggi (Capaian Kinerja: $91,00\% \leq x < 100,00\%$; Serapan Anggaran: $91,00\% \leq x < 100,00\%$)		: Rendah ($51,00\% \leq x < 65,00\%$)
	: Tinggi ($76,00\% \leq x < 90,00\%$)		: Sangat Rendah ($\leq 50,00\%$)

Berdasarkan hasil evaluasi RKPD Triwulan IV Tahun 2021, disimpulkan beberapa hal sebagai berikut.

1. Pada pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan penyusunan RKPD Tahun 2022, seluruh kegiatan untuk pengendalian dan evaluasi perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah Provinsi DKI Jakarta, dalam hal ini adalah RKPD Tahun 2022, sudah dilaksanakan. Secara substansi dan tahapan yang telah dilaksanakan, dokumen RKPD Tahun 2022 telah memenuhi ketentuan yang ada di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.
2. Pada level tujuan dan sasaran RPJMD, belum seluruh indikator tujuan maupun sasaran yang datanya sudah rilis pertanggal 8 Januari 2022. Berdasarkan data pengukuran IKU sasaran strategis terdapat 28 IKU yang datanya sudah rilis dan 10 IKU datanya belum rilis. Berdasarkan perbandingan realisasi tahun 2021 dan tahun 2020 terjadi peningkatan realisasi.
3. Berdasarkan data capaian tahun 2021, pada level tujuan dan sasaran, terdapat 8 tujuan/sasaran yang tidak mencapai target pada tahun 2021, antara lain:
 - a. Indeks Pembangunan Manusia: target pada tahun 2021 yaitu 81,2 dan realisasi 81,11 sehingga terdapat gap sebesar 0,09 dengan capaian 99,89% (sangat tinggi). Meskipun tidak mencapai target, akan tetapi apabila dibandingkan dengan seluruh provinsi di Indonesia, IPM DKI Jakarta merupakan yang tertinggi
 - b. Pengeluaran per Kapita Disesuaikan: Target 18.527 ribu rupiah dengan realisasi 18.520 ribu rupiah sehingga gap sebesar hanya 7 ribu rupiah. Meskipun tidak mencapai target akan tetapi capaian indikator tersebut masih masuk dalam kategori sangat tinggi
 - c. Cakupan Air Limbah: Target 19,99% dengan realisasi 18,19% sehingga gap antara target dan realisasi hanya 1,80% dan capaiannya masih masuk dalam kategori sangat tinggi
 - d. Persentase perjalanan penduduk menggunakan sarana kendaraan bermotor umum (public transportation modal share): Gap antara target dan realisasi hanya 0,24%. Penyebab ketidaktercapaian karena masih terjadinya pembatasan kapasitas angkutan umum karena PPKM yang terjadi
 - e. Tingkat penurunan permukaan tanah (land subsidence): Target sebesar 15% dengan realisasi 14,76% sehingga gap antara target dan realisasi sebesar 0,004% dengan capaian 98,40% (kategori capaian sangat tinggi).
 - f. Jumlah kawasan permukiman kumuh: Ditargetkan tersisa 77 RW kumuh akan tetapi realisasi tersisa 81 RW kumuh sehingga capaiannya 94,81% (sangat tinggi). Penyebab tidak tercapainya target dikarenakan kondisi kepemilikan lahan yang akan dilakukan CIP bukan di lahan milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
 - g. Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD: Target 11,99% dan realisasi sebesar 8,91% sehingga gap antara target dan realisasi cukup besar yaitu 3,08%. Capaian IKU tersebut sebesar 68,91% sehingga capaiannya masuk dalam kategori sedang. Penyebab ketidaktercapaian karena belum pulihnya industri/aktivitas pariwisata di Pemprov DKI Jakarta pada tahun 2021
 - h. Jumlah Wisatawan: Target sebesar 7.750.104 dengan realisasi 5.621.336 sehingga gap antara target dan realisasi yaitu sebanyak 2.128.768 juta wisatawan dengan capaian hanya 72,53% (kategori sedang)
4. Dari data realisasi capaian tujuan dan sasaran, juga dapat diketahui bahwa sebanyak 16 indikator tujuan dan/atau sasaran yang realisasi tahun 2021 telah melampaui target kinerja tahun 2022, yaitu:
 - a. Indeks Risiko Bencana
 - b. Jumlah daya penyediaan energi dan ketenagalistrikan yang berkelanjutan
 - c. Harapan Lama Sekolah
 - d. Indeks kepuasan masyarakat

- e. Angka Harapan Hidup
 - f. Opini laporan keuangan daerah
 - g. Cakupan Pelayanan Air Bersih
 - h. Indeks kualitas lingkungan hidup
 - i. Tingkat Pengangguran Terbuka
 - j. Tingkat penurunan permukaan tanah (land subsidence)
 - k. Jumlah Peningkatan Pelaku Kewirausahaan
 - l. Tingkat nilai pilar kapasitas inovasi
 - m. Indeks Ketahanan Pangan
 - n. Tingkat nilai dimensi interaksi dan keberagaman
 - o. Persentase penurunan pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana
 - p. Indeks pelestarian warisan budaya
5. Pada program pembangunan daerah yang disusun dalam Program Panca Upaya Pembangunan Jakarta, dapat diketahui capaian kinerja outcome tahun 2021, antara lain:
- a. Pembangunan Manusia: 88,89% program mencapai target dan hanya 1 (satu) program yang kinerjanya sangat rendah yaitu program pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan. Penyebab ketidaktercapaian karena program tersebut membutuhkan keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaannya sehingga pada tahun 2021 dimasa pandemi masih terjadi, program tidak dapat dilaksanakan secara optimal;
 - b. Pembangunan Ekonomi dan Infrastruktur: 85,29% program mencapai target dan hanya terdapat 1 (satu) program yang capaiannya masuk kategori rendah, yaitu program perekonomian dan pembangunan dengan penanggungjawab program yaitu BPBUMD. Rendahnya capaian tersebut karena kinerja BPBUMD terdampak pandemi yang terjadi pada triwulan I dan II;
 - c. Peningkatan Integritas Aparatur: 92,44% program mencapai target dan sisanya masuk dalam kategori program sangat tinggi dan tinggi.
 - d. Kota Lestari: 87,5% program mencapai target dan 12,5% program dengan
- capaian sangat tinggi sehingga pencapaian outcome dapat dikatakan cukup optimal. Sementara itu, tingginya pencapaian program juga dipengaruhi oleh karakteristik program pada panca upaya utama kota lestari yang kinerjanya tidak dipengaruhi oleh kondisi pandemi yang masih terjadi pada tahun 2021;
- e. Simpul Kemajuan: 100% program mencapai target, dapat dikatakan kinerja outcome cukup optimal sehingga ukuran keberhasilan yang ditetapkan dapat tercapai. Apabila dihubungkan dengan kondisi pandemi covid-19 yang terjadi pada tahun 2021, sebagian besar program tidak dipengaruhi kondisi pandemi kecuali program pembinaan perpustakaan dengan indikator program rasio pengunjung perpustakaan. Akan tetapi kinerjanya tetap dapat tercapai dengan optimal.
6. Pada tahun 2021, terdapat 3 (tiga) program yang realisasinya cukup jauh di bawah target, antara lain:
- a. Program pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan: capaian program sangat rendah yaitu hanya 15,84%
 - b. Program perekonomian dan pembangunan: capaian program masuk kategori rendah yaitu hanya 60,40%
 - c. Program pengelolaan pendapatan daerah: capaian program masuk kategori sedang yaitu 65,18%
- Berdasarkan hasil evaluasi RKPD Triwulan IV Tahun 2021, rekomendasi yang dapat diberikan, antara lain:
- 1. Beberapa realisasi IKU tahun 2021 sudah melampaui target tahun 2022 sehingga untuk kondisi yang seperti ini agar continuous improvement dapat dilakukan, sebaiknya target kinerja dapat ditingkatkan antara lain melalui pengendalian pada proses perencanaan fase perubahan RKPD tahun berjalan dan fase RKPD tahun berikutnya;

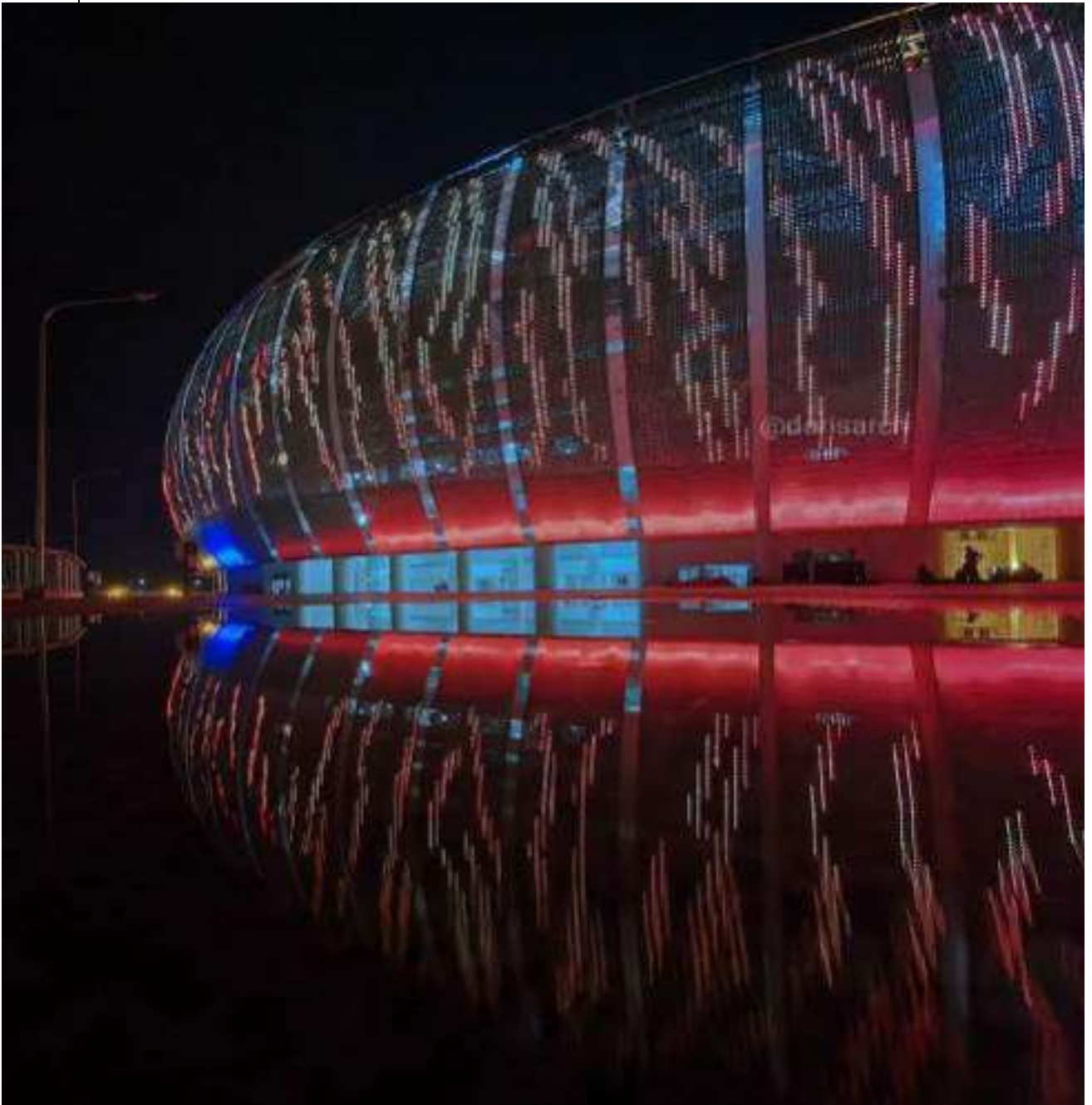
2. Apabila melihat data perbandingan capaian program, rata-rata capaian kegiatan dan rata-rata capaian subkegiatan maka sebagian besar hubungan kausalitas yang rendah pada level kegiatan. Banyak rata-rata capaian kegiatan yang tidak/belum seimbang antara capaian program, maupun subkegiatan sehingga diharapkan ke depannya kualitas indikator level kegiatan dapat ditingkatkan sehingga berkausalitas menunjang kinerja level outcome;
3. Proses perencanaan dan penganggaran seyogyanya mempertimbangkan serapan anggaran tahun sebelumnya, dikarenakan setelah Perubahan APBD Tahun 2021 anggaran yang sudah ditetapkan juga tidak dapat terserap optimal sementara kinerjanya dapat tercapai optimal. Untuk itu, perencanaan berbasis kinerja harus terus dijadikan prinsip penyusunan perencanaan agar sasaran yang ingin direncanakan dapat tercapai.

3

Kerangka Ekonomi dan Keuangan

Pada bagian ini memuat penjelasan tentang perekonomian daerah dan keuangan daerah, yang terdiri atas penjelasan mengenai kondisi ekonomi tahun lalu dan perkiraan tahun berjalan, yang antara mencakup indikator pertumbuhan ekonomi

daerah, sumber-sumber pendapatan dan kebijakan pemerintah daerah yang diperlukan dalam pembangunan perekonomian Daerah, yang terdiri dari pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.



3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Sub bab ini menerangkan tentang arahan nasional terkait kebijakan ekonomi yang bersumber dari dokumen rancangan awal RKP, RPJMN 2020-2024 serta kebijakan perekonomian daerah yang bersumber dari dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi DKI Jakarta. Arah kebijakan ekonomi daerah ditujukan untuk mengimplementasikan program prioritas nasional

serta sebagai payung untuk perumusan prioritas program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2023 yang merupakan tahun transisi. Untuk itu, pembangunan Provinsi DKI Jakarta tahun 2023 mengusung tema “**Pemulihan dan Transformasi Menuju Ekonomi Digital dalam Rangka Pemantapan Kota Global yang Berdaya Saing**”

Kondisi dan Proyeksi Perekonomian Global

Perbaikan ekonomi global terus berlanjut sepanjang tahun 2022, meski belum berjalan seimbang. Kecepatan tingkat perbaikan ekonomi suatu negara sangat dipengaruhi oleh tingkat vaksinasi untuk mencapai imunitas massal, besarnya stimulus kebijakan fiskal dan moneter, serta tingkat daya tahan ekonomi. Di negara – negara maju, pemulihan ekonomi berjalan lebih cepat, di dukung oleh stimulus fiskal dan moneter yang sangat besar. Stimulus pemerintah dan bank sentral dimaksud melalui program vaksinasi, bantuan sosial dan dunia usaha, serta penambahan likuiditas (*quantitative easing*) yang sangat besar melalui sistem keuangan. Sementara di sisi lain, sebagian besar negara *emerging market* dan negara berkembang, kecuali Tiongkok, masih harus berjuang memperbaiki kondisi ekonomi di dalam negerinya, menuju pemulihan ekonomi. Disamping pasokan dan kemampuan vaksinasi yang terbatas, keterbatasan kemampuan stimulus fiskal dan moneter juga menyebabkan lebih lambatnya proses pemulihan ekonomi. Sebagian besar *emerging market* dan negara berkembang mengalami keterbatasan untuk meningkatkan anggaran lebih besar, terutama karena penurunan penerimaan pajak yang disebabkan oleh merosotnya aktivitas dunia usaha, serta keterbatasan kemampuan berutang dalam rangka membiayai defisit fiskal yang lebih besar.

Sementara itu, efektivitas kebijakan moneter untuk mendorong perekonomian banyak terkendala karena tekanan inflasi yang tinggi

dan sektor keuangan yang juga terdampak pandemi. Pada tahun 2022 dan 2023, perekonomian dunia diperkirakan tumbuh lebih moderat yaitu sekitar 3,6% setelah tumbuh 6,1% pada 2021.

Pemulihan ekonomi telah terjadi di dua negara ekonomi terbesar dunia, yaitu Tiongkok dengan pertumbuhan 4,4% dan 5,1% pada 2022 dan 2023 setelah tumbuh 8,1% pada 2021, dan AS dengan pertumbuhan 3,7% dan 2,3% pada 2022 dan 2023 setelah tumbuh 5,7% pada 2021. Sementara itu, pemulihan ekonomi negara-negara lain diperkirakan terjadi pada tahun 2022 dengan perbaikan ekonomi yang terus berlanjut sejak tahun 2021. Di antara negara – negara maju, kawasan Eropa diperkirakan tumbuh 2,8% dan 2,3% pada 2022 dan 2023 setelah tumbuh 5,3% pada 2021, demikian pula Jepang akan tumbuh 2,4% dan 2,3% pada 2022 dan 2023 setelah tumbuh 1,6% pada 2021.

Di antara negara Asia, India diperkirakan tumbuh tinggi sekitar 8,2% dan 6,9% pada 2022 dan 2023 setelah tumbuh 8,9% pada 2021. Demikian pula ASEAN-5 akan tumbuh 5,3% dan 5,9% pada 2022 dan 2023 setelah tumbuh 3,4% pada 2021. Di antara negara eropa, Rusia diperkirakan akan mengalami kontraksi 8,5% dan 2,3% pada tahun 2022 dan 2023 setelah tumbuh 4,7% pada tahun 2021 hal tersebut terindikasi sebagai imbas dari konflik antara Rusia dan Ukraina.

Kenaikan volume perdagangan dunia dan harga komoditas juga terus berlanjut, sehingga menopang prospek ekspor dan pemulihan ekonomi di berbagai *emerging market* dan negara berkembang. Pertumbuhan volume perdagangan dunia dan harga komoditas yang mengalami kontraksi sebesar pada tahun 2020,

naik tajam pada tahun 2021. Pemulihan ekonomi dunia diperkirakan lebih kuat pada paruh kedua tahun 2022 serta tahun 2023 dan selanjutnya. Penjelasan lebih lanjut mengenai proyeksi ekonomi global dan proyeksi indikator perekonomian global dapat dilihat pada table di bawah ini.

TABEL 3.1

Pemulihan Ekonomi Global

	2020	2021	Projections	
			2022	2023
World Output	-3.1	6,1	3,6	3,6
Advanced Economies	-4.5	5,2	3,3	2,4
United States	-3.4	5,7	3,7	2,3
Euro Area	-6.4	5,3	2,8	2,3
Germany	-4.6	2,8	2,1	2,7
France	-8.0	7,0	2,9	1,4
Italy	-9.0	6,6	2,3	1,7
Spain	-10.8	5,1	4,8	3,3
Japan	-4.5	1,6	2,4	2,3
United Kingdom	-9.3	7,4	3,7	1,2
Canada	-5.2	4,6	3,9	2,8
Other Advanced Economies²	-1.8	5,0	3,1	3,0
Emerging Market and Developing Economies	-2.0	6,8	3,8	4,4
Emerging and Developing Asia	-0.8	7,3	5,4	5,6
China	2,2	8,1	4,4	5,1
India ³	-6.6	8,9	8,2	6,9
ASEAN-5 ⁴	-3.4	3,4	5,3	5,9
Emerging and Developing Europe	-1.8	6,7	-2,9	1,3
Russia	-2.7	4,7	-8,5	-2,3
Latin America and the Caribbean	-7.0	6,8	2,5	2,5
Brazil	-3.9	4,6	0,8	1,4
Mexico	-8.2	4,8	2,0	2,5
Middle East and Central Asia	-2.9	5,7	4,6	3,7
Saudi Arabia	-4.1	3,2	7,6	3,6
Sub-Saharan Africa	-1.7	4,5	3,8	4,0
Nigeria	-1.8	3,6	3,4	3,1
South Africa	-6.4	4,9	1,9	1,4
<i>Memorandum</i>				
World Growth Based on Market Exchange Rates	-3.5	5,8	3,5	3,1
European Union	-5.9	5,4	2,9	2,5
Middle East and North Africa	-3.3	5,8	5,0	3,6
Emerging Market and Middle-Income Economies	-2.2	7,0	3,8	4,3
Low-Income Developing Countries	0,2	4,0	4,6	5,4
World Trade Volume (goods and services)	-7.9	10,1	5,0	4,4
Imports				

	2020	2021	Projections	
			2022	2023
Advanced Economies	-8.7	9,5	6,1	4,5
Emerging Market and Developing Economies	-7.9	11,8	3,9	4,8
Exports				
Advanced Economies	-9.1	8,6	5,0	4,7
Emerging Market and Developing Economies	-4.8	12,3	4,1	3,6
Commodity Prices (US dollars)				
Oil ⁵	-32.7	67,3	54,7	-13.3
Nonfuel (average based on world commodity import weights)	6,8	26,8	11,4	-2.5
Consumer Prices				
Advanced Economies ⁶	0,7	3,1	5,7	2,5
Emerging Market and Developing Economies ⁷	5,2	5,9	8,7	6,5

Sumber : IMF, *World Economic Outlook*, April 2022

Pemerintah pada negara-negara maju, secara umum lebih mampu memberikan dukungan fiskal tambahan untuk rumah tangga dan perusahaan. Berbagai program seperti pinjaman, jaminan, fasilitas dana pinjaman, hingga penurunan nilai suku bunga dilakukan. *Gap* penurunan *output* pada negara-negara maju dibandingkan dengan masa sebelum pandemi covid-19 diperkirakan lebih kecil jika

dibandingkan dengan kondisi pada negara-negara lainnya. Pola pemulihan pada kelompok negara maju bervariasi tergantung pada bagaimana negara merespon pandemi ini, fleksibilitas dan kemampuan beradaptasi pada ekonomi dengan mobilitas rendah serta keluwesan struktur ekonomi dalam menghadapi krisis.

Emerging Market

Untuk negara berkembang, proses pemulihan juga diperkirakan bervariasi antara China dengan negara-negara lainnya. Kebijakan yang efektif dalam penanganan wabah, respon yang cepat terhadap investasi publik serta dukungan likuiditas dari Bank Sentral berperan penting dalam proses pemulihan. Namun bagi negara-negara eksportir minyak dan negara-negara

yang mengandalkan perekonomiannya pada sektor pariwisata akan mengalami proses pemulihan yang lebih lambat. Kerentanan, struktur ekonomi, tren pertumbuhan sebelum krisis, tingkat keparahan pandemi dan respon kebijakan dalam penanganan pandemi akan mempengaruhi pola pemulihan perekonomian.

Kondisi dan Proyeksi Perekonomian Nasional

Seiring dengan pemulihan ekonomi dunia, perbaikan ekonomi Indonesia terus berlanjut pada level 5,01 persen (yoy) pada triwulan I tahun 2022 di tengah perang Rusia - Ukraina. Pertumbuhan ini dorong oleh peningkatan konsumsi rumah tangga, investasi bangunan dan terjaganya kinerja ekspor seiring dengan peningkatan mobilitas masyarakat dan

permintaan mitra dagang utama yang masih kuat. Dari sisi pengeluaran, berlanjutnya pemulihan ditopang oleh konsumsi Rumah Tangga yang tumbuh sebesar 4.34 persen, konsumsi LNPRT yang tumbuh sebesar 5.98, Investasi PMTDB 4.09 serta ekspor dan impor dengan nilai masing-masing tumbuh sebesar 16.22 dan 15.03 persen.

TABEL 3.2.a

Komponen Pertumbuhan Ekonomi Sisi Pengeluaran (%yoy)

komponen	2020	2021				2021	2022
		I	II	III	IV		I
Konsumsi Rumah Tangga	-2.63	-2.21	5.69	1.02	3.55	2.02	4.34
Konsumsi LNPRT	-4.25	-3.69	3.99	2.79	3.29	1.59	5.98
Konsumsi Pemerintah	1.96	2.55	8.6	0.62	5.25	4.17	-7.74
Investasi (PMTDB)	-4.96	-0.21	7.52	3.76	4.49	3.8	4.09
Investasi Bangunan	-3.78	-0.74	4.36	3.36	2.48	2.32	-0.74
Investasi NonBangunan	-8.44	1.44	18.5	4.96	10.4	8.42	2.58
Ekspor	-8.14	6.94	31.5	29.16	29.83	24.04	16.22
Impor	-16.72	4.41	31.84	29.95	29.6	23.31	15.03
PDB	-2.07	0.7	7.07	3.51	5.02	3.69	5.01

Sumber : Bank Indonesia, "Laporan Perekonomian Provinsi DKI Jakarta", Mei 2022

TABEL 3.2.b

Komponen Pertumbuhan Ekonomi Sisi Lapangan Usaha

No.	Komponen	2020	2021				2021	2022
			I	II	III	IV		I
A.	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	0.49	-0.34	6.26	3.25	7.33	4.12	-0.16
B.	Pertambangan dan Penggalian	-6.43	-6.38	-2.15	-9.77	2.73	-4.06	0.45
C.	Industri Pengolahan	-10.34	-1.05	25.23	11.86	11.18	11.01	9.61
D.	Pengadaan Listrik dan Gas	-10.95	-6.88	-8.63	-13.61	-30.59	-16.3	-13.27
E.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	-2.68	2.77	10.07	1.33	2.53	4.07	-0.35
F.	Konstruksi	-5.55	-5.33	5.34	-1.4	2.53	0.09	0.75
G.	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	-7.04	-1.08	13.93	3.64	6.38	5.46	6.93
H.	Transportasi dan Pergudangan	-7.63	-0.49	41.44	7.79	9.56	12.77	3.45
I.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	-16.21	-10.44	45.24	6.78	7.12	8.99	6.15
J.	Informasi dan Komunikasi	11.05	7.84	2.52	2.7	5.74	4.65	6.14
K.	Jasa Keuangan dan Asuransi	4.38	-7.32	9.9	4.88	-4.99	0.14	0.58
L.	Real Estat	1.57	0.38	3.79	0.53	2.44	1.77	2.51
M, N.	Jasa Perusahaan	-2.07	-4.57	4.48	-1.99	1.62	-0.21	4.02
O.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	-5.71	-0.89	1.66	-6.68	-4.52	-2.56	-4.01
P.	Jasa Pendidikan	2.64	0.01	3.66	-1.71	1.55	0.84	0.16
Q.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	19.85	14.92	14.02	1.9	4.01	8.1	14.73
R, S, T, U.	Jasa Lainnya	-4.08	-9.59	5.32	-5.14	2.32	-1.9	13.3

Sumber : BPS. Berita Resmi Statistik. No. 14/02/Th. XXV. 7 Februari 2022

Kinerja perekonomian nasional juga dapat dilihat dari sisi pembiayaan. Dari sisi Lapangan Usaha (LU), hampir seluruh LU pada triwulan I 2022 menunjukkan pertumbuhan positif. Perbaikan kinerja LU terutama didorong oleh beberapa LU, seperti Industri Pengolahan, Perdagangan Besar dan Eceran, serta Transportasi dan Pergudangan, seiring dengan peningkatan mobilitas masyarakat yang terjadi di seluruh wilayah. Secara spasial, pertumbuhan ekonomi yang positif terjadi di seluruh wilayah Indonesia, dengan pertumbuhan tertinggi tercatat di wilayah Sulawesi-Maluku-Papua (Sulampua), diikuti Jawa, Sumatera, Bali-Nusa Tenggara (Balinusra), dan Kalimantan.

Kinerja perekonomian nasional diprakirakan semakin menguat pada tahun 2022 dengan target pertumbuhan pada sebesar 5,2 persen. Dengan tema pembangunan Nasional “Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural” maka pada tahun 2022 diharapkan pemulihan menjadi lebih kuat dan menjadi tahun terakhir defisit anggaran lebih besar dari 3% PDB, lebih responsif, antisipatif dan fleksibel dengan tingkat pendapatan tumbuh positif seiring dengan pemulihan ekonomi dan penguatan reformasi perpajakan, melanjutkan penanganan pandemic Covid – 19 dan mendukung pemulihan serta pembiayaan yang efisien dan inovatif.

TABEL 3.3

Realisasi dan Proyeksi Ekonomi Makro Nasional

INDIKATOR	Realisasi		Proyeksi	
	2020	2021	2022	2023
Pertumbuhan Ekonomi (% . yoy)	-2.07*	3,69*	5.2 – 5.8**	5,3-5,9***
Inflasi (% . yoy)	1.68	1,87	3.0±1**	3.0±1****
Nilai tukar (Rp/US\$)	14.525	14.269	14.350**	N/A

Sumber : *) Badan Pusat Statistik, 2022

**) APBN 2022

***) BAPPENAS

****) Bank Indonesia, 2022

Namun demikian, resiko eksternal dan domestik perlu terus diantisipasi mengingat gangguan rantai pasok sebagai dampak perang Rusia – Ukraina yang menyebabkan kenaikan harga energi dan pangan. Kemunculan varian baru seiring divergensi cakupan vaksinasi nasional juga menjadi faktor yang perlu untuk diwaspadai.

Adapun fokus kebijakan fiskal tahun 2022 berdasarkan Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok – pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2022 adalah untuk percepatan pemulihan, program vaksinasi, keberlanjutan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) serta transformasi melalui reformasi.

Program PEN berhasil memberikan bantalan pemulihan perekonomian nasional hal ini dapat dilihat dengan kontraksi Perekonomian Nasional yang relatif lebih moderat dibandingkan dengan negara negara lainnya pada tahun 2020. Pada tahun 2021,

perekonomian nasional mampu tumbuh positif 3,7 persen dimana semua komponen pertumbuhan, baik sisi pengeluaran maupun sisi produksi, telah mampu tumbuh positif di tahun 2021.

Pada tahun 2022, Pemerintah tetap melanjutkan Program PEN yang diarahkan untuk *jobs-stimulating recovery* dalam *memitigasi dampak scarring effect* dan menciptakan pemulihan ekonomi inklusif. Berbeda dengan PEN 2020 - 2021 yang menitikberatkan pada penanganan kesehatan dan perlindungan sosial, alokasi program PEN 2022 difokuskan pada penciptaan lapangan kerja dan pemberdayaan masyarakat.

Alokasi program PEN 2022 sebesar Rp 455,62 triliun mencakup 3 klaster yaitu Klaster Kesehatan, Klaster Perlindungan Masyarakat dan Klaster Penguatan Pemulihan Ekonomi. Klaster Kesehatan difokuskan antara lain untuk diagnostik, biaya klaim pasien dan

insentif/santunan nakes, vaksinasi mencapai target 100 persen, dan insentif perpajakan. Kluster Perlindungan Masyarakat terdiri dari antara lain untuk PKH, Kartu Sembako, BLT Desa, Program Kartu Prakerja, serta Bantuan PKL, Warung, dan Nelayan. Terakhir, kluster

Penguatan Pemulihan Ekonomi difokuskan pada penciptaan lapangan kerja serta peningkatan produktivitas dalam bentuk program K/L pada sektor tertentu serta berbagai dukungan pada dunia usaha (pembiayaan dan insentif perpajakan).

Kondisi dan Proyeksi Perekonomian Daerah

Kondisi 2021

Seiring dengan proses pemulihan perekonomian nasional, pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta pada triwulan I Tahun 2022 tumbuh sebesar 4,63 persen (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya 3,64 persen (yoy). Perbaikan pertumbuhan ekonomi pada

triwulan I Tahun 2022 didukung oleh konsumsi rumah tangga, Investasi, Konsumsi Net Ekspor, dan konsumsi LNPRT. Sementara konsumsi pemerintah memberikan kontribusi negatif, berasal dari masih rendahnya realisasi belanja APBD.

TABEL 3.4

Perkembangan PDRB Provinsi DKI Jakarta dari Sisi Permintaan (%yoy)

komponen	2020	2021				2021	2022
		I	II	III	IV		
Konsumsi Rumah Tangga	-2.23	-1.51	8.34	4.43	3.65	3.63	4.2
Konsumsi LNPRT	-4.06	-4.49	2.18	0.43	2.08	0.06	5.92
Konsumsi Pemerintah	14.18	21.14	21.92	6.88	-2.07	9.73	-15.52
Investasi (PMTDB)	-6.98	5.52	1.26	5.15	1.09	1.09	4.94
Ekspor	-9.62	-10.33	23.33	19.57	11.26	11.26	8.24
Impor	-10.8	-5.74	22.95	18.55	12.45	12.45	5.57
PDB	-2.39	1.94	10.93	2.43	3.56	3.56	4.63

Sumber: Laporan Perekonomian DKI Jakarta, Bank Indonesia Mei 2022

Konsumsi Rumah Tangga pada triwulan I Tahun 2022 tumbuh sebesar 4,20 persen, pertumbuhan meningkat jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yaitu sebesar 3,65 persen. Pertumbuhan konsumsi rumah tangga yang meningkat pada triwulan I Tahun 2022 tercermin dari indeks keyakinan konsumen yang mencapai level optimis walaupun varian Omicron sempat melonjak di awal tahun. Konsumsi LNPRT tumbuh sebesar 1,86 persen. Konsumsi Pemerintah mengalami pertumbuhan

negatif yaitu -1,72 persen. Hal ini seiring masih rendahnya realisasi belanja APBN dan APBD di DKI Jakarta. Sementara itu, investasi Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) tumbuh melambat yaitu sebesar 4,94 persen dibandingkan triwulan sebelumnya. Perlambatan ini berasal dari perlambatan pertumbuhan investasi bangunan dan non-bangunan. Ekspor dan impor masing-masing tumbuh sebesar 8,24 persen dan -3,46 persen.

TABEL 3.5

Perkembangan PDRB Provinsi DKI Jakarta Dari Sisi Lapangan Usaha

No.	Komponen	2020	2021				2021	2022
			I	II	III	IV		
A.	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	0.49	-0.34	6.26	3.25	7.33	4.12	-0.16
B.	Pertambangan dan Penggalian	-6.43	-6.38	-2.15	-9.77	2.73	-4.06	0.45
C.	Industri Pengolahan	-10.34	-1.05	25.23	11.86	11.18	11.01	9.61
D.	Pengadaan Listrik dan Gas	-10.95	-6.88	-8.63	-13.61	-30.59	-16.3	-13.27

No.	Komponen	2020	2021					2022	
			I	II	III	IV	2021	I	
E.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	-2.68	2.77	10.07	1.33	2.53	4.07	-0.35	
F.	Konstruksi	-5.55	-5.33	5.34	-1.4	2.53	0.09	0.75	
G.	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	-7.04	-1.08	13.93	3.64	6.38	5.46	6.93	
H.	Trasnportasi dan Pergudangan	-7.63	-0.49	41.44	7.79	9.56	12.77	3.45	
I.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	-16.21	-10.44	45.24	6.78	7.12	8.99	6.15	
J.	Informasi dan Komunikasi	11.05	7.84	2.52	2.7	5.74	4.65	6.14	
K.	Jasa Keuangan dan Asuransi	4.38	-7.32	9.9	4.88	-4.99	0.14	0.58	
L.	Real Estat	1.57	0.38	3.79	0.53	2.44	1.77	2.51	
M, N.	Jasa Perusahaan	-2.07	-4.57	4.48	-1.99	1.62	-0.21	4.02	
O.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	-5.71	-0.89	1.66	-6.68	-4.52	-2.56	-4.01	
P.	Jasa Pendidikan	2.64	0.01	3.66	-1.71	1.55	0.84	0.16	
Q.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	19.85	14.92	14.02	1.9	4.01	8.1	14.73	
R, S, T, U.	Jasa Lainnya	-4.08	-9.59	5.32	-5.14	2.32	-1.9	13.3	

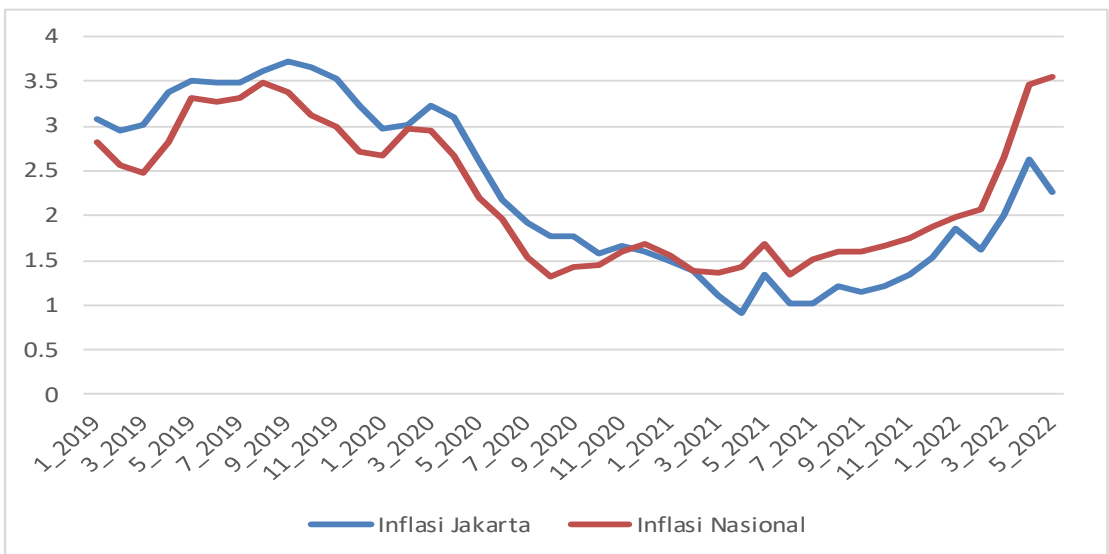
Sumber: Berita Resmi Statistik, BPS Jakarta, 2020-022, diolah

Pada sisi Lapangan Usaha, yang paling besar pertumbuhannya adalah Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial tumbuh sebesar 14,73 persen, Industri Pengolahan tumbuh sebesar 9,61 persen, Perdagangan Besar dan Eceran tumbuh sebesar 6,93 persen, dan jasa lainnya

sebesar 13,30 persen. Sementara sektor yang mengalami kontraksi diantaranya pengadaan listrik dan gas -13,27 persen dan administrasi pemerintahan, pertahanan, jaminan sosial wajib -4,01 persen.

GAMBAR 3.1

Perkembangan Inflasi Jakarta dan Nasional (2019-2022)



Sumber: Berita Resmi Statistik, BPS Jakarta, 2019-2022, diolah

Untuk pertama kalinya, sejak Tahun 2019, Inflasi Jakarta menunjukkan perbedaan arah tren jika dibandingkan dengan Nasional. Pada Mei 2022, Jakarta mengalami deflasi sebesar 0.36 persen dari 2.63 persen (yoy) pada April 2022 menjadi 2.27 persen (yoy). Namun demikian, angka ini semakin mendekati angka inflasi sebelum pandemic. Sementara inflasi nasional meningkat dari 3.47 persen (yoy) pada

April 2022 menjadi 3.55 persen (yoy) pada Mei 2022. Angka inflasi nasional telah melewati angka sebelum pandemi. Terjadinya deflasi dipicu oleh menurunnya harga untuk kelompok Makanan, minuman dan tembakau serta kelompok Pakaian dan Alas Kaki. Adapun inflasi rendah terjadi untuk kelompok kesehatan, perawatan pribadi dan jasa lainnya.

GAMBAR 3.2

Perkembangan Nilai Tukar Rupiah terhadap USD. 1 Januari 2021 – 31 Desember 2021



Sumber: Bank Indonesia. 2022

Proyeksi Tahun 2022 s.d 2026

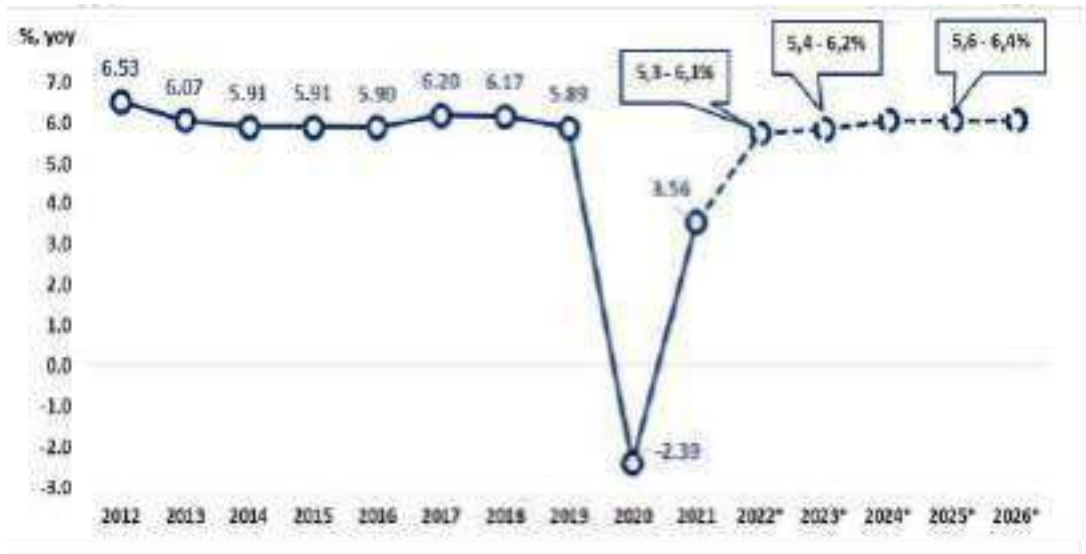
Proses pemulihan ekonomi DKI Jakarta pada 2022 diprakirakan berlanjut meski peningkatan kasus COVID-19 varian Omicron perlu diwaspadai. Pada tahun 2023 perekonomian diperkirakan berada di kisaran 5,4- 6,2% (yoy). Sementara pada 2024 – 2026 dengan asumsi tidak terjadi shock signifikan pada perekonomian DKI Jakarta, pertumbuhan diperkirakan akan berada pada kisaran baseline sebesar 5,6% - 6,4%.

Hal ini turut didukung oleh beberapa faktor antara lain membaiknya perekonomian dunia dan domestik dukungan penyediaan vaksin Covid-19 dan peningkatan pembangunan infrastruktur strategis di Jakarta.

Pemulihan ekonomi diperkirakan akan ditopang oleh pemulihan konsumsi masyarakat sejalan dengan peningkatan mobilitas, perbaikan pendapatan, dan ekspektasi konsumen yang membaik. Selain itu peningkatan pertumbuhan ekonomi negara mitra dagang utama juga diperkirakan mendukung perbaikan ekspor Jakarta. Pemulihan ekspor Jakarta terindikasi dari kinerja ekspor beberapa komoditas utama Jakarta yang membaik. Kegiatan investasi juga diperkirakan meningkat seiring berlanjutnya pembangunan proyek infrastruktur strategis dan peningkatan konsumsi masyarakat yang mendorong meningkatnya kapasitas produksi dan implementasi UU Cipta Kerja.

GAMBAR 3.3

Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Jakarta Tahun 2021-2023



Sumber: Bank Indonesia, 2022

Percepatan pemulihan ekonomi Jakarta perlu memperhatikan sektor yang berdampak tinggi di tengah tingkat penularan pandemi. Dengan mempertimbangkan dampak ekonomi dan risiko penularan pandemi secara sektoral.

beberapa sektor perlu didorong untuk mempercepat pemulihan ekonomi. Keberhasilan upaya pemulihan sektor potensial tersebut membutuhkan sinergi dan kolaborasi dari semua pihak.

TABEL 3.6

Faktor Risiko Perekonomian Jakarta

Jenis Resiko	Jalur Transmisi	Probabilitas	Keterangan
Pertumbuhan Ekonomi			
Progres vaksinasi terhambat karena keterlambatan pasokan vaksin	Aktivitas ekonomi terhambat	Moderat	Menahan pertumbuhan ekonomi
Kasus Covid-19 varian Omicron berlanjut	Aktivitas ekonomi terhambat	Moderat	Menahan pertumbuhan ekonomi
Pengetatan level PPKM pada bulan ramadhan dan HBKN	Aktivitas ekonomi terbatas	High	Pertumbuhan ekonomi stagnan
Inflasi			
Meningkatnya permintaan pada bulan ramadhan dan HBKN	Peningkatan aktivitas konsumsi	High	Meningkatnya tekanan inflasi
Berlanjutnya kenaikan harga komoditas global	Kelangkaan pasokan pangan impor dan kenaikan harga domestik	High	Meningkatnya tekanan inflasi
Meningkatnya tensi geopolitik akibat perang Rusia-Ukraina	Kelangkaan pasokan pangan impor	High	Meningkatnya tekanan inflasi

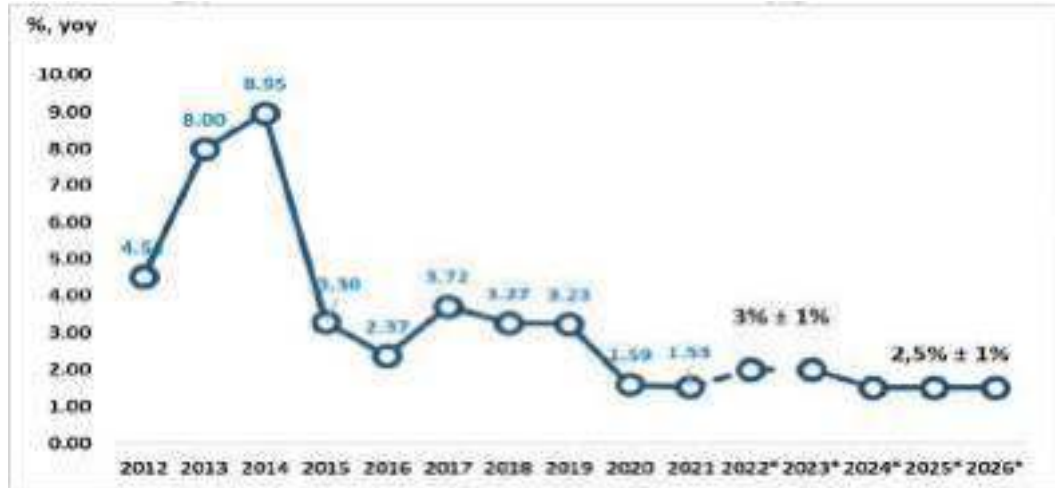
Sumber: Bank Indonesia, "Laporan Perekonomian Provinsi DKI Jakarta", Mei 2022

Berdasarkan pantauan terhadap berbagai faktor, baik kondisi ekonomi global maupun nasional, serta seiring dengan pemulihan perekonomian secara global, inflasi DKI Jakarta pada tahun 2022 s.d 2026 diperkirakan inflasi

meningkat namun terjaga pada level dalam kisaran 3.0%±1% (yoy) sampai dengan tahun 2023 dan pada level 2.5%± 1% pada tahun 2024 sampai dengan tahun 2026. Hal ini masih sejalan dengan sasaran inflasi nasional.

GAMBAR 3.4

Proyeksi Inflasi Jakarta 2022-2026



Sumber: Bank Indonesia, 2022

TABEL 3.7

Realisasi dan Proyeksi Ekonomi Makro DKI Jakarta

No.	Uraian	Realisasi			Proyeksi	
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Pertumbuhan Ekonomi (persen)	5.89*	(2.36)*	3.56*	5.3 – 6.1**	5.4 – 6.3**
2	Inflasi (persen)	3.23	1.59	1.53	3 ± 1**	3 ± 1**

Sumber : *BPS Provinsi DKI Jakarta .2019 dan 2021, **Bank Indonesia. 2022

3.1 Kerangka Keuangan Daerah

Dalam rangka mendukung pemulihan ekonomi Jakarta, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan insentif fiskal berupa kemudahan pembayaran pajak bagi warga DKI Jakarta. Hal ini tertuang dalam Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2022 tentang kebijakan Penetapan dan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan sebagai Upaya Pemulihan Ekonomi Tahun 2022.

Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada fase RKPD merencanakan Pendapatan Daerah sebesar 77,45 triliun rupiah pada tahun 2023. Angka ini lebih tinggi dibandingkan angka pendapatan pada APBD Penetapan tahun 2022.

Demikian pula dari sisi Belanja Daerah. Seiring dengan peningkatan pendapatan maka Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, pada fase RKPD, merencanakan akan menambah Belanja Daerah. Peningkatan Belanja dilakukan melalui pos-pos Belanja Barang Jasa dan Modal, Belanja Bunga, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial serta Belanja Tidak terduga (BTT).

Dengan menganut prinsip anggaran berimbang, maka Penerimaan Pembiayaan direncanakan sebesar 8,12 triliun. Demikian pula dengan Pengeluaran Pembiayaan yang direncanakan sebesar sebesar 8,19 triliun.

TABEL 3.8

Rencana Ringkasan APBD dalam RKPD Tahun 2023

NO	URAIAN	REALISASI APBD 2021	APBD 2022	APBD 2023 (RANCANGAN RKPD)
1	PENDAPATAN	65.567.009.199.000	77.448.713.889.500	77.449.125.299.092
1.01	Pendapatan Asli Daerah	41.606.307.405.630	55.658.635.618.592	57.239.283.758.676
1.02	Pendapatan Transfer	22.673.794.344.052	16.882.866.000.000	16.934.958.081.980
1.03	Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah	1.286.907.449.318	4.907.212.270.908	3.274.883.458.436
2	BELANJA	61.618.639.920.402	75.757.234.798.334	77.378.554.819.207
2.01	Belanja Pegawai	18.816.237.919.714	19.331.080.357.111	21.106.808.149.034
2.02	Belanja Barang Jasa & Modal	28.354.090.364.304	38.243.039.112.478	37.530.541.003.969
2.03	Belanja Bunga	86.116.019.366	789.540.302.919	258.000.000.000
2.04	Belanja Subsidi	4.355.291.571.465	5.596.362.775.262	7.269.323.930.642
2.05	Belanja Hibah	2.651.074.469.075	2.976.027.925.699	2.311.299.363.766
2.06	Belanja Bantuan Sosial	6.528.360.208.967	5.194.947.290.736	5.349.862.690.366
2.07	Belanja Tidak Terduga	439.889.457.199	3.146.481.644.879	3.196.273.200.930
2.08	Belanja Transfer	387.579.910.312	479.755.389.250	356.446.480.500
3	PEMBIAYAAN			
3.01	Penerimaan Pembiayaan	11.910.025.426.923	5.022.420.964.799	8.126.412.043.051
	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)	5.165.696.290.359	4.035.856.630.001	6.703.735.078.349
	Penerimaan Pinjaman Daerah	6.744.329.136.564	986.564.334.798	1.422.676.964.702
3.02	Pengeluaran Pembiayaan	6.140.446.854.085	6.713.900.055.965	8.196.982.522.936
	Penyertaan Modal Daerah	5.906.817.230.655	5.535.964.934.677	6.238.693.693.138
	Pembayaran Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat-Penerusan Pinjaman LN-Jangka Panjang	33.629.623.430	927.935.121.288	1.782.271.240.223
	Pemberian Pinjaman Daerah (DP Nol)	200.000.000.000	250.000.000.000	176.017.589.575
TOTAL APBD		77.477.034.625.923	82.471.134.854.299	85.575.537.342.143

Kebijakan Pendapatan Daerah

Kebijakan pendapatan daerah meliputi kebijakan pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, lain lain pendapatan asli daerah yang sah, dana perimbangan serta lain-lain Pendapatan

Kebijakan Pajak Daerah

1. Intensifikasi Pajak Daerah

- 1) Pengembangan Digitalisasi Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah
- 2) Pemutakhiran data melalui *fiscal cadaster* / sensus pajak daerah untuk pemetaan data potensi dan data intelijen pajak daerah
- 3) Penyempurnaan data subjek dan objek pajak daerah
- 4) Pemeriksaan terhadap Wajib Pajak *Self-Assessment* dengan menggunakan perhitungan data potensi dan data intelijen pajak daerah
- 5) Law enforcement / penegakan hukum dalam proses penagihan piutang dan cleansing data piutang pajak daerah
- 6) Perubahan Peraturan terkait Pajak Daerah:
 - a. Perubahan Peraturan Daerah terhadap Pajak Daerah
 1. Perubahan tarif melalui perubahan Peraturan Daerah terhadap jenis Pajak Penerangan Jalan (PPJ)
 2. Perubahan tariff melalui perubahan Peraturan Daerah terhadap jenis Pajak Parkir
 3. Perubahan Peraturan Daerah Pajak Reklame terhadap jenis reklame baru dan penyesuaian masa Pajak Reklame
 4. Perubahan Peraturan Daerah Ketentuan Umum Pajak Daerah terhadap transaksi online
 - b. Perubahan Peraturan Gubernur terhadap Pajak Daerah:
 1. Perubahan tarif Layanan Parkir *Off-Street* berdasarkan Zona

Daerah yang Sah. Pada tahun 2023 ditetapkan bahwa target pendapatan daerah adalah sebesar 110,2 Miliar, untuk mencapai hal tersebut terdapat beberapa komponen dalam pendapatan daerah, yaitu sebagai berikut.

- Waktu dan Zona Tempat melalui perubahan Peraturan Gubernur yang semula maksimal Rp5.000/jam menjadi maksimal Rp10.000/jam
2. Perubahan Peraturan Gubernur terhadap Pajak Reklame:
 - Penyesuaian Nilai Sewa Reklame (NSR) dan Kelas Jalan Reklame sebagai Dasar Pengenaan Pajak Reklame
 - Perluasan objek reklame dan perubahan Pergub Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Reklame atas pembatasan kawasan pengendalian reklame khususnya pada kawasan kendali ketat
 - Berkoordinasi dengan DPM-PTSP dalam kebijakan penyelenggaraan reklame Digital/LED pada kawasan kendali ketat
3. Penyesuaian Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) PBB-P2 mendekati harga pasar yang wajar
4. Penyesuaian Nilai Perolehan Air Tanah (NPAT) yang masuk dalam daerah jangkauan PAM serta perubahan tata cara perhitungan Pajak Air Tanah yang sebelumnya dikenakan secara progresif menjadi *clustering* tarif sebagai Dasar Pengenaan Pajak Air Tanah melalui perubahan Peraturan Gubernur
5. Penetapan Peraturan Gubernur yang mengatur tentang pengenaan tarif layanan parkir *offstreet* yang lebih tinggi

terhadap Kendaraan Bermotor
Belum Daftar Ulang (KBm BDU)

6. Penetapan Peraturan Gubernur yang mengatur tentang pelaporan data transaksi usaha (Hotel, Restoran, Hiburan, Parkir) secara elektronik
 7. Perubahan Peraturan Gubernur atas pembebasan BPHTB dengan NJOP sampai dengan Rp. 2 Miliar dengan pengecualian *strata title* yang dibangun bukan oleh Pemerintah Pusat/Daerah
- 7) Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan :
- a. Peningkatan SDM yang adaptif dan memiliki kapasitas digital
 - b. Peningkatan integritas SDM
 - c. Penambahan SDM pada JFU tertentu
 - d. Pembangunan, pembenahan, perluasan & sosialisasi pelayanan berbasis digital
- 8) Peningkatan koordinasi kelembagaan:
- a. Koordinasi dalam rangka pemungutan Pajak Daerah (*Tax Clearance*)
 - b. Koordinasi dalam rangka *Law Enforcement*
 - c. Koordinasi dalam rangka pendataan dan pengawasan penggunaan air tanah melalui penambahan SDM atas petugas catat meter air
 - d. Koordinasi dalam rangka Sosialisasi Pajak Daerah kepada Wajib Pajak
 - e. Koordinasi dalam rangka integrasi sistem basis data melalui Jakarta Satu (*One Map, One Data, One Policy*)
 - f. Koordinasi dalam rangka transformasi digital bekerjasama dengan Diskominfo melalui *mobile apps* Jaki (Jakarta Kini)

2. Ekstensifikasi Pajak Daerah

1) Asumsi dasar pertumbuhan makro ekonomi:

- a) Pertumbuhan kendaraan bermotor baru secara nasional rata-rata meningkat serta peningkatan share penjualan kendaraan bermotor baru di DKI Jakarta
- b) Peningkatan harga BBM
- c) Ekonomi nasional yang berangsur pulih dan mengalami pertumbuhan
- d) Pertumbuhan penjualan properti rata-rata meningkat
- e) Perkembangan kawasan Transit Oriented Development (TOD) di lintasan MRT dan LRT

2) Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor untuk kendaraan di atas air

3) Elektronifikasi pengelolaan pajak reklame yang terintegrasi dengan sistem pajak daerah (mendorong penyelenggaraan reklame oleh BUMD / Swasta melalui skema *Public Private Partnership*)

4) Penguatan wajib pajak baru berdasarkan pemutakhiran data melalui fiscal cadaster/ sensus pajak daerah, pendataan, dan startup

Kebijakan Retribusi Daerah

Retribusi Daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Beberapa hal yang mempengaruhi pemungutan Retribusi Daerah, sebagai berikut:

1. Beberapa kebijakan dalam rangka optimalisasi penerimaan Retribusi Daerah adalah:
 - a. Pengembangan aplikasi sistem pemungutan Retribusi Daerah secara elektronik.
 - b. Menerapkan *Banking System* dalam melakukan pembayaran Retribusi Daerah.
 - c. Menerapkan transaksi non tunai.
 - d. Memberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat atau wajib Retribusi Daerah melalui Retribusi Perizinan dan Non Perizinan, yang dilaksanakan melalui DPMPSTP.
 - e. Menerapkan sistem *e-ticketing* untuk menggantikan pelayanan retribusi daerah yang masih menggunakan karcis.
2. Beberapa kebijakan yang berpengaruh terhadap penurunan capaian terhadap penerimaan Retribusi Daerah adalah:
 - a. Adanya kebijakan Pemerintah yang menghapus beberapa jenis Retribusi Daerah, seperti Retribusi Izin Undang Undang Gangguan, Retribusi Pengukuran dan Pengujian Hasil Hutan dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.
 - b. Sarana dan prasarana pemungutan Retribusi Daerah yang sudah tidak layak digunakan, namun belum dilakukan perbaikan/ peremajaan.

Kebijakan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan merupakan penerimaan daerah yang berasal dari hasil perusahaan milik

daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, Penerimaan ini antara lain dari Bank Pembangunan Daerah, Perusahaan Daerah, deviden dan Penyertaan Modal Daerah kepada pihak ketiga, Untuk meningkatkan kinerja komponen pendapatan ini, dilakukan melalui langkah-langkah adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kemampuan manajemen pengelolaan bisnis BUMD yang dapat meningkatkan laba BUMD.
2. Menerapkan strategis bisnis yang tepat, serta meningkatkan sinergisitas antar BUMD untuk meningkatkan daya saing perusahaan.
3. Membuat surat penagihan deviden kepada BUMD.
4. Memperkuat struktur permodalan BUMD, antara lain melalui PMD, dan lain-lain.

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah merupakan penerimaan daerah yang berasal dari lain-lain milik Pemerintah Daerah, Penerimaan ini berasal dari hasil penjualan barang milik daerah, dan penerimaan jasa giro, Untuk meningkatkan kinerja Lain- lain Pendapatan Daerah Yang Sah, diperlukan suatu kebijakan Pemprov. DKI Jakarta sebagai berikut:

1. Mengimplementasikan hasil evaluasi terhadap perjanjian-perjanjian pemanfaatan aset daerah dengan pihak ketiga.
2. Mengoptimalkan pemanfaatan aset daerah yang berada di lahan-lahan yang strategis dan ekonomis melalui kerjasama dengan pihak ketiga.
3. Mengembangkan pengelolaan mitigasi fiskal daerah melalui *debt management*.
4. Mengoptimalkan pendapatan BLUD dengan penambahan dari RSUD Adhyaksa, RSUD Jati Padang dan RSUD Kebayoran

Baru, yang sedang dalam proses pembentukan menjadi PPK BLUD.

Kebijakan Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, meliputi transfer Pemerintah Pusat dan transfer antar daerah. Transfer Pemerintah Pusat terdiri dari dana perimbangan, dana insentif daerah, dana otonomi khusus, dana keistimewaan dan dana desa, sementara transfer antar daerah meliputi pendapatan bagi hasil dan bantuan keuangan.

Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, Kebijakan umum yang berkaitan dengan Dana Perimbangan difokuskan pada peningkatan perolehan Dana Perimbangan.

Setiap tahun Pemerintah bersama DPR melakukan pembahasan dan penetapan besaran alokasi TKDD per daerah. Penentuan alokasi TKDD yang akan diterima oleh setiap daerah ditentukan oleh 3 hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan Formula (By Formula)
Sebagian besar pengalokasian TKDD dilakukan berdasarkan formula. Untuk mendukung hal tersebut, diperlukan data dasar sebagai sumber/input untuk dilakukan perhitungan alokasi. Daerah tidak bisa melakukan pengurusan/lobi untuk menaikkan jumlah alokasi yang akan diterimanya. Daerah hanya bisa memastikan bahwa data yang ada sudah benar dan valid. Oleh sebab itu, diperlukan rekonsiliasi data khususnya dengan Badan Pusat Statistik (BPS) di daerah masing-masing, karena data yang biasa

digunakan dalam perhitungan berasal dari lembaga resmi yang ditunjuk pemerintah dalam mengeluarkan data. Jenis alokasi TKDD yang menggunakan formula antara lain: Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) kecuali yang berdasarkan usulan/proposal, Dana Desa.

2. Berdasarkan Daerah Penghasil (By Origin)
Daerah yang telah diberikan oleh Tuhan kekayaan alam berupa sumber daya alam maka daerah tersebut akan mendapatkan kembali dalam bentuk bagi hasil apabila ada penerimaan negaranya. Dana Bagi Hasil (DBH) diberikan kembali ke daerah penghasil dalam rangka mengatasi ketimpangan vertikal (*vertical imbalance*) karena daerah penghasil mendapatkan eksternalitas sebagai dampak dari eksploitasi sumber daya alam tersebut. Daerah yang tidak memiliki sumber daya alam akan diberikan oleh pemerintah dalam bentuk DAU yang mana berfungsi sebagai *horizontal imbalance*.

3. Berdasarkan Kinerja (By Performance)
TKDD yang alokasinya ke daerah berdasarkan performance atau kinerja adalah Dana Insentif Daerah (DID). Setiap daerah memiliki kesempatan yang sama dan berupaya untuk mendapatkan insentif ini sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan. Daerah dengan kinerja yang baik, salah satunya terkait pengelolaan keuangannya maka akan mendapatkan insentif dalam bentuk alokasi dana, sebaliknya daerah yang kinerja kurang baik maka tidak akan mendapatkannya.

Selain ketiga hal tersebut diatas, ada beberapa daerah yang menerima alokasi TKDD karena adanya peraturan perundang-

undangan yang mengamanatkannya. Dana Otonomi Khusus (Dana Otsus) diberikan kepada Provinsi Aceh sebagai amanat dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 serta Provinsi Papua dan Papua Barat sebagai amanat dari Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001. Dana Keistimewaan (Dais) diberikan kepada Provinsi D.I. Yogyakarta berdasarkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012. Hal-hal tersebut diatas yang dapat menentukan besar kecilnya alokasi TKDD yang akan diterima oleh daerah.

Strategi Pendapatan Transfer

Strategi umum yang berkaitan dengan Pendapatan Transfer difokuskan pada perolehan alokasi dan pengelolaan Pendapatan Transfer. Dalam hal ini, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dalam pengalokasian dan pengelolaan Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Non Fisik dan Dana Insentif Daerah.

Untuk meningkatkan perolehan pendapatan transfer khususnya Dana Bagi Hasil (DBH) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bekerjasama dengan Kementerian Keuangan Republik Indonesia melakukan intensifikasi pemungutan PPh orang pribadi dan menjangring wajib pajak baru. Sedangkan untuk mengoptimalkan perolehan alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Non Fisik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berkoordinasi secara intens dengan Kementerian terkait dalam memenuhi persyaratan alokasi DAK Fisik dan Non Fisik sesuai regulasi yang ditetapkan.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus meningkatkan capaian kinerja di bidang tata

kelola keuangan daerah, pelayanan umum pemerintahan, pelayanan dasar publik, dan kesejahteraan masyarakat sehingga Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat memenuhi kriteria dalam perolehan Dana Insentif Daerah.

Kebijakan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Kebijakan umum Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah difokuskan untuk melakukan koordinasi pencairan Hibah MRT, Kelompok Masyarakat Dalam Negeri/Perorangan dalam Negeri terkait uang pemasukan dari Rekomendasi HGB/HPL dan Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri khususnya dana hibah PT Jasa Raharja.

Strategi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Strategi umum Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah terbagi menjadi 3 (tiga) jenis pendapatan hibah yaitu yang pertama, Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat difokuskan untuk melakukan koordinasi terkait pencairan Hibah MRT yang telah dituangkan dalam Naskah Perjanjian Penerusan Hibah (NPPH), yang kedua yaitu Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat Dalam Negeri/Perorangan dalam Negeri difokuskan untuk meningkatkan uang pemasukan Rekomendasi HGB/HPL atas persetujuan tertulis dari Gubernur atau pejabat yang ditunjuk terhadap permohonan perolehan/perpanjangan dan atau peralihan/pengoperan dan atau penjaminan/tanggungannya sesuatu hak di atas tanah HPL atas nama Pemprov DKI Jakarta, perpanjangan hak di atas HPL, peralihan hak di atas HPL dan hak tanggungan sesuatu hak

di atas HPL, hak atas tanah eks desa dan tanah eks Kota Praja, dan yang ketiga yaitu Pendapatan Hibah dari Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri dengan melakukan Keterangan dan penjabaran lebih lanjut mengenai realisasi dan proyeksi atau target

addendum MoU/Kerjasama hibah dengan PT Jasa Raharja mengenai besaran dan waktu penyaluran dana hibah

pendapatan daerah Provinsi DKI Jakarta terdapat dalam tabel di bawah ini

TABEL 3.9

Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2019 s.d Tahun 2023 (dalam Miliar Rupiah)

No	Uraian	Tahun				Proyeksi/ Target Tahun 2023
		Realisasi Tahun 2019 Audited*	Realisasi APBD 2020 Audited**	APBD Tahun 2021***	APBD Tahun 2022****	
1.	Pendapatan Asli Daerah	45.707,40	37.414,75	41.800,15	55.658,64	57.239,28
1.1	Pajak Daerah	40.298,12	31.895,26	34.550,41	45.700,00	47.000,00
1.2	Retribusi Daerah	587,38	496,33	382,14	806,88	600,00
1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	619,45	672,49	385,49	793,74	642,50
1.4	Lain-lain PAD yang Sah	4.202,43	4.350,66	6.482,12	8.358,02	8.996,78
2.	Pendapatan Transfer – Dana Perimbangan	14.494,39	16.962,89	22.673,79	16.882,87	16.934,96
2.1	Dana bagi hasil (DBH)	11.698,38	13.647,95	22.630,42	0	13.628,31
2.2	Dana Alokasi Khusus Fisik	0,00	0,00	0	0	1,80
2.3	Dana Alokasi Khusus (Non Fisik)	2.796,00	3.249,76	0	0	3.261,05
2.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus/Dana Insentif Daerah	0	65,18	43,37	0	43,80
3.	Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah	2.041,70	1.574,53	1.434,02	4.907,21	3.274,88
3.1	Hibah	2.041,70	1.509,35	1.434,02	4.907,21	3.724,88

No	Uraian	Tahun				Proyeksi/ Target Tahun 2023
		Realisasi Tahun 2019 Audited*	Realisasi APBD 2020 Audited**	APBD Tahun 2021***	APBD Tahun 2022****	
	TOTAL PENDAPATAN	62.300,67	55.887,00	65.907,97	77.448,71	77.449,12

Sumber : *) Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk Tahun yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2019

**) LRA Provinsi DKI Jakarta Tahun 2020 Periode s.d TW 4 2020 Audited

***) LRA Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021 Periode s.d TW 4 2021 Sementara

****) Perda Nomor 1 Tahun 2022 Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2022

Kebijakan Belanja Daerah

Dalam hal kebijakan belanja daerah tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam rancangan Rencana Pembangunan Daerah, diarahkan sebagai berikut:

1. Mendorong implementasi strategi pembangunan dan arah kebijakan pembangunan;
2. Memenuhi kewajiban penyediaan anggaran pendidikan dan kesehatan sesuai perundang-undangan;
3. Mengedepankan belanja yang menunjang pertumbuhan ekonomi, peningkatan penyediaan lapangan kerja dan upaya pengentasan kemiskinan serta mendukung kebijakan nasional;
4. Mendorong alokasi anggaran untuk mendukung peran Jakarta sebagai Ibukota Negara;
5. Memberikan bantuan-bantuan dalam bentuk:
 - a. Subsidi, dalam mendukung pelayanan publik;
 - b. Hibah, untuk menyentuh kegiatan/usaha penduduk/komunitas termasuk pengamanan pemilihan umum;
 - c. Bantuan sosial, untuk menyentuh komunitas sosial tertentu dalam rangka pembangunan modal sosial;
 - d. Bantuan keuangan, untuk memberikan insentif/disinsentif kepada pemerintah daerah lainnya, khususnya wilayah Jabodetabekjur dalam rangka kerjasama/komitmen antar pemerintah

daerah serta kepada partai politik sesuai dengan Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik. Adapun ruang lingkup kerjasama daerah, antara lain penataan ruang, perumahan dan permukiman, pengendalian banjir, pengelolaan sumber daya air, kebersihan, lingkungan hidup, transportasi dan perhubungan, pariwisata, ketahanan pangan dan agribisnis, kependudukan, kesehatan, pendidikan dan sosial.

6. Memberikan alokasi anggaran pada sektor-sektor yang langsung menyentuh kepentingan masyarakat termasuk urusan wajib terkait pelayanan dasar dengan bepedoman kepada Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Berdasarkan Pergub No.38 Tahun 2021 tanggal 31 Mei 2021 tentang Perubahan Atas Pergub No.1 Tahun 2021 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2021 telah dilakukan pergeseran untuk penanganan penanggulangan Covid-19 dan pemulihan ekonomi yang antara lain digunakan untuk;

- a. Pembayaran insentif nakes
- b. Honorarium tim vaksinasi
- c. Insentif tenaga penunjang
- d. Penyediaan subsidi pangan dengan harga murah bagi masyarakat
- e. Bantuan sosial tunai

- f. Dapur umum
- g. Pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K)
- Selain itu, kebijakan belanja diarahkan pada pemenuhan Belanja Prioritas dalam kerangka kesinambungan implementasi *money follow priority program*.

TABEL 3.10

Realisasi dan Proyeksi/Target Belanja Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2019 s.d Tahun 2023 (dalam Miliar Rupiah)

No	Uraian	Tahun				
		Realisasi Tahun 2019 Audited*	Realisasi APBD 2020 **	APBD Tahun 2021 ***	APBD Tahun 2022****	Proyeksi/Target Tahun 2023
1.	Belanja					
1.1	Belanja Operasi	52.565,11	43.835,45	54.108,38	59.207,77	63.177,83
1.1.1	Belanja Pegawai	22.016,85	16.686,87	18.816,91	19.330,44	21.106,81
1.1.2	Belanja Bunga	60,78	62,30	86,11	789,54	258,00
1.1.3	Belanja Subsidi	2.782,93	3.628,17	4.355,29	5.596,36	7.269,32
1.1.4	Belanja Barang dan Jasa	20.807,65	16.775,62	21.550,17	25.394,54	26.882,54
1.1.5	Belanja Hibah	2.480,58	1.881,88	2.655,94	2.901,94	2.311,30
1.1.6	Belanja Bantuan Sosial	4.416,32	4.800,61	6.643,96	5.194,95	5.349,86
1.2	Belanja Modal	11.551,92	3.173,22	6.807,09	12.923,23	10.647,99
1.3	Belanja Tidak Terduga	1,61	4.707,94	700,95	3.146,48	3.196,27
1.4	Transfer Bantuan Keuangan	839,07	371,27	387,60	479,76	356,44
TOTAL BELANJA + TRANSFER		64.938,36	52.088,13	62.004,03	75.757,23	77.378,55

Sumber : *) Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk Tahun yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2019

**) LRA Provinsi DKI Jakarta Tahun 2020 Periode s.d TW 4 2020 Audited

***) LRA Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021 Periode s.d TW 4 2021 Sementara

****) Perda Nomor 1 Tahun 2022 Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2022

Terkait kebijakan hibah, ada 3 prioritas yang disepakati, meliputi:

- 1) Prioritas 1: kebijakan dan pendelegasian pemerintah pusat yang harus dilaksanakan oleh Pemda, yaitu Dana Alokasi Khusus (DAK) dalam bentuk hibah, hibah guru agama dan guru swasta, serta hibah kepada partai politik sesuai peraturan

- 2) Prioritas 2: amanat peraturan perundang-undangan, diantaranya hibah kepada instansi bentukan pemerintah dan hibah peningkatan mutu pendidikan
- 3) Prioritas 3: meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan aktivitas masyarakat, diantaranya hibah kepada Forkopimda, instansi vertikal lainnya serta hibah kepada yayasan dan tempat ibadah

TABEL 3.11

Rekapitulasi Usulan Belanja Hibah

No	prioritas	Kelompok Penerima
1	1	Hibah yang berasal dari DAK
2	1	Gaji guru dan beasiswa
3	1	Partai Politik
4	2	BOTI, insentif guru ngaji, insentif merbot, operasional, dan kegiatan (Hibah kepada DMI)
5	2	Hibah Peningkatan Mutu Pendidikan SMA & SMK Swasta
6	2	Lembaga Bentukan Pemerintah/Pemerintah Daerah yang berdasar hukum
7	3	Forkopimda
8	3	Instansi vertikal lainnya (TNI, Polri)
9	3	Hibah lainnya kepada tempat ibadah dan lembaga keagamaan (247 tempat ibadah dan lembaga)
10	3	Hibah kepada yayasan dan lembaga lainnya

Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain, sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali. Pada kebijakan pembiayaan daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023 terdiri atas beberapa unsur pembentukan, yaitu:

1. Penerimaan Pembiayaan Daerah (PMD)

PMD terdiri atas sisa lebih perhitungan

Adapun realisasi dan proyeksi/target pembiayaan daerah Provinsi DKI Jakarta

anggaran tahun anggaran sebelumnya, penerimaan pengembalian PMD; penerimaan pinjaman daerah; dan penerimaan kembali investasi non permanen.

2. Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Pengeluaran Pembiayaan Daerah terdiri atas Pembentukan Dana Cadangan, Penyertaan Modal/Investasi Daerah, Pembayaran Pokok Utang dan Pemberian Pinjaman Daerah.

tahun 2019 s.d. 2023 dapat dilihat pada tabel berikut.

TABEL 3.12

Realisasi dan Proyeksi/Target Pembiayaan Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2019 s.d Tahun 2023 (dalam Miliar Rupiah)

No	Uraian	Tahun				Proyeksi/ Target Tahun 2023
		Realisasi Tahun 2019 Audited *	Realisasi APBD 2020 **	APBD 2021***	APBD Tahun 2022 ****	
1.	Penerimaan Pembiayaan	11.781,95	5.582,82	11.914,02	5.022,42	8.126,41
1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun	9.755,08	1.203,97	5.165,70	4.035,86	6.703,74

No	Uraian	Tahun				Proyeksi/ Target Tahun 2023
		Realisasi Tahun 2019 Audited *	Realisasi APBD 2020 **	APBD 2021***	APBD Tahun 2022 ****	
	Sebelumnya (SiLPA)					
1.2	Penerimaan Pinjaman Daerah	2.025,15	2.903,53	6.748,32	986,56	1.422,68
1.3	Penerimaan Pengembalian Penyertaan Modal Daerah	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1.4	Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen	1,71	0.52	0.0	0.0	0.0
2.	Pengeluaran Pembiayaan	7.934,85	4.215,99	6.290,21	6.713,90	8.196,98
2.1	Pembentukan dana cadangan	95,11	95,68	0.0	0.0	0.0
2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Daerah	7.402,19	4.086,68	6.056,58	5.535,96	6.238,69
2.3	Pembayaran Pokok Utang	87,54	33,63	33,63	927,94	1.782,27
2.4	Pemberian Pinjaman Daerah	350,00	0.0	200,00	250,00	176,02
TOTAL PEMBIAYAAN		3.847,10	1.366,83	5.623,81	(1.691,48)	(70,57)

Sumber : *) Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk Tahun yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2019

**) LRA Provinsi DKI Jakarta Tahun 2020 Periode s.d TW 4 2020 Audited

***) LRA Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021 Periode s.d TW 4 2021 Sementara

****) Perda Nomor 1 Tahun 2022 Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2022

Mengingat besarnya pembiayaan yang dibutuhkan untuk pembangunan infrastruktur kota serta memperhatikan besarnya peluang dari sisi kebijakan dan regulasi yang ada, dan besarnya potensi pendanaan yang berasal dari masyarakat maupun pihak dunia usaha, maka kebijakan sumber pendanaan dalam pembangunan di Provinsi DKI Jakarta perlu diperluas. Perluasan tersebut dapat dilakukan melalui dan tidak terbatas pada pendanaan bersama antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan Pemerintah/Pemerintah Daerah lainnya, Kerjasama Pemerintah dengan Badan

Usaha (KPBU), pinjaman dan hibah luar negeri, penerbitan Obligasi Daerah, pendanaan yang bersumber dari pemanfaatan ruang, penugasan kepada BUMD termasuk mendorong kerjasama secara *business to business (B to B)* serta membuka peluang seluas-luasnya bagi peran serta masyarakat secara sukarela dalam kerangka skema Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Dunia Usaha (TSLDU)/*Corporate Social Responsibility (CSR)* dan swa-pendanaan lainnya, sesuai peraturan perundang-undangan.

Kerangka Pendanaan Pembangunan

Penyelenggaraan pemerintahan Provinsi DKI Jakarta, terdiri atas 5 (lima) Kota Administrasi, yaitu Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Selatan dan Jakarta Timur serta 1 (satu) Kabupaten Administrasi yakni Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu. Berdasarkan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia dimana berbunyi otonomi Provinsi DKI Jakarta diletakkan pada tingkat Provinsi. Sebagai implikasinya, maka pengelolaan keuangan Daerah berada pada tingkat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Pada dasarnya struktur keuangan pemerintah daerah hampir sama dengan struktur keuangan pemerintah pusat. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, APBN dan APBD terdiri atas anggaran pendapatan, anggaran belanja, dan pembiayaan.

Lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah Dan Pembiayaan Daerah.

Adapun Pendapatan Daerah terdiri atas Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Selanjutnya, komponen Belanja Daerah terdiri atas Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, dan Belanja Transfer. Sedangkan, Pembiayaan Daerah terdiri atas Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan.

Pembiayaan Daerah merupakan transaksi keuangan untuk menutup defisit anggaran ataupun memanfaatkan surplus anggaran yang terjadi apabila adanya selisih (gap) antara Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah. Dalam perkembangannya, Pembiayaan Daerah dimanfaatkan pula untuk menjalankan proyek penugasan Pemerintah Daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), utamanya untuk pembangunan infrastruktur.

Kebijakan Pembiayaan Daerah di masa yang akan datang, terkait sumber dari sisi penerimaan pembiayaan dapat berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA),

pencairan Dana Cadangan Daerah, Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, Penerimaan Pinjaman Daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah, dan/atau penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun kebijakan Pengeluaran Pembiayaan mencakup pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo, penyertaan modal daerah yang telah ditetapkan melalui peraturan daerah yang diantaranya merupakan bagian dari penugasan dalam penyediaan pelayanan publik, pembentukan Dana Cadangan yang sudah harus jelas rencana peruntukan pemanfaatannya, Pemberian pinjaman daerah, dan/atau pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal ada kecenderungan terjadinya defisit anggaran, perlu adanya efisiensi dan penentuan skala prioritas dalam pelaksanaan program/kegiatan dan pemberian penyertaan modal daerah. Adapun skala prioritas program/kegiatan dimaksud adalah yang fokus dan menyentuh langsung pada pelayanan publik, mampu memberikan manfaat lebih, pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) serta peningkatan keberdayaan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.

Sebaliknya, jika ada kecenderungan akan terjadinya surplus anggaran, maka kebijakan yang perlu dilaksanakan adalah penyelesaian pembayaran pokok utang, pembentukan dana cadangan dan/atau pendanaan belanja peningkatan jaminan sosial, yang diimplementasikan dalam bentuk program/kegiatan pelayanan dasar masyarakat.

Disamping itu, Jakarta merupakan 'rumah' lebih dari 10 juta penduduk pada malam hari dan 'mengakomodir' tambahan sekitar 3 juta orang penglaju/commuter dari wilayah sekitar yang bekerja dan beraktifitas di Jakarta pada siang hari.

Sebagai pusat pemerintahan, bisnis, politik dan budaya, Jakarta adalah kantor pusat bagi Badan Usaha Milik Negara (BUMN), perusahaan swasta nasional maupun perusahaan multinasional. Jakarta juga menjadi tuan rumah untuk berbagai organisasi internasional seperti kantor Sekretariat ASEAN, duta besar dan perwakilan negara lain.

Selain itu, Jakarta merupakan pusat aktivitas ekonomi dan keuangan nasional maupun internasional di mana banyak Investasi Asing/Foreign Direct Investment (FDI) di berbagai sektor yang diinvestasikan di Jakarta, seperti sektor transportasi, pergudangan, telekomunikasi, pertambangan, listrik, gas dan air, perumahan, industri dan perkantoran, makanan dan industri lainnya. Meskipun telah diputuskan bahwa kota Jakarta tidak lagi menjadi Ibukota Negara, Jakarta dipercaya akan tetap memegang peranan penting sebagai kota Bisnis berskala global.

Sebagai konsekuensi logis atas fakta tersebut diatas serta dalam rangka menjadikan Jakarta sebagai Kota yang maju, layak, nyaman dan berkelanjutan untuk dihuni bagi semua, maka perlu penyiapan berbagai infrastruktur strategis maupun pendukung seperti transportasi, pengendalian banjir, penyediaan air bersih, pengolahan sampah dan air limbah,serta pemenuhan pelayanan dasar yang meliputi pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, dan perumahan rakyat dan pemukiman, ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat serta sosial.

Secara empiris, tren realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi DKI Jakarta 5 tahun terakhir (2017–2022) menunjukkan kemampuan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam mengalokasikan belanja modal khususnya dalam penyediaan infrastruktur semakin terbatas, seiring dengan

adanya peningkatan kebutuhan pelayanan publik serta berkurangnya kapasitas fiskal Pemerintah Provinsi DKI Jakarta karena adanya situasi yang tidak biasa (munculnya pandemi Corona Virus Disease / Covid – 19), yang dimulai pada tahun 2020. Untuk itu pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2023-2026, kebijakan sumber pendanaan perlu diperluas.

Adapun beberapa sumber pendanaan yang perlu dijajaki antara lain dan tidak terbatas pada sumber pendanaan melalui Pembiayaan Utang Daerah seperti Pinjaman Daerah, Obligasi Daerah dan Sukuk Daerah, Sinergi Pendanaan antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan Pemerintah, pihak swasta, badan usaha milik Negara, BUMD, dan/atau dengan Pemerintah Daerah lainnya, skema Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha (KPDBU), pendanaan yang bersumber dari pemanfaatan ruang, penugasan kepada BUMD termasuk mendorong dilakukannya kerjasama secara B to B serta membuka peluang seluas-luasnya bagi peran serta masyarakat secara sukarela untuk penyelenggaraan skema Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Dunia Usaha (TSLDU)/ *Corporate Social Responsibility* (CSR) dan swa-pendanaan lainnya, sesuai peraturan perundang-undangan. Secara skematis berbagai kerangka alternatif pendanaan yang dapat diimplementasikan pada kurun 2023-2026 dapat dilihat pada Gambar 3.5.

GAMBAR 3.5

Kerangka Alternatif Pendanaan yang Dapat Diimplementasikan pada Kurun 2023-2026



Sumber: Dokumen Rancangan Pembangunan Daerah 2023-2026

Adapun penjelasan secara rinci adalah sebagai berikut:

Pembiayaan Melalui Pembiayaan Utang Daerah

Pembiayaan Utang Daerah adalah setiap penerimaan Daerah yang harus dibayar kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun – tahun anggaran berikutnya. Adapun Pembiayaan Utang Daerah digunakan untuk membiayai Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Dalam hal ini, Pemerintah Daerah dilarang melakukan Pembiayaan langsung dari pihak luar negeri.

Nilai bersih maksimal Pembiayaan Utang Daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari DPRD yang diberikan pada saat pembahasan APBD. Dalam hal tertentu, Kepala Daerah dapat melakukan pembiayaan melebihi nilai bersih maksimal yang telah disetujui DPRD dan dilaporkan sebagai perubahan APBD tahun yang bersangkutan.

Pembiayaan Utang Daerah yang memenuhi persyaratan teknis dapat dilakukan melebihi sisa masa jabatan Kepala Daerah setelah mendapat pertimbangan dari Menteri, menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri, dan menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional.

1. Pinjaman Daerah

Pinjaman Daerah merupakan pembiayaan utang Daerah yang diikat dalam suatu perjanjian pinjaman dan bukan dalam bentuk surat berharga, yang mengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain, sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali. Pinjaman Daerah dapat bersumber dari Pemerintah, Pemerintah Daerah lain, lembaga keuangan bank dan/atau lembaga keuangan bukan bank.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018, Pinjaman Daerah merupakan salah satu alternatif sumber pembiayaan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk mendanai kegiatan yang merupakan inisiatif Pemerintah Daerah dalam rangka urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun Pinjaman Daerah dapat digunakan

dalam rangka pengelolaan kas, pembiayaan pembangunan infrastruktur daerah, pengelolaan portofolio utang daerah, dan/atau penerusan pinjaman dan/atau penyertaan modal kepada BUMD. Terkait dengan Pinjaman Daerah dalam rangka pengelolaan kas dilakukan tidak dengan persetujuan DPRD. Namun demikian, Pinjaman Daerah dimaksud harus dilunasi dalam tahun anggaran berkenan.

Pinjaman Daerah memiliki risiko kesinambungan fiskal, risiko tingkat bunga, dan risiko pembiayaan kembali, sehingga diperlukan kecermatan dan kehati-hatian dalam pengelolaan pinjaman daerah.

Daerah bertanggung jawab atas kegiatan yang diusulkan untuk didanai dari Pinjaman Daerah. Adapun pengelolaan Pinjaman Daerah harus memenuhi prinsip taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, transparan, akuntabel, efisien dan efektif dan kehati-hatian.

Adapun syarat untuk mendapatkan Pinjaman Daerah antara lain:

- a. jumlah sisa Pinjaman Daerah ditambah jumlah pinjaman yang akan ditarik tidak melebihi 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah penerimaan umum APBD tahun sebelumnya;
- b. nilai rasio kemampuan keuangan daerah untuk mengembalikan Pinjaman Daerah sebagaimana ditetapkan oleh Menteri Keuangan;
- c. tidak mempunyai tunggakan atas pengembalian pinjaman yang berasal dari Pemerintah Pusat;
- d. kegiatan yang dibiayai dari Pinjaman Daerah harus sesuai dengan dokumen perencanaan daerah; dan
- e. persyaratan lain yang ditetapkan pemberi pinjaman sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Adapun seluruh penerimaan maupun pengeluaran dalam rangka Pinjaman Daerah dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

2. Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri

(Grant/Loan)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah, Pemerintah Daerah dilarang untuk melakukan pinjaman secara langsung kepada pihak luar negeri. Namun demikian, Pemerintah dapat melakukan penerusan pinjaman kepada Pemerintah Daerah.

Pinjaman Luar Negeri sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah merupakan setiap pembiayaan melalui utang yang diperoleh Pemerintah dari Pemberi Pinjaman Luar Negeri yang diikat oleh suatu perjanjian pinjaman dan tidak berbentuk surat berharga negara, yang harus dibayar kembali dengan persyaratan tertentu

Pinjaman Luar Negeri dapat bersumber antara lain dari Kreditor Multilateral; Kreditor Bilateral; Kreditor Swasta Asing; dan Lembaga Penjamin Kredit Ekspor. Di samping itu, pengajuan Pinjaman Luar Negeri harus memenuhi prinsip transparan, akuntabel, efisien dan efektif, kehati-hatian, tidak disertai ikatan politik, serta tidak memiliki muatan yang dapat mengganggu stabilitas keamanan negara.

Terkait Pinjaman Luar Negeri ini, Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan Kementerian PPN/Bappenas sebagai instansi Pemerintah yang diberikan amanat untuk mengkoordinasikan perencanaan Pinjaman Kegiatan, melalui penerbitan beberapa dokumen perencanaan Pinjaman Luar Negeri yaitu Rencana Pemanfaatan Pinjaman Luar Negeri (RPPLN), Daftar Rencana Pinjaman Luar Negeri Jangka Menengah (DRPLN-JM), Daftar Rencana Prioritas Pinjaman Luar Negeri (DRPPLN)/tahunan dan Daftar Kegiatan (DK).

Adapun keempat dokumen Perencanaan Pinjaman Luar Negeri sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut:

1. **Rencana Pemanfaatan Pinjaman Luar Negeri (RPPLN)** yang berisikan arah kebijakan pemanfaatan Pinjaman Luar Negeri serta indikasi besaran rencana pemanfaatan Pinjaman Luar Negeri, khususnya Pinjaman Kegiatan dalam 5 tahun ke depan (periode yang sama dengan RPJMN). Instansi pengusul yang

diperbolehkan memanfaatkan Pinjaman Luar Negeri merujuk RPPLN ini dalam menyiapkan usulan kegiatan yang akan dibiayai dengan Pinjaman Luar Negeri. Pada periode 2020 – 2024, RPPLN 2020 – 2024 sudah ditetapkan oleh Menteri PPN/Kepala Bappenas.

2. **Daftar Rencana Pinjaman Luar Negeri Jangka Menengah (DRPLN-JM)** atau dikenal dengan Bluebook yang memuat daftar usulan kegiatan yang diajukan oleh Kementerian, Lembaga, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), serta Pemerintah Daerah berdasarkan kebutuhannya. Kegiatan yang dicantumkan dalam DRPLN-JM adalah kegiatan yang dinilai layak untuk didanai dengan memanfaatkan Pinjaman Luar Negeri. Dokumen ini menjadi dasar bagi Pemerintah untuk berkomunikasi dengan para mitra pembangunan dalam menyusun kerangka kerjasama pembangunan dengan masing-masing mitra. Usulan kegiatannya yang sudah dalam DRPLN-JM ini, dipersiapkan pelaksanaannya dengan memperhatikan kriteria kesiapan/readiness criteria sesuai ketentuan berlaku. Instansi pengusul bertanggung jawab terhadap pemenuhan kriteria kesiapan tidak hanya kesiapan dokumen dan administrasi saja tetapi penting untuk memastikan kesiapan pelaksanaan di lapangan. Pemenuhan kesiapan tersebut disampaikan kepada Menteri PPN/Kepala Bappenas.

Pada tahun 2020, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah mengusulkan Kegiatan Pembangunan MRT Jakarta Fase 2 (Bundaran HI – Ancol Barat) ke dalam Daftar Rencana Pinjaman Luar Negeri Jangka Menengah (DRPLN-JM).

3. **Daftar Rencana Prioritas Pinjaman Luar Negeri (DRPPLN)** atau dikenal dengan Greenbook memuat usulan kegiatan yang telah memenuhi sebagian besar dari kriteria kesiapan sesuai ketentuan. DRPPLN merupakan dokumen perencanaan yang diterbitkan setiap tahunnya yang dipergunakan sebagai dasar untuk instansi pengusul, Bappenas dan Kementerian Keuangan dalam menyusun pagu indikatif dan pagu anggaran untuk kegiatan Pinjaman Luar Negeri baru pada siklus

penyusunan RAPBN. DRPPLN juga menjadi rujukan dalam melanjutkan proses koordinasi secara formal dengan para mitra pembangunan, karena usulan kegiatan yang tercantum dalam DRPPLN harus sudah memiliki indikasi sumber pendanaan/calon pemberi pinjamannya. Proses penyiapan kegiatan akan terus ditingkatkan sampai memenuhi seluruh kriteria kesiapan yang dipersyaratkan sehingga siap untuk pembahasan kesepakatan dengan mitra pembangunan. Menteri PPN/Kepala Bappenas akan merekomendasi kegiatan yang sudah siap tersebut dengan menyampaikan Daftar Kegiatan kepada Menteri Keuangan. Selanjutnya Kementerian Keuangan akan memimpin proses negosiasi hingga penandatanganan perjanjian

4. **Daftar Kegiatan (DK)** adalah daftar rencana kegiatan yang telah tercantum dalam DRPPLN dan siap untuk dirundingkan dengan calon Pemberi Pinjaman Luar Negeri. Daftar Kegiatan merupakan rekomendasi yang disampaikan oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional kepada Menteri Keuangan. Atas dasar Daftar Kegiatan ini, Menteri Keuangan melakukan perundingan dengan Calon Pemberi Pinjaman Luar Negeri dengan memperhatikan kesiapan kegiatan.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah beberapa kali memanfaatkan skema Pinjaman Daerah yang bersumber dari luar negeri ini, diantaranya untuk proyek Jakarta Emerge Dredging Initiative (JEDI) dengan pendanaan World Bank dan Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta Koridor Selatan-Utara Fase I (Lebak Bulus-Bundaran HI) dan Fase II A (Bundaran HI-Kota) dengan pendanaan pinjaman Pemerintah Jepang melalui Japan International Cooperation Agency (JICA).

Pembangunan MRT Jakarta

Pada 24 Maret 2019, MRT Jakarta Jalur Selatan - Utara Fase I Lebak Bulus-Bundaran HI telah beroperasi dan diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia, Ir. H. Joko Widodo, dan pada waktu yang sama pembangunan MRT Jakarta Jalur Selatan - Utara Fase II juga resmi dicanangkan. MRT Jalur Selatan - Utara Fase II memiliki total

panjang jalur ± 11,5 kilometer dan merupakan rute ekstensi dari MRT Jakarta Jalur Selatan - Utara Fase I Lebak Bulus-Bundaran HI sebagai satu kesatuan jaringan Jalur MRT yang menghubungkan wilayah selatan kota Jakarta dengan wilayah utara kota Jakarta. Pembangunan MRT Jalur Selatan - Utara Fase II dibagi dalam 2 (dua) tahap, yaitu Fase II A (Bundaran HI - Kota) dan Fase II B (Kota - Ancol Barat).

Pada tahun 2021, Pembangunan MRT Jakarta Fase II (Bundaran HI – Ancol Barat) telah memasuki tahap konstruksi untuk Fase II A dari Bundaran HI hingga ke Kota. Adapun pendanaannya berasal dari pinjaman Pemerintah Jepang melalui Japan International Cooperation Agency (JICA), dengan pengaturan komposisi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Komite Kebijakan Percepatan Penyediaan Infrastruktur Nomor 1 Tahun 2018 tentang Komposisi Pembebanan Pinjaman Pembangunan Mass Rapid Transit di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Jalur Utara -Selatan, adalah sebesar 51% ditanggung oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta (on-lending) dan 49% ditanggung oleh Pemerintah yang selanjutnya dihibahkan kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta (on-granting).

Dukungan pendanaan Pemerintah Jepang melalui Japan International Cooperation Agency (JICA) bagi pembangunan MRT Jakarta Jalur Selatan - Utara Fase I Lebak Bulus - Bundaran HI adalah sebesar ¥125,237,000,000,-, sedangkan besaran biaya total pembangunan MRT Jakarta Jalur Selatan - Utara Fase II (Data DRPLN-JM/Blue Book Tahun 2020 – 2024) adalah sebesar USD 1.890.083.000,- (satu miliar delapan ratus sembilan puluh juta delapan puluh tiga ribu Dolar Amerika). Adapun besaran tersebut dengan rincian sebagai berikut:

- a. Alokasi Dana Fase II pada IP 578 yaitu sebesar USD 405.110.000,- (empat ratus lima juta seratus sepuluh ribu Dolar Amerika);
- b. Estimasi Sisa Dana Dari Alokasi Dana Fase I pada IP 578 sebesar USD 66.528.000,- (enam puluh enam juta lima ratus dua puluh delapan ribu Dolar Amerika);

- c. Dana Tersedia pada IP 578 (a + b) (data tersedia per Agustus 2020 (pengajuan DRPLN-JM ke Bappenas)) sebesar USD 471.638.000,- (empat ratus tujuh puluh satu juta enam ratus tiga puluh delapan ribu Dolar Amerika);
- d. Estimasi Biaya MRT Jakarta Fase IIA (Bundaran HI – Kota) sebesar USD 1.277.572.000,- (satu miliar dua ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh dua ribu Dolar Amerika);
- e. Estimasi Biaya MRT Jakarta Fase IIB (Kota – Ancol Barat) sebesar USD 1.084.151.000,- (satu miliar delapan puluh empat juta seratus lima puluh satu ribu Dolar Amerika);
- f. Kebutuhan Loan Tambahan Fase IIA (d – c) sebesar USD 805.932.000 (delapan ratus lima juta Sembilan ratus tiga puluh dua ribu Dolar Amerika)
- g. Kebutuhan Loan Tambahan Fase IIB sebesar USD 1.084.151.000 (satu miliar delapan puluh empat juta seratus lima puluh satu ribu Dolar Amerika);
- h. Total Kebutuhan Loan Tambahan Fase II (f + g) sebesar USD 1.890.083.000 (satu miliar delapan ratus Sembilan puluh juta delapan puluh tiga ribu Dolar Amerika) atau setara ± Rp. 27.217.195.200.000,- (dua puluh tujuh triliun dua ratus tujuh belas miliar seratus Sembilan puluh lima juta dua ratus ribu Rupiah) (Kurs APBN Tahun 2020, 1 USD = Rp. 14.400,-).

Besaran biaya dimaksud telah teregistrasi dalam Daftar Rencana Pinjaman Luar Negeri Jangka Menengah 2020-2024 (Blue Book) Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Bappenas dan telah mendapatkan persetujuan DPRD Provinsi DKI Jakarta melalui Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 59 Tahun 2017 tentang Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta terhadap Pembiayaan Pembangunan Proyek MRT Jakarta Jalur Selatan – Utara (Koridor Lebak Bulus – Kampung Bandan). Selain itu, usulan biaya dimaksud juga telah mendapatkan pertimbangan Kementerian Dalam Negeri melalui surat Nomor 979/4695/SJ tanggal 6 Oktober 2017 untuk kemudian disampaikan kepada Kementerian Perhubungan, Kementerian Perencanaan Pembangunan

Nasional/ Bappenas, dan Kementerian Keuangan.

MRT Jakarta Jalur Selatan - Utara Fase II A memiliki 7 (tujuh) stasiun bawah tanah yaitu Stasiun Thamrin, Monas, Harmoni, Sawah Besar, Mangga Besar, Glodok, dan Kota.

Rencana pembangunan MRT Jakarta Jalur Selatan - Utara Fase II B dengan rute Kota – Ancol Barat telah mendapatkan Persetujuan Prinsip Gubernur DKI Jakarta. Saat ini, rencana MRT Jakarta Jalur Selatan - Utara Fase II B telah dipersiapkan melalui Kajian Teknis Studi Kelayakan PT. MRT Jakarta yang memuat antara lain rekomendasi trase, kebutuhan operasi, jadwal pelaksanaan dan rekomendasi opsi pendanaan. Ke depan, Rencana pembangunan MRT Jakarta Jalur Selatan - Utara Fase II B ini akan memasuki tahap perpanjangan izin prinsip dan proses persetujuan trase Kementerian Perhubungan.

Terkait dengan pengadaan lahan depo Ancol Barat direncanakan melalui Penyertaan Modal Daerah kepada PT. MRT Jakarta atau kerja sama bisnis dengan mitra investor strategis. Rekomendasi opsi pendanaan untuk MRT Jakarta Jalur Selatan - Utara Fase II B diusulkan melalui sumber yang sama dengan Fase I dan II A yaitu dengan pinjaman Pemerintah Jepang melalui Japan International Cooperation Agency (JICA). Dalam analisis opsi pendanaan pada Kajian Teknis Studi Kelayakan MRT Jakarta Jalur Selatan - Utara Fase II B, opsi pinjaman melalui JICA diperbandingkan dengan skema pembiayaan Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), APBN/ APBD, serta dengan pendonor lain seperti Korean International Cooperation Agency (KOICA), World Bank, Asian Development Bank (ADB), dan Asian Infrastructure Development Bank (AIIB). Opsi pendanaan melalui pinjaman JICA direkomendasikan dengan mempertimbangkan repayment period dan grace period yang panjang (masing - masing 40 tahun dan 12 tahun) serta bunga yang relatif kecil sebesar 0,1 persen. Selain itu juga untuk manajemen resiko yang dapat dibagi antara Pemerintah dengan donor dan potensi terjadinya transfer knowledge bagi MRT Jakarta dan para tenaga kerja khususnya di Provinsi DKI Jakarta.

Selain Koridor Selatan – Utara, direncanakan pula Koridor Timur – Barat sepanjang 87 km yang akan melintasi Provinsi Banten, Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Jawa Barat, dengan rencana indikatif Cikarang – Balaraja dimana untuk Provinsi DKI Jakarta direncanakan sebagai Fase I yang terdiri atas Stage I Kalideres - Cempaka Putih dan Stage II Cempaka Putih - Ujung Menteng. Untuk rencana MRT Jalur Timur - Barat Pada saat ini sedang berlangsung kegiatan jasa konsultasi Engineering Services yang dilaksanakan oleh Dirjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan.

Selain itu, isu strategis terkait opsi pendanaan masih terbuka dan dalam proses pembahasan antara Pemerintah melalui Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Bappenas, Kementerian Perhubungan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dimana ditawarkan opsi sharing pendanaan melalui pinjaman luar negeri JICA atau AIB, skema KPBU, APBN dan APBD.

Jakarta Emerge Dredging Initiative (JEDI)

Pada tanggal 17 Februari 2012, sebagaimana isi dari Naskah Perjanjian Pinjaman Luar Negeri Loan Agreement Nomor 8121-ID, International Bank for Reconstruction and Development (IBRD) telah menyetujui untuk memberikan pinjaman kepada Pemerintah Republik Indonesia sebesar USD 139,640,000 dalam rangka pembiayaan Jakarta Urgent Flood Mitigation Project (Jakarta Emergency Dredging Initiative). Melalui Surat Menteri Keuangan Nomor S-217/MK.05/2012 tanggal 2 April 2012, Pemerintah Republik Indonesia telah menyetujui untuk meneruskan sebagian pinjaman yang berasal dari IBRD, Loan Agreement Nomor 8121-ID sebagai pinjaman kepada Pemprov DKI Jakarta, dalam mata uang Rupiah dengan jumlah yang tidak melebihi sebesar ekuivalen USD 69,340,000,-.

Secara umum, pinjaman ditujukan untuk membiayai kegiatan Pengerukan dan Rehabilitasi Sungai, Kanal dan Waduk di Wilayah Provinsi DKI Jakarta. Sedikitnya 13 sungai akan dikeruk, waduk maupun situ yang telah dangkal juga akan dikuras. Sungai yang dikeruk adalah Banjir Kanal Barat, Cakung Drain, Cengkareng Drain, Kali Angke, Kali Cideng, Kali Kamal, Kali Sunter, Kali

Tanjungan, Kali Krukut – Kali Cideng – Tanah Sereal, Kali Jelakeng - Kali Pakin - Kali Besar, Kali Ciliwung Gunung Sahari, Sodetan Sentiong Sunter, Kali Grogol – Sekretaris.

Tujuan dari JEDI adalah untuk:

- Mengurangi dampak banjir tahunan di DKI melalui rehabilitasi dan pengerukan floodways, saluran air dan cekungan retensi, sesuai dengan standar praktik internasional.
- Memberikan keahlian teknis melalui pelatihan untuk memperkuat kapasitas pemerintah DKI untuk mengoperasikan dan memelihara sistem pengendalian banjir, sesuai dengan standar internasional.

Penarikan pinjaman telah selesai pada akhir tahun 2016, dengan besar utang pokok pinjaman JEDI sebesar Rp 504.949.300.724. Jadwal pembayaran pokok pinjaman terakhir di tahun 2032.

Jakarta Sewerage System (JSS) Zona 1 dan Zona 6

Dalam rangka mendukung peningkatan akses sanitasi sehat aman dan layak di Indonesia sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024) dan target Sustainable Development Goals (SDGs), Pemerintah Provinsi DKI Jakarta selama beberapa tahun ini telah memulai serangkaian kegiatan untuk merintis pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) di Provinsi DKI Jakarta. Sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 41 Tahun 2016 tentang Rencana Induk Pengembangan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Domestik terdapat 14 zona yang akan dibangun dan hingga saat ini telah ada 2 zona yang dibahas bersama Pemerintah Pusat yaitu Zona 1 dan Zona 6.

Jakarta Sewerage Development Project Zona 1

Sebagaimana tertuang pada Surat Deputi Koordinasi Percepatan Infrastruktur Pengembangan Wilayah, Kemenko Bidang Perekonomian, Nomor S-5/D.VI.M.EKON.KPPIP/02/2016 tanggal 16 Februari 2016, dinyatakan bahwa pendanaan Zona 1 akan menggunakan skema pendanaan bersama APBN dan APBD dengan pembagian sebagai berikut:

- a. IPAL, Main Trunk, Sambungan Rumah pada Daerah percontohan oleh Pemerintah Pusat melalui pinjaman luar negeri; dan
 - b. Sub trunk dan Sambungan Rumah di luar daerah percontohan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
- Pembangunan JSS Zona 1 akan dilaksanakan pada Tahun 2021-2025. Total nilai investasi untuk pembangunan Zona 1 diperkirakan sebesar ±8,85 Triliun Rupiah (berdasarkan sumber Hasil Engineering Estimate Consultant E/S JSS Zona 1) dengan rincian sebagai berikut.

TABEL 3.13

Pendanaan Paket Pembangunan JSS Zona 1

No	Uraian	Estimasi Biaya (Rp)	Sumber Pendanaan
1	Pembangunan IPAL	± Rp 4 T	Kementerian PUPR-JICA ODA Loan
2	Pembangunan Jaringan Pipa Area 1-1	± Rp 0.92 T	
3	Pembangunan Jaringan Pipa Area 1-2	± Rp 2 T	
4	Pembangunan Pilot Area	± Rp 0.12 T	
5	Pembangunan Jaringan Pipa Area 2-1	± Rp 1 T	APBD Pemprov
6	Pembangunan Jaringan Pipa Area 2-2	± Rp 0.8 T	DKI Jakarta

Sumber: Hasil Engineering Estimated Kunsultan Engineering Services (E/S) JSS Zona 1

Usulan PMD PD PAL Jaya sebesar Rp430 Miliar perlu untuk dikurangi terkait pembangunan JSS zona 1 paket 5 dan 6 sebesar Rp330 Miliar, hal tersebut perlu dilakukan mengingat pembangunan sudah dialokasikan pada Dinas SDA dengan skema tahun jamak.

Jakarta Sewerage Development Project Zona 6

Berdasarkan studi yang dilakukan oleh INDII – Mott MacDonald yang bekerjasama dengan Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas – Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Pembangunan Jakarta Sewerage Development Project Zona 6 membutuhkan nilai investasi sebesar Rp.8,7 Triliun.

Jakarta Sewerage Development Project Zona 6 terbagi menjadi 4 fase karena tingginya biaya dan periode kons

truksi, dimana keseluruhan fase (fase 1, 2, 3 dan 4) disebut Fase Ultimate. Untuk Fase 1 Jakarta Sewerage Zona 6 telah disusun Dokumen Studi Kelayakan (Feasibility Study) pada Tahun 2013 yang dilengkapi dengan Supplemental Study pada Tahun 2017. Studi Kelayakan (FS) untuk fase 2, 3 dan 4 akan disusun pada kontrak 1 Jakarta Sewerage Zona 6 Fase 1.

Direncanakan porsi pembiayaan kegiatan Jakarta Sewerage Development Project Zona 6 Fase 1 berasal dari APBN (loan) 78,3% dan APBD 21,7% dengan rincian sebagai berikut

TABEL 3.14

Porsi Pembagian Kegiatan Jakarta Sewerage Development Project Zona 6 Fase 1

No	Sumber Pendanaan	Estimasi Nilai (Rp)	Persentase
1	APBN (Loan)	30,978	78,3%
2	APBD	8,578	21,7%
Total		39,556	100%

Sumber: Estimasi awal Minutes of Discussion (MoD) JSS Zona 6

Pembangunan JSS Zona 6 fase 1 akan dilaksanakan pada Tahun 2022-2027 dengan

skema pendanaan pada tabel berikut.

TABEL 3.15

Pendanaan Paket Pembangunan JSS Zona 6 Fase 1

1	Pembangunan IPAL dan Rumah Pompa	± Rp 2 T	Kementerian PUPR – JICA ODA Loan
2	Pembangunan Jaringan Pipa Utama	± Rp 0.2 T	
3	Pembangunan Pilot Area	± Rp 0.3 T	
4	Pembangunan Jaringan Pipa Lateral, Service, Persil	± Rp 0.74 T	APBD Pemprov DKI Jakarta

Sumber: Estimasi awal Minutes of Discussion (MoD) JSS Zona 6

Obligasi Daerah/Sukuk Daerah

Obligasi Daerah adalah surat berharga berupa pengakuan utang yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah. Sedangkan Sukuk Daerah adalah surat berharga berdasarkan prinsip syariah sebagai bukti atas bagian penyertaan aset Sukuk Daerah yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah, Obligasi Daerah merupakan pinjaman daerah yang ditawarkan kepada publik melalui penawaran umum di pasar modal dalam bentuk mata uang rupiah. Selain sebagai alternatif pembiayaan pembangunan daerah, Obligasi Daerah merupakan salah satu instrumen yang dapat dimanfaatkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah tanpa tergantung sepenuhnya pada APBD. Selain itu, Obligasi Daerah diharapkan mampu membuka lapangan kerja melalui pembangunan infrastruktur serta mampu meningkatkan daya saing daerah dengan ketersediaan infrastruktur yang memadai. Penerbitan Obligasi Daerah ini juga dapat menjadi salah satu instrumen dalam peningkatan penerapan tata kelola keuangan dan pemerintahan yang baik, yang meliputi transparansi, akuntabilitas, dan disiplin dalam pengelolaan keuangan Daerah, di mana penilaian atas tata kelola keuangan dan pemerintahan dimaksud dijadikan sebagai salah satu persyaratan untuk penerbitannya.

Ada beberapa jenis kegiatan yang bisa dibiayai melalui skema penerbitan Obligasi Daerah, di antaranya: .

- a. Kegiatan sebagai investasi prasarana dan/atau sarana dalam rangka penyediaan pelayanan publik yang menghasilkan

penerimaan (revenue bond). Ke depan, diharapkan instrumen Obligasi Daerah ini juga bisa dimanfaatkan untuk investasi prasarana dan/atau sarana yang tidak menghasilkan penerimaan (general bond) sepanjang diatur dalam peraturan perundang-undangan;

- b. Sesuai dengan dokumen perencanaan daerah;
- c. Merupakan kegiatan baru atau pengembangan kegiatan yang sudah ada;
- d. Dapat dibiayai sepenuhnya atau sebagian dari Obligasi Daerah; dan
- e. Kegiatan beserta barang milik daerah yang melekat dalam kegiatan tersebut dapat dijadikan jaminan Obligasi Daerah.

Selain beberapa kriteria tersebut di atas, kecermatan dalam melihat peluang serta minat pasar/investor menjadi salah satu langkah strategis yang ikut menentukan tingkat penyerapan Obligasi Daerah di pasar modal. Selanjutnya, ada beberapa langkah strategis yang perlu dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta guna mengoptimalkan rencana penerbitan Obligasi Daerah, yaitu :

- a. Penguatan koordinasi dan komunikasi terkait beberapa kebijakan di tingkat pusat maupun daerah dalam menerbitkan Obligasi Daerah.
- b. Penyiapan struktur kelembagaan dan sumber daya berikut kelengkapannya agar mampu dalam menjalankan rangkaian proses dari perencanaan dan persiapan hingga penerbitan Obligasi Daerah.
- c. Penyediaan beberapa instrumen regulasi

dan pendukung lainnya.

Dengan adanya skema Obligasi Daerah sebagai salah satu skema alternatif pembiayaan diharapkan mampu meningkatkan

Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha

Pembiayaan dengan skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), merupakan kerjasama antara Pemerintah dan Badan Usaha dalam penyediaan infrastruktur untuk kepentingan umum dengan mengacu pada spesifikasi yang telah ditetapkan sebelumnya, yang sebagian atau seluruhnya menggunakan sumber daya Badan Usaha dengan memperhatikan pembagian resiko antara para pihak. Penggunaan skema KPBU dalam penyediaan infrastruktur strategis, diantaranya bertujuan untuk penyediaan infrastruktur yang berkualitas, efektif, tepat sasaran dan tepat waktu sekaligus sebagai salah satu strategi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam memenuhi kebutuhan pendanaan secara berkelanjutan.

Skema KPBU dapat dilakukan dengan prakarsa dari Pemerintah (solicited) maupun prakarsa dari Badan Usaha (unsolicited) dengan masing-masing keunggulan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur, Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Nomor 4 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur, dan Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 22 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 91 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 22 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kerjasama Pemerintah

transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di samping menghadirkan dana untuk kebutuhan percepatan pembangunan infrastruktur

Daerah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur. Adapun lingkup kegiatan yang dapat dilaksanakan dengan skema KPBU mencakup sebagian atau seluruh proses kegiatan KPBU, seperti membiayai, merancang, membangun, merehabilitasi, mengoperasikan, memelihara, dan lainnya.

Beberapa kriteria yang dapat dibiayai dari skema KPBU berdasarkan peraturan perundang – undangan dimaksud di atas, antara lain :

- a. Infrastruktur yang dapat dikerjasamakan adalah infrastruktur ekonomi dan infrastruktur sosial;
- b. Termasuk ke dalam 19 (Sembilan belas) jenis infrastruktur yang disebutkan dalam Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur dan peraturan perundang – undangan turunannya; dan
- c. Memberikan manfaat yang lebih bagi masyarakat dengan memperhatikan analisa biaya manfaat dan sosial dan analisa nilai manfaat uang (Value for Money) apabila dikerjasamakan dengan Badan Usaha.

Dalam pengimplementasiannya, Skema KPBU ini diharapkan dapat memacu baik aktifitas pembangunan pemerintah dan pemerintah daerah, maupun animo investasi bagi pihak swasta/badan usaha. Adapun bentuk stimulus bagi pihak swasta/badan usaha diantaranya adanya jaminan dan dukungan Pemerintah serta kepastian pengembalian investasi Badan Usaha dalam penyediaan infrastruktur melalui mekanisme pembayaran secara berkala oleh Pemerintah/Pemerintah Daerah kepada Badan Usaha. Namun demikian dalam pelaksanaannya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta harus memperhatikan kemampuan keuangan daerah, kesinambungan fiskal, pengelolaan resiko fiskal dan ketepatan sasaran penggunaannya secara jangka panjang.

Kegiatan yang akan dilaksanakan dengan skema KPBU akan difokuskan pada percepatan pengimplementasian kegiatan yang mendukung pencapaian visi misi Gubernur dan Wakil Gubernur, Proyek Strategis Nasional (PSN) sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional dan Proyek Prioritas sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 12 Tahun 2015 tentang Percepatan Penyiapan Infrastruktur Prioritas.

Beberapa kegiatan yang masuk kategori sebagaimana disebut di atas dan berpotensi untuk dikerjasamakan dengan Badan Usaha, di antaranya meliputi dan tidak terbatas pada :

- a. Penyelenggaraan MRT yang menghubungkan dengan daerah sekitar;
- b. Penyelenggaraan Kereta Api Ringan di wilayah Jakarta;
- c. Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) lingkup hilir;
- d. Fasilitas Jakarta Sewerage System/Pengolahan Air Limbah;
- e. Fasilitas pengolahan sampah (Intermediate Treatment Facility/ITF);
- f. Penyediaan Hunian Terjangkau/Affordable Housing; dan
- g. Penyelenggaraan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).

Untuk mengimplementasikan skema KPBU dalam penyediaan infrastruktur dan layanan publik lainnya, telah di bentuk Simpul

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL)/Corporate Social Responsibility (CSR)

Pembangunan infrastruktur pelayanan publik semakin lama semakin menjadi kebutuhan yang mendesak, Di lain sisi, kemampuan keuangan Pemerintah semakin terbatas. Oleh karena itu, skema TJSL/ CSR hadir sebagai salah satu solusi dengan resiko yang rendah

Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Kerjasama Pemerintah Daerah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 91 Tahun 2018. Simpul Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan, sinkronisasi, koordinasi, pengawasan dan evaluasi kegiatan KPDBU di Provinsi DKI Jakarta.

Untuk pengoptimalan pengimplementasian skema KPBU di Provinsi DKI Jakarta, simpul KPDBU dalam melaksanakan tugasnya dapat melibatkan Perangkat Daerah/BUMD, dapat berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat maupun lembaga lain dan dapat dibantu oleh Profesional baik perseorangan maupun tim, sebagaimana tercantum dalam Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Kerjasama Pemerintah Daerah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 91 Tahun 2018.

Kedepannya akan dilakukan penyesuaian terhadap regulasi tata cara penyelenggaraan KPDBU di Provinsi DKI Jakarta sebagai bentuk harmonisasi atas diubahnya Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur menjadi Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020

sebagai salah satu alternatif sumber pembiayaan. Di samping itu, TJSL/ CSR dapat mendorong peningkatan peran serta sektor swasta dalam pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012

tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan.

Alternatif sumber pembiayaan pembangunan dengan menggunakan skema TJS/ CSR ini merupakan suatu bentuk kerjasama antara pemerintah dengan swasta, yang bertujuan untuk mewujudkan pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat bagi dunia usaha, komunitas setempat, dan masyarakat pada umumnya. Namun, dalam proses kerjasama ini harus dilakukan atas dasar saling percaya dan tetap menerapkan asas transparansi dan akuntabilitas agar proses kerjasama ini dapat berlangsung kontinu dan segala program pembangunan dapat tetap berlanjut (sustainable cooperation).

Menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan dan dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan TJS/ CSR di lingkungan Provinsi DKI Jakarta, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menerbitkan Peraturan Gubernur Nomor 112 Tahun 2013 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Dunia Usaha (TSLDU). Berdasarkan Peraturan Gubernur tersebut, TJS/ CSR dilaksanakan secara sukarela dimana perusahaan memiliki kebebasan mutlak untuk menentukan bentuk kegiatan, besarnya dana yang akan dialokasikan atau dibelanjakan dan lokasi kegiatan, serta dengan cara/pola kegiatan TJS/ CSR dilaksanakan. Namun demikian, perlu adanya sinergi antara dunia usaha dengan Pemerintah Daerah dalam penerapannya agar lebih tepat sasaran dan bermanfaat secara optimal. Sinergitas antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan dunia usaha tersebut salah satunya dapat diwujudkan melalui Forum TSLDU.

Dalam Peraturan Gubernur Nomor 112 Tahun 2013 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Dunia Usaha, keberadaan Forum TSLDU diinisiasi oleh unsur dunia usaha, masyarakat, dan perguruan tinggi yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah. Pelaksanaan operasional Forum TSLDU dibebankan pada dana TJS/ CSR masing-masing perusahaan dan sumber-sumber lain yang sah serta tidak mengikat. Nantinya, semua bentuk kontribusi yang difasilitasi

melalui Forum TSLDU akan dipertanggung jawabkan dan dilaporkan kepada pemberi kontribusi.

TJS/CSR bukan merupakan kewajiban/ kompensasi/persyaratan/insentif atas diberikannya pelayanan perizinan terhadap kegiatan atau aktivitas perusahaan. Kontribusi TJS/ CSR dapat berupa barang milik daerah dan Jasa/non Barang termasuk asistensi/dukungan teknis, penggunaan keahlian, beasiswa dan pelatihan; dan/atau pendanaan. Pelaksanaan TJS/ CSR dilakukan melalui kegiatan langsung kepada masyarakat atau melalui keikutsertaan dalam program pemerintah daerah berupa kegiatan TJS/ CSR terkait barang milik daerah dan atau jasa/non barang milik daerah. Adapun ruang lingkup TJS/ CSR berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 112 Tahun 2013 meliputi:

- a. bina sosial dan budaya;
- b. bina ekonomi;
- c. bina fisik lingkungan, ;dan;
- d. penanggulangan bencana

Untuk mengoptimalkan pelaksanaan TJS/CSR, kedepan akan terus dilakukan penguatan melalui perbaikan kebijakan / regulasi dalam pelaksanaan TJS/CSR seperti penguatan definisi Tanggung Jawab Sosial dan/atau Filantropi, penguatan prinsip pelaksanaan yang tidak hanya menekankan kepada prinsip sukarela, tetapi juga prinsip tanggung jawab, kolaborasi, saling menghormati, kesetaraan, tidak mengikat, efektif dan efisien, perluasan pelaku TJS/CSR yang tidak hanya dapat dilaksanakan oleh dunia usaha saja, melainkan juga organisasi, perguruan tinggi, asosiasi atau, penguatan jenis kegiatan TJS/CSR yang terbuka untuk semua bidang pembangunan daerah yang selaras dengan tujuan pembangunan berkelanjutan, serta penguatan sistem monitoring dan evaluasi.

Dengan perbaikan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terhadap pelaksanaan kegiatan TJS dan Filantropi, diharapkan kegiatan TJS dan Filantropi dapat menjadi salah satu alternatif pembiayaan yang memiliki peran yang besar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memiliki dampak yang lebih besar dan lebih luas terhadap pembangunan berkelanjutan.

Pendanaan Terkait Pemanfaatan Ruang

A. Kewajiban Pemegang Izin Prinsip Pemanfaatan Ruang (IPPR)

Salah satu bentuk sumber pembiayaan yang saat ini sedang dioptimalkan pemanfaatannya oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta guna mewujudkan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum sesuai dengan rencana kota adalah melalui realisasi pemenuhan kewajiban dari pemegang Izin Prinsip Pemanfaatan Ruang (IPPR). Izin Prinsip Pemanfaatan Ruang adalah izin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pemohon yang akan memanfaatkan ruang, secara prinsip diperkenankan memanfaatkan ruang dalam batasan sub zona tertentu sesuai Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi, memenuhi persyaratan administrasi dan teknis berdasarkan aspek teknis, politis, sosial, budaya dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sebelum IPPR, produk persetujuan prinsip ini dituangkan dalam bentuk Surat Gubernur atau yang dikenal dengan Surat Izin Penunjukan Penggunaan Tanah (SIPPT). Dimana di dalam IPPR telah ditetapkan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum yang harus diwujudkan oleh Pemegang IPPR sebagai bentuk suatu kewajiban.

Adapun pembangunan prasarana sebagaimana dimaksud di atas meliputi pembangunan jaringan jalan; jaringan saluran pembuangan air limbah; jaringan saluran pembuangan air hujan (drainase); atau tempat pembuangan sampah.

Untuk pembangunan sarana meliputi pembangunan sarana perniagaan/ perbelanjaan; sarana pelayanan umum dan pemerintahan; sarana pendidikan; sarana kesehatan; sarana peribadatan; sarana rekreasi dan olahraga; sarana pemakaman; sarana pertamanan dan ruang terbuka hijau; atau sarana parkir.

Sedangkan untuk pembangunan utilitas umum meliputi pembangunan jaringan air bersih; jaringan listrik; jaringan telepon; jaringan gas; jaringan transportasi; pemadam kebakaran; atau sarana penerangan jasa umum.

Pada dasarnya pemenuhan kewajiban pemegang Izin Pemanfaatan Ruang

dimaksudkan untuk menjaga keseimbangan daya dukung lingkungan melalui kontribusi swasta/masyarakat. Namun, guna terus mendorong tingkat akuntabilitas pengelolaan pemenuhan kewajiban pemegang Izin Pemanfaatan Ruang dan pencapaiannya yang dirasa belum optimal, tentunya pengelolaan kewajiban dimaksud perlu ditingkatkan kedepannya melalui upaya penagihan piutang atas pemenuhan kewajiban pemegang Izin Pemanfaatan Ruang secara berkala dan upaya peningkatan keterbukaan informasi dan perizinan terpadu berbasis daring (online) yang menyimpan seluruh informasi terkait izin dan kewajiban yang dapat diakses oleh berbagai pihak secara mudah

B. Pengenaan Kompensasi Pelampauan Koefisien Lantai Bangunan (KLB)

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi disebutkan bahwa dalam rangka mendorong perkembangan kota terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang dan sebagai perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang, Pemerintah Daerah dapat menerapkan ketentuan insentif dan disinsentif. Dalam penetapan disinsentif didasarkan atas pertimbangan pemanfaatan ruang dibatasi dan dikendalikan untuk menjaga kesesuaian dengan fungsi ruang yang ditetapkan dalam rencana tata ruang. Objek pengenaan disinsentif diberikan apabila pembangunan dilakukan pada kawasan yang dibatasi perkembangannya.

Berdasarkan ketentuan Pasal 644 ayat (1) huruf b Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi, pengenaan kompensasi merupakan salah satu jenis disinsentif dalam penataan ruang. Dalam rangka menindaklanjuti ketentuan tersebut, saat ini Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menerapkan ketentuan pengenaan kompensasi terhadap pelampauan Nilai Koefisien Lantai Bangunan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan

Gubernur Nomor 210 Tahun 2016 tentang Pengenaan Kompensasi Terhadap Pelampauan Nilai Koefisien Lantai Bangunan

Berdasarkan Pasal 621 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi serta Peraturan Gubernur Nomor 210 Tahun 2016 tentang Pengenaan Kompensasi Terhadap Pelampauan Nilai Koefisien Lantai Bangunan, pelampauan KLB dapat diberikan pada lokasi yang ditetapkan sebagai zona Teknik Pengaturan Zonasi (TPZ) Bonus dengan kode a yang merupakan:

- a. pusat kegiatan primer;
- b. pusat kegiatan sekunder;
- c. kawasan strategis kepentingan ekonomi;
- d. kawasan terpadu kompak dengan pengembangan Konsep TOD;
- e. kawasan yang memiliki fungsi sebagai fasilitas parkir perpindahan moda (park and ride); dan
- f. lokasi pertemuan angkutan umum massal.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 210 Tahun 2016 tentang Pengenaan Kompensasi Terhadap Pelampauan Nilai Koefisien Lantai Bangunan, bentuk kompensasi terhadap pelampauan KLB antara lain :

- a. menyediakan lahan dan/atau membangun RTH Public;
- b. menyediakan lahan dan/atau membangun rumah susun umum;
- c. menyediakan lahan dan/atau membangun waduk atau situ;
- d. menyediakan infrastruktur;
- e. menyediakan jalur dan meningkatkan kualitas fasilitas pejalan kaki yang terintegrasi dengan angkutan umum; dan
- f. menyediakan jalur sepeda yang terintegrasi dengan angkutan umum

Bentuk penyediaan infrastruktur sebagaimana huruf d antara lain :

- a. infrastruktur transportasi;
- b. infrastruktur jalan;
- c. infrastruktur sumber daya air, irigasi dan pengendalian banjir;
- d. infrastruktur air minum;
- e. infrastruktur sistem pengelolaan air limbah terpusat;
- f. infrastruktur sistem pengelolaan air limbah setempat;

- g. infrastruktur sistem pengelolaan persampahan;
- h. infrastruktur telekomunikasi dan informatika;
- i. infrastruktur ketenagalistrikan;
- j. infrastruktur minyak dan gas bumi dan energi terbarukan
- k. infrastruktur konservasi energi;
- l. infrastruktur fasilitas perkotaan;
- m. infrastruktur fasilitas pendidikan;
- n. infrastruktur fasilitas sarana dan prasarana olahraga, serta kesenian;
- o. infrastruktur kawasan;
- p. infrastruktur pariwisata;
- q. infrastruktur kesehatan;
- r. infrastruktur lembaga permasyarakatan;
- s. infrastruktur perumahan rakyat;
- t. infrastruktur pertamanan;
- u. infrastruktur pemerintahan;
- v. infrastruktur lingkungan hidup; dan
- w. infrastruktur perekonomian

Selain bentuk kompensasi sebagaimana huruf a sampai dengan huruf f, dikenakan kompensasi tambahan dalam bentuk penyediaan jalur dan peningkatan kualitas pejalan kaki secara proporsional pada lahan perencanaan serta tidak diperhitungkan dalam nilai kesetaraan kompensasi yang ditetapkan dalam Perencanaan Arsitektur.

Penyediaan bentuk kompensasi tersebut diutamakan pada lahan/aset milik Pemerintah Daerah atau pada lahan yang wajib diserahkan kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan prioritas kebutuhan Pemerintah Daerah berdasarkan usulan kebutuhan SKPD/UKPD. Bentuk kompensasi tersebut wajib diserahkan kepemilikannya kepada Pemerintah Daerah untuk dicatat menjadi aset Pemerintah Daerah

Pelampauan KLB dan bentuk pengenaan kompensasinya ditetapkan berdasarkan Persetujuan Gubernur setelah mendapatkan pertimbangan dalam Rapat Pimpinan BKPRD dan/atau forum Rapat Pimpinan Gubernur. Terhadap permohonan pelampauan nilai KLB yang mendapatkan persetujuan tersebut terkait penetapan pelampauan nilai KLB, perhitungan nilai kompensasi dan bentuk kompensasi ditindaklanjuti dengan Perjanjian Pemenuhan Kewajiban Kompensasi atas Pelampauan Nilai KLB yang dibuat secara notarial akta. Mekanisme kompensasi pelampauan KLB ini diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 210

Tahun 2016 Tentang Pengenaan Kompensasi Terhadap Pelampauan Nilai Koefisien Lantai Bangunan

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah melakukan penerapan pengenaan kompensasi terhadap pelampauan koefisien lantai bangunan berupa pengenaan kompensasi pembangunan infrastruktur seperti Simpang Susun Semanggi, Penataan Kawasan Kota Tua, Pembangunan Rusunami / Rusunawa, Revitalisasi Waduk dan Kali Pengendali Banjir dan Fasilitas Publik Lainnya.

C. Konversi dari Pemenuhan Kewajiban Pembiayaan dan Pembangunan Rumah Susun Murah/Sederhana Melalui Konversi Oleh Para Pemegang Izin Pemanfaatan Ruang

Selaras dengan Kewajiban IPPR dan Kompensasi Pelampauan KLB, skema ini merupakan salah satu terobosan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang ditetapkan melalui Peraturan Gubernur Nomor 112 Tahun 2019 dengan pengaturan tata cara konversi dari kewajiban dan/atau sanksi yang dikenakan kepada para pemegang Izin Pemanfaatan Ruang berupa penyediaan Rumah Susun Murah/Sederhana akibat perizinan dan/atau pelanggaran perizinan SP3L (Surat Persetujuan Prinsip Pembebasan Lahan untuk tanah > 5000m²) yang telah dilakukan sebelumnya, menjadi bentuk lainnya yaitu penyediaan prasarana, sarana dan utilitas umum.

Sebagaimana diketahui sejak tahun 90an, pemenuhan kewajiban dan/atau sanksi SP3L ini banyak menemui kendala dalam pemenuhannya karena berbagai alasan seperti pertimbangan bisnis, kondisi sosial masyarakat di lokasi, kesulitan dalam mencari lahan lain untuk pembangunan Rumah Susun ataupun hambatan pada proses lainnya, yang pada akhirnya apabila diakumulasikan maka ekuivalensinya dalam nilai uang/biaya akan sangat bermanfaat untuk penyediaan prasarana sarana umum di Jakarta.

Secara lebih detail, skema ini mengatur bahwa kewajiban/sanksi SP3L dapat berupa:

1. pembangunan rumah susun, yang pada pengaturan baru ini bukan saja harus di lokasi izin melainkan juga dapat dilakukan di lahan milik Pemerintah Daerah
2. pembangunan prasarana, sarana dan utilitas umum di lahan milik Pemerintah Daerah atau pembangunan konstruksi berikut tanah, berupa:
 - a. prasarana: jaringan jalan, air limbah, drainase atau persampahan
 - b. sarana: perbelanjaan, pelayanan umum dan pemerintahan, pendidikan, kesehatan, peribadatan, rekreasi dan olahraga, pemakaman, pertamanan dan RTH, parkir.
 - c. utilitas umum: jaringan air bersih, listrik, telepon, gas, jaringan transportasi, pemadam kebakaran, penerangan jalan umum.
3. pengadaan barang berupa benda bergerak/tidak bergerak dan/atau penyediaan barang dalam rangka melengkapi pembangunan rumah susun dan prasarana, sarana dan utilitas umum.

Adapun perhitungan konversi dari Rumah Susun Sederhana juga ditetapkan pada Peraturan Gubernur Nomor 112 Tahun 2019 dengan rumus yang mempertimbangkan luas lahan dan NJOP pada saat izin diterbitkan dan NJOP terakhir sehingga penilaian konversi menjadi valid dan tidak merugikan Pemerintah.

Pada akhirnya skema ini dapat menguntungkan kedua belah pihak baik Pemerintah (karena dapat mendukung terlaksananya peningkatan/penyediaan prasarana sarana umum), dan juga bagi para pemegang izin yang selama ini “terkatung-katung” akibat ketidakmampuan mereka menyediakan Rumah Susun murah, maka ada kepastian hukum dalam penyelesaian kewajiban dengan cara memilih alternatif lain berupa penyediaan prasarana sarana umum

Jaringan Kolaborasi Pembangunan Jakarta (*Jakarta Development Collaboration Network*)

Jakarta telah menjadi salah satu kota terbesar dan terpadat di Indonesia dengan lebih dari 10 juta orang. Hal ini mendorong pertumbuhan besar dalam kegiatan ekonomi Jakarta. Meskipun demikian, Jakarta perlu mengatasi masalah kemiskinan, akses publik yang tidak merata, tantangan ekonomi, pengembangan kota, dan kualitas warganya yang belum cukup baik untuk menghadapi tantangan di masa depan. Oleh karena itu, Jakarta menetapkan komitmen untuk memperbaharui struktur perkotaan yang disebut "Jakarta City Regeneration", yang meliputi pembaharuan paradigma, fisik, dan sosial budaya. Jakarta City Regeneration menggunakan model Kota 4.0, yang mana warga sebagai co-creator dan pemerintah sebagai kolaborator.

Untuk mempercepat keberhasilan regenerasi kota, Jakarta perlu melihat jauh ke depan dengan mengembangkan kemitraan lokal dan global. Melalui Jakarta Development Collaboration Network (JDCN), Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ingin terlibat dalam kerja sama dan kolaborasi lebih lanjut dengan berbagai pemangku kepentingan untuk mengubah Jakarta menjadi kota yang berkelanjutan, modern, sejahtera, dan tangguh demi kebahagiaan warganya.

Jaringan Kolaborasi Pembangunan Jakarta (Jakarta Development Collaboration Network) yang selanjutnya disebut JDCN adalah forum yang dibentuk Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk melaksanakan pembangunan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta melalui paradigma dan sistem kolaborasi dan ko-kreasi bersama unsur di luar Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana tercantum dalam Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 24 Tahun 2020 Tentang Jaringan Kolaborasi Pembangunan Jakarta (Jakarta Development Collaboration Network).

JDCN mempunyai tugas mengoordinasikan Kolaborasi dan Ko-kreasi dalam Pembangunan Provinsi DKI Jakarta bersama unsur pemerintah dan/atau unsur non pemerintah. JDCN membantu Gubernur untuk memastikan bahwa usulan dari pihak luar sesuai dengan

kebutuhan Kota Jakarta tidak hanya dalam konteks jangka pendek tapi kebutuhan Kota Jakarta lebih luas sehingga ini tidak hanya dengan Kegiatan-Kegiatan Sosial saja, akan tetapi dapat juga berupa pembangunan fisik.

Bisnis Proses yang akan dilaksanakan adalah JDCN menerima usulan Proyek/Kegiatan dari pihak pengusul, kemudian memberikan rekomendasi kepada Gubernur mengenai usulan Proyek/Kegiatan, selanjutnya Proyek/Kegiatan yang telah disepakati akan dilaksanakan/diselenggarakan oleh pengusul dan/atau bersama pemerintah. Dengan adanya JDCN ini semua usulan dan kegiatan yang telah dilaksanakan akan terdata dan terkoordinasikan dengan baik melalui Sistem Informasi. Untuk mengimplementasikan sistem kerja JDCN telah dibentuk Susunan Keanggotaan Jaringan Kolaborasi Pembangunan Jakarta (Jakarta Development Collaboration Network) sebagaimana diatur dalam Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 336 Tahun 2020 Tentang Susunan Keanggotaan Jaringan Kolaborasi Pembangunan Jakarta (Jakarta Development Collaboration Network).

Pemilihan Skema Pembayaran

Rencana pembangunan pemerintah tidak semua direalisasikan di dalam satu waktu yang bersamaan. Realisasi rencana pembangunan dilakukan secara bertahap dalam periode pembangunan yang telah disesuaikan dengan Rencana Program di dalam rencana pembangunan daerah. Sehingga, untuk menentukan rencana pembangunan yang akan direalisasikan setiap tahun perlu disusun terlebih dahulu prioritas proyek sehingga masing-masing proyek memiliki skala kepentingan untuk didahulukan dibandingkan dengan proyek lainnya.

Selain itu, rencana pembangunan yang direalisasikan di dalam proyek membutuhkan biaya yang besar sehingga perencanaan merupakan salah satu aspek yang cukup penting. Keterbatasan dana untuk pembangunan menyebabkan belum bisa terpenuhinya seluruh kebutuhan. Dengan mempertimbangkan hal tersebut maka perlu

diterapkan penentuan skala prioritas sehingga menghasilkan urutan prioritas proyek yang tepat dan akurat.

Project Selection merupakan rangkaian tahapan pengambilan keputusan pembiayaan atas usulan belanja modal dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah terkait. Tujuan project

selection antara lain sebagai upaya melakukan penilaian jangka panjang atas usulan belanja modal yang harus dilaksanakan, apa manfaat yang diperoleh dari perolehan belanja modal tersebut, serta bagaimana pendanaannya. Dengan persiapan dan penelitian yang komprehensif, diharapkan belanja modal dapat dilaksanakan dengan selektif, efektif dan efisien.

TABEL 3.16

Petunjuk Pemilihan Alternatif Pembiayaan Berdasarkan Kelayakan Ekonomi dan Finansial Proyek

Kelayakan Ekonomi dan Finansial	Besaran Investasi		
	Tinggi (≥100 milyar)	Sedang (20-100 milyar)	Rendah (0-20 milyar)
Tidak layak ekonomi	APBN/APBD	APBN/APBD	APBN/APBD
Layak secara ekonomi, namun tidak layak secara finansial	APBN/ APBD Betterment Levies CSR	APBN/ APBD CSR	APBN/ APBD CSR Filantropi
Layak secara ekonomi, namun kurang layak secara finansial	Pinjaman Daerah	Manajemen Aset	Manajemen Aset
Layak secara ekonomi dan finansial marjinal (dengan kapasitas fiskal yang terbatas)	KPBU-AP KPBU-ESCO Pinjaman Daerah Development Impact Fees Linkage	Development Impact Fees; Development Exaction; Linkage Excess Condemnation Konsolidasi Lahan	Konsolidasi Lahan Development Excation
Layak secara ekonomi dan finansial marjinal (dengan kapasitas fiskal yang cukup tinggi)	KPBU-VGF Pinjaman Daerah Obligasi		
Layak secara ekonomi dan finansial	KPBU Reguler; KPBU Penjaminan; KPBU Sebagian Konstruksi Join Venture PINA	Join Venture	

Sumber: World Bank, "Handbook for Subnational Government (SNG) Alternative Financing Modalities" 2020

Untuk dapat mengetahui dan mengevaluasi kelayakan ekonomi dan finansial suatu proyek, maka perlu dilakukan analisis kelayakan ekonomi dan finansial dengan memperhatikan hasil analisis yang menunjukkan apakah proyek layak secara ekonomi dan finansial atau tidak.

Evaluasi kelayakan ekonomi dilakukan dengan membandingkan biaya dan manfaat. Tingkat kelayakannya diukur dengan pendekatan Economic Internal Rate of Return/EIRR, Economic Net Present Value/ENPV, serta Benefit Cost Ratio/BCR pada tingkat diskonto yang ditetapkan.

Suatu proyek dikatakan layak secara ekonomi apabila:

- $EIRR \geq 9\%$ (minimum batas kelayakan ADB);
- $ENPV \geq 0$; dan
- $BCR \geq 1$

Sedangkan Kelayakan finansial proyek dianalisis menggunakan analisis Internal Rate of Return (IRR) dan Net Present Value (NPV). NPV dan IRR adalah bagian dari analisis penganggaran modal (capital budgetting) yang menjadi parameter utama dalam penilaian kelayakan suatu proyek. NPV adalah selisih nilai masa kini (present value) antara seluruh aliran kas yang dikeluarkan (cash outflow) dan aliran kas diterima (cash inflow) sepanjang umur proyek.

Jika NPV positif (>0) maka berarti aliran kas

diterima lebih besar dari aliran kas yang dikeluarkan. IRR adalah tingkat imbal hasil (rate of return) yang membuat nilai masa kini dari aliran kas yang dikeluarkan menjadi sama dengan nilai masa kini dari aliran kas yang diterima. Dengan demikian, IRR adalah tingkat return yang membuat $NPV=0$. Dalam penilaiannya, besar IRR harus lebih besar dari biaya modal (cost of capital) yang digunakan oleh proyek. Cost of capital dihitung menggunakan weighted average cost of capital (WACC).

Suatu proyek dikatakan layak secara finansial apabila:

- $NPV > 0$
- $IRR (\text{proyek dan equity}) > WACC$

Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha

Pembiayaan dengan skema KPBU, merupakan kerjasama antara Pemerintah dan Badan Usaha dalam penyediaan infrastruktur untuk kepentingan umum dengan mengacu pada spesifikasi yang telah ditetapkan sebelumnya, yang sebagian atau seluruhnya menggunakan sumber daya Badan Usaha dengan memperhatikan pembagian resiko antara para pihak. Penggunaan skema KPBU dalam penyediaan infrastruktur strategis, diantaranya bertujuan untuk penyediaan infrastruktur yang berkualitas, efektif, tepat sasaran dan tepat waktu sekaligus sebagai salah satu strategi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam memenuhi kebutuhan pendanaan secara berkelanjutan.

Skema KPBU dapat dilakukan dengan prakarsa dari Pemerintah (*solicited*) maupun prakarsa dari Badan Usaha (*unsolicited*) dengan masing-masing keunggulan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur, Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Nomor 4 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan

Pembangunan Nasional Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur, dan Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 22 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 91 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 22 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kerjasama Pemerintah Daerah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur.

Adapun lingkup kegiatan yang dapat dilaksanakan dengan skema KPBU, mencakup sebagian atau seluruh proses kegiatan KPBU, seperti pembiayaan, perancangan, pembangunan, rehabilitasi, pengoperasian, pemeliharaan, dan lainnya. Beberapa kriteria yang dapat dibiayai dari skema KPBU berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud di atas, berupa infrastruktur ekonomi dan infrastruktur sosial dengan ketentuan:

- a. Termasuk ke dalam 19 (Sembilan belas) jenis infrastruktur yang disebutkan dalam

Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur dan peraturan perundang-undangan turunannya; dan

- b. Memberikan manfaat yang lebih bagi masyarakat dengan memperhatikan analisa biaya manfaat dan sosial dan analisa nilai manfaat uang (*Value for Money*) apabila dikerjasamakan dengan Badan Usaha.

Dalam pengimplementasiannya, skema KPBU ini diharapkan dapat memacu, baik aktifitas pembangunan pemerintah dan pemerintah daerah, maupun animo investasi bagi pihak swasta/badan usaha. Adapun bentuk stimulus bagi pihak swasta/badan usaha diantaranya adanya jaminan dan dukungan Pemerintah serta kepastian pengembalian investasi Badan Usaha dalam penyediaan infrastruktur melalui mekanisme pembayaran secara berkala oleh Pemerintah/Pemerintah Daerah kepada Badan Usaha. Hal ini sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerjasama Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2016 tentang Pembayaran Ketersediaan Layanan Dalam Rangka Kerjasama Pemerintah Daerah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur di Daerah, Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Nomor 2 Tahun 2020 dan Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Kerjasama Pemerintah Daerah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 91 Tahun 2018. Namun dalam pelaksanaannya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta harus memperhatikan kemampuan keuangan daerah,

kesinambungan fiskal, pengelolaan resiko fiskal dan ketepatan sasaran penggunaannya secara jangka panjang. Kegiatan yang akan dilaksanakan dengan skema KPBU akan difokuskan pada percepatan pengimplementasian kegiatan yang mendukung pencapaian visi misi Gubernur dan Wakil Gubernur, Proyek Strategis Nasional (PSN) sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional dan Proyek Prioritas sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 12 Tahun 2015 tentang Percepatan Penyiapan Infrastruktur Prioritas.

Beberapa kegiatan yang masuk dalam kategori di atas dan berpotensi untuk dikerjasamakan dengan Badan Usaha, di antaranya meliputi, dan tidak terbatas pada :

- a. Pembangunan Jakarta Sewerage System/Pengolahan Air Limbah untuk Zona 5 dan 8;
- b. Penyelenggaraan MRT yang menghubungkan dengan daerah sekitar;
- c. Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional Jatiluhur 1;
- d. Penyelenggaraan Kereta Api Ringan di wilayah Jakarta/LRT Fase II;
- e. Fasilitas pengolahan sampah (Intermediate Treatment Facility/ITF);
- f. Penyediaan Hunian Terjangkau/Affordable Housing.

Dalam rangka implementasi skema KPBU untuk penyediaan infrastruktur dan layanan publik lainnya di Jakarta, telah di bentuk Simpul Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha (KPDBU) sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Kerjasama Pemerintah Daerah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 91 Tahun 2018.

Simpul Kerjasama dimaksud mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan, sinkronisasi, koordinasi, pengawasan dan evaluasi kegiatan KPDBU di Provinsi DKI Jakarta. Hal tersebut dilakukan guna optimalisasi/implementasi skema KPBU di Provinsi DKI Jakarta. Dalam melaksanakan tugasnya, simpul KPDBU dapat melibatkan Perangkat Daerah/BUMD, serta berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat maupun lembaga

lain yang dapat dibantu oleh profesional perseorangan maupun tim.

Mengenai skema implementasi KPBU, usulan PMD PT. Jakpro perlu dikurangi terkait pembangunan LRT fase IIA sebesar karena usulan yang dimaksud tersebut belum ada keputusan mengenai skema pembiayaannya (KPBU atau PMD).

Pinjaman dan Hibah Luar Negeri

Selain Pinjaman PEN dan KPBU di atas, dalam rangka pemenuhan kebutuhan pendanaan dalam penyediaan infrastruktur strategis, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga memanfaatkan skema pinjaman dan hibah luar negeri sebagai salah satu alternatif sumber pendanaan yang ditempuh. Pinjaman Luar Negeri sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah merupakan setiap pembiayaan melalui utang yang diperoleh Pemerintah dari pemberi pinjaman luar negeri, yang diikat oleh suatu perjanjian pinjaman dan tidak berbentuk surat berharga negara dan harus dibayar kembali dengan persyaratan tertentu.

Pinjaman luar negeri dapat bersumber antara lain dari kreditor multilateral, kreditor bilateral, kreditor swasta asing dan lembaga penjamin kredit ekspor. Di samping itu, pengajuan pinjaman luar negeri harus memenuhi prinsip transparan, akuntabel, efisien dan efektif, kehati-hatian, tidak disertai ikatan politik, serta tidak memiliki muatan yang dapat mengganggu stabilitas keamanan negara.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah, Pemerintah Daerah dilarang untuk melakukan pinjaman secara langsung kepada pihak luar negeri. Namun demikian, Pemerintah dapat melakukan penerusan pinjaman kepada Pemerintah Daerah.

Adapun seluruh penerimaan maupun pengeluaran dalam rangka pinjaman daerah harus dicantumkan dalam APBD. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah beberapa kali memanfaatkan skema pinjaman daerah yang bersumber dari luar negeri ini, diantaranya untuk proyek Jakarta *Emerge Dredging Initiative* (JEDI) yang didanai oleh *World Bank* dan untuk pembangunan *Mass Rapid Transit* (MRT) Koridor Selatan-Utara Fase I (Lebak Bulus-Bundaran HI) dengan memanfaatkan pendanaan dari *Japan International Cooperation Agency* (JICA). Begitu pula halnya dengan penerimaan hibah dari APBN yang bersumber dari pinjaman luar negeri dalam rangka pendanaan untuk sebagian pengembangan Jakarta *Sewerage System* (JSS) Zona 1 dan Zona 6.

Obligasi

Obligasi Daerah selain sebagai alternatif pembiayaan pembangunan daerah juga merupakan salah satu instrumen yang dapat dimanfaatkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah tanpa tergantung sepenuhnya pada APBD. Selain itu, Obligasi Daerah diharapkan mampu membuka

lapangan kerja melalui pembangunan infrastruktur serta mampu meningkatkan daya saing daerah dengan ketersediaan infrastruktur yang memadai. Penerbitan obligasi daerah ini juga dapat menjadi salah satu instrumen dalam peningkatan penerapan tata kelola keuangan dan pemerintahan yang baik, yang meliputi transparansi, akuntabilitas, dan disiplin dalam

pengelolaan keuangan Daerah. Tata kelola keuangan dan pemerintahan dimaksud, menjadi persyaratan penerbitan obligasi dimaksud.

Obligasi daerah merupakan pinjaman daerah yang ditawarkan kepada publik melalui penawaran umum di pasar modal domestik dalam bentuk mata uang rupiah. Obligasi daerah merupakan surat pernyataan utang dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas segala risiko yang timbul akibat dari penerbitan obligasi daerah.

Terdapat beberapa jenis kegiatan yang bisa dibiayai melalui skema penerbitan obligasi daerah, antara lain:

1. Kegiatan pembangunan prasarana dan/atau sarana dalam rangka penyediaan pelayanan publik yang menjadi urusan Pemerintahan Daerah;
2. Pelaksanaan kegiatan prasarana dan/atau sarana daerah tidak melampaui akhir tahun anggaran pada masa berakhirnya jabatan Kepala Daerah dikecualikan bagi kegiatan yang mendukung prioritas nasional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Sesuai dengan dokumen perencanaan daerah;
4. Merupakan kegiatan baru atau pengembangan kegiatan yang sudah ada;
5. Dapat dibiayai sepenuhnya atau sebagian dari obligasi daerah; dan
6. Kegiatan beserta barang milik daerah yang melekat dalam kegiatan tersebut dapat dijadikan jaminan obligasi daerah.

Kecermatan dalam melihat peluang serta minat pasar/investor menjadi salah satu langkah strategis yang ikut menentukan tingkat

penyerapan obligasi daerah di pasar modal. Selanjutnya, ada beberapa langkah strategis yang perlu dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta guna mengoptimalkan rencana penerbitan obligasi daerah, yaitu:

1. Penguatan koordinasi dan komunikasi terkait beberapa kebijakan di tingkat pusat maupun daerah dalam menerbitkan obligasi;
2. Penyiapan struktur kelembagaan dan sumber daya berikut kelengkapannya agar mampu dalam menjalankan rangkaian proses dari perencanaan dan persiapan hingga penerbitan obligasi;
3. Penyediaan beberapa instrumen regulasi dan pendukung lainnya.

Sebagai langkah awal untuk mendukung penyelenggaraan skema obligasi daerah, telah diterbitkan Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 964 Tahun 2019 tentang Tim Persiapan Penerbitan Obligasi Daerah Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Selain itu, Gubernur telah menyampaikan surat kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian tentang Permohonan Fasilitas Pendampingan Penerbitan Obligasi Daerah. Diharapkan dengan adanya kedua instrumen tersebut, dapat mempercepat persiapan penerbitan obligasi daerah Provinsi DKI Jakarta.

Dengan adanya skema obligasi daerah sebagai salah satu skema alternatif pembiayaan, diharapkan mampu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di samping menghadirkan dana untuk kebutuhan percepatan pembangunan infrastruktur di Jakarta.

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Dunia Usaha/Corporate

Social Responsibility

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, pembiayaan dengan skema TSLDU/CSR merupakan skema

pembiayaan non-APBD yang bertujuan untuk mewujudkan pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas

kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat bagi dunia usaha, komunitas setempat, dan masyarakat pada umumnya. Selain itu, Pemprov. DKI Jakarta telah mengeluarkan Peraturan Gubernur Nomor 112 Tahun 2013 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Dunia Usaha. Dalam peraturan Gubernur dimaksud, TSLDU/CSR bertujuan untuk mengoptimalkan program pembangunan daerah, dengan prinsip kegiatan sukarela dimana perusahaan memiliki kebebasan mutlak untuk menentukan bentuk kegiatan, besarnya dana yang akan dialokasikan atau dibelanjakan, lokasi kegiatan, serta cara/pola kegiatan TSLDU/CSR yang akan dilaksanakan.

Namun demikian, diperlukan sinergi antara dunia usaha dengan Pemerintah Daerah dalam penerapan TSLDU/CSR agar lebih tepat sasaran dan bermanfaat secara optimal. Sinergi tersebut salah satunya dapat diwujudkan melalui keberadaan Forum TSLDU/CSR, sebagaimana Peraturan Gubernur dimaksud. Melalui forum tersebut, diharapkan terjalin sinergi antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan dunia usaha dalam penyusunan program dan aktivitas TSLDU/CSR sehingga sejalan dengan arah pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan kebutuhan riil yang ada di masyarakat.

Pengenaan Kompensasi Pelampauan KLB dan Konversi Kewajiban Penyediaan Rumah Susun Murah/ Sederhana (RSM/S)

Pengenaan kompensasi pelampauan Koefisien Lantai Bangunan (KLB) merupakan mekanisme disinsentif yang dilaksanakan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2014 tentang Rencana Detil Tata Ruang dan Pengaturan Zonasi (RDTR dan PZ), dimana disebutkan bahwa dalam rangka mendorong perkembangan kota terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang dan sebagai instrumen untuk mencegah, membatasi pertumbuhan atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang. Tata kelola dana kompensasi pelampauan KLB yang meliputi sisi penerimaan dan pemanfaatan akan ditingkatkan agar memenuhi regulasi pengelolaan keuangan daerah dan regulasi penataan ruang. Namun demikian, penerimaan dari kompensasi pelampauan KLB ini tidak dapat diperlakukan seperti jenis penerimaan daerah lainnya yang selalu memiliki target penerimaan.

Pada saat ini, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sedang menyusun revisi atas Peraturan Gubernur Nomor 210 Tahun 2016 tentang Pengenaan Kompensasi Terhadap Pelampauan Nilai Koefisien Lantai Bangunan. Namun demikian, revisi Pergub dimaksud saat ini masih menunggu disahkannya Raperda

tentang RTRW dan RDTR, mengingat masih diperlukannya penafsiran pihak legislatif dalam memaknai insentif/disinsentif penataan ruang.

Selain kompensasi pelampauan KLB, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sedang menjajaki mekanisme disinsentif lainnya yaitu melalui mekanisme Kewajiban Penyediaan Rumah Susun Murah/Sederhana (RSM/S). Mekanisme tersebut dilaksanakan dengan memberikan sanksi bagi pengembang/badan usaha/yayasan yang melakukan pembebasan lahan di atas 5000 m² dan/atau berada di jalan protokol tanpa memiliki Surat Persetujuan Prinsip Pembebasan Lokasi/Lahan (SP3L) dalam bentuk pembangunan prasarana sarana dan utilitas umum dengan menggunakan nilai konversi kewajiban rumah susun murah/ sederhana. Kewajiban RSM/S dapat dilakukan di lahan milik pemohon atau dapat dialihkan ke lahan milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta apabila pemohon tidak memiliki lahan. Saat ini, mekanisme tersebut masih dalam tahap pembahasan revisi rancangan Peraturan Gubernur tentang Pelaksanaan Pembangunan Prasarana Sarana dan/atau Utilitas Umum dengan menggunakan nilai konversi Kewajiban RSM/S.

Kelembagaan Pembiayaan

Menyikapi semakin tingginya aktivitas berbagai sektor pembangunan khususnya dalam penyediaan berbagai infrastruktur strategis perkotaan, baik yang diinisiasi oleh Pemerintah/Pemerintah Daerah maupun pihak swasta serta dalam rangka optimalisasi pemanfaatan dan pendayagunaan potensi pembiayaan yang ada di daerah maupun sumber-sumber lainnya yang berasal dari lembaga pembiayaan di tingkat nasional maupun multinasional, maka dipandang perlu dibentuk lembaga pembiayaan yang dapat mengakomodir dan berperan sebagai katalisator dalam berbagai aktivitas pembangunan. Pembentukan lembaga pembiayaan pembangunan ini mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan. Lembaga pembiayaan pembangunan sebagaimana dimaksud pada Peraturan Presiden ini meliputi Perusahaan Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura dan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang berbentuk Perseroan Terbatas atau koperasi. Terkait dengan hal ini, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk membentuk Perusahaan Daerah/BUMD dengan 'core business' di

bidang pembiayaan. Aktivitas pembiayaan pembangunan sebagaimana dimaksud disini dapat berbentuk penyediaan dana dan/atau barang modal yang dapat dilaksanakan secara kerjasama dengan berbagai institusi keuangan swasta maupun multilateral, sepanjang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Lembaga pembiayaan pembangunan ini akan dikembangkan secara bertahap. Pada periode awal setelah pendiriannya, difokuskan pada pembangunan fondasi korporasi atau bentuk kelembagaan lainnya yang kuat. Selanjutnya, secara bertahap akan dikembangkan menjadi lembaga yang dapat menjadi katalisator sekaligus solusi yang komprehensif dalam berbagai aktifitas pembangunan termasuk penyediaan infrastruktur di Jakarta hingga dapat berkiprah di tingkat nasional. Pada tahun 2018, telah dilaksanakan berbagai pembahasan dan kajian pembentukan Lembaga Pembiayaan dengan *leading sector* Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD). Selanjutnya, diputuskan akan didirikan lembaga pembiayaan dengan mekanisme Penugasan kepada BUMD melalui anak perusahaan.

Sasaran & Prioritas Pembangunan

Pada bab ini dikemukakan secara eksplisit tentang perumusan sasaran dan prioritas pembangunan daerah berdasarkan hasil analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu dan capaian kinerja yang

direncanakan dalam RPJMD sebelumnya, identifikasi permasalahan ditingkat daerah dan nasional, rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaannya.



Foto: @omroy02_

4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Isu Strategis Pembangunan

Pandemi Covid-19 mengajarkan kepada kita untuk melihat kembali konsep pembangunan Jakarta di masa depan. Oleh karena itu, pada masa datang, Jakarta diharapkan akan menjadi;

1. Kota yang tahan pandemi (*pandemic proof city*);
2. Kota yang tangguh menghadapi krisis (*crisis resilient city*);
3. Kota yang mengimplementasikan digitalisasi (*digitally advanced city*);
4. Kota yang berkelanjutan dan layak huni (*sustainable livable city*);

Oleh karena itu, dalam 5 (lima) tahun kedepan, hal-hal yang akan menjadi isu utama pembangunan diantaranya, yaitu:

1. Ketahanan terhadap bencana.

Rentannya kondisi Provinsi DKI Jakarta terhadap banjir dan genangan tidak terlepas dari demografi Jakarta, yang memiliki tingkat kemiringan 0 – 3 persen dan aliran 13 sungai di dalam wilayahnya. Berdasarkan laporan KLHS Perubahan RPJMD 2017-2022, kinerja Jasa Lingkungan Hidup Pengatur Mitigasi Banjir Tahun 2018, DKI Jakarta didominasi oleh klasifikasi jasa lingkungan kelas rendah (64,74%) dan sangat rendah (29,48%). Kinerja Jasa Lingkungan Hidup Pengatur Mitigasi Banjir tersebut erat kaitannya dengan fungsi pengaturan air dan pada peran wilayah sebagai resapan.

Sebaran kinerja sangat rendah di DKI Jakarta menghampar di tengah dan sepanjang aliran sungai. Hal ini dipengaruhi oleh perbedaan tipologi bentang alam berupa dataran fluvial landai, dataran fluvial sangat landai, dan dataran banjir yang merupakan dataran yang riskan terhadap luapan air sungai. Oleh karena itu, kinerja pengaturan mitigasi banjir pada wilayah ini dinilai sangat rendah. Berbeda halnya dengan wilayah selatan Jakarta, dataran fluviovulkanik menghampar di bagian selatan yang secara alami memiliki potensi resapan yang lebih baik dibandingkan tipologi

dataran lain. Sebenarnya dataran fluviovulkanik ini dapat dioptimalkan pemanfaatannya sebagai peresapan untuk mengurangi laju aliran air dari hulu ke hilir. Namun, adanya perkembangan dalam bentuk kegiatan konstruksi berskala besar di wilayah ibukota serta terjadinya alih fungsi lahan menjadi kawasan permukiman, menyebabkan berkurangnya luas daerah resapan. Selain itu juga ditambah dengan kondisi dimana sebagian besar tanah di Jakarta sudah menjadi hak milik perseorangan, kian mempersulit penataan kota dalam membangun infrastruktur pengendali banjir, drainase kota, maupun pembangunan sumur resapan. Hal ini perlu menjadi perhatian seluruh pemangku kepentingan (stakeholder) terkait pengelolaan skema pengelolaan sumber daya air secara menyeluruh.

Hal lain yang perlu diperhatikan dalam implementasi penanggulangan banjir dan genangan adalah diperlukannya penguatan kelembagaan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan pengembangan tata laksana, dengan mengefektifkan berbagai upaya perbaikan sistem sungai dan saluran, pintu air, situ dan waduk, proteksi air laut, pengembangan sistem informasi untuk peringatan dini, dan kesiap-siagaan masyarakat.

Selain banjir, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga perlu mengantisipasi fenomena banjir rob yang disebabkan oleh pasang surut air laut maupun penurunan muka tanah (*land subsidence*) pada beberapa kawasan. Dalam rangka menanggulangi hal tersebut diperlukan upaya pembangunan tanggul laut dan tanggul muara sungai.

Penanganan Banjir Jakarta tidak lagi hanya membuat atau meluruskan aliran sungai-sungai dengan konstruksi beton atau sheetpile. Air yang mengalir dari selatan Jakarta ke muara utara Jakarta dapat ditahan lebih lama, melalui pembangunan waduk-waduk dan memperbanyak sumur resapan di daerah

selatan Jakarta. Fungsi waduk kedepan bukan sekedar sebagai waduk pengendali banjir atau waduk retensi saja namun bisa dimanfaatkan atau di kelolah menjadi sumber air baku ataupun menjadi sumber energi baru untuk kepentingan masyarakat Jakarta.

Sehubungan dengan pandemic COVID-19 yang melanda Jakarta sejak tahun 2020, penguatan kesehatan masyarakat sebagai bagian dari ketahanan terhadap bencana menjadi hal yg signifikan untuk dibangun dan dikembangkan. Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berinisiasi mengembangkan Urban Health System dalam menjadikan kota yang sehat dari seluruh aspek secara holistik. Kesehatan Publik Perkotaan (Urban Health System) merupakan sistem kesehatan kota yang dikembangkan secara menyeluruh dengan mengoptimalkan pengelolaan sumber daya kota guna meningkatkan kualitas layanan perkotaan secara berkelanjutan sehingga mampu menciptakan kondisi kesehatan penduduk yang lebih baik di masa kini maupun mendatang, dengan cara meningkatkan kesehatan penduduk melalui peningkatan pelayanan kesehatan promotif dan preventif serta berfokus kepada perbaikan 4 (empat) determinan dalam Kesehatan publik perkotaan, yaitu determinan lingkungan sosial, determinan lingkungan fisik terbangun/ infrastuktur, determinan perekonomian dan determinan tata Kelola pemerintahan. Dalam penyusunan buku putih Kesehatan publik perkotaan Jakarta, pembahasan masalah dibagi kedalam 5 (lima) kategori penyakit, yaitu penyakit menular; penyakit tidak menular; kekerasan dan cedera; bencana terkait perubahan iklim; serta Kesehatan mental. Terdapat 15 Strategi umum yang diperoleh melalui analisis SWOT pada analisis internal (identifikasi strength dan weakness), yang dibagi menjadi Strategi yang Langsung Berkaitan dengan Sektor Kesehatan dan juga Strategi yang Tidak Langsung Berkaitan dengan Sektor Kesehatan (tetapi dapat memperkuat sistem kesehatan publik perkotaan). Strategi yang Langsung Berkaitan dengan Sektor Kesehatan 1. Meningkatkan kesadaran masyarakat dan akses pada dukungan kesehatan mental 2. Meningkatkan pemanfaatan dan pemerataan fasilitas kesehatan (pemanfaatan jaminan kesehatan

semesta/universal health coverage) 3. Mengoptimalkan peluang pembiayaan di sektor Kesehatan 4. Menjadikan fasilitas kesehatan sebagai pelopor upaya promotif Kesehatan 5. Menyelenggarakan transformasi Rumah Sakit Daerah Strategi yang Tidak Langsung Berkaitan dengan Sektor Kesehatan 1. Menjadikan fasilitas publik dan kawasan-kawasan fungsional kota sebagai pelopor upaya promotif kesehatan 2. Meningkatkan pemerataan akses dan konsumsi makanan sehat dan aman yang terjangkau 3. Meningkatkan kesadaran masyarakat dan akses pada dukungan kesehatan mental (dukungan berbasis fasilitas dan berbasis komunitas) 4. Mewujudkan Kota Layak Anak dan meningkatkan kesadaran masyarakat terkait upaya pencegahan kekerasan 5. Meningkatkan kapasitas daerah terkait penanggulangan bencana dan meningkatkan edukasi masyarakat terkait perubahan iklim dan pencemaran 6. Membentuk komite kota sehat (platform) untuk memantau implementasi kesehatan publik perkotaan secara komprehensif dengan melembagakan pendekatan HiAP (health in all policies) di tingkat pemerintah daerah 7. Mengoptimalkan peluang pembiayaan di berbagai sektor terkait peningkatan kesehatan penduduk 8. Membangun sistem informasi dan monitoring yang terintegrasi untuk memastikan kebijakan pembangunan berorientasi pada peningkatan kesehatan penduduk dan pemerataannya 9. Pilot project pengembangan sistem kesehatan publik perkotaan.

2. Pemerintahan Dinamis dan Transformasi Pelayanan Publik

Pelayanan publik yang lebih cepat, lebih murah, lebih mudah dan lebih baik harus selalu diupayakan dan diwujudkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Hal ini tidak terlepas dari peran DKI Jakarta sebagai ibukota negara, yang mempunyai kedudukan khusus dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan kedudukan tersebut, tentu DKI Jakarta menjadi panutan dan acuan bagi provinsi lain dalam upaya penyediaan optimal

bagi masyarakat.

Pelaksanaan reformasi birokrasi adalah jalan utama dalam rangka mewujudkan pelayanan pemerintah yang lebih optimal. Reformasi birokrasi secara berkesinambungan menjadi mutlak untuk dilakukan dimana itu dapat terwujud jika Pemerintah memiliki komitmen terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi dengan memfokuskan pada aspek kelembagaan, aparatur serta tata laksana dengan mengedepankan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan partisipatif.

Adapun permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan reformasi birokrasi antara lain adalah masih perlunya penguatan pelaksanaan reformasi birokrasi yang mengedepankan prinsip efisiensi, efektifitas dan transparansi, pembenahan birokrasi terkait perubahan budaya kerja yang mengutamakan profesionalisme dan akuntabilitas bagi seluruh aparat pemerintah secara terpadu dan berkesinambungan. Lebih lanjut diperlukan pula upaya harmonisasi peraturan perundang-undangan, penyesuaian struktur organisasi, dan jumlah pegawai untuk mewujudkan organisasi tepat ukuran dan fungsi yang lebih optimal dalam peningkatan kualitas dan akselerasi pelayanan public.

Aspek penting lainnya adalah perlunya kebijakan dan pelayanan pemerintah yang berbasis data yang terintegrasi serta dukungan teknologi informasi dan komunikasi. Lebih lanjut, guna meminimalisir praktik KKN, konflik kepentingan, serta menghindari high cost economy diperlukan peraturan khusus yang mengatur hubungan antar lembaga.

3. Ketahanan Ekonomi Inklusif

Pemulihan dan peningkatan perekonomian Jakarta tidak hanya melihat pada pertumbuhan masing-masing sektor, namun juga harus diimplementasikan secara luas dengan mempertimbangkan aspek ketimpangan dan kemiskinan secara inklusif. Pada tahun 2021, capaian indeks Gini DKI Jakarta kembali mencapai angka 0,411 dimana angka Gini ini naik dari 0.399 pada tahun 2020. Hal tersebut menunjukkan semakin rendahnya peran kelompok penduduk dengan pendapatan rendah dalam pembentukan total pendapatan yang diterima penduduk DKI Jakarta. Bahkan

peran kelompok penduduk dengan pendapatan 40 persen terendah dan 40 persen menengah sudah lebih rendah dibandingkan dengan 20 persen penduduk dengan pendapatan teratas di DKI Jakarta.

Lebih jauh lagi, kemiskinan hakikatnya tidak hanya mengenai kesenjangan pendapatan, melainkan bersifat multidimensi sehingga hal ini berkorelasi dengan aspek kesehatan, pendidikan dan kualitas hidup masyarakat. Kondisi saat ini di DKI Jakarta masih terdapat warga miskin/rentan miskin yang tidak mendapatkan akses kebutuhan dasar dan kesempatan kehidupan yang layak. Hal tersebut dibuktikan oleh masih adanya penduduk miskin dan rentan miskin yang belum mendapat akses air bersih sebesar 94,9 persen, permukiman yang layak sebesar 90,1 persen, sanitasi yang layak sebesar 65,5 persen, dan bayi miskin dan rentan miskin yang belum memperoleh nutrisi yang cukup sebesar 55,6 persen. Adanya persoalan tersebut dapat menghambat pembangunan dan stabilitas perekonomian DKI Jakarta, sehingga perlu upaya khusus dalam perbaikan kualitas kehidupan dan penghidupan masyarakat, salah satunya melalui program peningkatan pendapatan masyarakat dan jaring pengaman social, yang mencakup akses masyarakat terhadap pendidikan, kesehatan dan kualitas hidup, serta adanya perlindungan fiskal dan keadilan hukum bagi masyarakat.

Penyediaan lapangan kerja menjadi aspek krusial dalam menekan angka kemiskinan, namun penyediaan lapangan kerja masih menjadi masalah utama bagi mayoritas warga DKI Jakarta berdasarkan Survey Poltrack bulan September 2016. Selain penyediaan lapangan kerja, aspek penilaian kemudahan berbisnis juga cukup mendasar dalam upaya mendorong perekonomian Jakarta. Sebagaimana diketahui peringkat kemudahan berbisnis (Ease of Doing Business) Indonesia pada 2017 meningkat 15 posisi, menjadi peringkat 91, dari sebelumnya peringkat 106. Lebih lanjut Indonesia termasuk 10 besar negara dengan peningkatan terbaik EoDB, bersama di antaranya dengan Brunei, Pakistan, dan Kenya. Selain penyediaan lapangan pekerjaan dan mengupayakan terwujudnya kemudahan berbisnis, diupayakan pula pengembangan kewirausahaan bagi

masyarakat Jakarta. Hal ini penting mengingat bahwa prospek kewirausahaan di DKI Jakarta cukup baik dan pengembangannya akan dapat menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang cukup besar.

Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang dinyatakan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (World Health Organization) sebagai pandemi terjadi pada sebagian besar negara-negara di seluruh dunia, termasuk di Indonesia, tak terkecuali Jakarta sebagai Ibukota dimana dari waktu ke waktu menunjukkan peningkatan dan telah menimbulkan korban jiwa, dan kerugian material yang semakin besar, sehingga berimplikasi pada aspek sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat dimana pada kuartal I tahun 2020, baik indeks keparahan kemiskinan dan gini ratio mengalami peningkatan sekitar dibawah 0,07 persen yang mencerminkan kesenjangan pengeluaran semakin memburuk dan tingkat ketimpangan sosial semakin meningkat.

Pandemi COVID-19 telah berdampak antara lain terhadap perlambatan pertumbuhan ekonomi, penurunan pendapatan, dan peningkatan belanja dan pembiayaan, sehingga diperlukan berbagai upaya Pemerintah baik Pusat maupun Daerah untuk melakukan penyelamatan kesehatan dan perekonomian, dengan fokus pada belanja untuk kesehatan, jaring pengaman sosial (social safety net), serta pemulihan perekonomian.

Menurut Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta, pada triwulan III 2020, perekonomian Jakarta masih berada di bawah normal dan berkontraksi minus 3,82 persen (y-on-y). Ini berarti, selama dua triwulan berturut-turut perekonomian DKI Jakarta berkontraksi. Bahkan sampai dengan akhir tahun 2021 ekonomi Jakarta hanya tumbuh hanya sebesar 3,56 persen.

Tekanan perekonomian ini berimplikasi terhadap daya beli masyarakat. Permintaan domestik seperti konsumsi rumah tangga dan investasi masih rendah dan belum menunjukkan perbaikan. Kedua agregat demand ini berkontraksi sehingga mempersulit upaya perbaikan ekonomi. Untuk menyeimbangkan tekanan ini, konsumsi

pemerintah terutama yang terkait dengan belanja untuk menangani Covid-19 meningkat sangat signifikan. Kendati demikian, upaya tersebut belum bisa mengembalikan kekuatan domestic expenditures sebagai motor pertumbuhan.

Namun kebijakan pelonggaran Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat memungkinkan ekonomi Jakarta menggeliat sehingga memberikan peluang sektor-sektor produktif menciptakan nilai tambah dan mendorong percepatan kinerja ekonomi. Pada kuartal II-2021 perekonomian Jakarta tumbuh 10,91 persen (y-o-y). Diharapkan naiknya gejolak ekonomi dapat memperluas kesempatan kerja baru sekaligus menekan Tingkat Pengangguran Terbuka yang bulan Agustus 2021 tercatat mencapai 8,5 persen atau setara dengan 439,9 ribu jiwa.

4. Kota Berkelanjutan Berbasis Digital dan Komunitas

Menurut Brundtland (1987) kota berkelanjutan (sustainable city) adalah kota yang mampu memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengabaikan kebutuhan generasi mendatang.

Sedangkan kota berbasis digital atau dikenal dengan digital city atau Kota Cerdas (smart city) didefinisikan juga sebagai kota yang mampu menggunakan SDM, modal sosial, dan infrastruktur telekomunikasi modern untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan kualitas kehidupan yang tinggi, dengan manajemen sumber daya yang bijaksana melalui pemerintahan berbasis partisipasi masyarakat (Caragliu, A., dkk dalam Schaffers, 2010:3).

Selanjutnya kota berkelanjutan berbasis digital pada prinsipnya merupakan kota yang dibangun dengan prinsip-prinsip pemanfaatan sumber daya secara efisien demi generasi mendatang namun dengan mengintegrasikan teknologi digital dalam kehidupan kota. Dengan pendekatan berbasis digital dan komunitas, kota berkelanjutan dapat terwujud dengan baik didorong oleh efisiensi pemanfaatan sumber daya salah satunya melalui digitalisasi dan efisiensi. Terkait dengan hal tersebut, beberapa isu yang perlu menjadi perhatian diantaranya hunian layak, transit berbasis komunitas dan prinsip kota cerdas.

Hunian layak serta peningkatan kualitas permukiman Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak tahun 2021 sebesar 40%. Tidak hanya masyarakat berpenghasilan rendah saja yang memiliki kesulitan memperoleh hunian, namun juga para pekerja dan kelas menengah. Hal ini dikarenakan keterbatasan Pemerintah dalam menyediakan lahan yang kini semakin mahal serta kesulitan masyarakat untuk mendapatkan fasilitas kredit dari lembaga keuangan. Dalam menuntaskan permasalahan tersebut, Pemerintah perlu mengoptimalkan pengelolaan aset khususnya tanah daerah dan lahanlahan potensial khususnya di perkotaan dan kawasan TOD, menyediakan hunian vertikal yang layak huni beserta PSUnya, memberi fasilitasi pembiayaan rumah berbasis kredit, serta merumuskan regulasi yang mengatur tentang investasi rumah susun maupun ketataruangan. Dibutuhkan kolaborasi antara Pemerintah, perusahaan swasta, dan lembaga keuangan dalam mewujudkan kemudahan kepemilikan rumah yang layak dan terjangkau. Pada tahun 2019, masih terdapat 14,4 persen rumah tangga kumuh perkotaan di Provinsi DKI Jakarta. Hasil Kajian BPS Provinsi DKI Jakarta tahun 20017 menyatakan bahwa terdapat 445 RW di DKI Jakarta yang terkategori kumuh. Hingga tahun 2022, penanganan terhadap RW Kumuh telah dilakukan terhadap 220 RW, sehingga menyisakan 225 RW. Penanganan kawasan kumuh pada RW Kumuh tersebut terkendala pada kewenangan Pemerintah yang tidak bisa menyentuh aset privat (bangunan dan lahan), sehingga intervensi dari Pemerintah terbatas pada perbaikan fisik lingkungan permukimannya (mencakup jalan lingkungan, penyediaan air minum, drainase lingkungan, pengolahan air limbah, pengolahan persampahan, dan proteksi kebakaran). Selain pada RW Kumuh, permasalahan aset juga ditemui pada lahan-lahan privat yang ditinggali oleh masyarakat secara ilegal yang kini telah berkembang menjadi kampung. Pemerintah memiliki peran untuk memberikan kepastian bermukim kepada masyarakat, sehingga diperlukan upaya pendistribusian sertifikat melalui program Reformasi Agraria terhadap kampung-kampung tersebut.

Pembangunan Multimoda/Fasilitas Pejalan Kaki Dalam perkembangan Jakarta ke depan

sebagai kota pusat ekonomi di Indonesia, sejak tahun 2019 pola pembangunannya sudah mengarah kepada pembangunan kota modern yang mulai menerapkan konsep multimoda, yaitu pembangunan yang mengedepankan kepada penggunaan moda transportasi beragam antara lain seperti berjalan kaki, bersepeda, transportasi umum masal, dan lainnya. Konsep ini mengedepankan masyarakat perkotaan untuk secara aktif bergerak dan menggunakan transportasi masal dalam melakukan aktivitas sehari-harinya. Melalui konsep multi moda ini, Jakarta konsisten dalam menuju kota nyaman, aman, sejahtera, produktif, berkelanjutan dan berdaya saing global sesuai dengan Visi RPJPD 2005-2025 yang mengedepankan kesetaraan social dan kemudahan dalam mengakses fasilitas-fasilitas perkotaan, dimana didalamnya juga termasuk kepada penataan kembali kabel udara untuk meningkatkan kualitas dan citra Kawasan perkotaan di Jakarta Namun demikian dalam mendukung perubahan budaya menuju kota modern melalui intervensi penyediaan ruang pejalan kaki dan jalur sepeda, Pemprov DKI masih dihadapkan dengan beberapa kendala antara lain: - belum tersedianya fasilitas pejalan kaki dan jalur sepeda yang optimal di setiap ruas jalan, - lebar jalan yang terbatas untuk disediakan fasilitas pejalan kaki dan jalur sepeda - sinkronisasi pelaksanaan pembangunan fasilitas pejalan kaki dan jaringan utilitas - keterbatasan anggaran akibat dampak pandemic Covid -19 Disamping kendala diatas, konsep multimoda juga tidak akan optimal dilaksanakan jika fasilitas-fasilitas transportasi belum terintegrasi secara menyeluruh baik dalam fisik, tiket dan waktu. Adapun fasilitas transportasi dimaksud antara lain yang berbasis koridor seperti BRT TransJakarta, LRT Jakarta, LRT Jabodebek, MRT Jakarta dan Commuter Line; juga yang berbasis feeder (pengumpan). Sampai dengan saat ini, Pemprov DKI Jakarta sudah mulai melakukan integrasi baik secara fisik dan tiket walaupun belum secara menyeluruh terlebih pada angkutan feeder sehingga belum sepenuhnya mengatasi permasalahan first and last mile. Selain itu, pentingnya penerapan prinsip-prinsip pembangunan TOD sesuai Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 16 tahun 2017 tentang

Pedoman Pengembangan Kawasan Berorientasi Transit pada lokasi-lokasi TOD, antara lain seperti peningkatan konektivitas, pengembangan Kawasan menuju intensitas yang lebih padat, mengedepankan tata guna lahan campuran dan membangun Kawasan kompak yang meminimalisir jarak perjalanan, sehingga dapat menstimulasi peningkatan pergerakan masyarakat secara aktif dan optimal. Sedangkan hal yang perlu didukung pada sisi regulasi, yaitu belum adanya kebijakan-kebijakan baik pada level pusat dan daerah yang saling mendukung satu sama lain untuk dapat menjadi insentif dan disinsentif bagi pengguna transportasi umum dan kendaraan pribadi, seperti regulasi yang mengatur kepemilikan kendaraan pribadi baik di Jakarta dan di area penyangganya. Sinkronisasi kebijakan perlu dilakukan tidak hanya untuk di Kota Jakarta saja, namun juga dengan kota-kota penyangganya.

5. Manusia Sehat, Berdaya Saing dan Setara

Kondisi pendidikan di DKI Jakarta secara umum sudah menunjukkan capaian yang cukup baik, namun masih terdapat beberapa aspek yang perlu ditingkatkan dalam rangka menciptakan pelayanan pendidikan prima bagi masyarakat. Dalam menghadapi tantangan ke depan dengan adanya MEA dan globalisasi perlu memperhatikan akses pendidikan berkualitas yang menjangkau seluruh kalangan, baik kaum disabilitas maupun yang sudah mencapai usia non sekolah, namun belum mengenyam pendidikan secara baik (belum lulus pendidikan dasar). Kemudian hal lain yang perlu menjadi perhatian adalah Angka Partisipasi Murni tingkat SMA sederajat di DKI Jakarta belum optimal. Ini artinya masih ada anak-anak usia SMA di DKI Jakarta yang seharusnya berada di bangku sekolah, namun mereka tidak berkesempatan untuk bersekolah.

Semakin tinggi jenjang pendidikan, angka partisipasi sekolah semakin rendah. Hal ini dapat terlihat dengan membandingkan angka partisipasi jenjang tingkat menengah dibandingkan dengan jenjang tingkat dasar. Ini menunjukkan ada faktor penghambat yang menyebabkan peserta didik tidak dapat melanjutkan ke tingkat yang lebih tinggi. Pada beberapa tulisan yang menyebabkan

rendahnya angka partisipasi jenjang menengah adalah lokasi sekolah, motivasi orangtua dan anak, serta tingkat kemiskinan.

Saat ini pendidikan Madrasah di DKI Jakarta, khususnya Madrasah swasta juga masih memerlukan perhatian khusus. Perluasan kesejahteraan tenaga pendidik swasta dan bantuan operasional pendidikan perlu dikaji lebih lanjut dalam rangka peningkatan kualitas mutu pendidikan. Peningkatan mutu pendidikan juga perlu didorong khusus untuk wilayah Kepulauan Seribu.

Untuk menjaga kualitas pendidikan di DKI Jakarta sendiri juga diperlukan suatu ukuran agar kualitas pendidikan DKI dapat lebih unggul dibandingkan dengan daerah lainnya. Dalam hal menambah wawasan siswa sekolah tentang kondisi global, dapat dilakukan proses pertukaran pelajar secara reguler, khususnya dengan negara-negara tetangga. Kemudian ancaman globalisasi dapat diminimalisir dengan penciptaan lulusan sekolah yang sudah memiliki keterampilan. Oleh karena itu dapat dipertimbangkan pula untuk menciptakan sekolah kejuruan dengan bidang yang dibutuhkan dalam mendukung kegiatan perekonomian DKI Jakarta.

Revolusi industri 4.0 berdampak dalam berbagai bidang kehidupan, tak terkecuali bidang pendidikan. Pemanfaatan teknologi informasi dalam era 4.0 merupakan suatu keharusan. Pandemi Covid-19 juga memaksa semua pemangku pendidikan, termasuk orangtua untuk lebih cepat beradaptasi dan menguasai pemanfaatan teknologi informasi dalam proses belajar mengajar. Memperkuat pendidikan keluarga merupakan salah satu cara mendukung pembelajaran dari rumah.

Model pembelajaran yang mendukung era 4.0 tidak hanya berkaitan dengan pemanfaatan teknologi informasi tetapi juga cara bagaimana menumbuhkan keterampilan peserta didik dalam proses pembelajaran yang dianggap sangat dibutuhkan untuk berkompetisi di era 4.0. Keterampilan tersebut dikenal dengan 4 C (Communication, Collaboration, Critical Thinking and Problem Solving, dan Creativity and Innovation).

Upaya lain yang harus ditingkatkan dalam era membanjirkan informasi di media sosial adalah

peningkatan literasi, terutama literasi membaca yang menjadi dasar dari literasi yang lain. Pada era saat ini menuntut orang mempunyai kemampuan dalam hal memilih dan memilah informasi menjadi pengetahuan yang bermanfaat, disinilah peran literasi mendukung peserta didik menjadi pembelajar yang mandiri.

Untuk kualitas pendidikan anak sejak dini, perlu didorong peningkatan jumlah dan kualitas sekolah PAUD di Jakarta. Kemudian untuk tenaga pengajar/ guru PAUD, terutama PAUD Kelompok Belajar, Tempat Penitipan Anak, Status PAUD Sejenis (SPS), serta Taman Pendidikan Al Quran, juga perlu mendapat perhatian. Yang perlu menjadi perhatian kedepan adalah Pembelajaran PAUD yang membangun sikap dan pembelajaran baca-tulis-hitung (calistung) yang bernuansa akademik.

Selain mengupayakan ketercukupan lembaga penyelenggara PAUD dengan populasi anak berusia dini, pemerintah juga berperan dalam mengupayakan agar semua lembaga penyelenggara PAUD memenuhi standar penyelenggaraan PAUD.

Dalam hal pelayanan kesehatan, upaya untuk melakukan transformasi layanan kesehatan di antaranya melalui digitalisasi kesehatan yang diselenggarakan berdasarkan Permenkes RI Nomor 46 Tahun 2017 tentang Strategi e-Kesehatan Nasional. Digitalisasi pelayanan kesehatan atau e-kesehatan adalah pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk pelayanan dan informasi kesehatan, utamanya untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dan meningkatkan proses kerja yang efektif dan efisien. Transformasi digital dalam pelayanan kesehatan melalui e-medical record (jangka menengah) dan masa transisi menuju SIMRS terintegrasi (jangka panjang). Transformasi layanan kesehatan lainnya juga diupayakan melalui re-branding RSUD, pengembangan komunikasi publik melalui strategi komunikasi informasi jaminan kesehatan jakarta (Buku Putih Kesehatan Publik Perkotaan Jakarta, 2021). Gender adalah pembedaan peran, atribut, sifat, sikap dan perilaku yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Dan peran gender terbagi menjadi peran produktif, peran reproduksi serta peran sosial

kemasyarakatan. Pengertian kesetaraan gender merujuk kepada suatu keadaan setara antara laki-laki dan perempuan dalam pemenuhan hak dan kewajiban (SDGs, 2015). Strategi pembangunan harus memasukan perspektif gender untuk mencapai pembangunan yang lebih adil dan merata bagi seluruh penduduk Indonesia baik laki-laki maupun perempuan. Pengarustamaan gender (PUG) merupakan strategi untuk mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender dalam pembangunan. Strategi ini dilakukan dengan cara mengintegrasikan perspektif gender dalam proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan. Disabilitas merupakan istilah umum (umbrella term) yang digunakan untuk merujuk pada kondisi keterbatasan fungsi/struktur tubuh (keterbatasan fisik, sensoris, intelektual, dan mental), keterbatasan aktivitas, dan hambatan berpartisipasi. Keterbatasan-keterbatasan ini tercipta dari proses interaksi antara kondisi kesehatan (seperti penyakit/kelainan), kondisi lingkungan (seperti perilaku, akses fisik, dan ketersediaan teknologi), dan kondisi pribadi (seperti kepercayaan diri dan motivasi diri). (Smeru, 2020). Berdasarkan SUPAS 2015, terdapat 8,56 persen atau sekitar 21,84 juta penduduk Indonesia merupakan penyandang disabilitas, di mana 48,5 persen dari jumlah tersebut merupakan penyandang disabilitas ganda. Penyandang disabilitas memiliki tingkat partisipasi yang rendah dalam berbagai bidang seperti pendidikan dan ketenagakerjaan serta kurang memiliki akses terhadap fasilitas dan layanan publik yang menyebabkan penyandang disabilitas berisiko lebih tinggi hidup di bawah garis kemiskinan. Di DKI Jakarta sendiri, berdasarkan SUSENAS BPS Maret 2021, terdapat 8 kategori disabilitas yang dialami oleh rata-rata di bawah 4% dari populasi survey diantaranya : kesulitan penglihatan, kesulitan pendengaran, kesulitan berjalan/naik tangga, kesulitan menggerakkan tangan/jari, kesulitan dalam mengingat/konsentrasi, gangguan perilaku/emosional, kesulitan berbicara/memahami atau berkomunikasi dengan orang lain dan kesulitan untuk mengurus diri sendiri. Dari hasil SUSENAS

tersebut pada aspek pendidikan, masih didapati penyandang disabilitas yang tidak memiliki ijazah SD dan mayoritas menamatkan pendidikannya di jenjang Sekolah Dasar. Hal tersebut menunjukkan bahwa kesempatan pemenuhan hak pendidikan bagi penyandang disabilitas belum sepenuhnya tercapai di DKI Jakarta. Hal tersebut adalah satu dari contoh aspek penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas yang perlu mendapat perhatian khusus bagi perencanaan pembangunan di DKI Jakarta. Kesetaraan pembangunan diwujudkan dalam pembangunan inklusif yang dapat diartikan sebagai proses pembangunan yang memastikan keterlibatan seluruh kelompok, termasuk kelompok marginal, baik sebagai objek maupun subjek, dalam proses pembangunan, disertai adanya rasa memiliki dari setiap elemen masyarakat terhadap proses pembangunan tersebut. Untuk mewujudkan pembangunan inklusif, dibutuhkan proses pembangunan yang inklusif pula. Dengan kata lain, terwujudnya pembangunan inklusif di antaranya ditandai dengan adanya proses untuk mewujudkan pembangunan inklusif, serta terwujudnya pembangunan inklusif itu sendiri. Hal ini dapat dilihat dari adanya jaminan aksesibilitas, partisipasi aktif dan penuh, perlakuan nondiskriminatif dan kesamaan kesempatan, penghargaan terhadap keberagaman, serta penghargaan terhadap martabat yang melekat pada diri seseorang (Smeru, 2020). Kesetaraan pembangunan melalui pembangunan inklusif diharapkan dapat memberikan kesetaraan pembangunan manusia yang memperhatikan kebutuhan penduduk rentan seperti penyandang disabilitas, anak dan lanjut usia serta memenuhi aspek kesetaraan gender.

6. Pemerataan Pembangunan

Peningkatan kesejahteraan dan pemerataan ekonomi masyarakat adalah tuntutan klasik dan utama yang menjadi tantangan Jakarta sebagai kota metropolitan. Dalam upaya pencapaiannya, diperlukan dorongan dari berbagai instrumen diantaranya pengurangan ketimpangan ekonomi melalui penurunan tingkat kemiskinan, perluasan kesempatan kerja, peningkatan akses pendidikan, peningkatan akses layanan kesehatan,

ketahanan pangan serta peningkatan industri kreatif yang berdaya saing.

Ketimpangan antar wilayah dapat terlihat secara jelas melalui besaran tingkat kemiskinan antar wilayah yang tidak seimbang. Tingkat kemiskinan di wilayah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu mencapai 14,87 persen dan di wilayah administrasi Kota Jakarta Utara mencapai 6,78 persen pada tahun 2020, jauh dibawah tingkat kemiskinan Provinsi yang mencapai 4,69 persen. Sedangkan wilayah lain di bawah rata-rata Provinsi yaitu Jakarta Pusat sebesar 4,51 persen, Jakarta Timur sebesar 4,16 persen, Jakarta Selatan 4,34 persen dan Jakarta Barat sebesar 4,25 persen. Disparitas lainnya yang menjadi parameter adalah nilai IPM antar wilayah. Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu menjadi satusatunya wilayah yang masih pada angkat kisaran 70 yaitu sebesar 72,10, dimana IPM Provinsi sebesar 81,11. Sedangkan wilayah lain nilai IPM sudah berada di atas 80.

Dalam pelaksanaannya, upaya pengurangan ketimpangan ini dapat lebih efektif apabila difokuskan dan dikoordinasikan tingkat Kota dan Kabupaten Administrasi. Oleh karenanya penguatan peran Walikota dan Bupati sebagai koordinator menjadi faktor penting dalam upaya terciptanya harmonisasi peningkatan kesejahteraan dan pemerataan ekonomi masyarakat. Penguatan peran Walikota dan Bupati yang akan didorong adalah dalam peningkatan kewenangan koordinasi terhadap OPD tingkat Kota dan Kabupaten. Peran Walikota dan Bupati Administrasi dalam Struktur Organisasi Perangkat Daerah di Provinsi DKI Jakarta sangat strategis yaitu sebagai koordinator wilayah yang mana dituntut untuk tidak sekedar melakukan pengoordinasian, namun lebih kepada penyelesaian berbagai permasalahan di tingkat Kota dan Kabupaten secara mendalam. Diharapkan Walikota dan Bupati Administrasi terlibat pada pelaksanaan multi program/kegiatan baik melibatkan Perangkat Daerah tingkat Provinsi dan tingkat wilayah maupun stakeholders lainnya.

Dari isu strategis pembangunan tersebut, maka dapat diturunkan isu strategis pada Tahun 2023, diantaranya;

1. Ketahanan Kota

Isu ketahanan kota meliputi isu kesehatan, Infrastruktur dan ketahanan pangan. Isu kesehatan terkait dengan ketahanan terhadap penyakit menular melalui *Urban Health System*. Infrastruktur terkait dengan antisipasi bencana alam seperti; banjir, genangan dan rob serta penurunan muka tanah.

2. Transformasi Ekonomi

Transformasi ekonomi terkait dengan transportasi, ekosistem digital dan transformasi pelayanan publik.

3. Kebutuhan Dasar

Pemenuhan kebutuhan dasar tetap menjadi isu penting pada tahun 2023. Ketersediaan air bersih dan sanitasi lingkungan, perluasan aksesibilitas hunian layak dan terjangkau serta penguatan mutu pendidikan merupakan hal yang perlu ditingkatkan kualitasnya dalam rangka akselerasi pembangunan.

4. Kota Berkelanjutan

Isu terkait kota berkelanjutan yang diusung pada tahun 2023 diantaranya perluasan pemanfaatan energy rendah karbon serta perluasan ruang terbuka hijau dan biru.

Tujuan/Sasaran Tahun 2023

Tujuan pembangunan daerah yang tercantum dalam dokumen Rancangan Pembangunan daerah (RPD) Tahun 2023 – 2026 diantaranya;

1. Tujuan Pertama: Regenerasi Kota yang Berketahanan dan Berkelanjutan. Adapun sasaran pembangunan yang ingin dicapai untuk tujuan ini diantaranya;

- a. Pembangunan Infrastruktur dan Layanan Dasar Perkotaan yang Berkualitas.
Indikator : Pemenuhan Layanan Dasar Perkotaan
- b. Perbaikan Pola Aktivitas dan Mobilitas Melalui Pengembangan Kota Berorientasi Transit. Indikator: Persentase Perjalanan Penduduk Menggunakan Moda Transportasi Publik (Definisi Operasional: Perbandingan jumlah pengguna angkutan umum dengan seluruh kendaraan (kendaraan umum dan kendaraan pribadi) di wilayah DKI Jakarta)
- c. Pemulihan Ekosistem Kota dan Implementasi Pembangunan Rendah Karbon. Indikator 1: Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Definisi Operasional: Penghitungannya melalui $(\text{angka IKLH tahun } X - \text{angka IKLH tahun } X \text{ min } 1) / (\text{angka IKLH tahun } X \text{ min } 1) \text{ dikali } 100\%$)
Indikator 2 : Persentase Penurunan

Emisi Gas Rumah Kaca (Definisi Operasional: Nilai persentase yang menggambarkan persentase penurunan emisi Gas Rumah Kaca dari nilai baselinenya, setelah dilakukan perhitungan emisi Gas Rumah Kaca dari aksi Mitigasi pada sektor Energi, Limbah, AFOLU, dan IPPU

- d. Peningkatan Stabilitas dan Ketahanan Kota. Indikator : Indeks Risiko Bencana (Definisi Operasional: Mengukur Indeks Risiko Bencana berdasarkan probabilitas spacial frekuensi dari bahaya alam X parameter sosial budaya, ekonomi, fisik dan lingkungan/ pendekatan tingkat ketahanan daerah berdasarkan tujuh prioritas : 1. Perkuatan kebijakan dan kelembagaan; 2. Pengkajian risiko dan perencanaan terpadu; 3. Pengembangan sistem informasi, diklat dan logistik; 4. Penanganan tematik kawasan rawan bencana; 5. Peningkatan efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana; 6. Perkuatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana; dan 7. Pengembangan sistem pemulihan bencana)

2. Tujuan Kedua : Perekonomian Inklusif Yang Berdaya Saing Disertai Penghidupan Layak Dan Pemerataan Kesejahteraan.

Indikator: Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif (Definisi Operasional: Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif mengukur inklusivitas pembangunan melalui aspek pertumbuhan ekonomi, ketimpangan dan kemiskinan, serta akses dan kesempatan. Angka indeks terdiri dari 3 pilar meliputi :Pilar Pertumbuhan dan Perkembangan Ekonomi terdiri dari Sub Pilar Pertumbuhan Ekonomi, Sub Pilar Kesempatan Kerja, dan Sub Pilar Infrastruktur Ekonomi; Pilar Pemerataan Pendapatan dan Pengurangan Kemiskinan terdiri dari Sub Pilar Ketimpangan dan Sub Pilar Ketimpangan; dan Pilar Perluasan Akses dan Kesempatan terdiri dari Sub Pilar Kapabilitas Manusia, Sub Pilar Infrastruktur Dasar, dan Sub Pilar Keuangan Inklusif. Hasil pengukuran indeks ini diterbitkan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas).

Adapun sasaran pembangunan untuk tujuan kedua ini adalah;

1. Pertumbuhan Ekonomi dan Sektor Usaha Berbasis Pengalaman dan Nilai Tambah Indikator: Laju Pertumbuhan Ekonomi (Definisi Operasional: pertumbuhan ekonomi dapat dihitung menggunakan formulasi $R(t-1, t) = (PDRB_t - PDRB_{t-1})/PDRB_{t-1} \times 100\%$, dimana R = tingkat pertumbuhan ekonomi dalam satuan persentase (%); PDRB_t = Produk Domestik Regional Bruto (pendapatan nasional riil) pada tahun t; PDB_{t-1} = Produk Domestik Regional Bruto (pendapatan nasional riil) pada tahun sebelumnya. Angka Laju Pertumbuhan Ekonomi dirilis Badan Pusat Statistik)
2. Peningkatan Kesempatan, Pemberdayaan, dan Adaptabilitas Tenaga Kerja Indikator : Tingkat Pengangguran Terbuka (Definisi Operasional: Tingkat Pengangguran Terbuka (Agustus) yang tinggi menunjukkan bahwa terdapat banyak angkatan kerja yang tidak terserap pada pasar kerja. Misal: TPT 6%, artinya dari 100 penduduk usia 15 tahun keatas yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa

(angkatan kerja) sebanyak 6 orang merupakan pengangguran. $TPT = (\text{Jumlah Pengangguran}/\text{Jumlah Angkatan Kerja}) \times 100\%$. Adapun Angka Tingkat Pengangguran Terbuka dirilis Badan Pusat Statistik)

3. Pengurangan Ketimpangan Melalui Pemenuhan Kebutuhan Dasar dan Jaminan Perlindungan Sosial.

Indikator 1 : Persentase Penduduk Miskin (Definisi Operasional: persentase penduduk yang berada dibawah Garis Kemiskinan (GK) pada bulan September). Persentase penduduk miskin yang dijadikan acuan adalah yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik).

Indikator 2 : Rasio Gini (Definisi Operasional: Koefisien gini didasarkan pada kurva lorenz, yaitu sebuah kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi dari suatu variabel tertentu (misalnya pendapatan) dengan distribusi uniform (seragam) yang mewakili persentase kumulatif penduduk. Mengetahui ukuran tingkat ketimpangan pengeluaran sebagai proksi pendapatan penduduk. Rasio Gini yang dijadikan acuan adalah yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik pada bulan September).

Indikator 3 : Tingkat Kemiskinan Ekstrem (Definisi Operasional: proporsi penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan internasional dengan pendapatan kurang dari USD 1,9 pada *Purchasing Power Parity*). Tingkat Kemiskinan Ekstrem yang dijadikan acuan adalah yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik dengan rumus perhitungan: $P\ PMI = (JPM/JPI) \times 100\%$

4. Penguatan Daya Saing Kota Melalui Inovasi dan Kolaborasi Indikator : Indeks Daya Saing Daerah (Definisi Operasional: Indeks ini menggunakan 4 aspek utama yaitu lingkungan penguat, sumberdaya manusia, pasar dan ekosistem inovasi; 12 pilar yaitu Kelembagaan, Infrastruktur, Perekonomian Daerah, Kesehatan,

Pendidikan, Efisiensi Pasar Produk, Ketenagakerjaan, Akses Keuangan, Ukuran Pasar, Adopsi Teknologi, Dinamika Bisnis, Kapasitas Inovasi dengan 23 Dimensi dan 90 indikator. Hasil Indeks Daya Saing Daerah diterbitkan oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional).

3. Tujuan Ketiga : Pembangunan Manusia Madani yang Berkesetaraan

Indikator: Indeks Pembangunan Manusia (Definisi Operasional: IPM terdiri dari 3 dimensi dasar yaitu umur panjang dan hidup sehat (diwakili indikator Angka Harapan Hidup), pengetahuan (diwakili indikator harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah), dan standar hidup layak (diwakili indikator pengeluaran per kapita) Rumus : $IPM = (I \text{ kesehatan}) \times (I \text{ pendidikan}) \times (I \text{ pengeluaran}) \times 100$.

Sasaran:

1. Pemerataan Kesempatan Pendidikan Untuk Semua dan Edukasi Terkait Pembelajaran Sepanjang Hayat
Indikator: Indeks Dimensi Pendidikan (Definisi Operasional: Indeks Pendidikan adalah komponen yang menyusun Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang diterbitkan Badan Pusat Statistik setiap tahun, dimana merupakan perhitungan rata-rata antara Indeks Harapan Lama Sekolah dan Indeks Rata-rata Lama Sekolah).
2. Peningkatan Kualitas dan Harapan Hidup Melalui Perbaikan Kesehatan Perkotaan.

Indikator 1 : Angka Harapan Hidup (Definisi Operasional: Angka harapan hidup adalah perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas (kematian) menurut umur. Angka ini diterbitkan Badan Pusat Statistik setiap tahun).
Indikator 2 : Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) pada Balita. (Definisi Operasional: Stunting adalah kondisi kurang gizi kronis yang diukur berdasarkan indeks tinggi badan menurut umur (TB/U) dibandingkan dengan standar WHO). Prevalensi

Stunting diukur pada anak umur 0 sampai 59 bulan, dengan mengkonversi data tinggi badan pada Riset Kesehatan Dasar (RISKESDAS) ke dalam nilai terstandar (Z-score) menggunakan baku antropometri anak balita. Klasifikasi berdasarkan indikator TB/U adalah sebagai berikut: 1) Sangat pendek ($Zscore < -3,0$); 2) Pendek ($3,0 \leq Zscore < -2,0$) Rumus perhitungannya yaitu jumlah balita pendek dan sangat pendek dibagi dengan jumlah balita yang diukur tinggi badannya dikali 100%.

3. Penurunan Kesenjangan Melalui Pembangunan Responsif Gender
Indikator : Indeks Pembangunan Gender (Definisi Operasional: IPG menggunakan metode penghitungan yang sama dengan IPM namun turut memperhatikan ketimpangan gender. Nilai IPG didapatkan dengan membandingkan capaian IPM laki-laki dengan IPM Perempuan. Hasil indeks ini diterbitkan Badan Pusat Statistik setiap tahun).
4. Penguatan Nilai-nilai Demokrasi, Kebangsaan, dan Kebhinekaan Masyarakat
Indikator : Indeks Demokrasi (Definisi Operasional: indikator yang menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi di Indonesia. Tingkat capaiannya diukur berdasarkan pelaksanaan dan perkembangan 3 (tiga) aspek demokrasi, yaitu kebebasan sipil (civil liberty), hak-hak politik (political rights), dan lembaga-lembaga demokrasi (institution of democracy). Hasil indeks ini diterbitkan Badan Pusat Statistik setiap tahun)

4. Tujuan Keempat: Transformasi Pelayanan Publik Dan Manajemen Pemerintahan Berintegritas.

Indikator: Indeks Reformasi Birokrasi (Definisi Operasional: Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi maka Indeks Reformasi Birokrasi adalah nilai akhir dari serangkaian kegiatan evaluasi atau penilaian 8 (delapan) area perubahan Reformasi Birokrasi , yaitu: a. Manajemen

Perubahan b. Penguatan pengawasan c. Penguatan akuntabilitas d. Penataan Organisasi e. Penataan tatalaksana f. Penataan manajemen SDM g. Deregulasi Kebijakan h. Peningkatan kualitas pelayanan publik. Adapun penilaian Indeks Reformasi Birokrasi dilakukan oleh Kementerian PAN-RB).

Sasaran:

1. Peningkatan Kualitas, Aksesibilitas, dan Kemudahan Layanan Masyarakat
Indikator: Indeks Kepuasan Masyarakat (Definisi Operasional: Indeks Kepuasan Masyarakat mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017 adalah hasil pengukuran dari kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat berupa angka. Angka ditetapkan dengan skala 1 (satu) sampai dengan 4 (empat). Survei Kepuasan Masyarakat adalah kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik. Biro ORB sesuai tusi melaksanakan kegiatan perumusan dan penyusunan bahan kebijakan, pembinaan, pemantauan dan evaluasi, bimbingan dan konsultasi dan penyajian dokumen IKM Provinsi DKI Jakarta untuk dilaporkan ke Kementerian PAN dan RB. IKM = Total Nilai SKPD yang melaksanakan SKM/Jumlah SKPD yang melaksanakan SKM).
2. Akselerasi Transformasi Digital dan Pengembangan Manajemen Kota Cerdas
Indikator : Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). (Definisi Operasional: Indeks SPBE merupakan instrumen penilaian yang digunakan untuk mengukur kemajuan pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Pemerintah Pusat dan Daerah yang terdiri atas 3 domain, 7 aspek dan 35 indikator sesuai dengan Permen PAN-RB Nomor 5 Tahun 2018. Hasil pengurusan indeks ini diterbitkan ataupun melalui pendampingan oleh Kementerian PAN-RB).
3. Pengelolaan Perbaikan Manajemen dan Arsitektur Kinerja Pemerintah Indikator : Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah (AKIP) (Definisi Operasional: Besaran hasil penilaian tingkat akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Komponen yang dinilai, yaitu Perencanaan Kinerja (30%), Pengukuran Kinerja (30%), Pelaporan Kinerja (15%), dan Evaluasi Internal (25%). Kategori Penilaian: Predikat AA (Sangat Memuaskan) - Nilai >90-100, Predikat A (Memuaskan) - Nilai >80-90, Predikat BB (Sangat Baik) - Nilai >70-80, Predikat B (Baik) - Nilai >60-70, Predikat CC (Cukup) - Nilai >50-60. Hasil penilaian predikat AKIP diterbitkan oleh Kementerian PAN-RB).

4. Pengelolaan Keuangan Daerah yang Sehat, Transparan, dan Akuntabel
Indikator : Opini Laporan Keuangan Daerah (Definisi Operasional: Pernyataan profesional Badan Pemeriksa Keuangan RI mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan daerah Pemprov DKI Jakarta sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan, keandalan sistem pengendalian internal, kepatuhan terhadap perundangan dan kecukupan pengungkapan).
5. Pengembangan Kapasitas, Profesionalitas, dan Iklim Kerja Aparatur
Indikator: Indeks Sistem Merit (Definisi Operasional : Ukuran yang digunakan sebagai standar penilaian penerapan sistem merit pada Instansi Pemerintah dengan dasar hukum yaitu: 1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Merit dalam Manajemen ASN; 2. Peraturan Kepala Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor 9 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penilaian mandiri Sistem Merit dalam Manajemen ASN di Lingkungan Instansi Pemerintah). Metode Pengukuran melalui penilaian terhadap 8 aspek sistem merit dengan pembobotan sebagai berikut: 1) perencanaan kebutuhan 10%; 2) pengadaan 10%; 3) pengembangan karier 30%; 4) promosi

dan mutasi 10%; 5) manajemen kinerja 20%; 6) penggajian, penghargaan dan disiplin 10%; 7) perlindungan dan pelayanan 4%; dan 8) system informasi 6%. Kategori Tingkat Penerapan Sistem

Merit yaitu: Kategori IV nilai 325-400 (Sangat Baik), Kategori III nilai 250-324 (Baik), Kategori II nilai 175-249 (Kurang). Dan Kategori I nilai 100-174 (Buruk).

TABEL 4.1

Tujuan/Sasaran Tahun 2023

NO	TUJUAN/SASARAN RPD	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA
					2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	TERWUJUDNYA REGENERASI KOTA YANG BERKETAHANAN DAN BERKELANJUTAN	Indeks Kota Layak Huni	Indeks	62,6* (2021)	65
1.1	Terbangunnya Infrastruktur dan Layanan Dasar Perkotaan yang Berkualitas	Pemenuhan Layanan Dasar Perkotaan	Persen	68,76 (2021)	69,06
1.2	Tercapainya Perbaikan Pola Aktivitas dan Mobilitas Melalui Pengembangan Kota Berorientasi Transit	Persentase Perjalanan Penduduk Menggunakan Moda Transportasi Publik	Persen	14,76 (2021)	18,78
1.3	Tercapainya Pemulihan Ekosistem Kota dan Implementasi Pembangunan Rendah Karbon	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	54,43 (2021)	54,93
		Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	Persen	18,5 (2022)	19,3
1.4	Peningkatan Stabilitas dan Ketahanan Kota	Indeks Risiko Bencana	Indeks	60,43 (2021)	60,12
2	TERBANGUNNYA PEREKONOMIAN INKLUSIF YANG BERDAYA SAING DISERTAI PENGHIDUPAN LAYAK DAN PEMERATAAN KESEJAHTERAAN	Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif	Indeks	7,18 (2021)	7,69
2.1	Tumbuhnya Ekonomi dan Sektor Usaha Berbasis Pengalaman dan Nilai Tambah	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	3,56 (2021)	5,40-6,20

NO	TUJUAN/SASARAN RPD	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA
					2023
2.2	Meningkatkan Kesempatan, Pemberdayaan, dan Adaptabilitas Tenaga Kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	8,51 (2021)	8,21
2.3	Berkurangnya Ketimpangan Melalui Pemenuhan Kebutuhan Dasar dan Jaminan Perlindungan Sosial	Persentase Penduduk Miskin	Persen	4,67 (2021)	4,13
		Rasio Gini	Koefisien	0,411 (2021)	0,411
		Tingkat Kemiskinan Ekstrem	Persen	1,37 (2021)	1,06
2.4	Menguatnya Daya Saing Kota Melalui Inovasi dan Kolaborasi	Indeks Daya Saing Daerah	Indeks	3,962 (2021)	3,96
3	TERCAPAINYA PEMBANGUNAN MANUSIA MADANI YANG BERKESETARAAN	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	81,11 (2021)	81,55
3.1	Meratanya Kesempatan Pendidikan Untuk Semua dan Edukasi Terkait Pembelajaran Sepanjang Hayat	Indeks Dimensi Pendidikan	Tahun	12,12 (2021)	12,14
3.2	Meningkatnya Kualitas dan Harapan Hidup Melalui Perbaikan Kesehatan Perkotaan	Angka Harapan Hidup	Tahun	73,01 (2021)	73,21
		Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) pada Balita	Persen	16,8 (2021)	13,7
3.3	Menurunnya Kesenjangan dan Pembangunan Responsif Gender	Indeks Pembangunan Gender	Indeks	94,84 (2021)	95,04
3.4	Menguatnya Nilai-nilai Demokrasi, Kebangsaan, dan Kebhinekaan Masyarakat	Indeks Demokrasi	Indeks	76,07 (2021)	76,82

NO	TUJUAN/SASARAN RPD	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA
					2023
4	TERLAKSANANYA TRANSFORMASI PELAYANAN PUBLIK DAN MANAJEMEN PEMERINTAHAN BERINTEGRITAS	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	76,54 (2021)	82
4.1	Meningkatnya Kualitas, Aksesibilitas, dan Kemudahan Layanan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	88,5 (2021)	88,5
4.2	Terakselerasinya Transformasi Digital dan Pengembangan Manajemen Kota Cerdas	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks	3,47 (2021)	3,50
4.3	Tercapainya Perbaikan Manajemen dan Arsitektur Kinerja Pemerintah	Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Predikat	76,54 (BB) (2020)	82 (A)
		Indeks Survei Penilaian Integritas	Indeks	68,7 (2021)	70
4.4	Terkelolanya Keuangan Daerah yang Sehat, Transparan, dan Akuntabel	Opini Laporan Keuangan Daerah	Opini	WTP (2020)	WTP
4.5	Berkembangnya Kapasitas, Profesionalitas, dan Iklim Kerja Aparatur	Indeks Sistem Merit	Indeks	310,5 (2021)	326

Sumber: Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2026

4.2

Strategi, Arah Kebijakan dan Program Prioritas

Dalam rangka mewujudkan Jakarta sebagai;

1. Kota yang tahan pandemi (*pandemic proof city*)
2. Kota yang tangguh menghadapi krisis (*crisis resilient city*)
3. Kota yang mengimplementasikan digitalisasi (*digitally advanced city*)
4. Kota yang berkelanjutan dan layak huni (*sustainable livable city*)

Diperlukan strategi untuk membangun warga dan ekosistem warga kota yang setara, sejahtera, dan bahagia dengan dilandasi semangat gotong-royong. Mengacu pada strategi jangka menengah tahun 2023 – 2026, maka ada 3 (tiga) strategi utama pembangunan pada tahun 2023, yaitu;

1. Keadilan dan keberpihakan

Strategi ini dijabarkan dalam 4 (empat) hal yaitu:

- a. Kesempatan yang setara
Memastikan hadirnya kesempatan yang setara bagi semua, keadilan dirasakan dalam setiap sendi pengelolaan kota, sejak pembuatan regulasi sampai layanan publik, serta mengajak seluruh elemen kota ikut bergerak memberdayakan warga yang lemah dan terpinggirkan.
- b. Suara warga
Mendengarkan suara seluruh elemen warga, mempertimbangkan perspektif perempuan, anak-anak, difabilitas, dan masyarakat marjinal dalam setiap kebijakan, membangun interaksi yang manusiawi dan realistis dengan seluruh warga dan elemen kota.
- c. Kota global
Mendorong Jakarta menjadi kota global dengan segala keragaman dan kegiatannya, terbuka terhadap perubahan dan kemajuan dunia, serta masyarakat dan bisnis merasakan manfaat pembangunan dan pertumbuhan ekonomi.
- d. Kelestarian kota
Memastikan kelestarian lingkungan (*sustainability*), tradisi, dan karakter kota ikut terjaga dan berkembang, membangun keindahan setiap sudut kota, serta

memberikan ruang seluasnya bagi seni dan budaya.

2. Orientasi pada warga dan ruang interaksi

Strategi orientasi pada warga dan ruang interaksi dijabarkan dalam 4 (empat) hal yaitu:

- a. Pola perilaku dan ruang interaksi
Setiap kebijakan mempertimbangkan pola perilaku dan ruang interaksi antar warga, warga difabilitas yang terhubung dengan komunitasnya, dan saling terhubung lintas segmen sehingga menciptakan lingkungan permukiman mandiri yang meminimalisir kebutuhan mobilitas fisik.
- b. Ekosistem social
Membangun ekosistem sosial, tak hanya ekosistem ekonomi, peka pada perubahan konteks sosial dan ekonomi yang dinamis.
- c. Pelibatan warga
Warga adalah pelaku utama pembangunan dengan pemerintah sebagai rekan kolaborator yang menggerakkan dan memberikan dukungan. Menangkap dan berkolaborasi dalam mengembangkan praktik baik, kearifan lokal dan solusi inovatif dari masyarakat.
- d. Pelayanan kebutuhan personal warga
Menyediakan layanan kesejahteraan yang inklusif dan dirancang khusus sesuai kebutuhan masing-masing personal warga dengan berbasiskan data kependudukan yang terintegrasi.

3. Birokrasi efektif dan penguatan tata kelola

Strategi birokrasi yang efektif dan penguatan tata kelola melalui Tata kelola pemerintahan tangkas (*agile*) dijabarkan dalam 3 (tiga) hal yaitu:

- a. Kepercayaan public
Menedepankan etika, transparansi dan keterbukaan dalam setiap proses pemerintahan dan interaksi dengan warga dan elemen kota, dimana setiap aparat menjadi wakil kehadiran negara dan menjadi duta pemerintah kepada warga.
- b. Profesionalisme birokrasi
Menerapkan sistem merit, prinsip akuntabilitas dan agilitas dalam tata kelola pemerintahan sehingga terwujud penyelenggaraan pemerintahan yang

- tangkas, efektif dan adaptif terhadap dinamika perkembangan kota.
- c. Sistem dan institusionalisasi solusi
Mengembangkan sistem automasi, prosedur operasional standar dan pemanfaatan teknologi berbasis data dalam perumusan kebijakan, layanan pemerintahan, dan pemecahan masalah untuk meminimalkan diskresi dan solusi spontan terhadap masalah yang dapat diantisipasi atau berulang.

Berebekal pembelajaran penanganan pandemi Covid-19, kolaborasi dan pemanfaatan teknologi digital merupakan kunci keberhasilan Jakarta untuk dapat keluar dari krisis. Perencanaan dan pembangunan kota Jakarta dalam segala aspek perlu dilaksanakan dalam paradigma baru yaitu inklusifitas, kohesi sosial, pemberdayaan dan keberadilan (yaitu membesarkan yang kecil tanpa mengecilkan yang besar), serta kolaborasi dalam pembangunan, dimana pemerintah berperan

sebagai kolaborator dan warga sebagai co-creator.

Perubahan mobilitas, interaksi dan aktivitas warga pasca pandemi juga perlu diakomodasi oleh kota Jakarta. Untuk itu perubahan paradigma pembangunan menjadi berorientasi transit (transit oriented development/ TOD) dan berorientasi digital (digital oriented development/ DOD) fundamental untuk dilakukan. Pengembangan kota berorientasi transit diantaranya dilaksanakan dengan pengembangan compact city dimana pemenuhan segala kebutuhan masyarakat ada dalam skala lingkungan dan prioritas pengguna jalan kepada pejalan kaki, pesepeda dan pengguna transportasi umum. Adapun pengembangan kota berorientasi digital dilakukan tidak hanya melalui transformasi pelayanan pemerintahan secara digital, namun juga peningkatan konektivitas dan perluasan cakupan layanan agar masyarakat dapat melaksanakan kegiatannya sehari-hari dari rumah masing-masing secara digital.

4.2.1 Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2023

Dalam rangka memantapkan tujuan dan sasaran pembangunan DKI Jakarta tahun 2023-2026 perlu didukung oleh kebijakan-kebijakan dalam merespon percepatan pelaksanaan prioritas pembangunan Provinsi

DKI Jakarta serta mendukung pembangunan nasional. Prioritas pembangunan tahun 2023 mengacu pada dokumen RPD tahun 2023 – 2026 yang dijabarkan sebagai berikut;

GAMBAR 4.1

Tahapan Pembangunan Jangka Menengah 2023-2026



Sumber: Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2026

Mengacu pada tahapan pembangunan jangka menengah tahun 2023-2026 maka tema pembangunan tahun 2023 adalah **“Pemulihan dan Transformasi Menuju Ekonomi Digital dalam Rangka Pemantapan Kota Global yang Berdaya Saing”**. Untuk

mencapai hal tersebut, maka diperlukan arah kebijakan untuk pemulihan serta transformasi ekonomi digital menuju kota global yang berdaya saing melalui program **prioritas** sebagai berikut;

1. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
2. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah
3. Program Pengembangan Perumahan
4. Program Kawasan Permukiman
5. Program Penatagunaan Tanah
6. Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)
7. Program Pengelolaan Persampahan
8. Program Penyelenggaraan Jalan
9. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
10. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)
11. Program Pengelolaan Pelayaran
12. Program Pengelolaan Perkeretaapian
13. Program Penataan Bangunan Gedung
14. Program Perencanaan Lingkungan Hidup
15. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
16. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)
17. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)
18. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
19. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
20. Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
21. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
22. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup
23. Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
24. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
25. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
26. Program Pengelolaan Hutan
27. Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya
28. Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan
29. Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)
30. Program Pengelolaan Energi Terbarukan
31. Program Pengelolaan Ketenagalistrikan
32. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
33. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase
34. Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
35. Program Penanggulangan Bencana
36. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran
37. Program Pengelolaan Aspek Gegeologian
38. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
39. Program Pemasaran Pariwisata
40. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual
41. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
42. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
43. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
44. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
45. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian
46. Program Penyuluhan Pertanian
47. Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan
48. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting
49. Program Pengembangan Ekspor
50. Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen
51. Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri
52. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri
53. Program Pengendalian Izin Usaha Industri
54. Program Perencanaan Tenaga Kerja

- | | |
|---|---|
| 55. Program Penempatan Tenaga Kerja | 85. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman |
| 56. Program Hubungan Industrial | 86. Program Pengendalian Penduduk |
| 57. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi | 87. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) |
| 58. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja | 88. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan |
| 59. Program Pengawasan Ketenagakerjaan | 89. Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan |
| 60. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian | 90. Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan |
| 61. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi | 91. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan |
| 62. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM) | 92. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) |
| 63. Program Pengembangan UMKM | 93. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi |
| 64. Program Pemberdayaan Sosial | 94. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan |
| 65. Program Rehabilitasi Sosial | 95. Program Perlindungan Perempuan |
| 66. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial | 96. Program Peningkatan Kualitas Keluarga |
| 67. Program Penanganan Bencana | 97. Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak |
| 68. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat | 98. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA) |
| 69. Program Penanganan Kerawanan Pangan | 99. Program Perlindungan Khusus Anak |
| 70. Program Pengawasan Keamanan Pangan | 100. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD |
| 71. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat | 101. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan |
| 72. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal | 102. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik |
| 73. Program Promosi Penanaman Modal | 103. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan |
| 74. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal | 104. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya |
| 75. Program Pengembangan Kebudayaan | 105. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial |
| 76. Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya | 106. Program Pendaftaran Penduduk |
| 77. Program Pengelolaan Permuseuman | 107. Program Pencatatan Sipil |
| 78. Program Pembinaan Perpustakaan | 108. Program Pengelolaan Profil Kependudukan |
| 79. Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno | 109. Program Pelayanan Penanaman Modal |
| 80. Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah | 110. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal |
| 81. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah | 111. Program Pengelolaan Arsip |
| 82. Program Pengelolaan Pendidikan | 112. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum |
| 83. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat | |
| 84. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan | |

- | | |
|--|---|
| 113. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | 123. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah |
| 114. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan | 124. Program Penyelenggaraan Pengawasan |
| 115. Program Pengelolaan Kecamatan | 125. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi |
| 116. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik | 126. Program Perekonomian dan Pembangunan |
| 117. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika | 127. Program Pengelolaan Keuangan Daerah |
| 118. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral | 128. Program Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa |
| 119. Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi | 129. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah |
| 120. Program Penataan Organisasi | 130. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah |
| 121. Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum | 131. Program Kepegawaian Daerah |
| 122. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah | 132. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia |

TABEL 4.2

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Program Prioritas Tahun 2023

NO	TUJUAN	SASARAN RKPD TAHUN 2023	STRATEGI PEMBANGUNAN TAHUN 2023	PROGRAM PRIORITAS TAHUN 2023
1	TERWUJUDNYA REGENERASI KOTA YANG BERKETAHANAN DAN BERKELANJUTAN	Terbangunnya Infrastruktur dan Layanan Dasar Perkotaan yang Berkualitas	Penyediaan dan Peningkatan akses pelayanan air minum	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
			Penyediaan dan Peningkatan akses pelayanan air limbah	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah
			Peningkatan dan pemeliharaan perumahan rakyat beserta sarana prasarananya	Program Pengembangan Perumahan
			Peningkatan kualitas dan kuantitas kawasan permukiman yang layak huni, tertata rapi dan berkelanjutan	Program Kawasan Permukiman
			Melakukan evaluasi tata ruang untuk mendukung penyelesaian permasalahan administrasi pertanahan masyarakat dan tertib pertanahan	Program Penatagunaan Tanah
			Meningkatkan kualitas ruang terbuka hijau, sarana prasarana dan tutupan hijau sesuai dengan rencana induk ruang terbuka hijau	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)
			Optimalisasi kapasitas sistem penanganan persampahan	Program Pengelolaan Persampahan
		Tercapainya Perbaikan Pola Aktivitas dan Mobilitas Melalui Pengembangan Kota Berorientasi Transit	Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur Bina Marga	Program Penyelenggaraan Jalan
		Meningkatkan kualitas penataan ruang dan mendorong terwujudnya sistem pusat pelayanan yang berorientasi transit		Program Penyelenggaraan Penataan Ruang

NO	TUJUAN	SASARAN RKPD TAHUN 2023	STRATEGI PEMBANGUNAN TAHUN 2023	PROGRAM PRIORITAS TAHUN 2023
			Meningkatkan pelayanan angkutan umum dan pemberlakuan pembatasan penggunaan kendaraan pribadi untuk mendorong masyarakat menggunakan angkutan umum dan mengurangi kemacetan	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)
			Meningkatkan pelayanan terminal penumpang angkutan perairan (Pelabuhan) dan pengawasan badan usaha angkutan perairan	Program Pengelolaan Pelayaran
			Merumuskan kebijakan dan memberikan rekomendasi terkait penyelenggaraan perkeretaapian	Program Pengelolaan Perkeretaapian
		Tercapainya Pemulihan Ekosistem Kota dan Implementasi Pembangunan Rendah Karbon	Membangun orientasi pembangunan bangunan gedung hijau dan ramah disabilitas seluruh pemangku kepentingan penyelenggara bangunan gedung	Program Penataan Bangunan Gedung
			Pengintegrasian upaya pencegahan pencemaran lingkungan melalui kebijakan dan aturan	Program Perencanaan Lingkungan Hidup
			Menurunkan Beban Pencemaran Lingkungan	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
			Meningkatkan kualitas ruang terbuka hijau, sarana prasarana dan tutupan hijau sesuai dengan rencana induk ruang terbuka hijau	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)
			Pengembangan sistem pengelolaan limbah B3 yang terintegrasi	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)
			Peningkatan ketaatan pengelolaan lingkungan yang dilaksanakan oleh kegiatan usaha	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)

NO	TUJUAN	SASARAN RKPD TAHUN 2023	STRATEGI PEMBANGUNAN TAHUN 2023	PROGRAM PRIORITAS TAHUN 2023
			Peningkatan keterlibatan dan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
			Peningkatan konservasi dan rehabilitasi ekosistem laut, pesisir dan pulau pulau kecil serta peningkatan pemberdayaan masyarakat	Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
			Pengembangan perikanan budidaya dan tangkap	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
			Peningkatan pengawasan, pengendalian dan penegakan aturan hukum terkait pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup
			Peningkatan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
				Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
				Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
			Melakukan Pembangunan / Penataan / Penghijauan Hutan untuk meningkatkan kualitas Hutan Kota	Program Pengelolaan Hutan
			Melaksanakan inventarisasi dan tindak lanjut laporan masyarakat sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku	Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya
			Melaksanakan pendidikan, pelatihan dan pemberdayaan tentang kehutanan untuk meningkatkan kompetensi masyarakat dan SDM Dinas sesuai dengan perkembangan teknologi	Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan
			Melakukan inventarisasi dan koordinasi terkait standarisasi pengelolaan DAS di Provinsi DKI Jakarta	Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)

NO	TUJUAN	SASARAN RKPD TAHUN 2023	STRATEGI PEMBANGUNAN TAHUN 2023	PROGRAM PRIORITAS TAHUN 2023
			Pengembangan penyediaan energi dan ketenagalistrikan yang berkelanjutan	Program Pengelolaan Energi Terbarukan
			Meningkatnya pemanfaatan energi dan ketenagalistrikan secara aman, handal dan berkelanjutan untuk mendukung pembangunan kota	Program Pengelolaan Ketenagalistrikan
		Meningkatnya Stabilitas dan Ketahanan Kota	Pengurangan dampak banjir melalui peningkatan tampungan, penataan kali/sungai serta pembangunan tanggul pantai	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
			Pengurangan genangan melalui peningkatan kapasitas dan pembangunan saluran drainase	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase
			Melaksanakan penegakan Perda/Perkada secara yustisial dan non yustisial dengan mengedepankan pendekatan persuasif serta memberdayakan potensi masyarakat untuk turut serta berperan aktif mewujudkan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
			Pengurangan risiko bencana dengan meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana alam maupun non alam melalui kolaborasi seluruh stakeholder	Program Penanggulangan Bencana
			Mengoptimalkan perangkat kebijakan di bidang penanganan kebakaran dan penyelamatan serta berkolaborasi dengan instansi dan pemangku kepentingan	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran
			Pengawasan dan pemantauan pemanfaatan air tanah dalam upaya pengendalian penurunan Muka Tanah	Program Pengelolaan Aspek Kegeologian

NO	TUJUAN	SASARAN RKPD TAHUN 2023	STRATEGI PEMBANGUNAN TAHUN 2023	PROGRAM PRIORITAS TAHUN 2023
2	TERBANGUNNYA PEREKONOMIAN INKLUSIF YANG BERDAYA SAING DISERTAI PENGHIDUPAN LAYAK DAN PEMERATAAN KESEJAHTERAAN	Tumbuhnya Ekonomi dan Sektor Usaha Berbasis Pengalaman dan Nilai Tambah	Peningkatan kualitas pengelolaan, pelayanan produk, dan daya tarik pariwisata DKI Jakarta	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
			Peningkatan pemasaran dan informasi pariwisata secara sinergis, intensif, inovatif, dan interaktif	Program Pemasaran Pariwisata
			Peningkatan kerja sama kelembagaan secara profesional, efektif, efisien, produktif, serta pemberdayaan, penguatan dukungan, dan fasilitasi pelaku ekonomi kreatif	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual
			Pelibatan peran serta masyarakat, penerapan sertifikasi usaha pariwisata, dan pengembangan kompetensi SDM pariwisata dan ekonomi kreatif	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
			Peningkatan produksi pertanian, peternakan, susu, daging dan pelayanan kesehatan hewan serta pengembangan pertanian perkotaan/urban farming	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
			Peningkatan produksi pertanian, peternakan, susu, daging, olahan hasil pertanian peternakan dan pelayanan kesehatan hewan serta pengembangan pertanian perkotaan/urban farming	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
			Peningkatan produksi pertanian, peternakan, susu, daging, olahan pertanian peternakan dan pelayanan kesehatan hewan serta pengembangan pertanian perkotaan/urban farming	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
			Peningkatan produksi pertanian, peternakan, susu, daging, olahan pertanian dan peternakan, pelayanan kesehatan hewan serta pengembangan pertanian perkotaan/urban farming	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian

NO	TUJUAN	SASARAN RKPD TAHUN 2023	STRATEGI PEMBANGUNAN TAHUN 2023	PROGRAM PRIORITAS TAHUN 2023
			Peningkatan produksi pertanian, peternakan, susu, daging, olahan hasil pertanian dan peternakan, pelayanan kesehatan hewan serta pengembangan pertanian perkotaan/urban farming	Program Penyuluhan Pertanian
			Meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang perdagangan melalui Online Single Submission Risk Based Approach (OSS-RBA)	Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan
			Melakukan operasi pasar, pemantauan dan pelaporan harga.	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting
			Peningkatan Ekspor dan Pengendalian Impor.	Program Pengembangan Ekspor
			Peningkatan pengawasan barang beredar, jasa dan tertib niaga.	Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen
			Peningkatan efisiensi perdagangan dalam Negeri.	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri
			Meningkatkan produktivitas industri dan Mendorong IKM melalui pendampingan, pelatihan kewirausahaan, pelatihan teknis dan manajerial	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri
			Peningkatan pembinaan dan pengawasan IKM	Program Pengendalian Izin Usaha Industri
		Meningkatnya Kesempatan Kerja dan Adaptabilitas Tenaga Kerja	Peningkatan daya saing tenaga kerja dan penciptaan lapangan kerja	Program Perencanaan Tenaga Kerja
				Program Penempatan Tenaga Kerja
				Program Hubungan Industrial
			Peningkatan Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi.	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi

NO	TUJUAN	SASARAN RKPD TAHUN 2023	STRATEGI PEMBANGUNAN TAHUN 2023	PROGRAM PRIORITAS TAHUN 2023
			Meningkatkan SDM pengelola dan pengawas koperasi melalui sosialisasi, pembinaan, dan pelatihan	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja Program Pengawasan Ketenagakerjaan
			Menumbuhkan dan mengembangkan kewirausahaan koperasi dan UMKM.	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian
			Meningkatkan daya saing koperasi dan UMKM	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi
			Pembinaan Pelaku Usaha Kecil	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)
			Pendidikan dan pelatihan UMKM	Program Pengembangan UMKM
			Peningkatan kualitas dan profesionalitas Sumber Daya Manusia Penyelenggara Kesejahteraan Sosial melalui pelaksanaan pemutakhiran database, pembinaan dan penilaian, bimbingan teknis dan pelatihan, pemberian penghargaan, dana stimulasi, penyempurnaan kebijakan terkait, monitoring evaluasi penyelenggaraan pemberdayaan sosial serta mendorong kolaborasi dengan berbagai pihak	Program Pemberdayaan Sosial
			Pemberian pelayanan rehabilitasi sosial dasar sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), peningkatan kolaborasi dengan berbagai pihak dalam memenuhi kebutuhan dasar PPKS baik di dalam ataupun luar panti, penyempurnaan kebijakan terkait serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi sosial	Program Rehabilitasi Sosial

NO	TUJUAN	SASARAN RKPD TAHUN 2023	STRATEGI PEMBANGUNAN TAHUN 2023	PROGRAM PRIORITAS TAHUN 2023
			Pemberian Layanan Perlindungan dan Jaminan Sosial yang Tepat Sasaran kepada Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial melalui peningkatan kualitas layanan data terpadu kesejahteraan sosial dengan pemutakhiran berkala untuk mewujudkan layanan data yang lengkap dan akurat, penguatan monitoring dan evaluasi pelayanan, peningkatan kolaborasi non-pemerintah dalam pemberian bantuan sosial ataupun bantuan pengembangan ekonomi serta penyempurnaan kebijakan terkait	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
			Penanganan bencana sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal bagi korban bencana alam dan sosial, peningkatan kualitas pelayanan dan sumber daya yang responsif dan adaptif terhadap bencana, penguatan monitoring dan evaluasi pelayanan serta penyempurnaan kebijakan terkait	Program Penanganan Bencana
			Penanganan bencana sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial	
			Pengamanan ketersediaan pangan, pengendalian akses, harga, promosi, dan distribusi/pemasaran	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat
			Peningkatan jumlah kecamatan yang tahan pangan	Program Penanganan Kerawanan Pangan
			Peningkatan dan pengawasan mutu & keamanan pangan, hasil pertanian, perikanan dan peternakan	Program Pengawasan Keamanan Pangan

NO	TUJUAN	SASARAN RKPD TAHUN 2023	STRATEGI PEMBANGUNAN TAHUN 2023	PROGRAM PRIORITAS TAHUN 2023
			Meningkatkan Partisipasi Masyarakat melalui Lembaga Kemasyarakatan (PKK, Posyantek dan Masyarakat lainnya) dalam Pengembangan Kewirausahaan Terpadu (Jakpreneur) sebagai upaya meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat
		Menguatnya Daya Saing Kota Melalui Inovasi dan Kolaborasi	Pelaksanaan pengembangan Iklim Penanaman Modal dilakukan melalui penyusunan kebijakan yang selaras dengan peraturan yang terus berkembang dan perlu dipedomani, diantaranya dengan terbitnya Undang-undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja tentunya membutuhkan telaah kebijakan terbaru dalam urusan Penanaman Modal terutama terkait dengan kebijakan kemudahan berusaha di daerah. Selain harmonisasi produk hukum dalam rangka meningkatkan iklim investasi juga dilakukan penyusunan serta pengembangan peta potensi dan peluang Investasi di DKI Jakarta	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
			Pelaksanaan kegiatan promosi dengan melibatkan Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat, Perwakilan negara asing, calon investor, BUMN, BUMD, Swasta Nasional, Swasta Asing dan Stakeholder lainnya terkait penanaman modal. Bentuk kegiatan promosi dapat dilakukan melalui pelaksanaan promosi secara langsung maupun tidak langsung (daring) atau media promosi lainnya. Lokus pelaksanaan di dalam negeri dan luar negeri. Pelaksanaan Fasilitasi calon investor yang tertarik untuk berinvestasi di Jakarta khususnya pada proyek Pemerintah DKI Jakarta dan atau proyek BUMD. Dalam persiapan pelaksanaan promosi dilakukan kurasi atas standarisasi pengajuan dan melakukan evaluasi terhadap proyek dari BUMD	Program Promosi Penanaman Modal

NO	TUJUAN	SASARAN RKPD TAHUN 2023	STRATEGI PEMBANGUNAN TAHUN 2023	PROGRAM PRIORITAS TAHUN 2023
			<p>dan SKPD yang akan dipresentasikan pada forum promosi, pelaksanaan riset pasar/Investor Mapping Behaviour (pemetaan perilaku/karakteristik negara-negara investor agar proyek yang akan ditawarkan tepat sasaran). Selain itu ditingkatkan peran Komite Investasi dalam mendukung pencapaian target Penanaman Modal</p>	
			<p>Pengendalian pelaksanaan Penanaman Modal dilakukan melalui pelaksanaan pengawasan Penanaman Modal, pembinaan pelaksanaan Penanaman Modal, peningkatan pemahaman bagi para pelaku usaha mengenai urusan Penanaman Modal yang dilakukan melalui antara lain bimbingan teknis, Sosialisasi maupun diseminasi. Pelaksanaan pengendalian juga dilaksanakan melalui kegiatan pemberian bantuan penyelesaian berbagai hambatan dan permasalahan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam menjalankan kegiatan Penanaman Modal.</p>	<p>Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal</p>
			<p>1. Pelindungan hak kebudayaan dan ekspresi budaya untuk memperkuat kebudayaan yang inklusif; 2. Pengembangan dan pemanfaatan kekayaan budaya untuk memperkuat karakter bangsa dan kesejahteraan rakyat; 3. Pengembangan diplomasi budaya untuk memperkuat pengaruh Indonesia dalam perkembangan peradaban dunia; dan 4. Pengembangan tata kelola pembangunan kebudayaan.</p>	<p>Program Pengembangan Kebudayaan</p>

NO	TUJUAN	SASARAN RKPD TAHUN 2023	STRATEGI PEMBANGUNAN TAHUN 2023	PROGRAM PRIORITAS TAHUN 2023
			<p>1. Memetakan keberadaan cagar budaya untuk membuat peta jalan pengelolaan cagar budaya secara holistik; 2. Menguatkan kerja sama dengan organisasi di daerah, dan juga pemerintah daerah untuk pengelolaan cagar budaya secara mandiri sesuai dengan standar konservasi; 3. Memanfaatkan cagar budaya untuk penguatan nilai-nilai budaya daerah dan juga nilai-nilai ekonomi cagar budaya, salah satunya sebagai objek wisata, tetapi tetap berfokus pada keberlanjutan sebagai cagar budaya.</p>	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya
			<p>1. Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu melalui peningkatan kajian untuk keakuratan informasi koleksi; Pengembangan promosi melalui media cetak, elektronik virtual; Kerjasama dengan komunitas museum untuk membuat program publik yang menarik; 2. Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman melalui peningkatan SDM dengan pelatihan dan sertifikasi keahlian teknis permuseuman; 3. Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum melalui peningkatan pelayanan berdasarkan survey kepuasan pengunjung; Peningkatan peran insan museum dalam pengelolaan koleksi; 4. Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum melalui penyempurnaan fasilitas untuk pengelolaan koleksi; 5. Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum melalui peningkatan sarana edukasi dan rekreasi; Pengembangan sistem pencatatan, penyimpanan</p>	Program Pengelolaan Permuseuman

NO	TUJUAN	SASARAN RKPD TAHUN 2023	STRATEGI PEMBANGUNAN TAHUN 2023	PROGRAM PRIORITAS TAHUN 2023
			dan pengamanan koleksi; Pengembangan sistem informasi yang mudah diakses oleh masyarakat.	
			Peningkatan kapasitas kelembagaan dan peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan budaya literasi	Program Pembinaan Perpustakaan
			Melakukan pendataan, pengolahan, preservasi, pengalihmediaan, dan/atau akuisisi naskah kuno yang dimiliki masyarakat untuk dilestarikan dan didayagunakan	Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno
			Penyelenggaraan Kerjasama Pemerintah Daerah dan Badan Usaha yang dilakukan melalui pelaksanaan fasilitasi rencana proyek dengan skema KPDBU yang masuk kedalam simpul	Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah

NO	TUJUAN	SASARAN RKPD TAHUN 2023	STRATEGI PEMBANGUNAN TAHUN 2023	PROGRAM PRIORITAS TAHUN 2023
			KPDBU dengan ruang lingkup fasilitasi sesuai peraturan Gubernur yang mengatur mengenai tugas pokok dan fungsi DPMPTSP	
			1. Membangun tata kelola inovasi daerah yang mampu mendorong penciptaan kluster inovasi; 2. Mengoptimalkan penciptaan dan pengembangan inovasi daerah melalui kolaborasi pentahelix antara Pemerintah, Akademisi, Pelaku Usaha, Masyarakat, dan Media.	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah
3	TERCAPAINYA PEMBANGUNAN MANUSIA MADANI YANG BERKESETARAAN	Meratanya Kesempatan Pendidikan Untuk Semua Disertai Edukasi Pembelajaran Sepanjang Hayat	<p>Peningkatan Efisiensi dan Efektivitas Perencanaan dan Anggaran serta Pengelolaan Manajemen dan Administrasi Pemerintahan</p> <p>Peningkatan pemerataan akses layanan pendidikan di semua jenjang, peningkatan dan pemerataan kualitas belajar mengajar, peningkatan profesional pendidik dan tenaga kependidikan, penguatan pendidikan vokasi berbasis kerja sama DU/DI, dan pemenuhan sarana prasarana pendidikan yang didukung dengan tata kelola pendidikan yang transparan dan akuntabel</p>	Program Pengelolaan Pendidikan
		Meningkatnya Kualitas dan Harapan Hidup Melalui Perbaikan Kesehatan Perkotaan	Implementasi Transformasi Pelayanan Kesehatan yang Adaptif dan Terintegrasi dengan Memfokuskan Pada Standarisasi Fasilitas Kesehatan, Transformasi Organisasi, Inovasi Layanan, Peningkatan Kapasitas Kegawatdaruratan Klinis dan Komunitas, Digitalisasi dan Peningkatan Aksesibilitas Pelayanan Kesehatan dalam Kerangka Urban Health	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat

NO	TUJUAN	SASARAN RKPD TAHUN 2023	STRATEGI PEMBANGUNAN TAHUN 2023	PROGRAM PRIORITAS TAHUN 2023
			Membangun Kepercayaan dan Pengalaman Terbaik bagi Penerima Layanan melalui Pemenuhan dan Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Kesehatan dan Optimalisasi Implementasi Hospitality.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
			Pemenuhan dan Peningkatan Kualitas Produk Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan, serta Pengawasan Keamanan Makanan dan Minuman	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman
			Pepaduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian kuantitas penduduk; Penguatan kerjasama pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal, Nonformal dan Informal; Peningkatan cakupan Pendataan Keluarga Terpadu Satu Pintu melalui Carik Jakarta; Peningkatan pengolahan dan analisis data Carik Jakarta dalam penanganan isu kependudukan; Peningkatan dukungan sarana dan prasarana Pendataan Keluarga Terpadu Satu Pintu melalui Carik Jakarta	Program Pengendalian Penduduk
			Penguatan pemahaman 8 Fungsi Keluarga; Optimalisasi pola asuh dan pendampingan balita dan anak; Peningkatan pola asuh dan pendampingan remaja, peningkatan kualitas dan karakter remaja, serta penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja; Penguatan pelayanan ramah lansia melalui 7 (tujuh) dimensi lansia tangguh dan pendampingan perawatan jangka panjang bagi lansia; Peningkatan kemandirian ekonomi keluarga, dengan sasaran khusus keluargakeluarga akseptor KB lestari, keluarga peserta MKJP khususnya MOP dan MOW, serta	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)

NO	TUJUAN	SASARAN RKPD TAHUN 2023	STRATEGI PEMBANGUNAN TAHUN 2023	PROGRAM PRIORITAS TAHUN 2023
			peserta KB Mandiri di wilayah Kampung KB; Peningkatan kemitraan pembangunan keluarga	
			Meningkatkan peran serta Pemuda melalui kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda serta Optimalisasi dalam Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan DKI Jakarta	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan
			Peningkatan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	
			Optimalisasi Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi, Olahraga Rekreasi dan Olahraga Pendidikan serta Peningkatan Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga	Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan
			Peningkatan Daya Saing Olahraga	
			Membentuk anggota pramuka yang berjiwa patriotik, menjunjung tinggi nilai-nilai luhur bangsa dan memiliki kecakapan hidup melalui peningkatan sumber daya manusia dan pengembangan organisasi kepramukaan.	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan

NO	TUJUAN	SASARAN RKPD TAHUN 2023	STRATEGI PEMBANGUNAN TAHUN 2023	PROGRAM PRIORITAS TAHUN 2023
			Peningkatan dan Pengembangan Kapasitas Anggota Kepramukaan	
			Penguatan UKBM dan Keterlibatan Aktif Masyarakat melalui Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Kader Kesehatan, Advokasi dan Aksi Lintas Sektoral	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
			Penyediaan dukungan sarana, prasarana, dan tenaga pelayanan keluarga berencana yang berkualitas dan memadai; Peningkatan keterlibatan/dukungan lembaga dan stakeholder dalam KIE kesehatan reproduksi dan pelayanan KB; Advokasi Program KKBPK dan peningkatan peran serta Mitra Kerja dan Stakeholder dalam pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan KB; Promosi dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK melalui berbagai media; Peningkatan kompetensi serta pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB, Tenaga Pelayanan dan Kader KB; Konvergensi lintas sektor dalam pelaksanaan kegiatan di Kampung KB	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)
			1. Meningkatkan ketersediaan fasilitas pelayanan kantor melalui penyediaan anggaran, pemenuhan SDM dan sarana prasarana kebutuhan kantor 2. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas perencanaan dan anggaran 3. Meningkatkan tata kelola dukungan manajemen dan administrasi pemerintahan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

NO	TUJUAN	SASARAN RKPD TAHUN 2023	STRATEGI PEMBANGUNAN TAHUN 2023	PROGRAM PRIORITAS TAHUN 2023
		Menurunnya Kesenjangan Melalui Pembangunan Responsif Gender	<p>Peningkatan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, yang mencakup percepatan pelaksanaan PUG di Perangkat Daerah melalui penguatan kelembagaan PUG dan penguatan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG); peningkatan pengetahuan dan pemahaman individu, baik perempuan maupun laki-laki, keluarga, komunitas, lembaga masyarakat, media massa, dan dunia usaha; peningkatan peran dan partisipasi perempuan dalam pembangunan, terutama dalam pendidikan, kesehatan, ekonomi, tenaga kerja, serta politik, jabatan publik, dan pengambilan keputusan; peningkatan jejaring dan koordinasi antara pemerintah masyarakat, media massa, dunia usaha, dan lembaga masyarakat; dan pengembangan inovasi dalam upaya pelaksanaan PUG dan Pemberdayaan Perempuan</p>	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
			<p>Peningkatan perlindungan perempuan, termasuk TPPO, yang mencakup peningkatan pengetahuan dan pemahaman individu baik perempuan maupun laki-laki, keluarga, masyarakat, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya tentang KtP dan TPPO; penguatan kelembagaan perlindungan perempuan dari tindak kekerasan melalui peningkatan kapasitas SDM penyedia layanan; koordinasi antar unit penyedia layanan, penguatan data dan informasi, serta pengawasan; pengembangan sistem layanan terpadu penanganan KtP dan TPPO; penguatan jejaring dan kerja sama antara pemerintah daerah, komunitas, media massa, dunia usaha dan</p>	Program Perlindungan Perempuan

NO	TUJUAN	SASARAN RKPD TAHUN 2023	STRATEGI PEMBANGUNAN TAHUN 2023	PROGRAM PRIORITAS TAHUN 2023
			<p>lembaga bantuan hukum; dan pengembangan inovasi dalam upaya pencegahan KtP dan TPPO</p>	
			<p>Meningkatkan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak melalui advokasi dan pelayanan pada keluarga yang komprehensif dan terintegrasi pada lembaga/ organisasi/ kelompok/ perorangan yang berperan mendampingi keluarga di Jakarta.</p>	<p>Program Peningkatan Kualitas Keluarga</p>
			<p>Peningkatan pengelolaan sistem data gender dan anak yang berkualitas, mutakhir dan terpadu</p>	<p>Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak</p>
			<p>Meningkatkan advokasi dan koordinasi tentang pemenuhan hak anak pada lembaga/ organisasi/ kelompok/stakeholder baik yang memberikan pelayanan langsung pada anak dan keluarga maupun yang berkaitan dengan anak; dan meningkatkan pemenuhan hak partisipasi anak untuk pembangunan melalui pendampingan Forum Anak Daerah.</p>	<p>Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)</p>

NO	TUJUAN	SASARAN RKPD TAHUN 2023	STRATEGI PEMBANGUNAN TAHUN 2023	PROGRAM PRIORITAS TAHUN 2023
			Meningkatkan advokasi dan koordinasi tentang perlindungan bagi kelompok Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK) pada lembaga/ organisasi/ kelompok/ stakeholder baik yang memberikan pelayanan perlindungan langsung pada keluarga dan AMPK; dan meningkatkan akses dan informasi layanan korban kekerasan terhadap anak yang terintegrasi dan komprehensif di DKI Jakarta.	Program Perlindungan Khusus Anak
		Menguatnya Nilai-nilai Demokrasi, Kebangsaan, dan Kebhinekaan Masyarakat	Peningkatan Kualitas Layanan Kepada Anggota Dewan untuk Mendukung Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD
			Peningkatan pengelolaan kantor dan pengelolaan kendaraan operasional dalam mendukung efisiensi dan efektivitas kinerja pegawai serta Peningkatan Pelayanan Sekretariat DPRD	
			Peningkatan pemahaman masyarakat melalui penguatan ideologi pancasila	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
			Peningkatan kesadaran politik dan demokrasi melalui penguatan pendidikan politik dan peningkatan citra positif lembaga dan institusi politik	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik
			Peningkatan pemberdayaan ormas melalui penguatan wawasan kemandirian Ormas dan pembinaan konsep kelembagaan mandiri	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
			Peningkatan pemahaman masyarakat melalui pengembangan ketahanan ekonomi, sosial, budaya, dan agama	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya

NO	TUJUAN	SASARAN RKPD TAHUN 2023	STRATEGI PEMBANGUNAN TAHUN 2023	PROGRAM PRIORITAS TAHUN 2023
			Peningkatan pemahaman masyarakat terkait pencegahan dan penanganan konflik sosial dimasyarakat	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial
4	TERLAKSANANYA TRANSFORMASI PELAYANAN PUBLIK DAN MANAJEMEN PEMERINTAHAN BERINTEGRITAS	Meningkatnya Kualitas, Aksesibilitas, dan Kemudahan Layanan Masyarakat	<p>Meningkatkan Cakupan Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk</p> <p>Meningkatkan Cakupan Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil</p> <p>Peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan penyajian profil kependudukan</p> <p>Peningkatan kualitas pelayanan dilakukan dengan pengembangan layanan berbasis digital melalui Pengembangan Sistem Teknologi Informasi, Penyiapan Sarana Jaringan dan Infrastruktur Secara Online dan penyediaan sarana dan prasarana teknologi informasi</p> <p>Pelayanan dan pemanfaatan arsip autentik, pengelolaan data dan informasi kearsipan serta penguatan strategi dan sistem pelayanan</p> <p>Pelaksanaan program pengelolaan kecamatan dalam upaya peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat, diantaranya melalui kegiatan PPSU, RT, RW, LMK dan FKDM</p> <p>Pelaksanaan program pengelolaan kecamatan dalam upaya peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat, diantaranya melalui kegiatan PPSU, RPTRA, RT, RW, LMK dan FKDM</p> <p>Pengelolaan kota administrasi dan pelaksanaan koordinasi wilayah yang optimal</p>	<p>Program Pendaftaran Penduduk</p> <p>Program Pencatatan Sipil</p> <p>Program Pengelolaan Profil Kependudukan</p> <p>1. Program Pelayanan Penanaman Modal 2. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal</p> <p>Program Pengelolaan Arsip</p> <p>Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum</p> <p>Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan</p>

NO	TUJUAN	SASARAN RKPD TAHUN 2023	STRATEGI PEMBANGUNAN TAHUN 2023	PROGRAM PRIORITAS TAHUN 2023
			Pengelolaan kabupaten administrasi dan pelaksanaan koordinasi wilayah yang optimal	
			Pengelolaan Penyelenggaraan Pemerintahan, Kesejahteraan Rakyat Dan Pengembangan di wilayah yang optimal	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
			Pelaksanaan program pengelolaan kecamatan dalam upaya peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat, diantaranya melalui kegiatan PKK, Posyandu, Jumantik dan RPTRA	Program Pengelolaan Kecamatan
			Pelaksanaan program pengelolaan kecamatan dalam upaya peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat, diantaranya melalui kegiatan PKK, Posyandu, Jumantik dan Ruang Interaksi Warga	
			Pelaksanaan program pengelolaan kecamatan dalam upaya peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat, diantaranya melalui kegiatan PKK, Posyandu, Jumantik, dan Ruang Interaksi Warga	
			Pelaksanaan program pengelolaan kecamatan dalam upaya peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat, diantaranya melalui kegiatan PKK, Posyandu, Jumantik, dan RPTRA	
			Pelaksanaan program pengelolaan kecamatan dalam upaya peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat, diantaranya melalui kegiatan PKK, Posyandu, dan Jumantik dan RPTRA	
			Pelaksanaan program pengelolaan kecamatan dalam upaya peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat, diantaranya melalui kegiatan ketertiban umum	

NO	TUJUAN	SASARAN RKPD TAHUN 2023	STRATEGI PEMBANGUNAN TAHUN 2023	PROGRAM PRIORITAS TAHUN 2023
		Terakselerasinya Transformasi Digital dan Pengembangan Ekosistem Kota Cerdas	<p>Mempercepat Peningkatan Kualitas Pengelolaan dan Layanan Informasi dan Komunikasi Publik</p> <p>Mempercepat Peningkatan Kualitas Layanan Teknologi Informasi Dan Komunikasi</p> <p>Mempercepat Peningkatan Penggunaan Data dalam Proses Perencanaan Pembangunan di Daerah</p> <p>Mempercepat Peningkatan Kualitas Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</p> <p>Mempercepat Peningkatan Manajemen Keamanan Informasi</p>	<p>Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik</p> <p>Program Pengelolaan Aplikasi Informatika</p> <p>Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral</p> <p>Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi</p>
		Tercapainya Perbaikan Manajemen dan Arsitektur Kinerja Pemerintah	<p>Penguatan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah</p> <p>Peningkatan kualitas dan efektivitas penataan Peraturan Perundang-undangan dan Advokasi Hukum Provinsi DKI Jakarta</p> <p>1. Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan berbasis bukti; 2. Mengedepankan integrasi dalam penyusunan rencana pembangunan; 3. Memastikan terlaksananya rencana pembangunan secara efektif dan efisien melalui penguatan pengendalian proses pembangunan</p> <p>Percepatan penyelesaian rekomendasi temuan hasil pengawasan APIP dan penyelesaian hasil pemeriksaan eksternal (BPK RI)</p>	<p>Program Penataan Organisas</p> <p>Program Fasilitas dan Koordinasi Hukum</p> <p>1. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah 2. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah</p> <p>Program Penyelenggaraan Pengawasan</p>

NO	TUJUAN	SASARAN RKPD TAHUN 2023	STRATEGI PEMBANGUNAN TAHUN 2023	PROGRAM PRIORITAS TAHUN 2023
			Peningkatan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi dalam mewujudkan Kapabilitas APIP level 4	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi
			Fasilitasi dan Evaluasi Penyelenggaraan Kolaborasi dan Kerja Sama Daerah	Program Perekonomian dan Pembangunan
		Terkelolanya Keuangan Daerah yang Sehat, Transparan, dan Akuntabel	Melalui penguatan tata kelola dan kapasitas keuangan perusahaan, penciptaan SDM unggul dan kompetitif, kemampuan bersaing di lingkup Nasional dan Global, serta memberikan kontribusi terhadap APBD untuk penciptaan lingkungan kota yang layak, produktif dan berkelanjutan	Program Pengelolaan Keuangan Daerah
			Peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah	
			Pengembangan sistem informasi pengadaan barang/jasa, perbaikan standar pelayanan dan peningkatan kualitas SDM secara berkelanjutan untuk mendorong perbaikan layanan pengadaan barang dan jasa	Program Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa
			Menyelenggarakan penyusunan dan pengelolaan standar harga satuan barang milik daerah	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah
			Melaksanakan Penatausahaan Aset Daerah yang Akuntabel dan Transparan melalui optimalisasi pemanfaatan aset, pemaksimalan penagihan piutang, pengelolaan Barang Milik Daerah yang tertib, pengamanan Barang Milik Daerah serta inventarisasi aset yang sesuai dengan ketentuan perundangundangan	

NO	TUJUAN	SASARAN RKPD TAHUN 2023	STRATEGI PEMBANGUNAN TAHUN 2023	PROGRAM PRIORITAS TAHUN 2023
			Optimalisasi Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah melalui Kegiatan Ekstensifikasi dan Intensifikasi	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
		Berkembangnya Kapasitas, Profesionalitas, dan Iklim Kerja Aparatur	Mewujudkan sistem manajemen ASN yang baik melalui: pemetaan, penilaian, dan pengembangan kompetensi ASN, pengembangan sistem penilaian kinerja, kesejahteraan ASN, penataan ASN, promosi jabatan secara terbuka, penegakan disiplin aparatur serta pengembangan jabatan fungsional tertentu.	Program Kepegawaian Daerah
			Peningkatan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia

Sumber: Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2026

4.2.2 Prioritas Kewilayahan

Provinsi DKI Jakarta, terdiri dari 5 Wilayah kota dan 1 Kabupaten. Masing-masing memiliki karakteristik dan keunggulan yang berbeda. Daya saing kota/ kabupaten tersebut dapat optimal jika masing-masing wilayah fokus

1.2.2.1 Jakarta Pusat

Prioritas Wilayah Kota Administrasi Jakarta Pusat dalam rangka mendukung tema pembangunan tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Jakpreneur, yaitu optimalisasi pengembangan Jakpreneur melalui pembinaan dan pendampingan kewirausahaan sebanyak 2.961 orang
2. Pelatihan Ketenagakerjaan
3. Urban Farming merupakan bentuk dukungan penguatan ketahanan pangan melalui pembinaan urban farming dengan target sebanyak 250 orang
4. Loksem, review penggunaan ruang kota dan lokasi sementara (Loksem)
5. Pariwisata, dukungan terhadap upaya pemulihan pariwisata melalui event seni kreatif di 4 kawasan unggulan
6. Penataan kawasan, *Enjoy Jakarta Walking Tour* dengan 8 rute dan penataan kawasan Petojo Enclek menjadi *leisure walk tour trail*
7. Layanan Kesehatan, peningkatan dan penguatan layanan kesehatan melalui optimalisasi layanan puskesmas kelurahan
8. Penguatan Lembaga Masyarakat, penguatan lembaga kemasyarakatan melalui pelatihan bagi pengurus RT,RW,LMK dan FKDM.
9. Penyediaan ruang ketiga, peningkatan penyediaan ruang ketiga melalui optimalisasi ruang kota yang belum termanfaatkan
10. Rehab total kantor kelurahan. Rehab total 5 (lima) kanto kelurahan: Kelurahan Pegangsaan, Kelurahan Kwitang, Kelurahan Senen, Kelurahan Tanah Tinggi dan Kelurahan Bungur
11. Penyediaan alat bantu fisik bagi para penyandang disabilitas sebanyak 250 unit.

membangun pada potensi keunggulannya. Oleh karena itu perlu rumusan prioritas pembangunan dari setiap wilayah kota/kabupaten.

12. Pengendalian banjir, pemasangan pompa pengendali banjir di 2 lokasi, pembangunan pintu air 12 lokasi, pembuatan kolam olakan/bioswale di 5 lokasi, optimalisasi pengerukan kali, pemeliharaan tali air dan saluran drainase serta rutin melakukan grebek lumpur

1.2.2.2 Jakarta Utara

Isu strategis pembangunan Kota Administrasi Jakarta Utara pada tahun 2023, antara lain :

1. Pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19
2. Penanggulangan kemiskinan dan Pemberdayaan masyarakat
3. Penanganan banjir di pesisir pantai utara Jakarta
4. Penanganan sampah pesisir di belakang tanggul NCICD

Adapun hal – hal yang memerlukan dukungan dari Provinsi adalah;

1. Penyediaan satu data program penanggulangan kemiskinan
2. Pembangunan sheet pile kali Muara Ciliwung Gunung Sahari
3. Pengerukan dan Pembangunan tanggul di Kali Cakung Lama
4. Pembangunan tahap II sheet pile di sepanjang kali Betik
5. Peninggian jalan di Danau Sunter Barat arah Sunter Permai depan Pengadilan Negeri Jakarta Utara
6. Peningkatan kapasitas pintu saringan Kali Laya Waduk Rawa Badak
7. Penyediaan sarana dan prasarana pendukung penanganan sampah pesisir di tanggul NCICD

1.2.2.3 Jakarta Barat

Isu strategis wilayah Jakarta Barat tahun 2023 adalah sebagai berikut;

1. Banjir. Permasalahan terkait banjir di

wilayah kota administrasi Jakarta Barat adalah;

- a. Dari 13 sungai di DKI Jakarta, 8 sungai diantaranya melewati wilayah Jakarta Barat yang berpotensi terjadinya luapan jika terjadi curah hujan dan debit air yang tinggi, serta datangnya air dari hulu berbarengan dengan meluapnya rob air laut
- b. Sebagian wilayah di Jakarta Barat, dari luas 129,54 KM2, 35% berada di bawah permukaan air laut, dan
- c. Wilayah di Jakarta Barat terdapat beberapa wilayah yang memiliki kontur relatif cekung sehingga air tidak bisa mengalir secara alami ke saluran lingkungan.

Adapun upaya yang akan dilakukan untuk penanganan banjir pada tahun 2023 diantaranya;

- a. Pengerukan di 8 sungai dalam upaya menambah kapasitas daya tampung air
 - b. Perkuatan tebing pada sungai-sungai yang berpotensi longsor dan banjir
 - c. Pembuatan embung, pintu air dan penambahan kapasitas pompa
 - d. Revitalisasi pompa stationer dan kolam olakan
 - e. Pembuatan sumur resapan dan biopori
 - f. Pembuatan rain garden / bioswale pada taman tepi dan median jalan
 - g. Mengawasi dan menertibkan masyarakat yang berkewajiban untuk membuat sumur resapan sesuai dengan IMB yang dimiliki
 - h. Mendorong gedung-gedung pemerintah maupun swasta di wilayah Jakarta Barat untuk menerapkan / melaksanakan program zero run off
2. Kemacetan.
- a. Wilayah Jakarta Barat merupakan salah satu pintu gerbang masuk ke kota Jakarta dari wilayah penyanggah sehingga menyebabkan tingginya mobilisasi pengguna kendaraan bermotor
 - b. Transportasi massal yang terintegrasi belum menyeluruh secara masif sampai ke daerah penyanggah
 - c. Beberapa ruas jalan wilayah Jakarta Barat banyak dilalui oleh kendaraan

- d. Beberapa ruas jalan di wilayah Jakarta Barat masih terdapat missing link dan bottle neck

Upaya – upaya yang akan dilakukan untuk menanggulangi kemacetan di wilayah Jakarta Barat pada tahun 2023, antara lain;

- a. Penambahan fasilitas park and ride di pintupintu gerbang masuk wilayah Jakarta Barat dalam rangka mendorong peningkatan pengguna angkutan massal
- b. Memberikan edukasi kepada masyarakat untuk menggunakan
- c. transportasi angkutan massal serta berkendara yang tertib
- d. Melakukan pengawasan dan penindakan terhadap kendaraan berat, para pengguna dan pemanfaat jalan lainnya yang melanggar
- e. Mendorong percepatan program terhadap lokasi-lokasi yang missing link dan bottle neck
- f. Melakukan rekayasa lalu lintas pada titik-titik / simpul-simpul konflik lalu lintas

1.2.2.4 Jakarta Selatan

Isu strategis pembangunan di wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan pada Tahun 2023 adalah:

1. Penangan Banjir
2. Penataan Kawasan dan Jalur Pedestrian
3. Sarana Prasarana Kesehatan
4. Taman Interaktif
5. Sarana dan Prasarana Olahraga
6. Pembangunan Jalan Tembus
7. Pemerintahan
8. Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif

Adapun prioritas wilayah yang memerlukan dukungan SKPD Provinsi, diantaranya:

1. Konektivitas antara Camping Ground dengan Agro Wisata Ragunan dengan membuka akses di lahan milik Dinas Pertamanan dan Hutan Kota serta Dinas KPKP dengan sarana dan prasarana
2. Pembebasan Lahan, Penataan Kawasan, dan Pembangunan Outlet Rawa Lindung, Petukangan Selatan
3. Pembebasan Lahan dan Pembangunan

Jalan Tembus dari Jl. TK Pembina Kel. Petukangan Utara, Pesanggrahan menuju Jl. H. Liun Jakarta Barat

4. Kolaborasi Penataan Embung Terpadu di Srengseng Sawah RW 09, Jagakarsa untuk membangun Embung dan Makam/Taman
5. Pemanfaatan Lahan dan Kebijakan Perubahan Zonasi untuk Pembangunan
6. Puskesmas Kelurahan dan Kecamatan

1.2.2.5 Jakarta Timur

Isu strategis pembangunan di Jakarta Timur tahun 2023 antara lain;

1. Banjir
 - a. Peningkatan peran serta dan kolaborasi swasta & masyarakat dalam pembangunan sumur resapan
 - b. Optimalisasi Area Ruang Hijau dan Biru pada Ruang Terbuka Hijau
 - c. Pemanfaatan Waduk/Embung sebagai pengendali banjir sekaligus tempat rekreasi
 - d. Optimalisasi Area Ruang Hijau dan Biru pada Ruang Terbuka Hijau
2. Pandemi Covid-19
 - a. Meningkatkan Kecepatan Tracing dan kemampuan kapasitas testing untuk proses deteksi dini yang mempengaruhi kecepatan pemutusan mata rantai penularan Covid
 - b. Meningkatkan kolaborasi pelaksanaan Vaksin
 - c. Memperbanyak komunikasi resiko mengenai Covid pada masyarakat
 - d. Adaptasi secara bertahap menuju era endemi/ kebiasaan baru
3. Pemulihan ekonomi
 - a. Pengembangan dan penerapan digitalisasi ekonomi bagi para anggota Jakpreneur
 - b. Penumbuhan ekosistem industri mikro kreatif di wilayah Jakarta Timur
 - c. Pengembangan tenaga kerja yang adaptif secara digital sesuai kebutuhan bursa kerja secara kolaborasi dengan pihak perusahaan
 - d. Pengembangan destinasi wisata berbasis agro edu wisata (Agro Wisata Cilangkap, Cagar Buah Condet, Taman Ternak Pondok Ranggan)

Adapun hal-hal yang memerlukan dukungan Provinsi diantaranya;

1. Pendelegasian kewenangan dalam pengelolaan sungai, waduk & pintu air
2. Pendelegasian kewenangan dari Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Kota untuk mendukung pelaksanaan kolaborasi pembangunan dengan masyarakat & swasta terkait kerjasama, CSR & pemanfaatan asset
3. Menambah jenis pelatihan ketenagakerjaan sesuai kebutuhan pasar

1.2.2.6 Kepulauan Seribu

Isu strategis wilayah kabupaten Kepulauan Seribu pada tahun 2023 antara lain;

1. Kesehatan

Isu strategis terkait dengan kesehatan yaitu belum tercukupinya sarana dan prasarana medis dan belum mencukupinya tenaga medis terutama pada tenaga spesialis. Oleh karena itu, diperlukan hal-hal sebagai berikut untuk isu kesehatan:

- a. Optimalisasi rumah sakit kepulauan seribu dengan pemanfaatan layanan kamar operasi dan perawatan intensif untuk dewasa (ICU) dan bayi baru lahir (NICCU)
- b. Pemenuhan kebutuhan dokter spesialis dengan peningkatan intensif dokter spesialis yang ditempatkan di RSUD Kep.Seribu
- c. Kebutuhan lahan untuk pembangunan poskes di Pulau Pari

2. Pendidikan

Masih belum memadainya alat praktek penunjang pembelajaran. Oleh karena itu, diperlukan Pengadaan Tempat Praktek Docking Kapal sebagai sarana pelatihan SMKN 61

3. Air Bersih

Kurangnya kapasitas produksi SWRO dan Kurangnya kualitas produksi dan SWRO agar bisa langsung diminum. Terkait dengan isu air bersih maka diperlukan

- Peningkatan kapasitas produksi SWRO
- Peningkatan kualitas produksi dan SWRO agar bisa langsung diminum

4. Penangan Sampah

- a. Penanganan sampah di laut masih dilakukan secara manual (Pengadaan

- kapal pengumpul sampah dilaut)
- b. Sampah residu dari domestic/rumah tangga dan sampah kiriman masih dibawa ke darat
- c. Volume sampah kiriman dari darat masih tinggi
- d. Belum memadainya sarana prasarana pengelolaan sampah (Wadah Sampah, TPS 3R dan TPS B3, Dermaga Kapal Sampah)

Terkait dengan penanganan sampah, maka hal – hal yang perlu dilakukan antara lain;

1. Pengadaan Kapal Conveyor untuk membersihkan sampah di perairan
2. Pembangunan TPS, dan Pengolahan Sampah Non Konvensional dan Ramah Lingkungan

5. Perumahan dan Pemukiman

Kebutuhan lahan untuk permukiman semakin meningkat, di lain sisi ketersediaan lahan semakin sulit. Oleh karena itu, maka diperlukan Pembangunan Rumah Susun di Kepulauan Seribu

6. Infrastruktur

- a. Perlunya pelabuhan dan dermaga yang memenuhi standar
 - b. Masih tingginya permintaan pembangunan, pendalaman kolam labuh nelayan dan alur laut
 - c. Belum tersedianya jalan lingkar yang dilengkapi pedestrian dan jalur sepeda
 - d. Belum meratanya rute layanan transjakarta antar pulau
 - e. Terbatasnya jam pelayanan transjakarta
- Dalam hal isu infrastruktur di wilayah Kabupten Kepulauan Seribu maka diperlukan hal –hal sebagai berikut:

1. Sarana bantu Navigasi untuk perjalanan kapal dimalam hari
2. Revitalisasi Pelabuhan & Dermaga
3. Pemenuhan Kebutuhan Angkutan Perairan Antar Pulau
4. Penambahan Armada Kapal Transportasi

7. Perikanan dan kelautan

Belum adanya tempat sentra pasar ikan terpadu

- Pembangunan Tempat Pelelangan Ikan Terpadu
- Revitalisasi Pulau Tidung Kecil menjadi Eko Agro Mina Wisata

8. Destinasi wisata

1. Kurangnya amenitas wisata untuk meningkatkan nilai jual pariwisata
2. Masih terkendalanya investasi usaha pariwisata
3. Perlu peningkatan promosi pariwisata Kep. Seribu

Terkait dengan isu pariwisata maka diperlukan;

- a. Pengembangan Spot wisata di setiap Pulau Permukiman
- b. Pengembangan Object wisata Cagar Budaya

9. Tenaga Kerja

Tidak adanya lokasi dan bangunan untuk Pelatihan Tenaga Kerja. Oleh Karena itu maka diperlukan Pembangunan dan pembentukan Balai Latihan Kerja di kepulauan seribu

10. Olahraga

Kurangnya sarana dan prasarana olahraga. Oleh karena itu, maka diperlukan:

- a. Pembangunan GOR di pulau panjang dan pulau tidung kecil
- b. Pembangunan Floating Sports Tourism

Kebijakan Penanganan Dampak Ekonomi Covid-19

Pandemi Covid-19 menuntut Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk bergerak cepat dan responsif dalam melakukan tindakan pencegahan maupun penanggulangan. Ada tiga strategi utama yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yaitu, tes, lacak dan pembatasan gerak.

Sejak awal Januari 2021, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta konsisten menjalankan pemeriksaan *Polymerase Chain Reaction* (PCR) sebanyak 40.000 tes setiap pekannya. Angka ini empat kali lipat dari standar yang

ditetapkan WHO yaitu 1 tes untuk setiap 1.000 penduduk. Dengan populasi Jakarta yang berkisar 10 juta penduduk maka Jakarta diharuskan melakukan lebih dari 10.000 tes setiap pekannya. Sedangkan dalam strategi pelacakan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggunakan dua metode yaitu *active case finding* (ACF) dan *contact tracing* atau pelacakan fisik. Program ACF sudah dilaksanakan sejak pertengahan Mei 2020. Metode ini memungkinkan Pemprov untuk proaktif pada pusat-pusat keramaian seperti pasar dan gedung perkantoran. Ketika kasus

baru ditemukan, metode pelacakan fisik selanjutnya dilakukan untuk menelusuri kontak di lingkungan tempat tinggal, tempat beraktifitas dan tempat kerja dari pasien tersebut. Melalui kombinasi kedua metode tersebut, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berharap mampu menjelaskan sebaran kasus secara lebih rinci kepada masyarakat.

Strategi selanjutnya dalam menangani wabah Covid-19 oleh Pemprov DKI Jakarta adalah melalui pembatasan gerak.

Kebijakan pembatasan gerak di DKI Jakarta dilakukan melalui Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). PSBB Jakarta pertama kali dilakukan pada tanggal 10 April 2020. PSBB tersebut diperpanjang hingga tiga putaran dengan masing-masing putaran selama 14 hari. Pada tanggal 5 Juni 2020, Pemprov DKI Jakarta melonggarkan pembatasan menjadi PSBB transisi hingga lima putaran. Namun, pada pertengahan September, tepatnya tanggal 14 September 2020 kebijakan 'rem darurat' pengendalian wabah covid-19 dengan menerapkan PSBB kembali dilakukan. Ada 11 sektor essensial yang diperbolehkan beroperasi dengan kapasitas 25 persen diantaranya; sektor kesehatan, sektor bahan pangan, makanan, minuman, sektor energi, sektor komunikasi dan teknologi informasi, sektor keuangan, perbankan, sistem pembayaran, pasar modal, sektor logistik, sektor perhotelan, sektor kontruksi, sektor industri strategis, pelayanan dasar, utilitas publik dan industri

yang ditetapkan sebagai objek vital nasional dan objek tertentu serta kebutuhan sehari-hari.

Hingga awal tahun 2021, tepatnya tanggal 11-25 Januari 2021, Pemprov DKI Jakarta kembali menerapkan PSBB ketat seiring dengan kebijakan pemerintah pusat terkait Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) se Jawa – Bali yang dilatarbelakangi oleh peningkatan jumlah kasus Covid-19 pasca libur Natal dan Tahun Baru.

Pada tanggal 6-19 April 2021, Pemprov. DKI Jakarta menerapkan kebijakan PPKM Tahap V dengan kriteria zonasi atau tingkat resiko penularan Covid-19 pada tingkat lingkungan RT/RW. Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021, Pemprov. DKI Jakarta menerapkan PPKM Tahap VI yang berlaku pada tanggal 20 April-3 Mei 2021.

Selanjutnya berdasarkan Surat Edaran Ketua Satgas Penanganan Covid-19 Nomor 13 Tahun 2021, Pemprov. DKI Jakarta menerapkan kebijakan PPKM Mikro Tahap VII pada tanggal 4-17 Mei 2021, guna menekan mobilitas penduduk saat mudik lebaran. Kemudian Pemprov DKI Jakarta memperpanjang pemberlakuan PPKM Mikro hingga 31 Mei 2021 dan di awal bulan Juni Pemprov DKI Jakarta melakukan perpanjangan pemberlakuan PPKM Mikro hingga 14 Juni 2021. Pada tanggal 21 Juli 2021 Pemprov DKI Jakarta kembali memperpanjang PPKM level 4 hingga 25 Juli 2021.

GAMBAR 4.2

PPKM DKI Jakarta



Sumber: [instagram.com/DKIJakarta](https://www.instagram.com/DKIJakarta)

Berbagai langkah antisipasi telah dilakukan oleh Pemprov DKI sejak Januari 2020, di antaranya:

1. Instruksi Gubernur Nomor 16 Tahun 2020 tentang penanganan Covid-19;
2. Pemprov DKI Jakarta membentuk Tim Tanggap Covid-19 melalui Keputusan Gubernur No.291/2020 terkait Pengukuhan Tim Tanggap Covid-19 DKI Jakarta;
3. Meningkatkan Kewaspadaan Terhadap Risiko Penularan Infeksi Covid-19 kepada Para Kepala Sekolah Satuan Pendidikan Kerja Sama dan Para Kepala Sekolah Perwakilan Negara Asing melalui Surat Edaran Disdik Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Peningkatan Kewaspadaan Terhadap Risiko Penularan Infeksi Covid-19 kepada Para Kepala Sekolah Satuan Pendidikan Kerja Sama dan Para Kepala Sekolah Perwakilan Negara Asing;
4. Melakukan pengkajian ulang dan pembatasan izin keramaian;
5. Berkoordinasi dengan Polda Metro Jaya dalam memastikan ketersediaan masker di Ibu Kota;
6. Menutup sementara layanan perizinan yang melibatkan banyak orang;
7. Meluncurkan situs web resmi Covid-19 (corona.jakarta.go.id);
8. Mengalokasikan Rp 54 Miliar untuk kegiatan pencegahan penularan Covid-19 dengan payung hukum Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang pengalokasian anggaran BTT sebesar 54 miliar rupiah melalui Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta untuk penanganan dan pencegahan penularan Covid-19 pada 10 Maret 2020;
9. Imbauan melakukan isolasi diri bagi tenaga kerja di lingkungan Pemprov DKI Jakarta tanpa pemotongan Gaji dan TKD;
10. Membentuk tim review perizinan atas kegiatan publik yang akan dilakukan di Ibu Kota;
11. Pelaksanaan *Car Free Day*/HBKB ditiadakan melalui payung hukum Surat Edaran nomor 184/SE/2020 tentang Perpanjangan Penutupan Sementara Kegiatan Operasional Industri Pariwisata Dalam Upaya Kewaspadaan Terhadap Penularan Infeksi Covid-19;
12. Melakukan Kegiatan Pembelajaran di Rumah Selama Pelaksanaan Ujian Sekolah dan/atau Ujian Nasional dengan payung hukum berupa Surat Edaran Disdik No. 26 Tahun 2020 (26/SE/2020) Terkait Pembelajaran Di Rumah Selama Pelaksanaan Ujian Sekolah dan/atau Ujian Nasional;
13. Menutup Sementara Layanan Gedung Perpustakaan Umum;
14. Menutup Sementara Fasilitas Taman dan Hutan Kota di Wilayah DKI Jakarta (Surat Edaran Distama No. 04 Tahun 2020);
15. Memodifikasi pelayanan transportasi umum massal di antaranya Transjakarta, Moda Raya Terpadu/*Mass Rapid Transit* (MRT) Jakarta, dan Lintas Raya Terpadu/*Light Rapid Transit* (LRT) Jakarta (Surat Edaran Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta Nomor 10/SE/2020 Tahun 2020 tentang Peningkatan Kewaspadaan Terhadap Resiko Penularan Infeksi Covid-19 Pada Angkutan Umum di Wilayah Provinsi DKI Jakarta dan Siaran Pers No. 1121 - Dorong Social Distancing, Pemprov DKI Modifikasi Transportasi Umum Massal Jakarta);
16. Penetapan Rumah Sakit Rujukan Kasus Coronavirus Disease (Covid-19) di Provinsi DKI Jakarta (Surat Keputusan Dinas Kesehatan 275 tahun 2020);
17. Memberikan insentif bagi tenaga kesehatan di Jakarta sebesar Rp215.000 per orang/hari. (Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Pemberian Insentif Kepada Tenaga Kesehatan Dan Tenaga Penunjang Kesehatan Dalam Penanggulangan Bencana Wabah Covid-19;
18. Menyesuaikan sistem kerja pegawai di lingkungan Pemprov DKI Jakarta (*Work From Home*) - Surat Edaran Gubernur Nomor 2/SE/2020 Tentang Penyesuaian

Sistem Kerja Pegawai Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid19 Di Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;

19. Menyediakan 15 program pendukung kegiatan belajar dari rumah bagi siswa secara gratis (Surat Edaran Kepala Dinas Pendidikan No. 33/ 2020 tentang Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ)/ Home Learning Bermakna dan Menyenangkan dan Siaran Pers No. 1123 - Dukung Pembelajaran Dari Rumah, Disdik DKI Jakarta Berkolaborasi dengan Komunitas Penggerak Pendidikan);
20. Membuka Hotline 24 Jam terkait kewaspadaan Covid-19 (Surat Edaran Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta Nomor 48 Tahun 2020 Tentang Hotline 24 Jam Tanggap Covid-19 Suku Dinas Kesehatan Dan Puskesmas Kecamatan DKI Jakarta);
21. Imbauan melakukan *Social Distancing Measure* di Ibu Kota (Seruan Gubernur Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Menjaga Jarak Aman Antar Warga Dalam Bermasyarakat (*Social Distancing Measure*) Dalam Rangka Antisipasi dan Pencegahan Penularan Covid-19 di Provinsi DKI Jakarta dan Ingub 23 Tahun 2020 Tentang Optimalisasi Antisipasi dan Pencegahan Penularan Covid-19 dengan Menjaga Jarak Aman Antar Warga Dalam Bermasyarakat (*Social Distancing Measure*) di Lingkungan Masyarakat);
22. Mengimbau penundaan sementara seluruh kegiatan peribadatan keagamaan di rumah ibadah;
23. Imbauan teknis antisipasi dan pencegahan penyebaran Covid-19 pada area pusat perbelanjaan, supermarket, minimarket, dan pasar di wilayah Provinsi DKI Jakarta;
24. Menetapkan tanggap darurat bencana wabah Covid-19 selama 14 hari (20 Maret - 02 April 2020) - Keputusan Gubernur Nomor 337 Tahun 2020 Tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Wabah Covid 19 di Wilayah Provinsi DKI Jakarta;
25. Menetapkan Standar Operasional Prosedur Pelayanan Pengangkutan dan Pemakaman Jenazah Covid-19 yang berasal dari rumah sakit maupun dari rumah warga di lingkup Provinsi DKI Jakarta;
26. Melakukan disinfeksi di lima (5) wilayah Kota Administrasi;
27. Pembatasan Transportasi Umum Berlaku Mulai Senin, 23 Maret 2020 untuk Transjakarta, MRT, LRT, dan KRL;
28. Mendistribusikan 40.000 APD dari BNPB untuk tenaga medis;
29. Melaksanakan pengawasan dan penindakan terhadap penutupan sementara kegiatan operasional industri pariwisata dalam upaya kewaspadaan terhadap penularan Covid-19;
30. Mengimbau pembatasan jam operasional untuk menghambat penyebaran Covid-19 pada area perdagangan di wilayah Provinsi DKI Jakarta;
31. Melakukan pendataan warga dengan profil berisiko tinggi terpapar virus corona (Covid-19) sebagai upaya pencegahan penularan di masyarakat;
32. Pemprov DKI Jakarta membuka layanan belanja kebutuhan pokok secara daring bekerjasama dengan Aplikasi Ojek Daring, Perumda Pasar Jaya, dan 50 Pasar Tradisional;
33. Menetapkan pembatasan penggunaan moda transportasi untuk mengurangi pergerakan orang dari dan ke wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi selama masa pandemi Covid-19;
34. Pemprov DKI Jakarta menambah alokasi anggaran belanja tidak terduga hingga 3,032 triliun untuk penanganan Covid-19;
35. Prioritas Pelaksanaan Pelayanan Layanan Kesehatan di Puskesmas Kecamatan dan Puskesmas Kelurahan dalam Rangka Tanggap Covid-19;
36. Pemprov DKI Jakarta telah membuat sebuah pedoman RT/RW dalam menangani Covid-19;

37. Perumda Pasar Jaya menunda pembukaan pasar di kawasan Tanah Abang yang sudah mulai ditutup sementara sejak 27 Maret;
38. Pemprov DKI Jakarta melalui Disnakertrans Energi memperpanjang pelaksanaan WFH hingga 19 April 2020. Berlaku untuk beberapa perusahaan di seluruh DKI Jakarta;
39. Pemprov DKI Jakarta mengumumkan Pembatasan Sosial Berskala Besar yang akan diterapkan di wilayahnya. Setelah menggelar rapat koordinasi dengan Forkopimda;
40. Pemprov DKI Jakarta siapkan bansos untuk warga miskin dan rentan miskin di Jakarta;
41. Pemprov DKI Jakarta melakukan koordinasi lintas wilayah jelang penerapan PSBB di Kawasan Episenter Covid-19;
42. Rekrutmen Relawan Tenaga Kesehatan, Tenaga Penunjang Kesehatan dan Tenaga Penunjang Lainnya Dalam Rangka Penanganan Covid-19 Di Lingkungan Pemprov DKI Jakarta;
43. Menetapkan Pembatasan Operasional Kapal di perairan Provinsi DKI Jakarta pada masa status Darurat Bencana Wabah Covid-19;
44. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang meminta pemerintah pusat untuk mempercepat pencairan Dana Bagi Hasil (DBH);
45. Penutupan sementara layanan bus AKAP menyusul kebijakan larangan mudik dari pemerintah;
46. Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non-Fisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2020 untuk Kegiatan; Pencegahan dan/atau Penanganan Covid-19;
47. Prosedur Mutu Proses Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk Pendanaan Percepatan Penanganan Covid-19;
48. Pemprov DKI Jakarta Luncurkan Program Kolaborasi Sosial Berskala Besar (KSBB);
49. Jaringan Kolaborasi Pembangunan Jakarta (*Jakarta Development Collaboration Network*);
50. Program Pemberian Insentif UMKM; dan
51. Rekrutmen 1,545 *contact tracer* deteksi Covid-19.
52. Nilai Anggaran Penanganan COVID-19 di Jakarta Pada APBD Perubahan 2020.
53. Gubernur Anies Siapkan Tenda dan Perahu Khusus untuk Korban Banjir Positif COVID-19.
54. DKI Jakarta Programkan Pemberian Insentif UMKM.
55. DKI Jakarta Prioritaskan Vaksin COVID-19 untuk Tenaga Kesehatan.
56. DKI Jakarta Anggarkan Rp254 M untuk Makam Korban COVID-19.
57. Perpanjangan PSBB Transisi DKI Jakarta.
58. Pemprov DKI Jakarta Izinkan Pesta Pernikahan di Rumah dan Gedung.
59. Disnaker DKI Bakal Tolak Penundaan Kenaikan UMP Perusahaan Langgar Protokol Kesehatan.
60. Anies Segera Teken Perda COVID-19, Target Berlaku Pekan Depan.
61. DKI Jakarta Terbitkan Protokol Kesehatan Pembelajaran Tatap Muka di Sekolah.
62. Aturan Protokol Kesehatan Saat Resepsi Pernikahan yang Wajib Dipatuhi.
63. Gubernur Anies Ancam Pelanggar PSBB Didenda Progresif Rp150 Juta jika Kembali Berulah.
64. Antisipasi Libur Akhir Tahun dengan Seruan Gubernur No 17 Tahun 2020 tentang Pengendalian Kegiatan Masyarakat dan Instruksi Gubernur DKI Jakarta No. 64 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan Masyarakat dalam Pencegahan COVID-19 di Masa Libur Hari Raya Natal 2020 dan Tahun Baru 2021.
65. Pemprov DKI Luncurkan Program KSBB Bidang UMKM.
66. Pemprov DKI memberikan relaksasi pajak penghasilan (PPh) pasal 21, 22, 25 dan restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
67. Pemprov DKI Jakarta perpanjang PSBB Transisi DKI Jakarta hingga 21 Desember

- 2020.
68. Rapid Tes Antigen Sebagai Syarat Keluar Masuk Jakarta.
 69. Pemprov DKI Jakarta perpanjang PSBB Transisi DKI Jakarta hingga 3 Januari 2020.
 70. Wisma Atlet mulai tidak menerima pasien COVID-19 tanpa gejala.
 71. Pemprov DKI Jakarta beri diskon 50 persen Pajak Kendaraan Bermotor.
 72. Pemprov DKI Jakarta perpanjang PSBB Transisi hingga 17 Januari 2021
 73. Pemprov DKI Jakarta perketat PSBB selama 11-25 Januari 2021.
 74. Pemprov DKI Jakarta perpanjang PSBB hingga 8 Februari 2021.
 75. Pedagang pasar akan divaksinasi COVID-19 setelah tenaga kesehatan.
 76. Gedung Dinas Pendidikan DKI Jakarta dikaji untuk isolasi ibu hamil.
 77. BPOM izinkan vaksin Sinovac untuk lansia.
 78. Masyarakat umum akan terima SMS undangan vaksin.
 79. Dinas Kesehatan DKI Jakarta gelar vaksinasi COVID-19 bagi tenaga kesehatan secara massif.
 80. Pemprov DKI Jakarta perpanjang PPKM Mikro hingga 22 Februari 2021.
 81. Pemprov DKI Jakarta mulai menyipakan sejumlah lokasi untuk penyuntikan vaksin.
 82. Babinsa dan Bhabinkamtibmas bakal membantu petugas melacak kasus positif COVID-19 hingga tingkat RT di Jakarta.
 83. Warga daerah PPKM jadi prioritas vaksinasi COVID-19 dengan sistem klaster.
 84. Vaksinasi COVID-19 bagi wartawan awal Maret.
 85. Pedagang Pasar Tanah Abang disuntik vaksin COVID-19.
 86. Vaksinasi lansia di Jakarta dimulai.
 87. DKI Jakarta gunakan vaksin COVID-19 dari Bio Farma untuk vaksinasi Tahap II.
 88. Menkes: Lebih dari 5.000 aparat TNU-Polri siap jadi tracer COVID-19.
 89. Pemprov DKI Jakarta terapkan sistem mobile untuk percepat vaksinasi COVID-19.
 90. Satgas COVID-19 gandeng KLHK garap kebijakan pengolahan limbah medis.
 91. Pemprov DKI Jakarta perpanjang PPKM Mikro hingga 8 Maret 2021.
 92. Sebanyak 650 tenaga pendidik di Jakarta jalani vaksinasi COVID-19
 93. Sebanyak 5.500 jurnalis mulai disuntik vaksin COVID-19 di Gelora Bung Karno.
 94. Vaksinasi COVID-19 untuk atlet mulai berlangsung.
 95. Pemprov DKI Jakarta gandeng RS swasta laksanakan vaksinasi Tahap II.
 96. Vaksinasi ASN di Jakarta.
 97. Pemprov DKI Jakarta menambah 10 rumah sakit untuk lokasi vaksinasi COVID-19.
 98. BPOM izinkan penggunaan vaksin AstraZeneca.
 99. Pemprov DKI Jakarta memantapkan kesiapan dibukanya kembali tempat usaha karaoke.
 100. Pembukaan kembali Taman Margasatwa Ragunan.
 101. Jakarta Sasar 3 juta orang menerima vaksin COVID-19.
 102. Tempat bermain anak diizinkan beroperasi dengan syarat.
 103. 4 taman kota di Jakarta Pusat mulai dibuka.
 104. Wagub DKI Jakarta ajak warga kolaborasi tingkatkan ketahanan pangan.
 105. Pemprov DKI Jakarta perpanjang PPKM Skala Mikro.
 106. Sebanyak 1.819 pedagang binaan di Jakarta Utara akan divaksinasi.
 107. Sebanyak 26.624 guru divaksin COVID-19 di Jakarta.
 108. Sebanyak 52% lansia DKI Jakarta telah divaksin.
 109. Pemprov DKI Jakarta perpanjang PPKM Mikro hingga 19 April 2021.
 110. Penambahan kuota vaksin kepada wartawan.
 111. Dinas Pendidikan Pemprov DKI Jakarta melakukan uji coba pembelajaran tatap muka tahap I.
 112. Melaksanakan serangkaian kegiatan keagamaan selama Ramadan hingga kegiatan buka puasa bersama.
 113. Memperpanjang jam operasional restoran.
 114. Dinkes DKI Jakarta buka vaksinasi COVID-19 untuk guru di fasilitas kesehatan.

115. Koordinasi dan kerja sama dengan Pemerintah Pusat terkait kebijakan larangan mudik.
116. Pembatasan jam masuk warga di zona merah.
117. Memberlakukan Surat Izin Keluar Masuk (SIKM) pada 6 sampai 17 Mei 2021.
118. Memberlakukan sistem buka tutup di Pasar Tanah Abang.
119. Pemprov DKI Jakarta perpanjang pemberlakuan PPKM Mikro hingga 17 Mei 2021.
120. Pemprov DKI Jakarta perpanjang pemberlakuan PPKM Mikro hingga 31 Mei 2021.
121. Vaksinasi bagi masyarakat berusia 50 tahun ke atas.
122. Pemprov DKI Jakarta perpanjang pemberlakuan PPKM Mikro hingga 14 Juni 2021.
123. Layanan vaksinasi COVID-19 yang akan menyasar pedagang kaki lima (PKL) hingga pedagang pasar dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
124. Pemprov DKI Jakarta telah menambah 33 tempat isolasi dalam rangka penanganan pasien COVID-19.
125. Pemprov DKI Jakarta izinkan WNA melakukan vaksin COVID-19.
126. Pemprov DKI Jakarta siapkan 28 lokasi isolasi pasien COVID-19 baru, siap tampung 6.534 orang.
127. Pemprov DKI Jakarta tengah memaksimalkan Rusun Nagrak sebagai tempat isolasi bagi Pasien tanpa gejala COVID-19.
128. Pemprov DKI Jakarta secara bertahap meningkatkan kapasitas rumah sakit di Jakarta. Dari 140 rumah sakit rujukan COVID-19 di Jakarta, 13 di antaranya merupakan RSUD milik Pemprov DKI Jakarta yang sudah 100 persen menangani pasien COVID-19.
129. Pemprov DKI Jakarta fungsikan bus sekolah sebagai bantuan kendaraan angkut pasien Corona tanpa gejala. Bus ini membantu ambulans yang dikhususkan bagi pasien gejala sedang dan berat.
130. Pemprov DKI Jakarta mempersiapkan Skenario Antisipasi jika 100 Ribu Warga DKI Terpapar COVID-19.
131. Pemprov DKI Jakarta meminta penjualan hewan kurban Idul Adha tahun ini dilakukan secara online, sesuai Instruksi Gubernur DKI Jakarta No. 43 Tahun 2021.
132. Pemprov DKI tengah menyiapkan wisma-wisma kecil untuk dijadikan tempat perawatan pasien COVID-19.
133. Pemprov DKI Jakarta tambah jumlah petugas penggali kubur dan pengangkut jenazah di TPU.
134. Pemprov DKI Jakarta memperpanjang rekrutmen tenaga profesional pengendalian COVID-19 atau Jakarta Memanggil hingga 15 Juli 2021.
135. Pemprov DKI Jakarta mempersiapkan JIExpo Kemayoran sebagai tempat isolasi darurat covid-19.
136. BPBD Provinsi DKI Jakarta bersama Satpol PP Provinsi DKI Jakarta bentuk posko pemulasaran jenazah di Monas.
137. Seluruh kantor Wali Kota di wilayah DKI Jakarta difungsikan sebagai tempat isolasi pasien COVID-19.
138. Pemprov DKI Jakarta fungsikan kantor Unit Pengelola Angkutan Sekolah (UPAS) Dinas Perhubungan DKI Jakarta di Jalan Raya Pondok Gede, Kramatjati, Jakarta Timur sebagai tempat isolasi.
139. Pemprov DKI Jakarta bersama stakeholder melakukan uji coba mobil vaksinasi keliling.
140. DKI Jakarta sediakan fasilitas peti jenazah gratis untuk jenazah pasien COVID-19.
141. Pemprov DKI Jakarta berencana melakukan refocusing APBD DKI Jakarta Tahun Anggaran 2021 untuk penanganan COVID-19 selama PPKM Darurat.
142. Pemprov DKI Jakarta Memastikan tidak ada pemangkasan pos anggaran TKD PNS untuk penanganan COVID-19.
143. Penerbitan kebijakan STRP bagi pekerja sektor esensial, pekerja sektor kritikal, dan perorangan dengan kebutuhan mendesak.
144. Vaksinasi di DKI Jakarta tidak dibatasi zona.
145. Pemprov DKI Berencana menambah 1000 tempat tidur dan Bangun RSD baru untuk pasien COVID-19.
146. 74 juta warga Jakarta sudah vaksinasi COVID-19.

147. Pemprov DKI Siapkan 26.000 tempat isolasi hadapi kemungkinan terburuk pandemi COVID-19.
148. Pemprov DKI Jakarta targetkan 13 juta anak divaksin COVID-19.
149. Pemprov DKI Jakarta menyiapkan anggaran hingga Rp640 miliar khusus untuk BST yang mulai dicairkan pada 19 Juli.
150. Pemprov DKI Jakarta siapkan rumah dinas untuk isolasi.
151. Pemprov DKI Jakarta bakal bangun tempat kremasi khusus korban COVID-19.
152. Pemprov DKI Jakarta memperpanjang PPKM Level 4 Hingga 25 Juli 2021.
153. Pemprov DKI Jakarta pastikan STRP diperpanjang otomatis.
154. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengusulkan revisi terhadap Perda No. 2 Tahun 2020 tentang penanggulangan COVID-19 kepada DPRD DKI Jakarta dalam Rapat Paripurna.

Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah

Pada bab ini dijelaskan mengenai Rencana Kerja dan Pendaan yang berisi program dan kegiatan serta pagu indikatif, yang dirancang untuk mendukung terwujudnya capaian rencana strategis untuk mendukung prioritas

pembangunan daerah, prioritas perangkat daerah maupun untuk pemenuhan pelayanan perangkat daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah.

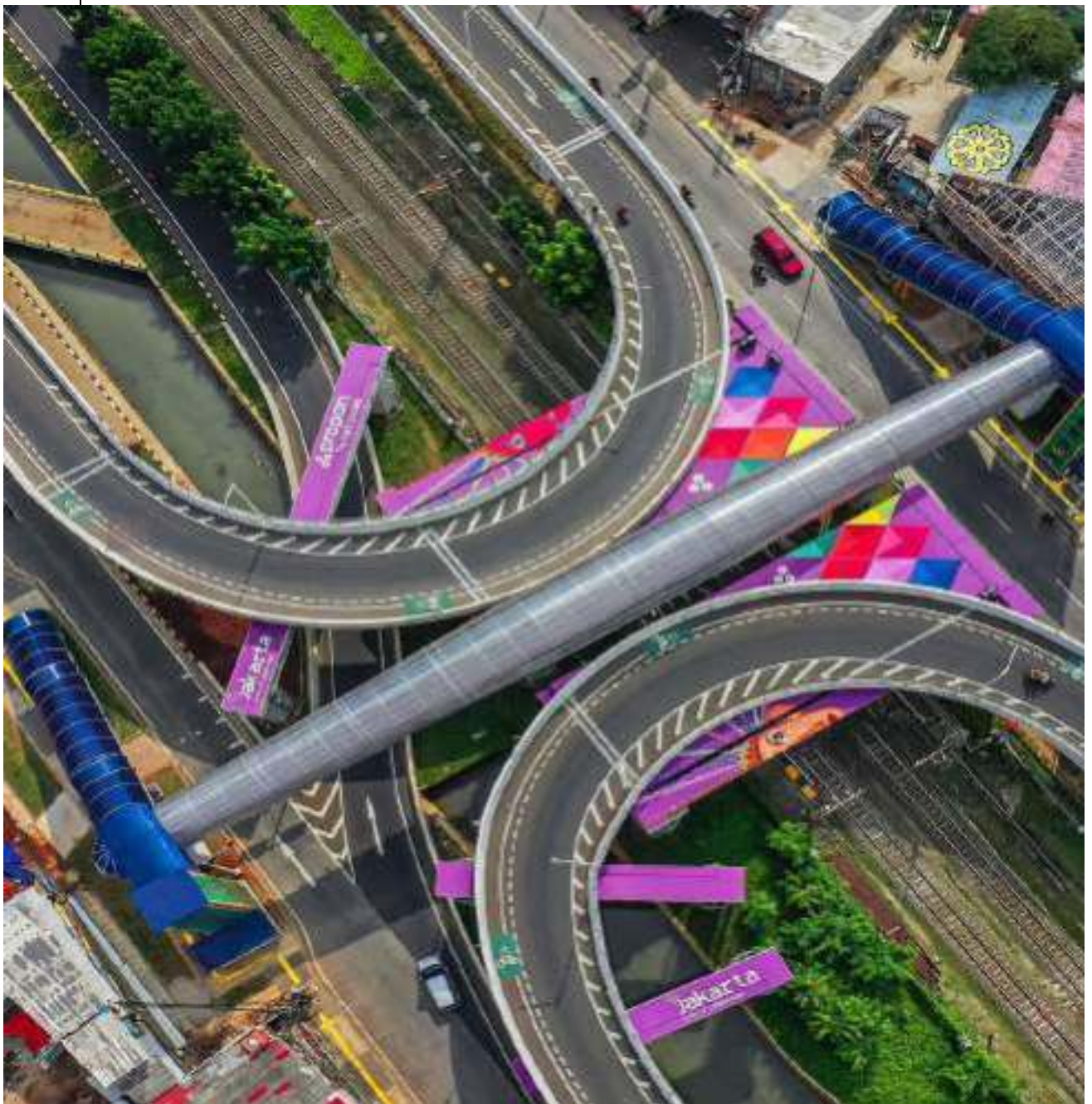


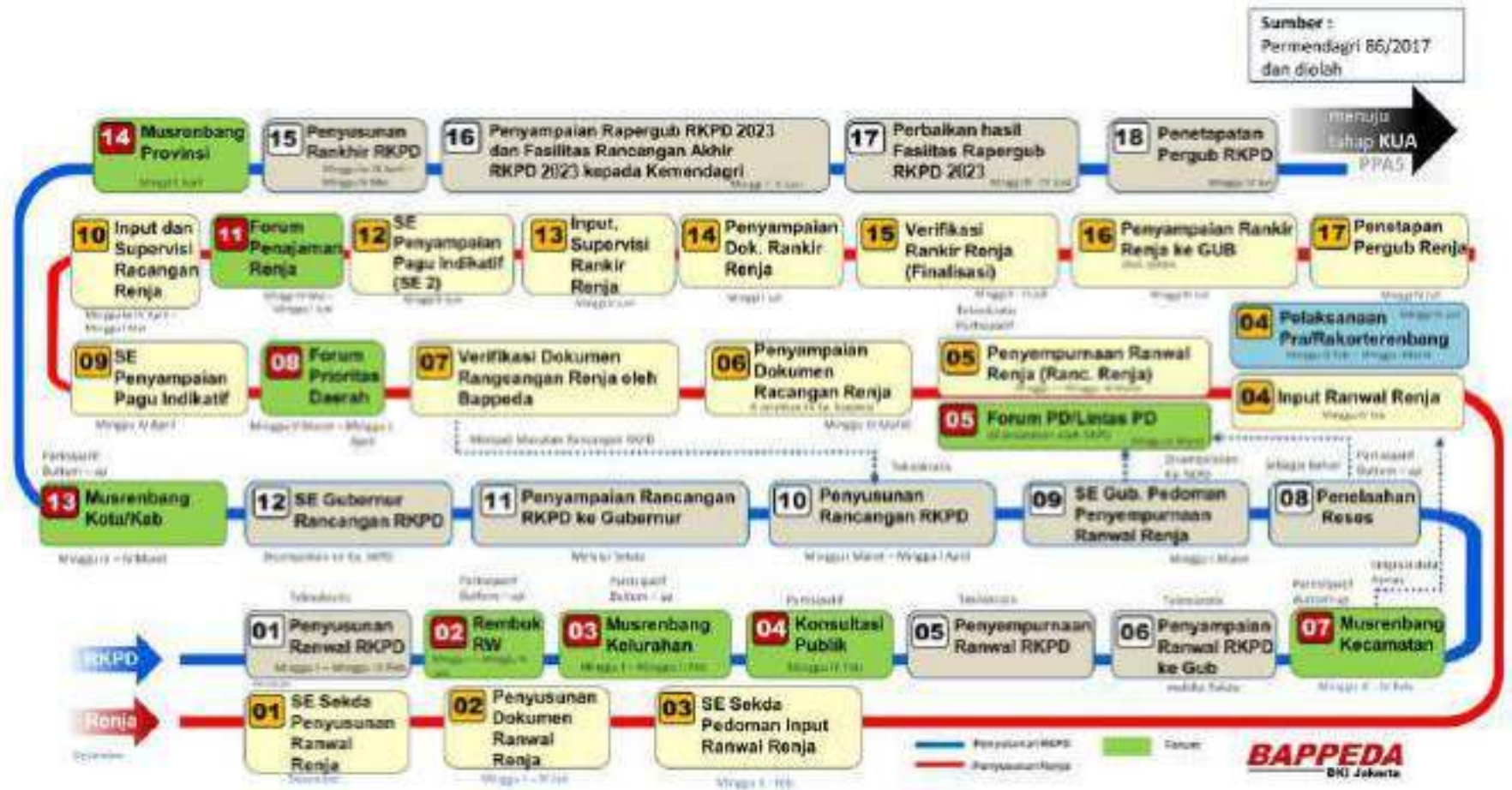
Foto: @omroy02_

Rencana kerja dan pendanaan daerah tahun 2023 disusun dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah termasuk pemenuhan pelayanan dasar kepada masyarakat. Rencana kerja Provinsi DKI Jakarta tahun 2023 disusun berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026 untuk menjaga keselarasan antara program, kegiatan serta sasaran dan prioritas pembangunan daerah, dan mengacu pada rancangan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 yang bertujuan menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, sasaran prakiraan maju. Dengan tema pembangunan Jakarta tahun 2023 yaitu **Pemulihan dan Transformasi Menuju Ekonomi Digital dalam Rangka Pemantapan Kota Global yang Berdaya Saing**.

Penyusunan dokumen RKPD di Provinsi DKI Jakarta melalui proses yang panjang, di mulai dari Rembuk RW hingga dokumen tersebut disahkan menjadi Peraturan Kepala Daerah. Selanjutnya Rencana Kerja disusun melalui sistem *smart planning & budgetting* sesuai tahapan proses perencanaan sebagaimana Gambar 1 terlampir. Dalam menyusun rencana kerja, selain memperhatikan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026 dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 serta arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional, Renja juga disusun dengan mempertimbangkan pula aspirasi masyarakat yang diperoleh melalui proses Musrenbang yang dimulai dari Rembuk RW, sebagai implementasi pendekatan bawah-atas (*bottom-up*).

GAMBAR 5.1

Mekanisme dan Jadwal Penyusunan RKPD 2023



Sumber: Peraturan Menteri Dalam Negeri 86/2017, diolah

5.1

Aspirasi Masyarakat Melalui Musrenbang

Masukan usulan kegiatan hasil Rembuk RW yang telah divalidasi secara berjenjang menghasilkan usulan masyarakat yang dapat diakomodir menjadi kegiatan di dalam Rencana Kerja SKPD/UKPD pada RKPD tahun 2023. Secara umum, aspirasi masyarakat melalui mekanisme Rembuk RW menggunakan standardisasi (*template*) kegiatan yang melalui Rembuk RW di 2.719 RW.

Dalam pelaksanaannya, aspirasi masyarakat melalui mekanisme Rembuk RW dalam bentuk usulan Rembuk RW telah melalui proses verifikasi dan validasi secara berjenjang melalui fase Rembuk RW, Musrenbang Kelurahan, Musrenbang Kecamatan dan Musrenbang Kota/Kabupaten. Detil hasil proses verifikasi dan validasi dapat dilihat pada tabel berikut.

TABEL 5.1

Rekapitulasi Usulan Awal dan Fase rembuk RW Tahun 2023

No.	Wilayah	Jumlah RW	Sudah Input	% Input	Total Usulan	Total Anggaran
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
1	Jakarta Pusat	383	383	100%	4.549	Rp 1.012.355.579.090
2	Jakarta Utara	449	449	100%	5.618	Rp 1.976.742.576.654
3	Jakarta Barat	580	580	100%	6.985	Rp 2.147.748.951.790
4	Jakarta Selatan	576	576	100%	9.353	Rp 3.122.846.310.611
5	Jakarta Timur	707	707	100%	11.021	Rp 2.659.361.833.827
6	Kep. Seribu	24	24	100%	166	Rp 1.442.840.448.237
Total		2.719	2.719	100%	37.692	Rp 12.361.895.700.208

Total usulan Aspirasi Masyarakat (Asmas) pada Fase rembuk RW sebanyak 37.692 usulan dengan total anggaran sebesar 12,36 triliun rupiah. Pada fase ini, usulan Asmas terbanyak berasal dari Jakarta Timur dengan jumlah Asmas sebanyak 11.021 usulan dengan jumlah usulan anggaran sekitar 2,6 triliun rupiah. Sedangkan Asmas paling sedikit berasal dari

Kepulauan Seribu dengan jumlah Asmas sebanyak 166 usulan dengan jumlah usulan anggaran sebesar 1,4 triliun rupiah. Namun demikian, jika dilihat dari usulan anggaran terbesar berasal dari Jakarta Selatan dengan jumlah usulan anggaran 3,1 triliun rupiah untuk 9.353 usulan Asmas.

TABEL 5.2 Rekapitulasi Usulan Fase Musrenbang Kelurahan Tahun 2023

No.	Wilayah	Jml Kel.	Total Usulan	Total Anggaran	Update	Baru	Fisik	Menunggu		Teruskan 2023		Sudah Terakomodir		Tolak	
								Jml	Rp	Jml	Rp	Jml	Rp	Jml	Rp
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]	[15]	[16]
1	Jakarta Pusat	44	4.549	Rp1.012.355.579.090	4.549	191	2.300	-	-	3.612	Rp808.169.187.880	620	Rp113.960.194.220	317	Rp90.226.196.990
2	Jakarta Utara	31	5.618	Rp1.976.742.576.654	5.618	39	3.862	-	-	5.168	Rp1.757.695.170.564	176	Rp67.245.541.147	274	Rp151.801.864.942
3	Jakarta Barat	56	6.985	Rp2.147.748.951.790	6.985	75	4.364	-	-	5.781	Rp1.774.488.623.088	534	Rp203.094.227.669	670	Rp170.166.101.033
4	Jakarta Selatan	65	9.353	Rp3.122.846.310.611	9.353	148	6.309	-	-	7.504	Rp2.591.162.643.790	567	Rp170.546.766.915	1.282	Rp361.136.899.906
5	Jakarta Timur	65	11.021	Rp2.659.361.833.827	11.021	130	7.389	-	-	7.380	Rp1.738.184.831.321	2.579	Rp677.055.710.932	1.062	Rp244.121.291.573
6	Kep. Seribu	6	166	Rp1.442.840.448.237	166	-	123	-	-	136	Rp1.415.727.138.673	21	Rp23.802.939.821	9	Rp3.310.369.743
Total		267	37.692	Rp12.361.895.700.208	37.692	583	24.347	-	-	29.581	Rp10.085.427.595.316	4.497	Rp1.255.705.380.704	3.614	Rp1.020.762.724.187

TABEL 5.3 Rekapitulasi Usulan Fase Musrenbang Kecamatan Tahun 2023

No.	Wilayah	Jml Kel.	Total Usulan	Total Anggaran	Update	Baru	Fisik	Menunggu		Teruskan 2023		Sudah Terakomodir		Tolak	
								Jml	Rp	Jml	Rp	Jml	Rp	Jml	Rp
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]	[15]	[16]
1	Jakarta Pusat	44	4.549	Rp1.012.355.579.090	4.549	191	2.300	-	-	3.612	Rp808.169.187.880	620	Rp113.960.194.220	317	Rp90.226.196.990
2	Jakarta Utara	31	5.618	Rp1.976.742.576.654	5.618	39	3.862	-	-	5.168	Rp1.757.695.170.564	176	Rp67.245.541.147	274	Rp151.801.864.942
3	Jakarta Barat	56	6.985	Rp2.147.748.951.790	6.985	75	4.364	-	-	5.781	Rp1.774.488.623.088	534	Rp203.094.227.669	670	Rp170.166.101.033
4	Jakarta Selatan	65	9.353	Rp3.122.846.310.611	9.353	148	6.309	-	-	7.504	Rp2.591.162.643.790	567	Rp170.546.766.915	1.282	Rp361.136.899.906
5	Jakarta Timur	65	11.021	Rp2.659.361.833.827	11.021	130	7.389	-	-	7.380	Rp1.738.184.831.321	2.579	Rp677.055.710.932	1.062	Rp244.121.291.573
6	Kep. Seribu	6	166	Rp1.442.840.448.237	166	-	123	-	-	136	Rp1.415.727.138.673	21	Rp23.802.939.821	9	Rp3.310.369.743
Total		267	37.692	Rp12.361.895.700.208	37.692	583	24.347	-	-	29.581	Rp10.085.427.595.316	4.497	Rp1.255.705.380.704	3.614	Rp1.020.762.724.187

5.2 Penelaahan Hasil Reses

Penelaahan Hasil Reses Kesatu, Kedua, dan Ketiga Tahun 2021

Hasil penelaahan terhadap permasalahan yang terdapat dalam Rekomendasi Hasil Reses Kesatu, Kedua dan Ketiga DPRD Provinsi DKI

Jakarta Tahun 2021 dapat dijabarkan sebagai berikut.

TABEL 5.4

Rekapitulasi Hasil Reses DPRD Tahun 2021 Menurut Wilayah

No.	Wilayah	Saran			Tanggapan			Usulan Kegiatan			Total
		I	II	III	I	II	III	I	II	III	
1	Jakarta Barat	90	96	51	271	403	296	572	804	563	3.146
2	Jakarta Pusat	67	149	45	208	210	64	438	524	386	2.091
3	Jakarta Selatan	62	102	28	216	244	116	997	940	449	3.154
4	Jakarta Timur	184	393	179	602	469	257	1.836	1.655	1.344	6.919
5	Jakarta Utara	74	88	71	297	231	233	562	478	394	2.428
6	Kab.Adm.Kep.Seribu	8	15	4	15	7	6	48	46	24	173
Total		485	843	378	1.609	1.564	972	4.453	4.447	3.160	17.911

Sumber: Laporan Penelaahan Tahap I & II atas Hasil Reses DPRD Tahun 2021

Reses Kesatu Tahun 2021

Reses Kesatu Tahun 2021 menghasilkan 6.547 pokok pikiran DPRD yang terdiri dari 485 saran, 1.609 tanggapan, dan 4.453 usulan kegiatan.

Berikut adalah tabel rekapitulasi hasil reses DPRD periode I tahun 2021 menurut wilayah Kotamadya/Kabupaten.

TABEL 5.5

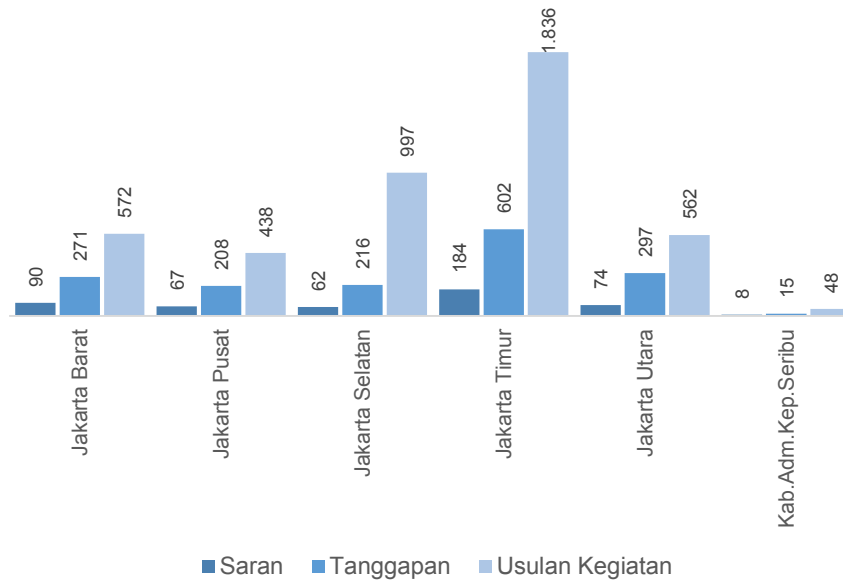
Rekapitulasi Hasil Reses DPRD Periode I Tahun 2021 Menurut Wilayah

No.	Wilayah	Saran	Tanggapan	Usulan Kegiatan
1	Jakarta Barat	90	271	572
2	Jakarta Pusat	67	208	438
3	Jakarta Selatan	62	216	997
4	Jakarta Timur	184	602	1.836
5	Jakarta Utara	74	297	562
6	Kab.Adm.Kep.Seribu	8	15	48
Total		485	1.609	4.453

Sumber: Laporan Penelaahan Tahap I & II atas Hasil Reses DPRD Tahun 2021

GAMBAR 5.2

Kompilasi Hasil Reses DPRD Periode I Tahun 2021 Menurut Wilayah



Sumber: Laporan Penelaahan Tahap I & II atas Hasil Reses DPRD Tahun 2021

Reses Kedua Tahun 2021

Reses Kedua Tahun 2021 menghasilkan 6.854 pokok pikiran DPRD yang terdiri dari 843 saran, 1.564 tanggapan, dan 4.447 usulan kegiatan.

Berikut adalah tabel rekapitulasi hasil reses DPRD periode II tahun 2021 menurut wilayah Kotamadya/Kabupaten.

TABEL 5.6

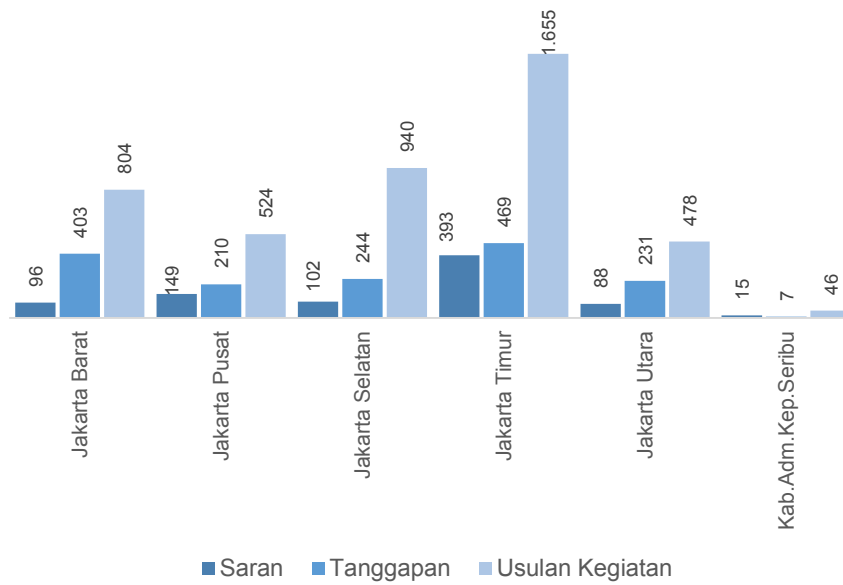
Rekapitulasi Hasil Reses DPRD Periode II Tahun 2021 Menurut Wilayah

No.	Wilayah	Saran	Tanggapan	Usulan Kegiatan
1	Jakarta Barat	96	403	804
2	Jakarta Pusat	149	210	524
3	Jakarta Selatan	102	244	940
4	Jakarta Timur	393	469	1.655
5	Jakarta Utara	88	231	478
6	Kab. Adm. Kep. Seribu	15	7	46
Total		843	1.564	4.447

Sumber: Laporan Penelaahan Tahap I & II atas Hasil Reses DPRD Tahun 2021

GAMBAR 5.3

Kompilasi Hasil Reses DPRD Periode II Tahun 2021 Menurut Wilayah



Sumber: Laporan Penelaahan Tahap I & II atas Hasil Reses DPRD Tahun 2021

Reses Ketiga Tahun 2021

Reses Ketiga Tahun 2021 menghasilkan 4.510 pokok pikiran DPRD yang terdiri dari 378 saran, 972 tanggapan, dan 3.160 usulan kegiatan.

Berikut adalah tabel rekapitulasi hasil reses DPRD periode III tahun 2021 menurut wilayah Kotamadya/Kabupaten.

TABEL 5.7

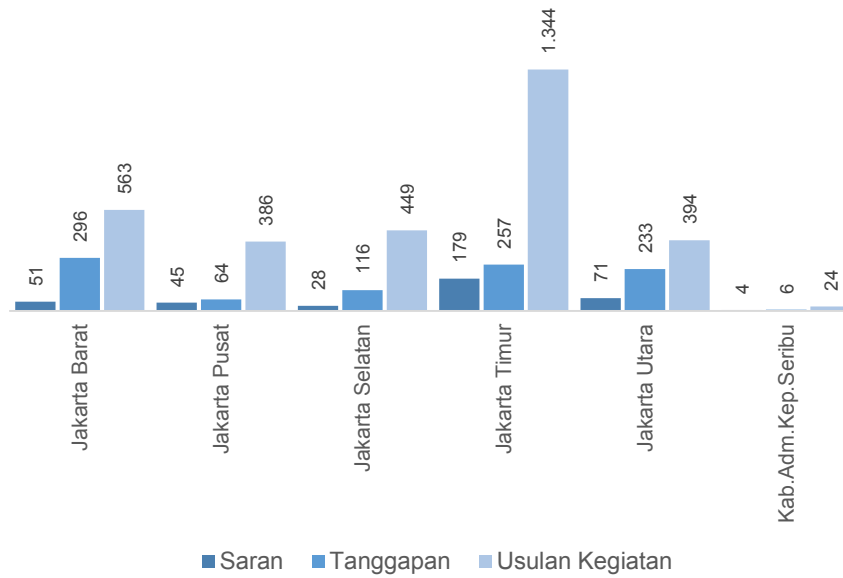
Rekapitulasi Hasil Reses DPRD Periode III Tahun 2021 Menurut Wilayah

No.	Wilayah	Saran	Tanggapan	Usulan Kegiatan
1	Jakarta Barat	51	296	563
2	Jakarta Pusat	45	64	386
3	Jakarta Selatan	28	116	449
4	Jakarta Timur	179	257	1.344
5	Jakarta Utara	71	233	394
6	Kab. Adm. Kep. Seribu	4	6	24
Total		378	972	3.160

Sumber: Laporan Penelaahan Tahap I & II atas Hasil Reses DPRD Tahun 2021

GAMBAR 5.4

Kompilasi Hasil Reses DPRD Periode III Tahun 2021 Menurut Wilayah



Sumber: Laporan Penelaahan Tahap I & II atas Hasil Reses DPRD Tahun 2021

Penelaahan Hasil Reses Kesatu Tahun 2022

Reses Kesatu Tahun 2022 menghasilkan 5.864 pokok pikiran DPRD yang terdiri dari 373 saran, 1.468 tanggapan, dan 4.023 usulan kegiatan.

Berikut adalah tabel rekapitulasi hasil reses DPRD periode I tahun 2022 menurut wilayah Kotamadya/Kabupaten.

TABEL 5.8

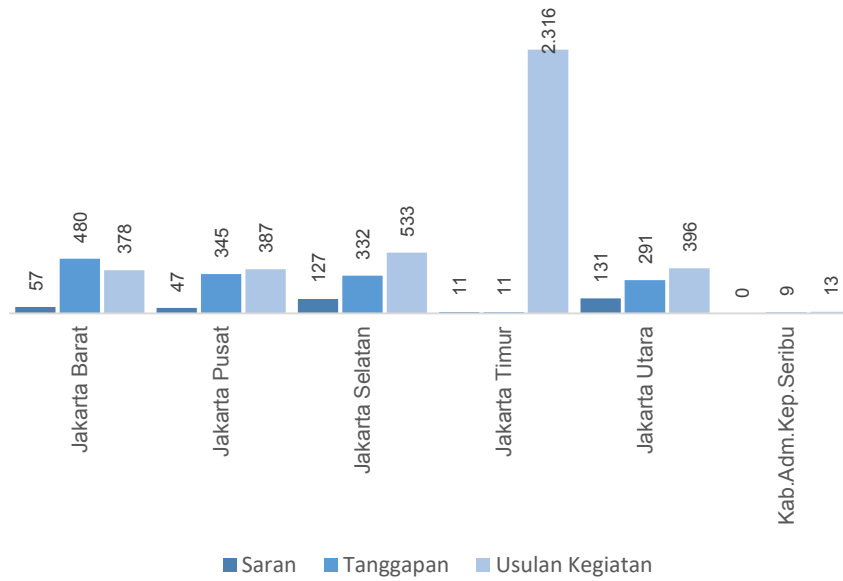
Rekapitulasi Hasil Reses DPRD Periode I Tahun 2022 Menurut Wilayah

No.	Wilayah	Saran	Tanggapan	Usulan Kegiatan
1	Jakarta Barat	57	480	378
2	Jakarta Pusat	47	345	387
3	Jakarta Selatan	127	332	533
4	Jakarta Timur	11	11	2.316
5	Jakarta Utara	131	291	396
6	Kab. Adm. Kep. Seribu	0	9	13
Total		373	1.468	4.023

Sumber: Laporan Penelaahan Tahap I & II atas Hasil Reses I DPRD Tahun 2022

GAMBAR 5.5

Kompilasi Hasil Reses DPRD Periode I Tahun 2022 Menurut Wilayah



Sumber: Laporan Penelaahan Tahap I & II atas Hasil Reses I DPRD Tahun 2022

5.3 Penelaahan Usulan Langsung Masyarakat

Dalam menyusun RKPD Tahun 2023, Pemprov. DKI Jakarta juga melakukan penjangkauan aspirasi masyarakat melalui sistem

e-Musrenbang. Adapun detail penelaahan usulan langsung masyarakat dapat dijabarkan sebagai berikut.

TABEL 5.9

Rekapitulasi Hasil Penelaahan Usulan Langsung Masyarakat Menurut Wilayah

No.	Wilayah	Diakomodir	Total
1	Jakarta Pusat	1044	1055
2	Jakarta Utara	535	538
3	Jakarta Barat	743	759
4	Jakarta Selatan	822	843
5	Jakarta Timur	898	914
6	Kepulauan Seribu	277	280
Total		4319	4389

TABEL 5.10

Rekapitulasi Hasil Penelaahan Usulan Langsung Masyarakat Menurut SKPD/UKPD

No.	SKPD/UKPD	Diakomodir	Total
1	Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah	1	1
2	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	19	19
3	Badan Pengelolaan Aset Daerah	1	1
4	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	4	4

No.	SKPD/UKPD	Diakomodir	Total
5	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	2	2
6	Biro Pemerintahan	7	7
7	Biro Pendidikan Dan Mental Spiritual	12	12
8	Dinas Bina Marga	332	384
9	Dinas Cipta Karya, Tata Ruang Dan Pertanahan	1	1
10	Dinas Kebudayaan	46	46
11	Dinas Kesehatan	12	12
12	Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan Dan Pertanian	7	7
13	Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik	77	77
14	Dinas Lingkungan Hidup	41	43
15	Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	2	2
16	Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak Dan Pengendalian Penduduk	8	8
17	Dinas Pemuda Dan Olahraga	209	209
18	Dinas Penanggulangan Kebakaran Dan Penyelamatan	179	179
19	Dinas Pendidikan	92	93
20	Dinas Perhubungan	24	25
21	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah	1	1
22	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	9	9
23	Dinas Pertamanan Dan Hutan Kota	49	50
24	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman	19	24
25	Dinas Sosial	30	30
26	Dinas Sumber Daya Air	251	256
27	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Dan Energi	42	42
28	Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu - Kep. Seribu	50	50
29	Kecamatan Kep.Seribu Utara - Kep. Seribu	1	1
30	Kecamatan Matraman - Jaktim	1	1
31	Kecamatan Pancoran - Jaksel	3	3
32	Kecamatan Pasar Minggu - Jaksel	1	1
33	Kecamatan Penjaringan - Jakut	1	1
34	Kecamatan Pulogadung - Jaktim	1	1
35	Kecamatan Tebet - Jaksel	1	1
36	Kelurahan Bangka - Jaksel	4	4

No.	SKPD/UKPD	Diakomodir	Total
37	Kelurahan Bidara Cina - Jaktim	1	1
38	Kelurahan Bintaro - Jaksel	4	4
39	Kelurahan Bukit Duri - Jaksel	1	1
40	Kelurahan Bungur - Jakpus	15	15
41	Kelurahan Cakung Barat - Jaktim	3	3
42	Kelurahan Cakung Timur - Jaktim	2	2
43	Kelurahan Cawang - Jaktim	1	1
44	Kelurahan Cempaka Baru - Jakpus	6	6
45	Kelurahan Cempaka Putih Barat - Jakpus	3	3
46	Kelurahan Cideng - Jakpus	7	7
47	Kelurahan Cijantung - Jaktim	4	4
48	Kelurahan Cikini - Jakpus	1	1
49	Kelurahan Cililitan - Jaktim	1	1
50	Kelurahan Cilincing - Jakut	1	1
51	Kelurahan Cipete Selatan - Jaksel	2	2
52	Kelurahan Cipete Utara - Jaksel	1	1
53	Kelurahan Cipinang Besar Utara - Jaktim	2	2
54	Kelurahan Cipinang Cempedak - Jaktim	13	13
55	Kelurahan Cipinang Melayu - Jaktim	2	2
56	Kelurahan Ciracas - Jaktim	2	2
57	Kelurahan Galur - Jakpus	1	1
58	Kelurahan Gandaria Selatan - Jaksel	4	4
59	Kelurahan Gelora - Jakpus	1	1
60	Kelurahan Grogol Utara - Jaksel	1	1
61	Kelurahan Gunung Sahari Selatan - Jakpus	2	2
62	Kelurahan Harapan Mulia - Jakpus	13	13
63	Kelurahan Jagakarsa - Jaksel	2	2
64	Kelurahan Jati Pulo - Jakbar	2	2
65	Kelurahan Jatinegara - Jaktim	3	3
66	Kelurahan Jatinegara Kaum - Jaktim	3	3
67	Kelurahan Jatipadang - Jaksel	1	1
68	Kelurahan Jelambar Baru - Jakbar	1	1
69	Kelurahan Johar Baru - Jakpus	1	2

No.	SKPD/UKPD	Diakomodir	Total
70	Kelurahan Kalibata - Jaksel	1	1
71	Kelurahan Kalisari - Jaktim	1	1
72	Kelurahan Kampung Bali - Jakpus	5	5
73	Kelurahan Kampung Rawa - Jakpus	5	5
74	Kelurahan Kapuk Muara - Jakut	3	3
75	Kelurahan Karang Anyar - Jakpus	8	8
76	Kelurahan Kartini - Jakpus	16	16
77	Kelurahan Kayu Manis - Jaktim	1	1
78	Kelurahan Kayu Putih - Jaktim	3	3
79	Kelurahan Kebayoran Lama Selatan - Jaksel	5	5
80	Kelurahan Kebayoran Lama Utara - Jaksel	2	2
81	Kelurahan Kebon Baru - Jaksel	1	1
82	Kelurahan Kebon Kacang - Jakpus	7	7
83	Kelurahan Kebon Kosong - Jakpus	18	18
84	Kelurahan Kebon Manggis - Jaktim	11	11
85	Kelurahan Kebon Melati - Jakpus	5	5
86	Kelurahan Kebon Pala - Jaktim	3	3
87	Kelurahan Kebon Sirih - Jakpus	5	5
88	Kelurahan Kedaung Kali Angke - Jakbar	2	2
89	Kelurahan Kemayoran - Jakpus	3	3
90	Kelurahan Kenari - Jakpus	7	7
91	Kelurahan Klender - Jaktim	2	2
92	Kelurahan Kota Bambu Selatan - Jakbar	30	30
93	Kelurahan Kota Bambu Utara - Jakbar	2	2
94	Kelurahan Kramat - Jakpus	7	7
95	Kelurahan Kramat Jati - Jaktim	1	1
96	Kelurahan Kuningan Barat - Jaksel	2	2
97	Kelurahan Kwitang - Jakpus	11	11
98	Kelurahan Lenteng Agung - Jaksel	9	9
99	Kelurahan Mampang Prapatan - Jaksel	6	6
100	Kelurahan Mangga Dua Selatan - Jakpus	3	3
101	Kelurahan Manggarai - Jaksel	1	1
102	Kelurahan Marunda - Jakut	3	3

No.	SKPD/UKPD	Diakomodir	Total
103	Kelurahan Menteng - Jakpus	2	2
104	Kelurahan Menteng Dalam - Jaksel	1	1
105	Kelurahan P.Panggung - Kep. Seribu	9	9
106	Kelurahan P.Pari - Kep. Seribu	1	1
107	Kelurahan P.Untung Jawa - Kep. Seribu	6	6
108	Kelurahan Pademangan Barat - Jakut	2	2
109	Kelurahan Pademangan Timur - Jakut	2	2
110	Kelurahan Palmerah - Jakbar	11	11
111	Kelurahan Palmeriam - Jaktim	1	1
112	Kelurahan Pancoran - Jaksel	5	5
113	Kelurahan Papanggo - Jakut	7	7
114	Kelurahan Pasar Baru - Jakpus	2	2
115	Kelurahan Pasar Minggu - Jaksel	3	3
116	Kelurahan Paseban - Jakpus	1	1
117	Kelurahan Pegadungan - Jakbar	3	3
118	Kelurahan Pegangsaan - Jakpus	2	2
119	Kelurahan Pegangsaan Dua - Jakut	6	6
120	Kelurahan Pejaten Barat - Jaksel	1	1
121	Kelurahan Pekojan - Jakbar	2	2
122	Kelurahan Pela Mampang - Jaksel	6	6
123	Kelurahan Penggilingan - Jaktim	3	3
124	Kelurahan Penjaringan - Jakut	10	10
125	Kelurahan Petamburan - Jakpus	12	12
126	Kelurahan Petojo Selatan - Jakpus	3	3
127	Kelurahan Petojo Utara - Jakpus	1	1
128	Kelurahan Petukangan Utara - Jaksel	9	9
129	Kelurahan Pisangan Baru - Jaktim	2	2
130	Kelurahan Pondok Bambu - Jaktim	1	1
131	Kelurahan Pondok Kelapa - Jaktim	9	9
132	Kelurahan Pondok Kopi - Jaktim	1	1
133	Kelurahan Pulo Gebang - Jaktim	1	1
134	Kelurahan Rambutan - Jaktim	3	3
135	Kelurahan Rawa Badak Selatan - Jakut	1	1

No.	SKPD/UKPD	Diakomodir	Total
136	Kelurahan Rawa Badak Utara - Jakut	1	1
137	Kelurahan Rawamangun - Jaktim	2	2
138	Kelurahan Rawasari - Jakpus	1	1
139	Kelurahan Rorotan - Jakut	1	1
140	Kelurahan Semanan - Jakbar	3	3
141	Kelurahan Semper Barat - Jakut	1	1
142	Kelurahan Semper Timur - Jakut	2	2
143	Kelurahan Senen - Jakpus	6	6
144	Kelurahan Serdang - Jakpus	3	3
145	Kelurahan Slipi - Jakbar	2	2
146	Kelurahan Srengseng Sawah - Jaksel	2	2
147	Kelurahan Sukabumi Selatan - Jakbar	2	2
148	Kelurahan Sukapura - Jakut	2	2
149	Kelurahan Sunter Jaya - Jakut	1	1
150	Kelurahan Tanah Tinggi - Jakpus	21	21
151	Kelurahan Tanjung Duren Selatan - Jakbar	1	1
152	Kelurahan Tanjung Priok - Jakut	2	2
153	Kelurahan Tebet Barat - Jaksel	2	2
154	Kelurahan Tegal Alur - Jakbar	1	1
155	Kelurahan Tengah - Jaktim	8	8
156	Kelurahan Tomang - Jakbar	1	1
157	Kelurahan Tugu Utara - Jakut	1	1
158	Kelurahan Ujung Menteng - Jaktim	1	1
159	Kelurahan Utan Kayu Utara - Jaktim	1	1
160	Kelurahan Utan Panjang - Jakpus	3	3
161	Pusat Budidaya Dan Konservasi Laut	2	2
162	Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Cakung - Jaktim	9	9
163	Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Cempaka Putih - Jakpus	2	2
164	Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Cengkareng - Jakbar	1	1
165	Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Cilandak - Jaksel	5	5
166	Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Cilincing - Jakut	15	15
167	Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Cipayung - Jaktim	2	2

No.	SKPD/UKPD	Diakomodir	Total
168	Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Ciracas - Jaktim	1	1
169	Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Duren Sawit - Jaktim	6	6
170	Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Gambir - Jakpus	3	3
171	Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Grogol Petamburan - Jakbar	1	1
172	Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Jagakarsa - Jaksel	4	4
173	Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Johar Baru - Jakpus	2	2
174	Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Kalideres - Jakbar	5	5
175	Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Kebayoran Baru - Jaksel	4	4
176	Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Kebayoran Lama - Jaksel	3	3
177	Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Kebon Jeruk - Jakbar	2	2
178	Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Kelapa Gading - Jakut	5	5
179	Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Kemayoran - Jakpus	17	17
180	Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Kep. Seribu Utara - Kep. Seribu	1	1
181	Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Kramat Jati - Jaktim	4	4
182	Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Makasar - Jaktim	31	31
183	Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Mampang Prapatan - Jaksel	12	12
184	Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Matraman - Jaktim	11	11
185	Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Menteng - Jakpus	1	1
186	Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Pademangan - Jakut	4	4
187	Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Pal Merah - Jakbar	3	3
188	Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Pancoran - Jaksel	13	13
189	Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Pasar Minggu - Jaksel	14	14
190	Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Pasar Rebo - Jaktim	2	2
191	Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Penjaringan - Jakut	2	2
192	Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Pesanggrahan - Jaksel	1	1
193	Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Sawah Besar - Jakpus	14	14

No.	SKPD/UKPD	Diakomodir	Total
194	Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Senen - Jakpus	11	11
195	Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Taman Sari - Jakbar	1	1
196	Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Tambora - Jakbar	6	6
197	Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Tanah Abang - Jakpus	19	19
198	Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Tanjung Priok - Jakut	8	8
199	Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Tebet - Jaksel	12	13
200	Pusat Pelatihan Dan Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini Dan Pendidikan Masyarakat	5	5
201	Pusat Pelatihan Kerja Daerah - Jakbar	4	4
202	Pusat Pelatihan Kerja Daerah - Jakpus	21	21
203	Pusat Pelatihan Kerja Daerah - Jaksel	11	11
204	Pusat Pelatihan Kerja Daerah - Jaktim	28	28
205	Pusat Pelatihan Kerja Daerah - Jakut	3	3
206	Pusat Pelatihan Kerja Pengembangan Industri	9	9
207	Pusat Pengembangan Benih Dan Proteksi Tanaman	2	2
208	Pusat Pengembangan Kompetensi Pendidik, Tenaga Kependidikan Dan Kejuruan - Jakbar	1	1
209	Pusat Pengembangan Kompetensi Pendidik, Tenaga Kependidikan Dan Kejuruan - Jaksel	1	1
210	Satuan Polisi Pamong Praja	1	1
211	Sudin Pemberdayaan, Perlindungan Anak Dan Pengendalian Penduduk - Jaksel	1	1
212	Suku Badan Pengelolaan Aset Daerah Kota - Jakut	2	2
213	Suku Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten - Kep. Seribu	7	7
214	Suku Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kota - Jakbar	1	1
215	Suku Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kota - Jakpus	2	2
216	Suku Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kota - Jaksel	1	1
217	Suku Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kota - Jakut	1	1
218	Suku Dinas Bina Marga Kota - Jakbar	10	10
219	Suku Dinas Bina Marga Kota - Jakpus	10	10
220	Suku Dinas Bina Marga Kota - Jaksel	7	7
221	Suku Dinas Bina Marga Kota - Jaktim	10	10
222	Suku Dinas Bina Marga Kota - Jakut	2	2

No.	SKPD/UKPD	Diakomodir	Total
223	Suku Dinas Kebudayaan Kabupaten - Kep. Seribu	4	4
224	Suku Dinas Kebudayaan Kota - Jakbar	29	29
225	Suku Dinas Kebudayaan Kota - Jakpus	50	50
226	Suku Dinas Kebudayaan Kota - Jaksel	31	31
227	Suku Dinas Kebudayaan Kota - Jaktim	49	49
228	Suku Dinas Kebudayaan Kota - Jakut	17	17
229	Suku Dinas Kesehatan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu	5	5
230	Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Barat	2	2
231	Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Pusat	1	1
232	Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Selatan	3	3
233	Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Timur	8	8
234	Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Utara	7	7
235	Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan Dan Pertanian Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu	31	31
236	Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan Dan Pertanian Kota Administrasi Jakarta Pusat	15	15
237	Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan Dan Pertanian Kota Administrasi Jakarta Selatan	4	4
238	Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan Dan Pertanian Kota Administrasi Jakarta Timur	17	17
239	Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan Dan Pertanian Kota Administrasi Jakarta Utara	1	1
240	Suku Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik Kota - Jakbar	7	7
241	Suku Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik Kota - Jakpus	6	6
242	Suku Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik Kota - Jaksel	4	4
243	Suku Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik Kota - Jaktim	2	2
244	Suku Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu	11	11
245	Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Barat	86	86
246	Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Pusat	143	143
247	Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Selatan	96	96
248	Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Timur	116	116
249	Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Utara	98	98

No.	SKPD/UKPD	Diakomodir	Total
250	Suku Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Kabupaten - Kep. Seribu	9	9
251	Suku Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Kota - Jakpus	2	2
252	Suku Dinas Pemuda Dan Olahraga Kota - Jakbar	19	19
253	Suku Dinas Pemuda Dan Olahraga Kota - Jakpus	25	25
254	Suku Dinas Pemuda Dan Olahraga Kota - Jaksel	24	24
255	Suku Dinas Pemuda Dan Olahraga Kota - Jaktim	19	19
256	Suku Dinas Pemuda Dan Olahraga Kota - Jakut	14	14
257	Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran Dan Penyelamatan Kota Administrasi Jakarta Barat	1	1
258	Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran Dan Penyelamatan Kota Administrasi Jakarta Pusat	2	2
259	Suku Dinas Pendidikan Kabupaten - Kep. Seribu	2	2
260	Suku Dinas Pendidikan Wilayah 1 Kota - Jakpus	7	7
261	Suku Dinas Pendidikan Wilayah 1 Kota - Jaksel	1	1
262	Suku Dinas Pendidikan Wilayah 2 Kota - Jakbar	1	1
263	Suku Dinas Pendidikan Wilayah 2 Kota - Jakpus	1	1
264	Suku Dinas Perhubungan Kota Administrasi Jakarta Barat	24	24
265	Suku Dinas Perhubungan Kota Administrasi Jakarta Pusat	41	41
266	Suku Dinas Perhubungan Kota Administrasi Jakarta Selatan	62	62
267	Suku Dinas Perhubungan Kota Administrasi Jakarta Timur	52	52
268	Suku Dinas Perhubungan Kota Administrasi Jakarta Utara	38	38
269	Suku Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kota Administrasi Jakarta Barat	1	1
270	Suku Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kota Administrasi Jakarta Pusat	2	2
271	Suku Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kota Administrasi Jakarta Selatan	1	1
272	Suku Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kota Administrasi Jakarta Timur	2	2
273	Suku Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kota Administrasi Jakarta Utara	2	2
274	Suku Dinas Pertamanan Dan Hutan Kota Kota - Jakbar	16	16
275	Suku Dinas Pertamanan Dan Hutan Kota Kota - Jakpus	20	20
276	Suku Dinas Pertamanan Dan Hutan Kota Kota - Jaksel	11	11
277	Suku Dinas Pertamanan Dan Hutan Kota Kota - Jaktim	4	4
278	Suku Dinas Pertamanan Dan Hutan Kota Kota - Jakut	12	12
279	Suku Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kabupaten - Kep. Seribu	10	10

No.	SKPD/UKPD	Diakomodir	Total
280	Suku Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota - Jakbar	4	4
281	Suku Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota - Jaksel	2	2
282	Suku Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota - Jaktim	1	1
283	Suku Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota - Jakut	1	1
284	Suku Dinas Sosial Kota Administrasi Jakarta Barat	4	4
285	Suku Dinas Sosial Kota Administrasi Jakarta Pusat	4	4
286	Suku Dinas Sosial Kota Administrasi Jakarta Selatan	5	5
287	Suku Dinas Sosial Kota Administrasi Jakarta Timur	8	8
288	Suku Dinas Sosial Kota Administrasi Jakarta Utara	1	1
289	Suku Dinas Sumber Daya Air Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu	14	14
290	Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Barat	75	75
291	Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Pusat	67	67
292	Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Selatan	93	93
293	Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Timur	76	76
294	Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Utara	62	62
295	Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Dan Energi Kabupaten - Kep. Seribu	5	5
296	Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Dan Energi Kota - Jakbar	21	21
297	Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Dan Energi Kota - Jakpus	34	34
298	Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Dan Energi Kota - Jaksel	13	13
299	Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Dan Energi Kota - Jaktim	64	65
300	Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Dan Energi Kota - Jakut	2	2
301	Unit Pelayanan Ambulans Gawat Darurat	3	3
302	Unit Pengelola Pelabuhan Perikanan	1	1
303	Unit Pengelola Pengembangan Tanaman Perkotaan	34	34
304	Unit Pengelola Sistem Pengendalian Lalu Lintas	6	6
305	Unit Penyelenggara Pelabuhan Daerah I	8	8
306	Unit Penyelenggara Pelabuhan Daerah II	8	8
Total		4319	4389

TABEL 5.11

Rekapitulasi Alasan Hasil Usulan Langsung Masyarakat Belum Diakomodir

No.	Alasan Belum Akomodir
1	Diarahkan melalui swadaya masyarakat
2	Diarahkan melalui swadaya masyarakat dan terkendala kepemilikan aset
3	Diarahkan melalui CSR
4	Duplikasi Usulan Kegiatan
5	Lokasi usulan tidak jelas
6	Permasalahan saluran got yang mampet dapat dilaporkan melalui JAK atau ke Keurahan dan akan ditangani oleh PPSU Kelurahan
7	Tidak adanya kurikulum pelatihan yang dimaksud
8	Tidak dapat dilaksanakan secara teknis
TOTAL	

5.4 Sinkronisasi Prioritas Nasional dan Prioritas Daerah

Dalam rangka mendukung capaian target pembangunan Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 258 Ayat 3 dan Pasal 259 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, perlu dilakukan koordinasi teknis pembangunan antara Kementerian atau Lembaga Pemerintah Non Kementerian dan Daerah. Koordinasi teknis pembangunan antara Kementerian atau Lembaga Pemerintah non-Kementerian dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 1, dikoordinasikan oleh Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional dengan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan.

Sesuai hal tersebut diatas, Kementerian dalam Negeri bersama Kementerian PPN/Bappenas Republik Indonesia mengoordinasikan teknis penyampaian kegiatan/proyek OPD terkait pengusulan kegiatan/proyek kewenangan daerah yang dibiayai oleh APBD yang dianggap mendukung pencapaian Prioritas Nasional pada "Aplikasi SIPD".

Adapun hasil sinkronisasi terkait hal tersebut diatas dapat dijabarkan dengan Proyek

Prioritas Nasional dan Prioritas Daerah yang telah disepakati sebagai berikut:

A. Prioritas Nasional

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
 - a) Pemenuhan Kebutuhan Energi dengan Mengutamakan Peningkatan Energi Baru Terbarukan
 - b) Peningkatan Kuantitas/Ketahanan Air untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi
 - c) Peningkatan Ketersediaan, Akses, dan Kualitas Konsumsi Pangan
 - d) Peningkatan Pengelolaan Kemaritiman, Perikanan, dan Kelautan
 - e) Penguatan Kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM) dan koperasi
 - f) Peningkatan Nilai Tambah, Lapangan Kerja, dan Investasi Di Sektor Riil, dan Industrialisasi
 - g) Peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan Tingkat Kandungan

Dalam Negeri

- h) Penguatan Pilar Pertumbuhan dan Daya Saing Ekonomi
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan
Pengembangan sektor/komoditas/kegiatan unggulan daerah
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
 - a) Pengendalian Penduduk dan Penguatan Tata Kelola Kependudukan
 - b) Penguatan Pelaksanaan Perlindungan Sosial
 - c) Peningkatan Akses dan Kualitas Pelayanan Kesehatan Menuju Cakupan Kesehatan Semesta
 - d) Peningkatan Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas
 - e) Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda
 - f) Pengentasan Kemiskinan
 - g) Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan
 - a) Revolusi Mental dan Pembinaan Ideologi Pancasila untuk Memperkokoh Ketahanan Budaya Bangsa dan Membentuk Mentalitas Bangsa yang Maju, Modern, dan Berkarakter
 - b) Meningkatkan Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan untuk Memperkuat Karakter dan Memperteguh Jati Diri Bangsa, Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat, dan Mempengaruhi Arah Perkembangan Peradaban Dunia
 - c) Memperkuat Moderasi Beragama untuk Mengukuhkan Toleransi, Kerukunan dan Harmoni Sosial
 - d) Peningkatan Budaya Literasi, Inovasi, dan Kreativitas Bagi Terwujudnya Masyarakat Berpengetahuan dan Berkarakter
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung

Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar

- a) Infrastruktur Pelayanan Dasar
- b) Infrastruktur Ekonomi
- c) Infrastruktur Perkotaan
- d) Energi dan Ketenagalistrikan
- e) Transformasi Digital
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim
 - a) Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup
 - b) Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim
 - c) Pembangunan Rendah Karbon
7. Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum Pertahanan dan Keamanan dan Transformasi Pelayanan Publik
 - a) Konsolidasi Demokrasi
 - b) Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri
 - c) Penegakan Hukum Nasional
 - d) Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola
 - e) Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional

B. Prioritas Daerah

1. Regenerasi Kota yang Berketahanan dan Berkelanjutan
 - a) Pembangunan Infrastruktur dan Layanan Dasar Perkotaan yang berkualitas
 - b) Perbaikan Pola Aktivitas dan Mobilitas Melalui Pengembangan Kota Berorientasi Transit
 - c) Pemulihan Ekosistem Kota dan Implementasi Pembangunan Rendah Karbon
 - d) Peningkatan Stabilitas dan Ketahanan Kota
2. Perekonomian Inklusif yang Berdaya Saing, Penghidupan Layak, dan Pemerataan Kesejahteraan

- a) Pertumbuhan Ekonomi dan Sektor Usaha Berbasis Pengalaman dan Nilai Tambah
 - b) Peningkatan Kesempatan, Pemberdayaan, dan Adaptabilitas Tenaga Kerja
 - c) Pengurangan Ketimpangan Melalui Pemenuhan Kebutuhan Dasar dan Jaminan Perlindungan Sosial
 - d) Penguatan Daya Saing Kota Melalui Inovasi dan Kolaborasi
3. Pembangunan Manusia Madani yang Berkesetaraan
- a) Pemerataan Kesempatan Pendidikan Untuk Semua dan Edukasi Terkait
 - b) Pembelajaran Sepanjang Hayati
 - c) Peningkatan Kualitas dan Harapan Hidup Melalui Perbaikan Kesehatan Perkotaan
 - d) Penurunan Kesenjangan Melalui Pembangunan Responsif Gender Penguatan Nilai-Nilai Demokrasi, Kebangsaan, dan Kebijaksanaan Masyarakat
4. Transformasi Pelayanan Publik dan
- Manajemen Pemerintahan
- a) Peningkatan Kualitas, Aksesibilitas, dan Kemudahan Layanan Masyarakat
 - b) Akselerasi Transformasi Digital dan Pengembangan Manajemen Kota Cerdas
 - c) Perbaikan Manajemen dan Arsitektur Kinerja Pemerintah
 - d) Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Sehat, Transparan dan Akuntabel
 - e) Pengembangan Kapasitas, Profesionalitas dan Iklim Kerja Aparatur
- Sesuai sebagaimana tersebut diatas, Kementerian Dalam Negeri bersama Kementerian PPN/Bappenas mengoordinasikan teknik Penyampaian/Proyek OPD terkait pengusulan kewenangan daerah yang dibiayai oleh APBD yang dianggap mendukung pencapaian Prioritas Nasional pada aplikasi "SIMLARAS".
- Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah melakukan sinkronisasi program/kegiatan daerah yang mendukung prioritas nasional dengan sebagaimana yang dapat dilihat pada lampiran V dalam Dokumen RKPD ini.

5.5 Rencana Kerja Perangkat Daerah

Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta disusun melalui sistem Smart Planning Budgeting serta sistem SIPD Kementerian Dalam Negeri. Seluruh program dalam Rencana Kerja tersebut merupakan pelaksanaan dari program yang terdapat dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) DKI Jakarta Tahun 2023 – 2026. Adapun rekapitulasi dari Program pada Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta dapat dilihat pada lampiran IV dalam dokumen ini.

Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026 menjadi pedoman dalam

penyusunan RKPD tahunan yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur. Dalam penyusunan RKPD, prioritas dan sasaran pembangunan tahunan daerah diselaraskan dengan program prioritas yang telah ditetapkan dalam RPD. Target dan pagu indikatif program yang dalam RPD masih bersifat indikatif dapat disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan pada saat penyusunan RKPD. Berikut merupakan target dan pagu indikatif Program Prioritas Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023 yang menjadi acuan dalam penyusunan RKPD.

TABEL 5.12

Pagu Indikatif Perangkat Daerah Tahun 2023

Kode	Kode	Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal RPD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Kondisi Akhir RPD		Perangkat Daerah Penanggung jawab
							2023		Target	Rp	
							Target	Rp			
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					49.734.332.5 89.573		218.434.442. 516.707	
	1.01		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN					20.006.868.5 24.603		79.346.631.9 02.847	
		1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks	4	4	9.308.465.46 3.623	4	35.777.606.5 91.935	DINAS PENDIDIKAN
		1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Jumlah Anak Usia 16-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah (APS)	Persentase	80,97	100	10.698.403.0 60.980	100	43.569.025.3 10.912	DINAS PENDIDIKAN
			Jumlah Anak Usia 4-18 disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus (APS)	Persentase	38,65	100	100				
			Tingkat Penyerapan Lulusan SMK	Persentase	22,54	30	55				
			Persentase anak usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	Persentase	36,38	100	100				
			Jumlah Anak Usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS)	Persentase	99,1	100	100				
			Persentase guru profesional	Persentase	86,3	87,4	90,7				
			Persentase Satuan Pendidikan Terakreditasi A	Persentase	72,18	72,37	72,94				

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal RPD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Kondisi Akhir RPD		Perangkat Daerah Penanggung jawab	
					2023		Target	Rp		
					Target	Rp				
		Persentase siswa dengan nilai Asesmen Kompetensi (Literasi) memenuhi kompetensi minimum	Nilai	67,58	68,75		72,25			
		Persentase siswa dengan nilai Asesmen Kompetensi (Numerasi) memenuhi kompetensi minimum	Nilai	60,17	61,33		64,83			
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					13.466.301.5 14.115		60.140.822.9 11.615		
	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks	0	3	8.297.238.58 3.468	4	34.882.369.5 25.858	DINAS KESEHATAN
	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Penerapan Sistem Informasi Kesehatan Terintegrasi	%	100	100	3.609.783.32 0.638	100	18.555.396.5 08.290	DINAS KESEHATAN
			Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang melaksanakan Farmasi Klinis Sesuai Standar	%	0	67		100		
			Persentase Pemenuhan Kategori Standar Alat Kesehatan yang Aman, Mutu, Selamat dan Laik Pakai di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	%	0	100		100		
			Indeks Keluarga Sehat (IKS)	Indeks	0,49	0,55		0,64		
			Angka Kematian Ibu (AKI)	Rate	76,49	76		70		
			Angka Kematian Neonatal (AKN)	Rate	1,33	1,31		1,28		

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal RPD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Kondisi Akhir RPD		Perangkat Daerah Penanggung jawab
					2023		Target	Rp	
					Target	Rp			
		Persentase Pemenuhan Standar Akreditasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan Milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta	%	0	100		100		
		Persentase Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sesuai target di SKPD/UKPD Urusan Kesehatan	%	100	100		100		
		Persentase Pemenuhan Layanan Unggulan di Rumah Sakit Daerah (RSD)	%	0	20		80		
		Persentase Pemenuhan Standar Pembangunan, Rehabilitasi, dan/atau Pemeliharaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Fasilitas Pendukungnya	%	100	100		100		
		Persentase Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	%	98,39	98		98		
	1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN							
		Persentase Implementasi Hospitality dalam Pelayanan	%	0	100	1.558.481.456.219	100	6.699.605.998.797	DINAS KESEHATAN
		Rata-Rata Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) di Dinas Kesehatan dan Unit Kerja Dinas Kesehatan sesuai Analisis Beban Kerja (ABK)	%	0	60		65		
		Persentase Pemenuhan Jumlah dan Jenis Tenaga	%	0	85		100		

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal RPD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Kondisi Akhir RPD		Perangkat Daerah Penanggung jawab	
					2023		Target	Rp		
					Target	Rp				
		Kesehatan sesuai Standar di Puskesmas Kecamatan								
		Persentase Pemenuhan Kriteria Penyelenggara Pelatihan Bidang Kesehatan Berskala Nasional	%	0	50		100			
	1.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase Sarana Kefarmasian yang Memenuhi Standar	%	39	40	547.197.640	55	2.547.347.676	DINAS KESEHATAN
			Persentase Sarana Alat Kesehatan yang Memenuhi Ketentuan Cara Pengelolaan dan Distribusi Alat Kesehatan yang Baik	%	0	40		55		
			Persentase Tempat Pengelolaan Pangan (TPP) yang Memenuhi Syarat Sesuai Standar	%	67	67		73		
	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Proporsi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Aktif	%	65.82	60	250.956.150	67	903.530.994	DINAS KESEHATAN
			Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Melaksanakan Revitalisasi Pelayanan	Unit	0	44		176		
1.03		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				8.660.386.968.419		41.243.444.169.049		
	1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks	0	4	254.489.973.204	4	1.003.127.697.651	DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN PERTANAHAN

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal RPD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Kondisi Akhir RPD		Perangkat Daerah Penanggung jawab
					2023		Target	Rp	
					Target	Rp			
1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	indeks	4	4	587.084.443.104	4	2.441.120.084.329	DINAS BINA MARGA
1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks	4	4	1.336.555.590.986	4	5.230.746.890.982	DINAS SUMBER DAYA AIR
1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Peningkatan kapasitas tampungan air	m3	1510000000	233600	2.128.624.895.510	2783100	8.359.926.916.139	DINAS SUMBER DAYA AIR
		Persentase luas kawasan/sistem polder yang tertangani	Persentase	10,53	1,36		12,12		
		Persentase Pantai di Kepulauan Seribu yang bebas dari abrasi	Persentase	52	53,2		56,8		
		Persentase pembangunan tanggul kritis di muara kali dan pantai Jakarta	Persentase	37	42		75		
1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Jumlah kapasitas pengolahan air minum yang beroperasi	liter/detik	21034	21682	39.282.394.084	25232	1.267.216.219.655	DINAS SUMBER DAYA AIR
1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Jumlah debit air limbah yang terolah	m3/hari	1285	1295,6	660.393.201.933	5636,7	4.077.009.666.933	DINAS SUMBER DAYA AIR
1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase penanganan genangan yang kurang dari 2 jam	Persentase	85	86	447.544.353.043	89	1.940.849.455.480	DINAS SUMBER DAYA AIR
1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase penyelenggaraan bangunan gedung yang	Persentase	0	96	473.686.000.000	99	4.400.734.000.000	DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN PERTANAHAN

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal RPD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Kondisi Akhir RPD		Perangkat Daerah Penanggung jawab	
					2023		Target	Rp		
					Target	Rp				
	1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Penyelenggaraan Jalan	Indeks	0	4	2.597.546.85 6.543	4	12.078.133.5 65.695	DINAS BINA MARGA
	1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Penyelenggaraan Jalan Lingkup Kabupaten Administrasi	Indeks	0	4	16.898.241.4 96	4	73.768.205.8 03	KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU - KEP. SERIBU
	1.01.02	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Indeks Kepuasan Pelayanan laboratorium di bidang Ke Bina Margaan	Indeks	4	4	436.957.500	4	1.773.136.62 7	DINAS BINA MARGA
	1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase kesesuaian panduan rancang kota sistem pusat pelayanan dengan pedoman pengembangan kawasan berorientasi transit	Persentase	0	90	117.844.061. 016	90	369.038.329. 755	DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN PERTANAHAN
			Persentase pelanggaran penyelenggaraan ruang dan bangunan yang terselesaikan tepat waktu	Persentase	90	90		90		
	1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN					3.040.020.09 0.476		17.513.227.1 06.908	
	1.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks	4	4	558.975.291. 977	4	2.506.973.55 7.949	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
			Indeks Kepuasan Penghuni Rumah Susun	Indeks	80,1	81		84		

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal RPD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Kondisi Akhir RPD		Perangkat Daerah Penanggung jawab	
					2023		Target	Rp		
					Target	Rp				
	1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	% Unit Hunian Layak yang Terbangun	%	0.98	1,32	1.795.992.25 5.099	1,95	11.720.001.4 82.309	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	% Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha yang Terselenggara	%	80.39	80,94	250.000.000	84,88	1.000.000.00 0	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	% PSU Kawasan Permukiman yang ditingkatkan	%	5.15	6,96	684.802.543. 400	14,19	3.285.252.06 6.650	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.05		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT					2.789.599.60 9.463		12.065.354.5 23.552	
	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks	4	4	921.240.245. 081	4	4.275.475.97 7.421	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
			Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	indeks	4	4	1.068.825.25 8.419	4	4.099.999.78 9.690	DINAS PENANGGULANGAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
			Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai	4	4	41.859.255.5 73	4	165.736.912. 126	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penyelesaian Pelanggaran Perda/Perkada terkait Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persen	93.92	94	298.327.383. 960	94,75	1.384.537.38 8.954	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal RPD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Kondisi Akhir RPD		Perangkat Daerah Penanggung jawab
					2023		Target	Rp	
					Target	Rp			
1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase masyarakat dan aparatur yang dilatih dalam penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Persen	0.7	0,84	48.120.474.506	1,08	198.321.750.235	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
		Persentase pendampingan yang dilaksanakan pada pasca bencana	Persen	100	100		100		
		Persentase pengungsi terlayani kebutuhan dasarnya dalam waktu 1 kali 24 jam	Persen	100	100		100		
1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase Pencegahan, Pemadaman Kebakaran dan Penyelamatan Berhasil	persen	51	53	411.226.991.924	60	1.941.282.705.126	DINAS PENANGGULANGAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL					1.771.155.882.497		8.124.961.902.736	
1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks	0	4	397.992.242.370	4	1.800.628.992.936	DINAS SOSIAL
		Indeks Kepuasan Layanan Kepegawaian	Indeks	0	4		4		
1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase Potensi Sumber Daya dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang Mampu Melakukan Pemberdayaan Sosial	Persen	0	79,5	31.019.844.160	80,3	127.295.956.201	DINAS SOSIAL
1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Indeks Pencapaian SPM Rehabilitasi Sosial	Indeks	0	100	288.378.141.924	100	1.343.709.857.425	DINAS SOSIAL

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal RPD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Kondisi Akhir RPD		Perangkat Daerah Penanggung jawab	
					2023		Target	Rp		
					Target	Rp				
	1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial Penerima Layanan Perlindungan dan Jaminan Sosial yang Tepat Sasaran	Persen	0	100	1.019.631.977.420	100	4.443.284.258.338	DINAS SOSIAL
	1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Indeks Pencapaian SPM Penanganan Bencana	Indeks	0	100	32.704.936.523	100	402.713.937.964	DINAS SOSIAL
			Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Korban Bencana Lingkup Kabupaten Administrasi	Persen	0	95	1.428.740.100	95	7.328.899.872	KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU - KEP. SERIBU
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					24.675.070.298.759		120.539.041.950.264	
	2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA					604.511.269.721		2.806.785.965.592	
	2.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks	4	4	429.480.534.687	4	1.994.081.592.865	DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, DAN ENERGI
	2.07.02	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Tingkat rata-rata capaian indikator kinerja dalam dokumen perencanaan tenaga kerja	Persen	70	70	99.900.000	70	399.600.000	DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, DAN ENERGI
	2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase peserta pelatihan kerja yang mendapatkan sertifikat kompetensi	Persen	80	80	132.882.885.796	80	617.189.280.321	DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, DAN ENERGI
			Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	Rupiah	395756547	399714112		411825849		
	2.07.04		Persentase tenaga kerja formal yang ditempatkan	Persen	85	87	37.599.833.625	91,5	174.471.787.850	

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal RPD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Kondisi Akhir RPD		Perangkat Daerah Penanggung jawab
					2023		Target	Rp	
					Target	Rp			
		PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persen	85	90		90		DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, DAN ENERGI
	2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persen	65	67,5	2.737.453.588	71,25	12.704.522.099	DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, DAN ENERGI
	2.07.06	PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN	Persen	80	80	1.710.662.025	80	7.939.182.457	DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, DAN ENERGI
2.08		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				28.796.209.853		126.685.229.099	
	2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	%	60	70	2.762.176.530	85	12.819.261.276	DINAS PEMBERDAYAAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
	2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	%	99.5	100	16.287.809.135	100	69.598.416.932	DINAS PEMBERDAYAAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
	2.08.04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	%	0	15	4.489.240.000	30	20.892.573.340	DINAS PEMBERDAYAAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
	2.08.05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	%	0	100	141.700.000	100	657.629.700	DINAS PEMBERDAYAAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal RPD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Kondisi Akhir RPD		Perangkat Daerah Penanggung jawab
					2023		Target	Rp	
					Target	Rp			
2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase anak yang terpenuhi hak dasarnya melalui pemenuhan indikator Evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak	%	50	50	1.368.116.288	80	6.349.427.693	DINAS PEMBERDAYAAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase anak yang mendapatkan perlindungan khusus melalui lembaga pemerintah dan non pemerintah untuk memenuhi indikator Klaster 5 Kabupaten/Kota Layak Anak	%	0	75	3.747.167.900	81	16.367.920.158	DINAS PEMBERDAYAAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN					1.200.603.091.471		5.469.201.805.483	
2.09.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks	4	4	306.068.056.361	4	1.270.436.376.776	DINAS KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN DAN PERTANIAN
2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Persentase Ketersediaan Pangan	Persen	100	100	891.145.175.899	100	4.183.828.667.563	DINAS KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN DAN PERTANIAN
2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase Wilayah Tahan Pangan	Persen	95,45	95,45	207.660.000	97,72	830.640.000	DINAS KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN DAN PERTANIAN
2.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase Pangan yang Bebas Bahan Berbahaya	Persen	99,95	99,8	3.182.199.211	99,8	14.106.121.144	DINAS KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN DAN PERTANIAN
2.10	URUSAN PEMERINTAHAN					3.200.000.000		12.800.000.000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal RPD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Kondisi Akhir RPD		Perangkat Daerah Penanggung jawab	
					2023		Target	Rp		
					Target	Rp				
		BIDANG PERTANAHAN								
	2.10.10	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Persentase bidang tanah milik masyarakat yang terinventarisasi dan terfasilitasi dalam rangka perencanaan penggunaan tanah untuk mendukung peningkatan sertifikasi di kawasan pemukiman	Persentase	0	10	3.200.000.000	100	12.800.000.000	DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN PERTANAHAN
	2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP					4.806.344.489.146		22.050.962.736.036	
	2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks	3	3	986.735.290.003	3	4.378.111.540.259	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
			Indeks Kepuasan Layanan Kepegawaian	Indeks	3	3		3		
	2.11.02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Dokumen pelaporan pengelolaan lingkungan hidup yang disampaikan ke Pemerintah Pusat dengan tepat waktu	%	100	100	2.977.476.000	100	13.219.823.723	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase parameter yang memenuhi baku mutu	%	75	76	33.760.189.189	77,5	150.395.440.889	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase jumlah ruang terbuka hijau yang dikelola sesuai dengan Rencana Induk Ruang Terbuka Hijau	Persen	100	100	1.639.721.840.991	100	7.540.604.806.363	DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal RPD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Kondisi Akhir RPD		Perangkat Daerah Penanggung jawab
					2023		Target	Rp	
					Target	Rp			
2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase Ruang Terbuka Hijau yang Dikelola Lingkup Kabupaten Administrasi	Persen	100	100	24.440.567.368	100	113.428.673.158	KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU - KEP. SERIBU
2.11.05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Jumlah Limbah B3 Rumah Tangga yang dikelola	Ton	53	61	4.188.134.346	74	19.229.089.840	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan yang diterbitkan oleh pemerintah daerah	%	9	12	2.881.605.978	13,5	12.794.166.291	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Jumlah partisipan yang berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup tingkat nasional	Lokasi	38	46	3.613.919.817	58	16.045.597.993	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase penyelesaian penanganan pengaduan masyarakat sesuai ketentuan	%	100	100	212.173.451	100	942.038.029	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Peningkatan kapasitas sistem penanganan persampahan	ton/hari	250	2710	2.107.813.292.003	7262	9.806.191.559.491	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		Persentase rumah tangga yang melakukan pemilahan	%	5	7		13		

Kode	Kondisi Awal RPD	Urusan/Bidang Urusan/Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Kondisi Akhir RPD		Perangkat Daerah Penanggung jawab	
					2023		Target	Rp		
					Target	Rp				
2.12		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				344.751.188.517		1.679.472.471.801		
	2.12.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks	4	4	301.821.400.421	4	1.479.985.325.242	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase Cakupan Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk	Persen	99	99	37.570.208.159	99	174.413.336.068	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase Cakupan Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil	Persen	89	99,5	4.845.625.294	99,88	22.588.546.991	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase Pemanfaatan Data Kependudukan	Persen	85,71	89,29	339.187.048	100	1.624.167.092	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.05	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Persentase tersusunnya profil kependudukan	Persen	100	100	174.767.595	100	861.096.408	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.13		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA					466.874.982.622		2.171.116.081.149	
	2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang aktif dalam pemberdayaan masyarakat	%	90	91,79	466.874.982.622	97,41	2.171.116.081.149	DINAS PEMBERDAYAAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal RPD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Kondisi Akhir RPD		Perangkat Daerah Penanggung jawab	
					2023		Target	Rp		
					Target	Rp				
		MASYARAKAT HUKUM ADAT								
2.14		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA					259.848.446.248		992.415.210.757	
	2.14.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks	4	4	229.340.299.285	4	855.821.762.595	DINAS PEMBERDAYAAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
	2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Persentase keluarga yang terdata melalui Carik Jakarta yang berhasil dimutakhirkan	%	87	90	17.112.933.554	100	79.749.793.623	DINAS PEMBERDAYAAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
	2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase Masyarakat (Keluarga) yang memperoleh informasi program Bangga Kencana dengan cara memperoleh/mendengar/melihat pesan/ informasi Program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga (Bangga Kencana) melalui media dan Petugas.	%	53,6	56,1	10.397.333.409	63,6	44.725.904.539	DINAS PEMBERDAYAAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
			Persentase kebutuhan ber- KB yang tidak terpenuhi (Unmet Need)	%	14,8	14,3		12,8		
			Angka prevalensi kontrasepsi modern (modern Contraceptive Prevalence Rate/ mCPR)	%	57,66	58,33		60,32		

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal RPD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Kondisi Akhir RPD		Perangkat Daerah Penanggung jawab	
					2023		Target	Rp		
					Target	Rp				
		Age Specific Fertility Rate (kelompok umur 15-19 tahun)	Kelahiran per 1000 WUS 15-19 tahun	21,85	21,35		19,85			
	2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Median Usia Kawin Pertama (MUKP)	tahun	21.7	22,1	2.997.880.000	23,2	12.117.750.000	DINAS PEMBERDAYAAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
	2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN				12.771.732.398.328		62.123.470.701.232		
	2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks	4	4	1.212.224.934.091	4	5.061.831.387.002	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Jumlah penumpang angkutan umum yang terlayani per hari	Penumpang per hari	2672575	3497135	9.194.717.617.849	4386163	48.206.427.176.620	DINAS PERHUBUNGAN
			Indeks fatalitas kecelakaan angkutan umum per tahun	Indeks	4,42	1,61		1,3		
			Kecepatan Rata-Rata di ruas jalan yang dikenakan kebijakan pembatasan lalu lintas pada jam sibuk	km/jam	25	26		29		
	2.15.03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Jumlah terminal penumpang angkutan perairan (Pelabuhan) yang memenuhi Standar Pelayanan Prima	Pelabuhan	1	5	375.203.593.804	11	766.537.504.072	DINAS PERHUBUNGAN
			Persentase badan usaha angkutan perairan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan	Persen	23,8	40		70,47		

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal RPD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Kondisi Akhir RPD		Perangkat Daerah Penanggung jawab	
					2023		Target	Rp		
					Target	Rp				
	2.15.05	PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN	Jumlah rekomendasi kebijakan penyelenggaraan perkeretaapian provinsi	Rekomendasi	0	2	1.989.586.252.584	8	8.088.674.633.538	DINAS PERHUBUNGAN
2.16		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA					769.637.918.209		3.406.321.300.104	
	2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks	3	4	132.533.836.310	4	532.798.326.657	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase Pemenuhan Layanan Informasi dan Komunikasi Publik	Persen	100	100	53.099.225.267	100	231.402.160.533	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Jumlah pemenuhan layanan Teknologi Informatika dan Komunikasi	Perangkat Daerah	51	51	584.004.856.632	51	2.642.120.812.914	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
2.17		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH					333.789.550.647		1.530.020.578.256	
	2.17.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks	4	4	254.527.034.968	4	1.153.269.389.439	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase Koperasi Aktif yang Patuh terhadap Peraturan Perundang-undangan	Persen	54	57	15.600.000	65	62.400.000	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN	Persentase SDM Koperasi yang meningkat kapasitasnya	Persen	40	50	811.488.122	70	4.098.015.017	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN,

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal RPD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Kondisi Akhir RPD		Perangkat Daerah Penanggung jawab	
					2023		Target	Rp		
					Target	Rp				
		LATIHAN PERKOPERASIAN							KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	
	2.17.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase pertumbuhan volume usaha koperasi	Persen	-25	2	250.000.000	2	1.300.000.000	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
			Persentase Koperasi konvensional yang bertransformasi digital (modern)	Persen	0,46	0,47		0,5		
	2.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase wirausaha baru yang tangguh dan mandiri	Persen	2.19	2,5	76.959.128.397	4	365.438.667.878	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase UMKM yang terdigitalisasi	Persen	43.7	70	1.226.299.160	100	5.852.105.922	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL					825.578.850.463		3.634.246.539.394	
	2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks	4	4	617.514.720.459	4	2.671.825.912.046	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Nilai kemudahan investasi	Nilai	0	72,5	1.611.075.032	80,1	7.476.999.221	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase promosi proyek-proyek di DKI Jakarta untuk BLUD, BUMD, dan Swasta	100	100	100	8.615.353.772	100	39.983.856.857	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal RPD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Kondisi Akhir RPD		Perangkat Daerah Penanggung jawab	
					2023		Target	Rp		
					Target	Rp				
		Persentase penguatan kegiatan promosi penanaman modal DKI Jakarta	Persen	0	100		100			
	2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase penerbitan izin tepat waktu	%	100	100	180.292.107.840	100	833.530.672.487	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase jumlah perusahaan yang melaporkan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)	%	50	60	1.669.876.730	90	7.749.897.901	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Indeks Kepuasan Layanan Pengelolaan Sarana Prasarana Teknologi Informasi serta Sistem Data dan Informasi Perizinan dan nonperizinan	Indeks	86	87	15.875.716.630	90	73.679.200.882	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.19		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA					1.462.464.261.287		10.399.826.341.050	
	2.19.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks	4	4	292.576.251.509	4	1.240.877.577.826	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
			Indeks Kepuasan Layanan Kepegawaian	Indeks	0	4		4		
	2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase Pemuda Hasil Binaan yang Berprestasi dalam Bidang yang Ditentukan Lingkup Kabupaten Administrasi	Persen	0	60	1.020.786.758	75	4.983.147.032	KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU - KEP. SERIBU
	2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase Pemuda hasil binaan yang berprestasi dalam bidang yang ditentukan	Persentase	47	50	40.001.329.892	50	185.005.524.518	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal RPD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Kondisi Akhir RPD		Perangkat Daerah Penanggung jawab
					2023		Target	Rp	
					Target	Rp			
1.01.02	PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Persentase Cabang Olahraga yang Berprestasi Lingkup Kabupaten Administrasi	Persen	0	75	2.621.518.517	90	11.868.711.113	KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU - KEP. SERIBU
2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Persentase cabang olahraga yang berprestasi	Persentase	93	86	1.111.356.047.621	96	8.894.206.966.786	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
2.19.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Persentase Anggota Kepramukaan yang meningkat kapasitasnya Lingkup Kabupaten Administrasi	Persen	0	4,5	614.191.044	6	2.456.764.176	KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU - KEP. SERIBU
		Persentase Anggota Kepramukaan yang meningkat kapasitasnya	Persentase	1.87	2,02	14.274.135.946	2,49	60.427.649.599	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
2.20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK					11.975.367.019		55.577.678.336	
2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase Pemenuhan Data Prioritas	Persen	100	100	11.975.367.019	100	55.577.678.336	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
2.21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN					14.066.054.589		65.278.242.348	
2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase perangkat daerah Provinsi yang telah menggunakan layanan persandian dalam rangka pengamanan informasi milik pemerintah	Persen	98	98	14.066.054.589	100	65.278.242.348	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN					544.587.718.819		2.634.458.999.999	

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal RPD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Kondisi Akhir RPD		Perangkat Daerah Penanggung jawab
					2023		Target	Rp	
					Target	Rp			
2.22.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kepuasan Terhadap Kinerja Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Indeks	4	4	239.953.570.552	4	1.095.328.386.170	DINAS KEBUDAYAAN
2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase Karya Budaya yang telah ditetapkan sebagai Warisan Budaya Benda dan Tak Benda (WBTB) yang merupakan Intangible Culture Assets menurut UNESCO	Persen	8.3	8,64	222.771.800.346	9,89	1.012.603.736.233	DINAS KEBUDAYAAN
2.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase Objek diduga Cagar Budaya yang ditetapkan menjadi Cagar Budaya Provinsi DKI Jakarta	Persen	39.94	41,5	41.298.618.734	46,11	362.720.138.549	DINAS KEBUDAYAAN
2.22.06	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengunjungi peninggalan sejarah dan museum lainnya	Persen	5.5	24,55	40.563.729.187	25	163.806.739.047	DINAS KEBUDAYAAN
2.23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN					73.146.093.103		377.907.188.145	
2.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Tingkat Kemanfaatan Perpustakaan oleh Masyarakat	Persen	24.6	24,8	70.110.573.700	25,5	363.565.765.112	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
		Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan dengan penduduk	Rasio	0,0545	0,0588		0,0714		
		Rasio ketercukupan tenaga perpustakaan dengan penduduk	Rasio	0,0001	0,0003		0,0006		
		Persentase Peningkatan Perpustakaan sesuai Standar	Persen	4,9	7,4		14,9		

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal RPD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Kondisi Akhir RPD		Perangkat Daerah Penanggung jawab	
					2023		Target	Rp		
					Target	Rp				
		Nilai Tingkat Kegemaran Membaca	Nilai	72,31	72,61		73,51			
	2.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Persentase Peningkatan Kemanfaatan Perpustakaan Lingkup Kabupaten Administrasi	Persen	0	13,5	1.499.269.403	15	6.688.769.283	KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU - KEP. SERIBU
	2.23.03	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Persentase Capaian Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam yang Menjadi Koleksi Daerah	Persen	0	25	1.536.250.000	32,5	7.652.653.750	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
			Persentase Capaian Naskah Kuno Milik Daerah Yang Dilestarikan	Persen	0	10		100		
2.24		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN					153.162.408.717		1.002.494.881.483	
	2.24.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks	4	4	129.374.981.968	4	543.136.950.475	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Persentase Ketersediaan Arsip Siap Layan Lingkup Kabupaten Administrasi	Persen	0	25	760.000.000	50	3.090.000.000	KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU - KEP. SERIBU
	2.24.02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Persentase Ketersediaan Arsip Siap Layan	Persen	31,92	36,91	23.027.426.749	45,45	456.267.931.008	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
			Persentase lembaga (OPD,BUMD) yang mengelola arsip sesuai dengan NSPK	Persen	50	61,11		100		
3		URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN					1.286.669.992.104		5.662.204.664.410	
	3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN					116.637.245.129		543.536.238.057	

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal RPD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Kondisi Akhir RPD		Perangkat Daerah Penanggung jawab	
					2023		Target	Rp		
					Target	Rp				
	3.25.02	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	Persentase Kawasan Pemanfaatan Ruang Perairan Pesisir yang sesuai dengan Dokumen Perencanaan Ruang Laut	Persen	0	18,46	17.711.821.578	18,53	66.431.887.405	DINAS KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN DAN PERTANIAN
	3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	Ton	115775	120000	64.676.247.939	124960	344.735.292.111	DINAS KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN DAN PERTANIAN
	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	Ton	3746.72	4435	10.537.380.034	4588	48.391.623.500	DINAS KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN DAN PERTANIAN
	3.25.05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan	Persen	69	70	7.850.000.000	73	13.850.000.000	DINAS KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN DAN PERTANIAN
	3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Jumlah Produksi dan Pemasaran Produk Olahan Hasil Perikanan	Ton	7310	14885,27	15.861.795.578	16265,54	70.127.435.041	DINAS KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN DAN PERTANIAN
			Angka Konsumsi Ikan	Kg/Kapita/Tahun	41,9	47		47,3		
	3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA					432.751.613.583		1.845.461.076.515	
	3.26.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks	4	4	168.535.218.813	4	700.578.135.594	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Jumlah Usaha Pariwisata yang Memiliki Perizinan	Usaha Pariwisata	14345	16345	90.834.291.315	19345	391.507.149.851	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
			Jumlah Pengunjung Event	Orang	87,693	296050		1365074		
			Nilai Kepuasan Pengunjung Objek Wisata	Nilai	0	70		85		

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal RPD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Kondisi Akhir RPD		Perangkat Daerah Penanggung jawab	
					2023		Target	Rp		
					Target	Rp				
	3.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Jumlah Pengunjung E-Tourism	Pengunjung Website dan Medsos	2945967	3122725	126.077.577.935	13064317	543.410.120.595	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
			Nilai Ketertarikan Masyarakat terhadap Pariwisata DKI Jakarta	Nilai	0	70		85		
	3.26.04	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Jumlah Produk/Jasa Ekonomi Kreatif yang Didaftarkan Kekayaan Intelektualnya	Produk	100	250	36.367.756.726	850	162.826.829.879	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	3.26.05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Jumlah Tenaga Kerja Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Tersertifikasi	Orang	3888	4688	10.936.768.794	7088	47.138.840.596	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
3.27		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN					132.897.102.424		645.125.425.927	
	3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Pemenuhan Sarana Pertanian	Persen	45	50	6.256.517.545	50	25.206.517.545	DINAS KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN DAN PERTANIAN
	3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase Prasarana Perternakan dalam Kondisi Baik	Persen	45	50	113.565.175.166	65	561.437.620.828	DINAS KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN DAN PERTANIAN
			Persentase Prasarana Pertanian dalam Kondisi Baik	Persen	55,5	65		80		
	3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN	Persentase Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (Rabies)	Persen	100	100	5.817.941.864	100	28.134.931.349	DINAS KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN DAN PERTANIAN

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal RPD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Kondisi Akhir RPD		Perangkat Daerah Penanggung jawab	
					2023		Target	Rp		
					Target	Rp				
	DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase Pengendalian Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persen	65	65		75			
		Persentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular	Persen	0	5		5			
	3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase Area Lahan yang Terkendali	Persen	85	85	372.992.565	85	1.572.992.565	DINAS KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN DAN PERTANIAN
	3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase Peningkatan Produksi dan Pemasaran Produk Pertanian dan Peternakan	Persen	0	2,5	6.884.475.284	2,5	28.773.363.640	DINAS KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN DAN PERTANIAN
			Persentase Sumber Daya Manusia Pertanian yang Meningkatkan Kapasitasnya	Persen	80	80		80		
3.28		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN					392.401.136.440		1.530.360.932.488	
	3.28.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai	0	3	345.762.503.599	3	1.326.006.406.463	DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA
	3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Persentase luas hutan yang dikelola	Persen	100	100	44.259.610.696	100	193.795.050.539	DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA
	3.28.04	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	Persentase penyelesaian laporan masyarakat terkait konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya	Persen	0	90	360.000.000	90	1.670.760.000	DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA

Kode	Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal RPD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Kondisi Akhir RPD		Perangkat Daerah Penanggung jawab
						2023		Target	Rp	
						Target	Rp			
	3.28.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Persentase peserta dengan tingkat pemahaman baik pada pendidikan, pelatihan dan pemberdayaan bidang kehutanan	Persen	0	80	1.519.022.145	80	6.888.715.486	DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA
	3.28.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	Jumlah DAS di Provinsi DKI Jakarta yang telah dikelola sesuai standar	Lokasi	0	1	500.000.000	4	2.000.000.000	DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA
3.29		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL					39.464.300.000		288.147.947.500	
	3.29.02	PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN	Persentase pemantauan pemanfaatan air tanah	Persentase	100	100	15.942.000.000	100	63.768.000.000	DINAS SUMBER DAYA AIR
	3.29.05	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN	Jumlah pengurangan emisi sebagai dampak dari pembangunan PLTS	Ton CO2	345.92	357,84	18.495.800.000	1431,38	190.230.686.000	DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, DAN ENERGI
	3.29.06	PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	Rasio elektrifikasi di Kepulauan Seribu	Persen	100	100	5.026.500.000	100	34.149.261.500	DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, DAN ENERGI
			Persentase Pembangunan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik	Persen	0	10		100		
			Persentase pembangkit dan instalasi ketenagalistrikan yang izinnya dikeluarkan oleh Pemprov DKI Jakarta yang memiliki Sertifikat Laik Operasi	Persen	60	60		60		
3.30		URUSAN PEMERINTAHAN					50.585.683.929		279.761.171.903	

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal RPD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Kondisi Akhir RPD		Perangkat Daerah Penanggung jawab	
					2023		Target	Rp		
					Target	Rp				
		BIDANG PERDAGANGAN								
	3.30.02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase Pemanfaatan SKA	Persen	58.38	60	600.000.000	63	2.720.500.000	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
			Persentase verifikasi permohonan Perizinan Berusaha Sektor Perdagangan melalui Online Single Submission Risk Based Approach (OSS-RBA)	Persen	0	70		85		
	3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Koefisien variasi harga barang kebutuhan pokok antar waktu	Nilai	14	14	30.000.000	14	130.000.000	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	3.30.05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Nilai ekspor non migas DKI Jakarta	USD	11203720000	11427794400	6.705.722.200	11774067998	31.121.256.730	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase keluhan/temuan konsumen yang ditindaklanjuti	Persen	100	100	18.970.110.955	100	86.822.384.942	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
			Persentase produk hasil uji yang sesuai syarat mutu SNI atau syarat teknis lainnya	Persen	76	80		83		
			Persentase Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	Persen	100	100		100		
	3.30.07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase pelaku usaha terfasilitasi dalam pemasaran produk dalam negeri yang meningkat omsetnya	Persen	15	20	24.279.850.774	50	158.967.030.231	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

Kode	Usuran/Bidang Usuran/Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal RPD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Kondisi Akhir RPD		Perangkat Daerah Penanggung jawab
					2023		Target	Rp	
					Target	Rp			
3.31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN					121.932.910.599		529.811.872.020	
	3.31.02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase Peningkatan Omzet Industri Kecil dan Menengah	Persen	2	3,5	121.762.267.099	5	529.019.915.536	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
		Persentase pelaku usaha IKM yang meningkatkan kapasitasnya	Persen	0	50		65		
	3.31.03 PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Persentase Industri Tertib Perizinan	Persen	50	55	170.643.500	70	791.956.484	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN					2.222.956.551.950		9.894.899.887.322	
4.01	SEKRETARIAT DAERAH					1.501.182.252.024		6.722.151.283.548	
	4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks	0	4	915.694.798.381	4	4.187.979.711.527	SEKRETARIAT DAERAH
		Indeks Kepuasan terhadap Pelayanan Administrasi Umum dan Kerumahtanggaan Kompleks Balaikota serta Rumah Dinas Pimpinan	Indeks	4	4		4		
		Indeks Kepuasan Layanan Keprotokolan, Administrasi dan Komunikasi Pimpinan Daerah	Indeks	4	4		4		
	4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks	4	4	83.470.833.605	4	356.467.348.692	BADAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal RPD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Kondisi Akhir RPD		Perangkat Daerah Penanggung jawab	
					2023		Target	Rp		
					Target	Rp				
	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks	4	4	24.451.453.673	4	103.222.832.187	BADAN PEMBINAAN BADAN USAHA MILIK DAERAH
	4.01.02	PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	Persentase Kerjasama Luar Negeri yang Terimplementasi	Persentase	0	50	8.786.326.934	60	22.326.829.970	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02	PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	Nilai PMPRB pada Lingkup Area Perubahan Penataan dan Penguatan Organisasi	Nilai	7,03	7,16	674.438.155	7,28	3.138.213.478	SEKRETARIAT DAERAH
Nilai PMPRB pada Lingkup Area Perubahan Penataan Tata Laksana dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik			Nilai	11,83	12,11	12,14				
Nilai PMPRB pada Lingkup Area Perubahan Manajemen Perubahan			Nilai	4,82	4,83	4,9				
	4.01.03	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	Persentase Kerjasama Dalam Negeri yang Terimplementasi	Persentase	0	50	91.332.298.120	60	464.856.044.121	SEKRETARIAT DAERAH
Indeks Kepuasan Layanan Administrasi dan Keuangan Perjalanan Dinas			Indeks	0	4	4				
Persentase Penyelesaian Masalah Pelaksanaan Pemerintahan dan Otonomi Daerah			Persen	90	91	94				
	4.01.03	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	Persentase Proyek Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha yang berjalan sesuai dengan tahapan yang diatur dalam ketentuan	%	100	100	2.346.439.700	100	10.889.826.648	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal RPD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Kondisi Akhir RPD		Perangkat Daerah Penanggung jawab
					2023		Target	Rp	
					Target	Rp			
4.01.04	PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT	Indeks efektivitas fasilitasi, koordinasi, sinkronisasi, evaluasi dan capaian kinerja kebijakan bidang kesejahteraan rakyat di bawah Koordinasi Biro Kesejahteraan Sosial	Indeks	4	4	358.926.230.968	4	1.503.797.891.356	SEKRETARIAT DAERAH
		Indeks efektivitas fasilitasi, koordinasi, sinkronisasi, evaluasi dan capaian kinerja kebijakan bidang kesejahteraan rakyat di bawah koordinasi Biro Pendidikan dan Mental Spiritual	Indeks	4	4		4		
4.01.05	PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM	Persentase Produk Hukum Daerah yang Diundangkan	Persentase	100	100	4.084.984.021	70	19.100.586.084	SEKRETARIAT DAERAH
		Persentase Penanganan Perkara Litigasi yang diselesaikan	Persen	100	100		100		
		Persentase Penanganan Perkara Non Litigasi yang diselesaikan	Persen	100	100		100		
		Nilai Capaian Pelaksanaan Aksi HAM Daerah	Nilai	98	91		94		
4.01.06	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase Kebijakan sesuai dengan peraturan	%	100	100	148.500.000	100	640.053.563	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.06	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Rata-rata nilai ROE	Nilai	3,6	7	6.240.800.000	10	27.869.884.400	BADAN PEMBINAAN BADAN USAHA MILIK DAERAH
		Pertumbuhan Laba Bersih	Persen	0	12		15		
		Pertumbuhan Pendapatan Usaha	Persen	0	10		13		
4.01.07	PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	Persentase pengadaan Barang/Jasa tepat waktu	Persentase	80	82,5	4.764.849.322	90	20.776.460.915	BADAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal RPD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Kondisi Akhir RPD		Perangkat Daerah Penanggung jawab
					2023		Target	Rp	
					Target	Rp			
4.01.08	PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	Persentase pelaksanaan kebijakan sesuai dengan peraturan	%	100	100	260.299.145	100	1.085.600.607	SEKRETARIAT DAERAH
		Persentase Upaya Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup	%	80	80		80		
		Persentase Upaya Pengendalian Pemenuhan Kewajiban Surat Izin Penunjukan Penggunaan Tanah (SIPPT)	%	30	30		45		
4.02	SEKRETARIAT DPRD					721.774.299.926		3.172.748.603.774	
4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Indeks	4	4	313.513.994.206	4	1.264.983.489.365	SEKRETARIAT DPRD
4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Indeks Kepuasan Layanan Sekretariat DPRD	Indeks	4	4	408.260.305.720	4	1.907.765.114.409	SEKRETARIAT DPRD
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN					8.594.041.344.635		53.704.454.373.256	
5.01	PERENCANAAN					152.576.533.000		596.488.303.201	
5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks	3	4	112.702.100.000	4	442.607.838.201	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal RPD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Kondisi Akhir RPD		Perangkat Daerah Penanggung jawab
					2023		Target	Rp	
					Target	Rp			
5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Nilai Komponen Perencanaan Pembangunan Lingkup Provinsi pada Indeks Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	Nilai	0	75	38.014.599.000	90	146.098.966.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
		Nilai Komponen Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan pada Indeks Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	Nilai	0	75		90		
5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Nilai Komponen Perencanaan Pembangunan Daerah Lingkup Perangkat Daerah	Nilai	0	75	1.859.834.000	90	7.781.499.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
		Nilai Komponen Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Lingkup Perangkat Daerah	Nilai	0	75		90		
5.02	KEUANGAN					5.601.663.716.393		23.509.114.363.948	
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks	4	4	129.482.594.667	4	540.527.897.602	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks	4	4	169.221.416.371	4	658.148.267.217	BADAN PENGELOLAAN ASET DAERAH
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN	Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks	4	4	1.246.169.157.381	4	5.566.406.067.607	BADAN PENDAPATAN DAERAH

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal RPD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Kondisi Akhir RPD		Perangkat Daerah Penanggung jawab	
					2023		Target	Rp		
					Target	Rp				
		PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								
	5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase Akurasi dan Penyelesaian Dokumen APBD	%	100	100	3.875.304.09 4.942	100	15.989.942.3 52.329	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
			Persentase pengelolaan pelaksanaan APBD	%	100	100		100		
			Persentase Laporan Keuangan sesuai SAP dan tepat waktu	%	100	100		100		
	5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase Penyelesaian Penyusunan Standar Harga tepat waktu	%	100	100	1.385.136.50 0	100	6.428.418.49 7	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase pemanfaatan BMD	%	0	10	83.506.896.3 29	25	331.947.585. 316	BADAN PENGELOLAAN ASET DAERAH
			Indeks Kepatuhan Tertib Aset	Indeks	0	4		4		
			Persentase aset daerah yang teridentifikasi dan tercatat dalam e-aset	%	100	100		100		
	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase realisasi penerimaan Pajak Daerah	%	92,83	100	96.594.420.2 03	100	415.713.775. 380	BADAN PENDAPATAN DAERAH
			Persentase realisasi penerimaan Retribusi Daerah	%	50,56	100		100		
	5.03	KEPEGAWAIAN					2.630.235.42 6.075		28.711.872.4 39.581	
	5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai	4	4	2.578.407.43 9.400	4	28.496.859.6 93.291	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase Pegawai Tugas Belajar yang lulus tepat waktu	persentase	80	80	19.913.092.1 99	95	79.652.368.7 96	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal RPD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Kondisi Akhir RPD		Perangkat Daerah Penanggung jawab	
					2023		Target	Rp		
					Target	Rp				
	5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Indeks Kepuasan Terhadap Layanan KORPRI Kabupaten Administrasi	Indeks	0	3	39.000.000	4	156.000.000	KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU - KEP. SERIBU
	5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Nilai Aspek Perencanaan Kebutuhan, Pengadaan, Sistem Informasi serta Perlindungan dan Pelayanan pada Indeks Sistem Merit	Nilai	110	110	31.875.894.476	110	135.204.377.494	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
			Nilai Aspek Promosi dan Mutasi pada Indeks Sistem Merit	Nilai	17,5	25		25		
			Nilai Aspek Pengembangan Karir pada Indeks Sistem Merit	Nilai	42,03	50,03		69,53		
			Nilai Aspek Manajemen Kinerja serta Penggajian, Penghargaan dan Disiplin pada Indeks Sistem Merit	Nilai	110	110		110		
	5.04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN					208.277.669.167		880.262.661.526	
	5.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks	4	4	150.268.926.780	4	645.934.356.046	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Nilai Sistem Merit pada Sub Aspek Pelaksanaan Pelatihan Dasar (Latsar) bagi CPNS	Nilai	6	6	58.008.742.387	6	234.328.305.480	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
			Nilai Sistem Merit pada Sub Aspek Ketersediaan strategi dan program untuk mengatasi kesenjangan kompetensi dan kinerja dalam rangka peningkatan kapasitas ASN	Nilai	10	10		10		

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal RPD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Kondisi Akhir RPD		Perangkat Daerah Penanggung jawab
					2023		Target	Rp	
					Target	Rp			
		Nilai Sistem Merit pada Sub Aspek Penyelenggaraan Diklat untuk mengatasi kesenjangan	Nilai	7,5	7,5		7,5		
		Nilai Sistem Merit pada Sub Aspek Pelaksanaan peningkatan kompetensi melalui praktik kerja dan pertukaran pegawai	Nilai	7,5	7,5		7,5		
		Persentase Diklat yang dilaksanakan BPSDM sesuai dengan ketentuan	Persen	0	60		66		
5.05		PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN				1.288.000.00 0		6.716.605.00 0	
	5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persen	0	40	1.288.000.00 0	100	6.716.605.00 0	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
6		UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN				250.825.935.647		1.322.664.344.880	
6.01		INSPEKTORAT DAERAH				250.825.935.647		1.322.664.344.880	
	6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks	4	4	170.320.271.874	4	894.882.818.063	INSPEKTORAT
	6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	%	85	91	63.358.296.817	95	348.200.596.774	INSPEKTORAT
	6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Nilai	2	3,25	17.147.366.956	4	79.580.930.043	INSPEKTORAT

Kode	Kode	Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal RPD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Kondisi Akhir RPD		Perangkat Daerah Penanggung jawab
							2023		Target	Rp	
							Target	Rp			
7			UNSUR KEWILAYAHAN					4.954.431.51 4.221		21.425.221.6 48.626	
	7.01		KECAMATAN ADMINISTRASI					2.807.975.38 6.316		12.409.158.9 01.201	
		1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN KECAMATAN	Indeks Kepuasan Terhadap Pengelolaan Kelurahan (penyelenggaraan RT, RW, LMK dan FKDM)	Indeks	4	4	40.740.730.6 67	4	186.178.374. 784	KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU - KEP. SERIBU
				Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PPSU	Indeks	4	4		4		
		7.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN KECAMATAN	Indeks Kepuasan Terhadap Pengelolaan Kelurahan (penyelenggaraan RT, RW, LMK dan FKDM)	Indeks	4	4	370.541.402. 172	4	1.645.190.93 4.455	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT
				Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PPSU	Indeks	4	4		4		
		7.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN KECAMATAN	Indeks Kepuasan Terhadap Pengelolaan Kelurahan (penyelenggaraan RT, RW, LMK dan FKDM)	Indeks	4	4	405.023.425. 439	4	1.750.730.60 2.261	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA
				Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PPSU	Indeks	4	4		4		
		7.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN KECAMATAN	Indeks Kepuasan Terhadap Pengelolaan Kelurahan (penyelenggaraan RT, RW, LMK dan FKDM)	Indeks	4	4	490.192.319. 616	4	2.076.925.35 7.078	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
				Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PPSU	Indeks	4	4		4		

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal RPD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Kondisi Akhir RPD		Perangkat Daerah Penanggung jawab	
					2023		Target	Rp		
					Target	Rp				
	7.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN KECAMATAN	Indeks Kepuasan Terhadap Pengelolaan Kelurahan (penyelenggaraan RT, RW, LMK dan FKDM)	Indeks	4	4	466.200.388.286	4	2.221.599.197.846	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
			Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PPSU	Indeks	4	4		4		
	7.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN KECAMATAN	Indeks Kepuasan Terhadap Pengelolaan Kelurahan (penyelenggaraan RT, RW, LMK dan FKDM)	Indeks	4	4	594.176.982.575	4	2.633.506.336.858	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
			Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PPSU	Indeks	4	4		4		
	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PKK, Posyandu, Jumantik dan RPTRA	Indeks	4	4	124.947.446.172	4	548.135.015.955	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PKK, Posyandu, Jumantik, dan RPTRA	Indeks	4	4	65.764.225.685	4	284.715.587.294	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PKK, Posyandu, Jumantik, dan RPTRA	Indeks	4	4	97.352.396.618	4	407.394.396.821	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PKK, Posyandu, Jumantik, dan RPTRA	Indeks	4	4	84.747.324.263	4	372.552.212.905	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA
	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PKK, Posyandu, Jumantik dan RPTRA	Indeks	4	4	48.638.193.986	4	197.842.101.885	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal RPD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Kondisi Akhir RPD		Perangkat Daerah Penanggung jawab	
					2023		Target	Rp		
					Target	Rp				
	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PKK, Posyandu, Jumantik, dan RPTRA	Indeks	4	4	4.746.751.937	4	20.214.532.753	KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU - KEP. SERIBU
	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Ketertiban Umum	Indeks	4	4	565.549.824	4	2.437.590.432	KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU - KEP. SERIBU
	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Ketertiban Umum	Indeks	4	4	2.810.500.000	4	11.906.893.225	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT
	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Ketertiban Umum	Indeks	4	4	1.901.722.036	4	8.083.781.655	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA
	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Ketertiban Umum	Indeks	4	4	2.655.902.121	4	11.201.066.533	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Ketertiban Umum	Indeks	4	4	1.930.532.909	4	8.392.686.441	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Ketertiban Umum	Indeks	4	4	5.039.592.010	4	22.152.232.020	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
	7.02		KOTA ADMINISTRASI				2.007.003.450.532		8.422.294.301.512	
	7.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase gedung kantor dan rumah dinas di lingkungan kota Administrasi dalam kondisi baik	Persen	77	80	339.065.030.954	90	1.717.561.577.170	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT
			Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks	4	4		4		

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal RPD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Kondisi Akhir RPD		Perangkat Daerah Penanggung jawab
					2023		Target	Rp	
					Target	Rp			
7.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Gedung Kantor dan Rumah Dinas di Lingkungan Kota Administrasi dalam Kondisi Baik	Persen	90	90	299.790.493.824	100	1.285.998.123.351	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks	4	4	4			
7.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase gedung kantor dan rumah dinas di lingkungan kota Administrasi dalam kondisi baik	Persen	36	44	565.041.308.541	62	2.236.399.566.788	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks	4	4	4			
7.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Gedung Kantor dan Rumah Dinas di Lingkungan Kota Administrasi dalam Kondisi Baik	Persen	41.74	51,3	348.687.806.139	66,09	1.362.342.423.441	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks	4	4	4			
7.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks	4	4	439.694.659.433	4	1.757.051.002.660	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
		Persentase Gedung Kantor dan Rumah Dinas di Lingkungan Kota Administrasi dalam Kondisi Baik	Persen	40	15	60			
7.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KOTA ADMINISTRASI	Nilai Efektifitas Koordinasi Bidang Pemerintahan	Nilai	0	85	2.574.044.194	88,5	11.425.543.860	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
		Nilai Efektifitas Koordinasi Bidang Perekonomian dan Pembangunan	Nilai	0	85	88,5			

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal RPD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Kondisi Akhir RPD		Perangkat Daerah Penanggung jawab
					2023		Target	Rp	
					Target	Rp			
		Nilai Efektifitas Koordinasi Bidang Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat	Nilai	0	85		88,5		
7.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KOTA ADMINISTRASI	Nilai Efektifitas Koordinasi Bidang Pemerintahan	Nilai	0	85	3.053.847.395	88,5	12.645.793.580	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
		Nilai Efektifitas Koordinasi Bidang Perekonomian dan Pembangunan	Nilai	0	85		88,5		
		Nilai Efektifitas Koordinasi Bidang Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat	Nilai	0	85		88,5		
7.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KOTA ADMINISTRASI	Nilai Efektifitas Koordinasi Penyelesaian Permasalahan Pengelolaan Kabupaten Administrasi	Nilai	0	85	1.176.919.968	88,5	5.031.334.097	KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU - KEP. SERIBU
7.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KOTA ADMINISTRASI	Nilai Efektifitas Koordinasi Bidang Pemerintahan	Nilai	0	85	2.885.349.929	88,5	11.736.464.418	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
		Nilai Efektifitas Koordinasi Bidang Perekonomian dan Pembangunan	Nilai	0	85		88,5		
		Nilai Efektifitas Koordinasi Bidang Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat	Nilai	0	85		88,5		
7.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KOTA ADMINISTRASI	Nilai Efektifitas Koordinasi Bidang Pemerintahan	Nilai	0	85	2.463.065.549	88,5	11.472.577.287	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA
		Nilai Efektifitas Koordinasi Bidang Perekonomian dan Pembangunan	Nilai	0	85		88,5		
		Nilai Efektifitas Koordinasi Bidang Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat	Nilai	0	85		88,5		
7.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KOTA ADMINISTRASI	Nilai Efektifitas Koordinasi Bidang Pemerintahan	Nilai	0	85	2.570.924.606	88,5	10.629.894.860	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT
		Nilai Efektifitas Koordinasi Bidang Perekonomian dan Pembangunan	Nilai	0	85		88,5		

Kode	Kode	Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal RPD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Kondisi Akhir RPD		Perangkat Daerah Penanggung jawab
							2023		Target	Rp	
							Target	Rp			
				Nilai Efektifitas Koordinasi Bidang Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat	Nilai	0	85		88,5		
	7.03		KABUPATEN ADMINISTRASI					139.452.677.373		593.768.445.913	
		7.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks	4	4	138.264.923.293	4	588.972.315.386	KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU - KEP. SERIBU
				Persentase Gedung Kantor dan Rumah Dinas di Lingkungan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Dalam Kondisi Baik	Persen	35,71	46,43		75		
		7.03.02	PROGRAM PENINGKATAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN, KESEJAHTERAAN RAKYAT DAN PENGEMBANGAN	Nilai Efektifitas Koordinasi Bidang Pemerintahan dan Kesra	Nilai	0	85	1.187.754.080	88,5	4.796.130.527	KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU - KEP. SERIBU
				Nilai Efektifitas Koordinasi Bidang Administrasi, Ekonomi dan Pembangunan	Nilai	0	85		88,5		
8			UNSUR PEMERINTAHAN UMUM					193.395.836.431		882.470.814.901	
	8.01		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK					193.395.836.431		882.470.814.901	
		8.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks	4	4	60.683.530.035	4	279.717.053.176	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase Tingkat Pemahaman Masyarakat terkait Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan Lingkup Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu	Persen	50	50,5	438.845.436	52	1.781.888.444	KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU - KEP. SERIBU

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal RPD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Kondisi Akhir RPD		Perangkat Daerah Penanggung jawab
					2023		Target	Rp	
					Target	Rp			
8.01.02	PROGRAM Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase Tingkat Pemahaman Masyarakat terkait Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persen	50	50,5	20.463.545.120	52	94.971.312.902	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.03	PROGRAM Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	Persentase Tingkat Pemahaman Masyarakat terkait Pendidikan Politik, Etika dan Budaya Politik Serta Peningkatan Peran Partai Politik Lingkup Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu	Persen	50	50,5	8.000.000	52	402.155.310	KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU - KEP. SERIBU
8.01.03	PROGRAM Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	Persentase Tingkat Pemahaman Masyarakat terkait Pendidikan Politik, Etika dan Budaya Politik Serta Peningkatan Peran Partai Politik	Persen	50	50,5	54.393.525.120	52	256.184.249.262	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.04	PROGRAM Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Tingkat Pemahaman Organisasi Kemasyarakatan terkait Peran Organisasi Kemasyarakatan Dalam Pembangunan	Persen	50	50,5	23.688.788.620	52	97.119.667.985	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal RPD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Kondisi Akhir RPD		Perangkat Daerah Penanggung jawab
					2023		Target	Rp	
					Target	Rp			
8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase Tingkat Pemahaman Masyarakat terkait Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Persen	50	50,5	4.431.829.280	52	20.568.119.689	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase Tingkat Pemahaman Masyarakat terkait Kewaspadaan Dini, Penanganan Konflik, dan Pemantauan Orang Asing	Persen	50	50,5	28.868.172.820	52	130.022.623.874	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase Tingkat Pemahaman Masyarakat terkait Kewaspadaan Dini, Penanganan Konflik, dan Pemantauan Orang Asing Lingkup Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu	Persen	50	50,5	419.600.000	52	1.703.744.259	KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU - KEP. SERIBU

Sumber: Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2026

Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Bab ini akan menjabarkan mengenai indikator kinerja Daerah, yang penetapannya bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan terhadap pencapaian visi dan misi Gubernur/Wakil Gubernur dari sisi keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya dalam pemenuhan kinerja dalam aspek kesejahteraan, layanan, dan daya saing. Indikator kinerja daerah secara teknis pada dasarnya dirumuskan dengan mengambil indikator dari program yang telah ditetapkan (*outcomes*) atau komposisinya (*impact*). Suatu indikator kinerja daerah dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian

kinerja program (*outcome*) terhadap tingkat capaian indikator kinerja Daerah berkenaan setelah program dan kegiatan prioritas ditetapkan.

Selain itu, penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah bertujuan untuk memberikan panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir tahun 2022. IKK dimaksud merupakan Indikator Kinerja Daerah terhadap capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan Daerah.



Foto: @omroy02_

6.1 Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar hasil berbagai Program dan Kegiatan sebagai penjabaran tugas dan

fungsi organisasi. Lebih lanjut penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat dilihat pada Tabel 6.1.

6.2 Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

Target per tahun terhadap indikator kinerja daerah terhadap capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah 3 (tiga) aspek, yaitu aspek kesejahteraan

masyarakat, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing daerah dapat dilihat pada Tabel 6.2.

Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Penentuan capaian indikator tahunan pada aspek kesejahteraan masyarakat dapat diketahui dari gambaran pencapaian

indikator kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, kesejahteraan sosial dan indikator seni budaya dan olahraga.

Aspek Daya Saing

Daya saing menjadi isu utama dalam pembangunan daerah, begitu pula dengan DKI Jakarta. Berdaya saing global menjadi visi jangka panjang Provinsi DKI Jakarta yang tertuang dalam RPJPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2005 – 2025.

Konsep daya saing pada umumnya dikaitkan dengan kemampuan suatu perusahaan, kota, daerah, wilayah atau negara dalam mempertahankan atau meningkatkan keunggulan kompetitif secara berkelanjutan (Porter, 2000). Sementara itu, kerangka daya saing menurut *Asia Competitiveness Institute* (ACI) meliputi stabilitas ekonomi makro, kualitas hidup dan infrastruktur, kondisi finansial, bisnis dan tenaga kerja serta pemerintahan dan

institusi publik, seperti gambar dibawah ini.

Stabilitas ekonomi makro ditopang oleh komponen kedinamisan ekonomi regional, keterbukaan dalam perdagangan dan jasa serta daya tarik terhadap investasi. Kualitas hidup dan infrastruktur terdiri dari komponen kualitas hidup, pendidikan dan stabilitas sosial, Infrastruktur teknologi serta infrastruktur fisik. Kondisi Finansial Bisnis dan Tenaga Kerja meliputi kinerja produktivitas, fleksibilitas pasar tenaga kerja dan kemampuan finansial dan efisiensi bisnis. Pemerintah dan institusi publik terdiri dari komponen kebijakan dan ketahanan fiskal publik, institusi pemerintahan dan kepemimpinan serta persaingan regulasi dan penegakan hukum.

GAMBAR 6.1

Kerangka Indeks Daya Saing



Sumber: Asia Competitiveness Institute, 2018

Aspek Pelayanan Umum

Penentuan capaian indikator tahunan pada aspek kesejahteraan masyarakat dapat diketahui dari gambaran pencapaian indikator

kesejahteraan dan pemerataan ekonomi kesejahteraan sosial dan indikator seni budaya dan olahraga.

TABEL 6.1

Indikator Kinerja Utama Tahun 2023-2026

No.	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian Tahun 2023	Kondisi Akhir
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(9)
A	INDIKATOR TUJUAN				
1	Indeks Kota Layak Huni	Indeks	62,6 (2017)	65	68
2	Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif	Indeks	7,18 (2020)	7.69	8.04
3	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	81,11 (2021)	81.55	82.11
4	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	76,54 (2020)	82	85
B	INDIKATOR SASARAN				
1	Pemenuhan Layanan Dasar Perkotaan	Persen	68,76 (2021)	69,06	70,1
2	Persentase Perjalanan Penduduk Menggunakan Moda Transportasi Publik	Persen	14,76 (2021)	21	24
3	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	54,43 (2021)	54,93	56,43
4	Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	Persen	18,5 (2022)	19,3	22,3
5	Indeks Risiko Bencana	Indeks	64,02 (2020)	63,3	60,02
6	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	3,56 (2021)	5,40- 6,20	5,60- 6,40
7	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	8,51 (2021)	8,21	7,31
8	Tingkat Kemiskinan	Persen	4,67 (2021)	4,13	2,91

No.	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian Tahun 2023	Kondisi Akhir
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(9)
10	Tingkat Kemiskinan Ekstrem	Persen	1,37 (2021)	1,06	0,68
11	Indeks Daya Saing Daerah	Indeks	3,962 (2021)	3,96	4,03
12	Indeks Dimensi Pendidikan	Tahun	12,12 (2021)	12,14	12,20
13	Angka Harapan Hidup	Tahun	73,01(2021)	73,21	73,53
14	Indeks Pembangunan Gender	Indeks	94,63 (2021)	94,72	94,89
15	Indeks Demokrasi	Indeks	76,07 (2020)	76,82	77,57
16	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	88,5 (2021)	88,5	90
17	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks	3,47 (2021)	3,50	3,53
18	Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Predikat	74,41 (BB) (2020)	82 (A)	90,5 (AA)
19	Indeks Survey Penilaian Integritas	Indeks	68,7	70	85
20	Opini Laporan Keuangan Daerah	Opini	WTP (2020)	WTP	WTP
21	Indeks Sistem Merit	Indeks	310,5 (2021)	326	345,5

Sumber: Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2026

TABEL 6.2

Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

No.	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal	Target Capaian Tahun 2023	Kondisi Kinerja Akhir
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(9)
A. ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT					
1.	Pertumbuhan PDRB	Persen	3,56 (2021)	5,4 - 6,2	5,6 - 6,4
2.	Laju Inflasi	Persen	1,53	2,5 + 1	2,5 + 1
3.	Rasio Gini	Keofisien	0,411 (2021)	0,411	0,409
4.	Tingkat Kemiskinan	Persen	4,67 (2021)	4,13	2,91
5.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	81,11 (2021)	81,55	82,11
6.	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Persen	8,51 (2021)	8,21	7,31
B. ASPEK DAYA SAING DAERAH					
1.	Realisasi Nilai Investasi	Triliun Rp	103.3 (2021)	114	132
2.	Nilai Aspek Ekosistem Inovasi	Nilai	4,189 (2021)	4,19	4,22
3.	Nilai Budaya Literasi	Nilai	71.2 (2018)	71,3	71,6
C. ASPEK PELAYANAN UMUM					
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB PELAYANAN DASAR					
1 PENDIDIKAN					
1.1	Jumlah Anak Usia 16-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah (APS)	Persen	80.97	100	100
1.2	Jumlah Anak Usia 4-18 disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus (APS)	Persen	38.65	100	100
1.3	Rata-rata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	Nilai	2.15	2.3	2.36

No.	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal	Target Capaian Tahun 2023	Kondisi Kinerja Akhir
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(9)
1.4	Rata-rata kompetensi Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional	Nilai	1.9	2.29	2.35
1.5	Tingkat Penyerapan Lulusan SMK	Persen	22.54	30	55
1.6	Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK	Persen	71.2	77	80
1.7	Persentase anak usia 5-6 tahun telah mengikuti pendidikan	Persen	36.38	100	100
1.8	Jumlah Anak Usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS)	Persen	99.1	100	100
1.9	Persentase guru profesional	Persen	86.3	87.4	90.7
1.10	Persentase guru produktif SMK yang memiliki pengalaman magang di dunia kerja	Persen	6.75	17.42	49.72
1.11	Persentase Satuan Pendidikan Terakreditasi A	Persen	72.18	72.37	72.94
1.12	Rata-rata kompetensi Numerasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional	Nilai	1.45	1.65	1.8
1.13	Rata-rata kompetensi Numerasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional	Nilai	1.74	1.94	2.09
1.14	Rata-rata kompetensi Literasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional	Nilai	1.34	1.54	1.69
1.15	Rata-rata kompetensi Literasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional	Nilai	1.51	1.81	1.96
1.16	Rata-rata kompetensi Literasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional	Nilai	1.55	1.85	2
1.17	Rata-rata kompetensi Numerasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional	Nilai	1.57	1.87	2.02
1.18	Rata-rata kompetensi Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional	Nilai	1.81	2.11	2.17
1.19	Rata-rata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	Nilai	1.98	2.28	2.34

No.	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal	Target Capaian Tahun 2023	Kondisi Kinerja Akhir
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(9)
1.20	Rata-rata kompetensi Numerasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional	Nilai	1.7	1.8	1.95
1.21	Rata-rata kemampuan Numerasi SD berdasarkan Asesmen Nasional	Nilai	1.7	1.8	1.95
1.22	Rata-rata kemampuan Literasi SD berdasarkan Asesmen Nasional	Nilai	1.7	1.8	1.95
1.23	Rata-rata kompetensi Literasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional	Nilai	1.7	1.8	1.95
2.	KESEHATAN				
2.1	Persentase Penerapan Sistem Informasi Kesehatan Terintegrasi	Persen	100	100	100
2.2	Persentase Kategori Fasilitas Pelayanan Kesehatan Milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang Memiliki Ketersediaan Obat Sesuai Standar	Persen	67	67	100
2.3	Persentase Pemenuhan Kategori Standar Alat Kesehatan yang Aman, Mutu, Selamat dan Laik Pakai di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Persen	0	100	100
2.4	Indeks Keluarga Sehat (IKS)	Indeks	0.49	0.55	0.64
2.5	Jumlah Kabupaten/Kota yang Menerapkan Kebijakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)	Kabupaten/ Kota	0	1	3
2.6	Persentase Penyiapan Layanan Kegawatdaruratan Maternal dan Neonatal di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Persen	0	100	100
2.7	Angka Kematian Ibu (AKI)	Rate	76.49	76	70
2.8	Angka Kematian Neonatal (AKN)	Rate	1.33	1.31	1.28
2.9	Jumlah Puskesmas Kecamatan Terakreditasi Paripurna	Puskesmas	15	17	25
2.10	Jumlah RSUD/RSKD Terakreditasi Paripurna	RSUD/RSKD	18	19	22
2.11	Rata-Rata Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) SKPD/UKPD Urusan Kesehatan	Poin	88	88	88

No.	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal	Target Capaian Tahun 2023	Kondisi Kinerja Akhir
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(9)
2.12	Persentase UKPD yang mencapai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Sesuai Target	Persen	84	100	100
2.13	Jumlah RSUD/RSKD Kelas A, B, dan C yang Memiliki Layanan Unggulan	RSUD/RSKD	2	8	12
2.14	Jumlah Layanan Unggulan di Masing-masing RSUD/RSKD Kelas A dan B	Layanan	1	1	4
2.15	Persentase Pemenuhan Tempat Tidur NICU/PICU di Masing-masing RSUD/RSKD	Persen	4	4	7
2.16	Persentase Pemenuhan Tempat Tidur ICU di Masing-masing RSUD/RSKD	Persen	6	6	9
2.17	Persentase Ibu Hamil Dilakukan Penapisan Tripel Eliminasi (HIV, Sifilis, dan Hepatitis B)	Persen	0	60	90
2.18	Persentase Bayi Baru Lahir dari Ibu Hamil Penderita HIV/Sifilis/Hepatitis B yang Diberikan Tata Laksana Sesuai Standar	Persen	0	10	50
2.19	Jumlah Kelurahan yang Memanfaatkan Aplikasi SmartDB dalam Pengendalian Vektor Dengue	Kelurahan	0	10	200
2.20	Jumlah Penyediaan Klinik Upaya Berhenti Merokok (UBM) di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Klinik	3	10	25
2.21	Jumlah Puskesmas Kecamatan yang Membina Agent of Change (AoC)	Puskesmas Kecamatan	3	10	44
2.22	Jumlah RSUD/RSKD yang Menyelenggarakan Pelayanan Rawat Inap Rujukan/Subrujukan Tuberkulosis Resisten Obat Sesuai Standar	RSUD/RSKD	1	2	7
2.23	Jumlah Laboratorium Kesehatan Daerah Sebagai Laboratorium Rujukan Pemeriksaan Sampel Campak dan Rubella Tingkat Provinsi	Laboratorium	0	1	1
2.24	Persentase Cakupan Surveilans Aktif Rumah Sakit	Persen	0	70	85

No.	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal	Target Capaian Tahun 2023	Kondisi Kinerja Akhir
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(9)
2.25	Persentase Pembangunan dan/atau Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Fasilitas Pendukungnya yang Dilaksanakan Sesuai Standar	Persen	100	100	100
2.26	Persentase Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	Persen	98.39	98	98
2.27	Jumlah Kota/Kabupaten yang Melaksanakan Tatanan Kehidupan Masyarakat Sehat Mandiri	Kabupaten/ Kota	6	6	6
2.28	Jumlah Sertifikasi/Akreditasi Internasional dan/atau Nasional yang dilaksanakan dan/atau dicapai oleh Laboratorium Kesehatan Milik Pemerintah Daerah	Sertifikasi	3	3	4
2.29	Jumlah Rumah Sakit Daerah Tujuan Wisata Medis	Rumah Sakit Daerah	0	0	2
2.30	Persentase UKPD yang Mengimplementasikan Hospitality dalam Pelayanan	Persen	0	100	100
2.31	Persentase Implementasi Hospitality dalam Pelayanan	Persen	0	100	100
2.32	Rata-Rata Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) di Dinas Kesehatan dan Unit Kerja Dinas Kesehatan sesuai Analisis Beban Kerja (ABK)	Persen	0	60	65
2.33	Persentase Pemenuhan Jumlah dan Jenis Tenaga Kesehatan sesuai Standar di Puskesmas Kecamatan	Persen	0	85	100
2.34	Jumlah Puskesmas Kecamatan dengan Jenis Tenaga Kesehatan sesuai Standar	Puskesmas Kecamatan	30	30	44
2.35	Persentase Sarana Kefarmasian yang Memenuhi Standar	Persen	39	40	55
2.36	Persentase Sarana Alat Kesehatan yang Memenuhi Ketentuan Cara Pengelolaan dan Distribusi Alat Kesehatan yang Baik	Persen	0	40	55
2.37	Persentase Tempat Pengelolaan Pangan (TPP) yang Memenuhi Syarat Sesuai Standar	Persen	67	67	73

No.	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal	Target Capaian Tahun 2023	Kondisi Kinerja Akhir
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(9)
2.38	Proporsi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Aktif	Persen	65.82	60	67
2.39	Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Melaksanakan Revitalisasi Pelayanan	Unit	0	44	176
2.40	Jumlah Rumah Sakit Daerah yang dilakukan Peningkatan Kelas Rumah Sakit atau Perubahan Jenis Rumah Sakit	Rumah Sakit Daerah	0	2	5
2.41	Persentase Pemenuhan Kriteria Penyelenggara Pelatihan Bidang Kesehatan Berskala Nasional	Persen	0	50	100
3.	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				
3.1	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Penyelenggaraan Jalan	Indeks	0	4	4
3.2	Indeks Kepuasan Pelayanan laboratorium di bidang Ke Bina Margaan	Indeks	4	4	4
3.3	Persentase kesesuaian panduan rancang kota sistem pusat pelayanan dengan pedoman pengembangan kawasan berorientasi transit	Persen	0	90	90
3.4	Persentase pelanggaran penyelenggaraan ruang dan bangunan yang terselesaikan tepat waktu	Persen	90	90	90
3.5	Persentase penyelenggaraan bangunan gedung yang memenuhi standar teknis keselamatan bangunan	Persen	0	96	99
3.6	Jumlah kapasitas pengolahan air minum yang beroperasi	liter/detik	21034	21682	25232
3.7	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Penyelenggaraan Jalan Lingkup Kabupaten Administrasi	Indeks	0	4	4
3.8	Jumlah debit air limbah yang terolah	m ³ /hari	1285	1295.6	5636.7
3.9	Persentase penanganan genangan yang kurang dari 2 jam	Persen	85	86	89

No.	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal	Target Capaian Tahun 2023	Kondisi Kinerja Akhir
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(9)
3.10	Peningkatan kapasitas tampungan air	m3	151000000 0	233600	2783100
3.11	Persentase luas kawasan/sistem polder yang tertangani	Persen	10.53	1.36	12.12
3.12	Persentase Pantai di Kepulauan Seribu yang bebas dari abrasi	Persen	52	53.2	56.8
3.13	Persentase pembangunan tanggul kritis di muara kali dan pantai Jakarta	Persen	37	42	75
4.	PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN				
4.1	% Unit Hunian Layak yang Terbangun	Persen	0.98	1.32	1.95
4.2	% Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha yang Terselenggara	Persen	80.39	80.94	84.88
4.3	% PSU Kawasan Permukiman yang ditingkatkan	%	5.15	6.96	14.19
5.	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT				
5.1	Persentase masyarakat dan aparatur yang dilatih dalam penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Persen	0.7	0.84	1.08
5.2	Persentase pendampingan yang dilaksanakan pada pasca bencana	Persen	100	100	100
5.3	Persentase pengungsi terlayani kebutuhan dasarnya dalam waktu 1 kali 24 jam	Persen	100	100	100
5.4	Persentase Penyelesaian Pelanggaran Perda/Perkada terkait Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persen	93.92	94	94.75
5.5	Persentase Pencegahan, Pemadaman Kebakaran dan Penyelamatan Berhasil	persen	51	53	60
6.	SOSIAL				

No.	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal	Target Capaian Tahun 2023	Kondisi Kinerja Akhir
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(9)
6.1	Persentase Potensi Sumber Daya dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang Mampu Melakukan Pemberdayaan Sosial	Persen	0	79.5	80.3
6.2	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial Penerima Layanan Perlindungan dan Jaminan Sosial yang Tepat Sasaran	Persen	0	100	100
6.3	Indeks Pencapaian SPM Rehabilitasi Sosial	Indeks	0	100	100
6.4	Indeks Pencapaian SPM Penanganan Bencana	Indeks	0	100	100
6.5	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Korban Bencana Lingkup Kabupaten Administrasi	Persen	0	95	95
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB NON PELAYANANDASAR					
1. TENAGA KERJA					
1.1	Tingkat rata-rata capaian indikator kinerja dalam dokumen perencanaan tenaga kerja	Persen	70	70	70
1.2	Persentase peserta pelatihan kerja yang mendapatkan sertifikat kompetensi	Persen	80	80	80
1.3	Persentase tenaga kerja formal yang ditempatkan	Persen	85	87	91.5
1.4	Persentase Tenaga Kerja Mandiri yang berwira Usaha, berdaya saing dan Berkelanjutan.	Persen	85	90	90
1.5	Persentase perusahaan yang memahami norma ketenagakerjaan.	Persen	80	80	80
1.6	Persentase perusahaan yang menerapkan sarana-sarana hubungan industrial	Persen	65	67.5	71.25
1.7	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	Rupiah	395756547	399714 112	411825849
2. PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK					
2.1	Persentase OPD dan Lembaga Masyarakat yang melaksanakan PUG dan Pemberdayaan Perempuan	Persen	60	70	85

No.	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal	Target Capaian Tahun 2023	Kondisi Kinerja Akhir
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(9)
2.2	Persentase pembinaan kepada perempuan dan anak dalam keluarga untuk meningkatkan kualitas keluarga	Persen	0	15	30
2.3	Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif	Persen	99.5	100	100
2.4	Persentase anak yang terpenuhi hak dasarnya melalui pemenuhan indikator Evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak	Persen	50	50	80
2.5	Persentase anak yang mendapatkan perlindungan khusus melalui lembaga pemerintah dan non pemerintah untuk memenuhi indikator Klaster 5 Kabupaten/Kota Layak Anak	Persen	0	75	81
2.6	Persentase keluarga yang diintervensi permasalahan kesenjangan gender dan anak	Persen	0	100	100
3.	PANGAN				
3.1	Persentase Ketersediaan Pangan	Persen	100	100	100
3.2	Persentase Wilayah Tahan Pangan	Persen	95.45	95.45	97.72
3.3	Persentase Pangan yang Bebas Bahan Berbahaya	Persen	99.95	99.8	99.8
4.	PERTANAHAN				
4.1	Persentase bidang tanah milik masyarakat yang terinventarisasi dan terfasilitasi dalam rangka perencanaan penggunaan tanah untuk mendukung peningkatan sertifikasi di kawasan pemukiman	Persen	0	10	100
5.	LINGKUNGAN HIDUP				
5.1	Persentase jumlah ruang terbuka hijau yang dikelola sesuai dengan Rencana Induk Ruang Terbuka Hijau	Persen	100	100	100
5.2	Peningkatan kapasitas sistem penanganan persampahan	ton/hari	250	2710	7262
5.3	Persentase Dokumen pelaporan pengelolaan lingkungan hidup yang disampaikan ke Pemerintah Pusat dengan tepat waktu	Persen	100	100	100

No.	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal	Target Capaian Tahun 2023	Kondisi Kinerja Akhir
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(9)
5.4	Persentase penyelesaian penanganan pengaduan masyarakat sesuai ketentuan	Persen	100	100	100
5.5	Jumlah partisipan yang berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup tingkat nasional	Lokasi	38	46	58
5.6	Persentase pengawasan kepatuhan kebijakan bidang lingkungan hidup yang dikeluarkan evaluasi/rekomendasi	Persen	29	29	30.5
5.7	Jumlah Limbah B3 Rumah Tangga yang dikelola	Ton	53	61	74
5.8	Persentase rumah tangga yang melakukan pemilahan	Persen	5	7	13
5.9	Persentase parameter yang memenuhi baku mutu	Persen	75	76	77.5
5.10	Persentase Jumlah Ruang Terbuka Hijau yang Dikelola Lingkup Kabupaten Administrasi	Persen	100	100	100
6.	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL				
6.1	Persentase Cakupan Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk	Persen	99	99	99
6.2	Persentase Cakupan Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil	Persen	89	99.5	99.88
6.3	Persentase Pemanfaatan Data Kependudukan	Persen	85.71	89.29	100
6.4	Persentase tersusunnya profil kependudukan	Persen	100	100	100
7.	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA				
7.1	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang aktif dalam pemberdayaan masyarakat	Persen	90	91.79	97.41
8	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA				
8.1	Persentase keluarga yang terdata melalui Carik Jakarta yang berhasil dimutakhirkan	Persen	87	90	100
8.2	Median Usia Kawin Pertama (MUKP)	tahun	21.7	22.1	23.2

No.	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal	Target Capaian Tahun 2023	Kondisi Kinerja Akhir
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(9)
8.3	Persentase Masyarakat (Keluarga) yang memperoleh informasi program Bangga Kencana dengan cara memperoleh/mendengar/ melihat pesan/ informasi Program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga (Bangga Kencana) melalui media dan Petugas.	Persen	53.6	56.1	63.6
8.4	Persentase kebutuhan berKB yang tidak terpenuhi (Unmet Need)	Persen	14.8	14.3	12.8
8.5	Angka prevalensi kontrasepsi modern (modern Contraceptive Prevalence Rate/ mCPR)	Persen	57.66	58.33	60.32
8.6	Age Specific Fertility Rate (kelompok umur 15-19 tahun)	Kelahiran per 1000 WUS 15-19 tahun	21.85	21.35	19.85
9	PERHUBUNGAN				
9.1	Jumlah penumpang angkutan umum yang terlayani per hari	Penumpang per hari	2672575	3497135	4386163
9.2	Indeks fatalitas kecelakaan angkutan umum per tahun	Indeks	4.42	1.61	1.3
9.3	Kecepatan Rata-Rata di ruas jalan yang dikenakan kebijakan pembatasan lalu lintas pada jam sibuk	km/jam	25	26	29
9.4	Jumlah terminal penumpang angkutan perairan (Pelabuhan) yang memenuhi Standar Pelayanan Prima	Pelabuhan	1	5	11
9.5	Persentase badan usaha angkutan perairan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan	Persen	23.8	40	70.47
9.6	Jumlah rekomendasi kebijakan penyelenggaraan perkeretaapian provinsi	Rekomendasi	0	2	8
10	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				
10.1	Persentase Pemenuhan Layanan Informasi dan Komunikasi Publik	Persen	100	100	100

No.	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal	Target Capaian Tahun 2023	Kondisi Kinerja Akhir
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(9)
10.2	Jumlah pemenuhan layanan Teknologi Informatika dan Komunikasi	Perangkat Daerah	51	51	51
11	KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH				
11.1	Persentase Koperasi Aktif yang Patuh terhadap Peraturan Perundang- undangan	Persen	54	57	65
11.2	Persentase SDM Koperasi yang meningkat kapasitasnya	Persen	40	50	70
11.3	Persentase pertumbuhan volume usaha koperasi	Persen	-25	2	2
11.4	Persentase Koperasi konvensional yang bertransformasi digital (modern)	Persen	0.46	0.47	0.5
11.5	Persentase wirausaha baru yang tangguh dan mandiri	Persen	2.19	2.5	4
11.6	Persentase UMKM yang terdigitalisasi	Persen	43.7	70	100
12	PENANAMAN MODAL				
12.1	Persentase promosi proyek-proyek di DKI Jakarta untuk BLUD, BUMD, dan Swasta	Persen	100	100	100
12.2	Persentase jumlah perusahaan yang melaporkan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)	Persen	50	60	90
12.3	Persentase penerbitan izin tepat waktu	Persen	100	100	100
12.4	Indeks Kepuasan Layanan Pengelolaan Sarana Prasarana Teknologi Informasi serta Sistem Data dan Informasi Perizinan dan nonperizinan	Indeks	86	87	90
12.5	Nilai kemudahan investasi	Nilai	0	72.5	80.1
12.6	Persentase penguatan kegiatan promosi penanaman modal DKI Jakarta	Persen	0	100	100
13	KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA				
13.1	Persentase Anggota Kepramukaan yang meningkat kapasitasnya	Persen	1.87	2.02	2.49
13.2	Persentase cabang olahraga yang berprestasi	Persen	93	86	96

No.	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal	Target Capaian Tahun 2023	Kondisi Kinerja Akhir
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(9)
13.3	Persentase Pemuda hasil binaan yang berprestasi dalam bidang yang ditentukan	Persen	47	50	50
13.4	Persentase Pemuda Hasil Binaan yang Berprestasi dalam Bidang yang Ditentukan Lingkup Kabupaten Administrasi	Persen	0	60	75
13.5	Persentase Anggota Kepramukaan yang meningkat kapasitasnya Lingkup Kabupaten Administrasi	Persen	0	4.5	6
13.6	Persentase Cabang Olahraga yang Berprestasi Lingkup Kabupaten Administrasi	Persen	0	75	90
14	STATISTIK				
14.1	Persentase Pemenuhan Data Prioritas	Persen	100	100	100
15	PERSANDIAN				
15.1	Persentase perangkat daerah Provinsi yang telah menggunakan layanan persandian dalam rangka pengamanan informasi milik pemerintah	Persen	98	98	100
16	KEBUDAYAAN				
16.1	Persentase Karya Budaya yang telah ditetapkan sebagai Warisan Budaya Benda dan Tak Benda (WBTB) yang merupakan Intangible Culture Assets menurut UNESCO	Persen	8.3	8.64	9.89
16.2	Persentase Objek diduga Cagar Budaya yang ditetapkan menjadi Cagar Budaya Provinsi DKI Jakarta	Persen	39.94	41.5	46.11
16.3	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengunjungi peninggalan sejarah dan museum lainnya	Persen	5.5	24.55	25
17	PERPUSTAKAAN				
17.1	Tingkat Kemanfaatan Perpustakaan oleh Masyarakat	Persen	24.6	24.8	25.5
17.2	Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan dengan penduduk	Rasio	0.0545	0.0588	0.0714
17.3	Rasio ketercukupan tenaga perpustakaan dengan penduduk	Rasio	0.0001	0.0003	0.0006

No.	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal	Target Capaian Tahun 2023	Kondisi Kinerja Akhir
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(9)
17.4	Persentase Peningkatan Perpustakaan sesuai Standar	Persen	4.9	7.4	14.9
17.5	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca	Nilai	72.31	72.61	73.51
17.6	Persentase Capaian Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam yang Menjadi Koleksi Daerah	Persen	0	25	32.5
17.7	Persentase Capaian Naskah Kuno Milik Daerah Yang Dilestarikan	Persen	0	10	100
17.8	Persentase Peningkatan Kemanfaatan Perpustakaan Lingkup Kabupaten Administrasi	Persen	0	13.5	15
18	KEARSIPAN				
18.1	Persentase Ketersediaan Arsip Siap Layan	Persen	31.92	36.91	45.45
18.2	Persentase lembaga (OPD,BUMD) yang mengelola arsip sesuai dengan NSPK	Persen	50	61.11	100
18.3	Persentase Ketersediaan Arsip Siap Layan Lingkup Kabupaten Administrasi	Persen	0	25	50
	URUSAN PILIHAN				
1	KELAUTAN DAN PERIKANAN				
1.1	Persentase Kawasan Pemanfaatan Ruang Perairan Pesisir yang sesuai dengan Dokumen Perencanaan Ruang Laut	Persen	0	18.46	18.53
1.2	Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan	Persen	69	70	73
1.3	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	Ton	115775	120000	124960
1.4	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	Ton	3746.72	4435	4588
1.5	Jumlah Produksi dan Pemasaran Produk Olahan Hasil Perikanan	Ton	7310	14885.27	16265.54
1.6	Angka Konsumsi Ikan	Kg/Kapita/Tahun	41.9	47	47.3
2	PARIWISATA				
2.1	Jumlah Usaha Pariwisata yang Memiliki Perizinan	Usaha Pariwisata	14345	16345	19345

No.	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal	Target Capaian Tahun 2023	Kondisi Kinerja Akhir
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(9)
2.2	Jumlah Pengunjung Event	Orang	87,693	296050	1365074
2.3	Nilai Kepuasan Pengunjung Objek Wisata	Nilai	0	70	85
2.4	Jumlah Pengunjung E- Tourism	Pengunjung Website dan Medsos	2945967	3122725	13064317
2.5	Nilai Ketertarikan Masyarakat terhadap Pariwisata DKI Jakarta	Nilai	0	70	85
2.6	Jumlah Produk/Jasa Ekonomi Kreatif yang Didaftarkan Kekayaan Intelektualnya	Produk	100	250	850
2.7	Jumlah Tenaga Kerja Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Tersertifikasi	Orang	3888	4688	7088
3	PERTANIAN				
3.1	Persentase Pemenuhan Sarana Pertanian	Persen	45	50	50
3.2	Persentase Prasarana Perternakan dalam Kondisi Baik	Persen	45	50	65
3.3	Persentase Prasarana Pertanian dalam Kondisi Baik	Persen	55.5	65	80
3.4	Persentase Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (Rabies)	Persen	100	100	100
3.5	Persentase Pengendalian Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persen	65	65	75
3.6	Persentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular	Persen	0	5	5
3.7	Persentase Area Lahan yang Terkendali	Persen	85	85	85
3.8	Persentase Peningkatan Produksi dan Pemasaran Produk Pertanian dan Peternakan	Persen	0	2.5	2.5
3.9	Persentase Sumber Daya Manusia Pertanian yang Meningkatkan Kapasitasnya	Persen	80	80	80
4	KEHUTANAN				
4.1	Persentase luas hutan yang dikelola	Persen	100	100	100

No.	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal	Target Capaian Tahun 2023	Kondisi Kinerja Akhir
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(9)
4.2	Persentase penyelesaian laporan masyarakat terkait konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya	Persen	0	90	90
4.3	Persentase peserta dengan tingkat pemahaman baik pada pendidikan, pelatihan dan pemberdayaan bidang kehutanan	Persen	0	80	80
4.4	Jumlah DAS di Provinsi DKI Jakarta yang telah dikelola sesuai standar	Lokasi	0	1	4
5	ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL				
5.1	Jumlah pengurangan emisi sebagai dampak dari pembangunan PLTS	Ton CO2	345.92	357.84	1431.38
5.5	Rasio elektrifikasi di Kepulauan Seribu	Persen	100	100	100
5.3	Persentase Pembangunan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik	Persen	0	10	100
5.4	Persentase pembangkit dan instalasi ketenagalistrikan yang izinnya dikeluarkan oleh Pemprov DKI Jakarta yang memiliki Sertifikat Laik Operasi	Persen	60	60	60
5.5	Persentase pemantauan pemanfaatan air tanah	Persen	100	100	100
6	PERDAGANGAN				
6.1	Persentase pelaku usaha terfasilitasi dalam pemasaran produk dalam negeri yang meningkat omsetnya	Persen	15	20	50
6.2	Persentase Pemanfaatan SKA	Persen	58.38	60	63
6.6	Koefisien variasi harga barang kebutuhan pokok antar waktu	Nilai	14	14	14
6.4	Nilai ekspor non migas DKI Jakarta	USD	112037200 00	114277 94400	117740679 98
6.5	Persentase keluhan/temuan konsumen yang ditindaklanjuti	Persen	100	100	100
6.6	Persentase produk hasil uji yang sesuai syarat mutu SNI atau syarat teknis lainnya	Persen	76	80	83

No.	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal	Target Capaian Tahun 2023	Kondisi Kinerja Akhir
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(9)
6.7	Persentase Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	Persen	100	100	100
6.8	Persentase verifikasi permohonan Perizinan Berusaha Sektor Perdagangan melalui Online Single Submission Risk Based Approached (OSS-RBA)	Persen	0	70	85
7	PERINDUSTRIAN				
7.1	Persentase Peningkatan Omzet Industri Kecil dan Menengah	Persen	2	3.5	5
7.2	Persentase pelaku usaha IKM yang meningkat kapasitasnya	Persen	0	50	65
7.3	Persentase Industri Tertib Perizinan	Persen	50	55	70
	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				
1	PERENCANAAN				
1.1	Nilai Komponen Perencanaan Pembangunan Daerah Lingkup Perangkat Daerah	Nilai	0	75	90
1.2	Nilai Komponen Perencanaan Pembangunan Lingkup Provinsi pada Indeks Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	Nilai	0	75	90
1.3	Nilai Komponen Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan pada Indeks Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	Nilai	0	75	90
1.4	Nilai Komponen Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Lingkup Perangkat Daerah	Nilai	0	75	90
2	KEUANGAN				
2.1	Persentase realisasi penerimaan Pajak Daerah	Persen	92.83	100	100
2.2	Persentase realisasi penerimaan Retribusi Daerah	Persen	50.56	100	100
2.3	Persentase pemanfaatan BMD	Persen	0	10	25
2.4	Indeks Kepatuhan Tertib Aset	Indeks	0	4	4

No.	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal	Target Capaian Tahun 2023	Kondisi Kinerja Akhir
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(9)
2.5	Persentase Akurasi dan Penyelesaian Dokumen APBD	Persen	100	100	100
2.6	Persentase pengelolaan pelaksanaan APBD	Persen	100	100	100
2.7	Persentase Laporan Keuangan sesuai SAP dan tepat waktu	Persen	100	100	100
2.8	Persentase Penyelesaian Penyusunan Standar Harga tepat waktu	Persen	100	100	100
2.9	Persentase aset daerah yang teridentifikasi dan tercatat dalam e-aset	Persen	100	100	100
3.	KEPEGAWAIAN				
3.1	Nilai Aspek Perencanaan Kebutuhan, Pengadaan, Sistem Informasi serta Perlindungan dan Pelayanan pada Indeks Sistem Merit	Nilai	110	110	110
3.2	Nilai Aspek Promosi dan Mutasi pada Indeks Sistem Merit	Nilai	17.5	25	25
3.3	Nilai Aspek Pengembangan Karir pada Indeks Sistem Merit	Nilai	42.03	50.03	69.53
3.4	Nilai Aspek Manajemen Kinerja serta Penggajian, Penghargaan dan Disiplin pada Indeks Sistem Merit	Nilai	110	110	110
3.5	Indeks Kepuasan Terhadap Layanan KORPRI Kabupaten Administrasi	Indeks	0	3	4
3.6	Persentase Pegawai Tugas Belajar yang lulus tepat waktu	Persen	80	80	95
4.	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN				
4.1	Nilai Sistem Merit pada Sub Aspek Pelaksanaan Pelatihan Dasar (Latsar) bagi CPNS	Nilai	6	6	6
4.2	Nilai Sistem Merit pada Sub Aspek Ketersediaan strategi dan program untuk mengatasi kesenjangan kompetensi dan kinerja dalam rangka peningkatan kapasitas ASN	Nilai	10	10	10

No.	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal	Target Capaian Tahun 2023	Kondisi Kinerja Akhir
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(9)
4.3	Nilai Sistem Merit pada Sub Aspek Penyelenggaraan Diklat untuk mengatasi kesenjangan	Nilai	7.5	7.5	7.5
4.4	Nilai Sistem Merit pada Sub Aspek Pelaksanaan peningkatan kompetensi melalui praktik kerja dan pertukaran pegawai	Nilai	7.5	7.5	7.5
4.5	Persentase Diklat yang dilaksanakan BPSDM sesuai dengan ketentuan	Persen	0	60	66
5.	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN				
5.1	Persentase Pembangunan dan Pengembangan Sistem Inovasi Daerah (SIDa)	Persen	0	40	100
	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN				
1.	SEKRETARIAT DAERAH				
1.1	Persentase Kerjasama Luar Negeri yang Terimplementasi	Persen	0	50	60
1.2	Persentase Kerjasama Dalam Negeri yang Terimplementasi	Persen	0	50	60
1.3	Indeks Kepuasan Layanan Administrasi dan Keuangan Perjalanan Dinas	Indeks	0	4	4
1.4	Persentase Kebijakan sesuai dengan peraturan	Persen	100	100	100
1.5	Persentase pelaksanaan kebijakan sesuai dengan peraturan	Persen	100	100	100
1.6	Persentase pengadaan Barang/Jasa tepat waktu	Persen	80	82.5	90
1.7	Persentase Upaya Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup	Persen	80	80	80
1.8	Rata-rata nilai ROE	Nilai	3.6	7	10
1.9	Persentase Upaya Pengendalian Pemenuhan Kewajiban Surat Izin Penunjukan Penggunaan Tanah (SIPPT)	Persen	30	30	45
1.10	Pertumbuhan Laba Bersih	Persen	0	12	15

No.	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal	Target Capaian Tahun 2023	Kondisi Kinerja Akhir
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(9)
1.11	Pertumbuhan Pendapatan Usaha	Persen	0	10	13
1.12	Nilai PMPRB pada Lingkup Area Perubahan Penataan dan Penguatan Organisasi	Nilai	7.03	7.16	7.28
1.13	Persentase Produk Hukum Daerah yang Diundangkan	Persen	100	100	70
1.14	Persentase Penanganan Perkara Litigasi yang diselesaikan	Persen	100	100	100
1.15	Persentase Penanganan Perkara Non Litigasi yang diselesaikan	Persen	100	100	100
1.16	Indeks efektivitas fasilitasi, koordinasi, sinkronisasi, evaluasi dan capaian kinerja kebijakan bidang kesejahteraan rakyat di bawah Koordinasi Biro Kesejahteraan Sosial	Indeks	4	4	4
1.17	Persentase Proyek Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha yang berjalan sesuai dengan tahapan yang diatur dalam ketentuan	Persen	100	100	100
1.18	Indeks efektivitas fasilitasi, koordinasi, sinkronisasi, evaluasi dan capaian kinerja kebijakan bidang kesejahteraan rakyat di bawah koordinasi Biro Pendidikan dan Mental Spiritual	Indeks	4	4	4
1.19	Nilai PMPRB pada Lingkup Area Perubahan Penataan Tata Laksana dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Nilai	11.83	12.11	12.14
1.20	Nilai PMPRB pada Lingkup Area Perubahan Manajemen Perubahan	Nilai	4.82	4.83	4.9
1.21	Persentase Penyelesaian Masalah Pelaksanaan Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Persen	90	91	94
1.22	Nilai Capaian Pelaksanaan Aksi HAM Daerah	Nilai	98	91	94
2.	SEKRETARIAT DPRD				
2.1	Indeks Kepuasan Layanan Sekretariat DPRD	Indeks	4	4	4
	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN				

No.	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal	Target Capaian Tahun 2023	Kondisi Kinerja Akhir
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(9)
1.	INSPEKTORAT DAERAH				
1.1	Tingkat Kapabilitas APiP	Nilai	2	3.25	4
1.2	Persentase Penyelesaian TL LHP Internal dan Eksternal	Persen	85	91	95
1.	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM				
1.	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				
1.1	Persentase Tingkat Pemahaman Masyarakat terkait Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persen	50	50.5	52
1.2	Persentase Tingkat Pemahaman Organisasi Kemasyarakatan terkait Peran Organisasi Kemasyarakatan Dalam Pembangunan	Persen	50	50.5	52
1.3	Persentase Tingkat Pemahaman Masyarakat terkait Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Persen	50	50.5	52
1.4	Persentase Tingkat Pemahaman Masyarakat terkait Kewaspadaan Dini, Penanganan Konflik, dan Pemantauan Orang Asing	Persen	50	50.5	52
1.5	Persentase Tingkat Pemahaman Masyarakat terkait Pendidikan Politik, Etika dan Budaya Politik Serta Peningkatan Peran Partai Politik	Persen	50	50.5	52
1.6	Persentase Tingkat Pemahaman Masyarakat terkait Kewaspadaan Dini, Penanganan Konflik, dan Pemantauan Orang Asing Lingkup Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu	Persen	50	50.5	52
1.7	Persentase Tingkat Pemahaman Masyarakat terkait Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan Lingkup Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu	Persen	50	50.5	52
1.8	Persentase Tingkat Pemahaman Masyarakat terkait Pendidikan Politik, Etika dan Budaya Politik Serta Peningkatan Peran Partai Politik Lingkup Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu	Persen	50	50.5	52
	UNSUR KEWILAYAHAN				

No.	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal	Target Capaian Tahun 2023	Kondisi Kinerja Akhir
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(9)
1.	KOTA ADMINISTRASI				
1.1	Nilai Efektifitas Koordinasi Penyelesaian Permasalahan Pengelolaan Kabupaten Administrasi	Nilai	0	85	88.5
1.2	Nilai Efektivitas Koordinasi Bidang Pemerintahan	Nilai	0	85	88.5
1.3	Nilai Efektifitas Koordinasi Bidang Pemerintahan	Nilai	0	85	88.5
1.4	Nilai Efektifitas Koordinasi Bidang Perekonomian dan Pembangunan	Nilai	0	85	88.5
1.5	Nilai Efektifitas Koordinasi Bidang Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat	Nilai	0	85	88.5
1.6	Nilai Efektifitas Koordinasi Bidang Perekonomian dan Pembangunan	Nilai	0	85	88.5
1.7	Nilai Efektifitas Koordinasi Bidang Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat	Nilai	0	85	88.5
1.8	Nilai Efektifitas Koordinasi Bidang Pemerintahan	Nilai	0	85	88.5
1.9	Nilai Efektifitas Koordinasi Bidang Perekonomian dan Pembangunan	Nilai	0	85	88.5
1.10	Nilai Efektifitas Koordinasi Bidang Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat	Nilai	0	85	88.5
1.11	Nilai Efektifitas Koordinasi Bidang Pemerintahan	Nilai	0	85	88.5
1.12	Nilai Efektifitas Koordinasi Bidang Perekonomian dan Pembangunan	Nilai	0	85	88.5
1.13	Nilai Efektifitas Koordinasi Bidang Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat	Nilai	0	85	88.5
1.14	Nilai Efektifitas Koordinasi Bidang Pemerintahan	Nilai	0	85	88.5
1.15	Nilai Efektifitas Koordinasi Bidang Perekonomian dan Pembangunan	Nilai	0	85	88.5
1.16	Nilai Efektifitas Koordinasi Bidang Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat	Nilai	0	85	88.5
2.	KABUPATEN ADMINISTRASI				

No.	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal	Target Capaian Tahun 2023	Kondisi Kinerja Akhir
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(9)
2.1	Nilai Efektifitas Koordinasi Bidang Pemerintahan dan Kesra	Nilai	0	85	88.5
2.2	Nilai Efektifitas Koordinasi Bidang Administrasi, Ekonomi dan Pembangunan	Nilai	0	85	88.5
3.	KECAMATAN ADMINISTRASI				
3.1	Indeks Kepuasan Terhadap Pengelolaan Kelurahan (penyelenggaraan RT, RW, LMK dan FKDM)	Indeks	4	4	4
3.2	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PKK, Posyandu, Jumantik, dan Ruang Interaksi Warga	Indeks	4	4	4
3.3	Indeks Kepuasan Terhadap Pengelolaan Kelurahan (penyelenggaraan RT, RW, LMK dan FKDM)	Indeks	4	4	4
3.4	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PPSU	Indeks	4	4	4
3.5	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PKK, Posyandu dan Jumantik	Indeks	4	4	4
3.6	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PKK, Posyandu, Jumantik dan RPTRA	Indeks	4	4	4
3.7	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PPSU	Indeks	4	4	4
3.8	Indeks Kepuasan Terhadap Pengelolaan Kelurahan (penyelenggaraan RT, RW, LMK dan FKDM)	Indeks	4	4	4
3.9	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PPSU	Indeks	4	4	4
3.10	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PKK, Posyandu, Jumantik, dan Ruang Interaksi Warga	Indeks	4	4	4
3.11	Indeks Kepuasan Terhadap Pengelolaan Kelurahan (penyelenggaraan RT, RW, LMK dan FKDM)	Indeks	4	4	4
3.12	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PPSU	Indeks	4	4	4

No.	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal	Target Capaian Tahun 2023	Kondisi Kinerja Akhir
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(9)
3.13	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PKK, Posyandu, Jumantik, dan Ruang Interaksi Warga	Indeks	4	4	4
3.14	Indeks Kepuasan Terhadap Pengelolaan Kelurahan (penyelenggaraan RT, RW, LMK dan FKDM)	Indeks	4	4	4
3.15	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PKK, Posyandu, Jumantik, dan Ruang Interaksi Warga	Indeks	4	4	4
3.16	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Ketertiban Umum	Indeks	4	4	4
3.17	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Ketertiban Umum	Indeks	4	4	4
3.18	Indeks Kepuasan Terhadap Pengelolaan Kelurahan (penyelenggaraan RT, RW, LMK dan FKDM)	Indeks	4	4	4
3.19	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PPSU	Indeks	4	4	4
3.20	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Ketertiban Umum	Indeks	4	4	4
3.21	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Ketertiban Umum	Indeks	4	4	4
3.22	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Ketertiban Umum	Indeks	4	4	4
3.23	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PPSU	Indeks	4	4	4
3.24	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Ketertiban Umum	Indeks	4	4	4

Sumber: Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2026



Penutup

RKPD Provinsi DKI Jakarta tahun 2023, merupakan masa transisi dari berakhirnya periode RPJMD tahun 2017-2022. Oleh karena itu, RKPD tahun 2023 memiliki peran penting penting dan strategis dalam penjabaran target-target pembangunan yang tertuang dalam dokumen RPD dan menjadi pedoman dan arahan bersama bagi seluruh pemangku kepentingan dalam pembangunan Jakarta di tahun 2023 secara sinergis, terpadu dan searah dengan pembangunan nasional.

Rencana pembangunan Jakarta tahun 2023 tersebut diarahkan untuk mendukung upaya pencapaian tema pembangunan yang dimuat dalam RKPD 2023 yaitu **Pemulihan dan Transformasi Menuju Ekonomi Digital dalam Rangka Pemantapan Kota Global yang Berdaya Saing**. Diharapkan program/kegiatan pada seluruh Perangkat Daerah diarahkan guna mendukung pencapaian tema pembangunan dimaksud.

Dengan tema pembangunan tersebut, pembangunan DKI Jakarta pada tahun 2023 diarahkan pada upaya menjadi:

1. Kota yang tahan pandemi (pandemic proof city);
2. Kota yang tangguh menghadapi krisis (crisis resilient city);
3. Kota yang mengimplementasikan digitalisasi (digitally advanced city);
4. Kota yang berkelanjutan dan layak huni (sustainable livable city).

Tahun 2023, Jakarta diharapkan dapat tumbuh pada kisaran 5,3 - 5,7 persen, tingkat pengangguran ditargetkan sebesar 8,06 - 6,96 persen, gini ratio diprediksikan sebesar 0,409 dengan target tingkat kemiskinan ditargetkan sebesar 3,5 - 3,0 persen, serta indeks risiko bencana ditargetkan sebesar 63,3.

Sebagai upaya untuk mencapai sasaran utama tersebut, fokus pembangunan pada tahun 2023 diarahkan pada:

1. Pengurangan ketimpangan melalui pemenuhan kebutuhan dasar dan jaminan perlindungan sosial.
2. Peningkatan Kualitas, Aksesibilitas dan Kemudahan Layanan Masyarakat.
3. Penurunan Kesenjangan Melalui Pembangunan Responsif Gender.
4. Pemerataan Kesempatan Pendidikan Untuk Semua dan Edukasi Terkait Pembelajaran Sepanjang Hayat.
5. Peningkatan Kualitas dan Harapan Hidup Melalui Perbaikan Kesehatan Perkotaan.
6. Pertumbuhan Ekonomi dan Sektor Usaha Berbasis Pengalaman dan Nilai Tambah.
7. Akselerasi Transformasi Digital dan Pengembangan Manajemen Kota Cerdas.
8. Peningkatan Kesempatan, Pemberdayaan, dan Adaptabilitas Tenaga Kerja.
9. Pemulihan Ekosistem Kota dan Implementasi Pembangunan Rendah Karbon.
10. Pembangunan Infrastruktur dan Layanan Dasar Perkotaan yang Berkualitas

Berbekal pembelajaran penanganan pandemi Covid-19, kolaborasi dan pemanfaatan teknologi digital merupakan kunci keberhasilan Jakarta untuk dapat keluar dari krisis. Perencanaan dan pembangunan kota Jakarta dalam segala aspek perlu dilaksanakan dalam paradigma baru yaitu inklusifitas, kohesi sosial, pemberdayaan dan keberadilan (yaitu membesarkan yang kecil tanpa mengecilkan yang besar), serta kolaborasi dalam pembangunan, di mana pemerintah berperan sebagai kolaborator dan warga sebagai co-creator.

Dengan adanya dukungan dari seluruh pemangku kepentingan melalui kolaborasi, diharapkan keberhasilan dari implementasi pelaksanaan RKPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023 dapat terwujud.

GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

ANIES RASYID BASWEDAN